SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu dilakukan reformasi kebijakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha guna mendukung cipta kerja;

b. bahwa penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu disempurnakan untuk semakin memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan;

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat: . . .

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
3. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah . . .

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
9. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah Administrator KEK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

15. Surat . . .

15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
23. Penanaman Modal adalah Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

24. Penanaman . . .

24. Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
27. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang lokasi usahanya berada di laut.
29. Persetujuan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PL adalah Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
31. Bangunan Gedung adalah Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
32. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
33. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
34. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

35. Analisis . . .

35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
36. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah Analisis Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
37. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
38. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
39. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
40. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan PBBR.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. persyaratan dasar;

b. PB;

c. PB UMKU;

d. norma, standar, prosedur, dan kriteria;

e. layanan Sistem OSS;

f. Pengawasan;

g. evaluasi . . .

g. evaluasi dan reformasi kebijakan;

h. pendanaan;

i. penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan

j. sanksi.

Pasal 3

Penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui:

a. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan

b. Pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB.

(2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) Apabila PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

(4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

(5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi sektor:

a. kelautan dan perikanan;

b. pertanian;

c. kehutanan . . .

c. kehutanan;

d. energi dan sumber daya mineral;

e. ketenaganukliran;

f. perindustrian;

g. perdagangan dan metrologi legal;

h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

i. transportasi;

j. kesehatan, obat, dan makanan;

k. pendidikan dan kebudayaan;

l. pariwisata;

m. keagamaan;

n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan

o. pertahanan dan keamanan.

(2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU meliputi pula sektor:

a. ekonomi kreatif;

b. informasi geospasial;

c. ketenagakerjaan;

d. perkoperasian;

e. penanaman modal;

f. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan

g. lingkungan hidup.

(3) PBBR pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan:

a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor;

b. nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor;

c. metode analisis Risiko; dan

d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.

(4) Kode . . .

(4) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat Risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter, dan kewenangan bagi PB setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(5) Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(6) Metode analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(7) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan mekanisme penerbitannya diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga.

(8) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa serta mekanisme penerbitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

(9) Peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(10) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.

(11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:

a. pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;

b. pemanfaatan sumber daya alam;

c. perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau

d. perdagangan . . .

d. perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya,

yang masa berlakunya diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden.

(12) Peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 6

(1) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU pada masing-masing sektor dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

a. memulai usaha; dan

b. menjalankan usaha.

Pasal 8

(1) Tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a. subtahapan pemenuhan legalitas usaha;

b. subtahapan pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR, dan PL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL; dan

c. subtahapan perolehan PB atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha.

(2) Subtahapan . . .

(2) Subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi yang berbentuk badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang badan usaha.

(3) Subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. KKPR berupa KKPR di darat atau KKPRL untuk lokasi usaha yang berada di laut; dan

b. PL berupa SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL-UPL.

(4) Setelah melakukan subtahapan pemenuhan legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan subtahapan pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan perolehan atau pengajuan PB berdasarkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 9

(1) Setelah memenuhi tahapan memulai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pelaku Usaha memenuhi tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

(2) Tahapan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. subtahapan persiapan; dan

b. subtahapan operasional dan/atau komersial.

Pasal 10

(1) Subtahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:

a. pengadaan tanah;

b. pemenuhan persyaratan dasar berupa PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung;

c. pembangunan Bangunan Gedung;

d. pengadaan peralatan atau sarana;

e. pengadaan sumber daya manusia;

f. pemenuhan . . .

f. pemenuhan standar usaha; dan/atau

g. pemenuhan persyaratan PB.

(2) Subtahapan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:

a. produksi barang dan/atau jasa;

b. logistik dan distribusi barang dan/atau jasa;

c. pemasaran barang dan/atau jasa; dan/atau

d. kegiatan lain dalam rangka operasional dan/atau komersial.

Pasal 11

(1) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a termasuk pembersihan atau pembukaan lahan.

(2) Kegiatan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pemenuhan PL bagi usaha dan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dan PBG bagi Pelaku Usaha yang akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung.

(3) Jika akan melakukan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib memiliki persyaratan dasar dalam bentuk PL dan PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk kegiatan usaha yang mempunyai tingkat Risiko rendah atau menengah rendah, setelah memperoleh PB, Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

(5) Untuk kegiatan usaha yang mempunyai tingkat Risiko menengah tinggi atau tinggi, setelah diterbitkan PB, Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

(6) Jika untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dipersyaratkan PB UMKU, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.

BAB . . .

BAB II

PERSYARATAN DASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a. KKPR;

b. PL; dan

c. PBG dan SLF.

(2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.

(3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. Lembaga OSS;

b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan

d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d untuk penerbitan persyaratan dasar:

a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus; atau

b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(5) Penerbitan . . .

(5) Penerbitan persyaratan dasar untuk proyek strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang proyek strategis nasional, penyelenggaraan penataan ruang, kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Bangunan Gedung, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 13

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG, dan/atau SLF, Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

Pasal 14

Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha terdiri atas:

a. darat; dan/atau

b. laut.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Lokasi Usaha di Darat

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui KKPR.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. konfirmasi KKPR; atau

b. persetujuan KKPR.

Pasal 16

KKPR untuk kegiatan usaha yang bersifat strategis nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

Pasal . . .

Pasal 17

(1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.

(2) Persetujuan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis oleh kepala Lembaga OSS melalui Sistem OSS.

(3) Penolakan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis.

Pasal 18

(1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal RDTR belum tersedia.

(2) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;

c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

d. penerbitan persetujuan KKPR.

Pasal 19

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang terdiri atas:

a. koordinat lokasi;

b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;

c. informasi penguasaan tanah;

d. informasi jenis kegiatan;

e. rencana jumlah lantai bangunan;

f. rencana luas lantai bangunan; dan

g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

(2) Setelah . . .

(2) Setelah dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP kedua.

(5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui, surat perintah setor PNBP kedua menjadi tidak berlaku dan permohonan persetujuan KKPR dianggap ditarik kembali.

(7) Dalam hal permohonan persetujuan KKPR dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak pembayaran PNBP terpenuhi.

(3) Jika . . .

(3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.

Pasal 21

(1) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a. RTR wilayah kabupaten/kota;

b. RTR wilayah provinsi;

c. RTR kawasan strategis nasional;

d. RTR pulau/kepulauan; dan/atau

e. RTR wilayah nasional.

(2) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertimbangan teknis pertanahan.

(3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar.

Pasal 22

(1) Jika hasil penilaian serta dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), persetujuan KKPR diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(2) Jika hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), permohonan persetujuan KKPR ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(3) Apabila . . .

(3) Apabila pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak tercakup dalam hasil penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), persetujuan KKPR diterbitkan tanpa pertimbangan teknis pertanahan.

Pasal 23

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

(3) Berdasarkan penyampaian perbaikan dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemeriksaan ulang atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 3 (tiga) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan kedua dokumen usulan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem OSS.

(6) Berdasarkan penyampaian perbaikan kedua dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pemeriksaan ulang kedua atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen usulan diterima.

(7) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5) atau berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan dinyatakan tidak benar, permohonan persetujuan KKPR ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(8) Berdasarkan . . .

(8) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 24

Ketentuan mengenai:

a. penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

b. penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian dokumen dan penerbitan persetujuan KKPR hasil perbaikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 25

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang seluruh lokasi usahanya berada di dalam delineasi RDTR yang belum terintegrasi dengan sistem OSS, penerbitan persetujuan KKPR dilakukan melalui kajian berdasarkan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Penilaian dokumen untuk persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan RDTR.

(3) Penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui pertimbangan teknis pertanahan.

(4) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;

c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

d. penerbitan persetujuan KKPR.

(5) Ketentuan mengenai:

a. pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan

b. pemeriksaan . . .

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari.

(7) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang telah sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan KKPR diterbitkan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(8) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 26

Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (3) atau ayat (6) serta Pasal 25 ayat (5) huruf b, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 24 huruf a serta Pasal 25 ayat (6), dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 27

(1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat diterbitkan tanpa dilakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang untuk kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lokasi . . .

a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri;

b. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di kawasan yang dikelola oleh otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut;

c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;

d. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;

e. lokasi usaha dan/atau kegiatan terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;

f. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi, dengan luasan yang lebih kecil dari luasan eksisting, letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha eksisting, dan pada pola ruang yang sama; dan/atau

g. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan sesuai dengan RTR.

(3) Persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan

c. penerbitan persetujuan KKPR.

(4) Sistem . . .

(4) Sistem OSS mengalirkan permohonan persetujuan KKPR untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 28

(1) Ketentuan pendaftaran persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a.

(2) Selain dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diperlukan juga kelengkapan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang lainnya untuk kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

(1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

(2) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.

(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dinyatakan tidak benar, permohonan persetujuan KKPR dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Lembaga OSS.

Pasal . . .

Pasal 30

(1) Apabila lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing, pengelola kawasan menyampaikan rencana induk kawasan kepada kepala Lembaga OSS.

(2) Kepala Lembaga OSS memasukkan rencana induk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sistem OSS sebagai dasar penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 31

Penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan oleh kepala Lembaga OSS melalui Sistem OSS.

Pasal 32

Jika Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan Risiko usaha rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem OSS berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.

Pasal 33

(1) Dalam hal pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 telah diterbitkan, Sistem OSS mengalirkan data pernyataan mandiri kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan lokasi penerbitan KKPR.

(2) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana termuat dalam pernyataan mandiri dengan RTR dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian antara usaha dan/atau kegiatan dengan RTR, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan, gubernur, bupati, atau wali kota:

a. menyampaikan . . .

a. menyampaikan surat keterangan ketidaksesuaian RTR melalui Sistem OSS; dan
b. melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah Seratus Kilometer Persegi

Pasal 34

(1) Apabila telah tersedia RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan konfirmasi KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

(2) Apabila RTR selain RDTR telah tersedia dan telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

(3) RTR yang telah memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis pemanfaatan ruang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) oleh Penanaman Modal Asing dalam bentuk perseroan terbatas.

Pasal 35

(1) Apabila:
a. belum tersedia RDTR;
b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi); atau

d. tidak . . .

d. tidak termasuk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,

penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian secara administrasi dan teknis paling lama 14 (empat belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterima secara lengkap.

(3) Apabila berdasarkan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan maka permohonan rekomendasi dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(4) Apabila permohonan rekomendasi dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(5) Apabila berdasarkan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha memenuhi persyaratan maka rekomendasi diterbitkan.

(6) Apabila rekomendasi diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menerbitkan:

a. surat perintah setor PNBP secara otomatis untuk pembayaran pelayanan penerbitan rekomendasi; dan

b. surat perintah setor PNBP secara otomatis untuk pembayaran pelayanan permohonan persetujuan KKPR,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(7) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP.

(8) Apabila . . .

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, surat perintah setor PNBP menjadi tidak berlaku serta:

a. rekomendasi dinyatakan tidak berlaku; dan

b. permohonan persetujuan KKPR dinyatakan ditarik kembali.

(9) Pemeriksaan dan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka penerbitan KKPR dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP.

(10) Ketentuan pemeriksaan dan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang serta penerbitan persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

Pasal 36

(1) Apabila rekomendasi tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), proses persetujuan KKPR dilanjutkan tanpa rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi).

(2) Ketentuan mengenai persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas 0 (nol) sampai dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) oleh Penanaman Modal Asing dalam bentuk perseroan terbatas.

Bagian Keempat
Persetujuan Kawasan Hutan
Paragraf 1
Umum

Pasal 37

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang berlokasi di kawasan hutan, pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di kawasan hutan dilakukan melalui:

a. persetujuan penggunaan kawasan hutan;

b. persetujuan komitmen pemanfaatan hutan;

c. persetujuan . . .

c. persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan

d. persetujuan pelepasan kawasan hutan.

(2) Kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan di wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Paragraf 2

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 38

(1) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan usaha yang:

a. dilaksanakan dalam rangka kegiatan usaha di luar sektor kehutanan; dan

b. berada di dalam kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung.

(2) Persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan; dan

c. penelaahan dan penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 39

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan melengkapi persyaratan:

a. administrasi; dan

b. teknis.

Pasal . . .

Pasal 40

(1) Jika persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

(2) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan disampaikan kembali kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan melalui Sistem OSS.

(3) Pelaku Usaha melakukan perbaikan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Apabila berdasarkan hasil penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan masih perlu diperbaiki, dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(6) Pelaku Usaha melakukan perbaikan kembali dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan penelaahan ulang kesesuaian dokumen dan persyaratan paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya perbaikan kembali persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Dalam . . .

(8) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau penelaahan ulang dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (7), dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan dilanjutkan ke tahapan penelaahan dan penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c.

(9) Dalam hal berdasarkan penelaahan kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan, permohonan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS dan diberitahukan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 41

(1) Penelaahan dan penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan paling lama 47 (empat puluh tujuh) Hari sejak dokumen permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dokumen dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(2) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi penolakan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan disertai alasan penolakan ke Sistem OSS.

(3) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan notifikasi berupa keputusan persetujuan penggunaan kawasan hutan dan peta lampiran ke Sistem OSS.

Pasal . . .

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan penggunaan kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan

Pasal 43

(1) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

(2) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diberikan pada areal kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum digunakan oleh Pelaku Usaha lain mengacu pada peta arahan pemanfaatan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. verifikasi administrasi;

c. telaahan teknis; dan

d. penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

Pasal 44

(1) Pendaftaran permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:

a. pernyataan komitmen; dan

b. persyaratan teknis.

(2) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembuatan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon;

b. penyusunan . . .

b. penyusunan dokumen lingkungan; dan
c. pelunasan iuran PB pemanfaatan hutan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. surat permohonan;
b. peta permohonan dan disertai dengan berkas digital dalam format *shape file* (shp);
c. proposal teknis;
d. pakta integritas; dan
e. pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dan peta pertimbangan teknis dari gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(4) Dalam hal pertimbangan teknis atau rekomendasi teknis dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterima permohonan, Lembaga OSS memproses permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan, pernyataan komitmen, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 45

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan melalui Sistem OSS.

(2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 46

(1) Apabila permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(2) Apabila permohonan dinyatakan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.

(3) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf d.

Pasal 47

(1) Apabila berdasarkan telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dokumen permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan masih perlu diperbaiki, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan disampaikan kembali kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan melalui Sistem OSS.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan disampaikan kembali kepada Pelaku Usaha.

(3) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

(4) Penolakan . . .

(4) Penolakan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diberitahukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan atau dokumen dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 48

Penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, verifikasi administrasi, dan penerbitan persetujuan komitmen pemanfaatan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

Pasal 50

(1) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. verifikasi; dan

c. penerbitan . . .

c. penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 51

(1) Pendaftaran permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan yang meliputi:

a. rencana kegiatan usaha;

b. pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;

c. peta usulan areal usaha; dan

d. pakta integritas.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan Pelaku Usaha dilengkapi dengan:

a. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi sumber daya air, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan air;

b. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi ketenagalistrikan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pemanfaatan jasa lingkungan energi air;

c. pertimbangan teknis dari kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang membidangi kepariwisataan, dalam hal PB yang dimohonkan merupakan PB pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan PB pengusahaan taman buru; dan/atau

d. surat keterangan keahlian/pernah mengikuti pelatihan pemandu wisata alam bagi pemohon PB penyediaan jasa wisata alam pemandu wisata alam.

(3) Untuk . . .

(3) Untuk PB penyediaan jasa wisata alam, dokumen persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak menjadi persyaratan.

Pasal 52

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi terhadap permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b paling lama 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru di Sistem OSS.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hasil berupa:

a. penolakan;

b. perbaikan; dan

c. persetujuan.

(3) Kriteria verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan

b. pemenuhan ketentuan teknis.

(4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam hal:

a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau

b. permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal:

a. permohonan . . .

a. permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan

b. permohonan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(6) Dalam hal:

a. permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan

b. permohonan memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,

permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk diperbaiki.

Pasal 53

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 permohonan dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

(2) Penyampaian notifikasi penolakan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 2 (dua) Hari sejak permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan ditolak melalui Sistem OSS.

Pasal 54

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 permohonan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan disetujui dan dilanjutkan dengan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c.

(2) Penerbitan . . .

(2) Penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 2 (dua) Hari sejak permohonan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru dinyatakan disetujui melalui Sistem OSS.

Pasal 55

(1) Apabila diminta melakukan perbaikan, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan dikembalikan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6).

(2) Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali perbaikan.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi paling lama 8 (delapan) Hari sejak penyampaian dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Ketentuan mengenai verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, verifikasi, dan penerbitan persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf . . .

Paragraf 5

Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan

Pasal 57

(1) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d diberikan untuk kegiatan usaha yang:

a. dilaksanakan dalam rangka kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan

b. berada di dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis;

c. pembentukan tim terpadu;

d. pertimbangan laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu; dan

e. penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Pasal 58

(1) Dalam hal permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan berupa proyek strategis nasional di kawasan hutan, Pelaku Usaha mengajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melalui Sistem OSS.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan kehutanan dan proyek strategis nasional.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyampaikan penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal . . .

Pasal 59

Pendaftaran persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan dokumen:

a. pernyataan komitmen; dan

b. persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 60

(1) Jika dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 telah lengkap, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan melakukan verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b.

(2) Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan identifikasi dan pemilahan data kelengkapan persyaratan permohonan dan melakukan penelaahan teknis.

(3) Verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 39 (tiga puluh sembilan) Hari.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan tidak memenuhi persyaratan, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dinyatakan ditolak.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi pernyataan komitmen dan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan memenuhi persyaratan, dilanjutkan ke tahapan pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c.

Pasal . . .

Pasal 61

(1) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5).

(2) Tim terpadu melaksanakan penelitian dan menyampaikan laporan hasil penelitian dan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Pasal 62

(1) Laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) sebagai bahan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk menerbitkan keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian dan rekomendasi tim terpadu.

(2) Keputusan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. penolakan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan; dan/atau
   b. persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya.

(3) Dalam hal keputusan berupa penolakan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(4) Dalam hal keputusan berupa persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan dilanjutkan ke tahapan penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e.

Pasal . . .

Pasal 63

Penerbitan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4).

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan pelepasan kawasan hutan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Lokasi Usaha di Laut

Pasal 65

(1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui KKPRL.

(2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan KKPRL.

Pasal 66

(1) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut;

c. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan

d. penerbitan persetujuan KKPRL.

(2) Persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilakukan untuk kegiatan secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup:

a. permukaan laut;

b. kolom air; dan/atau

c. permukaan . . .

c. permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Kegiatan secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:

a. dilakukan secara terus menerus; dan

b. dilakukan selama paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 67

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a diajukan melalui Sistem OSS yang dilengkapi dengan:

a. koordinat lokasi;

b. rencana kegiatan, bangunan, dan/atau instalasi di laut;

c. kebutuhan luas kegiatan pemanfaatan ruang di laut;

d. informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan

e. kedalaman lokasi.

(2) Setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b.

Pasal 68

(1) Pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak dokumen diterima lengkap.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan benar, permohonan pemanfaatan ruang laut dilakukan ke tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan tidak benar, permohonan pemanfaatan ruang laut dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 69

(1) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kajian atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

a. RTR wilayah provinsi;

b. RTR kawasan strategis nasional;

c. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu;

d. rencana zonasi kawasan antarwilayah; dan/atau

e. RTR wilayah nasional.

(2) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari.

(3) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak paling lama 2 (dua) Hari sejak disetujuinya dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.

(4) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak disetujui, Sistem OSS menyampaikan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal . . .

Pasal 70

(1) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut dinyatakan terdapat catatan perbaikan, Sistem OSS mengembalikan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penilaian kembali atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dinyatakan terdapat catatan perbaikan dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Jika berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat catatan perbaikan atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penilaian kembali atas dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dinyatakan terdapat catatan perbaikan dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Permohonan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:

a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (5); atau

b. berdasarkan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan tidak disetujui.

(8) Apabila . . .

(8) Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui, Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak paling lama 2 (dua) Hari sejak dokumen kegiatan pemanfaatan ruang laut disetujui.

Pasal 71

(1) Pembayaran PNBP dilakukan oleh Pelaku Usaha paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) atau Pasal 70 ayat (8).

(2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP kedua.

(3) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(4) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tidak berlaku; dan

b. Sistem OSS menerbitkan surat perintah setor PNBP ketiga.

(5) Pelaku Usaha melakukan pembayaran PNBP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan surat perintah setor PNBP ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui:

a. surat perintah setor PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tidak berlaku; dan

b. permohonan persetujuan KKPRL dianggap ditarik kembali oleh Pelaku Usaha.

Pasal . . .

Pasal 72

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan:

a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; dan

b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

Penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d dilakukan melalui Sistem OSS paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran PNBP.

Pasal 74

(1) Apabila dalam tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 memerlukan rekomendasi atau pertimbangan kementerian/lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan permohonan rekomendasi atau pertimbangan kepada kementerian/lembaga terkait.

(2) Rekomendasi atau pertimbangan disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya penyampaian permintaan rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila rekomendasi atau pertimbangan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tahapan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dilakukan tanpa rekomendasi atau pertimbangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk rekomendasi di sektor pertahanan.

Pasal 75

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terlampaui, persetujuan KKPRL diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Pasal . . .

Pasal 76

(1) Apabila kegiatan usaha berada di kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pengelola kawasan menyampaikan rencana induk kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

(2) Berdasarkan rencana induk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mencatat data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagai dasar penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan.

(3) Data lokasi dan peruntukan ruang di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Bagian Keenam

Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Suaka Alam dan/atau Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 77

(1) Apabila terdapat kegiatan usaha yang memanfaatkan ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan persetujuan KKPRL didahului rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

(2) Rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), permohonan penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan peta usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.

(4) Pemberian . . .

(4) Pemberian rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan verifikasi persyaratan permohonan berdasarkan kesesuaian kaidah konservasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam paling lama 15 (lima belas) Hari sejak dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam tidak diterbitkan, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut.

(6) Apabila berdasarkan verifikasi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menolak permohonan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan menyampaikan permohonan persetujuan KKPRL dinyatakan ditolak kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

(7) Apabila berdasarkan verifikasi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menyetujui permohonan rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, permohonan dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 melalui Sistem OSS.

(8) Ketentuan mengenai:

a. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;

b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70; dan

c. penerbitan persetujuan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75,

berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan persetujuan KKPRL di kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh

Persetujuan Lingkungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

(1) PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

(2) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:

a. Amdal;

b. UKL-UPL; atau

c. SPPL,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;

b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau

c. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL.

(4) Permohonan PL diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Penerbitan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(6) Bagi . . .

(6) Bagi kegiatan usaha dengan lebih dari 1 (satu) KBLI yang merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan PL mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi.

Pasal 79

PL dilakukan melalui tahapan:

a. penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
b. permohonan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
c. permohonan PL atau perubahan PL oleh Pelaku Usaha;
d. penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
e. pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
f. penerbitan PL.

Paragraf 2

Persetujuan Teknis

Pasal 80

(1) Persetujuan teknis harus dipenuhi Pelaku Usaha sebagai persyaratan administrasi untuk permohonan PL dengan dokumen lingkungan Amdal atau UKL-UPL.

(2) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemenuhan baku mutu air limbah;
b. pemenuhan baku mutu emisi;
c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 81

(1) Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c secara mandiri melalui sistem informasi lingkungan hidup.

(2) Pelaku . . .

(2) Pelaku Usaha melakukan penapisan jenis persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d secara mandiri melalui sistem informasi lalu lintas.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha tidak berdampak pada air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas, Pelaku Usaha tidak memerlukan persetujuan teknis.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdampak pada air, tanah, udara, dan/atau bangkitan dan tarikan lalu lintas, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan persetujuan teknis kepada instansi yang berwenang.

(5) Dalam hal tidak diperlukan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan PL melalui Sistem OSS.

(6) Permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dalam bentuk penyusunan:
   a. standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
   b. kajian teknis.

Pasal 82

Dalam hal persetujuan teknis telah memiliki standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf a, penerbitan persetujuan teknis dilakukan otomatis melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas sesuai dengan kewenangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 83

(1) Penerbitan persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) huruf b:
   a. untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari; dan
   b. untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dilakukan paling lama 16 (enam belas) Hari,

   sejak dinyatakan lengkap dan benar.

(2) Penerbitan . . .

(2) Penerbitan persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d:

a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi dan sedang, dilakukan paling lama 23 (dua puluh tiga) Hari; dan

b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari,

sejak dinyatakan lengkap dan benar.

(3) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah dan pemenuhan baku mutu emisi belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:

a. pejabat yang membidangi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; atau

b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,

melalui sistem informasi lingkungan hidup.

(4) Dalam hal persetujuan teknis dalam bentuk kajian teknis untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari:

a. pejabat yang membidangi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup; atau

b. pejabat . . .

b. pejabat yang membidangi lingkungan hidup untuk penerbitan persetujuan teknis yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/wali kota,

melalui sistem informasi lingkungan hidup.

(5) Dalam hal persetujuan teknis untuk persetujuan analisis mengenai dampak lalu lintas belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat langsung mengajukan permohonan PL dengan melampirkan bukti permohonan persetujuan teknis Pelaku Usaha yang telah dinyatakan lengkap dan benar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui sistem informasi lalu lintas.

(6) Persetujuan teknis yang belum dapat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sudah harus diterima pada saat pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup dimulai.

(7) Dalam hal persetujuan teknis tidak diterbitkan pada saat dimulainya pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup, pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup tetap dapat dilakukan tanpa persetujuan teknis.

Pasal 84

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL, apabila:

a. telah terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha yang menunjukkan masih mampu mendukung pelaksanaan usaha; dan

b. pengelolaan air limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkan dari kegiatan sendiri.

(2) Dalam hal rencana usaha merupakan proyek strategis nasional, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan persetujuan teknis di bidang lingkungan hidup dan/atau di bidang lalu lintas bersamaan dengan pengajuan PL.

(3) Permohonan . . .

(3) Permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui sistem informasi lingkungan hidup dan/atau sistem informasi lalu lintas.

(4) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyampaikan kepada Pelaku Usaha mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak permohonan diterima.

Pasal 85

(1) Dalam hal permohonan penerbitan persetujuan teknis bersamaan dengan permohonan PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 disetujui, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PL disertai dengan dokumen persetujuan teknis melalui Sistem OSS, untuk dilakukan penilaian atau pemeriksaan.

(2) Penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penilaian atau pemeriksaan substansi dokumen lingkungan hidup.

Paragraf 3

Persetujuan Lingkungan dengan Dokumen Amdal

Pasal 86

(1) Permohonan PL untuk usaha wajib Amdal yang diajukan oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:

a. pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha;

b. pemeriksaan formulir kerangka acuan;

c. penyusunan . . .

c. penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha; dan

d. penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha wajib Amdal yang telah memiliki PL akan melakukan perubahan usaha, Pelaku Usaha harus melakukan perubahan PL.

(3) Pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(5) Permohonan PL melalui penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan:

a. dokumen Andal;

b. dokumen RKL-RPL; dan

c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas.

(6) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian terhadap permohonan PL dengan dokumen Amdal.

(7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan:

a. penilaian administrasi; dan

b. penilaian substansi.

Pasal . . .

Pasal 87

(1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf a dilakukan untuk menilai kebenaran dokumen yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTR;

b. persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas;

d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;

e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan

f. kesesuaian sistematika Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(2) Penilaian kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf b.

Pasal 88

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penilaian . . .

(3) Penilaian kebenaran terhadap perbaikan dokumen dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf b.

(5) Permohonan PL dinyatakan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:

a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. berdasarkan hasil penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak benar.

Pasal 89

(1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) huruf b dilakukan untuk penilaian secara keseluruhan dan komprehensif terhadap aspek konsistensi, keharusan, relevansi, dan kedalaman substansi, meliputi:

a. uji tahap proyek; dan

b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung, ahli, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(3) Hasil penilaian substansi oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:

a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau

b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.

(4) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal . . .

Pasal 90

(1) Apabila dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui Sistem OSS mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Terhadap penyampaian dokumen yang telah diperbaiki oleh Pelaku Usaha, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen perbaikan masih dinyatakan tidak benar, dokumen dikembalikan kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan dan diberitahukan melalui Sistem OSS.

(5) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pengembalian dokumen masih dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak dokumen perbaikan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Apabila berdasarkan hasil evaluasi atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (6) dinyatakan benar, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal . . .

Pasal 91

(1) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) atau Pasal 90 ayat (5), Sistem OSS menyampaikan pemberitahuan penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Pelaku Usaha.

(2) Penghentian proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dapat diajukan permohonan kelanjutan penilaian oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyampaian pemberitahuan penghentian proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan permohonan kelanjutan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilanjutkan kembali.

(4) Tata cara dan jangka waktu penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian lanjutan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.

(5) Apabila Pelaku Usaha tidak mengajukan permohonan kelanjutan penilaian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 92

(1) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (7), atau Pasal 91 ayat (4), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Rekomendasi . . .

(2) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menetapkan:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan layak lingkungan hidup; atau

b. Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana usaha dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Pasal 93

(1) Jangka waktu:

a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2);

b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) atau Pasal 90 ayat (7); dan

c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),

dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dan benar dalam penilaian administrasi.

(2) Jangka waktu:

a. penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

b. uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4); dan

c. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),

dilakukan paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak permohonan kelanjutan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL diterima melalui Sistem OSS.

(3) Jangka . . .

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan ayat (5) pada tahapan penilaian substansi.

(4) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Pasal 94

Ketentuan mengenai tata cara penilaian Andal dan/atau RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 berlaku secara mutatis mutandis untuk penilaian *addendum* Andal dan/atau RKL-RPL.

Paragraf 4

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 95

(1) Permohonan PL dengan formulir UKL-UPL diajukan oleh Pelaku Usaha dengan melampirkan persetujuan teknis apabila dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan/atau lalu lintas.

(2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah disediakan dalam sistem informasi lingkungan hidup; atau

b. formulir UKL-UPL standar yang disusun Pelaku Usaha dengan mengacu pada format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal permohonan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap melalui Sistem OSS, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan terhadap PL dengan formulir UKL-UPL.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

a. pemeriksaan administrasi; dan

b. pemeriksaan substansi.

Pasal 96

(1) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf a dilakukan untuk memeriksa kebenaran dokumen yang meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTR;

b. persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan;

c. persetujuan teknis dalam hal dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau lalu lintas; dan

d. kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.

(2) Pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari sejak permohonan PL diterima Sistem OSS.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b.

Pasal 97

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku . . .

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen yang dinyatakan tidak benar paling lama 1 (satu) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan Perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen.

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan benar, permohonan PL dilakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b.

(5) Apabila Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dokumen dinyatakan tidak benar, permohonan PL ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS.

Pasal 98

(1) Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) huruf b atas formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.

(2) Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.

(3) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan benar.

(4) Pemeriksaan . . .

(4) Pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan benar.

(5) Apabila penerbitan persetujuan teknis dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan substansi atas dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sejak pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dinyatakan benar.

Pasal 99

(1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup secara otomatis melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan benar.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menyampaikan arahan perbaikan kepada Pelaku Usaha.

(4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan . . .

(5) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.

(6) Apabila:

a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,

permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 100

(1) Berdasarkan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan substansi atas formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi dan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi tidak terdapat perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan benar.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi memerlukan perbaikan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menyampaikan arahan perbaikan kepada Pelaku Usaha.

(4) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS menerbitkan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak perbaikan dokumen diterima.

(6) Apabila:

a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah melebihi batas waktu; atau

b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,

permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ditolak disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Paragraf 5

Persetujuan Lingkungan dengan Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pasal 101

(1) Permohonan PL dengan formulir SPPL diajukan oleh Pelaku Usaha kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS.

(2) Penerbitan . . .

(2) Penerbitan PL dengan formulir SPPL dilakukan melalui pernyataan mandiri oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS yang diterbitkan secara otomatis bersamaan dengan NIB.

Paragraf 6

Persetujuan Lingkungan Kawasan

Pasal 102

(1) Pelaku Usaha yang berada dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan PL kawasan, wajib menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan dokumen lingkungan hidup kawasan.
(2) RKL-RPL rinci yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengelola kawasan untuk diperiksa dan disahkan oleh pengelola kawasan.
(3) RKL-RPL rinci yang telah disahkan oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dan menjadi persyaratan atas dasar PB Pelaku Usaha di dalam kawasan.

Pasal 103

Pelaku Usaha dalam kawasan industri, KEK, atau KPBPB yang:
a. tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air; atau
b. melakukan pembuangan air limbah melalui instalasi pengolahan air limbah yang disediakan pengelola kawasan,

tidak memerlukan persetujuan teknis.

Paragraf 7

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis

Pasal 104

Menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup dapat mendelegasikan kewenangan pemberian PL dan persetujuan teknis kepada gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Pasal . . .

Pasal 105

Ketentuan mengenai PL yang tidak diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 104 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan

Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan Bangunan Gedung sebagai fasilitas tempat usaha.

Pasal 107

(1) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.

(2) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 108

(1) PBG harus dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

(2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) PBG . . .

(3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses melalui:

a. konsultasi perencanaan; dan

b. penerbitan.

Pasal 109

(1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a meliputi proses:

a. pendaftaran;

b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan

c. pernyataan pemenuhan standar teknis.

(2) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 110

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan menyampaikan:

a. data pemohon atau pemilik;

b. data Bangunan Gedung; dan

c. dokumen rencana teknis

(2) Data pemohon atau pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan data Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

(3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun pada saat perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

(4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung atau pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a.

Pasal . . .

Pasal 111

(1) Setelah dinyatakan lengkap oleh Sistem OSS, data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dilakukan pemeriksaan kebenaran data dan dokumen.

(2) Pemeriksaan kebenaran data dan dokumen dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan dokumen yang dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak data dan dokumen dinyatakan lengkap.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b.

Pasal 112

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dokumen dinyatakan tidak benar, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen paling lama 5 (lima) Hari sejak pengembalian dokumen dinyatakan tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemeriksaan atas perbaikan dokumen dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan benar, permohonan dilanjutkan ke proses pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b.

(5) Permohonan ditolak disertai dengan alasan penolakan melalui Sistem OSS, apabila:

a. Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atas perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perbaikan dokumen dinyatakan tidak benar.

Pasal . . .

Pasal 113

(1) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 26 (dua puluh enam) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (4).

(2) Pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak dokumen dinyatakan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (4).

(3) Hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis.

Pasal 114

(1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dokumen rencana teknis dinyatakan perlu dilakukan perbaikan, Sistem OSS mengembalikan dokumen kepada Pelaku Usaha disertai dengan catatan perbaikan.

(2) Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang terakhir harus dilengkapi dengan kesimpulan.

(3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
   a. rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis; atau
   b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.

Pasal 115

Berita acara pada pemeriksaan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 114 ayat (2) diunggah ke dalam Sistem OSS.

Pasal 116

(1) Berdasarkan rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a, Sistem OSS menerbitkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi penerbitan surat pernyataan pemenuhan standar teknis diterima.

(2) Surat . . .

(2) Surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi yang digunakan untuk memperoleh PBG.

Pasal 117

(1) Berdasarkan rekomendasi pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b:

a. surat pernyataan pemenuhan standar teknis tidak diterbitkan; dan

b. Sistem OSS menyampaikan berita acara yang memuat kesimpulan yang berisi rekomendasi pendaftaran ulang PBG kepada Pelaku Usaha,

paling lama 1 (satu) Hari sejak rekomendasi pendaftaran ulang PBG diterima.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat secara lengkap catatan perbaikan.

(3) Apabila Pelaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis.

(4) Apabila Pelaku Usaha melakukan pendaftaran ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.

Pasal 118

Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf b meliputi:

a. penetapan nilai retribusi daerah;

b. pembayaran retribusi daerah; dan

c. penerbitan PBG.

Pasal 119

(1) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a dilakukan oleh dinas teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan . . .

(2) Penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) Hari sejak diterimanya surat pernyataan pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).

(3) Dalam hal nilai retribusi tidak dapat ditetapkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan nilai retribusi dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS.

Pasal 120

(1) Pelaku Usaha melakukan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh masing-masing daerah sejak penetapan nilai retribusi daerah.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, penyampaian nilai retribusi daerah menjadi tidak berlaku dan permohonan PBG dinyatakan batal.

(3) Dalam menetapkan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memperhatikan kemampuan Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 121

(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf c dilakukan setelah Pelaku Usaha menyampaikan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) melalui Sistem OSS.

(2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. dokumen PBG; dan

b. lampiran dokumen PBG.

Paragraf . . .

Paragraf 3

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 122

(1) SLF harus diperoleh oleh Pelaku Usaha sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

(2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat terpenuhinya kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

(3) Pemenuhan SLF Bangunan Gedung yang sudah ada dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh:

a. pengkaji teknis; atau

b. tim penilai teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung.

(4) Atas pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau dinas teknis yang membidangi Bangunan Gedung di Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menerbitkan SLF melalui Sistem OSS.

(5) Untuk jasa yang diberikan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum membuat standar biaya jasa yang dikenakan bagi Pelaku Usaha.

Pasal 123

(1) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tidak perlu memperoleh PBG dan dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

(2) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan mengenai PBG dan SLF yang belum diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 122 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

BAB III
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 124

(1) PB dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

(2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari analisis Risiko.

(3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.

(4) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis PB.

Pasal 125

(1) Analisis Risiko dilakukan dengan melibatkan:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

c. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;

d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan

e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

(2) Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antarkementerian/lembaga.

(3) Keterlibatan . . .

(3) Keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:

a. memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;

b. memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat Risiko; dan

c. meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen Risiko.

Pasal 126

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui tahapan:

a. pengidentifikasian kegiatan usaha;

b. pengidentifikasian skala usaha;

c. penilaian tingkat bahaya; dan

d. penilaian potensi terjadinya bahaya.

(2) Hasil dari analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan tingkat Risiko.

Pasal 127

(1) Pengidentifikasian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a mengacu kepada pengaturan ruang lingkup kegiatan usaha pada KBLI.

(2) Pengidentifikasian skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

(3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek:

a. kesehatan;

b. keselamatan;

c. lingkungan; dan/atau

d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

(4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

(5) Penilaian . . .

(5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
a. jenis kegiatan usaha;
b. kriteria kegiatan usaha;
c. lokasi kegiatan usaha;
d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
e. Risiko volatilitas.

(6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. hampir tidak mungkin terjadi;
b. kemungkinan kecil terjadi;
c. kemungkinan terjadi; atau
d. hampir pasti terjadi.

Pasal 128

(1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) sampai dengan ayat (5), tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, ditetapkan menjadi:
a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

(2) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi atas:
a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
b. tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 129

Mekanisme pelaksanaan analisis Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 130

PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal . . .

Pasal 131

(1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

(3) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan melalui Sistem OSS.

(4) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

(5) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

(6) Pemenuhan atas standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperiksa pada saat Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 132

(1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b berupa:

a. NIB; dan

b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat . . .

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

(3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.

(4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

(5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

(6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah terverifikasi merupakan PB bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

(7) Dalam hal Pelaku Usaha:

a. tidak memenuhi standar sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan

b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit,

Lembaga OSS melakukan pencabutan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 133

(1) PB untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c berupa:

a. NIB; dan

b. Izin.

(2) Izin . . .

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui Sistem OSS.

(3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan PB bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 134

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

BAB IV

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

Pasal 135

(1) Dalam hal pada tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha diperlukan PB UMKU, kementerian/lembaga mengidentifikasi PB UMKU dengan tetap mempertimbangkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

(2) PB . . .

(2) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas.

(3) Pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Indonesia *National Single Window* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan neraca komoditas.

(4) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan PB UMKU kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui Sistem OSS.

(5) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan permohonan PB UMKU kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk dilakukan pemrosesan permohonan PB UMKU.

(6) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perizinan berusaha yang diperlukan dalam rangka:

a. peredaran produk;

b. kelayakan operasi;

c. standardisasi produk/jasa; dan/atau

d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 136

(1) Dalam melakukan pemrosesan permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila permohonan PB UMKU yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyampaikan persetujuan PB UMKU kepada Sistem OSS.

(3) Sistem OSS menerbitkan PB UMKU kepada Pelaku Usaha.

(4) Apabila permohonan PB UMKU yang diajukan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS disertai dengan penjelasan.

BAB V
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 137

(1) Pemerintah Pusat menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada setiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan penyelenggaraan PBBR oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

(3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan internal norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(4) Kepala . . .

(4) Kepala daerah dalam menyusun peraturan pelaksanaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak memperluas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 138

(1) Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pelaksanaan penerbitan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Lembaga OSS;

b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan

d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota,

sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pelaksanaan penerbitan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;

b. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;

c. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota; dan

d. menteri/kepala lembaga melalui Sistem OSS sepanjang ditentukan dalam ketentuan internasional,

sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, kewenangan penerbitan PB dilakukan oleh Lembaga OSS atau Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga untuk penerbitan PB dalam hal kegiatan usaha terdapat:

a. Penanaman Modal Asing; dan/atau

b. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain.

(5) Dikecualikan . . .

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kewenangan penerbitan PB di wilayah KPBPB dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB untuk penerbitan PB dalam hal kegiatan usaha terdapat:

a. Penanaman Modal Asing; dan/atau

b. Penanaman Modal yang menggunakan modal asing berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c:

a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK, kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU dilakukan oleh Administrator KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus; atau

b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KPBPB, kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 139

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam:

a. melakukan pemeriksaan PB dan/atau PB UMKU harus sesuai dengan jangka waktu; dan

b. memberikan PB dan/atau PB UMKU harus sesuai dengan masa berlaku.

(2) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan PB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pelaku Usaha harus memenuhi ketentuan PB UMKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Sektor

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 140

(1) PB sektor kelautan dan perikanan meliputi kegiatan usaha:

a. pengelolaan ruang laut;

b. perikanan tangkap;

c. pembudidayaan ikan;

d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan

e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

(2) PB UMKU sektor kelautan dan perikanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pengelolaan ruang laut;

b. perikanan tangkap;

c. pembudidayaan ikan;

d. pengolahan hasil kelautan dan perikanan; dan

e. pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 141

(1) PB sektor pertanian meliputi kegiatan usaha:

a. perkebunan;

b. tanaman pangan;

c. hortikultura; dan

d. peternakan . . .

d. peternakan dan kesehatan hewan.

(2) PB UMKU sektor pertanian meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. perkebunan;

b. tanaman pangan;

c. hortikultura;

d. peternakan dan kesehatan hewan; dan

e. sarana pertanian.

(3) Perizinan terkait veteriner diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3

Sektor Kehutanan

Pasal 142

PB sektor kehutanan meliputi kegiatan usaha:

a. pemanfaatan hutan;

b. pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru;

c. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar; dan

d. perbenihan tanaman hutan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 143

(1) PB sektor energi dan sumber daya mineral meliputi subsektor:

a. minyak dan gas bumi;

b. ketenagalistrikan;

c. mineral dan batubara; dan

d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

(2) PB . . .

(2) PB UMKU sektor energi dan sumber daya mineral meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas subsektor:

a. minyak dan gas bumi;

b. ketenagalistrikan;

c. mineral dan batubara;

d. energi baru, terbarukan, dan konservasi energi; dan

e. geologi.

(3) Kewajiban pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dikecualikan untuk PB dalam tahap survei dan tahap eksplorasi subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta tahap kegiatan eksplorasi pada subsektor mineral dan batubara.

Pasal 144

(1) Penerapan PB pada kegiatan usaha hulu pada subsektor minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama berlaku ketentuan:

a. kontrak kerja sama diperlakukan sebagai Izin dalam kegiatan usaha hulu; dan

b. badan usaha atau bentuk usaha tetap yang menandatangani kontrak kerja sama wajib memiliki NIB.

(2) Penerapan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus keberlakuan seluruh ketentuan dalam kontrak kerja sama.

Pasal 145

(1) Kegiatan usaha hilir pada subsektor minyak dan gas bumi meliputi:

a. kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, *liquified petroleum gas*, dan/atau *liquified natural gas* tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

b. kegiatan . . .

b. kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

c. kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial; dan

d. kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

(2) Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan yang menggunakan alat transportasi darat, air, dan/atau udara dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada sektor transportasi.

Pasal 146

PB UMKU pada subsektor geologi berupa pengusahaan air tanah diterbitkan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada kondisi air tanah yang tercantum dalam zona konservasi air tanah dan/atau data hidrogeologi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

(1) Pelaku Usaha yang telah melakukan kegiatan:

a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah; dan/atau

b. penggunaan air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah,

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif

berupa . . .

berupa denda administratif dan wajib mengajukan permohonan PB UMKU Izin pengusahaan air tanah, paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(2) Penggunaan air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:

a. penggunaan air tanah yang pernah memiliki Izin pengusahaan air tanah, namun telah habis masa berlakunya; atau

b. penggunaan air tanah yang belum pernah memiliki Izin pengusahaan air tanah.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan formula penghitungan denda administratif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(4) Permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS sesuai Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 148

(1) PB sektor ketenaganukliran meliputi kegiatan usaha:

a. pemanfaatan sumber radiasi pengion;

b. instalasi nuklir dan bahan nuklir;

c. pertambangan bahan galian nuklir; dan

d. pendukung sektor ketenaganukliran.

(2) PB UMKU sektor ketenaganukliran meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pemanfaatan sumber radiasi pengion;

b. instalasi nuklir dan bahan nuklir; dan

c. pertambangan bahan galian nuklir.

(3) PB . . .

(3) PB dan PB UMKU untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf a tertentu diterbitkan sesuai tahapan kegiatan yang meliputi:
   a. konstruksi;
   b. operasi;
   c. dekomisioning; dan/atau
   d. pernyataan pembebasan.

Paragraf 6

Sektor Perindustrian

Pasal 149

(1) PB sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha:
   a. penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, termasuk jasa industri; dan
   b. kawasan industri.

(2) PB UMKU sektor perindustrian meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
   a. rekomendasi;
   b. pertimbangan teknis;
   c. surat persetujuan;
   d. surat penetapan;
   e. tanda pendaftaran;
   f. tanda daftar;
   g. tanda sah; dan/atau
   h. surat keterangan dalam kegiatan penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha industri tertentu.

Pasal 150

PB untuk kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a berlaku juga sebagai PB untuk tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

a. tempat . . .

a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Pelaku Usaha di sektor perindustrian bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha industri; dan
b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Pasal 151

(1) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a wajib berlokasi di kawasan industri.
(2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlokasi di luar kawasan industri apabila:
    a. berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri tetapi seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis;
    b. berlokasi di zona industri dalam KEK;
    c. termasuk klasifikasi industri kecil;
    d. termasuk klasifikasi industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
    e. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
(3) Kegiatan usaha industri yang:
    a. berlokasi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
    b. termasuk klasifikasi industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

    wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTR.
(4) Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal . . .

Pasal 152

(1) Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pelaku Usaha perseorangan dan Pelaku Usaha nonperseorangan di sektor perindustrian yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 153

(1) Dalam 1 (satu) PB hanya berlaku bagi 1 (satu) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang:

a. memiliki usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi industri;

b. memiliki beberapa usaha industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) kawasan industri; atau

c. memiliki beberapa usaha industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) kawasan industri.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian memiliki usaha industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki PB baru.

Pasal 154

(1) PB untuk kegiatan usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diberikan hanya kepada Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas, yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTR.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh PB untuk kegiatan usaha kawasan industri merupakan perusahaan kawasan industri.

(3) PB . . .

(3) PB kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan KKPR kegiatan usaha kawasan industri.

Pasal 155

(1) Setiap perusahaan kawasan industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki persyaratan dasar dan PB.

(2) Sebelum mengajukan permohonan persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan kawasan industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan kawasan industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan Andal, perencanaan, dan pembangunan infrastruktur kawasan industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan.

(3) Perluasan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam satu hamparan dan berlokasi di kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTR.

Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 156

(1) PB sektor perdagangan dan metrologi legal meliputi kegiatan usaha:

a. perdagangan dalam negeri;

b. pengembangan ekspor nasional; dan

c. perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

(2) PB UMKU sektor perdagangan dan metrologi legal meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. perdagangan dalam negeri; dan

b. perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 157

PB perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) huruf c berlaku ketentuan:

a. permohonan . . .

a. permohonan dan penerbitan NIB kegiatan usaha dilakukan melalui Sistem OSS;

b. Sistem OSS mengalirkan permohonan PB kepada badan pengawas perdagangan berjangka komoditi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan; dan

c. penerbitan PB perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 158

(1) PB sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi kegiatan:

a. jasa konstruksi;

b. sumber daya air;

c. bina marga;

d. cipta karya; dan

e. pengembangan perumahan.

(2) PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. sumber daya air; dan

b. bina marga.

Pasal 159

(1) Setiap Pelaku Usaha yang telah melakukan kegiatan:

a. penggunaan sumber daya air tanpa PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air;

b. pelaksanaan konstruksi sumber daya air dan pelaksanaan nonkonstruksi tanpa PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air; dan/atau

c. pelaksanaan . . .

c. pelaksanaan konstruksi sumber air yang berupa kegiatan pengalihan alur sungai tanpa PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air,

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan wajib mengajukan permohonan PB-UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan formula penghitungan denda administratif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(3) Permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dengan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 9

Sektor Transportasi

Pasal 160

(1) PB sektor transportasi meliputi kegiatan usaha:
   a. transportasi darat;
   b. transportasi laut;
   c. transportasi udara; dan
   d. transportasi perkeretaapian.

(2) PB UMKU sektor transportasi meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:
   a. transportasi darat;
   b. transportasi laut;

c. transportasi . . .

c. transportasi udara; dan

d. transportasi perkeretaapian.

Pasal 161

(1) Kegiatan usaha sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi serta penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi.

(2) Kegiatan usaha sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan huruf d terdiri atas penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi.

(3) Kegiatan usaha sektor transportasi yang merupakan penyelenggaraan penunjang sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa terkait sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan secara langsung oleh UMK-M atau bekerja sama dengan badan usaha.

Paragraf 10

Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 162

PB dan PB UMKU sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas subsektor:

a. kesehatan;

b. obat dan makanan; dan

c. pangan segar.

Pasal 163

(1) PB subsektor kesehatan meliputi kegiatan usaha:

a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan

c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

(2) PB . . .

(2) PB UMKU subsektor kesehatan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan;

b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan

c. kesehatan lingkungan.

Pasal 164

(1) PB UMKU subsektor obat dan makanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. obat dan bahan obat;

b. obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik; dan

c. pangan olahan.

(2) PB UMKU subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi usaha tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 165

PB UMKU subsektor pangan segar meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. sarana penanganan pangan segar;

b. peredaran pangan segar; dan

c. jaminan keamanan pangan segar produk ekspor.

Paragraf . . .

Paragraf 11

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 166

PB dan PB UMKU sektor pendidikan dan kebudayaan terdiri atas subsektor:

a. pendidikan; dan
b. kebudayaan.

Pasal 167

(1) Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan dapat dilakukan melalui PBBR sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) PBBR untuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

(3) Pelaksanaan perizinan pada subsektor pendidikan untuk lembaga pendidikan formal di KEK wajib dilakukan melalui PBBR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria PBBR untuk satuan lembaga pendidikan formal di KEK diatur dalam:

    a. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah; atau
    b. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi,

    sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 168

PB subsektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a meliputi pula PB atas kegiatan usaha penerbitan buku.

Pasal . . .

Pasal 169

(1) PB subsektor kebudayaan meliputi kegiatan usaha perfilman.

(2) PB UMKU subsektor kebudayaan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pemberitahuan pembuatan film;

b. rekomendasi impor film; dan

c. tanda lulus sensor.

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 170

PB sektor pariwisata meliputi kegiatan usaha:

a. daya tarik wisata;

b. kawasan pariwisata;

c. jasa transportasi wisata;

d. jasa perjalanan wisata;

e. jasa makanan dan minuman;

f. penyediaan akomodasi;

g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

i. jasa informasi wisata;

j. jasa konsultan pariwisata;

k. jasa pramuwisata;

l. wisata tirta; dan

m. spa.

Paragraf . . .

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 171

PB sektor keagamaan meliputi kegiatan usaha:

a. penyelenggaraan ibadah haji khusus; dan

b. penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 172

PB sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran terdiri atas subsektor:

a. pos;

b. telekomunikasi; dan

c. penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 173

PB UMKU sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. penomoran telekomunikasi;

b. hak labuh sistem komunikasi kabel laut transmisi telekomunikasi internasional;

c. hak labuh satelit;

d. izin pita frekuensi radio;

e. izin stasiun radio bagi seluruh sektor usaha; dan

f. sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi bagi seluruh sektor usaha.

Paragraf . . .

Paragraf 15

Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 174

PB dan PB UMKU pada sektor pertahanan dan keamanan terdiri atas subsektor:

a. industri pertahanan; dan
b. keamanan.

Pasal 175

PB subsektor industri pertahanan berupa kegiatan usaha aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan.

Pasal 176

PB UMKU subsektor industri pertahanan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. penetapan sebagai industri pertahanan;
b. produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan;
c. kelaikan alat peralatan pertahanan dan keamanan;
d. pemasaran alat peralatan pertahanan dan keamanan;
e. penjualan, ekspor, dan transfer alat peralatan pertahanan dan keamanan;
f. pembelian dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan; dan/atau
g. industri bahan peledak.

Pasal 177

(1) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berkaitan dengan industri pertahanan yang menjalankan kegiatan usaha:
    a. industri alat utama;
    b. industri komponen utama dan/atau penunjang;
    c. industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan
    d. industri bahan baku,

    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan.

(2) Industri . . .

(2) Industri alat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. industri senjata dan amunisi;

b. industri pesawat terbang;

c. industri kendaraan perang;

d. industri kapal perang; dan

e. industri radar pertahanan.

Pasal 178

Dalam rangka pendirian badan usaha di bidang industri bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf g dan badan usaha di bidang industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) huruf a diperlukan:

a. rekomendasi penanaman modal asing berupa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, dalam hal terdapat kepentingan strategis untuk pendirian badan hukum dengan modal asing melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) yang bergerak di bidang industri alat utama;

b. rekomendasi pendirian pabrik senjata dan amunisi berupa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau pejabat yang ditunjuk untuk:
   1. pendirian badan hukum dengan kepemilikan modal asing maksimal 49% (empat puluh sembilan persen);
   2. pendirian badan hukum dengan kepemilikan dalam negeri; atau
   3. perubahan kepemilikan saham dalam badan hukum dengan kepemilikan dalam negeri,

   yang bergerak di bidang industri alat utama; dan/atau

c. rekomendasi pendirian pabrik bahan baku bahan peledak, bahan peledak, atau bahan peledak aksesoris berupa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pendirian badan hukum di bidang industri bahan peledak.

Pasal . . .

Pasal 179

Ketentuan mengenai pemberian perizinan dan/atau rekomendasi kegiatan ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan dan bahan baku bahan peledak serta bahan peledak aksesoris diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Pasal 180

PB subsektor keamanan meliputi kegiatan usaha:

a. jasa konsultansi keamanan;
b. jasa penerapan peralatan keamanan;
c. jasa pelatihan keamanan;
d. jasa kawal angkut uang dan barang berharga;
e. jasa penyediaan tenaga pengamanan; dan
f. jasa penyediaan satwa keamanan (K9).

Paragraf 16

Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 181

PB sektor ekonomi kreatif meliputi kegiatan usaha ekonomi kreatif.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 182

PB sektor informasi geospasial meliputi kegiatan usaha:

a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi geospasial;
b. pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan pengindraan jauh, atau hidrografi; dan
c. pengolahan dan pengelolaan data dan informasi geospasial.

Paragraf . . .

Paragraf 18

Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 183

(1) PB sektor ketenagakerjaan meliputi kegiatan usaha:

a. pelatihan kerja;

b. alih daya;

c. penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;

d. penempatan pekerja rumah tangga;

e. penempatan tenaga kerja daring (*job portal*);

f. penyeleksian dan penempatan pekerja migran Indonesia;

g. jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, dan instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja;

h. jasa sertifikasi dengan lingkup kegiatan usaha lembaga audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;

i. jasa pengujian laboratorium dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;

j. jasa inspeksi periodik dengan lingkup kegiatan usaha pemeriksaan dan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja;

k. jasa pembinaan dan konsultasi keselamatan dan kesehatan kerja; dan

l. sertifikasi profesi pihak ketiga.

(2) PB UMKU sektor ketenagakerjaan meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pemeriksaan/pengujian kesehatan tenaga kerja dan/atau pelayanan kesehatan kerja;

b. sertifikat layak keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c. penyelenggaraan pemagangan di luar negeri.

Paragraf . . .

Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 184

PB sektor perkoperasian meliputi kegiatan usaha:

a. simpan pinjam:
   1. dari dan kepada anggota koperasi; dan/atau
   2. dari dan kepada koperasi lain, dan
b. aktivitas pemeringkatan koperasi.

Paragraf 20
Sektor Penanaman Modal

Pasal 185

(1) PB sektor penanaman modal meliputi kegiatan usaha yang belum atau tidak memiliki kementerian/lembaga sebagai pengampu.
(2) PB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. kantor advokat;
   b. kantor konsultan kekayaan intelektual;
   c. kantor penerjemah atau interpreter;
   d. perpustakaan dan arsip swasta;
   e. aktivitas perusahaan holding;
   f. pemakaman dan kegiatan yang berkaitan dengan itu; dan
   g. aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Paragraf 21
Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 186

(1) PB sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi kegiatan usaha:
   a. aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things*;
   b. aktivitas penyediaan identitas digital;

c. aktivitas . . .

c. aktivitas penyediaan sertifikat elektronik dan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik;

d. aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial;

e. aktivitas pengembangan teknologi *blockchain*; dan

f. aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*).

(2) PB UMKU sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi penunjang operasional dan/atau komersial kegiatan usaha yang terdiri atas:

a. pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, bagi seluruh sektor usaha; dan

b. klasifikasi produk gim.

Paragraf 22

Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 187

PB sektor lingkungan hidup meliputi kegiatan usaha:

a. pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun; dan

b. pengelolaan air limbah.

BAB VI

LAYANAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 188

(1) Pelaksanaan PBBR dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.

(2) Sistem OSS merupakan sistem elektronik yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan PBBR.

(3) Sistem . . .

(3) Sistem OSS terdiri atas:

a. subsistem pelayanan informasi;

b. subsistem persyaratan dasar;

c. subsistem perizinan berusaha;

d. subsistem fasilitas Penanaman Modal;

e. subsistem kemitraan; dan

f. subsistem Pengawasan.

(4) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:

a. kementerian/lembaga;

b. pemerintah provinsi;

c. pemerintah kabupaten/kota;

d. Administrator KEK;

e. Badan Pengusahaan KPBPB; dan

f. Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Jenis Pelaku Usaha

Pasal 189

(1) Pemohon PB terdiri atas Pelaku Usaha:

a. orang perseorangan;

b. badan usaha;

c. kantor perwakilan; dan

d. badan usaha luar negeri.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan warga negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

(4) Kantor . . .

(4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:

a. orang perseorangan warga negara Indonesia;

b. orang perseorangan warga negara asing; atau

c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha dari luar negeri,

dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

(6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. perseroan terbatas;

b. persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*);

c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);

d. persekutuan perdata;

e. koperasi;

f. perusahaan umum;

g. perusahaan umum daerah;

h. badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama;

i. lembaga penyiaran;

j. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan

k. badan hukum lainnya.

(7) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;

b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau

c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.

(8) Badan usaha luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia dapat berupa:

a. pemberi waralaba berasal dari luar negeri;

b. pedagang berjangka asing;

c. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing; dan

d. bentuk usaha tetap.

Pasal . . .

Pasal 190

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf a merupakan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Pasal 191

(1) Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf b merupakan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire uennootschap*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 192

(1) Persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf c merupakan persekutuan firma (*venootschap onder firma*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal . . .

Pasal 193

(1) Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf d merupakan persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

(2) Pendaftaran persekutuan perdata kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran persekutuan perdata oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 194

(1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf e merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 195

Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf f merupakan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai badan usaha milik negara.

Pasal 196

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf g merupakan perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Pasal . . .

Pasal 197

Badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf h merupakan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai desa.

Pasal 198

Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf i merupakan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penyiaran.

Pasal 199

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf j merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

Pasal 200

Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (6) huruf k merupakan badan hukum yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Akses

Pasal 201

(1) Hak akses bagi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e diberikan kepada pengelola hak akses yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga, kepala DPMPTSP provinsi, kepala DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

(2) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan.

(3) Pelaku . . .

(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf f yang diberikan hak akses meliputi:

a. orang perseorangan; dan

b. direksi/pengurus/penanggung jawab atau sebutan lain pada badan usaha.

Pasal 202

Lembaga OSS melakukan evaluasi terhadap pemberian hak akses dan hak akses turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201.

Pasal 203

(1) Hak akses kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e paling sedikit diberikan untuk:

a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;

b. melakukan verifikasi perubahan atau pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;

c. pelaksanaan Pengawasan;

d. tindak lanjut hasil Pengawasan PB;

e. penilaian kepatuhan pelaksanaan PB;

f. tindak lanjut pengaduan Pelaku Usaha;

g. pengenaan dan tindak lanjut sanksi administratif; dan

h. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha.

(2) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf f digunakan untuk:

a. mengajukan permohonan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU termasuk perubahan dan pencabutan;

b. menyampaikan laporan berkala dari Pelaku Usaha;

c. menyampaikan pengaduan;

d. mengajukan permohonan fasilitas Penanaman Modal;

e. tindak lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan;

f. mengakses . . .

f. mengakses profil Pelaku Usaha; dan/atau

g. mengajukan permohonan pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha pembangunan kawasan industri, hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (4) huruf f digunakan untuk melakukan notifikasi pemenuhan persyaratan dasar lingkungan kepada Pelaku Usaha di dalam kawasan industri.

Pasal 204

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berbentuk:

a. orang perseorangan, dengan mengisi data nomor induk kependudukan;

b. badan usaha, dengan mengisi data nomor pengesahan atau nomor pendaftaran badan usaha;

c. perusahaan umum, perusahaan umum daerah, lembaga penyiaran, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum pembentukan;

d. persyarikatan atau persekutuan, dengan mengisi data dasar hukum pendirian; dan

e. kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri, dengan mengisi data nomor induk kependudukan kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan Indonesia atau nomor paspor kepala kantor perwakilan/penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing.

Pasal 205

(1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (3) secara mandiri dalam Sistem OSS.

(2) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. nama penanggung jawab;

b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor penanggung jawab;

c. nomor . . .

c. nomor telepon penanggung jawab;

d. surat elektronik penanggung jawab; dan/atau

e. kata sandi.

(3) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah diverifikasi Sistem OSS dengan mempertimbangkan keamanan data.

Paragraf 4

Nomor Induk Berusaha

Pasal 206

(1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.

(2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) NIB.

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

(5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:

a. angka pengenal importir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor;

b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

(6) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal importir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat memilih:

a. angka pengenal importir umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau

b. angka . . .

b. angka pengenal importir produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

(7) Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat digunakan oleh:

a. Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, untuk melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau

b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan, hanya dapat melakukan kegiatan ekspor.

(8) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.

(9) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 207

(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 mencakup data paling sedikit:

a. profil;

b. permodalan usaha;

c. nomor pokok wajib pajak;

d. KBLI; dan

e. lokasi usaha.

(2) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada Sistem OSS.

(3) Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk kependudukan yang terintegrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(4) Bagi Pelaku Usaha yang merupakan badan usaha, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(5) Terhadap . . .

(5) Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(6) Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.

(7) Data lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan sistem di kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang serta tugas pemerintahan di bidang pertanahan.

(8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian pada Sistem OSS.

(9) Bagi Pelaku Usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi data paling sedikit:
   a. nama perusahaan di luar negeri yang menunjuk;
   b. alamat perusahaan di luar negeri yang menunjuk; dan
   c. data kantor perwakilan di Indonesia.

Pasal 208

(1) Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1), Sistem OSS melakukan penapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya, termasuk:
   a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha prioritas;
   b. alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;
   c. kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi;
   d. ketentuan bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
   e. ketentuan bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal.

(2) Penapisan kesesuaian dengan ketentuan bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.

(3) Terhadap . . .

(3) Terhadap data yang telah dilakukan penapisan, Sistem OSS mengalirkan data kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.

Paragraf 5

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 209

(1) Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha menyampaikan rencana jumlah penggunaan tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan meneruskan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing kepada Lembaga OSS dan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi.

Paragraf 6

Data Pelaku Usaha dan Data Usaha

Pasal 210

(1) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha berupa:
   a. kegiatan usaha utama;
   b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
   c. kantor cabang administrasi.

(2) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha.

(3) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas satu atau lebih kegiatan usaha yang:
   a. tergolong sebagai pendukung dari kegiatan usaha utama;

b. dapat . . .

b. dapat merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan

c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan usaha utama.

(4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat kegiatan penunjang administratif.

Pasal 211

Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dengan memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi usaha paling sedikit memuat:

a. jenis produk yang dihasilkan;
b. kapasitas produk;
c. jumlah tenaga kerja; dan
d. rencana nilai investasi.

Pasal 212

(1) Untuk Penanaman Modal Asing, Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf d yang diajukan oleh Pelaku Usaha meliputi:

a. minimum investasi; dan

b. ketentuan permodalan.

(2) Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi usaha harus lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan usaha:

a. perdagangan besar per 4 (empat) digit awal KBLI, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;

b. jasa . . .

b. jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing per 2 (dua) digit awal KBLI per 1 (satu) titik lokasi usaha, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan;

c. konstruksi sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing per 4 (empat) digit awal KBLI, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan; atau

d. industri yang menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, total investasinya lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Pasal 213

(1) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3), Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan PBBR dengan memasukkan data kegiatan usaha pendukung untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi usaha paling sedikit memuat:

a. jenis produk yang dihasilkan;

b. kapasitas produk;

c. jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilai investasi.

(2) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3), Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian PBBR.

(3) Untuk Penanaman Modal Asing, kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada legalitas Pelaku Usaha.

Pasal . . .

Pasal 214

(1) Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (4) pada Sistem OSS dengan melengkapi data paling sedikit:
   a. alamat kantor cabang administrasi;
   b. nomor pokok wajib pajak kantor cabang administrasi atau nomor identitas tempat kegiatan usaha; dan
   c. penanggung jawab kantor cabang administrasi.

(2) Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu) lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang administrasi.

(3) Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS sebagai lampiran NIB.

Pasal 215

(1) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) merupakan:
   a. kegiatan dalam 1 (satu) lini produksi yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama; atau
   b. kegiatan yang menghasilkan lebih dari 1 (satu) jasa dengan kode KBLI 5 (lima) digit yang berbeda di lokasi yang sama,

   kelengkapan data dapat digabung menjadi satu.

(2) Kelengkapan data yang dapat digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. kebutuhan luasan lahan;
   b. kebutuhan bangunan gedung;
   c. mesin dan peralatan; dan
   d. nilai investasi.

Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 216

(1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf a menyediakan informasi dan layanan pusat bantuan dalam memperoleh PBBR serta informasi lain.

(2) Penyediaan . . .

(2) Penyediaan informasi dan layanan pusat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. KBLI berdasarkan tingkat Risiko;
b. RTR;
c. ketentuan persyaratan Penanaman Modal;
d. persyaratan dan/atau kewajiban PB, jangka waktu penerbitan, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
e. persyaratan dasar;
f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
g. Pengawasan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU serta kewajiban pelaporan;
h. panduan pengguna Sistem OSS, kanal kontak, dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions*);
i. data statistik realisasi investasi; dan
j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga

Subsistem Persyaratan Dasar

Pasal 217

(1) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf b dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. KKPR;
b. PL; dan/atau
c. PBG serta SLF.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 218

(1) Subsistem perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf c dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. PB:

1. Risiko rendah berupa NIB;
2. Risiko menengah terdiri atas:
   a) NIB; dan
   b) Sertifikat Standar.
3. Risiko tinggi terdiri atas:
   a) NIB; dan
   b) Izin.

b. PB UMKU.

(3) Subsistem perizinan berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:

a. Pelaku Usaha;
b. Lembaga OSS;
c. kementerian/lembaga;
d. DPMPTSP provinsi;
e. DPMPTSP kabupaten/kota;
f. Administrator KEK; dan
g. Badan Pengusahaan KPBPB.

(4) Kepala Lembaga OSS dapat memberikan hak akses terbatas selain kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf . . .

Paragraf 2

Jenis Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 219

(1) PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dapat dilakukan perluasan dan/atau perubahan dalam rangka pengembangan usaha.

(2) Perluasan dan/atau perubahan dalam rangka pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
   a. kapasitas produksi/jasa;
   b. lokasi usaha; dan/atau
   c. kegiatan usaha.

(3) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dapat dilakukan perpanjangan masa berlakunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses perpanjangan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, penerbitan, perluasan, perubahan, dan/atau perpanjangan PB dan/atau PB UMKU diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Paragraf 3

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 220

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah Pelaku Usaha memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus menjadi SPPL.

Paragraf . . .

Paragraf 4
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 221

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah rendah, setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

(4) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1) memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 5
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 222

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Pelaku Usaha mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

(4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai jangka waktu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui Sistem OSS.

(5) Pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(7) Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

(8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 223

(1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (7) dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.

(2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 224

(1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.

(3) Ketentuan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dan Pasal 223 berlaku secara mutatis mutandis dalam pelaksanaan verifikasi kembali.

(4) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

Pasal 225

(1) Dalam hal kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

(2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal . . .

Pasal 226

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf 6

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 227

(1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS.

(2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan kegiatan operasional dan/atau komersial.

(3) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula Amdal bagi kegiatan usaha yang wajib Amdal.

(4) Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Pemenuhan persyaratan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(7) Berdasarkan . . .

(7) Berdasarkan hasil verifikasi, kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB menyampaikan notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

(8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 228

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi persyaratan, Sistem OSS menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha.

Pasal 229

Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS.

Pasal 230

Dalam hal kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah provinsi, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem OSS menerbitkan Izin.

Pasal 231

Dalam hal kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa, Pelaku Usaha mengajukan permohonan PB UMKU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Paragraf . . .

Paragraf 7

Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 232

(1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi yang:

a. berlokasi di KEK, KPBPB, atau kawasan industri; dan/atau

b. termasuk dalam proyek strategis nasional,

kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing langsung menerbitkan PB dan PB UMKU tertentu tanpa terlebih dahulu dilakukan pemenuhan persyaratan oleh Pelaku Usaha.

(2) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 berlaku secara mutatis mutandis bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing, membatalkan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.

Paragraf 8

Penerbitan dan Kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil

Pasal 233

(1) UMK diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal.

(2) Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.

Pasal . . .

Pasal 234

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 memiliki Risiko rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS, sebagai identitas dan legalitas usaha.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:

a. standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau

b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

(3) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin.

(4) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.

(5) Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal 222, dan Pasal 227 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemberian Sertifikat Standar dan/atau Izin bagi pelaku UMK.

Bagian Kelima

Subsistem Fasilitas Penanaman Modal

Pasal 235

(1) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf d dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. pengajuan . . .

a. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal;

b. pengajuan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum;

c. pengajuan pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang dalam rangka kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara;

d. pengajuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan;

e. pengajuan fasilitas pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;

f. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu;

g. pengajuan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; dan/atau

h. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Bagian Keenam

Subsistem Kemitraan

Pasal 236

(1) Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf e dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. kemitraan . . .

a. kemitraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha Penanaman Modal;

b. kemitraan lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kemitraan yang bersifat sukarela yang dilakukan oleh Pelaku Usaha; dan

d. monitoring dan evaluasi atas implementasi komitmen kemitraan.

Bagian Ketujuh

Subsistem Pengawasan

Pasal 237

(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf f dapat diakses dengan menggunakan hak akses.

(2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. laporan berkala dari Pelaku Usaha;

b. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;

c. perangkat kerja Pengawasan;

d. penilaian kepatuhan pelaksanaan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;

e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya;

f. tindakan administratif berupa pencabutan atas sebagian atau seluruh persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan

g. pembinaan dan sanksi administratif.

(3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;

b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;

c. surat pemberitahuan kunjungan;

d. berita acara pemeriksaan; dan

e. perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan.

BAB . . .

BAB VII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 238

(1) Pengawasan PBBR dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. Administrator KEK; dan/atau

d. Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan ketentuan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU;

b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

c. memastikan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pengawasan rutin; dan

b. Pengawasan insidental.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas pelaksanaan PBBR.

Bagian . . .

Bagian Kedua

Pengawasan Rutin

Paragraf 1

Umum

Pasal 239

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau

b. inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 2

Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pasal 240

(1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf a dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan

b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

(3) Kepatuhan pemenuhan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(5) Perkembangan . . .

(5) Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam laporan kegiatan Penanaman Modal melalui Sistem OSS.

(6) Laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat:

a. realisasi Penanaman Modal;

b. realisasi tenaga kerja;

c. realisasi produksi;

d. kewajiban Penanaman Modal; dan

e. kendala yang dihadapi penanam modal.

Pasal 241

(1) Atas penyampaian laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing mempunyai tugas:

a. melakukan reviu; dan

b. menyusun laporan hasil reviu.

(2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penginputan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB ke Sistem OSS dalam rangka pemutakhiran profil Pelaku Usaha.

(3) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kategori:

a. sangat baik;

b. baik;

c. kurang baik; atau

d. tidak baik.

Pasal . . .

Pasal 242

(1) Tindak lanjut hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, meliputi:

a. pembinaan/pendampingan;

b. pengenaan sanksi administratif; dan/atau

c. inspeksi lapangan.

(2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Paragraf 3

Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 243

(1) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

(2) Integrasi dan koordinasi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.

(3) Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

(4) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;

b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

c. penilaian kepatuhan; dan

d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

(5) Inspeksi . . .

(5) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau virtual.

Pasal 244

(1) Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksana.

(2) Koordinator pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

b. DPMPTSP provinsi, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

c. DPMPTSP kabupaten/kota, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

d. Administrator KEK, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Administrator KEK; dan

e. Badan Pengusahaan KPBPB, atas pelaksanaan penerbitan PB yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan KPBPB.

(3) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. kementerian/lembaga pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan lintas provinsi;

b. organisasi perangkat daerah teknis pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan lintas kabupaten/kota;

c. organisasi perangkat daerah teknis pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;

d. Administrator KEK pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Administrator KEK; dan

e. Badan . . .

e. Badan Pengusahaan KPBPB pengampu untuk persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan KPBPB.

(4) Tugas koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menetapkan daftar kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dalam periode 1 (satu) tahun;

b. menetapkan jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

c. mengoordinasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

d. melakukan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin; dan

e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

(5) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu PB memiliki tugas untuk:

a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun;

b. mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS;

c. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin ke dalam Sistem OSS;

d. melakukan penilaian kepatuhan; dan

e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

(6) Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengampu persyaratan dasar dan PB UMKU memiliki tugas untuk:

a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin kepada kementerian/lembaga pengampu PB;

b. mengusulkan personel sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin;

c. melakukan penilaian kepatuhan; dan

d. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

(7) Pemerintah . . .

(7) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin kepada Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

(8) Dalam hal Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB tidak dapat melakukan inspeksi lapangan rutin, Pemerintah Pusat dapat mengambil alih inspeksi lapangan rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perencanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 245

(1) Perencanaan inspeksi lapangan rutin mencakup penyusunan:

a. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

b. sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan rutin; dan

c. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

(2) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. hasil reviu atas laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241; dan/atau

b. data dan informasi kegiatan usaha.

(3) Anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf . . .

Paragraf 5
Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 246

(1) Kementerian/lembaga menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi lapangan rutin yang memuat bobot kualitatif dan penilaian kepatuhan Pelaku Usaha.

(2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemeriksaan:
   a. pemenuhan kepatuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU; dan
   b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal.

(3) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat:
   a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
   b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

(4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha secara elektronik dalam Sistem OSS.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah penandatanganan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 247

(1) Dalam hal inspeksi lapangan rutin memerlukan kompetensi khusus tertentu, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dapat bekerja sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan personel pelaksana inspeksi lapangan rutin.

(2) Pelaksanaan . . .

(2) Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang memuat:

a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan

b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.

(3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani bersama dengan Pelaku Usaha.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara mencantumkan alasan penolakan Pelaku Usaha.

(5) Hasil inspeksi lapangan rutin oleh lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penginputan laporan hasil inspeksi lapangan rutin ke Sistem OSS paling lama 3 (tiga) Hari, sejak diterimanya laporan dari lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima laporan lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 248

Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin dalam rangka pengawasan rutin di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1).

Paragraf . . .

Paragraf 6

Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 249

(1) Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Sistem OSS melakukan pengolahan data penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan profil Pelaku Usaha dengan kategori:

a. sangat baik;

b. baik;

c. kurang baik; atau

d. tidak baik.

(2) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Sistem OSS oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.

Paragraf 7

Tindak Lanjut Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 250

(1) Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. pembinaan/pendampingan; dan/atau

b. pengenaan sanksi administratif.

(2) Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka meningkatkan kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha dengan tingkat kepatuhan kurang baik dan tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Pengawasan Insidental

Paragraf 1

Umum

Pasal 251

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu.

(2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. adanya pengaduan masyarakat;

b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; dan/atau

c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi lapangan insidental.

(4) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan melalui Sistem OSS.

Paragraf 2

Pelaksanaan Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 252

(1) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi atau mandiri oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Ketentuan mengenai:

a. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan

b. lembaga . . .

b. lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan inspeksi lapangan insidental.

Paragraf 3

Penilaian Kepatuhan Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 253

Ketentuan mengenai penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi lapangan insidental.

Paragraf 4

Tindak lanjut Inspeksi Lapangan Insidental

Pasal 254

Ketentuan mengenai tindak lanjut inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tindak lanjut inspeksi lapangan insidental.

Bagian Keempat

Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 255

(1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha kepada pelaku UMK.

(2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan:

1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan

2. dilakukan . . .

2. dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.

b. Pengawasan rutin PBBR untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan

c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan kewajiban, pelaku UMK dinilai patuh, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Kelima
Pencabutan Persyaratan Dasar, PB, dan PB UMKU

Pasal 256

(1) Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dilakukan dalam hal terdapat:

a. permohonan Pelaku Usaha;

b. permohonan pembubaran badan usaha;

c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait PBBR;

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau

e. berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan.

(2) Permohonan pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(3) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui Sistem OSS sebagai tindak lanjut hasil pengawasan.

(4) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat, keterangan, atau informasi tertulis yang telah berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan.

(5) Pencabutan . . .

(5) Pencabutan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

(6) Keputusan pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Bagian Keenam

Integrasi Mekanisme Pengawasan antara Jaminan Produk Halal dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 257

(1) Pengawasan terhadap PBBR dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan produk halal.

(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk integrasi antara sistem elektronik terintegrasi layanan penyelenggaraan jaminan produk halal dengan Sistem OSS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan terhadap PBBR secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan penyelenggaraan jaminan produk halal diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal setelah berkoordinasi dengan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Bagian . . .

Bagian Ketujuh

Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 258

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengawasan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan

b. menyampaikan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan usaha.

(3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara:

a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau

b. tidak langsung yang disampaikan secara:

1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau

2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.

(4) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2.

(5) Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan kementerian/lembaga lainnya dan/atau Pemerintah Daerah.

(6) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal . . .

Pasal 259

Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 260

Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 262

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pelaksanaan Pengawasan diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Bagian Kedelapan

Pengawasan Sektor

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 263

(1) Pengawasan terhadap KKPRL, rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi), PB, dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; dan/atau

e. kepala . . .

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengawasan bersifat teknis oleh pejabat bidang kelautan dan perikanan;

b. Pengawasan penegakan hukum oleh:

1. polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

2. pengawas perikanan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap KKPRL, rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi), PB, dan/atau PB UMKU di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor kelautan dan perikanan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 265

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor pertanian dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; dan/atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan . . .

(2) Kewenangan Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tenaga pengawas atau pejabat lainnya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 266

Pengawasan rutin pada sektor pertanian selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5), juga berdasarkan laporan Pelaku Usaha sektor pertanian.

Pasal 267

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pertanian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3

Sektor Kehutanan

Pasal 268

Pengawasan terhadap persetujuan kawasan hutan, rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, dan PB di sektor kehutanan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 269

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap persetujuan kawasan hutan, rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, dan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor kehutanan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 270

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor energi dan sumber daya mineral dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK;

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB; dan/atau

f. kepala badan/lembaga lain,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kontrak kerja sama.

(2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur sipil negara bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat mendelegasikan dan/atau melimpahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 272

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor energi dan sumber daya mineral diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 273

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor ketenaganukliran dilakukan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin atau insidental.

Pasal 274

Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) dilakukan oleh:

a. inspektur keselamatan nuklir;

b. asesor;

c. pejabat lain; dan/atau

d. ahli,

yang ditugaskan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 275

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali selama masa berlaku PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 276

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (2), selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) juga dilaksanakan pada:

a. keadaan darurat yang membahayakan pekerja, masyarakat, dan lingkungan;

b. pelaksanaan Pengawasan untuk garda-aman nuklir; dan

c. pengangkutan zat radioaktif.

Pasal 277

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ketenaganukliran diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran

Paragraf 6

Sektor Perindustrian

Pasal 278

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perindustrian dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;

b. gubernur;

c. bupati . . .

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor perindustrian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 280

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 281

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor perdagangan dan metrologi legal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf . . .

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 282

Pengawasan terhadap Bangunan Gedung, PB, dan/atau PB UMKU di sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
c. gubernur;
d. bupati/wali kota;
e. kepala Administrator KEK; atau
f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 283

(1) Pengawasan rutin pada subsektor jasa konstruksi selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5), juga berdasarkan:
   a. laporan kegiatan usaha tahunan; dan
   b. pengawasan pelaksanaan proyek jasa konstruksi.
(2) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil paling sedikit meliputi:
   a. laporan keuangan; dan
   b. data kepatuhan pelaksanaan PB.
(3) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah atau besar, dan badan usaha jasa konstruksi spesialis paling sedikit meliputi:
   a. data kepatuhan pelaksanaan PB;
   b. data kinerja manajemen perusahaan;
   c. data kinerja proyek;

d. laporan . . .

d. laporan keuangan; dan

e. data keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan.

(4) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lembaga sertifikasi paling sedikit meliputi:

a. data profil lembaga sertifikasi;

b. data kepatuhan pelaksanaan PB;

c. data kinerja;

d. laporan keuangan; dan

e. data operasional.

(5) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi.

Pasal 284

(1) Pengawasan atas pelaksanaan PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam PB dan/atau PB UMKU.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian identitas antara pemegang PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air;

b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air;

c. kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air dengan prasarana dan sarana yang dibangun;

d. dampak negatif yang ditimbulkan; dan/atau

e. penggunaan sumber daya air lain yang belum memperoleh PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. balai . . .

a. balai besar wilayah sungai/balai wilayah sungai;

b. instansi yang membidangi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya;

c. badan usaha milik negara/daerah di bidang pengelolaan sumber daya air,

dan dapat melibatkan peran masyarakat.

(4) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU pada subsektor sumber daya air.

Pasal 285

(1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinyemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, pengaturan lalu lintas, dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

(2) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

Pasal 286

(1) Pengawasan atas pelaksanaan PB untuk pengembangan perumahan bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengembangan perumahan setelah diterbitkannya PB.

(2) Pelaku Usaha pada subsektor pengembangan perumahan selain menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga menyampaikan laporan yang memuat:

a. pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun; dan

b. pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun untuk rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 287

Pengawasan atas pelaksanaan PB untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan dalam PB.

Pasal 288

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap Bangunan Gedung, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
b. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 9

Sektor Transportasi

Pasal 289

Pengawasan terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 290

(1) Pengawasan rutin terhadap kegiatan usaha di sektor transportasi selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 juga dilakukan dalam bentuk:

a. audit;

b. inspeksi;

c. pengamatan;

d. pemantauan;

e. uji petik; dan/atau

f. pengujian (*test*).

(2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu oleh penyedia jasa.

(4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa transportasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja operasi/pelayanan penyedia jasa transportasi.

(6) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan.

(7) Pengujian (*test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan transportasi atau tindakan keamanan transportasi dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum.

Pasal . . .

Pasal 291

Pengawasan insidental selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) juga dilakukan:

a. pada saat terjadinya kejadian atau kecelakaan;

b. adanya laporan petugas;

c. pada masa puncak angkutan; dan

d. adanya kejadian penting lainnya.

Pasal 292

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor transportasi diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Paragraf 10

Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 293

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kesehatan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 294

Pengawasan rutin berupa inspeksi lapangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat Risiko menengah rendah dilakukan 2 (dua) tahun sekali;

b. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat Risiko menengah tinggi dilakukan 1 (satu) tahun sekali; dan

c. untuk kegiatan usaha sektor kesehatan dengan tingkat Risiko tinggi dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 295

Dalam melakukan Pengawasan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat menugaskan tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 296

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor kesehatan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 297

Pengawasan terhadap PB UMKU pada subsektor obat dan makanan dilakukan oleh:

a. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 298

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dalam melaksanakan Pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas yang bertugas melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

(1) Dalam hal Pengawasan obat dan makanan pada fasilitas produksi, distribusi, pengangkutan, pelayanan, dan/atau penyerahan memerlukan klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut, tenaga pengawas berwenang melakukan tindakan pengamanan setempat.

(2) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan inventarisasi;

b. tindakan pengamanan terhadap bahan, produk, sarana, dan/atau alat dengan membuat garis pengaman;

c. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; dan/atau

d. sampling untuk uji laboratorium dan/atau penilaian penandaan.

(3) Pemilik obat dan makanan bertanggung jawab atas obat dan makanan yang dilakukan tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tindakan pengamanan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pengamanan setempat.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal hasil pemeriksaan fasilitas produksi, distribusi, pengangkutan, pelayanan, dan/atau penyerahan obat dan makanan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 300

Ketentuan mengenai Pengawasan terhadap PB UMKU di subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, kompetensi, dan peningkatan kapasitas tenaga pengawas pada subsektor obat dan makanan diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 301

Pengawasan terhadap PB UMKU pada subsektor pangan segar dilakukan oleh:

a. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

(1) Pengawasan rutin pada subsektor pangan segar selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait pelaksanaan PB UMKU sarana penanganan pangan segar, peredaran pangan segar, dan jaminan keamanan pangan segar produk ekspor.

(2) Laporan . . .

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pelaku Usaha kepada kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 303

(1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan rutin selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 juga dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan/proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan segar.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis atas pemenuhan standar yang dapat disertai dengan pengambilan contoh dan pengujian.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. mempertimbangkan kepatuhan Pelaku Usaha dan analisis Risiko keamanan pangan segar; atau

b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 304

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dalam melaksanakan pengawasan dapat mengangkat tenaga pengawas yang bertugas melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengangkatan tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 305

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB UMKU di subsektor pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor pangan segar diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Paragraf 11

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 306

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor pendidikan dan kebudayaan dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;
b. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 307

Pengawasan rutin pada sektor pendidikan dan kebudayaan selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha sektor pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 308

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pendidikan dan kebudayaan diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. peraturan . . .

b. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

c. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 309

Pengawasan terhadap PB pada sektor pariwisata dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 310

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB pada sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pariwisata diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 311

(1) Pengawasan terhadap PB pada sektor keagamaan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan . . .

(2) Kewenangan Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur sipil negara sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 312

Pengawasan rutin pada sektor keagamaan selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus dan/atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Pasal 313

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB di sektor keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor keagamaan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 314

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 315

Pengawasan atas isi siaran dalam kegiatan usaha pada subsektor penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 316

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi selain melakukan Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas layanan dan/atau produk layanan dari Pelaku Usaha yang mendapatkan PB dan/atau PB UMKU untuk kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem monitoring pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran wajib membuka akses dan memberikan informasi yang diminta untuk kepentingan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dapat mengumumkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 317

(1) UMK-M dapat memperoleh pendampingan untuk melakukan kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. konsultasi teknis dan bisnis untuk kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran;

b. peningkatan kompetensi berusaha untuk kegiatan usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan/atau

c. fasilitasi kolaborasi dengan Pelaku Usaha pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta pihak terkait.

Pasal . . .

Pasal 318

(1) Pengawasan terhadap hak labuh satelit dilakukan melalui evaluasi secara berkala daftar satelit asing yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 319

(1) Pengawasan terhadap Izin pita frekuensi radio dan Izin stasiun radio dilakukan melalui:

a. Pengawasan administrasi; dan/atau

b. Pengawasan teknis.

(2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan PB UMKU Izin pita frekuensi radio dan Izin stasiun radio sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio.

(4) Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. observasi penggunaan spektrum frekuensi radio;

b. identifikasi dan deteksi penggunaan spektrum frekuensi radio;

c. pengukuran parameter teknis stasiun radio; dan

d. inspeksi stasiun radio.

(5) Kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan:

a. penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan PB UMKU yang diberikan;

b. penggunaan spektrum frekuensi radio tidak menimbulkan gangguan yang merugikan pada pengguna spektrum frekuensi radio lain; dan/atau

c. penggunaan . . .

c. penggunaan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio untuk dinas radio komunikasi tertentu.

Pasal 320

Pengawasan terhadap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui:

a. pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan

b. pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan terhadap sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Pasal 321

(1) Pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 huruf a yang dibuat, dirakit, dan/atau dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi di dalam kawasan pabean, dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

(3) Dalam hal diperlukan, pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain pemeriksaan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban pemasangan label.

(5) Jenis . . .

(5) Jenis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilakukan pemeriksaan di dalam kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 322

(1) Pemeriksaan kesesuaian standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan terhadap sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 huruf b dilaksanakan dengan pertimbangan:
   a. alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi menimbulkan gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia;
   b. adanya laporan pengaduan;
   c. riwayat ketidaksesuaian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau
   d. adanya perbedaan harga yang signifikan dengan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi produk sejenis.

(2) Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi di sisi pengguna menggunakan metode sampling melalui:
   a. pemeriksaan administrasi; dan
   b. pemeriksaan teknis.

(3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemeriksaan terhadap dokumen spesifikasi teknis, kesesuaian merek dan tipe alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dan pemasangan label.

(4) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pengujian sampel alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan oleh balai pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.

Pasal . . .

Pasal 323

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 15

Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 324

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di subsektor industri pertahanan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewenangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait.
(3) Pengawasan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap PB dan/atau PB UMKU di subsektor industri pertahanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 325

(1) Pengawasan rutin untuk subsektor industri pertahanan mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha non perseorangan terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha yang meliputi:
    a. pelaksanaan produksi;
    b. sumber daya manusia;
    c. fasilitas produksi dan/atau fasilitas pemeliharaan; dan
    d. teknologi yang telah dikuasai.

(2) Pengawasan . . .

(2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk subsektor industri pertahanan dilakukan melalui:

a. survei;

b. monitoring; dan/atau

c. laporan.

(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 326

Pengawasan insidental untuk subsektor industri pertahanan mencakup Pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha dan/atau industri pertahanan terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 327

(1) Pengawasan dilakukan oleh pelaksana Pengawasan yang berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan untuk mendapatkan hak akses terhadap:

a. data, dokumen administrasi, dan legalitas perusahaan;

b. fasilitas dan sarana industri pertahanan;

c. kegiatan produksi industri pertahanan; dan

d. data produksi dan distribusi produk alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dihasilkan.

(3) Kewajiban pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menjaga kerahasiaan data dan dokumen/informasi;

b. menjaga independensi; dan

c. tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas Pengawasan.

Pasal . . .

Pasal 328

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor industri pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor industri pertahanan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 329

Pengawasan terhadap PB pada subsektor keamanan meliputi:

a. Pengawasan tingkat daerah dilaksanakan oleh kepolisian daerah secara rutin di daerahnya; dan

b. Pengawasan tingkat pusat dilaksanakan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia secara insidental.

Pasal 330

(1) Kepolisian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a melaksanakan audit kelengkapan dan kecocokan, audit kesiapan untuk memberikan penilaian terhadap reliabilitas dan integritas operasional, serta kelayakan badan usaha jasa pengamanan dalam beroperasional.

(2) Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf b melakukan audit Pengawasan kepada badan usaha jasa pengamanan yang sudah mendapatkan PB dan melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) wilayah hukum kepolisian daerah apabila dipandang perlu.

Pasal 331

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB di subsektor keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada subsektor keamanan diatur dalam peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf . . .

Paragraf 16

Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 332

Pengawasan terhadap PB pada sektor ekonomi kreatif dilakukan oleh:

a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 333

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB pada sektor ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ekonomi kreatif diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 334

Pengawasan terhadap PB pada sektor informasi geospasial dilakukan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 335

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB di sektor informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Paragraf . . .

Paragraf 18

Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 336

(1) Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU di sektor ketenagakerjaan dilakukan oleh:
   a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
   b. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia;
   c. gubernur;
   d. bupati/wali kota;
   e. kepala Administrator KEK; dan/atau
   f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

   sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. untuk urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh tim pengawas perizinan sektor ketenagakerjaan dengan melibatkan pengawas ketenagakerjaan; atau
   b. untuk suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, dilaksanakan oleh tim pengawas perizinan sektor ketenagakerjaan,

   dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a untuk sektor ketenagakerjaan dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 337

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor ketenagakerjaan diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. peraturan . . .

b. peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 338

Pengawasan terhadap PB pada sektor perkoperasian dilakukan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339

Pengawasan rutin pada sektor perkoperasian selain berdasarkan laporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (5) juga dilakukan berdasarkan laporan Pelaku Usaha terkait penyelenggaraan usaha sektor perkoperasian.

Pasal 340

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB pada sektor perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor perkoperasian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Paragraf 20
Sektor Penanaman Modal

Pasal 341

Pengawasan terhadap PB pada sektor Penanaman Modal dilakukan oleh:

a. menteri . . .

a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

b. kepala Administrator KEK; dan/atau

c. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 342

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan terhadap PB sektor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor Penanaman Modal diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Paragraf 21

Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 343

Pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 344

(1) Pengawasan pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dilakukan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan penerbit gim.

(2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dilakukan dengan:

a. memilih penyelenggara sistem elektronik lingkup privat sebagai sampel Pengawasan;

b. melakukan evaluasi terhadap sampel Pengawasan; dan/atau

c. melakukan tindak lanjut atas evaluasi Pengawasan.

(3) Pengawasan . . .

(3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3) huruf a terhadap penerbit gim dilakukan apabila telah melakukan klasifikasi secara mandiri dan telah diuji kesesuaian atas klasifikasi mandiri tersebut oleh lembaga klasifikasi.

(4) Pengawasan insidental terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan penerbit gim selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (2) juga dilaksanakan dalam rangka:

a. menindaklanjuti laporan dari kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga peradilan; dan/atau

b. menindaklanjuti temuan insiden dan/atau temuan insiden yang dihasilkan dari kegiatan Pengawasan.

Pasal 345

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 22

Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 346

Pengawasan terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup dilakukan oleh:

a. menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. kepala Administrator KEK; dan/atau
e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 347

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PL dan PB pada sektor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor lingkungan hidup diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB VIII

EVALUASI DAN REFORMASI KEBIJAKAN

Pasal 348

(1) Kementerian/lembaga melaksanakan evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR secara berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

(2) Evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

(3) Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB mendukung pelaksanaan evaluasi dan reformasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:

a. memberikan masukan terkait penyelenggaraan PBBR; dan/atau

b. menyediakan data dan/atau informasi penyelenggaraan PBBR,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 349

(1) Kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian melakukan koordinasi evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR dalam rangka meningkatkan iklim berusaha.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam rangka melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian menetapkan rencana aksi PBBR.

(3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penyusunan kebijakan PBBR;
b. implementasi penyelenggaraan PBBR;
c. penerapan reformasi PBBR ke dalam Sistem OSS;
d. peningkatan pemahaman dan kapasitas mengenai PBBR untuk kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB;
e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan PBBR kepada masyarakat; dan
f. evaluasi PBBR yang berkelanjutan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 350

(1) Pendanaan pengembangan Sistem OSS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada kementerian/lembaga bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada pemerintah provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pendanaan penyelenggaraan PBBR pada pemerintah kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 351

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, kepala Administrator KEK melaporkan kepada dewan nasional KEK untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 352

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, Kejaksaan Republik Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan.

(3) Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota memeriksa laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, baik yang diterima oleh kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang diteruskan dari Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak laporan masyarakat diterima.

(4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, Menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(5) Hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
   a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
   b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
   c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian . . .

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan.

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah disampaikan, menyampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 353

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB yang tidak menyelenggarakan PBBR melalui Sistem OSS dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis yang disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.

(3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan:

a. Lembaga OSS mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB;

b. menteri . . .

b. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU sektor mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan gubernur; atau

c. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Pasal 354

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan melakukan Pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 355

(1) Pelaku Usaha yang melanggar persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pengenaan denda administratif;

d. pengenaan daya paksa polisional;

e. pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau

f. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

(4) Pengenaan . . .

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Sistem OSS.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Pelaku Usaha

Paragraf 1

Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 356

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan, berupa:

a. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi atau tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU;

b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing;

c. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi);

d. pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut;

e. pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRL;

f. pemanfaatan kawasan konservasi yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;

g. usaha . . .

g. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

h. usaha pengadaan, sortasi, grading, penyimpanan, pemasaran, dan/atau pengangkutan hasil perikanan yang tidak memiliki PB UMKU;

i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU;

j. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU;

k. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dari Pemerintah Pusat;

l. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU;

m. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan;

n. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak menggunakan nakhoda, perwira, dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;

o. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia;

p. memiliki . . .

p. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;

q. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukan impor yang ditetapkan;

r. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) selain *Appendix I* yang tidak memenuhi PB;

s. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas dengan PB dan/atau PB UMKU yang sudah tidak berlaku;

u. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU;

v. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU;

w. melakukan aktivitas pelabuhan perikanan yang tidak memenuhi atau tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU;

x. melakukan usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan/atau jasa subsektor pembudidayaan ikan yang tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU;

y. melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

z. melakukan . . .

z. melakukan pembuatan pakan ikan, pemasukan bahan baku dan/atau pakan ikan, dan peredaran pakan ikan yang tidak memenuhi PB UMKU; dan

aa. melakukan pembuatan obat ikan, pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan, dan peredaran obat ikan yang tidak memenuhi standar PB UMKU,

dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. peringatan/teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. denda administratif;

d. pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau

e. pencabutan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU.

(3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha di sektor kelautan dan perikanan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak memiliki rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 357

(1) Sanksi administratif berupa peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf a dikenakan dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;

b. belum . . .

b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau

c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

(2) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha.

(4) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan paling banyak 2 (dua) kali.

(5) Peringatan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Pasal 358

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf b dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;

b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya jika kegiatan usaha tidak segera dihentikan; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.

(2) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penghentian sementara kegiatan;

b. penyegelan;

c. penutupan . . .

c. penutupan lokasi;

d. pembongkaran bangunan;

e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan;

f. penghentian layanan pemerintah;

g. pemulihan fungsi ruang laut; dan/atau

h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

(3) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 359

(1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan teguran/peringatan tertulis kedua kali atau paksaan pemerintah.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:

a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaku Usaha dengan sengaja mengabaikan ketentuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau

b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan/atau perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.

(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi atau tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

b. pemanfaatan . . .

b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki rekomendasi yang merupakan persyaratan persetujuan KKPR dikenai denda administratif sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dikali luasan pelanggaran (hektare) dikali tarif rekomendasi;

c. pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) yang tidak memiliki rekomendasi yang merupakan persyaratan persetujuan KKPR dikenai denda administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dikali luasan pelanggaran (hektare) dikali tarif rekomendasi;

d. pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki KKPRL yang tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut dikenai denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;

e. pemanfaatan ruang laut yang tidak memenuhi KKPRL dikenai denda administratif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali total nilai investasi;

f. usaha pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenai denda administratif sebesar 200% (dua ratus persen) dikali nilai jual produk/hasil perikanan yang ditangani/diolah/disimpan saat terjadi pelanggaran;

g. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

   1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;

   2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;

3. Rp150.000.000,00 . . .

3. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

h. mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage;*
3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp100.000.000,00 . . .

1. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

j. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak membawa dokumen PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan

5. Rp30.000.000,00 . . .

5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

k. membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa persetujuan dikenai denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari:

1. nilai kapal yang sedang atau telah dibangun;
2. nilai kapal yang diimpor; atau
3. biaya modifikasi kapal.

l. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia dikenai denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga pembangunan atau pembelian kapal;

m. mengimpor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, standar mutu wajib, dan/atau peruntukan yang ditetapkan dikenai denda administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dikali harga pembelian yang tertera dalam tanda bukti pembelian dikali jumlah komoditas yang diimpor yang melanggar;

n. pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) selain *Appendix I* yang tidak memenuhi PB dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

o. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan alih muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp50.000.000,00 . . .

1. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

p. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas dengan PB dan/atau PB UMKU yang sudah tidak berlaku dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;

3. Rp30.000.000,00 . . .

3. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

q. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;
4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan
5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

r. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang tidak membawa PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebesar:

1. Rp10.000.000,00 . . .

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;

2. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;

3. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage*;

4. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 100 (seratus) *gross tonnage* sampai dengan 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*; dan

5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk kapal pengangkut ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*.

s. melakukan usaha pembenihan, pembesaran ikan dan/atau jasa subsektor pembudidayaan ikan yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan

t. melakukan usaha pembenihan dan/atau pembesaran jenis ikan yang dilarang, merugikan, dan/atau membahayakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal . . .

Pasal 360

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf d dikenakan apabila Pelaku Usaha:
   a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali; dan/atau
   b. tidak membayar denda administratif yang dikenai.

(2) Pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenai secara langsung apabila Pelaku Usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf b.

(3) Pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

(4) Pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan Pelaku Usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Pasal 361

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) huruf e dikenakan apabila:
   a. setelah pembekuan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU dijatuhkan, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU; dan/atau
   b. tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.

(2) Pencabutan KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenai sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:

a. gangguan . . .

a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;

b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya; dan/atau

c. kerugian yang signifikan bagi kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 362

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan/atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Paragraf 2

Sektor Pertanian

Pasal 363

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. penarikan produk dari peredaran;

e. pencabutan PB;

f. penutupan kegiatan usaha; dan/atau

g. pengenaan daya paksa polisional.

(2) Setiap . . .

(2) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada sektor pertanian, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. pencabutan PB UMKU;
   e. penarikan produk dari peredaran;
   f. penutupan kegiatan usaha;
   g. pemusnahan; dan/atau
   h. pengenaan daya paksa polisional.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
   a. secara bertahap; dan
   b. secara tidak bertahap.

Pasal 364

Pengenaan sanksi administratif sektor pertanian diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 365

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Paragraf 3

Sektor Kehutanan

Pasal 366

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor kehutanan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. penghentian . . .

c. penghentian layanan pemerintah;
d. denda administratif;
e. pembekuan PB; dan/atau
f. pencabutan PB.

Pasal 367

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 368

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 369

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor minyak dan gas bumi, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. penghentian usaha atau kegiatan;
   d. denda administratif;
   e. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
   f. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.
(2) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. kegiatan survei umum;

b. kegiatan . . .

b. kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;

c. kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon; dan

d. kegiatan penunjang usaha minyak dan gas bumi;

(3) Penghentian usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan bersamaan dengan pengenaan daya paksa polisional.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 370

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tanpa PB dan/atau PB UMKU, dikenai sanksi administratif dengan tahapan sebagai berikut:

a. penghentian usaha dan/atau kegiatan; dan

b. denda administratif.

(2) Penghentian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bersamaan dengan paksaan Pemerintah Pusat.

(3) Paksaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pembongkaran sarana dan fasilitas;

b. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;

c. paksaan badan; dan/atau

d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(4) Dalam melakukan paksaan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan aparat penegak hukum.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 371

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor ketenagalistrikan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan sementara;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 372

(1) Dalam hal ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 mengakibatkan timbulnya korban dan/atau kerusakan terhadap:

a. keselamatan;

b. kesehatan;

c. lingkungan;

d. pemanfaatan sumber daya; dan/atau

e. aspek lainnya,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau gubernur sesuai dengan wilayah kerjanya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Aspek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aspek keselamatan ketenagalistrikan.

Pasal 373

(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 huruf c dilakukan melalui mekanisme PNBP atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kantor perwakilan asing yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau standar, besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. sebesar . . .

a. sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak jika tidak membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki PB dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia;

b. sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak jika tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; dan

c. sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak jika tidak menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan.

Pasal 374

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor mineral dan batubara, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau

c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB yang melanggar kewajiban pembayaran pendapatan negara dan/atau pendapatan daerah dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 375

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi untuk kegiatan usaha panas bumi, bioenergi, dan konservasi energi, dikenai sanksi administratif.

Pasal . . .

Pasal 376

(1) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 terdiri atas sanksi administratif untuk:

a. kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; dan

b. kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung.

(2) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

(3) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan/atau

c. pencabutan PB UMKU.

Pasal 377

(1) Sanksi administratif untuk kegiatan usaha bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 terdiri atas sanksi administratif untuk:

a. kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*); dan

b. kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) dan/atau kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB.

Pasal . . .

Pasal 378

Sanksi administratif untuk kegiatan usaha konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375 berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutan PB.

Pasal 379

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsektor geologi, dikenai sanksi administratif.

Pasal 380

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379 berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan air tanah; dan/atau
c. pencabutan PB UMKU.

Pasal 381

Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1) huruf d, Pasal 370 ayat (1) huruf b, Pasal 371 huruf c, Pasal 374 ayat (2), Pasal 377 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 382

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 ayat (1), Pasal 370, Pasal 371, Pasal 374 ayat (1), Pasal 376 ayat (3), Pasal 377 ayat (2), Pasal 378, dan Pasal 380 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 5

Sektor Ketenaganukliran

Pasal 383

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; atau

c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 384

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang . . .

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

Pasal 385

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (8).

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 386

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (8) telah ditetapkan dan pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 387

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PB atau PB UMKU dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion diterbitkan, pemegang PB atau PB UMKU melaksanakan dekomisioning namun tidak sesuai program dekomisioning fasilitas radiasi pengion, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu atau peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB atau PB UMKU dekomisioning fasilitas radiasi pengion.

Pasal 388

(1) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB atau PB UMKU dekomisioning fasilitas radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 ayat (6).

(2) Selama penghentian sementara, pemegang PB atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas pengamanan zat radioaktif dan pengelolaan limbah radioaktif.

(3) Pemegang . . .

(3) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB atau PB UMKU paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB atau PB UMKU dekomisioning fasilitas radiasi pengion.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB atau PB UMKU.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB atau PB UMKU:

a. tidak menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB atau PB UMKU;

b. tetap melaksanakan kegiatan dekomisioning selama pembekuan PB atau PB UMKU; atau

c. tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan zat radioaktif dan/atau limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama pembekuan PB atau PB UMKU,

kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengambil alih dana jaminan finansial untuk melanjutkan kegiatan dekomisioning.

(6) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 389

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak PB atau PB UMKU dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk fasilitas pemanfaatan sumber radiasi pengion diterbitkan, pemegang PB atau PB UMKU tidak melaksanakan program dekomisioning fasilitas radiasi pengion, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu atau peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengambil alih dana jaminan finansial untuk melaksanakan kegiatan dekomisioning.

(7) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dekomisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 390

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan PB dan/atau PB UMKU;

d. penghentian sementara kegiatan usaha; atau

e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 391

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

Pasal . . .

Pasal 392

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan telah memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran melakukan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(3) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal . . .

Pasal 393

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (2) telah ditetapkan dan pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 394

(1) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU instalasi nuklir dan bahan nuklir berupa tidak menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu, pemegang PB dan/atau PB UMKU yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (6), dikenai denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti pembayaran denda administratif paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengenaan denda administratif oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

(3) Pembayaran atas sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggugurkan kewajiban pemegang PB dan/atau PB UMKU untuk menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu.

Pasal 395

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti denda administratif, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran melakukan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti pembekuan izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 396

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak PB dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk reaktor daya besar diterbitkan, pemegang PB melaksanakan dekomisioning namun tidak sesuai program dekomisioning, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang . . .

(2) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

Pasal 397

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 ayat (6) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menghentikan sementara kegiatan dekomisioning.

(2) Selama . . .

(2) Selama penghentian sementara, pemegang PB tetap bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif.

(3) Dalam hal selama penghentian sementara pemegang PB tidak memenuhi tanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang PB dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan finansial dekomisioning.

Pasal 398

(1) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak PB dekomisioning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) huruf c untuk reaktor daya besar diterbitkan, pemegang PB tidak melaksanakan program dekomisioning, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila . . .

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

Pasal 399

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (6) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, pemegang PB dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari dana jaminan finansial dekomisioning.

Pasal 400

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB dan/atau PB UMKU apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; atau

d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 401

(1) Pemegang PB dan/atau PB UMKU yang melanggar ketentuan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila . . .

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

Pasal 402

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU wajib menindaklanjuti pembayaran denda administratif paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian denda administratif.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga dan membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

Pasal . . .

Pasal 403

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti denda administratif, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir.

(2) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selama penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan/atau limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang PB dan/atau PB UMKU harus menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB dan/atau PB UMKU.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU telah menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB dan/atau PB UMKU.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB dan/atau PB UMKU tidak menindaklanjuti rekomendasi pembekuan PB dan/atau PB UMKU, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal . . .

Pasal 404

Dalam hal pembekuan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (1) telah ditetapkan dan pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 405

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif berupa:

a. pembekuan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion apabila terdapat kondisi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan;

b. pencabutan PB dan/atau PB UMKU pemanfaatan sumber radiasi pengion secara langsung apabila terjadi kecelakaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup;

c. pembekuan PB operasi reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor dan menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha apabila terjadi kecelakaan nuklir pada reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor yang memiliki konsekuensi dekomisioning; dan

d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir apabila terjadi kecelakaan selama kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.

(2) Pembekuan PB operasi reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku hingga kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan PB dekomisioning reaktor nuklir daya besar atau persetujuan dekomisioning.

Pasal . . .

Pasal 406

(1) Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU konstruksi fasilitas radiasi pengion, operasi fasilitas radiasi pengion, atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (4), Pasal 386, dan Pasal 405 ayat (1) huruf b telah ditetapkan, eks pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas pengamanan fasilitas radiasi, pengamanan zat radioaktif, dan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

(2) Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU konstruksi instalasi nuklir, operasi instalasi nuklir, ekspor, impor, pengalihan, dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (6), Pasal 393 dan Pasal 395 ayat (5) telah ditetapkan, eks pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

(3) Dalam hal pembekuan PB operasi reaktor nuklir atau instalasi nuklir nonreaktor dan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf c telah ditetapkan, pemegang PB tetap bertanggung jawab atas pengelolaan instalasi nuklir, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran.

(4) Dalam hal pencabutan PB dan/atau PB UMKU pertambangan bahan galian nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (6), Pasal 404 dan Pasal 405 ayat (1) huruf d telah ditetapkan, eks pemegang PB dan/atau PB UMKU tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan/atau limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 407

(1) Dalam hal pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 ayat (6), Pasal 404 dan Pasal 405 ayat (1) huruf d telah ditetapkan, eks pemegang PB wajib melaksanakan dekomisioning pertambangan setelah memperoleh persetujuan dekomisioning pertambangan.

(2) Eks pemegang PB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai dana jaminan pelaksanaan dekomisioning pertambangan.

(3) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil dari dana jaminan pelaksanaan dekomisioning pertambangan.

(4) Jika eks pemegang PB tidak melaksanakan dekomisioning pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan dekomisioning pertambangan dengan menggunakan dana jaminan dekomisioning pertambangan.

(5) Dalam hal dana jaminan dekomisioning pertambangan untuk menyelesaikan dekomisioning pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, kekurangan biaya untuk penyelesaian dekomisioning pertambangan menjadi tanggung jawab eks pemegang PB.

(6) Eks pemegang PB pada kegiatan penambangan mineral radioaktif dapat dikecualikan dari kewajiban pelaksanaan dekomisioning pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat pertimbangan sebagai berikut:

a. cadangan deposit bahan galian nuklir masih dapat dieksploitasi; atau

b. aspek keekonomian atau strategis.

(7) Dalam hal eks pemegang PB pada kegiatan penambangan mineral radioaktif tidak melaksanakan dekomisioning pertambangan karena pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat menyerahkan wilayah penugasan penambangan mineral radioaktif kepada badan usaha berbadan hukum lainnya.

Pasal . . .

Pasal 408

(1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak persetujuan dekomisioning pertambangan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1), eks pemegang PB melaksanakan dekomisioning namun tidak sesuai program dekomisioning, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kesatu.

(2) Eks pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) eks pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Eks pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) eks pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Eks pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) eks pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan keselamatan, keamanan, dan garda-aman nuklir.

(8) Apabila . . .

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) eks pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menghentikan sementara kegiatan dekomisioning.

(9) Selama penghentian sementara, eks pemegang PB tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan limbah radioaktif.

(10) Dalam hal selama penghentian sementara eks pemegang PB tidak memenuhi tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pertambangan, bahan galian nuklir, dan limbah radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, eks pemegang PB dikenai denda administratif paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan finansial dekomisioning pertambangan.

Pasal 409

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mengenakan sanksi administratif kepada pemegang PB apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan PB pendukung sektor ketenaganukliran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan PB; atau

c. pencabutan PB.

Pasal 410

(1) Pemegang PB yang melanggar ketentuan PB pendukung sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d, dikenai peringatan tertulis kesatu.

(2) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila . . .

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis kedua.

(4) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran memberikan peringatan tertulis ketiga.

(6) Pemegang PB wajib menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (6) pemegang PB telah menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan kegiatan usaha pendukung sektor ketenaganukliran.

Pasal 411

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 ayat (6) pemegang PB tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran membekukan PB pendukung sektor ketenaganukliran.

(2) Pemegang PB wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemegang PB wajib menindaklanjuti pembekuan PB paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB.

(4) Apabila . . .

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB telah menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB tidak menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB.

Pasal 412

Dalam hal pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (1) telah ditetapkan dan pemegang PB tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB.

Pasal 413

(1) Kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran dapat langsung menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan PB pendukung sektor ketenaganukliran dalam hal:

a. pemegang PB menyampaikan data yang tidak benar dalam proses permohonan PB berupa data persyaratan PB;

b. pemegang PB lembaga uji ketenaganukliran menyampaikan data hasil pengujian yang tidak sesuai;

c. pemegang PB lembaga pelatihan ketenaganukliran menyampaikan data hasil kelulusan yang tidak sesuai; dan/atau

d. tidak terpenuhinya lagi syarat PB.

(2) Pemegang PB wajib menghentikan sementara kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemegang PB wajib menindaklanjuti pembekuan PB paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pembekuan PB.

(4) Apabila . . .

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB telah menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran menerbitkan keputusan pemberlakuan kembali PB.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang PB tidak menindaklanjuti pembekuan PB, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran mencabut PB.

(6) Dalam hal pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dan pemegang PB tetap melaksanakan kegiatannya, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran langsung mencabut PB.

Pasal 414

(1) Pengenaan sanksi administratif sektor ketenaganukliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 sampai dengan Pasal 413 dilakukan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan ketenaganukliran.

Paragraf 6

Sektor Perindustrian

Pasal 415

(1) Setiap Pelaku Usaha yang telah memiliki PB namun tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan

b. pencabutan PB dan PB UMKU.

(2) Peringatan . . .

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha yang telah dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melakukan kegiatan usaha industri, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB dan PB UMKU.

Pasal 416

(1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki PB dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan

c. penutupan sementara

(2) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pembekuan PB; dan/atau

e. pencabutan PB.

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenai sepanjang diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 417

(1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.

(3) Nilai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kawasan industri ditetapkan berdasarkan hasil audit lembaga independen.

(4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima oleh Pelaku Usaha.

Pasal 418

(1) Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 ayat (4) dan tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak melakukan perbaikan berupa memiliki PB atau berlokasi di kawasan industri/kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.

(3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi:

a. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki PB dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh PB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal . . .

Pasal 419

(1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 ayat (3) huruf b Pelaku Usaha di sektor perindustrian tidak membayar denda administratif dan/atau tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PB.

(2) Pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 420

Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang telah membayar denda administratif dan berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan PB.

Pasal 421

Dalam hal Pelaku Usaha di sektor perindustrian sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 ayat (2) tidak membayar denda administratif dan/atau tidak berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 422

(1) Pengenaan sanksi administratif sektor perindustrian dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kepala Lembaga OSS, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal . . .

Pasal 423

(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan PB UMKU sektor Perindustrian dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pengenaan denda administratif;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB UMKU.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif PB UMKU sektor Perindustrian diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Paragraf 7

Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal

Pasal 424

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan tidak memiliki PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. paksaan pemerintah; dan/atau

d. denda administratif.

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai secara:

a. kumulatif atau bertahap; dan

b. tidak bertahap.

Pasal . . .

Pasal 425

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf a berisi perintah untuk segera memiliki PB dan/atau PB UMKU, dan melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha.

Pasal 426

(1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf b dikenai dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku Usaha untuk mengajukan permohonan PB dan/atau PB UMKU, dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha pada sektor perdagangan.

Pasal 427

Dalam hal Pelaku Usaha tetap tidak dapat menyelesaikan permohonan PB dan/atau PB UMKU dan menyesuaikan dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha, dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf c untuk memiliki PB dan/atau PB UMKU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 428

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf c berupa:

a. pengamanan barang;

b. penarikan barang dari distribusi;

c. penutupan lokasi usaha;

d. penutupan gudang;

e. penutupan . . .

e. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan secara daring; dan/atau

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan bidang usaha serta tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

(3) Dalam melakukan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan aparat penegak hukum.

Pasal 429

Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 430

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424 ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 431

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada sektor perdagangan dan metrologi legal, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan . . .

b. paksaan pemerintah;

c. denda administratif;

d. pembekuan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau

e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai secara:

a. kumulatif atau bertahap; dan

b. tidak bertahap.

Pasal 432

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf a dikenakan dengan ketentuan:

a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;

b. belum menimbulkan dampak berupa kerugian konsumen; dan/atau

c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.

Pasal 433

(1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf b, berupa:

a. penarikan barang dari distribusi;

b. penutupan lokasi usaha;

c. penutupan gudang;

d. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan secara daring; dan/atau

e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

(2) Paksaan . . .

(2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan bidang usaha serta tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.

(3) Dalam melakukan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan aparat penegak hukum.

(4) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif berupa pembekuan PB dan PB UMKU dan/atau pencabutan PB dan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 434

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Paragraf 8

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 435

(1) Setiap Pelaku Usaha di subsektor jasa konstruksi dikenai sanksi administratif atas pelanggaran:

a. pemenuhan persyaratan PB meliputi:

1. kemampuan badan usaha jasa konstruksi/sertifikat badan usaha bagi badan usaha jasa konstruksi;

2. kompetensi . . .

2. kompetensi tenaga kerja konstruksi/sertifikat kompetensi kerja konstruksi bagi usaha orang perseorangan;
3. kemampuan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi/lisensi lembaga sertifikasi badan usaha jasa konstruksi bagi lembaga sertifikasi badan usaha; atau
4. kemampuan sertifikasi profesi jasa konstruksi/lisensi lembaga sertifikasi profesi jasa konstruksi bagi lembaga sertifikasi profesi,

dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat dan/atau habis masa berlaku.

b. pemenuhan kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi;
c. pemenuhan persyaratan dan kewajiban khusus bagi badan usaha jasa konstruksi Penanaman Modal Asing atau kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; dan
d. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pencabutan PB; dan/atau
e. pencantuman daftar hitam.

(3) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara kumulatif atau bertahap.

(4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 436

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(2) Pengenaan . . .

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural di bawah kewenangannya.

Pasal 437

(1) Pemegang PB sektor pekerjaan umum subsektor sumber daya air dilarang menghalangi dan harus membuka akses bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan tugas pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air.

(2) Pemegang PB sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air yang melanggar ketentuan PB dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pembekuan PB;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB.

Pasal 438

(1) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dilarang:

a. menyewakan dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air kepada pihak lain;

b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air;

c. melakukan penyalahgunaan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air.

d. menguasai sumber air; dan/atau

e. menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang digunakan.

(2) Selain . . .

(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dilarang menghalangi dan harus membuka akses bagi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan tugas pengelolaan sumber daya air, termasuk pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air.

(3) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air yang melanggar ketentuan PB dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pembekuan PB UMKU;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB UMKU.

Pasal 439

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 dan Pasal 438 diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 440

PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dapat langsung dilakukan pencabutan dalam hal:

a. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air mengajukan permohonan pencabutan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air;

b. pemegang . . .

b. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air menyampaikan dokumen atau kelengkapan persyaratan yang tidak benar atau tidak sah;

c. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air dan tidak dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan konstruksi; atau

d. pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor sumber daya air telah melakukan kegiatan konstruksi tetapi bangunan tidak difungsikan selama 2 (dua) tahun setelah selesai dibangun.

Pasal 441

(1) Pemegang PB dan PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor bina marga jalan tol yang melanggar ketentuan PB dan PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB dan PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

(1) Pemegang PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor bina marga jalan non-tol yang melanggar ketentuan PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB UMKU.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB UMKU sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 443

(1) Pemegang PB untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang melanggar ketentuan PB dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pembekuan PB; dan/atau

d. pencabutan PB.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 444

(1) Pemegang PB sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat subsektor pengembangan perumahan yang melanggar ketentuan PB dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pembekuan PB; dan/atau

d. pencabutan PB.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemberi PB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 445

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 ayat (2), Pasal 437 ayat (2), Pasal 438 ayat (3), Pasal 441 ayat (1), Pasal 442 ayat (1), Pasal 443 ayat (1), dan Pasal 444 ayat (1) diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
b. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Sektor Transportasi

Pasal 446

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor transportasi, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan;
   b. pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU;
   c. denda administratif;
   d. pengenaan daya paksa polisional;
   e. pencabutan sertifikat; dan/atau
   f. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

Pasal 447

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 dapat dilakukan secara tidak bertahap atau secara bertahap.
(2) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran tersebut dapat secara langsung membahayakan keselamatan dan keamanan transportasi.

(3) Pengenaan . . .

(3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU dan/atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf b dan huruf f.

Pasal 448

(1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf a terdiri dari peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti peringatan sampai berakhir jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf b dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan sanksi administratif berupa pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf f.

Pasal 449

(1) Sanksi denda administratif dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan sertifikat, PB, dan/atau PB UMKU, dan pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.

(3) Besaran tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 450

(1) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) huruf d dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan berpotensi atau menimbulkan:

a. kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

b. korban manusia atau kerugian harta benda; dan/atau

c. menimbulkan kecelakaan.

(2) Jenis sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penghentian sementara kegiatan;

b. penghentian sementara pelayanan umum;

c. penyegelan;

d. larangan beroperasi;

e. penutupan lokasi;

f. pembongkaran bangunan; dan/atau

g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kerusakan terhadap keselamatan dan keamanan transportasi dan/atau lingkungan.

Pasal 451

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Paragraf . . .

Paragraf 10

Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan

Pasal 452

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kesehatan, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha;
   c. pengenaan denda administratif; dan/atau
   d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.
(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kegiatan usaha subsektor kesehatan untuk kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga dikenai sanksi administratif berupa daya paksa polisional meliputi:
   a. penarikan dari peredaran;
   b. pemusnahan produk;
   c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya;
   d. penutupan akses permohonan PB dan/atau PB UMKU; dan/atau
   e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau untuk pengamanan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tidak secara berjenjang.

Pasal 453

Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (1) huruf a dikenai paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) Hari.

Pasal 454

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan pelanggaran yang membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 ayat (1) huruf b dan huruf d dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal . . .

Pasal 455

(1) Pengenaan sanksi administratif harus berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap standar pelaksanaan kegiatan usaha.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pihak yang dikenai sanksi administratif paling lambat 5 (lima) Hari sejak ditetapkan.

(4) Dalam pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat membentuk tim *ad hoc* untuk membantu dalam melakukan verifikasi, klarifikasi, dan kajian terhadap pelanggaran standar pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan laporan hasil Pengawasan.

Pasal 456

(1) Pelaku Usaha yang mendapat sanksi administratif berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang bersangkutan.

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas alasan yang jelas dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya penetapan sanksi administratif oleh yang bersangkutan.

(4) Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang mengenakan sanksi administratif harus melakukan pemeriksaan ulang.

(5) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti pemohon tidak bersalah, maka terhadap dirinya dilakukan pemulihan nama baik.

Pasal . . .

Pasal 457

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 458

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsektor obat dan makanan, dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan;
   b. penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan PB UMKU;
   c. pengenaan denda administratif;
   d. pengenaan daya paksa polisional;
   e. pembatalan PB UMKU; dan/atau
   f. pencabutan PB UMKU.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga penerbit PB untuk melakukan:
   a. penghentian sementara kegiatan usaha melalui pembekuan PB; dan/atau
   b. pencabutan PB.

(3) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. penarikan dari peredaran;
   b. pemusnahan;
   c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan obat dan makanan secara daring;
   d. penutupan akses permohonan PB UMKU; dan/atau
   e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.

(4) Sanksi . . .

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 459

(1) Pelaku Usaha dapat mengajukan aktivasi kembali PB UMKU atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atas pengajuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan memberikan persetujuan atau penolakan yang disampaikan melalui Sistem OSS.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha mengabaikan tindakan pembekuan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (1) huruf b, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan melakukan pencabutan PB UMKU melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 460

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458 ayat (1) dilaksanakan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 461

(1) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada subsektor pangan segar, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pengenaan denda administratif;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB UMKU.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 dikenai secara kumulatif atau bertahap berdasarkan tingkat Risiko pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 462

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha paling banyak 2 (dua) kali.

(2) Jangka waktu antara peringatan kesatu dan peringatan kedua dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya.

(5) Pengenaan . . .

(5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha apabila:

a. tidak melaksanakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

b. menyebabkan luka berat; atau

c. membahayakan nyawa orang.

(6) Sanksi administratif berupa pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. penarikan produk dari peredaran;

b. pemusnahan;

c. penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan pangan secara daring:

d. penutupan akses permohonan PB UMKU; dan/atau

e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.

(7) Penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dapat disertai penghentian sementara dari kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya, atau pencabutan PB UMKU;

b. dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya, maupun pencabutan PB UMKU; dan/atau

c. penarikan produk dari peredaran dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(8) Sanksi administratif berupa pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 ayat (1) huruf e dilakukan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(9) Sanksi . . .

(9) Sanksi administratif pencabutan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikenakan sendiri atau bersama-sama dengan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 463

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461 dilakukan oleh:

a. kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan;

b. gubernur;

c. bupati/wali kota;

d. kepala Administrator KEK; atau

e. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Paragraf 11

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 464

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada subsektor pendidikan untuk kegiatan usaha penerbitan buku, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penarikan produk dari peredaran;

c. pembekuan PB; dan/atau

d. pencabutan PB.

(2) Setiap . . .

(2) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor kebudayaan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penutupan sementara;

d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

e. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(3) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk:

a. penghentian pembuatan film;

b. penghentian pengedaran film;

c. penghentian pertunjukan film;

d. penghentian penjualan film; dan/atau

e. penghentian penyewaan film.

Pasal 465

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 diberikan oleh:

a. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah;

b. peraturan . . .

b. peraturan menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Sektor Pariwisata

Pasal 466

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor pariwisata, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan usaha;

c. pengenaan denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. secara bertahap; dan

b. secara tidak bertahap.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Sanksi . . .

(6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Pasal 467

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Paragraf 13

Sektor Keagamaan

Pasal 468

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan;

d. paksaan pemerintah;

e. pembekuan PB; dan/atau

f. pencabutan PB.

Pasal . . .

Pasal 469

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf a, dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. tidak memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus;

b. tidak memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus;

c. tidak memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan sesuai dengan perjanjian tertulis;

d. tidak memberangkatkan penanggung jawab penyelenggara ibadah haji khusus, petugas kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan pelayanan haji khusus;

e. tidak memfasilitasi pemindahan calon jemaah haji khusus kepada penyelenggara ibadah haji khusus lain atas permohonan jemaah;

f. tidak melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi;

g. tidak melaporkan keberangkatan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah;

h. tidak melakukan pembaharuan perubahan pemegang saham, komisaris, direksi, alamat perubahan penyelenggara ibadah haji khusus, dan pembukaan kantor cabang pada Sistem OSS; dan/atau

i. tidak melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b, dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan . . .

a. melakukan pelanggaran kedua kali atas sanksi teguran tertulis;

b. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;

c. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus; dan/atau

d. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf c dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(4) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf d dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah haji khusus.

(5) Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf e dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi denda administratif;

c. tidak memberangkatkan, melayani, dan memulangkan jemaah haji khusus sesuai dengan perjanjian;

d. gagal . . .

d. gagal memberangkatkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

e. tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah haji khusus melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;

f. gagal memulangkan jemaah haji khusus melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam; dan/atau

g. gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah haji visa mujamalah.

(6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf f dikenakan kepada penyelenggara ibadah haji khusus yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan keempat kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan ketiga kali atas sanksi denda administratif;

c. melakukan pengulangan kedua kali atas sanksi pembekuan PB; dan/atau

d. jika penyelenggara ibadah haji khusus melakukan pengulangan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan, menelantarkan, dan gagal memulangkan jemaah haji khusus.

Pasal 470

(1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf a dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. tidak menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jemaah umrah;

b. tidak memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan jemaah umrah;

c. tidak . . .

c. tidak menyampaikan rencana perjalanan umrah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama secara tertulis sebelum keberangkatan;

d. tidak melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;

e. tidak membuat laporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah tiba kembali di tanah air;

f. tidak mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi;

g. tidak mengikuti prinsip syariat;

h. tidak melaporkan pembukaan rekening penampungan bagi dana jemaah untuk kegiatan umrah;

i. tidak melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke rekening penampungan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah pada bank penerima setoran;

j. tidak melaporkan jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi;

k. tidak melaporkan paket di bawah harga referensi; dan/atau

l. tidak melakukan pembaharuan perubahan pemegang saham, komisaris, direksi, alamat perubahan penyelenggara perjalanan ibadah umrah, dan pembukaan kantor cabang pada Sistem OSS.

(2) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi teguran tertulis;

b. tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi;

c. tidak memberangkatkan jemaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan;

d. meminjamkan . . .

d. meminjamkan legalitas PB kepada biro perjalanan yang tidak memiliki PB sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;

e. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

f. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

g. gagal memulangkan jemaah umrah.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf c dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(4) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf d dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. gagal memberangkatkan jemaah umrah;

b. tidak menyediakan layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah; dan/atau

c. gagal memulangkan jemaah umrah.

(5) Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf e dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi denda administratif;

c. tidak memberangkatkan dan memulangkan jemaah umrah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi;

d. tidak . . .

d. tidak membuka rekening penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah umrah untuk kegiatan umrah;

e. gagal memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai perjanjian tertulis;

f. gagal memberangkatkan jemaah melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

g. tidak mampu menyediakan akomodasi, transportasi, dan konsumsi kepada jemaah umrah melewati batas waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan/atau

h. gagal memulangkan jemaah umrah melewati batas waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

(6) Sanksi administratif pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf f dikenakan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengulangan pelanggaran keempat kali atas sanksi teguran tertulis;

b. melakukan pengulangan pelanggaran ketiga kali atas sanksi denda administratif;

c. melakukan pengulangan pelanggaran kedua kali atas sanksi pembekuan PB; dan/atau

d. melakukan pengulangan pelanggaran berupa gagal memberangkatkan, menelantarkan, dan gagal memulangkan jemaah umrah.

Pasal 471

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 dan Pasal 470 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, besaran denda, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Paragraf . . .

Paragraf 14

Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Pasal 472

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada subsektor pos, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pengenaan daya paksa polisional;
e. pencabutan layanan; dan/atau
f. pencabutan PB.

Pasal 473

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU pada subsektor telekomunikasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. pengenaan denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pemutusan akses;
e. pencabutan penetapan penomoran;
f. pengenaan daya paksa polisional;
g. pencabutan layanan; dan/atau
h. pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal . . .

Pasal 474

(1) Setiap lembaga penyiaran atau penyelenggara multipleksing penyiaran yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada subsektor penyelenggaraan penyiaran, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan usaha;

d. pengenaan daya paksa polisional;

e. pencabutan layanan; dan/atau

f. pencabutan PB.

(2) Setiap lembaga penyiaran yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB yang terkait dengan isi siaran, dikenai sanksi administratif oleh Komisi Penyiaran Indonesia berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan denda administratif;

c. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau

e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran atas PB yang terkait dengan pelanggaran isi siaran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi oleh lembaga penyiaran.

Pasal . . .

Pasal 475

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Pasal 473, dan Pasal 474 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tidak bertahap atau secara bertahap.

Pasal 476

(1) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 dilakukan apabila pelanggaran tersebut membahayakan keamanan negara dan/atau berpotensi merugikan negara.

(2) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 477

(1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf a, Pasal 473 huruf a, dan Pasal 474 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri dari teguran tertulis pertama sampai dengan teguran tertulis ketiga.

(2) Jangka waktu antar teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 7 (tujuh) Hari dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari dengan mempertimbangkan upaya Pelaku Usaha untuk memenuhi PB dan/atau PB UMKU.

Pasal 478

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf b, Pasal 473 huruf b, dan Pasal 474 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada Pengawasan.

(2) Besaran denda administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal . . .

Pasal 479

Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf c, Pasal 473 huruf c, dan Pasal 474 ayat (1) huruf c dikenakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 480

Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf d, Pasal 473 huruf f, dan Pasal 474 ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:

a. meminta identitas pelaku pelanggaran dan mendokumentasikan dalam bentuk digital;
b. memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan usaha;
c. meminta keterangan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran;
d. memanggil Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran; dan/atau
e. penyegelan sementara alat dan/atau perangkat penunjang yang digunakan untuk kegiatan usaha.

Pasal 481

Pencabutan PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf f, Pasal 473 huruf h, dan Pasal 474 ayat (1) huruf f diberikan sebagai tahap paling akhir dalam tahapan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 482

(1) Direksi, pengurus, perorangan, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha dapat ditetapkan dalam daftar hitam dalam hal Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan layanan dan/atau pencabutan PB.
(2) Pihak yang ditetapkan dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang terlibat dalam kegiatan usaha yang bersangkutan.

(3) Pihak . . .

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan dari daftar hitam setelah:

a. 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam daftar hitam; dan/atau

b. kewajiban yang menjadi piutang negara dipenuhi.

Pasal 483

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 481 dan ketentuan lebih lanjut mengenai daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2) ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Pasal 484

(1) Pemegang hak labuh satelit yang menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan PB UMKU persyaratan hak labuh satelit dikenai sanksi administratif berupa pencabutan hak labuh satelit yang diikuti dengan pencabutan izin stasiun radio.

(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang hak labuh satelit yang menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 485

Hak labuh satelit dapat dicabut dalam hal:

a. satelit asing yang digunakan dinyatakan tidak dapat beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

b. tidak . . .

b. tidak memiliki izin stasiun radio dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun dalam periode masa berlaku hak labuh satelit; dan/atau

c. dalam hal terdapat kepentingan pertahanan dan/atau keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (*safety and distress*), pencarian dan pertolongan (*search and rescue*/SAR), kesejahteraan masyarakat, dan/atau kepentingan umum.

Pasal 486

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa Izin pita frekuensi radio, Izin stasiun radio, dan/atau persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan

c. pengenaan daya paksa polisional.

(2) Sanksi administratif pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk:

a. penghentian operasional pemancaran spektrum frekuensi radio; dan/atau

b. penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk pemancaran spektrum frekuensi radio.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai secara kumulatif.

(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin pita frekuensi radio, Izin stasiun radio, dan/atau persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 487

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk pelanggaran atas kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, kecuali untuk kewajiban yang telah diatur jenis sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin pita frekuensi radio belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, dikenai sanksi denda administratif.

(5) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender, pemegang Izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi dan/atau belum memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa diumumkan melalui:

a. media cetak; dan/atau

b. media elektronik.

Pasal 488

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio secara berkala, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian . . .

b. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau

c. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin pita frekuensi radio belum menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:

a. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio; dan

b. diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam hal pemegang Izin pita frekuensi radio telah menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio.

Pasal 489

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin pita frekuensi radio sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif keterlambatan pembayaran PNBP yang terutang;

c. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio; dan/atau

e. pencabutan izin pita frekuensi radio.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan bersamaan dengan teguran tertulis pertama.

(5) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua, pemegang Izin pita frekuensi radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin pita frekuensi radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan teguran tertulis ketiga.

(6) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga, pemegang Izin pita frekuensi radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin pita frekuensi radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 490

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menggunakan pita frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan

c. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan peruntukan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut jika pemegang Izin pita frekuensi radio telah menyesuaikan penggunaan pita frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Pasal . . .

Pasal 491

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dalam penggunaan pita frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicabut jika pemegang Izin pita frekuensi radio dalam penggunaan pita frekuensi radionya tidak lagi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(4) Dalam hal penggunaan pita frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan negara dan/atau keselamatan jiwa manusia, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 492

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio; dan/atau

d. pencabutan Izin pita frekuensi radio.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara kumulatif.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang Izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c belum mengajukan permohonan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, melunasi denda administratif, dan/atau menghentikan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 493

(1) Setiap pemegang Izin pita frekuensi radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;

d. penghentian sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio; dan/atau

e. pencabutan Izin pita frekuensi radio.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan secara kumulatif.

(3) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kalender pemegang Izin pita frekuensi radio yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d belum mengajukan permohonan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, melunasi denda administratif, dan/atau menghentikan sementara operasional penggunaan pita frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal . . .

Pasal 494

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan Izin stasiun radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;

c. penghentian sementara operasional pemancaran spektrum frekuensi radio; dan/atau

d. pencabutan izin stasiun radio.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif.

(3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemegang Izin stasiun radio tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional pemancaran spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang Izin stasiun radio tidak memberikan bukti mengenai kebenaran data dan/atau validitas dokumen, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin stasiun radio yang menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 495

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin stasiun radio sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .

a. teguran tertulis;
b. denda administratif keterlambatan pembayaran PNBP yang terutang;
c. penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio;
d. penghentian sementara operasional stasiun radio; dan/atau
e. pencabutan Izin stasiun radio.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari.

(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian layanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan bersamaan dengan teguran tertulis kesatu.

(5) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis kedua pemegang Izin stasiun radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin stasiun radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang pengenaannya bersamaan dengan teguran tertulis ketiga.

(6) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran tertulis ketiga pemegang Izin stasiun radio belum melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk Izin stasiun radio dan/atau denda administratif, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 496

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio untuk dinas radio komunikasi tertentu yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;

b. penghentian . . .

b. penghentian sementara operasional stasiun radio; dan/atau

c. pencabutan Izin stasiun radio.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(3) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis diberikan, pemegang izin stasiun radio tetap tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Jika dalam waktu setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, pemegang Izin stasiun radio tetap tidak menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio.

Pasal 497

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menggunakan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau mengoperasikan stasiun radio tidak sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam Izin stasiun radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan

c. penghentian sementara operasional stasiun radio yang tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau tidak sesuai dengan parameter teknis.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dicabut jika pemegang Izin stasiun radio telah menyesuaikan penggunaan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya dan/atau sesuai parameter teknisnya.

Pasal . . .

Pasal 498

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) dalam penggunaan frekuensi radio, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional stasiun radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicabut jika pemegang Izin stasiun radio dalam penggunaan frekuensi radionya tidak lagi menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*).

(4) Dalam hal penggunaan frekuensi radio yang menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*), berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan negara dan/atau keselamatan jiwa manusia, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 499

(1) Setiap pemegang Izin stasiun radio angkasa yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang tidak terdaftar; dan/atau

d. pencabutan Izin stasiun radio angkasa.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal sampai dengan batas waktu teguran kesatu, pemegang Izin stasiun radio angkasa belum mendaftarkan stasiun bumi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan

b. penghentian sementara operasional stasiun bumi yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemegang Izin stasiun radio angkasa belum mendaftarkan stasiun bumi, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin stasiun radio angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 500

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pengenaan daya paksa polisional berupa penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

c. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat; dan/atau

d. denda administratif.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan secara kumulatif atau alternatif.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 501

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimiliki, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat;

c. pencabutan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

d. denda administratif; dan/atau

e. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan secara kumulatif.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e.

(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang membuat, merakit, dan/atau memasukkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimiliki dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 502

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. pengenaan daya paksa polisional berupa penyegelan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi; dan/atau

d. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara kumulatif.

(4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan dan/atau menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau tidak memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 503

(1) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan menyampaikan data yang tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dalam pemenuhan persyaratan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, dikenai sanksi administratif berupa:

a. pencabutan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi;

b. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 2 (dua) tahun; dan

c. penarikan kembali seluruh alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diperdagangkan dan/atau digunakan oleh masyarakat.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha yang menyampaikan data tidak benar dan/atau dokumen yang tidak valid dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 504

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan pembayaran setelah terbitnya surat pemberitahuan pembayaran sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

Pasal 505

(1) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak melaporkan bukti pemasangan label alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

(2) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan.

(3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(4) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah teguran tertulis ketiga dikenakan, pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi tetap tidak memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan dan/atau dipergunakan, dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal . . .

Pasal 506

(1) Setiap pemegang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan tidak mengajukan perubahan data administrasi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau

b. penghentian layanan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 507

Pelaku Usaha yang sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasinya dicabut, diumumkan melalui:

a. media cetak; dan/atau

b. media elektronik.

Pasal 508

(1) Dalam kondisi tertentu, alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, dan/atau perangkat pendukung lainnya yang merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Pasal 501, dan/atau Pasal 502 dapat dilakukan pemusnahan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu alat telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, dan/atau perangkat pendukung lainnya:

a. membahayakan keselamatan jiwa manusia;

b. tidak diketahui kepemilikannya; dan/atau

c. telah diserahkan oleh pemilik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk dimusnahkan.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 509

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf b, Pasal 473 huruf b, Pasal 474 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 486 ayat (1) huruf b, Pasal 487 ayat (1) huruf b, Pasal 490 ayat (1) huruf b, Pasal 492 ayat (1) huruf b, Pasal 493 ayat (1) huruf b, Pasal 497 ayat (1) huruf b, Pasal 499 ayat (1) huruf b, Pasal 500 ayat (1) huruf d, Pasal 501 ayat (1) huruf d, dan Pasal 502 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.

(3) Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poin.

Pasal 510

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Pasal 473, Pasal 474 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, Pasal 482 ayat (1), Pasal 484 ayat (1), Pasal 486 ayat (1), Pasal 487 ayat (1), Pasal 488 ayat (1), Pasal 489 ayat (1), Pasal 490 ayat (1), Pasal 491 ayat (1), Pasal 492 ayat (1), Pasal 493 ayat (1), Pasal 494 ayat (1), Pasal 495 ayat (1), Pasal 496 ayat (1), Pasal 497 ayat (1), Pasal 498 ayat (1), Pasal 499 ayat (1), Pasal 500 ayat (1), Pasal 501 ayat (1), Pasal 502 ayat (1), Pasal 503 ayat (1), Pasal 504, Pasal 505 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 506 ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf . . .

Paragraf 15

Sektor Pertahanan dan Keamanan

Pasal 511

(1) Pelaku Usaha pada subsektor industri pertahanan yang memperoleh:
   a. penetapan industri pertahanan;
   b. sertifikasi kelaikan fasilitas produksi atau fasilitas pemeliharaan pertahanan;
   c. Izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan;
   d. Izin ekspor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris;
   e. Izin impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris; dan/atau
   f. penetapan badan usaha di bidang industri bahan peledak,

   yang tidak memenuhi dan/atau melanggar PB pada subsektor industri pertahanan dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis pertama;
   b. peringatan tertulis kedua;
   c. pencabutan penetapan sebagai industri pertahanan;
   d. pencabutan sertifikat kelaikan fasilitas produksi atau fasilitas pemeliharaan pertahanan;
   e. pencabutan Izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan; dan/atau
   f. pencabutan penetapan badan usaha di bidang industri bahan peledak.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha sejak diketahuinya pelanggaran.

(4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis pertama tidak diindahkan.

(5) Sanksi . . .

(5) Sanksi administratif pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan kepada Pelaku Usaha setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua tidak diindahkan.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengan proses hukum perdata dan/atau hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 512

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dapat memberikan sanksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 ayat (2) dengan memasukkan Pelaku Usaha ke dalam daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pelaku Usaha setelah tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua tidak diindahkan.

(3) Pelaku Usaha yang dikenai daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan berusaha di bidang industri pertahanan dan badan usaha di bidang industri bahan peledak selama 2 (dua) tahun sejak daftar hitam dikeluarkan.

Pasal 513

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 ayat (2) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistem OSS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal . . .

Pasal 514

(1) Badan usaha jasa pengamanan yang tidak melaksanakan ketentuan PB subsektor keamanan dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan PB; dan/atau

c. pencabutan PB.

(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila badan usaha jasa pengamanan tidak membuat laporan setiap semester selama 2 (dua) kali berturut-turut.

(3) Sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila badan usaha jasa pengamanan tidak memperpanjang PB dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa berlaku PB.

(4) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penetapan sanksi administratif berupa pembekuan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha jasa pengamanan tidak mengajukan perpanjangan PB.

Pasal 515

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514 ayat (1) diberikan oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui laman Sistem OSS.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf . . .

Paragraf 16

Sektor Ekonomi Kreatif

Pasal 516

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB di sektor ekonomi kreatif, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan berusaha;

c. pengenaan denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. secara bertahap; dan

b. secara tidak bertahap.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Sanksi administratif berupa pencabutan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

Pasal . . .

Pasal 517

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516 ayat (1) diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Paragraf 17

Sektor Informasi Geospasial

Pasal 518

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor informasi geospasial, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara;

c. pengenaan denda administratif; dan/atau

d. pencabutan PB.

Pasal 519

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 diberikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Paragraf . . .

Paragraf 18
Sektor Ketenagakerjaan

Pasal 520

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor ketenagakerjaan, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pencabutan PB; dan/atau
e. pengenaan denda administratif.

Pasal 521

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU pada sektor ketenagakerjaan, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
c. pencabutan PB UMKU.

Pasal 522

Pengenaan sanksi administratif PB dan/atau PB UMKU sektor ketenagakerjaan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, dan kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 523

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif PB dan/atau PB UMKU, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam:

a. peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan

b. peraturan . . .

b. peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan pekerja migran Indonesia dan tugas pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia,

sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19
Sektor Perkoperasian

Pasal 524

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor perkoperasian, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. penurunan penilaian kesehatan;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. pengenaan denda administratif; dan/atau
e. pencabutan PB.

(2) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disertai dengan usulan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan/atau pengawas.

Pasal 525

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif PB, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

Paragraf 20
Sektor Penanaman Modal

Pasal 526

(1) Setiap Pelaku Usaha sektor penanaman modal yang melanggar ketentuan PB, dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan . . .

b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha;
d. denda administratif;
e. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
f. pencabutan PB.

(2) Pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

(3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan:
a. secara bertahap; dan
b. secara tidak bertahap.

Pasal 527

Pengenaan sanksi administratif sektor Penanaman Modal diberikan oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 528

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Paragraf 21

Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pasal 529

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things*, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .

a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencabutan PB.

Pasal 530

(1) Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* yang tidak melakukan kegiatan konsultasi, perancangan, dan pembuatan solusi sistem terintegrasi *internet of things* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha aktivitas konsultasi dan perancangan *internet of things* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 531

(1) Setiap penyelenggara sertifikasi elektronik yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara;

c. pemutusan akses; dan/atau

d. dikeluarkan dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik yang mendapat pengakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penghentian . . .

a. penghentian sementara penyelenggaraan pendaftaran pemilik sertifikat elektronik; dan/atau

b. penghentian sementara kegiatan penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

(3) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui surat peringatan pertama apabila penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia tidak memenuhi kewajiban:

a. memperoleh pengakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dengan berinduk kepada penyelenggara sertifikasi elektronik induk;

b. berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia dalam hal menyelenggarakan sertifikasi elektronik dan menyediakan layanan yang menggunakan sertifikat elektronik di Indonesia;

c. memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik;

d. melakukan validasi sertifikat elektronik;

e. membuat daftar sertifikat elektronik yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi sertifikat elektronik pemilik sertifikat elektronik (*validation authority*);

f. memperbarui tanda lulus penyelenggara sertifikasi elektronik yang habis masa berlakunya;

g. mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas pemilik sertifikat elektronik;

h. memberitahukan pernyataan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification practice statement*) penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya kepada pihak lain yang menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia;

i. mempublikasikan pernyataan penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification practice statement*) penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya di situs resmi layanannya;

j. memberitahukan kontrak berlangganan (*subscriber agreement*) dan kebijakan privasi penyelenggaraan sertifikasi elektroniknya kepada calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik;

k. memberikan . . .

k. memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau pemilik sertifikat elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan sertifikat elektronik;

l. menjamin kerugian akibat kegagalan layanan penyelenggaraan sertifikasi elektronik, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. meminta persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dalam hal terjadi perubahan layanan penyelenggara sertifikasi elektronik yang berbeda dengan ketentuan dalam kebijakan sertifikat elektronik (*certificate policy*) penyelenggara sertifikasi elektronik induk Indonesia;

n. melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftarannya (*registration authority*);

o. memelihara dokumen arsip secara sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan/atau elektronik (*electronic-based*);

p. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan atau sewaktu-waktu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

q. menerbitkan sertifikat elektronik dalam hal permohonan untuk memiliki sertifikat elektronik memenuhi standar verifikasi identitas yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;

r. mengawasi, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan layanan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik;

s. mengembangkan . . .

s. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan penanda waktu elektronik dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan penanda waktu elektronik;

t. mengarsipkan informasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tersertifikasi;

u. menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari log operasional layanan pengiriman elektronik tercatat, log verifikasi identitas dari pengirim dan penerima, dan log komunikasi dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tersertifikasi;

v. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan pengiriman elektronik tercatat dalam hal menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat; dan/atau

w. menyetorkan setiap pendapatan yang diperolehnya dari biaya layanan penggunaan sertifikat elektronik yang dihitung dari persentase pendapatan kepada negara.

(4) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui surat peringatan kedua dalam hal surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan pertama diterima oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut.

(5) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis melalui surat peringatan ketiga dalam hal surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan kedua diterima oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut.

(6) Penyelenggara . . .

(6) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai evaluasi menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, manajemen, maupun operasional dalam hal surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan ketiga diterima oleh penyelenggara sertifikasi elektronik tersebut.

(7) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara penyelenggaraan pendaftaran pemilik sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila penyelenggara sertifikasi elektronik tidak melakukan kewajiban:

a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan penerbitan sertifikat elektronik;

b. melakukan pemeriksaan ulang dalam hal terdapat permohonan perpanjangan, pemblokiran, dan/atau pencabutan sertifikat elektronik oleh pemohon, serta permohonan penerbitan sertifikat elektronik oleh pemohon sedangkan pada saat permohonan diajukan sertifikat elektronik sebelumnya sudah pernah dicabut atau masa berlakunya sudah berakhir;

c. mengawasi, mengembangkan, mengimplementasikan, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik jika menyelenggarakan layanan preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik; dan/atau

d. mengetahui orang perseorangan sebagai penanggung jawab dari segel elektronik jika menyelenggarakan layanan segel elektronik.

(8) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila tidak melakukan kewajiban:

a. dalam menyelenggarakan layanan penanda waktu elektronik tersertifikasi, penyelenggara sertifikasi elektronik menggunakan perangkat penanda waktu yang memenuhi ketentuan:

1. memelihara . . .

1. memelihara perangkat penanda waktu;
2. melindungi waktu perangkat penanda waktu dari segala ancaman yang menyebabkan perubahan waktu; dan
3. mendeteksi jika waktu yang terindikasi pada perangkat penanda waktu bergeser atau tidak sinkron lebih dari 1 (satu) detik dengan tanda waktu nasional.

b. menghentikan proses pemberian layanan penanda waktu elektronik tersertifikasi melalui perangkat penanda waktu, dalam hal waktu yang terindikasi pada perangkat penanda waktu elektronik bergeser atau tidak sinkron sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3;

c. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan penanda waktu elektronik;

d. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan penanda waktu elektronik dalam hal penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia menyelenggarakan layanan penanda waktu elektronik;

e. dalam menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi mulai dari pengiriman sampai dengan penerimaan, penyelenggara sertifikasi elektronik menjamin ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan dari:
   1. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditransmisikan;
   2. identitas pengirim dan penerima mulai dari pengiriman sampai dengan penerimaan; dan
   3. menjamin akurasi tanggal dan waktu pengiriman dan penerimaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mulai dari pengiriman sampai dengan penerimaan;

f. dalam menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi, penyelenggara sertifikasi elektronik mengarsipkan paling sedikit:
   1. data identifikasi pengirim dan penerima;

2. data . . .

2. data autentikasi pengirim dan penerima;
3. bukti bahwa identitas pengirim telah diverifikasi;
4. log operasional layanan pengiriman elektronik tercatat, log verifikasi identitas dari pengirim dan penerima, dan log komunikasi;
5. bukti verifikasi identitas penerima sebelum pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
6. bukti bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan tidak berubah selama proses pengiriman;
7. nilai *hash* dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirim; dan
8. token penanda waktu yang terkait dengan tanggal dan waktu pengiriman, penerimaan, dan perubahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

g. menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari log operasional layanan pengiriman elektronik tercatat, log verifikasi identitas dari pengirim dan penerima, dan log komunikasi dalam menyelenggarakan layanan pengiriman elektronik tercatat tersertifikasi; dan/atau

h. mengembangkan, mengimplementasikan, mengawasi, dan memperbarui dokumentasi terkait penyelenggaraan pengiriman elektronik tercatat.

(9) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila tidak melakukan kewajiban memperoleh pengakuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dengan berinduk kepada penyelenggara sertifikasi elektronik induk yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

(10) Penyelenggara sertifikasi elektronik dikenai sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

a. tidak . . .

a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling lambat 7 (tujuh) Hari;

b. tidak memenuhi kewajiban dalam surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat peringatan ketiga diterima;

c. atas permintaan penyelenggara sertifikasi elektronik sendiri; dan/atau

d. adanya putusan pengadilan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 532

(1) Setiap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara;

d. pemutusan akses melalui pemblokiran akses (*access blocking*); dan/atau

e. dikeluarkan dari daftar.

(2) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila:

a. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran;

b. tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar;

c. tidak melakukan pemutusan akses *(take down)* terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum.

(3) Penyelenggara . . .

(3) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a. tidak mengindahkan teguran tertulis yang dikenai karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan/atau

b. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikenai sanksi administratif berupa pemutusan akses melalui pemblokiran akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

a. tidak melakukan pendaftaran;

b. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau

c. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(5) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak melakukan pemutusan akses (*take down*) berupa penutupan akun dan/atau penghapusan konten terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

(6) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dapat mengenakan sanksi administratif berupa pemutusan akses melalui pemblokiran akses *(access blocking)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan/atau memerintahkan *internet service provider* untuk melakukan pemutusan akses terhadap sistem elektronik kepada:

a. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang tidak melakukan pemutusan akses *(take down)* terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang; dan

b. penyelenggara . . .

b. penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content* yang tidak melakukan pemutusan akses *(take down)* terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan/atau tidak membayar denda administratif.

(7) Sanksi administratif berupa pemutusan akses melalui pemblokiran akses (*access blocking*) terhadap sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau penyelenggara sistem elektronik lingkup privat *user generated content.*

(8) Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dikeluarkan dari daftar penyelenggara sistem elektroniknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e apabila:

a. tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau

b. tidak memberikan akses terhadap data elektronik dan sistem elektronik dalam rangka Pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Pasal 533

(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan satuan poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif.

(3) Tarif denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poin.

Pasal 534

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran . . .

a. teguran tertulis; dan/atau
b. pencabutan PB.

Pasal 535

(1) Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang tidak melakukan kegiatan konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman berbasis kecerdasan artifisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 536

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas pengembangan teknologi *blockchain*, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau
b. pencabutan PB.

Pasal 537

(1) Pelaku Usaha aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* yang tidak melakukan kegiatan pengembangan teknologi *blockchain* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku . . .

(2) Pelaku Usaha aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha aktivitas pengembangan teknologi *blockchain* yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenakannya teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal 538

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran atas pemenuhan PB oleh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pada subsektor aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*), dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis; dan/atau
b. pencabutan PB.

Pasal 539

(1) Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) dengan kriteria UMK-M yang tidak melakukan kegiatan penerbitan piranti lunak (*software*) terkait dengan sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik khusus gim selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu.

(2) Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) dengan kriteria UMK-M yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenai teguran tertulis kesatu, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.

(3) Pelaku Usaha yang melakukan aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) dengan kriteria UMK-M yang tidak melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut sejak tanggal dikenai teguran tertulis kedua, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan PB.

Pasal . . .

Pasal 540

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, 531 ayat (1), Pasal 532 ayat (1), Pasal 534, Pasal 536, dan Pasal 538 diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.

Paragraf 22

Sektor Lingkungan Hidup

Pasal 541

Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan PB; dan/atau
e. pencabutan PB.

Pasal 542

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 oleh menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal . . .

Pasal 543

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 544

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan perkembangan dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha dalam rangka percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 545

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan PBBR.

Pasal 546

Dalam hal subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3) huruf f belum tersedia, pelaksanaan Pengawasan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB.

BAB . . .

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 547

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang dalam proses permohonan sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

b. kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:

   1. sertifikat standar namun belum terverifikasi; dan/atau
   2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

   sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, sertifikat standar dan/atau PB UMKU tersebut tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c. kegiatan usaha dengan Risiko tinggi yang telah memperoleh:

   1. Izin dalam rangka percepatan namun belum memenuhi persyaratan; dan/atau
   2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

   sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

d. lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengaturan pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka tetap melaksanakan tugas terkait PB terhadap kegiatan aset keuangan digital termasuk aset kripto serta derivatif keuangan sampai dengan waktu beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan derivatif keuangan.

Pasal . . .

Pasal 548

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Pelaku Usaha yang telah memperoleh hak akses sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini melakukan pembaruan data hak akses pada Sistem OSS; dan

b. atas pembaruan data hak akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 549

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU nya telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha;

b. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

c. usaha pariwisata dengan kategori menengah tinggi dan tinggi yang telah memiliki Sertifikat Standar usaha pariwisata, sertifikatnya tetap berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus:

    1. melaksanakan pemutakhiran administrasi Sertifikat Standar usaha pariwisata melalui lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang menerbitkan sertifikatnya dan mekanisme transfer surveilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    2. mengunggah Sertifikat Standar usaha yang berlaku dalam Sistem OSS.

Pasal . . .

Pasal 550

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 551

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;

b. Sistem OSS dan Sistem Indonesia *National Single Window* wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan

c. terhadap pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas yang belum dapat dilakukan melalui Sistem Indonesia *National Single Window* maka proses pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 552

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lydia Silvanna Djaman

SK No 253388 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan dalam undang-undang dimaksud melingkupi juga mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi Pengawasan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah ini berusaha mengakomodir beberapa sektor perizinan berusaha berbasis risiko lainnya, yaitu sektor ekonomi kreatif, sektor informasi geospasial, sektor ketenagakerjaan, sektor perkoperasian, sektor penanaman modal, sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan sektor lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupaya memberikan kepastian hukum kepada Pelaku Usaha terutama mengenai proses bisnis dan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) dalam pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah ini melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga terkait, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Hal ini juga sebagai upaya menghasilkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).

Bentuk perubahan besar yang dilakukan dalam proses bisnis adalah integrasi sistem yang semuanya menjadi terpusat di Sistem OSS sebagai antarmuka pengguna (*front-end system*), sehingga Pelaku Usaha tidak akan kebingungan lagi untuk mengurus ke sistem yang mana, karena semua proses yang melibatkan Pelaku Usaha dilakukan melalui Sistem OSS. Dalam hal ini Sistem OSS akan meneruskan data kepada sistem yang ada di kementerian/lembaga, namun hasil akhirnya tetap dikeluarkan di Sistem OSS.

Sementara . . .

Sementara itu perubahan besar yang dilakukan menyangkut jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) adalah kepastian hukum terkait jangka waktu dalam setiap proses Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terutama pada Bab Persyaratan Dasar, baik pada KKPR, PL, PBG, dan SLF. Peraturan Pemerintah ini memberikan jangka waktu yang tepat dan jelas agar tidak membingungkan dan merugikan Pelaku Usaha. Bahkan di beberapa ketentuan jaminan kualitas layanan (*service level agreement*) diberlakukan pengaturan fiktif positif, seperti dalam ketentuan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design)* proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Selanjutnya sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin.

Penyelenggaraan PBBR dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. pengaturan PBBR;
b. norma, standar, prosedur, dan kriteria PBBR;
c. PBBR melalui layanan Sistem OSS;
d. tata cara Pengawasan PBBR;
e. evaluasi dan reformasi kebijakan PBBR;
f. pendanaan PBBR;
g. penyelesaian permasalahan dan hambatan PBBR; dan
h. sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga" adalah:

1. Setiap permohonan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS dan kemudian permohonan tersebut dialirkan kepada sistem elektronik yang dimiliki oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Setiap penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU harus disampaikan kepada Pelaku Usaha hanya melalui Sistem OSS setelah melalui proses tahapan verifikasi oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Terintegrasi secara elektronik dimaksud mencakup pula pemrosesan dan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang dilakukan di Sistem OSS oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dengan menggunakan hak akses.

Pasal . . .

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu penerbitan" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan PB berdasarkan analisis Risiko, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu penerbitan" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan PB-UMKU dengan mempertimbangkan tingkat Risiko, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa serta mekanisme penerbitan yang menjadi pedoman bagi Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perolehan PB" adalah perolehan PB secara otomatis yang berlaku bagi kategori tingkat Risiko usaha rendah dan menengah rendah.

Yang dimaksud dengan "pengajuan PB" adalah perolehan PB melalui proses tahapan verifikasi yang berlaku bagi kategori tingkat Risiko usaha menengah tinggi dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf . . .

Huruf b

Subtahapan persiapan dalam pemenuhan Amdal atau UKL-UPL merupakan tahapan perencanaan usaha terkait PL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembersihan atau pembukaan lahan" dapat berupa kegiatan:

a. penebangan;

b. pemadatan; dan/atau

c. pengurukan tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "Bangunan Gedung atau komplek perdagangan/jasa yang dipakai bersama" antara lain Bangunan Gedung berupa komplek pertokoan, perkantoran, tempat peristirahatan (*rest area*), dan pasar.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK atau kawasan industri dapat berupa rekomendasi/surat keterangan atau perjanjian/kontrak kerja sama dari pengelola KEK atau kawasan industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengalihan KKPR kepada Pelaku Usaha yang baru dibuktikan dengan dokumen tertulis hubungan hukum yang menyatakan pengalihan penguasaan tanah.

Huruf . . .

Huruf d

Penerbitan KKPR kepada Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha lain dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa menyewa atau pinjam pakai yang masih berlaku, yang paling sedikit memuat kesediaan pemegang KKPR sebelumnya mengalihkan kepada Pelaku Usaha.

Huruf e

Dalam hal bentuk usaha tetap sudah memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah, poligon/koordinat wilayah kerja minyak dan gas bumi harus sudah ditanamkan dalam Sistem OSS.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "terintegrasi" adalah sistem yang menghubungkan fungsi dan/atau proses dalam sebuah entitas usaha yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pembinaan" antara lain Pelaku Usaha agar menyesuaikan bangunan sesuai dengan RTR atau Pelaku Usaha tidak dapat melakukan kegiatan usaha di lokasi yang diusulkan dan diarahkan melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sesuai dengan RTR.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tahapan pendaftaran" dalam ketentuan ini dimaknai sama dengan tahapan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan kawasan hutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tahapan pendaftaran" dalam ketentuan ini dimaknai sama dengan tahapan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelepasan kawasan hutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" antara lain kawasan industri, KEK, atau KPBPB.

Yang dimaksud dengan "pengelola kawasan" adalah pengelola kawasan industri administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPBPB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tidak diterbitkan" adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak menerima tanggapan (berupa menyetujui atau menolak) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari.

Ayat (6)

Sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menolak rekomendasi pemanfaatan kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, disertai dengan alasan penolakan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha, penerbitan SPPL dilakukan bersamaan dengan penerbitan NIB melalui Sistem OSS.

Ayat . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan kebenaran data dan dokumen" sama dengan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

PB UMKU dalam rangka peredaran produk antara lain untuk kegiatan usaha di bidang makanan minuman, farmasi obat-obatan, alat kesehatan, kosmetik, uji tipe untuk kendaraan, dan pertahanan.

Huruf b

PB UMKU dalam rangka kelayakan operasi antara lain untuk kegiatan usaha di bidang transportasi, ketenagalistrikan, komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, serta ketenaganukliran.

Huruf c

PB UMKU dalam rangka standardisasi produk/jasa antara lain untuk kegiatan usaha yang memerlukan standar nasional, sertifikasi untuk jasa pariwisata, sertifikasi sanitasi, dan sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Huruf d

PB UMKU dalam rangka kelancaran kegiatan usaha antara lain untuk kegiatan usaha pengambilan air tanah, penyelenggaraan terminal khusus, dan pergudangan.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan kepala daerah antara lain mengatur peran, tugas, dan tata kelola DPMPTSP serta organisasi perangkat daerah teknis dalam pemrosesan PBBR di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Lampiran II" adalah Lampiran II PB UMKU sektor energi dan sumber daya mineral yang mengatur mengenai Izin pengusahaan air tanah.

Pasal 148

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan usaha PB tertentu yang memerlukan perizinan bertahap pada pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi:

a. fasilitas produksi radioisotop, radiofarmaka, dan radioisotop dan radiofarmaka;

b. fasilitas produksi peralatan yang menggunakan zat radioaktif;

c. fasilitas iradiator kategori II, kategori III, dan kategori IV menggunakan sumber radioaktif; dan

d. fasilitas iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion.

Kegiatan . . .

Kegiatan usaha PB tertentu yang memerlukan perizinan bertahap pada instalasi nuklir dan bahan nuklir meliputi:

a. reaktor nuklir; dan

b. instalasi nuklir nonreaktor.

Kegiatan usaha PB UMKU tertentu yang memerlukan perizinan bertahap pada pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi:

a. fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka yang menunjang layanan kedokteran nuklir;

b. fasilitas produksi radiofarmaka yang menunjang layanan kedokteran nuklir;

c. fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;

d. fasilitas produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;

e. fasilitas kalibrasi yang menggunakan sumber radiasi pengion;

f. fasilitas kedokteran nuklir terapi;

g. fasilitas kedokteran nuklir diagnostik *in vivo*;

h. fasilitas radioterapi;

i. fasilitas iradiator kategori II dan kategori III menggunakan sumber radioaktif sebagai penunjang kegiatan utama;

j. fasilitas iradiator kategori II menggunakan pembangkit radiasi pengion sebagai penunjang kegiatan utama; dan

k. fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radiasi pengion.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Lampiran II" adalah Lampiran II PB UMKU sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang mengatur mengenai subsektor sumber daya air.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "usaha tertentu" antara lain:

a. sebagian usaha (seperti parfum isi ulang) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro;
b. usaha yang dilakukan di tempat penimbunan berikat;
c. usaha kemasan dan aktivitas pengepakan yang ditujukan untuk diekspor kembali pada KEK atau KPBPB; atau
d. fasilitas produksi obat penggunaan khusus,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 168

Yang dimaksud dengan "penerbitan buku" adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan buku.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Yang dimaksud dengan "berkoordinasi dengan kementerian terkait" yaitu penyusunan peraturan menteri paling sedikit berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepabeanan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga sebagai pengampu" adalah kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi penerbitan PB, pembinaan, dan pengawasan suatu kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 186

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Aktivitas penerbitan piranti lunak (*software*) terkait dengan sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik khusus gim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh badan hukum lainnya antara lain yayasan, persyarikatan, atau perkumpulan.

Persyarikatan atau perkumpulan dimaksudkan dalam rangka mengakomodasi persyarikatan atau perkumpulan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.

Ayat . . .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru" adalah izin lokasi/KKPR, izin lingkungan/PL, dan/atau izin mendirikan bangunan/PBG/SLF yang dimiliki dan masih berlaku, tetap bisa digunakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan Penanaman Modal" adalah laporan tentang kegiatan Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (3)

Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi dimaksudkan agar masing-masing kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, Administrator KEK, dan KPBPB melakukan inspeksi lapangan secara terkoordinasi sehingga tidak menyulitkan Pelaku Usaha. Hal ini mengingat jika dilakukan secara sendiri-sendiri, Pelaku Usaha akan kesulitan menyiapkan data dan informasi bagi pejabat yang melakukan inspeksi lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 244

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pemerintah daerah, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

Pasal . . .

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan/pendampingan yang dilakukan dapat berupa penyuluhan, pemberian penjelasan, dan/atau bimbingan teknis.

Ayat (3)

Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk pembinaan dilakukan termasuk untuk pemenuhan perizinan tunggal.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Cukup jelas.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 305

Cukup jelas.

Pasal 306

Cukup jelas.

Pasal 307

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Cukup jelas.

Pasal 310

Cukup jelas.

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 326

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328

Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 358

Cukup jelas.

Pasal 359

Cukup jelas.

Pasal 360

Cukup jelas.

Pasal 361

Cukup jelas.

Pasal 362

Cukup jelas.

Pasal 363

Cukup jelas.

Pasal 364

Cukup jelas.

Pasal 365

Cukup jelas.

Pasal 366

Cukup jelas.

Pasal 367

Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Cukup jelas.

Pasal 371

Cukup jelas.

Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373

Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376

Cukup jelas.

Pasal 377

Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pasal 379

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 380

Cukup jelas.

Pasal 381

Cukup jelas.

Pasal 382

Cukup jelas.

Pasal 383

Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385

Cukup jelas.

Pasal 386

Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388

Cukup jelas.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 391

Cukup jelas.

Pasal 392

Cukup jelas.

Pasal 393

Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

Pasal 395

Cukup jelas.

Pasal 396

Cukup jelas.

Pasal 397

Cukup jelas.

Pasal 398

Cukup jelas.

Pasal 399

Cukup jelas.

Pasal 400

Cukup jelas.

Pasal 401

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 402

Cukup jelas.

Pasal 403

Cukup jelas.

Pasal 404

Cukup jelas.

Pasal 405

Cukup jelas.

Pasal 406

Cukup jelas.

Pasal 407

Cukup jelas.

Pasal 408

Cukup jelas.

Pasal 409

Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jelas.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Cukup jelas.

Pasal 419

Cukup jelas.

Pasal 420

Cukup jelas.

Pasal 421

Cukup jelas.

Pasal 422

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 423

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Pengenaan daya paksa polisional dapat berupa penolakan penerbitan PB UMKU dalam jangka waktu tertentu kepada Pelaku Usaha apabila melakukan pelanggaran atas PB UMKU yang telah diterbitkan.

huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 424

Cukup jelas.

Pasal 425

Cukup jelas.

Pasal 426

Cukup jelas.

Pasal 427

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 428

Cukup jelas.

Pasal 429

Cukup jelas.

Pasal 430

Cukup jelas.

Pasal 431

Cukup jelas.

Pasal 432

Cukup jelas.

Pasal 433

Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435

Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 439

Cukup jelas.

Pasal 440

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442

Cukup jelas.

Pasal 443

Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445

Cukup jelas.

Pasal 446

Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 450

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penghentian sementara pelayanan umum" antara lain terkait dengan analisis mengenai dampak lalu lintas, Pelaku Usaha tidak memenuhi rekomendasi dari pengawas maka Pelaku Usaha tidak diperkenankan untuk melanjutkan pembangunan/pengembangan sarana kegiatan berusaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 451

Cukup jelas.

Pasal 452

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam mengenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional melalui penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya dilakukan dengan menerbitkan surat/rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk selanjutnya dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 453

Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

Pasal 455

Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 458

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dalam mengenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional melalui penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya dilakukan dengan menerbitkan surat/rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk selanjutnya dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 459

Cukup jelas.

Pasal 460

Cukup jelas.

Pasal 461

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk subsektor pangan segar, penghentian sementara kegiatan berusaha dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi, peredaran, dan/atau PB UMKU lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk subsektor pangan segar, pengenaan daya paksa polisional dapat berupa penarikan produk dari peredaran dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau tindakan pemulihan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 462

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dalam mengenakan sanksi administratif berupa daya paksa polisional melalui penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya dilakukan dengan menerbitkan surat/rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk selanjutnya dilakukan penutupan atau pemblokiran sistem elektronik dan/atau media elektronik lainnya, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 463

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 464

Cukup jelas.

Pasal 465

Cukup jelas.

Pasal 466

Cukup jelas.

Pasal 467

Cukup jelas.

Pasal 468

Cukup jelas.

Pasal 469

Cukup jelas.

Pasal 470

Cukup jelas.

Pasal 471

Cukup jelas.

Pasal 472

Cukup jelas.

Pasal 473

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 474

Cukup jelas.

Pasal 475

Cukup jelas.

Pasal 476

Cukup jelas.

Pasal 477

Cukup jelas.

Pasal 478

Cukup jelas.

Pasal 479

Cukup jelas.

Pasal 480

Cukup jelas.

Pasal 481

Cukup jelas.

Pasal 482

Cukup jelas.

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 485

Cukup jelas.

Pasal 486

Cukup jelas.

Pasal 487

Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489

Cukup jelas.

Pasal 490

Cukup jelas.

Pasal 491

Cukup jelas.

Pasal 492

Cukup jelas.

Pasal 493

Cukup jelas.

Pasal 494

Cukup jelas.

Pasal 495

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 496

Cukup jelas.

Pasal 497

Cukup jelas.

Pasal 498

Cukup jelas.

Pasal 499

Cukup jelas.

Pasal 500

Cukup jelas.

Pasal 501

Cukup jelas.

Pasal 502

Cukup jelas.

Pasal 503

Cukup jelas.

Pasal 504

Cukup jelas.

Pasal 505

Cukup jelas.

Pasal 506

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Cukup jelas.

Pasal 509

Cukup jelas.

Pasal 510

Cukup jelas.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Cukup jelas.

Pasal 513

Cukup jelas.

Pasal 514

Cukup jelas.

Pasal 515

Cukup jelas.

Pasal 516

Cukup jelas.

Pasal 517

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Cukup jelas.

Pasal 520

Cukup jelas.

Pasal 521

Cukup jelas.

Pasal 522

Cukup jelas.

Pasal 523

Cukup jelas.

Pasal 524

Cukup jelas.

Pasal 525

Cukup jelas.

Pasal 526

Cukup jelas.

Pasal 527

Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 529

Cukup jelas.

Pasal 530

Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Pasal 532

Cukup jelas.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Cukup jelas.

Pasal 535

Cukup jelas.

Pasal 536

Cukup jelas.

Pasal 537

Cukup jelas.

Pasal 538

Cukup jelas.

Pasal 539

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 540

Cukup jelas.

Pasal 541

Cukup jelas.

Pasal 542

Cukup jelas.

Pasal 543

Cukup jelas.

Pasal 544

Cukup jelas.

Pasal 545

Cukup jelas.

Pasal 546

Cukup jelas.

Pasal 547

Cukup jelas.

Pasal 548

Cukup jelas.

Pasal 549

Cukup jelas.

Pasal 550

Cukup jelas.

Pasal . . .

Pasal 551

Cukup jelas.

Pasal 552

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7115

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	03111	Penang-kapan Pisces/ Ikan Bersirip di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penang-kapan pisces/ikan bersirip antara lain: ikan	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar	- Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan Ikan di Kawa-san Konser-vasi	1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak meng-gunakan kapal pe-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainya, layang, kembung, selar, lemuru, kembang, pelagis kecil lainnya, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut,						3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan penangkapan	- Surat Izin Penang-kapan Ikan	nangkap ikan dan 2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kerapu, pari, kurisi, remang, tembang, siro, beronang, biji nangka, tenggiri bulat, belanak, julung-julung, tuna lainnya, ikan tuna mata besar, albacora, marlin, meka, lencam, kapas-kapas, ikan karang, ikan						ikan di kawasan konservasi dan 6. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampai-kan informasi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			demersal lainnya, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang di-pengaruhi pasang surut						a. Daerah penang-kapan ikan dan b. Alat penang-kapan ikan			
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana penga-daan kapal perikan-an dan	7 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penangkapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil		1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pe-nangkap ikan sesuai	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang per-seorangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau		tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan 2. Daerah penang-kapan ikan di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah admini-strasi provinsi yang ber-sangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang per-seorangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan	4 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap		1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penang-kapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau pe-nanggung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penanggung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
2	03112	Penangkapan *Crustacea* di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penang-	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan:	- Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapan *Crustacean* meliputi udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster, kepiting, rajungan dan *Crustacea* laut lainnya di laut, muara sungai, laguna dan Tempat lain yang dipengaruhi						1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan	Ikan di Kawasan Konservasi - Surat Izin Penangkapan Ikan	(lima) GT atau tidak menggunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasang surut						penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan penangkapan ikan di kawasan konservasi ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Daerah penang-kapan ikan dan b. Alat penang-kapan ikan			
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal	7 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penang-kapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum		ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan 2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah admini-strasi provinsi yang ber-sangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perseoran-gan atau pe-nanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang per-seorangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan	4 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin penangkapan ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau pe-nanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-		tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang per-seorangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan					
3	03113	Penang-kapan Mollusca di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan mollusca meliputi cumi-cumi, sotong, gurita, dan jenis lainnya remis, simping, kerang darah, kerang hijau, tiram, dan jenis	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai	- Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan Ikan di Kawa-san Konser-vasi - Surat Izin Penang-kapan Ikan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggu-nakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah pe-nangkap-an ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kekerangan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi ——— Bagi yang tidak menggunakan		wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha,	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh)	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang		Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan 2. Daerah Pe-nangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perseorangan atau penanggung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau				wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perseora-ngan atau penang-gung jawab badan hukum dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat:	4 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah Penangkapan ikan pada	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat per-nyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseora-ngan atau		3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perseora-ngan atau pe-nanggung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perseora-ngan atau penang-gung jawab badan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perseorang-an atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
4	03114	Penang-kapan/ Peng-ambilan Tumbuh-an Air di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan/ pengambil-an semua jenis tumbuhan air, seperti algae, rumput laut,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan	Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan Ikan di Kawasan Konser-vasi	1. Kapal penangkap Ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak menggu-nakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah pe-nangkap-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ganggang laut, dan tumbuhan hias di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang di-pengaruhi pasang surut						4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di		an ikan padaWPPN RI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kawasan konservasi ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	03115	Penang-kapan/ Peng-ambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan/ pengam-bilan induk/ benih ikan, induk/ benih udang, induk/ benih kerang, induk/ benih kepiting, dan induk/ benih biota lainnya di laut, muara sungai,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-	- Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan Ikan di Kawa-san Konser-vasi - Surat Izin Penang-kapan Ikan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak meng-gunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah pe-nangkap-an ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			laguna, dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil		yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Rencana peng-adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-		petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan 2. Daerah pe-nangkap-an ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan				trasi provinsi yang ber-sangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-	4 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI di atas 12	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab		pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		(dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
6	03116	Penang-kapan Echino-dermata di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan/ pengambil-an jenis echino-dermata seperti bintang laut,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan	- Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan Ikan di Kawa-san Konser-vasi - Surat Izin Penang-	1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak meng-gunakan kapal pe-nangkap ikan dan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			teripang, bulu babi, lili laut, dan lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di	kapan Ikan	2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kawasan konservasi ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan	7 Hari	1. Merealisasikan kapal		1. Kapal penangkap	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar			permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penang-kapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		ikan ber-ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna				2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
				- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan	4 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap		1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		atas 5 (lima) GT dan 2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
7	03117	Penang-kapan Coelen-terata di Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan:	- Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan	1. Kapal penangkap ikan berukuran sampai	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penang-kapan ikan coelentera-te seperti anemone laut, polip, ubur-ubur dan lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan	Ikan di Kawa-san Konser-vasi - Surat Izin Penang-kapan Ikan	dengan 5 (lima) GT atau tidak mengguna kan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah pe-nangkap-an ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Daerah Penang-kapan ikan dan b. Alat Penang-kapan ikan			
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal	7 Hari	1. Merealisasi-kan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan		1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penangkap ikan sesuai	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum		pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
8	03118	Penang-kapan Ikan Hias Laut	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan/ pengambil-an ikan hias laut, seperti kuda laut (hippo-campus), angel fish, clown fish,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan	- Tanda Daftar Kegiatan Penang-kapan Ikan di Kawa-san Konser-vasi - Surat Izin Penang-	1. Kapal pe-nangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak meng-gunakan kapal penangkap ikan dan 2. Daerah pe-nangkap-an ikan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lion fish, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong, dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipenga-ruhi pasang surut						terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi	kapan Ikan	pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah adminis-trasi provinsi yang ber-sangkutan dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana peng-adaan kapal perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk		lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		(lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penang-kap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan 2. Daerah penang-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna				kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah admini-strasi provinsi yang ber-sangkut-an	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
9	03119	Penang-kapan Biota Air	Kelompok ini mencakup usaha atau	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan	- Tanda Daftar Kegiatan	1. Kapal pe-nangkap ikan ber-ukuran	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Lainnya di Laut	kegiatan Penang-kapan dan pengum-pulan biota laut lainnya seperti cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaru-hi pasang surut						kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar 3. Melaporkan ikan hasil tangkapan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan	Penang-kapan Ikan di Kawa-san Konser-vasi - Surat Izin Penang-kapan Ikan	sampai dengan 5 (lima) GT atau tidak meng-gunakan kapal pe-nangkap ikan dan 2. Daerah penang-kapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah admini-strasi provinsi yang ber-sangkut-an	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi, bagi yang melakukan Penangkapan ikan di kawasan konservasi ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan		dan/atau di atas 12 (dua belas) mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan	7 Hari	1. Merealisasikan kapal penangkap ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan		1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum		untuk melakukan pendataan ikan hasil tangkapan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		penangkap ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Daerah penangkapan ikan pada WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan				yang ber-sangkutan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
10	03121	Penang-kapan Pisces/ Ikan Bersirip di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan pisces/ikan bersirip air tawar menangkap jenis ikan betok, sepat, bilih, depik, genggehek, kancera, kendia,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Melaporkan ikan hasil tangkapan ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan:	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, sumpit, sepat rawa, berukung, jelawat, parang, teri, bentilak, lais, sepat siam, betutu, gurame, sidat, baung, keting, gabus, toman, lele,						1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hampal, lalawak, nilem, semah, silih, belida, siluk/arwana, patin, lempuk, mujair, nila, ikan bersirip, beunteur, koan, di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	03122	Penang-kapan Crusta-cea di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkap an *Crusta-cea* air tawar, seperti udang grago (*Athya* spp), udang galah (*Macrobrac hium rosen-bergii*), udang tawar (*Palaemon* spp), dll di perairan darat, seperti di danau,	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampai-kan informasi: a. Daerah Penang-	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya						kapan ikan dan b. Alat Penang-kapan ikan			
12	03123	Penang-kapan Mollusca di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan mollusca air tawar seperti remis (Meretrix-spp), siput (Philalanka sp) dll di perairan darat, seperti di	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan:	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya						1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
13	03124	Penangkapan/ pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan/ pengambilan semua jenis	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkutan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tumbuhan air, seperti ganggang, eceng gondok, lumut, dan tumbuhan hias di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya						2. Memiliki Buku Kapal Perikanan ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	03125	Penang-kapan/ pengam-bilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan induk/ benih ikan sidat, arwana, baung: di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampai-kan informasi: a. Daerah Penang-	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapan ikan dan b. Alat Penang-kapan ikan			
15	03126	Penang-kapan Ikan Hias di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penangkapan ikan hias di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, seperti ikan	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pelangi dan botia						tangkapan dan 2. Menyampai-kan informasi: a. Daerah Penang-kapan ikan dan b. Alat Penang-kapan ikan			
16	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan Penang-kapan/ pengambil-an hewan atau biota air tawar seperti	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Bagi yang menggunakan kapal penangkap ikan: 1. Melaporkan ikan hasil tangkapan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan	-	Pelaku usaha berdomisili di wilayah administrasi kabupaten/ kota yang bersangkut-an	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			katak, bulus, labi-labi, belut, dan lainnya di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya						3. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan b. Alat Penangkapan ikan c. Pelabuhan pangkalan atau sentra nelayan dan d. Ukuran kapal penangkap ikan ——— Bagi yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1. Melaporkan ikan hasil tangkapan dan 2. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan ikan dan b. Alat Penangkapan ikan			
17	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 2. Menerapkan cara distribusi	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ikan yang baik dan 3. Laporan kegiatan usaha			
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			1. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan dan 2. Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja dan d. Wilayah distribusi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mitra usaha			
18	03143	Jasa Pasca Panen Penang-kapan Ikan di Perairan Darat	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan sistem jami-nan mutu dan keamanan hasil per-ikanan 2. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik dan 3. Laporan kegiatan usaha	Sertifikat Penerap-an Distri-busi Ikan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			1. Memiliki Serti-fikat pene-rapan distri-busi ikan paling lama 1 (satu) tahun sejak		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diterbitkan dan 2. Laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja dan d. Wilayah distribusi dan mitra usaha			
19	03151	Penang-kapan/ peng-ambilan Ikan Bersirip (*Pisces*) yang di-lindungi dan/atau Terma-suk	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaat-an jenis ikan taksa ikan bersirip (*Pisces*) yang	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan laporan stok dan	-	Seluruh	Menteri/Kepa la Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dalam *Appendiks* CITES	dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES sesuai ketentuan perlindungannya, yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagang-				Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, dan aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Contoh ikan bersirip yang termasuk kelompok ini: Ikan Napoleon, Ikan Capungan Banggai, Ikan Hiu Lanjaman, Ikan Hiu Martil, dan						mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemi-likan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Ikan Pari Mobula Kelompok ini tidak mencakup Penang-kapan untuk tujuan perdagang-an jenis ikan bersirip yang dilindungi penuh, dilarang peredaran-nya berdasar-kan regulasi nasional dan/atau tercantum dalam						Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkut-an ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			daftar *Appendiks* I CITES, seperti Ikan Arwana Merah dan Ikan Pari Gergaji						dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
20	03152	Penangkapan/ pengambilan *Crustacea* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appen-*	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis ikan taksa *Crustacea* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		diks CITES	sesuai ketentuan per-lindungan-nya, yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan komersial, pengem-bang-biakan, perdagang-an dalam negeri, perdagang-				Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		pemanfaatan secara berkala 3. Menyampai-kan usulan kuota ekspor 4. Menyampai-kan usulan kuota pengambilan/ penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsip-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an luar negeri, aquaria, hasil dari kegiatan Penang-kapan Kelompok ini tidak mencakup Penangkap an jenis ikan taksa *Crustacea* yang dilindungi penuh, dilarang peredaran-nya berdasar-kan regulasi nasional dan/atau tercantum						kan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dalam daftar *Appendiks* I CITES, seperti *Tachypleus gigas*, *Tachypleus tridentatus* dan *Carcinoscorpius rotundicauda*						Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
21	03153	Penangkapan/ pengambilan *Mollusca* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan jenis ikan taksa *Mollusca* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES sesuai ketentuan perlindung annya,	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari alam 2. Proposal/ dokumen	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang hidup di perairan laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan komersial, pengem-bang-biakan, perdagang-an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan				3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		4. Menyampai-kan usulan kuota pengambilan/ penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemi-likan jenis ikan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penang-kapan Contoh *Mollusca* yang masuk dalam kelompok ini: *Tridacna spp* , (Kima) dan *Strombus gigas* (Keong Ratu) Kelompok ini tidak mencakup Penang-kapan untuk tujuan perdagang-an jenis ikan taksa						akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melaku-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Mollusca yang dilindungi penuh, dilarang peredaran-nya berdasar-kan regulasi nasional dan/atau tercantum dalam daftar *Appendiks* I CITES, seperti: *Nautilus spp, Hip-popus hippopus, Hippopus porcella-nus, Cassis cornuta*						kan peng-angkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengang-kutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfa-atan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan *Charonia tritonis*						yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
22	03154	Penangkapan/ pengambilan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan kuota	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan, perdagang-an dalam negeri,				Negara Bukan Pajak		pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Daftar *Coelentera-ta* yang masuk dalam kelompok ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan regulasi dan/atau keputusan Konvensi CITES						8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis *Coelentera-ta* yang dilindungi penuh berdasar-kan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penang-kapan/ pengambil-annya berdasar-kan						ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melaku-kan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfa-atan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kebijakan Pemerintah Contoh: karang keras Ordo *Scleractinia*						dalam *Appendiks* CITES			
23	03155	Penangkapan/ pengambilan *Echinodermata* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *echinodermata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor 4. Menyampaikan usulan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dibatasi pemanfaat-annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bangbia-kan, perdagang-				4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		kuota pengambilan/ penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Contoh *Echinoder-mata* yang masuk dalam kelompok ini: *Holothoria fuscogilva*, *Holothuria nobilis*, dan *Holothuria whitmaei* Kelompok ini tidak mencakup						8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengambil-an jenis *Echinoderm ata* yang dilindungi penuh berdasar-kan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* CITES dan/atau dilarang Penang-kapan/ pengambil-annya berdasar-kan kebijakan Pemerintah						10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melaku-kan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Appendiks CITES			
24	03156	Penang-kapan/ pengam-bilan Amphibia yang di-lindungi dan/atau Terma-suk dalam Appen-diks CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaat-an *Amphibia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindung annya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-annya sesuai	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala 3. Menyampai-kan usulan kuota ekspor 4. Menyampai-kan usulan kuota pengambilan/ penangkapan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar						5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Contoh *Amphibia* yang masuk dalam kelompok ini: *Amyda cartiliginea* (Labi-Labi) dan *Orlitia borneensis* (Kura-Kura Sungai Kali-mantan) Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis						berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Amphibia yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah						10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Appendiks CITES			
25	03157	Penangkapan/ pengambilan *Reptilia* yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *reptilia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri,						4. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis *reptilia* yang dilindungi penuh berdasar-kan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penang-						dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah, seperti: Penyu						berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
26	03158	Penang-kapan/ pengam-bilan Mamalia yang dilin-dungi dan/atau Terma-suk dalam *Appen-*	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaat-an *mamalia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampai-kan laporan stok dan realisasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		diks CITES	diluar ketentuan perlindung annya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan				Penangkapan dari Alam 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		pemanfaatan secara berkala 3. Menyampai-kan usulan kuota ekspor 4. Menyampai-kan usulan kuota pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan meng-arsipkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengem-bangan, pengem-bangbiak-an, perdagang-an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis mamalia yang dilindungi penuh berdasar-						dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penang-kapan/ pengambil-annya berdasar-kan kebijakan pemerintah seperti: paus, lumba-lumba, dan dugong						Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan peng-angkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
27	03159	Penangkapan/ pengambilan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang dilindungi dan/atau Termasuk dalam	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau *Appendiks*	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfaatan secara berkala	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Appen-diks CITES	CITES terbatas diluar ketentuan perlindung-annya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan				2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan dan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		3. Menyampai-kan usulan kuota ekspor 4. Menyampai-kan usulan kuota pengambilan/ Penangkapan 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan, perdagang-an dalam negeri, perdagang-an luar negeri, aquaria hasil dari kegiatan Penang-kapan Kelompok ini tidak mencakup pengambil-an jenis *Algae* dan biota perairan						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkut-an antar wilayah provinsi 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lainnya yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar *Appendiks* I CITES dan/atau dilarang Penangkapan/ pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah						Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor 10. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup dan 11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			
28	03211	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif atau 2. Di kawasan kon-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											servasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Standar proses produksi pembesaran pisces/ikan bersirip laut dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif atau 2. Di kawasan konservasi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
											1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi super intensif 2. Wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut/ laut lepas	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan tenaga kerja asing 4. Di kawasan konservasi nasional 5. Di kawasan strategis nasional 6. Di kawasan strategis nasional tertentu	
29	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk	Sertifikat cara pembenihan ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Menerapkan cara pembenihan Ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan dan 3. Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Rencana pembiayaan				kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan teknologi super intensif	
30	03213	Budidaya Ikan Hias Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/Walikota
											1. Lokasi usaha berada di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Standar proses produksi budi daya ikan hias air laut dan		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif atau 2. Di kawasan kon-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											servasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
											1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi super intensif 2. Lokasi usaha berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan tenaga kerja asing 4. Di kawasan konservasi nasional 5. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 6. Di kawasan strategis nasional tertentu	
31	03214	Budidaya Karang (Coral)	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/ atau	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Standar proses produksi budi daya karang (*coral*) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		daerah provinsi	
											1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/ Kepala Badan
32	03215	Pembesaran Mollusca Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan	Sertifikat cara budi daya	1. Di laut sampai dengan 12 (dua	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	ikan yang baik	belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Standar proses produksi mollusca laut 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		daerah provinsi	
											1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	03216	Pembesaran *Crustacea* Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik 3. Melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 g/ekor atau pelepasliaran 2% dari hasil panen sesuai dengan segmentasi usaha dan	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka selama 3 tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran *Crustacea* laut		1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan kon-	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		2. Laporan kegiatan usaha (LKU) 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik 4. Melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 g/ekor dan 5. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka		servasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selama 3 tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri			
34	03217	Pembe-saran Tumbuh-an Air Laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawas-an kon-servasi yang dikelola oleh pemerin-tah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran Tumbuhan air laut 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur
											1. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Rencana pembiayaan				2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	
35	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											pemerintah daerah provinsi	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap	3 Hari	1. Standar proses pembesaran budi daya biota air laut lainnya 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan/atau 2. Di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi	Gubernur
											1. Menggunakan tenaga	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahapan kegiatn 7. Rencana pembiayaan				kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	
36	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupa-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				ten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan teknologi super intensif	
37	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi superintensif	Menteri/ Kepala Badan
38	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air Tawar di karamba 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-ten/kota dan 2. Menggu-nakan teknologi sederha-na, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau 2. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di sawah 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											Lokasi usaha berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki	3 Hari	1. Standar proses produksi budi daya ikan hias air tawar 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif,	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		ikan yang baik		atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											2. Menggunakan tenaga kerja asing	
41	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk	Sertifikat cara pembenihan ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Untuk produksi induk harus		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan		sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	
42	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederha-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											na, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi:	3 Hari	1. Standar proses produksi		1. Lokasi usaha berada di dalam	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau 2. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan
43	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									daya ikan yang baik		2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan	3 Hari	1. Standar proses produksi budi daya ikan air tawar di media lainnya 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-ten/kota dan 2. Menggu-nakan teknologi sederha-na, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupa-ten/kota dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Rencana pembiayaan				provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											nasional tertentu	
45	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
46	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Sertifikat penerapan distribusi ikan khusus skala usaha Menengah dan Besar dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik khusus skala usaha mikro dan kecil	Sertifikat penerapan distribusi ikan	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											nasional dan/atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
47	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											4. Di kawasan strategis nasional dan/atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
48	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing: 3. Di kawasan kon-	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											servasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
49	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Sertifikat penerapan distribusi ikan khusus skala usaha menengah dan besar dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang	Sertifikat penerapan distribusi ikan	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baik khusus skala usaha mikro dan kecil		3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
50	03251	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budi daya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi:	3 Hari	1. Standar proses		1. Lokasi usaha berada di	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		produksi pembesaran Pisces/ikan bersirip air payau 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/ atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan
51	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU)	Sertifikat cara pembenihan	1. Lokasi usaha berada di dalam	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Tidak diperbolehkan melakukan usaha produksi induk	ikan yang baik	satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi	3 Hari	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik dan 3. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		operasional pemuliaan		kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/ atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											3. Menggunakan teknologi super intensif	
52	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran mollusca air payau 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas provinsi dan/atau 2. Menggunakan tenaga kerja asing	
53	03254	Pembesaran *Crustacea* Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran *Crustacea* air payau		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan
54	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik		Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha 2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran Tumbuhan air payau 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan				2. Menggunakan tenaga kerja asing	
55	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 2. Menerapkan cara budi daya ikan yang baik	Sertifikat cara budidaya ikan yang baik	1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha	3 Hari	1. Standar proses produksi pembesaran Budi daya		1. Lokasi usaha berada di dalam satu daerah kabupa-	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana tahapan kegiatan 3. Rencana teknologi yang digunakan 4. Sarana usaha yang dimiliki 5. Rencana pengadaan sarana usaha 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan dan 7. Rencana pembiayaan		biota air payau lainnya 2. Laporan kegiatan usaha (LKU) dan 3. Memiliki sertifikat cara budi daya ikan yang baik		ten/kota dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dan 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											intensif, atau intensif	
											1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing dan/atau 3. Menggunakan teknologi super intensif	Menteri/ Kepala Badan
56	0326 i	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	Seluruh	Seluruh	Menegah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota
											1. Lokasi usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	
57	03262	Jasa Produksi Budidaya	Seluruh	Seluruh	Menegah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha (LKU)	-	Lokasi usaha di wilayah kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ikan Air Payau									1. Lokasi usaha berada di lintas provinsi 2. Menggunakan tenaga kerja asing 3. Di kawasan konservasi nasional 4. Di kawasan strategis nasional dan/ atau 5. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/Kepala Badan
58	03263	Jasa Pasca	Seluruh	Seluruh	Menengah Rendah		-	Otomatis		Sertifikat penerap-	Lokasi usaha di wilayah	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Panen Budidaya Ikan Air Payau				NIB dan Sertifikat Standar			1. Laporan kegiatan usaha (LKU) 2. Sertifikat penerapan distribusi ikan khusus skala usaha Menengah dan Besar dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik khusus skala usaha mikro dan kecil	an distribusi ikan	kabupaten/ kota 1. Menggunakan tenaga kerja asing 2. Di kawasan konservasi nasional 3. Di kawasan strategis nasional dan/atau 4. Di kawasan strategis nasional tertentu	Menteri/ Kepala Badan
59	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(*Pisces*) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	pemanfaatan ikan bersirip *Pisces* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat				(SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengemba-ngan, pengem-bang-biakan, perdaga-ngan dalam negeri, perdaga-ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengem-bangbiakan Contoh ikan						6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan meng-arsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bersirip yang termasuk kelompok ini: Ikan Napoleon, Ikan Capungan Banggai, Ikan Hiu Lanjaman, Ikan Hiu Martil, Ikan Pari Mobula, Kuda Laut, Ikan Arwana, dll						berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendiks* CITES			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	03272	Pengembangbiakan *Crustacea* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Crustacea* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria						5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hasil dari pengembangbiakan Contoh *Crustacea* yang masuk dalam kelompok ini: *Tachypleus gigas*, *Tachypleus tridentatus*, dan *Carcinoscorpius rotundicauda*						kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melaku-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Appendiks CITES			
61	03273	Pengembangbiakan *Mollusca* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Mollusca* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar				Negara Bukan Pajak		5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepe-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			negeri, aquaria hasil dari pengem-bangbiakan Contoh *Mollusca* yang masuk dalam kelompok ini: *Tridacna spp*, (Kima) dan *Strombus gigas* (Keong Ratu)						milikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melaku-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pengang-kutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melaku-kan kegiatan pemeliharaan dan pengang-kutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
62	03274	Pengembangbiakan *Coelenterata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Coelenterata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran Penerimaan	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdaga-				Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh *Coelenterata* yang masuk dalam kelompok ini: *Antipatharia spp*, *Heliporidae* spp, *Sclerectinia* spp, *Tubiporidae* spp, dan *Milleporidae* spp						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
63	03275	Pengembangbiakan *Echinodermata* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Echinodermata* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat-Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			annya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdaga-ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengem-bangbiakan Contoh *Ceolentera-ta* yang masuk dalam kelompok ini: *Holothoria fuscogilva, Holothuria nobilis*, dan *Holothoria whitmaei* .						usul kepemil-ikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
64	03276	Pengembangbiakan *Amphibia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Amphibia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdaga-				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengem-bang-biakan						usul kepemi-likan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
65	03277	Pengembangbiakan *Reptilia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *Reptilia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdaga-				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengem-bangbiakan Contoh Reptilia yang masuk dalam kelompok ini: *Amyda cartilagi-nea, Chitra chitra,* dan *Caretto-chelys insculpta*						usul kepemi-likan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
66	03278	Pengembangbiakan *Mamalia* yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pemanfaatan *mamalia* yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaat-	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			annya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri,				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengembangbiakan 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdagangan luar negeri, aquaria hasil dari pengembangbiakan Contoh *mamalia* yang masuk dalam kelompok ini: lumba-lumba						usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
67	03279	Pengembangbiakan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam *Appendiks* CITES	Kelompok ini mencakup usaha pengembangbiakan *Algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau *Appendiks* CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam *Appendiks* CITES Hasil Pengembangbiakan 2. Proposal/ dokumen 3. Berita acara verifikasi lapangan 4. Bukti pembayaran	17 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan stok dan realisasi pemanfataan secara berkala 3. Menyampaikan usulan rencana produksi 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang dibatasi pemanfaat-annya sesuai ketentuan konvensi internasio-nal yang diratifikasi yang hidup di habitat laut, perairan tawar dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengem-bangan, pengem-bang-biakan,				Penerimaan Negara Bukan Pajak		hasil pengem-bangbiakan 5. Menerapkan sistem penan-daan untuk jenis ikan hasil pengem-bangbiakan 6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan 8. Menyiapkan dan meng-arsipkan dokumen legalitas asal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdaga-ngan dalam negeri, perdaga-ngan luar negeri, aquaria hasil dari pengem-bangbiakan						usul kepemi-likan jenis ikan yang akan dimanfaatkan 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melaku-kan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi 10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor) 11. Menerapkan ketentuan tentang *Animal Welfare* dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercan-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tum dalam *Appendiks* CITES			
68	08104	Penggalian Pasir	Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan, dan pemisahan pasir yang berlokasi di laut selain yang berasal dari : 1. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Menteri 2. Dokumen Rencana Kerja Tetap 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	21 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak lanjutan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kepentingan Pelabuhan dan terminal khusus 2. Wilayah izin usaha pertambangan 3. Alur pelayaran dan 4. Zona inti kawasan konservasi kecuali untuk kepentingan									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengelolaan kawasan konservasi, yang dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi									
69	08930	Ekstraksi Garam	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan pelaksanaan usaha	-	1. Usaha mikro dan 2. Tidak memiliki fasilitas pengambilan air laut menetap	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran retribusi		1. Usaha Mikro dan 2. Memiliki fasilitas pe-ngambilan air laut menetap di kawas-an pe-rairan ≤12 mil di luar ke-wenangan Menteri	Gubernur
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan		1. Kawasan perairan	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		>12 mil atau 2. ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Stra-	Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											tegis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional atau f. Kawas-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											an lintas provinsi	
70	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical*	Seluruh	Bupati/ Wali kota
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizi-		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ 3. HACCP untuk tujuan ekspor dan 4. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga	*Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka peneliti-		Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	an dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan			
71	10212	Industri pengasapan/ pemanggangan ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/haccp untuk tujuan eksport dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja,	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Persetujuan Pelak-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja dan d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan	Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control* Point - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Akun Perusahaan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		
72	10213	Industri pembekuan ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usa	- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usah		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
73	10214	Industri pemindangan ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan	- Sertifikat Kelayakan Peng-	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	olahan (SKP) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta	- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produk-		
				- Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar					setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga	si UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Persetujuan Pa-		Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume	ngan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Wilayah pemasaran		usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hari kerja tenaga kerja dan d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
74	10217	Industri Pendingi-nan/Pe-ngemas-an Ikan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan	- Sertifi-kat Ke-layakan Pengo-	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	lahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Dalam Negeri		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegi-atan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kela-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									min tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
75	10291	Industri Pengga-raman/ Penge-ringan Biota Air Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifi-kat Ke-layakan Pengo-lahan (SKP) - Sertifi-kat Pe-nerapan Pro-gram Mana-jemen Mutu Terpa-du/*Ha-zard Analy-sis and Critical Control Point* - Surat Perse-tujuan	Seluruh	Bupati/ Wali kota
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
76	10292	Industri peng-asapan/ pemang-gangan biota air lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifi-kat Ke-layakan Pengo-lahan (SKP) - Izin Pe-nerapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produk-si Pa-ngan Olahan - Izin Pe-nerapan Cara Pro-	Seluruh	Bupati/ Wali kota
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat		Seluruh PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga	duksi Pangan Olahan yang Baik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan		
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	- Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifi-kat Perse-tujuan Pangan Olahan - Surat Perse-tujuan Pe-nilaian TKDN Peng-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		
77	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard*	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana	*Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk	Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi	dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
78	10294	Industri pemindagangan biota air lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Izin Penerapan Program Manajemen	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	*Critical Control Point* - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Sertifikat Pemenuhan Komit-		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis	men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
79	10297	Industri Pendinginan/Pengemasan Biota Air Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun lama setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) - Sertifikat Penerapan Program Manajemen	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Laporan kegiatan usaha	Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah	pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
80	10298	Industri peng-olahan rumput laut	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 2 (dua) tahun setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/	- Sertifi-kat Ke-layakan Pengo-lahan (SKP) - Izin Pene-rapan Pro-	Seluruh	Bupati/ Wali kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha	gram Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik - Sertifikat Pemenuhan Komit-		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat:		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pa-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan	ngan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point*		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, sta-	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pemenuhan Komitmen Produk-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tus tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk	si Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan	Persetujuan Pangan Olahan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran	5 Hari	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas		Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah	masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
				Mene-ngah dan Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki SKP paling lama 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP untuk tujuan ekspor dan 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan			
81	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari laut, dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Retribusi	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewenangan Menteri 2. Debit pengambilan air laut setara <30 m3/bulan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelola-an adminis-tratif dari perusaha-an air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga,	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak		1. Wilayah perairan >12 mil atau 2. Wilayah ≤ 12 mil dengan kriteria: a. Debit peng-ambil-an air laut setara ≥30 m3/ bulan b. Kawa-san Stra-tegis Nasio-nal	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			instansi/ lembaga/ badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan								c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional f. Kawasan lintas	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											provin-si	
82	36002	Penam-pungan dan Penyalur-an Air Baku	Kelompok ini mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air (laut) baku yang memanfaat kan ruang laut secara menetap minimal 30 hari dengan atau tanpa pengolahan untuk keperluan industri, pembangkit	Kecil	Rendah	NIB	-	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Retribusi	-	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewena-ngan Menteri 2. Debit pengam-bilan air laut setara <30 m3/bulan	Gubernur
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Dokumen rencana teknis	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Bukti pembayaran Penerimaan		1. Wilayah perairan >12 mil atau 2. Wilayah ≤ 12 mil dengan kriteria:	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			listrik dan lain-lain						Negara Bukan Pajak		a. Debit pengambilan air laut setara ≥30 m3/bulan b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional f. Kawasan lintas provinsi	
83	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Seluruh	- Menengah - Besar	Menengah, Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampaikan rencana usaha yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha	5 Hari 3 Hari	1. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun	- Sertifikat Penerapan Pro-	Seluruh PMDN Seluruh	Gubernur Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses dan 6. Wilayah pemasaran		setelah Perizinan Berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP sepanjang untuk tujuan ekspor 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga	gram Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* - Sertifikat penerapan distribusi ikan - Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan 4. Asal bahan baku berasal dari kapal penangkap ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, sepanjang di-persyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri			
84	46324	Per-dagangan Besar	Seluruh	- Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Menyampai-kan rencana usaha	5 Hari	1. Memiliki Sertifikat penerapan	- Sertifi-kat Pe-menuh-	Seluruh PMDN	Gubernur
								3 Hari			Seluruh	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Hasil Olahan Perikanan		- Besar			yang paling sedikit memuat: 1. Jenis usaha 2. Sumber dan nilai investasi 3. Jenis dan asal bahan baku 4. Sarana produksi yang digunakan 5. Tata letak dan gambaran proses produksi dan 6. Wilayah pemasaran		distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit 2. Memiliki Sertifikat Penerapan PMMT/ HACCP sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor, dipenuhi pada saat akan melakukan ekspor 3. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat:	an Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Ko-		Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja	mitmen Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Sertifikat penerapan distribusi ikan - Sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu/ Hazard Analy-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan 4. Asal bahan baku berasal dari kapal penangkap ikan yang telah memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik,	sis and Critical Control - Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Ko-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor dan/atau pasar dalam negeri	mitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
85	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha 2. Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan	- Sertifikat penerapan distribusi ikan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil perikanan dan 3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan Penolong		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga kerja yang meliputi		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan f. Jenis dan volume			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk yang dihasilkan 2. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit			
86	47753	Per-dagangan Eceran Ikan Hias	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Laporan kegiatan usaha 2. Menerapkan sistem jaminan mutu dan ke-amanan hasil perikanan dan	- Serti-fikat pene-rapan distri-busi ikan - Pe-netapan Pusat	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik	Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan Penolong		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis 2. Laporan kegiatan usaha paling sedikit memuat: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana b. Perkembangan omzet dan aset c. Penggunaan tenaga		Seluruh PMDN	Gubernur
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerja yang meliputi asal tenaga kerja, status tenaga kerja, dan jenis kelamin tenaga kerja serta jumlah hari kerja tenaga kerja d. Asal bahan baku, wilayah distribusi dan mitra usaha e. Jenis dan volume bahan baku dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									f. Jenis dan volume produk yang dihasilkan 3. Memiliki Sertifikat penerapan distribusi ikan paling lama 2 (dua) tahun setelah Perizinan Berusaha terbit			
87	47815	Per-dagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Per-ikanan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha	Penetap-an Pusat Pe-nyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
88	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olahan dan Ikan Olahan	Usaha Perdagangan eceran berbagai jenis ikan olahan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar),	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan-/atau Bahan	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			seperti abon, sosis, bakso, ikan teri, cucut, selar, kerapu dan ikan, udang, kerang yang diasinkan, atau dikering-kan,							Pe-nolong		
89	47828	Per-dagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas dan	Usaha Per-dagangan eceran berbagai jenis pakan ikan yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Laporan kegiatan usaha	Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pakan Ikan	muka (emper) toko atau tempat di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti pakan ikan, konsentrat pakan ikan, dan tepung kerang,									
90	50133	Angkut-an Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Kelompok ini mencakup usaha pengang-kutan barang	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Buku Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar	- Surat Izin Kapal Pe-ngang-kut Ikan	1. Kapal pe-ngangkut ikan atau kapal pendu-kung operasi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut ikan, alat Penangkapan ikan, atau alat bantu Penangkapan ikan						3. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan dan 4. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	Penangkapan ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT dan 2. Beroperasi di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan, untuk:	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											a. Kapal pendukung operasi Penangkapan ikan atau b. Kapal pengangkut ikan yang beroperasi antar pelabuhan pangkalan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik	7 Hari	1. Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan muatan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		1. Kapal pengangkut ikan atau kapal pendukung operasi Penangkapan ikan berupa kapal lampu di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pengang-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum				kut ikan dan kapal pendu-kung operasi Penang-kapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan Aceh) dan 2. Beropera-si di: a. WPP-NRI paling jauh	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaik an dari				12 (dua belas) mil laut di wila-yah admi-nistra-si pro-vinsi yang ber-sang-kutan, untuk kapal peng-angkut ikan yang bero-perasi dari daerah Pe-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				nang-kapan ikan ke pela-buhan pang-kalan b. WPP-NRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wila-yah admi-nistra-si pro-vinsi yang ber-sang-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											kutan, untuk Kapal pendukung operasi Penangkapan ikan atau c. Wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan untuk Kapal pengangkut ikan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											yang beroperasi antar pelabuhan pangkalan	
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat: 1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal	4 Hari	1. Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan 3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan		1. Kapal pengangkut ikan atau kapal pendukung operasi Penangkapan ikan berupa kapal lampu di atas 5 (lima) GT sampai dengan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perikan-an dan 3) Rencana operasi-onal b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum		ikan muatan dan 4. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha		30 (tiga puluh) GT (Khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pengang-kut ikan dan kapal pendu-kung operasi Penang-kapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerin-tahan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan				Aceh) dan 2. Beropera-si di: a. WPP-NRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wila-yah admi-nistra-si pro-vinsi yang ber-sang-kutan, untuk kapal peng-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab badan hukum dan 2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan				angkut ikan yang beroperasi dari daerah Penangkapan ikan ke pelabuhan pangkalan b. WPP-NRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wila-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				yah administrasi provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal pendukung operasi Penangkapan ikan atau c. Wilayah administrasi provinsi yang	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											bersangkutan untuk Kapal pengangkut ikan yang beroperasi antar pelabuhan pangkalan	
91	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan permohonan dengan melampirkan: a. Rencana usaha, yang memuat:	4 Hari	1. Merealisasikan kapal pengangkut ikan, paling lambat 2 (dua) tahun 2. Memiliki surat izin kapal pengangkut ikan	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	1. Kapal pengangkut ikan berukuran paling kecil 20 (dua puluh) GT dan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yaitu ikan Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya, serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur				1) Rencana investasi 2) Rencana pengadaan kapal perikanan dan 3) Rencana operasional b. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk badan hukum c. Pakta integritas dari orang perseorangan		3. Memberikan akses kepada petugas pendataan untuk melakukan pendataan ikan muatan dan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		2. Beroperasi antarnegara	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			antar-pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri termasuk usaha persewaan angkutan laut berbendera asing yang diageni oleh perusaha-an bukan perusaha-an perikanan berikut operator-nya				atau penang-gung jawab badan hukum d. Pas foto orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum terbaru berwarna e. Specimen tanda tangan orang perse-orangan atau penang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gung jawab badan hukum dan f. Surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampai-kan dari orang perse-orangan atau penang-gung jawab badan hukum dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
92	52224	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan yaitu seperti	- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Penetapan oleh menteri sebagai pelabuhan perikanan yang tidak dibangun pemerintah pusat dan	15 Hari	1. Memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan 2. Menerapkan sistem informasi kepelabuhanan perikanan dan	Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengoperasian fasilitas pelabuhan perikanan dan dermaga dan/atau pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan				pemerintah daerah 2. Rencana operasional pelabuhan perikanan dan 3. Pernyataan kesiapan mengoperasionalkan pelabuhan perikanan dengan melampirkan: a. Data fasilitas yang dimiliki beserta foto b. Data sumber daya		3. Melaporkan kegiatan pelabuhan perikanan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang dimiliki dan c. Data ketersediaan anggaran operasional					
			Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan perikanan yaitu pelayanan bongkar muat ikan dan lain-lain	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti keranjang, atau palet 2. Memiliki timbangan 3. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box* atau es 4. Memiliki sarana pengangkutan		1. Pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis pemerintah pusat dan 2. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									seperti gerobak dorong, kendaraan roda tiga dan/atau roda empat 5. Memiliki selasar 6. Menjaga kebersihan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan 7. Menjaga dan mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja 8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan		pemerintah pusat dan pemerintah daerah	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bongkar muat ikan dan 9. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya setiap 6 (enam) bulan			
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki sumber daya manusia tenaga bongkar muat 2. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti *forklift*, *crane*, keranjang, atau pallet	15 Hari	1. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti keranjang, atau palet 2. Memiliki timbangan 3. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box* atau es		Pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis daerah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki timbangan 4. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box*, atau es 5. Memiliki selasar 6. Memiliki sarana dan prasarana keselamatan kerja 7. Memiliki kendaraan pengangkut ikan berpendingin atau kendaraan yang dilengkapi dengan		4. Memiliki sarana peng-angkutan seperti gerobak dorong, kendaraan roda tiga dan/atau roda empat 5. Memiliki selasar 6. Menjaga kebersihan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan 7. Menjaga dan mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja 8. Memiliki penanggung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana untuk menjaga suhu ikan dan 8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan		jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan dan 9. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada gubernur sesuai kewenangannya setiap 6 (enam) bulan			
				- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki sumber daya manusia tenaga bongkar muat 2. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti *forklift, crane,*	15 Hari	1. Memiliki sarana bongkar muat ikan seperti keranjang, atau palet 2. Memiliki timbangan 3. Memiliki sarana pendinginan		1. Pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis pemerintah pusat dan 2. Pelabuhan perikanan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keranjang, atau *pallet* 3. Memiliki timbangan 4. Memiliki sarana pendinginan seperti *cool box*, atau es 5. Memiliki selasar 6. Memiliki sarana dan prasarana keselamatan kerja 7. Memiliki kendaraan pengangkut ikan berpendingin atau kendaraan yang		seperti *cool box* atau es 4. Memiliki sarana pengangkutan seperti gerobak dorong, kendaraan roda tiga dan/atau roda empat 5. Memiliki selasar 6. Menjaga kebersihan sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan 7. Menjaga dan mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja		yang tidak dibangun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan sarana untuk menjaga suhu ikan dan 8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan		8. Memiliki penanggung jawab pengoperasian pelayanan bongkar muat ikan dan 9. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya setiap 6 (enam) bulan			
93	74909	Aktivitas Profesi-onal, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan Teknik lainnnya yang tidak	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen rencana pe-ngangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam 2. Bukti pembayaran	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha 2. Pembagian hasil penjualan/ pembagian benda muatan kapal	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			diklasifikasikan di tempat lain, yaitu jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam (kapal dan benda yang telah tenggelam ≥ 50 tahun, baik yang memiliki status cagar budaya, objek				Penerimaan Negara Bukan Pajak		tenggelam antara pemerintah dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			diduga cagar budaya maupun benda selain objek diduga cagar budaya/ cagar budaya)									
94	91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	Merupakan Perizinan Berusaha di Kawasan Konservasi yang meliputi : 1. Penyediaan infrastruktur pariwisata	Seluruh	Tinggi	NIB dan Izin	1. Berita acara verifikasi lapangan 2. Proposal rencana usaha 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau retribusi daerah	17 Hari	1. Memiliki sertifikat kompetensi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi untuk setiap SDM pengusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas	-	Kawasan Konservasi Daerah	Gubernur
											Kawasan Konservasi Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			alam per-airan 2. Penye-diaan sarana dan/ atau penye-waan peralat-an dan jasa pariwi-sata alam per-airan 3. Penem-patan infra-struk-tur budi-daya				penerbitan izin pengurusan dalam hal peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi di daerah tersebut telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan		pemanfaatan di dalam kawasan konservasi 2. Menyampai-kan laporan tahunan pelaksanaan rencana usaha 3. Memiliki, me-laksanakan, dan melapor-kan Perjanjian Kemitraan dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atau retribusi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perikan an dan 4. Kegia-tan lain di kawa-san kon-servasi yang bersifat menetap				perundang-undangan		daerah atas kontribusi pemanfaatan kawasan konservasi dalam hal peraturan pemerintah yang meng-atur jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atau peraturan daerah yang mengatur jenis dan tarif retribusi daerah tersebut telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan			

B. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan	Pelepasan varietas tanaman perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman						daya yang baik (GAP)			
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.11

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			biji-bijian penghasil minyak makan lainnya						mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan	Pelepas-an varietas tanaman perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun	3 Hari		-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana,		4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara		2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar		karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
3	01137	Pertanian Bit, Gula dan	Kegiatan pembibitan dan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan	Pelepasan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tanaman Pemanis Bukan Tebu	pembenihan tanaman bit gula dan tanaman pemanis bukan tebu	- Mene-ngah					lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	varietas tanaman perke-bunan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemelihara-an, juga pemanenan dan pasca-	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman bit gula dan tanaman pemanis lainnya bukan tebu, seperti stevia dan sorgum manis								Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) cek		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia,	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang		sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan		tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
4	01140	Perke-bunan Tebu	Kegiatan pembibitan, dan pembenihan tebu	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan	Pelepas-an varietas tanaman perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanaman, pemelihara-an dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tebu	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis			Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki		mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas		1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun		pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
5	01150	Perke-bunan Temba-kau	Pembibitan dan pembenihan tanaman tembakau	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme	- Pele-pasan Varie-tas Tana-man Per-kebun-an	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penyemaian, pembibitan, penanaman, pemelihara-an dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman tembakau. Termasuk kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	daya yang baik (GAP)			
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangun an kebun termasuk rencana fasilitasi pembangun-an kebun masyarakat sekitar	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perkebunan-nya				2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendali-an organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem		2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan		dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangun-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggup-an memfasilita-si pembangun-an kebun masyarakat sekitar		an kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggup-an melaksana-kan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		dan keragaman sumber daya 70enetic serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanak-an tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
6	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf,	Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).			
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya				memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan		baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (çetak peta dan file elektronik) disertai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat		koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan		tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
7	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman pakan ternak (Produksi Benih Tanaman penutup Tanah)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standa	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sertifikasi benih tanaman perkebunan		pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya tanaman penutup tanah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis			Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
			Budi daya tanaman pakan ternak	Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	- Sertifi-kasi benih tana-man pakan ternak (Sertifi-kasi Benih Varie-	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
				Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi *self declare* terhadap standar		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak 2. Melakukan usaha Budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik	tas Lokal) - Sertifikasi benih tanaman pakan ternak (Sertifikasi Benih Bina) - Sertifikasi benih tanaman pakan ternak (Pereda		
				- Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar	-	Otomatis	1. Memelihara sumber benih. 2. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									standar mutu. 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 4. Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknologi pembukaan	-ran Benih Tanaman Pakan Ternak) - Pelepasan varietas tanaman pakan ternak (Pelepasan Varietas)	kota dalam satu provinsi	
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.			
8	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	Kegiatan perbenihan tanaman semusim lainnya. Meliputi pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	- Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan	15 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota
							-	Otomatis				

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharan , pemanenan dan pengolahan pasca-panen. Meliputi pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain	Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar			1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan		Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati / Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha		Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
9	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan peraturan perbenihan 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan	- Pendaftaran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan subtropis						instansi sesuai dengan kewenangan-nya	horti-kultura - Pele-pasan Varie-tas Tana-man Perke-bunan	Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat pernyataan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang		kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan perbenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP 2. Membuat catatan kegiatan usaha	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun	7 Hari	1. Melakukan transfer teknologi.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya				termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		2. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L. 4. Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah			
											Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		memiliki sertifikat GAP.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah tropis dan subtropis (Produksi Benih Kurma)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan penyiapan/ pelaksanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen buah-buahan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga								Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia,	3 Hari	1. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan sejenisnya (Budi Daya Kurma)				sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta		berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 5. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala		lintas provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha		1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan		usaha diberikan 7. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
10	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman buah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, Kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu	3 Hari	1. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan teknik budi		Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		daya yang baik dan benar 4. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 5. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan		dengan peraturan perundang-undangan 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat		status hak atas tanah 8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar Perkebunan		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
11	01261	Perke-bunan Kelapa	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah kelapa	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan buah kelapa	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan Budi daya Tanaman Kelapa yang baik sesuai GAP		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun	3 Hari	1. Menjaga kelestarian fungsi		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan		Lahan usaha berlokasi di Lintas Kabupaten	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		tumbuhan (OPT) 5. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 7. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		dengan kewenangan-nya 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 9. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
12	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit	- Mikro, - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu	- Pelepasan varietas tanaman perkebunan - Surat Persetujuan Penya-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau	luran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk penelitian/ riset - Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur	produsen pembesaran - Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk perusahaan kelapa sawit - Surat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan	Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) untuk Pekebun (perorangan / kelompok) - Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampai-kan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan	Sawit (SP2BKS) untuk penge-camb-ahan di seed pro-cessing unit		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan buah kelapa sawit	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Lahan Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana kerja pembangunan kebun	5 Hari	1. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 2. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Melaksana-kan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		perundang-undangan 7. Menerapkan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 8. Menerapkan teknik Budi daya yang baik dan benar 9. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
13	01269	Perke-bunan Buah Oleagi-nous Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah oleaginous lainnya	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan tanaman buah oleaginous lain, seperti buah zaitun dan lainnya	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu	3 Hari	1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 2. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menerapkan sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan		pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 5. Menerapkan teknik Budi daya yang baik dan benar. 6. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 7. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 8. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar Perkebunan		dan masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
14	01270	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman untuk bahan minuman (Produksi benih teh, kopi, kakao)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kopi, mate dan kakao (Budi daya kopi dan kakao)								lintas provinsi	
				- Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan		tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua)		lintas provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja		tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,		masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampai-kan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana kerja pembangunan kebun	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		6. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
15	01281	Perkebunan Lada	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai--an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan lada atau merica (piper spp)	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi		1. Rencana kerja pembangunan	5 Hari	1. Menerapkan teknologi		Usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi		Kabupaten/ kota	
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya		Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi		setelah pemberian status hak atas tanah 6. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksana-kan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
16	01282	Perkebunan Cengkeh	Kegiatan pembibitan dan pembenih-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa	Pelepasan Varietas Tanaman	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an tanaman cengkeh	- Mene-ngah					bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai	Perke-bunan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an dan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanenan cengkeh								Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP).		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya	5 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana,		3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara		(cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusaha-kan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan fasilitasi		Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan		pembangun-an kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksana-kan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
17	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik	Kegiatan pembibitan dan pembenih-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	i. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa	Pelepasan Varietas Tanaman	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		/ Penye-gar	an tanaman aromatik/ penyegar	- Mene-ngah					bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber	Perke-bunan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemelihara-an pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang								Kabupaten/ Kota	
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat standar	-	Otomatis	1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Tumbuhan (OPT) dan Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan		Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana,	3 Hari			Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran		perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Penerapan teknik Budi		lintas Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup		daya yang baik dan benar. 6. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara Lestari. 7. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan		kewenangan-nya. 8. Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		masyarakat sekitar. 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.			
18	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	Kegiatan Perbenihan Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaftaran varietas tanaman	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			mencakup kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman obat atau biofarmaka rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan fungisida dan yang sejenis, seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur,	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Hari pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. 2. Surat pernyataan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. (Benih Hortikultu-ra Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)				memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 3. Surat pernyataan menguasai tempat Usaha Produksi.		instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan.		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang.				Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman obat atau biofarmaka	- Mikro, - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya	- Pelep-asan Varie-tas Tana-man Per-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			rimpang (Produksi Benih Ginseng)						alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan	kebun-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an, dan pemanenan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanaman obat atau biofarmaka rimpang (Budi daya Ginseng)								Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 2. Menyampai-kan peta		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial		lintas Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk	5 Hari			Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Surat persetujuan		dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 5. Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar. 6. Penerapan teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja		pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara Lestari 7. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya . 8. Melakukan Fasilitasi pembanguna			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun,		n kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 9. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 10. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karyawan dan masyarakat sekitar Perkebunan		setelah pemberian status hak atas tanah			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang	- Mikro - Kecil	Menengah rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP) 2. Memenuhi standar usaha budi daya hortikultura tanaman obat atau	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas,						biofarmaka rimpang		Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat pernyataan memiliki	7 Hari	Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lempuyang, dlingo dan sejenisnya (Budi daya Hortikultu-ra Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)				sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		dengan kewenangannya		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki	7 Hari	Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 2. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. 3. Surat Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau		*Corporate Social Responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengedar benih dari Institusi yang berwenang. 4. Surat pernyataan menguasai tempat Usaha Produksi.					
19	01286	Pertanian Tanaman Obat atau	Perbenihan Hortikultu-ra Tanaman Obat atau	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik	Pendaf-taran varietas tanaman	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Biofarma-ka Non Rimpang	Biofarmaka Non Rimpang mencakup kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kapulaga,	- Mene-ngah					kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan perbenihan 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi) 4. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP	horti-kultura	Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			orang-aring, iles-iles, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan sejenisnya)	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan menguasai tempat Usaha Produksi 2. Surat pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat pernyataan memiliki atau menguasai sarana	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau peredaran benih 4. Surat pernyataan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang				Usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanaman, pemelihara-an, dan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari	- Penge-luaran dan pema-sukan benih tana-man	Seluruh	Gubernur
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen	15 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang (Produksi Benih Kina, Adas Pinang dan Gambir)				benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber	perkebuna - Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan Menerapkan teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai--an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			rimpang termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti kapulaga, orang-aring, iles-iles, lidah buaya, kejibeling, sambiloto, mengkudu atau pace, mahkota dewa dan								lintas provinsi	
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan	7 Hari	1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Penerapan sistem pengendalian		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sejenisnya(Budi daya tanaman obat atau biofarmaka non rimpang)	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran	7 Hari	organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat: 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas		peraturan perundang-undangan. 5. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan Fasilitasi pembangun-an kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan		sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.		tumbuhan (OPT) 9. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan kewenangan-nya.			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanaman, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka non rimpang	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoamn budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(Budi daya Kina, Adas Pinang dan Gambir)	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme	3 Hari	1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar. 3. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		3 Hari			Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang		4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan		5. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Surat pernyataan Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat		7. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sekitar perkebunan		9. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya.			
20	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik /Penye-gar dan Obat Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembeniha nnya (Produksi benih kemiri, panili, kayu manis, pala)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai	Pelepasan varietas tanaman perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, pembibitan, penanam-an, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala (Budi daya kemiri, panili, kayu manis, pala)	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Menjaga kelestarian		Usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 2. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan		Kabupaten/ kota	
											Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan	5 Hari	skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		peraturan perundang-undangan 3. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan		Usaha berlokasi di lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian		perundang-undangan 4. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 5. Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar 6. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari		Usaha berlokasi di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan		7. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 8. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 9. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 10. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
21	01291	Perke-bunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Kegiatan Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Karet Dan Penghasil Getah Lainnya	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarka			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
			Kegiatan budi daya tanaman karet dan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penghasil getah lainnya						daya yang baik (GAP)		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun	5 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana,		2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file		Kabupaten/ Kota	
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan		elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah 6. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi		dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.			
22	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Kegiatan pembenihan dan pembibitan tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	Pelepasan Varietas Tanaman Perke-bunan	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan 10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat Keterangan kelayakan sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang	15 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggara-kan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan		alam secara lestari 2. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 3. Menerapkan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dan/atau menguasai benih sumber 5. Memiliki perjanjian kerjasama/ MoU dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produsen benih sumber apabila pelaku usaha tidak memiliki dan/atau menguasai benih sumber 6. Memiliki dan/atau menguasai unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai jenis tanaman 7. Memiliki SDM di bidang perbenihan 8. Memiliki rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi benih yang dibuat per tahun 9. Memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan tanaman perkebunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik 12. Menyampaikan dokumen asal usul benih 13. Melakukan pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan 14. Melakukan pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan budi daya tanaman cemara dan tanaman tahunan lainnya	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Rencana kerja pembangunan kebun	3 Hari	1. Menerapkan teknologi pembukaan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari 2. Menerapkan teknik budi daya yang baik dan benar 3. Menerapkan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 4. Menyampai-kan peta digital lokasi Izin Usaha		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian		Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Mengusahakan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada di atas tanah hak ulayat 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan 6. Surat pernyataan Kesanggupan		6. Melakukan Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan 7. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar 8. Menjaga kelestarian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 7. Surat pernyataan Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 9. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Secara Periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
23	12091	Industri Pengolahan dan Pengeringan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan tanggungjawab sosial dan	Sertifikat Laik Operasi Pengusa-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Temba-kau							lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	haan Panas Bumi untuk Peman-faatan Langsung	Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Terintegrasi dengan kebun tembakau	5 Hari	1. Penanganan limbah sesuai ketentuan	-	Usaha yang areal dan/atau sumber	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang 3. Memiliki Dokumen Surat Keterangan Lahan atau lokasi usaha tidak dalam keadaan usaha dari Dinas teknis 4. Memiliki dokumen kesepakatan antara Kelompok		pasokan berada di satu Kabupaten/ Kota	-
											Usaha yang areal dan/atau sumber pasokan berada di lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Tani / Gapoktan dengan pemilik lahan terhadap lahan atau lokasi yang digunakan sebagai prasarana usaha atau Surat Hibah dari pemilik lahan kepada Kelompok Tani/Gapok-tan 5. Memiliki atau menguasai alat yang memenuhi SNI termasuk suku cadangnya		Usaha yang areal dan/atau sumber pasokan berada di lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(Bukti kepemilikan/ penguasaan alat) 6. Untuk Kelompok Tani /Gapoktan wajib terdaftar di Simluhtan 7. Mengintegra-sikan usaha pengolahan dengan kebun 8. Pernyataan Kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 9. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidupdan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	22121	Industri Pengasapan Karet	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Mengelola lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan, baik AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	- Sertifikat TKDN - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Per-	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	setujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Terintegrasi dengan kebun karet	5 Hari	1. Penanganan limbah sesuai ketentuan		Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang 3. Memiliki Dokumen Surat Keterangan Lahan atau lokasi usaha tidak dalam keadaan usaha dari Dinas teknis 4. Memiliki dokumen kesepakatan antara Kelompok Tani / Gapoktan dengan pemilik lahan		Usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terhadap lahan atau lokasi yang digunakan sebagai prasarana usaha atau Surat Hibah dari pemilik lahan kepada Kelompok Tani/Gapok-tan 5. Memiliki atau menguasai alat yang memenuhi SNI termasuk suku cadangnya (Bukti kepemilikan/ penguasaan alat)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Untuk Kelompok Tani /Gapoktan wajib terdaftar di Simluhtan 7. Mengintegrasi kan usaha pengolahan dengan kebun 8. Pernyataan Kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 9. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kewenangan-nya			
25	01630	Jasa Pasca-panen	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (*good handling practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha kepada	- SPPB PSAT - PSAT-PD - PSAT-PDUK - Izin Rumah Penge-masan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (good handling practices) 2. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha kepada		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 2. Surat pernyataan terkait	7 Hari	1. Menerapkan cara penanganan pascapanen yang baik dan benar (*good handling practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							informasi status kepemilikan dan kapasitas gudang 3. Bukti penguasaan alat 4. Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan 5. Dokumen rencana kerja		2. Menggunakan alat yang memenuhi SNI/PTM 3. Menguasai gudang 4. Memiliki operator alat yang terlatih, dan teknisi alat 5. Memiliki Ketersediaan alat untuk mobilisasi 6. Memiliki Ketersediaan *sparepart*		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
26	01111	Pertanian Jagung	Kelompok ini	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapka cara budi daya	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			mencakup usaha pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanam-an, pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika	- Kecil					tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) dan 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, dan c. laporan pemasaran. Laporan disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi:		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan penggunaan bahan baku, laporan proses produksi dan laporan pemasaran. Laporan disampai-kan setiap 1 tahun sekali kepada		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.		Lahan usaha berlokasi lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman jagung						dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian.			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Surat Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan		3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterampilan di bidang perbenihan					
27	01112	Pertanian Gandum	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanam-an, pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/ cantel,								Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gandum (wheat/ oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya						2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran. Laporan disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 3. Menyampai-kan laporan perkembanga n usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ran. yang disampai-kan minimal		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 2. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 3. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			serealia gandum seperti sorgum/ cantel, gandum (wheat/ oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jewawut (millet)						atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Surat Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai		3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan					
28	01113	Pertanian Kedelai	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija)								Kota dalam satu Provinsi	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran. yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasaran. yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga kerja warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija)						teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good*	- Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									agriculture practices) 7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk		(*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan		kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Surat pernyataan menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)					
29	01114	Pertanian Kacang Tanah	Kelompok ini mencakup usaha pertanian	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good*	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanam-an, pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang						*agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good*		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanah (kacang palawija)						*agriculture practices*) 2. Menyampaikan Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaranyang disampaikan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha budi daya		perkembang-an usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ranyang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan tanaman kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan , dan juga pemanenan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija						4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membukti-kan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkem-bangan usaha kepada		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)		Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
30	01115	Pertanian Kacang Hijau	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanam-an, pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau						yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(kacang palawija)						2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran. yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Kota dalam satu Provinsi	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasa-ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija)						produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (good agriculture practices) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan		benih bukan daerah endemis OPT 4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkem-bangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)					
31	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Kelompok Ini Mencakup Usaha Pertanian	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good*	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya	Serealia Lainnya, Aneka Kacang, Dan Biji Bijian Pengahasil Minyak Lainnya Mulai Dari Kegiatan Pengolahan Lahan, Penanam-an, Pemelihara-an, Pemanenan dan Pascapanen Jika Menjadi Satu						*agriculture practices*)		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kesatuan Kegiatan Tanaman Serealia Lainnya Bukan Padi, Jagung Dan Gandum, Tanamanan Aneka Kacang Lainnya Dan Pertanian Lainnya Yang Belum Diklasifika-sikan Pada Kelompok 01111 s.d. 01118						usaha meliputi: a. laporan penggu-naan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampai-kan Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasa-ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan serealia lainnya, aneka kacang, dan biji bijian penghasil minyak lainnya mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemelihara-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis dari institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanamanan aneka kacang lainnya dan pertanian lainnya						produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang belum diklasifika-sikan pada kelompok 01111 sd 01118. Termasuk						7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman serealia dan biji bijian penghasil minyak lainnya	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (good agriculture practices) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membukti-kan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
32	01121		Kelompok ini	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertanian Padi Hibrida	mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an, dan	- Kecil					tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen (GKP)	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi:		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-ran yang disampaikan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis (berupa informasi spasial) 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi	- Pelepasan varietas tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sampai dengan dihasilkan gabah kering yang memenuhi kriteria standar mutu benih						pengawasan dan sertifikasi benih 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha kepada Menteri Pertanian			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)		Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
33	01122	Pertanian Padi Inbrida	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an, dan						yang baik (*good agriculture practices*)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas Gabah Kering Panen (GKP).	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasa-		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ran yang disampai-kan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan 2. Dokumen rencana kerja	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*). 2. Menyampai-kan laporan perkembangan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha budi daya		usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan pertanian inbrida (bukan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1 Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis	- Pelepasan varietas tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan gabah kering yang						institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai	- Pema-sukan dan penge-luaran benih tana-man pangan	Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			memenuhi kriteria standar mutu benih						pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6 Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7 Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membukti-kan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
34	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Kelompok ini mencakup usaha	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menerapkan cara budi daya tanaman pangan	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanam-an, pemelihara-an, dan juga pemanenan dan pasca-panen jika						yang baik (*good agriculture practices*)			
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*) 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan pengguna-an bahan baku, b. laporan proses produksi dan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada Menteri Pertanian.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya tanaman pangan yang baik (*good agriculture practices*).		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Dokumen rencana kerja usaha budi daya		2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha meliputi: a. laporan penggunaan bahan baku, b. laporan proses produksi dan c. laporan pemasaran yang disampaikan minimal setiap 1 tahun sekali kepada		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Pertanian. 3. Menggunakan sarana produksi dalam negeri, kecuali tidak tersedia di dalam negeri. 4. Proses produksi wajib menggunakan tenaga kerja warga Negara Indonesia.			
			Kelompok ini mencakup usaha perbenihan	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih	- Pelepasan varietas	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija seperti ubi kayu, ubi						bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti untuk produksi benih atau untuk peredaran benih 4. Memiliki Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat Pernyataan memiliki tenaga kerja yang mempunyai	tanaman pangan - Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles iles, porang dan umbi umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenih-an aneka						pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (*good agriculture practices*) 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			umbi palawija	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan lahan usaha 2. Bukti lokasi produksi benih bukan daerah endemis institusi yang berwenang 3. Bukti penguasaan sarana untuk produksi benih atau untuk	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman yang baik (good agriculture practices) 2. Menerapkan standar mutu benih 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis OPT		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peredaran benih 4. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi yang berwenang 5. Surat pernyataan memiliki tenaga kerja yang		4. Memiliki keterangan kelayakan teknis sebagai produsen benih dari institusi yang berwenang 5. Menyampai-kan laporan perkembang an usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 6. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan budi daya tanaman yang baik dan benar (*good agriculture practices*)				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
35	01611	Jasa Pengolah-an Lahan	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan budi daya tanaman	-	Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering	- Menengah					pangan yang baik (GAP) 2. Menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan *GAP*	7 Hari	1. Menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik (GAP) 2. Menyampaikan laporan perkembangan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Bukti penguasaan alat 3. Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan 4. Dokumen rencana kerja		usaha kepada Menteri Pertanian		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
36	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih	Kelompok ini mencakup usaha yang bergerak dalam pemupukan	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan aplikasi	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Pengen-dalian Hama dan Gulma	lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengen-dalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak						pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama, penyakit dan gulma 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan sarana prasarana yang meliputi alat dan mesin serta bahan pemupukan/	7 Hari	1. Memiliki Bukti penguasaan sarana prasarana 2. Memiliki Sertifikat pelatihan atau kompetensi		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembibitan/ pengendalian OPT yang memenuhi SNI 2. Sertifikat kompetensi dalam aplikasi pemupukan/ penanaman bibit/benih, atau pengendalian hama dan gulma 3. Dokumen rencana kerja		dalam melakukan aplikasi pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama, penyakit dan gulma 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP): 4. Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/Persyarat-		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an Teknis Minimal 5. Menguasai gudang, alat untuk mobilisasi 6. Menggunakan operator alat yang kompeten 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian			
37	01613	Jasa Pema-nenan	Kelompok ini mencakup usaha pemanenan tanaman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan pengumpul-an hasil panen di lokasi yang disepakati atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak						2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.455

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan alat 2. Pernyataan akan menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik	7 Hari	1. Memiliki Bukti penguasaan sarana prasarana 2. Memiliki Sertifikat pelatihan atau kompetensi dalam melakukan pemanenan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan memiliki operator yang kompeten 4. Dokumen rencana kerja		3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) 4. Menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SNI/Persyarat-		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an Teknis Minimal 5. Menguasai alat untuk mobilisasi 6. Menggunakan operator alat yang kompeten 7. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	01614	Jasa Penyem-protan dan Penyer-bukan Melalui Udara	Kelompok ini mencakup usaha penyem-protan dan penyer-bukan melalui udara dengan pesawat udara khusus berdasar-kan keadaan tertentu	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan standar, operasional, dan prosedur penyemprotan dan penyerbukan 2. Memiliki izin operasional dari instansi terkait 3. Memiliki operator yang kompeten 4. Menyampai-kan laporan	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan alat 2. Surat pernyataan memiliki operator yang kompeten 3. Dokumen rencana kerja	7 Hari	1. Menerapkan standar, operasional, dan prosedur penyemprotan dan penyerbukan 2. Memiliki izin operasional dari instansi terkait		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki operator yang kompeten 4. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
39	01619	Jasa Penun-jang Pertanian Lainnya	Kelompok ini mencakup jasa penunjang pertanian lainnya	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan GAP/GHP	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyeleng-garaan pengairan/ penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operator-nya, pemelihara-						2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti penguasaan alat 2. Surat pernyataan kelayakan	7 Hari	1. Menyediakan sarana penunjang pertanian yang layak		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an dan perawatan alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operatornya dimasuk-kan dalam 77305.				sarana penunjang pertanian yang disediakan 3. Surat keterangan/ sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan 4. Dokumen rencana kerja		2. Menerapkan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan GAP/GHP. 3. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	01640	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengem-bang-biakan	Mencakup semua kegiatan pasca-panen yang ditujukan untuk meningkat-kan perkem-bangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan *Good Handling Practices* (GHP) untuk benih. 2. Kelayakan Teknis sebagai produsen dari instansi yang berwenang 3. Menyampai-kan laporan perkem-bangan usaha kepada	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum matang dan juga menjaga						Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan akan menerapkan *Good Handling Practices* (GHP) untuk benih	7 Hari	1. Menerapkan GHP untuk benih. 2. Menyampai-kan laporan perkembangan usaha kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kelembaban benih ke kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi, dan lainnya sampai benih dipasarkan. Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini				2. Surat keterangan kelayakan teknis sebagai produsen dari instansi yang berwenang 3. Bukti penguasaan alat				Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
41	10631	Industri Penggi-lingan Padi dan Penyo-sohan Beras	Mencakup usaha penggiling-an padi menjadi beras yang akan dijual termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memperhatikan prinsip K3L 2. Menerapkan praktik higienis dan sanitasi 3. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian minimal satu	- Sertifi-kat penera-pan pena-nganan yang baik pangan segar asal tumbu han	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penggiling-an padi						bulan sekali terkait: a. Informasi sumber, volume dan harga pembelian bahan baku (GKP/GKG) per bulan b. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, dll), volume penjualan, wilayah pemasa-ran, dan harga jual per bulan dan	- Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri - Regis-trasi PSAT Pro-duksi Dalam Negeri	Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Informasi stok gabah (GKP/GKG) dan/atau beras pada akhir bulan.	Usaha Kecil		
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi penerapan GHP/GMP 2. Memberikan laporan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Pertanian minimal satu bulan sekali terkait: a. Jenis dan Kapasitas Sarana dan Prasarana serta teknologi yang digunakan b. Perkembangan Usaha serta kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume dan harga pembelian,		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kadar air bahan baku (GKP, GKG dan PK) per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, Beras Premium, Beras Pecah/Menir, dll), volume penjualan, wilayah pemasa-ran dan harga jual per bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. Informasi stok gabah (GKP/GKG), Stok PK dan/atau beras (Beras Medium/Beras Premium) pada akhir bulan.			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan *Good Handling Practices* (GHP)/*Good Manufacturing Practices* (GMP)/*Hazard Analysis*	7 Hari	1. Memenuhi penerapan *Good Handling Practices* (GHP)/ *Good Manufacturing Practices* (GMP), *Hazard Analysis Critical*		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Critical Control Point (HACCP). 2. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana (*Receiving, Drying, Silo,* Husking, Milling, Packing, gudang), serta teknologi yang digunakan. 3. Rencana usaha dan kapasitas produksi 4. Surat pernyataan		*Control Point* (HACCP). 2. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian minimal satu bulan sekali terkait: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana terpakai (*Receiving, Drying, Silo, Husking,*		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber bahan baku		*Milling, Packing,* Gudang), serta teknologi yang digunakan b. Perkembangan usaha serta kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume dan harga pembelian, dan kadar air			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku (GKP, GKG, dan PK) per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Beras Medium, Beras Premium, Beras Pecah/Menir, dll), volume penjual-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, wilayah pemasaran dan harga jual per bulan e. Informasi stok gabah (GKP/GKG), Stok PK dan atau beras (Beras Medium/ Beras Premium) pada akhir bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42	10632	Industri Penggi-lingan dan Pember-sihan Jagung	Mencakup usaha penggiling-an dan pembersih-an jagung termasuk semua bagian dari tanaman jagung	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memperhatika n prinsip K3L 2. Menerapkan praktik higienis dan sanitasi 3. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian yang benar dan mudah diakses	- Sertifi-kat penera-pan pena-nganan yang baik pangan segar asal	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal satu bulan sekali terkait : a. Informasi sumber, volume, harga pembelian dan kadar air bahan	tumbu-an - Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku per bulan b. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (jagung pipilan kering pakan atau pangan), volume penjualan, wilayah pemasa-ran dan harga jual per bulan c. Informasi stok jagung pada akhir bulan	- Izin Edar PSAT Pro-duksi Dalam Negeri - Regis-trasi PSAT Pro-duksi Dalam Negeri Usaha Kecil	Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi penerapan GHP/GMP 2. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian yang benar dan mudah diakses minimal satu bulan sekali terkait : a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan b. Perkembang-an usaha		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume, harga pembelian dan kadar air bahan baku per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (Jagung pipilan kering pakan atau pangan), volume penjualan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wilayah pemasaran dan harga jual per bulan e. Informasi stok jagung pada akhir bulan			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan *Good Handling Practices* (GHP)/*Good Manufacturing `Practices* (GMP)	7 Hari	1. Memenuhi persyaratan *Good Manufacturing Practices* (GMP). 2. Memberikan laporan kepada Menteri Pertanian		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang digunakan. 3. Rencana usaha serta kapasitas produksi 4. Surat pernyataan sumber bahan baku		yang benar dan mudah diakses minimal satu bulan sekali terkait a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana serta teknologi yang diguna-kan b. Perkemba ngan usaha serta		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapasitas produksi c. Informasi sumber, volume, harga pembelian dan kadar air bahan baku per bulan d. Informasi jenis dan volume produk yang dihasilkan (jagung pipilan kering pakan atau		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pangan), volume penjualan, wilayah pemasaran dan harga jual per bulan e. Informasi stok jagung pada akhir bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
43	01192	Perbe-nihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibit-an Bit (Bukan Bit Gula)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	-	Otomatis	1. Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman pakan ternak yang baik. 2. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi self declare terhadap	- Sertifi-kasi benih tana-man pakan ternak (Sertifik asi Benih Varie-tas Lokal)	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									standar kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan ternak.	- Sertifikasi benih tanaman pakan ternak (Sertifikasi Benih Bina) - Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak (Peredaran Benih Tana-	Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										man Pakan Ternak) - Pelepas-an Varietas Tana-man Pakan Ternak (Pele-pasan Varietas		
44	01411	Pembibit-an dan Budi Daya Sapi Potong	Kegiatan pembibitan sapi potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan	Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pembibitan ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru.		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan budi daya sapi potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan	Sertifika-si Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembanguna		Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		n unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
45	01412	Pembibit-an dan Budi Daya Sapi Perah	Kegiatan pembibitan sapi perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
			Budi daya Sapi Perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	- Sertifi-kasi Cara Budi daya Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.494

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada	Yang Baik - Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
46	01413	Pembibit-an dan Budi Daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
			Budi daya kerbau potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
47	01414	Pembibit-an dan Budi Daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerap-kan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kewena-ngannya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewena-ngannya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		wilayah lintas Provinsi	
			Budi Daya kerbau perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan	- Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterriner - Registrasi Produk Hewan		
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik . 2. Surat keterangan mengenai jenis	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.504

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
48	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	Pembibitan Kuda dan Sejenisnya	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan		Lahan usaha berada di wilayah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		Ternak Yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Kabupaten/ Kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi Daya Kuda dan Sejenisnya	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pemba-ngunan unit		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.508

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.509

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49	01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara pembibitan/Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik - Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk	7 Hari	1. Menerapkan Cara pembibitan/ Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pemba-		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengem-bangan rumpun/galur baru		ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
50	01441	Pembibit-an dan Budi Daya Domba Potong	Pembibitan domba potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
			Budi daya domba potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
51	01442	Pembibit-an dan Budi	Pembibitan kambing potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan	Sertifika-si Cara	Lahan usaha yang berada di wilayah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daya Kambing Potong							Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Pembibitan Ternak Yang Baik	Kabupaten/ Kota	
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan		Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya kambing potong	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik		Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai		Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/Kota	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan kewenangan-nya			
52	01443	Pembibit-an dan Budi Daya Kambing Perah	Pembibitan kambing perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.521

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru					
			Budi daya kambing perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	- Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterriner	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan	- Registrasi Produk Hewan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
53	01444	Pembibit-an dan Budi Daya Domba Perah	Pembibitan domba perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah yang berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
			Budi daya domba perah	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifi-kasi Nomor	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya	Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan		
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
54	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ Raw Wool	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan		2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Ternak Yang Baik - Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterriner	Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55	01450	Peternakan Babi	Pembibitan babi	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.532

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya babi	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara Budi Daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.533

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi Daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

SK No 120737 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
56	01461	Budi Daya Ayam Ras Pedaging	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	–	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan	Sertifika-si Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak Yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
57	01462	Budi Daya Ayam Ras Petelur	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Produk Hewan - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
58	01463	Pembibit-an Ayam Lokal dan Persi-langan-nya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha Lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik. 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.		Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha Lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.			
59	01464	Budi Daya Ayam Lokal dan	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik	- Sertifi-kasi Cara Budi	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persilang-annya							2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Daya Ternak Yang Baik - Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.543

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	01465	Pembibit-an dan Budi Daya Itik dan/atau bebek	Pembibitan Itik dan/ atau bebek	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan cara pembibitan Ternak yang baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Budi Daya Itik dan/ atau bebek	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterriner untuk budi daya skala Besar - Registrasi Produk Hewan, untuk budi daya	Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai	7 Hari	1. Menerapkan cara budi daya Ternak yang baik 2. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja Pembangunan unit usaha		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	skala Besar	Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
61	01466	Pembibitan dan Budi Daya	Pembibitan burung puyuh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik	Sertifikasi Cara Pembibitan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Burung Puyuh							2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Budi daya burung puyuh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	_	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	- Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterriner untuk budi daya skala Besar - Registrasi	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi,		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan		produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja	Produk Hewan untuk budi daya skala Besar	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
62	01467	Pembibit-an dan Budi Daya Burung Merpati	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	–	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau Budi daya Ternak Yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan dan Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
63	01468	Pembibit-an Ayam Ras	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik	Sertifika-si Cara Pembi-bitan	Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan			
64	01469	Pembibit-an dan Budi Daya Ternak Unggas Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya ternak yang Baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau		2. Menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan		Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
65	01491	Pembibit-an dan Budi Daya Burung Unta	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya Ternak yang Baik		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau		2. Menyampaikan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan		Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
66	01492	Pengusa-haan Kokon/ Kepom-pong Ulat Sutera	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	kota dalam satu provinsi,	
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
67	01493	Pembibit-an dan Budi Daya Lebah	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik - Izin edar pa-	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				- Mene-ngah - Besar	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas,	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan atau budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengembangan rumpun/galur baru		dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	ngan olahan - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (Pmr) Sarana Produksi Pangan olahan - Izin Penerapan Cara Produksi	Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.567

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan olahan yang Baik - Persetujuan pelaksanaan uji klinik pangan Olahan - Izin Pengkajian keamanan, mutu, gizi, manfaat dan label		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										pangan olahan - Sertifikat pemenuhan komitmen ulang pangan olahan - Izin variasi mayor pangan olahan - Izin variasi nama dan/atau alamat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										kantor importir Pangan olahan selama masih dalam satu provinsi - Izin variasi nama produsen pangan olahan - Sertifikat persetujuan variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										mayor pangan olahan wajib SNI - Sertifikat pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan - Sertifikat pemenuhan komitmen variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										minor pangan olahan - Izin edar pangan olahan dengan notifikasi - Sertifikat persetujuan pangan olahan wajib SNI - Sertifikat pemenuhan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										komit-men pangan olahan		
68	01494	Pembibit-an dan Budi Daya Rusa	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertfikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan	Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan rumpun/galur baru		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
69	01495	Pembibit-an dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan kelinci	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Sertifika-si Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Budi daya kelinci	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi,	Sertifika-si Cara Budi Daya Ternak	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewena-ngannya	Yang Baik	Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya	7 Hari	1. Menerapkan Cara Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan		populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Menyampai-kan laporan realisasi		Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
70	01496	Pembibit-an dan Budi Daya Cacing	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi	- Sertifi-kasi Cara Pembi-bitan Ternak Yang Baik	Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	- Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Kota dalam satu provinsi	
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara pembibitan atau budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan/ Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampai-kan laporan populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha yang berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada di wilayah lintas provins	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan lokasi usaha peternakan		3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya			
71	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha rumah sarang walet	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan	7 Hari	1. Memenuhi cara pembibitan dan budi	- Sertifikasi Nomor Kontrol	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			cara pembibitan dan budi daya ternak yang baik 2. Surat pernyataan akan memenuhi persyaratan higiene sanitasi 3. Surat pernyataan memenuhi standar usaha pembibitan dan budi daya burung walet 4. Dokumen layout/desain		daya ternak yang baik 2. Memenuhi komitmen penerapan Higiene sanitasi 3. Menyampaikan laporan realisasi pengembangan pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	Veterriner - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangun proses produksi 5. Prosedur tertulis penerapan higiene sanitasi					
			Usaha pencucian sarang burung walet	- Mikro - Keci - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesesuaian manajemen usaha 2. Surat pernyataan akan memenuhi persyaratan	7 Hari	1. Memenuhi komitmen penerapan higiene sanitasi 2. Memenuhi kewajiban standar usaha pembersihan dan pencucian	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							higiene sanitasi 3. Dokumen layout/desain bangun proses produksi 4. Prosedur tertulis penerapan		sarang burung walet 3. Menyampaikan laporan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							higiene sanitasi		4. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.586

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Usaha pengolahan sarang burung walet	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesesuaian manajemen usaha 2. Surat pernyataan akan memenuhi	7 Hari	1. Memenuhi komitmen penerapan higiene sanitasi 2. Memenuhi kewajiban standar usaha pengolahan	Sertifika-si Nomor Kontrol Veter-riner	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persyaratan higiene sanitasi 3. Dokumen layout/desain bangun proses produksi 4. Prosedur tertulis penerapan		sarang burung walet 3. Menyampaikan laporan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							higiene sanitasi		4. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
72	01499	Pembibitan dan Budi daya Aneka Ternak Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Cara Pembibitan/Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan	- Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									populasi dan produksi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Yang Baik - Sertifi-kasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara budi daya ternak yang baik 2. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih dari komisi bibit	7 Hari	1. Menerapkan Cara Pembibitan/Budi daya Ternak yang Baik 2. Menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja		Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/kota	Bupati/Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pengem-bangan rumpun/galur baru		pembangunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada dalam wilayah lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
73	01621	Jasa Pelayan-an Kese-hatan Ternak	Seluruh	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha 3. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki tempat jasa pelayanan kesehatan ternak 2. Surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan	7 Hari	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner yang dari Dinas yang membidangi fungsi		Seluruh/ PMDN	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							instalasi farmasi, yang dipersyarat-kan untuk jasa pelayanan kesehatan ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner 3. Surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki		Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nomor pendaftaran		perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha 3. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya			
74	01622	Jasa Perka-winan Ternak	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan sertifikat standar	-	Otomatis	1. Memenuhi dan memelihara perlengkapan dan peralatan yang dipersyaratkan minimal Kontainer, N2 cair, semen beku, sarung tangan atau *plastic gloves*, gun IB dan *plastic sheath*. 2. Memiliki surat keterangan	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemenuhan persyaratan teknis sesuai angka 1 di atas dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode bull yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah, selama menjalankan kegiatan usaha. 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki tempat jasa perkawinan ternak atau unit pelayanan kesehatan hewan 2. Surat pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti perlengkapan dan peralatan yang	7 Hari	1. Memenuhi dan memelihara perlengkapan dan peralatan yang dipersyaratkan minimal Kontainer, N2 cair, semen beku, sarung tangan atau *plastic gloves*, gun IB dan *plastic sheath*. 2. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai angka 1 di atas		Seluruh/ PMDN	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dipersyarat-kan minimal Kontainer, N2 cair, semen beku, sarung tangan atau *plastic gloves*, gun IB, dan *plastic sheath* 3. Surat pernyataan menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode bull yang sama paling lama 3 (tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah		dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan. 3. Menggunakan semen beku yang memenuhi SNI dengan kode bull yang sama paling lama 3			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.602

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(tiga) tahun dalam 1 (satu) wilayah, selama menjalankan kegiatan usaha. 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya .			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
75	01623	Jasa Penetas-an Telur	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan produksi dan distribusi ternak umur sehari 2. Menyampai-kan laporan pengelolaan telur infertil 3. Menyampai-kan laporan kegiatan pengembangan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Penilaian Penerap-an Cara Penetas-an Telur Yang Baik	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat keterangan mengenai jenis komoditas, strain dan lokasi usaha peternakan 2. Surat pernyataan kesanggupan menerapkan cara penetasan telur yang baik	7 Hari	1. Menerapkan standar cara penetasan yang baik 2. Menyampai-kan Setting Hatching Record (SHR) 3. Menyampai-kan laporan. produksi dan distribusi ternak umur sehari 4. Menyampai-kan laporan pengelolaan telur infertil 5. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha lintas Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi	Gubernur
											Lahan usaha lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 6. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
76	01629	Jasa Penun-jang Peternak-an Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan *self declare* terhadap standar kegiatan usaha jasa	-	Lahan usaha berada di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peternakan lainnya 2. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan	7 Hari	1. Menyampai-kan laporan realisasi rencana kerja pemba-ngunan unit usaha peternakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berada di wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kewenangan-nya 2. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
77	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Penge-pakan Daging Bukan Unggas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan	15 Hari	1. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa pernyataan memiliki tenaga:	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veter-riner - Regis-trasi Produk Hewan	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan 2. Surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan		a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner b. tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter	- Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan akan mempekerjakan: a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner b. Tenaga pemeriksa daging		hewan penanggung jawab teknis c. *Animal Welfare Officer* (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis dan d. Paling kurang 2 orang Juru			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(keurmas-ter) dibawah pengawas-an dokter hewan penang-gung jawab teknis c. Animal Welfare Officer (AWO) dibawah pengawas-an dokter hewan penang-gung jawab teknis d. Paling kurang dua		Sembelih Halal. 2. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahtera-an hewan, sebelum RPH operasional 3. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		4. Memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah.			
78	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi fungsi	15 Hari	1. Pemenuhan komitmen untuk izin usaha RPH sebelum operasional berupa	- Sertifikasi Nomor Kontrol Veterriner	Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berada di	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daging Unggas					peternakan dan kesehatan hewan terkait dengan persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan 2. Surat pernyataan akan memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi,		pernyataan memiliki tenaga: Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner a. tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan	- Registrasi Produk Hewan - Surat Pendaftaran Berbahaya	wilayah lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi	
											Lahan usaha berada di wilayah lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							biosekuriti dan kesejahteraan hewan 3. Surat pernyataan akan mempekerja-kan: a. Dokter hewan sebagai pelaksana dan penang-gung jawab teknis pengawas-an kesehatan masyara-		penang-gung jawab teknis b. *Animal Welfare Officer* (AWO) dibawah penga-wasan dokter hewan penang-gung jawab teknis dan c. Paling kurang 2 orang Juru Sembelih Halal.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kat veteriner b. Tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis c. Animal Welfare Officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan		2. Pemenuhan komitmen memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan, sebelum RPH operasional 3. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab teknis d. Paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersya-ratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-dangan		4. Memiliki rekomendasi sistem pengelolaan limbah.			
79	21024	Industri Bahan	Produsen Obat	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan	20 Hari	1. Menyampai-kan laporan	- Pendaf-taran	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	Tradisional untuk Hewan	- Menengah - Besar			memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai lokasi untuk produksi obat hewan sarana/ peralatan dan		rencana impor bahan baku, rencana produksi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB). 3. Menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan	Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Perubahan Nomor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen layout/ rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan 4. Dokumen prosedur pelaksanaan		apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	Pendaftaran Obat Hewan) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Sertifikat Cara Pembuatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan produksi 5. Dokumen struktur organisasi 6. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen			Obat Hewan yang Baik (CPO-HB)		
80	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan	20 Hari	1. Menyampaikan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi	- Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan		sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampaikan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Pendaftaran Obat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersihan b. *Pest control* c. Area karantina, penolakan (*rejected*) dan			Hewan (Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelulusan (released) d. Area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. Ventilasi dan penerangan yang memadai f. Tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat			- Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik - Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. Ruang penyim-panan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. Pallet/rak untuk penyimpan an obat hewan i. Alat pemadam kebakaran j. Alat pemantau suhu yang dikalibrasi k. Alat pelindung diri sesuai kebutuhan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. Kebersihan ruangan b. Pengadaan /pembelian obat hewan c. Pengarsipan dokumen d. Penerimaan obat hewan e. Penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. Penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa h. Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. Pemantauan suhu j. Pemilihan jasa *pest control* k. Pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							l. Pengembalian obat hewan kepada pemasok m. Pemusnahan obat hewan n. Pengiriman obat dari produsen, pelabuhan /bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
81	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat	20 Hari	1. Menyampaikan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampaikan laporan permohonan	- Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat Hewan (Persetujuan Peru-	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan		persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	bahan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pene-tapan Pusat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana 7. Kebersihan 8. *Pest control* 9. Area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (released) 10. Area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci			Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11.Ventilasi dan penerangan yang memadai 12.Tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat 13.Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain 14.Pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan 15.Alat pemadam kebakaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							16.Alat pemantau suhu yang dikalibrasi dan 17.Alat pelindung diri sesuai kebutuhan 18.Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur 19.kebersihan ruangan 20.Pengadaan/pembelian obat hewan 21.Pengarsipan dokumen 22.Penerimaan obat hewan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							23. Penyimpanan obat hewan 24. Pengeluaran obat hewan 25. Penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa 26. Sistem k3 (kesehatan dan keselamatan kerja) 27. Pemantauan suhu 28. Pemilihan jasa *pest control* 29. Pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							30. Pengembalian obat hewan kepada pemasok 31. Pemusnahan obat hewan 32. Pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/ bandara ke customer tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir					
82	46446	Perdagangan	Seluruh (eksportir,	- Mikro	Menengah Tinggi		1. Surat pernyataan	20 Hari	1. Menyampaikan laporan		Seluruh (Eksportir/	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.633

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Besar Kosmetik untuk Hewan	importir, distributor)	- Kecil - Mene-ngah - Besar		NIB dan Sertifikat Standar	memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin		ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan	- Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an baru) - Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an ulang) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Peru-	Importir / Distributor)	
											Distributor PMDN	Gubernur

SK No 120740 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana:		apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	bahan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Penet-apan Pusat		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.635

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Kebersihan b. *pest control* c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*) d. area penolakan (*rejected*) yang berada di lokasi yang terkunci			Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		

SK No 120738 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. ventilasi dan pene-rangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpa nan oba g. ruang penyimpa nan obat hewan terpisah dengan komoditi lain					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. pallet/ rak untuk penyim-panan obat hewan i. alat pemadam kebaka-ran j. alat peman-tau suhu yang dikalib-rasi k. alat pelin-dung diri sesuai kebu-tuhan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pest control k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)* l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat dari produ-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sen, pelabu-han/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyim-panan perusa-haan importir					
83	46447	Per-dagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan	20 Hari	1. Menyampai-kan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	- Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an baru)	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program		instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	- Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an ulang) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Peru-bahan Nomor Pendaf-taran Obat Hewan)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersih-an b. pest control c. area karantina, penolakan			- Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pendaf-taran Obat Hewan) - Reko-menda-si badan usaha di bidang pema-saran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*rejected*) dan pelulusan (released) d. area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerangan yang memadai f. tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria pe-			yang kontrak Produksi Suplemen Kesehatan - Perubahan Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik - Rekomendasi Impor-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nyimpanan obat g. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/ rak untuk penyimpanan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang dikalibrasi k. alat pelindung diri			tir Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan - Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai kebutuhan 7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. Kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan			dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)* l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari produ-sen, pelabu-han/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyim-panan perusa-haan importir			-		
84	46448	Perda-gangan Besar Bahan Baku Obat Tradisi-	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang	20 Hari	1. Menyampai-kan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik	- Pendaf-taran Obat Hewan (pen-	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		onal Untuk Manusia dan Hewan					dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha	daftar-an baru) - Pendaf-taran Obat Hewan (pen-daftar-an ulang) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Peru-bahan Nomor Pen-daftar-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersih-an b. *pest control* c. area karantina,		yang telah terbit.	an Obat Hewan) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Penet-apan Pusat Penye-dia Bahan Baku		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penolakan (*rejected*) dan pelulusan (released) d. area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerangan yang memadai f. tempat penyimpanan yang memadai			dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan kriteria penyimpanan oba g. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/ rak untuk penyim-panan obat hewan i. alat pemadam kebaka-ran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. alat pemantau suhu yang dikalibrasi k. alat pelindung diri sesuai kebutuhan 7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan 656embali obat hewan *(recall)* l. pengembalian obat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyimpanan perusa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							haan importir					
85	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan	Seluruh (eksportir, importir, distributor)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/	20 Hari	1. Menyampaikan laporan ekspor/impor / distribusi dan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar	- Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran baru) - Pendaftaran Obat Hewan (pendaftaran ulang) - Pendaftaran Obat	Seluruh (Eksportir/ Importir / Distributor)	Menteri/ Kepala Badan
											Distributor PMDN	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya		yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.	Hewan (Perse-tujuan Peru-bahan Nomor Pen-daftar-an Obat Hewan) - Pendaf-taran Obat Hewan (Perse-tujuan Penga-lihan Nomor Pen-daftar-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersihan b. *pest control* c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (released) d. area penolak-			an Obat Hewan) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan pene-rangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai sesuai dengan kriteria penyim-panan obat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dikalibrasi k. alat pelindung diri sesuai kebutuhan 7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. pemilih-an jasa *pest control* k. pengem-balian dan penarik-an kembali obat hewan *(recall)* l. pengem-balian obat hewan kepada pemasok m. pemusnah-an obat hewan n. pengirim-an obat dari produsen, pelabu-han/ bandara ke					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							customer tanpa melalui sarana penyim-panan perusa-haan importir					
86	47726	Perda-gangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro, - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH) yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat	20 Hari	1. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menjalankan kegiatan usaha sesuai	Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/ menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen struktur organisasi 4. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi		dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Menyampai-kan laporan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya 5. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen 6. Dokumentasi sarana: a. Kebersih-an b. *pest control* c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. area penolakan (*rejected*) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan pene-rangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai sesuai dengan kriteria penyim-panan oba g. ruang penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/ rak untuk penyim-panan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat peman-tau suhu yang dikalibrasi k. alat pelin-dung diri sesuai kebu-tuhan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. penanganan produk Kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan *(recall)*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan n. pengiriman obat dari produsen, pelabuhan/ bandara ke *customer* tanpa melalui sarana penyimpanan perusahaan importir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
87	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 4. Surat pernyataan memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sertifikat pelatihan PJTOH. 5. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu. 6. Dokumen struktur organisasi. 7. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya. 8. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. 9. Dokumentasi sarana: a. kebersihan b. pest *control* c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerang-an yang memadai f. tempat penyimpan an yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpan an obat g. ruang penyimpan an obat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang dikalibrasi dan k. alat pelindung diri sesuai kebutuhan 10. Dokumen standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									g. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (*recall*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									l. pengembalian obat hewan kepada pemasok dan m. pemusnahan obat hewan			
88	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Menyampaikan laporan dan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 4. Surat pernyataan memiliki Penanggung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH. 5. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu.	-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Dokumen struktur organisasi. 7. Dokumen program pelatihan personel yang mencakup identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaan-nya. 8. Surat pernyataan memiliki layanan pengaduan konsumen. 9. Dokumentasi sarana: a. kebersihan b. pest *control*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. area karantina, penolakan (*rejected*) dan pelulusan (*released*) d. area penolakan (*rejected*) yang berada di lokasi yang terkunci e. ventilasi dan penerangan yang memadai f. tempat penyim-panan yang memadai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kriteria penyim-panan obat g. ruang penyimp-anan obat hewan terpisah dengan komoditi lain h. pallet/rak untuk penyimpan an obat hewan i. alat pemadam kebakaran j. alat pemantau suhu yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikalibrasi dan k. alat pelindung diri sesuai kebutuhan. 10. Dokumen standar operasional prosedur berupa prosedur: a. kebersihan ruangan b. pengadaan/pembelian obat hewan c. pengarsipan dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. penerimaan obat hewan e. penyimpanan obat hewan f. pengeluaran obat hewan g. penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa h. sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									i. pemantauan suhu j. pemilihan jasa *pest control* k. pengembalian dan penarikan kembali obat hewan (*recall*) l. pengembalian obat hewan kepada pemasok m. pemusnahan obat hewan	-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
89	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	Apotek veteriner, depo obat hewan, pet shop, poultry shop dan toko obat hewan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan memiliki Penangung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH yang dilengkapi dengan pernyataan dari PJTOH, ijazah PJTOH, dan sertifikat pelatihan PJTOH 2. Surat pernyataan memiliki/menguasai sarana/peralatan dan tempat	20 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu 3. Dokumen Standar Operasional prosedur (SOP)		terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. 4. Memiliki penanggungja wab teknis obat hewan (PJTOH). 5. Memiliki sarana prasarana usaha.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki prosedur dalam menjalankan kegiatan usaha.			
90	75000	Aktivitas Kesehat-an Hewan	Seluruh	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri, Puskeswan Mandiri, atau Klinik Hewan sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan	Radiologi Diagnos-tik dan/atau Interven-sional	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Praktik Dokter Hewan Mandiri Kuda, Praktik Dokter Hewan Mandiri Akuatik, atau Praktik Dokter Hewan Mandiri Satwa Liar sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota, atau Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 3. Memenuhi standar pengelolaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 4. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokter hewan penanggungjawab untuk Klinik Hewan 6. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 7. Menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan makanan hewan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan 8. Menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk (Klinik Hewan), selama menjalankan kegiatan usaha 9. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki tempat Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner 2. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi, yang dipersyarat-kan untuk	7 Hari	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau laboratorium veteriner dari		Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner 3. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan,		Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, bahan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan bahan yang dipersyarat-kan untuk Laboratorium Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laboratorium Veteriner 4. Surat Pernyataan memiliki Dokter Hewan penanggung jawab Klinik		dan/atau instalasi farmasi yang dipersyarat-kan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau Laboratorium Veteriner, selama menjalankan kegiatan usaha. 3. Memiliki dokter hewan penanggung-jawab			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Hewan, Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner yang dibuktikan dengan ijazah Dokter Hewan 5. Surat pernyataan memiliki radiologi atau x-ray yang mempunyai perizinan pemakaian dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN),		4. Memenuhi standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 5. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 6. Menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk kegiatan usaha Rumah Sakit Hewan 6. Surat Pernyataan pemenuhan standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 7. Surat pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran		apabila menggunakan makanan hewan kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan 7. Menerapkan sistem pengelolaan limbah, selama menjalankan kegiatan usaha. 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Surat pernyataan Memiliki instalasi pembuangan limbah atau bekerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah		pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya			
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki tempat Rumah Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner	7 Hari	1. Memiliki surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis untuk Rumah Sakit Hewan atau		Seluruh/ PMDN	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan memiliki persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan instalasi farmasi, yang dipersyaratkan untuk Rumah Sakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner 3. Surat Pernyataan memiliki		Laboratorium Veteriner sesuai yang dipersyarat-kan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau laboratorium veteriner dari Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Pejabat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persyaratan teknis seperti fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan bahan yang dipersyaratkan untuk Laboratorium veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Laboratorium Veteriner 4. Surat Pernyataan memiliki Dokter Hewan penanggung jawab Rumah		Otoritas Veteriner Kabupaten/ Kota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkap-an, peralatan, bahan, dan/atau instalasi farmasi yang dipersyarat-kan dalam ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sakit Hewan, atau Laboratorium Veteriner yang dibuktikan dengan ijazah Dokter Hewan 5. Surat pernyataan memiliki radiologi atau x ray yang mempunyai perizinan pemakaian dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN), untuk kegiatan usaha Rumah Sakit Hewan: 6. Surat Pernyataan		peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner atau Laboratorium Veteriner selama menjalankan kegiatan usaha 3. Memiliki dokter hewan penanggungj awab 4. Memenuhi standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemenuhan standar pengelolaan shelter hewan untuk kegiatan usaha shelter hewan 7. Surat Pernyataan menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran 8. Surat pernyataan memiliki instalasi pembuangan limbah atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam		usaha shelter hewan 5. Menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran, selama menjalankan kegiatan usaha 6. Menggunakan makanan hewan kesayangan yang memiliki nomor registrasi apabila menggunakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan limbah		makanan hewan kesayangan komersial dalam menjalankan kegiatan usaha shelter hewan 7. Menerapkan sistem pengelolaan limbah, selama menjalankan kegiatan usaha 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pimpinan instansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan kewenangan-nya			
91	01116	Pertanian Kacang Hortikultura	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Menerapkan peraturan perbenihan 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah					1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana	7 Hari			Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanenan dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultu-ra, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang								Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas, miju-miju, lupin, kacang polong,	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi	7 Hari	1. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya				2. Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Pernyataan		kewenangan-nya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 5. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi		komoditas dan lokasi)		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
92	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada	Pendaftaran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hortikultura sayuran daun						pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibili-ty* (CSR) secara		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penanam-an, pemelihara-an dan juga pemanen-an, dan pasca-panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, kembang								Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan batang lainnya	- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Sertifikat kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi 2. Benih atau sertifikat sistem manajemen mutu 3. Surat Pernyataan	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan		Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perbenihan 5. Surat Keterangan menguasai tempat usaha produksi				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
93	01132	Pertanian Hortikultura Buah	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi		1.Surat Pernyataan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan		Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan		usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca-panen jika	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya								Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai Lahan/kebun untuk usaha budi daya yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTW) 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai	7 Hari	1. Melakukan transfer teknologi 2. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk usaha budi daya (dilengkapi dokumen. perizinan sarana prasarana jika diperlukan) 3. Rencana usaha 4. Surat pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 5. Surat pernyataan		4. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah				Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
94	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran buah	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaftaran varietas tanaman hortikultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat keterangan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat keterangan kompetensi		*corporate* social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/ oyong dan sejenisnya								lintas Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)			
95	01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaftaran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hortikultura sayuran umbi						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis,	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		Lahan usaha berlokasi di	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya				tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
96	01136	Pertanian Jamur	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman jamur	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana	7 Hari			Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca-	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jamur dan truffle, seperti jamur merang, jamur tiram, jamur shitake, jamur kuping dan sejenisnya								Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.749

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
97	01139	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

SK No 136599 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		*corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pascapanen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya								lintas Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi. 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan dan 3. Surat Pernyataan memiliki atau	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)			
98	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Pertanian tanaman bunga, yang	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha.	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Produksi-nya adalah bunga potong dan kuncup bunga. Tanaman Bunga pada kelompok ini misalnya anggrek, anyelir,						2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gerbera/ hebras, Gladiol, krisan, mawar, melati, sedap malam dan tanaman bunga Lainnya. Termasuk tanaman bunga lainnya yang diambil bunganya. Pertanian tanaman bunga yang hasilnya adalah	Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tanaman bunga Hidup masuk ke golongan 013.						yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.					
99	01194	Pertanian Pembibit-an Tanaman Bunga	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan			
100	01210	Pertanian Buah Anggur	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaf-taran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			buah anggur						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan penyiapan atau pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah anggur	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya . 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.					
101	01230	Pertanian Buah Jeruk	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah jeruk	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan			
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penanam-an, pemelihara-an , pemanenan dan pasca-panen buah jeruk Besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin						2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 3. Membuat catatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan clementine, dan buah jeruk lainnya						kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP. 2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.		memenuhi standar K3L.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
102	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah apel dan buah batu	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah apel dan buah batu, seperti apel, aprikot, cherry,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			peach dan nectarine, pear dan quince, plum dan sloe, markisa, kepel, terong Belanda dan buah delima, dan buah batu lainnya								lintas Provinsi	
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP. 2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.		4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
103	01251	Pertanian Buah Beri	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman buah beri	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Surat Pernyataan menguasai	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi		corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan penyiapan/ pelaksana-an, penanam-an, pemelihara-an, pemanenan dan pasca-panen buah beri seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberry,	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			strawberry dan beri lainnya								lintas Provinsi	
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP. 2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.		4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.788

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
104	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman sayuran tahunan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136560 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang					
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an, dan pemanenan tanaman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya								Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)			
105	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan	Pendaf-taran varietas tanaman	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			buah semak lainnya						instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	horti-kultura	Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-an, penanam-an, pemelihara-an dan pemanenan tanaman buah semak lainnya, termasuk locust beans	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha. 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.					
106	01283	Pertanian Cabai	Kegiatan pembibitan dan pembenih-an tanaman cabai	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan			
			Kegiatan pengolahan lahan, penyemai-	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pascapanen sayuran cabai (capsicumspp), seperti cabai Besar, cabai rawit dan paprika	- Menengah					melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan 3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		kewenangan-nya 2. Melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.B.804

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
107	01301	Pertanian Tanaman Hias	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Membuat catatan kegiatan usaha 2. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP	-	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 136544 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan. 2. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 3. Melakukan Budi daya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang baik melalui penerapan GAP.		Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW	7 Hari	1. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Surat Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan) 3. Rencana usaha. 4. Surat Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya		2. Melakukan transfer teknologi. 3. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya. 4. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.		Kabupaten/ Kota	
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah					
108	01302	Pertanian Pengem-bang-biakan Tanaman	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya 2. Menerapkan peraturan Perbenihan	Pendaf-taran varietas tanaman horti-kultura	Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Lahan usaha berlokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pernyataan menguasai tempat usaha produksi 2. Surat Pernyataan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) secara periodik kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangan-nya		Lahan usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lahan usaha berlokasi lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lahan usaha berlokasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat Pernyataan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih 4. Surat Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi yang berwenang		2. Menerapkan peraturan Perbenihan		lintas Provinsi	

C. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEHUTANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Lembaga konservasi untuk kepentingan umum yang meliputi taman safari, kebun binatang, taman satwa, taman satwa khusus, kebun botani, herbarium, museum zoologi dan taman	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, atau Koperasi 2. Rencana karya pengelolaan lembaga konservasi untuk kepentingan umum 3. Proposal teknis 4. *Site plan* 5. Bukti kepemilikan atau legalitas penguasaan	20 Hari	1. Membuat rencana karya lima tahunan 2. Membuat rencana karya tahunan 3. Melakukan pembangunan infrastruktur 4. Mengelola lembaga konservasi secara intensif sesuai dengan etika dan kesejahteraan satwa	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tumbuhan khusus				lahan yang sah 6. Persetujuan teknis 7. Pakta integritas bermaterai 8. Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		5. Membuat dan menyampai-kan laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembang-an pengelolaan satwa kepada Dirjen KSDAE dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar/Balai KSDA sesuai lokasi usaha			
			Penangkar-an jenis tumbuhan dan satwa liar		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha perseorangan atau non-perseorangan	14 Hari	1. Membangun sarana dan prasarana seperti fasilitas kandang		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(BUMN, BUMD, PT, PT Perorangan, CV, BUMDes atau Koperasi) 2. Dokumen legalitas asal usul induk, benih atau bibit 3. Proposal teknis 4. Bukti kepemilikan atau legalitas penguasaan lahan yang sah 5. Persetujuan teknis 6. Pakta integritas		2. Memiliki SDM yang melakukan pemeliharaan dan melakukan pengelolaan limbah kotoran dan sisa makanan satwa 3. Menyusun laporan triwulan, membuat studbook, logbook, melakukan penandaan dan/atau pencatatan 4. Memperhati-kan kondisi satwa, baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang bermaterai 7. Bukti pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		kesehatan maupun kesejahtera-an satwa			
			Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, CV, Koperasi atau BUMDes 2. Proposal Teknis 3. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai atau Balai Besar KSDA	14 Hari	1. Membangun sarana prasarana seperti fasilitas perkantoran dan penampung-an yang memadai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan 2. Memiliki SDM		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilampiri dengan berita acara pemeriksaan teknis 4. Pakta integritas yang bermeterai 5. Bukti pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Peredaran Jenis TSL DN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		pengelolaan limbah 3. Menyusun dan menyampaikan laporan transaksi 4. Memperhatikan kondisi satwa hidup, baik kesehatan maupun kesejahteraan satwa			
			Peredaran jenis tumbuhan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan non-	14 Hari	1. Membangun sarana prasarana		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan satwa liar luar negeri				perseorangan yaitu BUMN, BUMD, PT, CV, Koperasi, dan BUMDes 2. Proposal teknis 3. Pertimbangan teknis dari Kepala Balai atau Balai Besar KSDA dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Teknis 4. Pakta integritas yang bermeterai 5. Bukti pembayaran PNBP Perizinan		seperti fasilitas perkantoran dan penampung-an yang memadai dan memenuhi ketentuan perundang-undangan 2. Memiliki SDM pengelolaan limbah 3. Menyusun dan menyampai-kan laporan transaksi 4. Memperhati-kan kondisi satwa hidup, baik kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berusaha Peredaran Jenis TSL LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		maupun kesejahtera-an satwa			
			Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Pemohon merupakan pelaku usaha non-perseorangan yaitu BUMN, BUMD, BUMDes, PT, CV dan Koperasi 2. Proposal teknis 3. Pertimbangan teknis 4. Bukti kepemilikan	14 Hari	1. Memelihara dan merawat kesehatan serta menjaga keamanan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan 2. Menyampai-kan laporan mengenai perkembang-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau penguasaan lahan yang sah menurut undang-undang 5. Sertifikasi dan/atau penandaan jenis TSL 6. Surat keterangan kesehatan satwa untuk jenis satwa liar hidup dari instansi yang berwenang 7. Pakta integritas yang bermeterai 8. Bukti pembayaran		an kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dirjen KSDAE 3. Mengasuransikan tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang diperagakan 4. Menyiapkan bank garansi sebagai dana jaminan untuk pengangkutan kembali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							PNBP Perizinan Berusaha Peragaan Jenis Tumbuhan dan Sawa Liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi yang diperagakan ke lembaga konservasi yang bersangkutan 5. Membayar iuran/ pungutan spesimen tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan sesuai ketentuan yang berlaku 6. Menyampai-kan laporan disertai Berita Acara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan visum dokter hewan yang berkompeten apabila terjadi kematian tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk peragaan dalam negeri atau visum untuk peragaan luar negeri 7. Menggunakan prasarana dalam melakukan pengangkutan tumbuhan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan satwa liar yang dilindungi didasarkan kepada standar pengangkutan yang berlaku Menyertakan tenaga pemelihara/ perawat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dengan memadai			
			Pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan izin panas bumi/ penugasan pengusahaan panas bumi/ penugasan	25 Hari	1. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pada kawasan pelestarian alam pada zona pemanfaat-an/ blok pemanfaat-an di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam				purvei pendahuluan dan eksplorasi/ penugasan eksplorasi/ kuasa pengusahaan panas Bumi yang dikeluarkan oleh menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintah-an di bidang energi dan sumber daya mineral/ kontrak operasi bersama atas		panas bumi tahap eksplorasi dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan konservasi sumber daya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nama pemohon 2. Persetujuan prinsip dari menteri investasi/ kepala BKPM an Menteri LHK 3. Berita acara pemberian tanda batas areal 4. peta usulan areal kegiatan eksplorasi dan dilampiri dengan data shapefile 5. Peta citra penginderaan jauh 6. Rencana kegiatan		alam dan ekosistem 2. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan tahunan, yang merupakan penjabaran per tahun dari rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan panas bumi 3. Melaksana-kan perlindungan dan pengamanan kawasan dan potensinya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							eksplorasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi 7. Bukti pembayaran PNBP berupa iuran perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi		bersama UPT/UPTD setempat pada dan di sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi 4. Tidak melakukan penebangan pohon, dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon, harus mengganti pohon yang ditebang dengan perbandingan 1:100 (satu berbanding seratus) anakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pohon jenis lokal atau endemik untuk ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan-nya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau masa berlakunya perizinan berusaha 5. Melaksana-kan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanaman dan pemeliharaan sampai berumur 5 (lima) tahun pada areal kegiatan eksplorasi yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan konflik sosial atau tenurial dengan cara persuasif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksana-kan ketentuan sebagaimana termuat dalam Persetujuan Lingkungan dan Dokumen lingkungan 8. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaat-kan infrastruktur milik negara 9. Memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									konservasi alam dan ekosistem di dalam Melaksana-kan kegiatan terkait konservasi keaneka-ragaman hayati dan restorasi kawasan 10. Mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan 11. Melaksana-kan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan Eksplorasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jika terdapat areal yang sudah tidak dipergunakan atau tidak melanjutkan ke tahap eksploitasi dan pemanfaatan 12. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya antara lain untuk kegiatan:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi b. Perlindungan dan pengamanan di dalam dan sekitar Areal Kegiatan Eksplorasi c. Pelestarian keanekaragaman hayati			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Pengelola-an limbah dan e. Kegiatan lain yang men-dukung pengelola-an bidang konser-vasi 13. Membuat laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi secara berkala berupa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan semester I dan laporan tahunan kepada Menteri 14. Melaksana-kan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan UPT/UPTD setempat 15. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya 16. Memelihara aset hasil pelaksanaan kegiatan eksplorasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaat-an jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaat-an pada kawasan pelestarian alam pada zona pemanfaat-an/ blok pemanfaat-an di kawasan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Panas Bumi/ Penugasan Pengusahaan Panas Bumi /Kuasa Pengusahaan Panas Bumi yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggar akan urusan pemerintah-an di bidang energi dan sumber daya mineral/ Kontrak Operasi Bersama/ Kontrak Jual Beli	26 Hari	1. Menyeleng-garakan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan dengan menerapkan kaidah konservasi di bidang geologi, kelestarian sumber daya alam hayati, konservasi tanah dan air sesuai dengan Persetujuan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Energi/Uap atas nama pemohon 2. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 3. Berita acara pemberian tanda batas areal 4. Peta usulan Areal Kegiatan Usaha dan dilampiri dengan data shapefile 5. Peta citra penginderaan jauh		Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem 2. Menyusun dan menyampaikan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi yang disahkan Dirjen KSDAE			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi 7. Hasil Studi Kelayakan dan laporan hasil Eksplorasi 8. Bukti pembayaran PNBP berupa iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan		setiap 5 (lima) tahunan kedua dan berikutnya 3. Menyusun dan menyampai-kan Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Direktur Teknis, yang merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Pengusaha-an Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan 4. Membayar PNBP berupa pungutan secara berkala Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan terhadap luas Areal Kegiatan Usaha setiap tahun sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melaksana-kan perlindung-an dan pengamanan kawasan dan potensinya bersama UPT atau UPTD setempat pada dan di sekitar Areal kegiatan Usaha 6. Menyelesai-kan konflik sosial atau tenurial dengan cara persuasif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Tidak melakukan penebangan pohon, dan apabila terpaksa melakukan penebangan pohon, harus mengganti pohon yang ditebang tersebut dengan perbanding-an 1:100 (satu berbanding seratus) anakan pohon jenis lokal atau endemik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ditanam pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan nya dan dipelihara sampai umur 5 (lima) tahun dan/atau masa berlakuknya Perizinan Berusaha 8. Melaksana-kan penanaman dan pemelihara-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an sampai berumur 5 (lima) tahun pada Areal Kegiatan Usaha yang sudah tidak diperguna-kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Melaksana-kan ketentuan sebagaimana termuat dalam dokumen Amdal 10. Memelihara aset negara bagi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemegang izin yang memanfaat-kan infrastruktur milik negara 11. Memiliki sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan ekosistem di dalam melaksana-kan kegiatan terkait konservasi keaneka-ragaman hayati dan restorasi kawasan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Mendukung pemangku kawasan dalam pengelolaan kawasan 13. Melaksana-kan restorasi ekosistem pada Areal Kegiatan Usaha yang sudah tidak diperguna-kan tanpa menunggu selesainya jangka waktu Perizinan Berusaha 14. Mengalokasi-kan anggaran yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memadai untuk pemenuhan kewajiban di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem-nya antara lain untuk kegiatan: a. Pem-berdayaan masyara-kat di sekitar Areal Kegiatan Usaha b. Per-lindungan dan peng-amanan di dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sekitar Areal Kegiatan Usaha c. Pelestarian keanekaragaman hayati d. Pengelolaan limbah dan e. Kegiatan lain yang mendukung pengelolaan bidang konservasi 15. Membuat laporan pelaksanaan Perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan secara berkala berupa laporan Semester I dan laporan tahunan kepada menteri 16. Melaksana-kan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan UPT/UPTD setempat 17. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, atau Taman Wisata Alam termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan oleh Kepala UPT atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan-nya 18. Memelihara aset kegiatan eksploitasi dan pemanfaatan sampai dengan berakhirnya perizinan			
			Pemanfaat-an jasa lingkung-an air skala/ kategori mikro untuk kegiatan usaha	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas	25 Hari	1. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air tidak menimbul-kan kerusakan ekosistem		1.Taman hutan raya lintas kabupaten/ kota 2.Taman hutan raya skala kabupaten/ kota	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemanfaat-an massa air dengan pengguna-an debit kurang dari 10 liter/detik Pemanfaat-an jasa lingkung-an air skala/ kategori kecil untuk kegiatan usaha pemanfaat-an massa air dengan pengguna-an debit 10 liter/detik – 30 liter perdetik				dan peta tanda batas 3. Disain fisik sarana dan prasarana 4. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding sepuluh ribu) dan dilampiri dengan data shapefile 5. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE		pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Wisata Alam atau Taman Buru 2. Merehabilita-si kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 3. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam		Taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi, dan taman buru	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaat-an jasa lingkung-an air skala/ kategori Mene-ngah untuk kegiatan usaha pemanfaat-an massa air dengan pengguna-an debit lebih dari 30 liter/detik – 75 liter/detik				6. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		4. Memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi 5. Melaksana-kan kegiatan konservasi sumber daya air pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru			
			Pemanfaat-an jasa lingkungan air skala/ kategori									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			besar untuk kegiatan usaha memanfaatkan massa air dengan penggunaan debit lebih dari 75 liter/detik						6. Melaksanakan pengamanan di areal usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 7. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat 8. Menyampaikan data spasial dan/atau non spasial terkait kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Melakukan kegiatan di lapangan setelah Perizinan Berusaha diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan 10. Melakukan pembangun-an sarana dan prasarana utama paling lambat 2 (tiga) tahun setelah terbit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangannya 12. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Provinsi atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 13. Menyampai-kan laporan debit pemanfaatan air per tiga bulan kepada Dirjen KSDAE Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 14. Membayar PNBP atau Retribusi sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 15. Memasang meteran air minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi secara berkala disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang 16. Memelihara tanda batas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang telah dipasang di lapangan 17. Memiliki pas masuk kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan			
			Pemanfaatan jasa lingkungan energi air mikrohidro (<1 mw)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas 3. Disain fisik sarana prasarana 4. Peta usulan areal usaha dengan skala paling rendah 1:10000 (satu berbanding	25 Hari	1. Menjaga agar kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air tidak menimbulkan kerusakan ekosistem pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru		1. Taman hutan raya lintas kabupaten/kota 2. Taman hutan raya skala kabupaten/ kota	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota
			Pemanfaatan jasa lingkungan energi air minihidro (1 – 10 mw)								Taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi dan taman buru	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sepuluh ribu) dilampiri dengan data shapefile 5. Rencana pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air yang disahkan oleh Dirjen KSDAE 6. Bukti pembayaran Iuran atau Retribusi Perizinan Berusaha Jasa Lingkungan Energi Air sesuai dengan		2. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 3. Menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam 4. Memberikan kemudahan bagi petugas baik pusat maupun daerah pada saat melakukan pengawasan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan		pembinaan dan evaluasi 5. Melaksana-kan kegiatan konservasi sumber daya air pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru 6. Melaksana-kan pengamanan di areal usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksana-kan pemberdaya-an masyarakat 8. Menyampai-kan data spasial dan/atau non spasial terkait kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 9. Melakukan kegiatan di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha diterbitkan 10. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana utama paling lambat 3 (tiga) tahun setelah terbit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air 11. Menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kabupaten/ Kota atau Provinsi sesuai kewenangan-nya 12. Menyampai-kan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Dirjen KSDAE atau Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 13. Menyampai-kan laporan debit pemanfaatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									air dan produksi listrik per tiga bulan kepada Dirjen KSDAE Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan-nya 14. Membayar PNBP atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Memasang meteran listrik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan melakukan kalibrasi secara berkala disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari instansi yang berwenang 16. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 17. Memiliki pas masuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam atau Taman Buru termasuk bagi karyawan dan kendaraan operasional yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengusaha-an sarana jasa lingkungan wisata alam pada zona atau blok pemanfaat-an di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang ditanda-tangani oleh pemohon dan personel UPT atau UPTD dan diketahui oleh Kepala	30 Hari	1. Menyusun dan menyerah-kan rencana karya 5 (lima) tahunan dan rencana karya tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan 2. Merealisasi-kan pembangun-an sarana		1. Taman hutan raya lintas kabupaten/ kota 2. Taman hutan raya skala kabupaten/ kota	1. Gubernur 2. Bupati/ Walikota
											Taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya skala nasional/ lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 3. Peta usulan areal kegiatan usaha dengan skala paling kecil 1:25000 (satu banding dua puluh lima ribu) dan data peta digital dengan format shapefile 4. Rencana Pengusahaan Sarana Wisata Alam yang ditanda-		wisata alam sesuai dengan rencana karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam diterbitkan 3. Melaksana-kan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tangani oleh pemohon dan disahkan oleh Dirjen KSDAE (untuk TN dan TWA) atau Kepala Dinas Provinsi (Tahura Provinsi), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (Tahura Kabupaten/ Kota) sesuai kewenangan 5. Disain fisik dan tata letak (*site plan*) sarana dan prasarana yang ditanda-tangani oleh		pengunjung pada areal Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 4. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah 5. Merehabilita-si kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Perizinan Berusaha Sarana Jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon dan disahkan oleh Direktur (untuk TN dan TWA) atau Kepala Dinas Provinsi (Tahura Provinsi), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota (Tahura Kabupaten/ Kota) sesuai kewenangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pengusahaan		Lingkungan Wisata Alam 6. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 7. Memelihara aset negara apabila memanfaat-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sarana Wisata Alam 9. Bukti pembayaran iuran atau retribusi Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		kan sarana milik pemerintah 8. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam Melaksana-kan kegiatan Pengusaha-an Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai Perizinan Berusaha yang diberikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Membuat laporan Pengusaha-an Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam secara periodik kepada Dirjen KSDAE, atau Gubernur atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangan berupa laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diaudit oleh akuntan publik 10. Membayar PHU-PSWA atau retribusi hasil Pengusaha-an Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Merealisasi-kan pembangun-an sarana wisata sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rencana karya tahunan yang telah disahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 12. Pemegang Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam, seluruh karyawan dan kendaraan operasional harus memiliki pas masuk KPA yang berlaku selama 1			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(satu) tahun dan disahkan Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 13. Merealisasikan membayar PHU-PSWA dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun 14. Pemegang perpanjangan Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam wajib			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									merealisasi-kan membayar PHU-PSWA dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjang-an Perizinan Berusaha Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 15. Memenuhi kelaikan operasional sarana prasarana sesuai standar di KPA yang ditetapkan oleh Menteri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									16. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan 17. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 18. Menyelesai-kan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha			
			Penyediaan jasa wisata alam pada suaka marga-satwa, taman nasional, taman	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM an Menteri LHK 2. Bukti pembayaran	5 Hari	1. Melaksana-kan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung		1. Suaka margasat-wa, taman nasional, taman hutan raya skala nasional/ lintas	1. Menteri/ Kepala Badan 2. Gubernur 3. Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			wisata alam dan taman hutan raya				Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam atau retribusi Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		2. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan/atau sampah 3. Memelihara aset negara bagi pemegang perizinan berusaha yang memanfaat-kan sarana milik pemerintah 4. Menyusun laporan kegiatan usaha setiap		provinsi dan taman wisata alam 2. Taman hutan raya skala provinsi/lintas kabupaten/kota 3. Taman hutan raya skala kabupaten/kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bulan Juni dan bulan Desember tahun berjalan dan disampaikan kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD atau Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan 5. Membayar pungutan hasil usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Melakukan kegiatan penyediaan jasa wisata alam dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam diterbitkan 7. Pelaku Usaha dan/atau seluruh karyawan serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kendaraan operasional wajib memiliki pas masuk KPA dan KSA yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai dengan kewenangan 8. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang diberikan			
			Pengusaha-an taman buru (meliputi penyediaan sarana untuk menunjang wisata berburu dan penyediaan pelayanan kegiatan berburu)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Prinsip dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM a.n. Menteri Kehutanan 2. Berita acara pemberian tanda batas dan peta tanda batas dengan skala paling rendah 1:25000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang ditanda-tangani oleh pemohon dan personil UPT dan diketahui	30 Hari	1. Menyusun Rencana Karya 5 (Lima) Tahunan dan Rencana Karya Tahunan yang disahkan oleh Kepala UPT 2. Merealisasi-kan pembangun-an sarana untuk menunjang wisata berburu sesuai dengan rencana		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh Kepala UPT 3. Peta usulan areal kegiatan dengan skala paling rendah 1:25000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) dan data peta digital dalam format *shapefile*-nya 4. Rencana Pengusahaan Taman Buru yang ditanda-tangani oleh pemohon, diperiksa oleh Kepala UPT dan disahkan		karya tahunan yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman Buru diterbitkan 3. Melaksana-kan kegiatan secara nyata dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh Dirjen KSDAE 5. Bukti pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Buru diberikan 4. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang wisata berburu sesuai dengan rencana karya yang telah disahkan 5. Mempekerja-kan tenaga ahli sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dikelolanya 6. Mengikut-sertakan masyarakat di sekitar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Taman Buru dalam kegiatan usahanya 7. Membuat laporan kegiatan Pengusaha-an Taman Buru secara periodik kepada Dirjen KSDAE berupa laporan triwulan, laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Membayar pungutan hasil usaha Pengusaha-an Taman Buru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Merehabilita-si kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan usahanya 10. Menjamin keamanan dan ketertiban para pengunjung 11. Turut menjaga kelestarian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									fungsi Taman Buru dan satwa yang terdapat di dalamnya 12. Melaksana-kan penangkaran satwa buru untuk memenuhi kepentingan perburuan yang diusahakan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memantau dan menang-gulangi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									adanya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis serta melaporkan kepada instansi yang berwenang 14. Memberi kemudahan bagi aparat kehutanan melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan 15. Merealisasikan pembangunan sarana penunjang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wisata berburu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 16. Membayar pungutan hasil Pengusaha-an Taman Buru dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) tahun 17. Pemegang perpanjang-an Perizinan Berusaha Pengusaha-an Taman Buru wajib			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									merealisasikan membayar pungutan hasil Pengusahaan Taman Buru dalam tahun yang sama dengan penerbitan perpanjangan Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru 18. Pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Taman Buru, seluruh karyawan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kendaraan operasional harus miliki pas masuk taman buru yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Kepala UPT 19. Memenuhi kelaikan operasional sarana prasarana sesuai standar di Taman Buru yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									20. Membuat standar operasional pelaksanaan kegiatan 21. Memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan 22. Menyelesaikan konflik sosial akibat adanya kegiatan usaha			
			Pemanfaatan kawasan di hutan lindung Pemanfaatan jasa lingkungan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan Komitmen PBPH 2. Berita Acara Koordinat Geografis	40 Hari	1. Menyusun Dokumen Perencanaan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			di hutan lindung				3. Bukti pelunasan iuran PBPH		berusaha diterbitkan			
			Pemungut-an hasil hutan bukan kayu di hutan lindung						2. Melaksana-kan kegiatan nyata di lapangan paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 3. Melaksana-kan penataan batas areal kerja paling lama 1 (satu) tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaksana-kan perlindung-an hutan di areal kerjanya 5. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 6. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Melakukan pemulihan lingkungan 8. Menata-usahakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keuangan kegiatan usahanya 9. Mempekerja-kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 10. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Melakukan penata-usahaan hasil hutan kecuali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan 12. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan kecuali pada kegiatan usaha jasa lingkungan 13. Menyampai-kan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Kehutanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									14. Melaksana-kan kemitraan dengan masyarakat setempat 15. Melaksanakan kerjasama dengan koperasi dan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) 16. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
			Pemanfaat-an kawasan di hutan produksi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pemanfaatan jasa lingkungan di hutan produksi Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi Pemungutan hasil hutan bukan kayu di hutan produksi				2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH		hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksanakan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksana-kan penanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan 11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksanakan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksanakan pemanenan hasil hutan kayu dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/*Red uce Impact Logging* (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan 17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampai-kan laporan kinerja secara periodik kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Kehutanan 19. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
2	02121	Peman-faatan Kayu Hutan Alam	Pemanfaat-an hasil hutan kayu hutan alam di hutan produksi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH 2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhati-kan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan 3. Melaksana-kan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksana-kan penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksana-kan perl-indungan hutan di areal kerjanya 6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksana-kan penanaman paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasi-kan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncana-kan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menata-usahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerja-kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksana-kan pemanfaatan hasil hutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksana-kan pemanenan hasil hutan kayu dengan menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ *Reduce Impact Logging* (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada Menteri Kehutanan 19. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
3	02111	Pemanfaatan Kayu Hutan	Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persetujuan Komitmen PBPH	10 Hari	1. Menyusun dokumen rencana kerja usaha pemanfaatan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tanam-an	hutan produksi				2. Berita Acara Koordinat Geografis 3. Bukti pelunasan iuran PBPH		hutan untuk 10 (sepuluh) tahun dengan memperhati-kan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diberikan 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan RKUPH sejak sejak RKU disahkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Melaksana-kan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 tahun setelah perizinan berusaha diterbitkan 4. Melaksana-kan penataan batas areal kerja 2 (dua) tahun sejak diberikan 5. Melaksana-kan perlindung-an hutan di areal kerjanya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya 7. Bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya 8. Melakukan pemulihan lingkungan terhadap kerusakan lingkungan di areal kerjanya 9. Melaksana-kan penanaman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit 50% dari target yang telah ditentukan 10. Merealisasikan produksi paling sedikit 50% dari target yang direncanakan 11. Menatausahakan keuangan kegiatan usahanya 12. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan 13. Membayar PNBP sesuai peraturan perundang-undangan 14. Melaksana-kan pemanfaatan hasil hutan dengan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat 15. Melaksana-kan pemanenan hasil hutan kayu dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menerapkan teknik pembalakan berdampak rendah/ *Reduce Impact Logging* (RIL) 16. Melakukan penata-usahaan hasil hutan 17. Melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan sesuai ketentuan 18. Menyampai-kan laporan kinerja secara periodik kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Kehutanan 19. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai ketentuan			
4	02140	Peng-usahaan Per-benihan Tanam-an Kehu-tanan	Kegiatan pengadaan dan pengedaran benih tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu benih bagi benih yang akan diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan berupa: a. Pengunduhan Benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi alat pengunduhan b. Penanganan Benih, yang dibuktikan dengan		membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							foto proses penanga-nan benih berikut penjelasa n metode (tata cara, alat dan bahan) c. Penyim-panan Benih, yang dibukti-kan dengan foto dan disain penyim-panan benih dalam		3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksana-kan tata usaha Benih tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kaitan-nya dengan perlindu-ngan benih (*seed protec-tion*) 3. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di Bidang Pengelolaan Benih, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 4. Memiliki Stok Benih					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih bersertifikat 5. Bukti Bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas : a. Sertifikasi Sumber benih atau b. Sertifikasi Mutu Benih dan/atau c. Pengunduhan atau pengum-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pulan anakan alam dari kawasan hutan					
			Kegiatan pengadaan dan pengedaran bibit tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat 2. Dalam hal lokasi	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu bibit bagi bibit yang diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan		Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan (persemaian) berada dalam area kerja badan usaha milik negara bidang kehutanan, dilengkapi pertimbangan teknis dari badan usaha milik negara bidang kehutanan 3. Memiliki Sistem irigasi dan penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan disainnya		kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber benih bersertifkat 3. Membuat laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa: a. Penyim-panan benih, yang dibuktikan dengan foto dan disain penyim-panan benih dalam kaitannya dengan per-lindungan benih (*seed protection*)		kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksana-kan tata usaha Bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penaburan benih, yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan) c. Pertum-buhan stek, yang dibuktikan dengan foto dan metode pertum-buhan stek (tata cara, alat dan bahan)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penyapihan, yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan) e. Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode pembesaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Fasilitas pengangkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat pengangkutan bibit 5. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 6. Memiliki stok					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok bibit bersertifikat 7. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan produksi bibit 8. Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas: a. Sertifikasi sumber benih atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sertifikasi mutu benih atau c. Sertifikasi mutu bibit					
			Kegiatan pengadaan dan pengedaran benih dan bibit tanaman hutan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	1. Dokumen sertifikat sumber benih atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih bersertifikat 2. Lokasi kegiatan: a. Jika	15 Hari	1. Melakukan sertifikasi mutu benih dan/atau sertifikasi mutu bibit bagi benih dan/atau bibit yang diedarkan 2. Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan		Permohonan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan (perum perhutani)	Menteri/ Kepala Badan
											Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaku usaha adalah Perum Per-hutani, dan lokasi berada di luar area Perum Per-hutani maka dileng-kapi Pertim-bangan Teknis dari Guber-nur b. Jika pelaku usaha		Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka benihnya diutamakan dari sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							adalah pelaku usaha lain, dan lokasi usaha berada di area kerja Perum Perhutani, maka dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Perum Perhutani 3. Memiliki Sistem irigasi dan		benih bersertifkat 3. Membuat laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali 4. Melaksanakan tata usaha benih dan bibit tanaman hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyiraman, yang dibuktikan dengan foto berikut dengan disainnya 4. Memiliki sarana dan prasarana perbenihan dan pembibitan/ persemaian berupa: a. Pengun-duhan benih, yang dibuktikan dengan foto dan detail rincian spesifikasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat pengun-duhan b. Penangan-an benih, yang dibuktikan dengan foto proses penangan-an benih berikut penjelasan metode (tata cara, alat dan bahan) c. Penyim-panan benih yang dibuktikan dengan foto dan disain penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan benih dalam kaitannya dengan perlindungan benih (*seed protection*) d. Penaburan benih yang dibuktikan dengan foto dan metode penaburan (tata cara, alat dan bahan) e. Pertumbuhan stek, yang dibuktikan dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							foto dan metode pertumbuhan stek (tata cara, alat dan bahan) f. Penyapihan yang dibuktikan dengan foto dan metode penyapihan (tata cara, alat dan bahan), g. Pembesaran bibit, yang dibuktikan dengan foto dan metode					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pem-besaran bibit (tata cara, alat dan bahan) dan h. Fasilitas peng-angkut bibit, yang dibuktikan dengan foto dan spesifikasi alat peng-angkutan bibit 5. Memiliki tenaga ahli atau tenaga terampil di bidang pengelolaan benih dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembibitan, dengan dibuktikan sertifikat pelatihan dan/atau ijazah akademik 6. Memiliki stok benih dan bibit yang bersertifikat, yang dibuktikan dengan laporan stok benih dan bibit bersertifikat 7. Terdapat aktivitas pembuatan bibit, yang dibuktikan dengan foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan laporan kegiatan produksi bibit 8. Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas: a. Sertifikasi sumber benih atau b. Sertifikasi mutu benih atau c. Sertifikasi mutu bibit					
			Kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit dari luar negeri	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki salah satu sertifikat standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang	15 Hari	1. Membuat laporan setelah dilakukan-nya proses izin usaha pemasukan benih dan/atau		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perbenihan tanaman hutan, yaitu: a. Pengadaan dan pengedaran benih atau b. Pengadaan dan pengedaran bibit atau c. Pengadaan dan pengedaran benih dan bibit disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan		bibit tanaman hutan dari luar negeri 2. Menjaga agar benih dan/atau bibit tanaman hutan yang telah masuk ke Indonesia tidak berdampak buruk pada ekosistem Indonesia (meminimalisasi terjadinya potensi spesies invasif post border)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dimasukkan dari luar negeri 2. Memiliki dokumen Surat Persyaratan Karantina Tumbuhan dari Badan Karantina Indonesia dan Dokumen Surat Hasil Analisa Resiko Jenis Tumbuhan Asing Invasif pre border dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)		3. Melaksana-kan ketentuan Karantina Tumbuhan dan Kepabeanan 4. Menyerah-kan dokumen kesehatan benih (*certificate of phyto-sanitary*) dari instansi yang berwenang di negara asal Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Surat pernyataan dari produsen benih dan/atau bibit tanaman hutan negara asal yang menerangkan bahwa benih dan/atau bibit tanaman hutan yang dimasukkan ke Indonesia bukan Produk Rekayasa Genetik 4. Surat Keterangan tentang asal-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usul (*certificate of origin*), dokumen kualitas (*certificate of quality*) dari instansi yang berwenang di negara asal 5. Apabila benih dan/atau bibit yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan berasal dari negara asal benih dan/atau bibit, maka wajib memiliki Sertifikat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kesehatan Tumbuhan (*certificate of phyto-sanitary*) dari NPPO (National Plant Protection Organisation) Negara asal dari benih dan/atau bibit serta Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*certificate of phyto-sanitary*) untuk Re-ekspor (*certificate of phytosanitary for re-export*)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari NPPO negara yang melakukan kegiatan pemasukan benih dan/atau bibit ke wilayah NKRI 6. Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS 7. Bukti bayar PNBP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung					
			Kegiatan pengeluaran benih	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki salah satu sertifikat	15 Hari	1. Membuat laporan setelah		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan/atau bibit ke luar negeri	- Mene-ngah - Besar			standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha di bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu: a. Pengadaan dan pengedar-an benih atau b. Pengadaan dan pengedar-an bibit atau c. Pengadaan dan pengedar-an benih dan bibit		dilakukan-nya proses izin usaha pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri 2. Melaksana-kan packing benih dan/atau bibit tanaman hutan sesuai standar dari negara tujuan 3. Melaksana-kan ketentuan Karantina Tumbuhan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disesuaikan dengan komoditi (benih dan/atau bibit) yang akan dikeluarkan ke luar negeri 2. Surat Keterangan tentang asal-usul (*certificate of origin*), dokumen kualitas (*certificate of quality*) dari instansi berwenang 3. Bukti bayar PNBP atas Perizinan Berusaha		dan Kepabeanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri setelah mendapatkan kepastian persetujuan dari Menteri namun sebelum Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS					
5	16102	Industri Peng-awetan Kayu	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2000 (dua ribu) M3/tahun						pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih						Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
6	16103	Industri Peng-awetan Rotan, Bambu Dan Sejenis-nya	Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1000 (seribu) ton/tahun						kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun						Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih						pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
7	16104	Industri Peng-olahan Rotan	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ribu) ton/tahun						operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu)	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independen 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			M3/tahun atau lebih						produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	16212	Industri Kayu Lapis Lami-nasi, Terma-suk *Decora-tive Plywood*	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/kegi atan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(enam ribu) M3/tahun						sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
9	16213	Industri Panel Kayu Lainnya	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun						berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/ kegiatan operasional secara periodik			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan		Seluruh	Gubernur
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	8. Memiliki dan/atau mempekerja kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
10	16215	Industri Kayu Laminasi	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangunan pabrik	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun						dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki 3. Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun						Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampaikan laporan realisasi kinerja/kegiatan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) meter kubik per tahun yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent 7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan		Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih						dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja-kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat 9. Melaksana-kan pengukuran			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah						dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			
11	16295	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu	Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi kurang dari 2000 (dua ribu) M3/tahun	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Merealisasi-kan pembangun-an pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan 2. Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas perizinan berusaha yang dimiliki	-	Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu kapasitas	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			produksi kurang dari 1000 (seribu) ton/tahun						3. Menyusun dan menyampai-kan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui Sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 4. Menyampai-kan laporan realisasi kinerja/kegi atan operasional secara periodik setiap bulan melalui Sistem			
			Kegiatan pengolahan Asil hutan bukan kayu kapasitas produksi 1000 (seribu) ton/tahun sampai dengan kurang dari 3000 (tiga ribu) ton/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Proposal teknis	10 Hari			Seluruh	Gubernur
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kapasitas produksi 2000 (dua ribu) M3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun						Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan 5. Melaksana-kan penata-usahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk yang diterbitkan oleh Lembaga independent			
			Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi 2000 (dua ribu) sampai dengan kurang dari 6000 (enam ribu) M3/tahun	Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar		10 Hari			Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala kecil						7. Mengajukan addendum perizinan berusaha apabila merencana-kan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan Kapasitas Produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan 8. Memiliki dan/atau mempekerja			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sebesar 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dengan kapasitas produksi 3000 (tiga ribu) ton/tahun atau lebih						kan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat			
			Kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas produksi 6000 (enam ribu) M3/tahun atau lebih yang terpadu dengan pengolahan hasil hutan bukan kayu skala menengah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	9. Melaksana-kan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan 10. Membayar PNBP atas jasa pelayanan dokumen angkutan (apabila mengolahan kayu alam dan/atau kayu dari		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hutan tanaman) 11. Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 12. Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan hasil hutan			

D. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh, selain Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan yang terintegrasi dengan SPKLU	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan	- Penyimpanan mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Persetujuan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Proyek PLTP	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon		Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Rekomendasi Persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang dalam hal Badan Usaha melakukan impor barang modal untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.		5. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemen-nya), dengan harga jual tenaga listrik dalam PJBL yang: a. Sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau 3. Harga jual tenaga listrik dalam PJBL telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik				1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jari-ngan tenaga	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya dalam menetapkan perizinan berusaha				listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk kepenting an umum yang dite-tapkan oleh Pe-merintah Daerah Provinsi	
			Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbaru-	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Jenis pembangkit yang digunakan merupakan Pembangkit	- Perse-tujuan Kajian Kela-yakan	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyedia-an tenaga	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kan yang terintegrasi dengan SPKLU						Energi Baru dan Terbarukan, 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang	Teknis, Ekonomis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Panas Bumi - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penun-	Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diberlakukan Wajib 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 6. Berkomitmen melengkapi dokumen sebagai berikut: a. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa	jang Kegiatan Utama	tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
											1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Indonesia) berisi: 1) Kajian kelayakan finansial 2) Kajian kelayakan operasional 3) Studi interkoneksi jaringan 4) Lokasi instalasi 5) Diagram satu garis 6) Jenis		pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyedia-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kapasitas usaha yang akan dilakukan 7) Jadwal pembangunan dan 8) Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi b. Penetapan Wilayah		an tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri c. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik d. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
2	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas provinsi 4. Usaha jual beli	Menteri Kepala/ Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan		listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan		berusaha, maksimal 30 tahun		Pemerintah Pusat	
											1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenang-annya				kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk ke-pentingan umum yang ditetap-kan oleh Pemerin-tah Daerah Provinsi.	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	35113	Distribusi Tenaga Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib	-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 2. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan		4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun.		listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
											1. Memiliki wilayah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan				usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kewenang-annya 3. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik				Pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk ke-pentingan umum yang di-tetapkan oleh Pe-merintah Daerah Provinsi.	
4	35114	Pen-jualan Tenaga Listrik	Seluruh, selain Izin Usaha Penyedia-an Tenaga Listrik untuk Ke-pentingan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan	-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha pe-nyediaan tenaga Listrik ter-integrasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Umum Penjualan Tenaga Listrik SPKLU				(berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan		oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan		yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas Provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan h. Jadwal peng-operasian yang disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun		pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk umum yang di-tetapkan oleh Pe-merintah Pusat	
											1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Penjualan Tenaga Listrik SPKLU	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Berkomitmen melengkapi dokumen sebagai berikut: a. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga	Umum (SPBKLU)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1) Kajian kelayakan finansial 2) Kajian kelayakan operasional 3) Studi interkoneksi jaringan 4) Lokasi instalasi 5) Diag-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ram satu garis 6) Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan 7) Jadwal pembangunan dan 8) Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terserti-fikasi. b. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri c. Melakukan permohon-an per-panjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
5	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	IUPTLU Terintegrasi Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 2. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasio-nal c. Studi in-terkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pem-bangunan dan h. Jadwal peng-operasian yang		Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
			Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepenti-ngan Umum 2. Kesepakatan awal penjualan tenaga listrik 3. Neraca daya di wilayah usahanya 4. Rencana	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang	Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Ke-giatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 5. Data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar		digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Memperbaharui izin usaha penjualan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir paling lama 30 tahun, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									melakukan proses evaluasi izin paling sedikit tiap 5 tahun			
			Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 2. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 3. Kesepakatan Awal Pembelian	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengopera-sian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	- Perse-tujuan harga pem-belian tenaga listrik lintas negara - Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang kegia-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Tenaga Listrik 4. Neraca Daya di Wilayah Usahanya 5. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin usaha penjualan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 30 tahun	tan utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
			Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							transmisi dan aturan jaringan distribusi tenaga listrik		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
6	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	IUPTLU - Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 2. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasio-nal c. Studi in-terkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pem-bangunan		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan h. Jadwal peng-operasian yang disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		maksimal 30 tahun.			
			Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum 2. Kesepakatan awal penjualan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasi an dilakukan oleh Tenaga Teknik yang	Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Ke-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik 3. Neraca daya di wilayah usahanya 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 5. Data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar		memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin penjualan	giatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
			Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 2. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi	- Perse-tujuan Harga Pem-belian Tenaga Listrik Lintas Negara - Penyim-panan Mineral Ikutan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan 3. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik 4. Neraca Daya di Wilayah Usahanya 5. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin pembelian tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 5	Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun			
			Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan transmisi dan aturan jaringan distribusi	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik		4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	IUPTLU - Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Lokasi instalasi b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan d. Jadwal pembangunan dan e. Jadwal	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peng-operasian yang disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
			Izin Penjualan Tenaga Listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki	Penyim-panan Mineral Ikutan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Lintas Negara	- Besar			2. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan 5. Data Rasio Rumah Tangga berlistrik pada Sistem Setempat dan Wilayah Sekitar		Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diber-lakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur	Radio-aktif sebagai Penun-jang Ke-giatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
			Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik 3. Rencana Daya	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga	- Perse-tujuan Harga Pem-belian Tenaga Listrik Lintas Negara	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di Wilayah Usahanya 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 5. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan	- Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									izin pembelian tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 5 tahun			
			Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik		memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lama 30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
8	35118	Distri-busi dan Pen-jualan Tenaga Listrik	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Ke-pentingan Umum - Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan	5 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan	Regis-trasi Nomor Iden-titas Stasiun Pengisi-an Ken-daraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penu-karan Baterai Kenda-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha pe-nyediaan tenaga listrik ter-integrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasi-nya lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasio-nal c. Studi in-terkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pem-bangunan dan h. Jadwal peng-operasian yang disusun oleh badan usaha		memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal	raan Listrik Umum (SPB-KLU)	4. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berushaa penyedia-an tenaga listtik untuk umum yang di-tetapkan oleh Pe-merintah Pusat	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang tersertifikasi 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 3. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan pereizinan berusaha				1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
9	35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tenaga Listrik		- Besar			Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik 2. Dokumen sistem manajemen mutu				Pemerintah Pusat	
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur
10	43211	Instalasi Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan	5 Hari	1. Menyampaikan Laporan berkala 2. Khusus kantor perwakilan jasa penunjang	-	Badan usaha milik negara, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik 2. Dokumen sistem manajemen mutu		tenaga listrik asing juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha		Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									negeri b. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing c. menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing d. mengutamakan penggunaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									material dalam negeri e. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal dan f. melaksanakan proses alih teknologi.			
11	35122	Peng-operasi-an instalasi peman-	Seluruh	- Mikro - Kecil - Me-nenga	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		faatan tenaga listrik		- Besar			Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik				Pemerintah Pusat	
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur
12	71102	Aktivitas keinsi-nyuran dan kon-sultasi teknis YBDI	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala *Khusus kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing juga harus	-	Badan usaha milik negara, kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing, atau badan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tenaga listrik						memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan		layanan umum Pemerintah Pusat	
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri 2. Mempekerja-kan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing 3. Menempatkan warga negara Indonesia sebagai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing 4. Mengutama-kan penggunaan material dalam negeri 5. Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta mem-perhatikan kearifan lokal dan 6. Melaksanakan proses alih teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup jasa konsultasi kegiatan survei geofisika, survei geologi, survei seismik dan survei geokimia	- Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Survei Umum)	1. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) 2. Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum 3. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi Longitude dan Latitude 4. Tata waktu dan rencana kerja	10 Hari	1. Setelah diterbitkannya Izin Survei Umum, pemegang izin wajib mengadakan kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pe-masyarakatan data dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Peralatan dan parameter survei 6. Parameter dan tahapan pengolahan data 7. Rencana pembiayaan perolehan data Survei Umum 8. Rencana pemasyarakat an data 9. Jaminan kecukupan pendanaan yang dibuktikan dengan: a. Bagi Badan Usaha yang telah		a. Apabila sampai pada akhir masa berlaku-nya Izin Survei Umum, pemegang Izin tidak memiliki kontrak kerja sama, Izin Survei Umum dinyata-kan tidak berlaku dan selu-ruh data hasil kegiatan Survei			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berdiri lebih dari 3 tahun menyampai kan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dari Badan Usaha atau yang dilakukan bersamaan dengan perusaha-		Umum wajib diserah- kan kepa- da Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM b. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, Izin Survei Umum yang terdiri dari area di Wilayah Terbuka dan area di Wilayah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an induknya b. Bagi Badan Usaha yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: 1) laporan keuangan tahunan yang ada 2) laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi		Kerja yang dilintasi akan dituangkan pada 1 (satu) kontrak kerja sama terkait penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara Pemegang Izin Survei Umum dan Pusat Data dan Teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha yang merupakan anak perusahaan 3) jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan induk yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Studi		Informasi ESDM c. Kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM dapat dilakukan setelah Izin Survei Umum diterbitkan, dengan tanggal efektif kontrak yaitu sejak memenuhi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kelayakan dan/atau 4) Surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk		realisasi luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum minimal 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melaku-kan kegiatan usahanya 10.Apabila melintasi Wilayah Kerja maksimal 30% dari seluruh luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum, wajib menyertakan: a. Surat keterangan tidak keberatan dari Kontraktor yang		Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi d. Apabila realisasi luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Sur-vei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam Izin Survei Umum, termasuk peruba-han izin-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Wilayah Kerjanya dilintasi b. Dokumen/ peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum termasuk pada area Wilayah Kerja yang dilintasi 11. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk		nya apabila ada, akan mengurangi secara proporsional jangka waktu kontrak kerja sama terkait penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data 2. Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menanda-tangani *Confidentiality Agreement* (CA) apabila pengolahan data survei dilakukan di luar negeri		area, panjang lintasan, jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam Izin Survei Umum, pemegang Izin wajib: a.Mempertahankan realisasi pelaksanaan minimal 70% (tujuh puluh persen) di Wilayah Terbuka dalam hal Survei			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Umum melintasi Wilayah Kerja b. Melaporkan pelaksana-an Survei Umum kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi 3. Dalam hal terdapat perubahan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									puluh persen) dari total luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam Izin Survei Umum, pemegang izin terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan perubahan izin kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah melakukan presentasi ke			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Setelah terbitnya perubahan izin, kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM wajib dilakukan amandemen 4. Apabila pemegang Izin Survei Umum tidak melak-sanakan kewajiban sebagaimana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dimaksud pada angka 2 dan angka 3, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area, panjang lintasan, jumlah titik dan/atau lokasi survei wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta data menjadi milik negara dan pemegang izin tidak memiliki hak pemasya-rakatan atas data tambahan 5. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik hasil survei umum yang dapat dima-sukkan dalam kontrak kerja sama dengan Pusat Data			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Teknologi dan Informasi ESDM wajib memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka. Data hasil Survei Umum yang tidak masuk dalam lingkup kontrak kerja sama wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM setelah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta data menjadi milik negara dan pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data 6. Pemegang Izin Survei Umum menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada Pusat Data Teknologi dan Informasi ESDM antara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lain terkait dengan pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum 7. Pemegang Izin Survei Umum wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 8. Pemegang Izin Survei Umum wajib bertang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum 9. Pemegang Izin Survei Umum wajib menyerahkan *Snapshot* perekaman seluruh data Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									datanya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta mempre-sentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 10. Izin Survei Umum tidak dapat dialihkan kepada pihak lain			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Pemegang Izin wajib melakukan kegiatan Survei Umum 12. Pemegang Izin Survei Umum wajib memenuhi realisasi luasan area, panjang lintasan atau jumlah titik Survei Umum minimal mencapai 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka			
13	71201	Jasa sertifikasi	Usaha dalam kelompok ini adalah	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa	5 Hari	1. Menyampaikan Laporan Berkala	Pendaftaran Lembaga Penilaian	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	- Besar			Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan	Kesesuaian (LPK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	5 Hari	1. Menyampai-kan Laporan Berkala 2. Memiliki sistem infor-masi sertifi-kasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenaga-listrikan 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang	Pendaf-taran Lembaga Penilaian Kesesuai-an (LPK)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketenaga-listrikan			
14	71202	Jasa Pengu-jian Labo-ratorium	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa laborato-rium pengujian peralatan dan pe-manfaat tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
15	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa inspeksi teknis dan pemerik-saan	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Laporan keuangan tahun terakhir untuk perusahaan yang telah berdiri	15 hari	Wajib mengikuti standar internasional, Standar Nasional Indonesia, dan standar lain sesuai ketentuan peraturan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			keselamat-an peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta kegiatan pengujian teknis tak merusak (*Non Destructive Testing*) Non Radiasi oleh Badan Usaha Inspeksi Minyak				minimal 1 (satu) tahun 2. Surat Pernyataan diatas materai mengenai komitmen meliputi: a. Daftar Peralatan pen-dukung/ penunjang inspeksi peralatan b. Daftar inspektur yang memiliki Sertifikat Keahlian inspeksi peralatan		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan Gas Bumi				c. Daftar Pengalaman perusahaan (kecuali untuk perusahaan baru) dan pengalaman personil dalam melakukan pemeriksaan peralatan dan 3. Analisis manajemen risiko keselamatan peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Minyak dan Gas Bumi 4. Surat Pernyataan diatas meterai mengenai kebenaran atas dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan mengenai: a. Kesang-gupan Badan Usaha terhadap peme-nuhan: - Aspek kese-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lindungan lingkungan hidup - Ketentuan peraturan perundang-undangan b. Badan Usaha bebas dari konflik atau permasa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lahan hukum lainnya dengan pihak lain					
16	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pemeriksa-an dan pengujian instalasi tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	5 hari	1. Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik 2. Menyampaikan Laporan Berkala 3. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jenderal yang membidangi Ketenaga-listrikan 4. Melakukan registrasi setiap Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenaga-listrikan 5. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang berlaku di bidang ketenaga-listrikan			
17	72102	Peneliti-an dan pengem-bangan teknologi dan rekayasa	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengem-bangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penelitian dan Pengembangan yang Terkait dengan Instalasi Tenaga Listrik	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri/ Kepala Badan
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	74322	Aktivitas sertifikasi personel independen	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	5 Hari	1. Menyampaikan Laporan Berkala 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketenaga-listrikan			
19	85497	Pendidi-kan teknik swasta	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidi-kan dan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pendidikan dan Pelatihan di	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pelatihan di bidang ketenaga-listrikan				Bidang Ketenaga-listrikan				Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	35129	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	Seluruh, selain Usaha Jasa Konservasi Energi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Usaha Jasa Konservasi Energi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki 1 orang atau lebih ahli konservasi energi yang dibuktikan dengan sertifikat auditor energi dan/atau verifikator 2. Daftar kelengkapan peralatan	Otomatis	1. Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Melaporkan pelaksanaan usaha konservasi energi pada Menteri melalui Direktur Jenderal	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penunjang 3. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktur Jenderal EBTKE 4. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kemampuan keuangan untuk melaksanakan usaha jasa konservasi		setiap akhir tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan 5. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan					
21	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Perdagangan Besar Batubara	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba)	**Permohonan Baru** 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau	14 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan termasuk menggunakan sistem	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perseorangan 2. Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi		informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan kepada Menteri sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Mengangkut dan menjual komoditas batubara yang berasal dari pemegang izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak/ perjanjian d. PKP2B e. Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara lainnya **Permohonan Perpanjangan** 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 2. Sumber		yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 4. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian d. PKP2B					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Izin Pengang-kutan dan Penjualan batubara lainnya 3. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan					
			Perdaga-ngan Besar Minyak Pelumas	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Standar K3L 2. Melaporkan realisasi penjualan pelumas setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Mencantumkan NPT pada kemasan produk pelumas			
			Perdagangan Besar bahan bakar gas cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel gasoline, bahan bakar oli,	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi)	A. **Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan** 1. Persyaratan Administratif a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima	15 Hari	1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan 2. Menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya 3. Menjamin harga jual	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kerosin, premium, solar, minyak dan bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propane, LNG, CNG, dan lain-lain)				Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Nara-hubung d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesang gupan Badan Usaha me-menuhi ke-tentuan per-aturan perun-dang-		komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh menteri 4. Menjamin dan bertanggung-jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan peraturan	Bahan Peno-long		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan 2) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 3) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha 4) Ke-		5. Mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang 6. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sediaan di-lakukan audit ke-patuh-an ter-hadap ke-tentuan per-aturan perun-dang-unda-ngan 5) Kesang-gupan badan usaha men-jamin dan be-tang-gung jawab		peraturan perundang-undangan 7. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengem-bangan masyarakat setempat 8. Bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah ketekniikan yang baik selama masa operasi 6) Badan usaha		sewaktu-waktu apabila diperlukan 9. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya		a. Sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha atau b. Jenis komoditas dan/atau merek dagang 11. Menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan apabila dike-mudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usaha-nya sesuai dengan per-aturan perun-dang-un-dangan 8) Kesang-gupan meneri-ma penun-		mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau terdapat perubahan terhadap data administrasi 12. Menjamin keselamatan instalasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Badan Usaha Niaga dapat melaksanakan penunjukan penyalur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau cadangan operasi dan pemenuh-		dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyalur wajib berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional b. Penyalur bukan untuk usaha perseorangan, ditujukan untuk badan usaha yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi). 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha		berbadan hukum, dan hanya untuk usaha PMDN c. Penyalur hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas untuk masing-masing jenis komoditas BBM, BBG,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sementara) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyim-panan), skema usaha, rencana pasokan, Pengguna-an Tenaga Kerja Asing dan		LPG, dan/ atau LNG d. Penyalur wajib menggguna-kan logo dan merek dagang BU Niaga Migas e. Penyalur menyam-paikan laporan kegiatan penyaluran nya kepada Badan Usaha Niaga Migas f. Memenuhi kewajiban lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keekonomian (rencana biaya investasi, harga jual, dan indikator kelayakan usaha) serta rencana merek		sesuai dengan peraturan perundangan g. Memiliki kontrak perjanjian kerjasama penunjukan penyalur h. Penyalur memiliki dokumen NIB, Persetujuan lingkungan hidup, persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dagang dan rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan untuk kegiatan niaga umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah		keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan i. Penyalur memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penyalur BBM, LPG, BBG, dan LNG yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana c. Kesepakatan awal (HoA atau MoU) jual beli dengan pemasok dan/atau		menyalurkan Bahan Bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara (SPBU, SPBN, SPBG,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dokumen yang meng-indikasi-kan ter-sedianya pasokan dengan calon pemasok Minyak Bumi yang difasilitasi oleh SKK Migas untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan d. Rencana		dsb) wajib me-miliki Sarana dan Fa-silitas pengisi-an Bahan Bakar 2) Penya-lur BBM, BBG/ LPG/ LNG yang menya-lurkan selain di Stasiun Peng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa fasilitas penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Hasil Olahan beserta data titik		isian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara (agen BBM, agen LPG, agen LNG dsb) wajib memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat berupa Data *Geo-reference Standard Datum* WGS84 dan e. Rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum Bahan Bakar Minyak berupa kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan		Sarana dan fasilitas pengangkutan untuk kegiatan penyaluran dengan transportasi darat 3) Untuk kegiatan penyaluran dengan transportasi laut/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit 1500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas pe-nyimpanan selanjut-nya dapat menguasai /sewa Sarana Fasilitas Pe-nyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating		sungai, Penya-lur dapat me-nguasai sarana dan Fa-silitas peng-angkut-an j. Penyalur selain penyalur LPG PSO dan Minyak Tanah hanya dapat me-nyalurkan bahan bakar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							storage, tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya Beserta data titik koordinat berupa Data *Geo-*		kepada konsumen pengguna langsung untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali k. Penyalur dilarang menjual/ menyalurkan kepada Badan Usaha Niaga Migas l. Penyalur LPG Bersubsidi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							reference Standard Datum WGS84 baik yang: 1) Dimiliki dengan jangka waktu pembangunan sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau 2) Dikuasai, dengan sewa eksklusif kepada pihak		(PSO) dan Minyak Tanah PSO wajib menunjuk Sub Penyalur dalam melaksanakan kegiatan penyaluran m. Penyalur wajib menjual jenis BBM Umum, Jenis LPG Umum, dan LNG sesuai dengan harga yang ditentukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lain f. Badan Usaha Niaga yang melakukan kegiatan pen-campuran *(blending)* untuk menghasil-kan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki/ menguasai fasilitas pencampu-ran (*blending*) Badan Usaha		oleh Badan Usaha Niaga n. Stok (cadangan) bahan bakar yang ada di fasilitas penyalur merupakan milik/ dicatat sebagai stok Badan Usaha Niaga 14. Badan Usaha Niaga wajib melaporkan penunjukan penyalurnya kepada Ditjen Migas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Niaga hanya dapat melakukan *blending* dengan komoditas hasil blending yang tercantum dalam Izin Usaha g. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan h. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/Penyesuaian/Perpanjangan (apabila ada) i. Jaminan kecukupan pendanaan, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan no-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memili-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan Izin Usaha) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas (untuk 1					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(biaya investasi, harga jual, dan indikator kelayakan usaha) b. Kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamat-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas /PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Daftar sarana dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa apabila terdapat fasilitas niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan e. Daftar sarana dan fasilitas niaga yang digunakan termasuk kepemilik-an sarana dan fasilitas pe-nyimpanan dengan jumlah ke-seluruhan paling sedikit 1500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan fasilitas penyim-panan se-lanjutnya dapat menguasai /sewa Sarana Fasilitas Penyimpan an BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating storage, tangki penyimpan an BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya f. Terhadap kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Niaga umum Bahan Bakar Minyak atau Niaga Hasil					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Olahan yang: 1) Memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan: i. Dokumen kepemilikan berupa gross akta dan ii. *Ship particulars* 2) Memiliki dan/atau me-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB 3) Memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan moda angkut-an laut, agar me-lampir-kan: gross akta atau surat per-Janjian pengua sa-an fasilitas g. Data titik koor-dinat fasilitas penyimpan an yang digunakan berupa Data *Georefe-*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rence Standard Datum WGS84 h. Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas) i. Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. Dokumen bukti pendaftaran merek dagang yang akan digunakan, sertifikat merek dagang atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan k. Menyampaikan spesifikasi produk yang diniagakan:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Spesifikasi Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Niaga umum Bahan Bakar Minyak 2) Laporan hasil uji laboratorium untuk kegiatan Niaga Umum Hasil Olahan B. **Izin Usaha**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Terbatas Hasil Olahan: 1. Persyaratan Administrasi a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Nara-hubung d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesang-gupan meme-nuhi aspek keselam atan, ke-sehatan kerja dan pe-ngelola-an ling-kungan hidup 2) Kesang-gupan meme-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nuhi ke-wajiban badan usaha 3) Kesedi-aan di-lakukan audit kepatu-han ter-hadap keten-tuan peratu-ran perund ang-unda-ngan 4) Kesang-gupan badan usaha menja-min					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama masa operasi 5) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau cadang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an operasi onal dan pe-menuh-an ke-butuh-an minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyim-panan milik-nya (untuk kegia-tan usaha niaga minyak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cadangan operasional dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha niaga bahan bakar minyak) 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/Perpanjangan Izin Usaha) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas, penggunaan Tenaga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha) serta hasil uji laboratorium untuk komoditas yang akan diniagakan b. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit 2) Doku-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							men kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkeduduk-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu c. Kontrak perjanjian jual beli dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemasok d. Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/ menguasai fasilitas penyimpa-nan dengan kapasitas paling sedikit 1.500 kilo liter yang terintegrasi dengan *receiving*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terminal/ dermaga/ *jetty* untuk kegiatan niaga terbatas Bahan Bakar Minyak dan volume penjualan sebesar minimum 5000 KL per bulan e. Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang memiliki/ menguasai fasilitas pe-nyimpanan yang terintegrasi dengan *receiving terminal*/ dermaga/ jetty untuk kegiatan Niaga terbatas hasil olahan f. Dokumen sarana dan fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dimiliki/ dikuasai oleh konsumen beserta data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard Datum WGS84* g. Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas) h. Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku dan i. Menyam-paikan laporan hasil uji laboratori-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							um produk yang diniagakan C. **Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Niaga LPG, LNG, BBG dan/atau CNG** 1. Persyaratan Administrasi a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat/ Benefecial Ownership c. Persetujuan Kese-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							suaian Kegiatan Pemanfaat-an Ruang atau Per-setujuan Peme-rintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pem-bangunan fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan sarana Dalam hal fasilitas berupa *floating Storage* diperlukan Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang d. Surat pernyataan tertulis di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atas materai mengenai: 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bahwa sarana dan fasilitas yang di-miliki/ di-kuasai layak ber-operasi dan mampu dijalan-kan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							adanya dan apabila dike-mudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usaha-nya sesuai dengan peratu-ran perun-dang-un-dangan 7) Kesang-gupan meneri-ma pe-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan minyak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak) 9) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi) 10) Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perun-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dang-undangan yang besar-nya di-hitung dari rencana volume pen-jualan harian rata-rata (untuk kegiat-an usaha niaga LPG) 11) Kesang-gupan badan usaha meneri-ma					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha niaga LPG) 12) Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG) dan/atau 13) Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan operasional					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							LPG sesuai ke-tentuan peratur-an yang berlaku (untuk kegiat-an usaha niaga LPG 2. Persyratan Teknis (Sementara) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana sumber pasokan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, Penggunan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, komitmen TKDN dan dokumen analisis keuangan meliputi rencana biaya investasi, harga beli,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Komponen dan besaran LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG, serta perhitungan keekonomian b. Kesepakatan jual beli (MoU) Gas Bumi/ LNG/ CNG/LPG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Kesepakatan jual beli dengan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG yang meliputi antara lain					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknologi yang digunakan, dimensi, kapasitas, serta sarana dan fasilitas dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard Datum WGS84* e. Rencana merek dagang dan logo untuk kegiatan niaga LPG, BBG, CNG dan/atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							LNG retail f. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat ketera-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dari bank umum yang berke-dudu-kan di Indone-sia, yang me-nerang-kan bahwa Badan Usaha memili-ki ke-mam-puan penda-naan dengan nominal tertentu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara (apabila ada) 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan Izin Usaha) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat: 1) Sumber paso-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan dan calon konsumen 2) Neraca Gas 3) Spesifikasi komoditas 4) Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat berupa Data *Geore-*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ference Standard Datum WGS84 5) Skema usaha dan rencana pengembangan usaha 6) Penggunan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal dan 7) Dokumen analisis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ke-uangan meliputi rincian biaya in-vestasi, komponen dan besaran Harga Jual LPG, BBG, LNG dan/atau CNG b. Dokumen pasokan berupa Penetapan alokasi gas bumi/LNG dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Menteri atau Perjanjan Jual Beli gas bumi/ LNG/CNG/ LPG dengan pemasok yang bukan kontraktor kontrak kerja sama hulu migas (Badan Usaha) yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							-undangan c. Dokumen kontrak jual beli LNG / CNG / LPG dengan konsumen akhir atau konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan d. Berita Acara Pe-meriksaan Keselamat-an Instalasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/ PLO / COI yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan e. Bukti ke-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemilikan/ penguasa-an atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Untuk moda angkutan darat berupa stnk/bpkb Untuk moda ang-kutan/pe-nyimpanan laut berupa gross akta kapal Untuk fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa tangki, pipa dokumen kepemilik-an berupa Surat pernyataan dari Direktur yang berwenang f. Bukti pen-daftaran atau sertifikat merek dagang dan logo LPG, BBG, CNG dan/atau LNG retail pada					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							instansi yang berwenang g. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangannya (apabila ada)					
22	46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba)	**Permohonan Baru** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan	14 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan termasuk menggunakan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai		sistem informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan kepada Menteri sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Mengangkut dan menjual komoditas mineral atau batubara yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelanjutan operasi kontrak/perjanjian d. KK e. IPR f. Izin Pengangkutan dan Penjualan mineral lainnya **Permohonan Perpanjangan** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha,		berasal dari pemegang izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak/perjanjian d. KK e. IPR f. Izin Pengangkutan dan Penjualan mineral lainnya 4. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan					
23	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba)	**Permohonan Baru** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik	14 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan termasuk menggunakan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Ruang lingkup pengangkutan dan penjualan lintas provinsi	Menteri/Kepala Badan
											Ruang lingkup pengangkutan dan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. KK c. IPR d. Izin Pengangku		sistem informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan		penjualan dalam 1 provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tan dan Penjualan mineral lainnya **Permohonan Perpanjangan** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan		3. Mengangkut dan menjual komoditas mineral yang berasal dari pemegang izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. KK c. IPR d. Izin Pengangkutan dan Penjualan mineral lainnya 4. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.202

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	05100	Pertambangan Batubara	Kelompok ini mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbitominous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 4. IUPK sebagai ke-	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			cara pencairan *(liquefaction)*. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan				4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	lanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 14 Hari 5. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 Hari	4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*)				6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi		WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan		11. Memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai kewenangann			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi		ya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Mikro, Kecil,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu		Menengah, Besar Wilayah serta Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian dan 16. Melaksanakan Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							permohonan perpanjangan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan Peningkatan Tahap 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit meliputi: 1. Surat Permohonan Perpanjangan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat Badan Usaha dari pemegang PKP2B 4. Rencana pengembang-an Seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.219

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					

SK No 137173 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	07101	Pertambangan Pasir Besi	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan pasir besi. Termasuk kegiatan sortasi, pemisahan, dan pembersihannya	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	1. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegia-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan	tan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai	Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan	kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 Hari 7. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan		penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan		tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang		Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompen-sasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan		Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang KK 4. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan per-tambangan rakyat e. Surat per-nyataan kesang-gupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan hidup serta keselama-tan per-tambangan f. Surat kete-rangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
26	07102	Pertambangan Bijih Besi	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih besi termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi serta	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan	1 IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2 Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			konsentratnya.				daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan	rasi : 14 Hari 3 IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4 Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5 Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu	peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai	tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan		perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan**		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi		Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK tahap**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penamba-ng rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Surat permohonan c. Peta dan batas koordinat wilayah d. Bukti pelunasan iuran pertamba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir e. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingku-ngan) f. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan dan g. Susunan pengurus					
27	07291	Pertam-bangan	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin		1. IUP/IUP Tahap Kegiatan	**Kewajiban IUP/IUPK**	Penyim-panan Mineral	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bijih Timah	usaha pertambangan bijih timah.	- Menengah - Besar			**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat . Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan data sumberdaya dan cadangan yang terverifikasi	Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan	IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	oleh competent person 4. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 5. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		Operasi pertambangan 7. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau		Pasca tambang serta penempatan jaminannya 9. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 11. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 12. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyampaikan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai		mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 15. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang -undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan serta keselama-tan pertamba-ngan f. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
28	07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih timah hitam.	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan,	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk	rasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Per-	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai	janjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 hari 7. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksa-	perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data	naan kunju-ngan lapa-ngan)	7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari bumn, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan		perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan**		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi		3. mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang kk 4. Rencana pengemba-ngan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** Paling sedikit harus dilengkapi:					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penamba-ng rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingkung-an) dan e. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
29	07293	Pertambangan Bijih Bauksit	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan dan penampungan bijih bauksit	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha,	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di	3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk	persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan	pelak-sanaan kunju-ngan lapa-ngan)	Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam		Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hal terjadi pemutakhiran data 3. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan		usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 5. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 7. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi		mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan		ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamban gan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
30	07294	Pertambangan Bijih Tembaga	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih tembaga,	- Mikro, - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut				dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-	2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari	mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan	Penunjang Kegiatan Utama	Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi	5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian : 14 Hari 6. Perpajangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian: 14 Hari 7. Izin Pertambangan	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi**	Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan		pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan		Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan penrundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan		perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengemba-ngan Seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan		Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat permohonan peningkatan tahap kegiatan 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari pemegang KK 4. Rencana pengemba-ngan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan selama perpanja-ngan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingku-ngan) e. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan dan Susunan pengurus					
31	07295	Pertam-bangan Bijih Nikel	Kelompok ini mencakup usaha pertamban gan bijih Nikel	- Mikro, - Kecil - Mene-ngah Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat permohonan 2. nomor induk berusaha dalam hal	1. IUP/IUP Tahap Kegia-tan Eksplo-rasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampai-kan dan mendapatkan	Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terjadi pemutakhiran data 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling	2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan	Kegiatan Utama		
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							singkat 3 (tiga) tahun 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran	5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian: 14 Hari 7. Izin Pertamb	Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambanga 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. surat permohonan	angan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BLIMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data. 4. surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang		perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan pen-rndang-undangan di bidang perpajakan dan 8. bukti pembayaran nilai'kompensasi data informasi **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. surat permohonan peningkatan tahap kegiatan		benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi 6. laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan		standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyamp-aikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. surat keterangan fiskal sesuai		7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. surat permohonan perpanja-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan tahap kegiatan 2. peta dan batas koordinat wilayah 3. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. rencana kerja selama masa perpanja-ngan 6. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi 7. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjan-jian** 1. surat permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK 4. rencana pengemba-ngan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. neraca sumber daya dan cadangan 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 8. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang 9. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan perpanjangan 2. peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi 5. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.389

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. salinan kartu tanda penduduk d. surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk					

SK No 137204 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setempat dan melakukan kegiatan pertam-bangan rakyat e. surat pernyataan kesang-gupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan penge-lolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan Pertambangan dan f. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. salinan kartu tanda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penduduk pengurus Koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota Koperasi merupakan penduduk setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. rencana penambangan selama perpanjangan dan Susunan pengurus					
32	07296	Pertambangan Bijih Mangan	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih mangan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan	rasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu	2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang	tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar		Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi		10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan penrundang-undangan di bidang		13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 9. Salinan bukti penempatan jaminan Reklamasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyata-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingkungan) dan e. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Susunan pengurus					
33	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Besi	- Mikro, - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usahà, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produk-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terjadi Pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan	si : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari bumn, BUMD, atau badan		penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai		Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester		Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat		pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingku-ngan) e. Rencana penamba-ngan selama perpan-jangan dan f. Susunan pengurus					
34	07301	Pertam-bangan Emas dan Perak	Kelompok ini mencakup usaha pertamban	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP/IUP Tahap Kegia-tan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak**	Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-	IUP IUPK IUPK Kelanjutan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau	rasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan data sumberdaya dan cadangan yang terverifikasi	aktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Kontrak dan Perjanjian	
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	IUP/ IUPK : 14 Hari 5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 hari	oleh competent person 4. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 5. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	7. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Operasi pertambangan 7. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data		Pasca tambang serta penempatan jaminannya 9. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 11. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 12. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyampaikan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi		mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 15. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan		Pengembangan Seluruh Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 17. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan		5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat badan usaha dari pemegang KK 4. Rencana pengemba-ngan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kegiatan tambang, pengelola-an lingku-ngan) e. Rencana penamba-ngan selama perpan-jangan dan f. Susunan pengurus					
37	07309	Pertam-bangan Bijih Logam	Kelompok ini mencakup usaha pertamban gan, dan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP/IUP Tahap Kegia-tan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK** 1. Menyampai-kan dan mendapatkan	Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif	IUP IUPK	Menteri/Kepa la Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Mulia Lainnya	pembersihan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau	rasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan	sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data		perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap**		benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan		perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan , pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar		rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertamban					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingku-ngan) e. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpan-jangan f. Susunan pengurus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, base course), paras, obsidian, dan granit. Termasuk disini kegiatan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertam-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2. Sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 4. Menyampaikan dan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemecahan, pemisahan dan pembersihannya				4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan	bangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 5. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 7. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 9. Melaksanakan pemasangan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 11. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 12. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/guber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		nur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 15. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan f. Susunan Pengurus					
35	08102	Penggalian Batu	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi**	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kapur/ Gamping		- Besar			1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi	rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produk-si : 14 Hari 3. Perpan-jangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertam-bangan	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan		Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran	batuan 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan	4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan		Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan		ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan		11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ Gubernur sesuai kewenangannya atas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR**			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan		4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai		perundang-undangan Kewajiban SIPB 1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat**		perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.521

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan hidup serta keselama-tan pertambanga n dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi c. Surat keterangan dari kelu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan e. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.526

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan					

SK No 112069 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penamba-ngan selama					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpan-jangan dan f. Susunan pengurus					
38	08103	Penggalian Kerikil/ Sirtu	Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Memenuhi Komitmen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasir kerikil.				perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling	3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertambangan	ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyampaikan dan mendapatkan 4. persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 5. Menyampaikan dan		wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							singkat 1 (satu) tahun 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan	batuan 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 6. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 8. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 10. Melaksanakan pemasangan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 12. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan		Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 13. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 16. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 17. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan , pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban SIPB** 1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan		ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.540

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. surat permoho-nan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
39	08104	Penggali-an Pasir	Pengambi-lan pasir di wilayah izin usaha pertamba-ngan Kelompok ini mencakup usaha penggalian,	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data	1. IUP Tahap Kegia-tan Eksplo-rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegia-tan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pember-sihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir				3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan	Operasi Produk-si : 14 Hari 3. Perpan-jangan	ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan		penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya.				perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertambangan batuan 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan	Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di	lapa-ngan)	6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam		teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban SIPB** 1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan		penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah		5. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambanga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							n rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
40	08105	Penggalian Tanah dan	Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tanah Liat	tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (*china clay*), *ball clay (firing clay)*, abu bumi,				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling	rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertambangan	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin		wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			serpih dan tanah urug				singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan	batuan 14 Hari 6. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan		berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam		peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan		perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana		negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha		5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kewajiban SIPB			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau		1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan		kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselama-tan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Susunan pengurus					
41	08106	Penggalian Gips	Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Termasuk disini kegiatan pembersihan, dan penghalusannya.	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan	IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan desa setempat yang menyatakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
42	08107	Pengga-lian Tras	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data	1. IUP Tahap Kegia-tan Eksplo-rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap	**Kewajiban IUP** 1. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi	Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunju-	kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah	ngan lapa-ngan)	perundang-undangan 5. Menyelesai-kan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembanga n dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan		7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan		5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesang-gupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
43	08108	Penggalian Batu Apung	Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sebagai batuan gelas vulkanik silikat). Termasuk disini kegiatan pembersihannya.				pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan	IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		Menteri/ gubernur sesuai ke-wenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaipkan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertam-bangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjanga dan f. Susunan pengurus					
44	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian diorit, basalt,				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari	Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertam-	kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			breksi, dan lainnya.				ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	bangan batuan 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan		hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Surat Izin Penambangan Batuan 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan		ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban SIPB** 1. Menyusun dan menyampai-kan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Salinan kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan		Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesai-kan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan		ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang me-nyatakan pemohon					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
45	08911	Pertam-bangan Belerang	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih belerang. Termasuk	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-rasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			juga kegiatan penghancuran, dan pembersihan terhadap mineral belerang. Pengolahan lanjutan dari mineral belerang dimasukkan dalam kelompok 20114.				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan	sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan		lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas	lapangan)	peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari		7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 4. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 5. Laporan Studi Kelayakan yang		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disetujui oleh menteri 6. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 7. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 8. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 10. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan		2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat		kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hidup serta keselamatan pertam-bangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ e. desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota			-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penambang rakyat f. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
46	08912	Pertambangan Fosfat	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bahan galian	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			fosfat. Termasuk disini kegiatan sortasi, penghancuran, pembersihan dan peningkatan kadar bahan galian fosfat.				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan,	Penunjang Kegiatan Utama	berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan		berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/guber nur sesuai kewenangann ya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertamba-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan		ngan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Susunan pengurus					
47	08913	Pertam-bangan Nitrat	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bahan galian nitrat. Termasuk disini kegiatan pembersihan, pemecahan, dan sortasi dengan cara lain terhadap	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bahan galian nitrat				perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan	Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan		5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik		persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi		permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah		penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ Gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan		benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi		perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari		rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertam-bangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
48	08914		Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin		1. IUP Tahap Kegiatan	**Kewajiban IUP**	-	- IUP dalam rangka penanaman	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertambangan Yodium	usaha pertambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Termasuk disini kegiatan distilasi dari ekstraksi mineral tersebut.	- Menengah - Besar			**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data	Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan		Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan	kunjungan lapangan)	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir:		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat orang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengurus koperasi merupakan penduduk setempat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
49	08915	Pertambangan Potash (Kalium	Kelompok ini mencakup usaha pertamban	- Mikro - Kecil - Menenga	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi**	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Karbo-nat)	gan potash dalam bentuk garam, feldpar dan leusit analeum. Termasuk disini kegiatan penghancu ran dan pembersiha n terhadap mineral tersebut.	- Besar			1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli	rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpan-jangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertam-bangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak terma-suk pelaksa-	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan		Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi	naan kunjungan lapangan)	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat		tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan		kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat**		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
50	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Pendaftaran Pupuk An-Organik - Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			08911 s.d. 08915. Misalnya pertambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan earth coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea, dan				manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum	- Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan pertambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar). Termasuk disini kegiatan pembersihan, pemisahan dan sortasi.				perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan		melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana		Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan		Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri		10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai		peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah		15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan		, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang		6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan pertam-bangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
51	08991	Pertambangan Batu Mulia	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan mineral bahan	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915. Misalnya pertambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan earth coulor,				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelak-	Tahunan sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan,		lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut - IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan pertambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar). Termasuk disini kegiatan pembersi-				5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran	sanaan kunjungan lapangan)	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			han, pemisahan dan sortasi.				pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi		perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi		9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangannya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan		5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang KK 2. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 3. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 4. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 5. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 9. Surat keterangan fiskal					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					
52	08992	Penggalian Feldspar dan Kalsit	Kelompok ini mencakup usaha penggalian feldspar dan kalsit, serta batu tulis/sabak. Termasuk disini kegiatan pemecahan,	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.				saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-	3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas		dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai		Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan		penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari		melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang		IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik		pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan		peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi		keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari		kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelurahan/ desa setempat orang yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53	08993	Pertambangan Aspal Alam	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam. Termasuk disini kegiatan pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut.	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari	1. IUP/ IUPK tahap kegiatan eksplorasi : 14 Hari 2. IUP/ IUPK tahap Kegiatan Operasi produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan		4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari Ahli		ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi		ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan		perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit meliputi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					
54	08994	Penggalian Asbes	Kelompok ini mencakup usaha penggalian asbes dalam bentuk	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			serabut maupun tidak. Termasuk disini kegiatan pembersihan dan pemisahannya.				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14Hari	sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan		lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	(jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat orang yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
55	08995	Pengga-lian Kuarsa/ Pasir Kuarsa	Kelompok ini mencakup usaha penggalian kuarsa/ pasir kuarsa/	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi	**Kewajiban IUP** 1. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasir silika. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan	Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas		perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan		pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
56	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	Seluruh, selain Mineral Logam tanah jarang mengikuti ketentuan persyaratan mineral logam di KBLI 07	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan,	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.822

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun	4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan		berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut - IUPK sebagai kelanjutan Kontrak / Perjanjian	

SK No 112173 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta	lapa-ngan) 5. IUPK sebagai kelanju-tan Kontrak / Per-janjian: 14 Hari 6. Perpan-jangan IUPK sebagai kelanju-tan Kon-trak / Perjan-jian: 14 Hari	akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesai-kan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ Gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.828

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan , pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertam-bangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.835

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus **IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang KK 4. Rencana pengembangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					
57	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (IUJP)	A. Persyaratan Administratif: 1. Surat Permohonan 2. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah menda-	1. Pengajuan IUJP baru: 14 Hari 2. Pengajuan perubahan dan	1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan ter-	1. IUJP yang proyeknya lintas provinsi 2. IUJP dalam rangka penanaman modal	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							patkan pengesahan dari instansi yang berwenang 3. Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll	perpanjangan IUJP: 12 Hari	Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya 2. Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja local 3. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai	masuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	asing	
											IUJP yang proyeknya dalam 1 provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							- Tidak dapat digabung dengan: a) Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641" 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha 5. Daftar susunan		dengan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID 6. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan 7. Surat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar B. Persyaratan Teknis: 1. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli b. Keahlian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan c. Kartu tanda penduduk (ktp)/izin mempekerja-kan tenaga kerja asing (imta) d. Ijazah e. *Curriculum vitae* (cv) dan f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandata-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP 2. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (*mechanical availability*) yang ditandatangani oleh kepala					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian mekanik/ permesinan atau orang yang ber-kompeten d. Lokasi ke-beradaan alat e. Status ke-pemilikan: i. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa per-alatan harus dilampir-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan ii. Apabila belum mem-punyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melam-pirkan surat per-janjian kerjasama *(mou)* atau surat dukungan dengan perusa-haan yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki peralatan iii. Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pe-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mohon C. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan: 1. Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan 2. Salinan dokumen IUJP sebelumnya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							D. Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2. Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan 6. Izin Pengangkutan dan Penjualan					
58	35203	Pengadaan Gas Bio	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Sumber perolehan Bahan Baku 2. Surat Pernyataan tertulis di atas meterai terkait kesanggupan badan usaha: a. Menyediakan Bahan Bakar Biogas secara berkelanjutan b. Memenuhi aspek ke-	15 Hari	**A. Kewajiban Untuk Seluruh Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Biogas Sebagai Bahan Bakar Lain** 1. Memenuhi dan Mematuhi peraturan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/ limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya				selamatan dan Kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup c. Memenuhi kewajiban Badan Usaha d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan e. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Direktorat Jenderal EBTKE dan f. Menjamin dokumen persyaratan		perundangan-undangan 2. Memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain 3. Menjamin ketersediaan bahan bakar biogas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 4. Menjamin harga jual bahan bakar biogas yang wajar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usaha-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Studi Kelayakan/ *Feasibility Study* 4. Analisis kelayakan usaha / informasi		5. Memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain yang meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusi-an, dan pemasaran 6. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelayakan usaha yang memuat: a. Sumber pasokan dan calon konsumen b. Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat c. Komponen TKDN d. Skema usaha dan rencana pengem-bangan usaha e. Penggunaan tenaga kerja		memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menjamin standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Biogas sebagai bahan bakar lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 8. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asing dan tenaga kerja lokal f. Dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli BBBg, komponen dan besaran harga jual BBBg, serta per-hitungan kelayakan usaha 5. Data Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Biogas (BBBg)		hidup serta pengembang-an masyarakat setempat 9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha Pengadaan Gas Bio kepada Menteri melalui Direktur Jenderal EBTKE setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 10. Melaporkan dan/atau me-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang akan diniagakan 6. Berita acara pemeriksaan oleh petugas dari Direktorat Jenderal EBTKE Apabila belum dimiliki, agar Pelaku Usaha mengunggah surat pernyataan resmi kop perusahaan bahwa siap dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan Berita Acara Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal EBTKE		nyampaikan permohonan penyesuaian terhadap Izin usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan/atau teknis 11. Bersedia dilakukan inspeksi / peninjauan lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal EBTKE sewaktu-waktu apabila diperlukan 12. Memenuhi perizinan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)		ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **B. Kewajiban Khusus Untuk Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Biogas Sebagai Bahan Bakar Lain Yang Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Dan Sarana**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.861

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menggunakan kaidah keteknikan yang baik 3. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bangun dalam negeri 4. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Membantu pengem-bangan masyarakat setempat **C. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan usaha niaga ekspor dan/atau impor bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain:** 1. Mendapatkan rekomendasi dan/atau evaluasi, sebagai salah satu kelengkapan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persyaratan penetapan neraca komoditas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 2. Rekomendasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan : a. Dengan memperhatikan kapasitas produksi dan jaminan pemenuh-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an kebutuhan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain b. 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan ekspor dan/atau impor dan c. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evaluasi ekspor dan/atau impor dari Pelaku Usaha 3. Melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan ekspor dan/atau impor **D. Ketentuan Lain Bagi Pelaku Usaha**			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain dapat meniagakan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain kepada konsumen akhir (skala besar) dan/atau distributor 2. Terhadap bahan bakar biogas sebagai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan bakar lain yang dicampur dengan bahan bakar gas melalui jaringan pipa gas, hanya dapat diniagakan oleh pemegang izin usaha niaga bahan bakar gas			
59	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Ber-sumber dari Hasil	Kelompok ini mencakup usaha niaga Bahan Bakar Nabati/ BBN	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang diusahakan 2. Data Standar dan Mutu	10 Hari	**A. Kewajiban Untuk Seluruh Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan**	- Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu	Kapasitas penyediaan di atas 10.000 ton per tahun	Menteri/ Kepala Badan
											Kapasitas penyediaan di bawah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertanian	(*biofuels*) yang meliputi pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor, pengangkutan, penyimpanan, serta pemasaran BBN, dengan produk *biofuel* cair yang dapat berupa *biodiesel, bioethanol, biohidrokarbon*				(spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang akan diniagakan 3. Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 4. Informasi Kelayakan Usaha 5. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 6. Surat Pernyataan secara tertulis di		**Bakar Nabati (*Biofuel*)** 1. Menjamin ketersediaan bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan 2. Memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) 3. Menjamin standar dan mutu	- Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Produksi Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Pemasaran	10.000 ton per tahun	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/*jet fuel nabati*) dan bahan nabati lainnya yang di-peruntuk-an untuk bahan bakar cair				atas meterai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup 7. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Surat pernyataan		(spesifikasi) bahan bakar nabati (*biofuel*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memanfaat-kan dan mengutama-kan bahan bakar nabati (*biofuel*) dari produksi dalam negeri 5. Menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/ konsumen akhir atas	Alat Perala-tan Perta-hanan dan Keama-nan - Izin Usaha Peneliti-an dan Peng-emba-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesо-ris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tertulis di atas meterai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal 9. Dokumen Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)		standar dan mutu bahan bakar nabati (*biofuel*) yang diniagakan sesuai standar dan mutu/ spesifikasi yang ditetapkan 6. Menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) yang memadai. 7. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan	- Izin Usaha Pergu-dangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan - Serti-fikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olaha - Serti-fikat Perse-tujuan Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu bahan bakar nabati (*biofuel*). 9. Mengutamakan peme-	- Pendaftaran Pestisida - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuhan kebutuhan dalam negeri 10. Menyampaikan data dan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) termasuk harga BBN kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Menggunakan kaidah keteknikan yang baik 13. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang	Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bangun dalam negeri 14. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan 15. Menjamin keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan hidup	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									16. Membantu pengembangan Masyarakat setempat 17. Memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam penyediaan dan pemanfaatan BBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan **B. Kewajiban Khusus Untuk Pemegang Perizinan Berusaha**	duksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Melaksana-kan Pemba-ngunan Fasilitas Dan Sarana 1. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menggunakan kaidah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keteknikan yang baik 3. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri 4. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setempat sesuai dengan standar kompetensi yang diper-syaratkan 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup 6. Membantu pengem-bangan masyarakat setempat **C. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan usaha niaga**			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati (*biofuel*) 1. Mendapatkan rekomendasi dan/atau evaluasi, sebagai salah satu kelengkapan persyaratan penetapan neraca komoditas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Rekomendasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan: a. Dengan memenuhi dokumen persyaratan berupa: 1) SK Izin Usaha Niaga BBN yang masih berlaku 2) *Certificate of Analysis* produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang akan di-lakukan ekspor/ impor 3) *Beneficial Ownership* dan 4) Surat Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan periode sebelumnya (untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang pernah melaksanakan ekspor) b. Dengan memperhatikan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati (*biofuel*) di dalam negeri c. 1 (satu) kali untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1 (satu) tahun pelaksanaan ekspor dan/atau impor dan d. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dan/atau evaluasi ekspor dan/atau impor dari Pelaku Usaha 3. Melaporkan kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan ekspor dan/atau impor **D. Ketentuan Lain Bagi Pelaku Usaha** 1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar nabati (*biofuel*) dapat meniagakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan bakar nabati (*biofuel*) kepada konsumen akhir 2. Terhadap bahan bakar nabati (*biofuel*) yang dicampur dengan bahan bakar minyak hanya dapat diniagakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak			
60	06202	Pengusa-haan Tenaga	1. Tahap Survei	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Panas Bumi)	1. Salinan surat penetapan pemenang lelang atau surat	14 Hari	1. Memberikan dukungan terhadap kegiatan	- Persetu-juan Studi Kelaya-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Panas Bumi	2. Tahap Eksplorasi 3. Tahap Eksploitasi dan/atau Pemanfaatan	- Besar			penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung 2. Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang: a. Pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi panas bumi b. Penempatan komitmen eksplorasi bagi pemenang lelang sesuai ketentuan		penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi 2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup 3. Memberikan	kan / *Feasibility Study* (FS) Proyek PLTP - Persetujuan gudang bahan peledak panas bumi - Penyimpanan Mineral Ikutan radioaktif sebagai Penunjang		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundangan		dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi 4. Menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung kepada Menteri secara berkala atas:	Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Rencana kerja dan rencana anggaran dan b. Realisasi pelaksana-an rencana kerja dan rencana anggaran 5. Memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Mengutama-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing 7. Melaksanakan program pengemba-ngan dan pemberdayaan masyarakat setempat 8. Menyeleng-garakan pembukuan atau pencatatan dengan mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya 9. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berlaku 10. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia 11. Mendorong pengembangan pemanfaatan Langsung panas Bumi pada Wilayah Kerjanya 12. Melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar 13. Menyampai-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan rencana jangka panjang eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfa-atan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta me-nyampaikan besarnya cadangan			
61	49300	Angku-tan Melalui Saluran Pipa	Kegiatan Usaha Pengang-kutan Minyak dan Gas	- Kecil - Meneng ah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa** 1. Persyaratan administratif Izin	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi peralatan dan	Persetu-juan Layak Operasi Instalasi Minyak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bumi Melalui Pipa				Usaha Sementara/ Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha: a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha		keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan	dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan		kerja, pengelolaan ligkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat 4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab		penyesuaian Izin apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik		atau sewaktu - waktu apabila diperlukan 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha 9. Menjamin keselamatan instalasi dan peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perun-dangun-dangan 2. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/ Perpanjangan Izin Usaha Sementara / Penyesuaian Izin Usaha Sementara a. Studi Kelayakan b. Surat Penetapan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemenang Lelang Ruas Transmisi /WJD oleh BPH Migas (jika ada) c. Dokumen Penunjukan pem-bangunan dan/atau surat penugasan dari Pemerintah atas ruas pada wilayah (Kepmen) atas ruas pipa transmisi pada suatu wilayah (jika ada) d. Hak Khusus dari Badan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengatur Hilir Migas e. Kesepakatan awal pengang-kutan gas bumi dengan calon shipper (dapat berupa HoA/MoU / *Gas Transport Agreement* (GTA)) f. Rencana pemanfaatan atau pembangu-nan sarana dan fasilitas Pengangku-tan Gas Bumi, yang meliputi antara lain teknologi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan, jalur, dimensi, kapasitas, right of way pipa serta sarana dan fasilitas selain pipa dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard* Datum WGS84 g. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpan-jangan Izin Usaha Sementara (apabila ada)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat ketera-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dari bank umum yang berkedu-dukan di Indonesia, yang menerang-kan bahwa Badan Usaha memiliki kemam-puan penda-naan dengan nominal tertentu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Persyaratan teknis Izin Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha: a. Studi Kelayakan b. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/ PLO/ COI yang masih					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan c. Dokumen Perjanjian antara transporter dengan shipper/ *Gas Transport Agreement* (GTA) d. Bukti kepemilikan pipa Dalam hal pembangunan pipa dilakukan melalui APBN maka persyaratan kepemilikan dapat diganti					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan dokumen surat penugasan untuk pembangunan dan/atau pengoperasian pipa dimaksud dan/atau kontrak kerjasama penunjukan mitra dari Badan Usaha atau lembaga yang mendapat penugasan, Berita Acara Serah Terima Barang Negara e. Surat Penetapan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemenang Lelang Ruas Transmisi /WJD oleh BPH Migas (jika ada) f. Dokumen Penunjukan pembangunan dan/ atau surat penugasan dari Pemerintah atas ruas pada wilayah (Kepmen) (jika ada) g. Hak Khusus dari Badan Pengatur Hilir Migas **B. Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bumi/BBM/ Hasil Olahan Melalui Pipa 1. Persyaratan Administratif a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							meme-nuhi aspek keselama-tan, kese-hatan kerja dan penge-lolaan ling-kungan hidup 2) Kesang-gupan meme-nuhi ke-wajiban Badan Usaha 3) Kesang-gupan Badan Usaha meme-nuhi ke-tentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah ketekniikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau perma-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Usahanya sesuai dengan peraturan per-undang-undangan 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU atau HoA) atas pengangkutan Minyak Bumi/BBM/ Hasil Olahan c. Rencana pemanfaatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pembangunan sarana dan fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/ Hasil Olahan, yang meliputi antara lain dimensi (panjang, diameter, kapasitas), jenis komoditas yang diangkut, dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Datum WGS84 d. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangan (apabila ada) e. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Studi Kelayakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangu-nan fasilitas dan sarana c. Pemanfaatan atau pemba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngunan sarana dan fasilitas Pengang-kutan Minyak Bumi/ BBM/Hasil Olahan yang meliputi antara lain dimensi (panjang, diameter, kapasitas), jenis komoditas yang diangkut, dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Datum WGS84 d. Persetujuan Lingkungan e. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandata-ngani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/ PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan f. Dokumen Perjanjian antara *transporter* dengan *shipper* g. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuai-an/Per-panjangan (apabila ada)					
			Kegiatan Usaha Pengang-kutan Karbon melalui Pipa	- Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Trans-portasi Karbon Melalui Pipa)	1 Persyaratan administratif berupa Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi dan peralatan	Perse-tujuan Layak Operasi Instalasi Minyak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2 Persyaratan teknis: a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan peng-angkutan Karbon, untuk pengang-kutan Karbon selain Karbon milik sendiri c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditanda-tangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi		serta keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup 4. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 5. Menyediakan asuransi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal meliputi perlindungan atas kerusakan fasilitas, pekerja, kerusakan lingkungan, pembong-karan akibat kecelakaan dengan *coverage* yang wajar berdasarkan paparan risiko dan biaya 6. Mengutama-kan peman-faatan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksanakan kewajiban penanganan kebocoran dalam transportasi Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan data dan teknis 9. Mematuhi ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan			
62	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Kegiatan Usaha Penyimpanan LPG/LNG/CNG dan/atau Penyimpanan LPG dengan fasilitas *bottling plant* (SPBE)** 1. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/ Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha: a. Surat Permohonan	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menjamin mutu produk	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penun-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Daftar Penerima Manfaat (*Benefecial Ownership*) c. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan ling-		atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat 4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan	jang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan di-		cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas		Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau		dalam Izin Usaha 9. Menjamin keselamatan instalasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perma- salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyara- tan dan ketera- ngan/ pernya- taan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dike- mudian hari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan 2. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/ Perpanjangan Izin Usaha Sementara / Penyesuaian Izin					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal dengan calon pengguna fasilitas penyim-panan c. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpan-jangan IU Sementara (apabila ada)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuang-an 3 (tiga) tahun terakhir atau 2) Dokumen kesepaka-tan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nominal tertentu 3. Persyaratan teknis Izin Usaha Tetap/ Perpanjangan/ Penyesuaian: a. Studi Kelayakan b. *BA commi-sioning* atau BA hasil pe-meriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditan-datangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Lingkungan Migas atau Persetujuan Layak Operasi (PLO) c. Gross Akta Kapal (jika Milik Sendiri) atau Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) untuk fasilitas penyim-panan di perairan d. Dokumen Kontrak perjanjian penyim-panan dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengguna fasilitas penyim-panan LNG/LPG/ CNG (sesuai komoditas yang akan disimpan) e. Bukti kepemilikan /penguasaan / kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Untuk moda angkutan darat berupa stnk/bpkb Untuk moda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							angkutan/ penyimpa-nan laut berupa gross akta kapal Untuk fasilitas berupa tangki, pipa dokumen kepemilikan berupa Surat pernyataan dari Direktur B. Kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/ Hasil Olahan 1. Persyaratan Administratif					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (Beneficial Ownership) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, ke-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undang-an 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak ber-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasi dan mampu dijalan-kan sesuai dengan kaidah ketek-nikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau perma-salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persya-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ratan dan keterang-an/ pernya-taan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dike-mudian hari ter-bukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan per-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undang-undangan 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU atau HoA) dengan calon pengguna fasilitas penyim-panan c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pemba-ngunan fasilitas dan sarana d. Surat Per-setujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk fasilitas penyim-panan di perairan e. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuai-an/Per-panjangan (apabila ada) f. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang mene-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Studi Kelayakan b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana c. Persetujuan Lingkungan d. Berita Acara Pemeriksaan Keselamat-an Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas / PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan C. Gross Akta Kapal atau Surat Perjanjian Sewa dan Gross Akta pemilik kapal (jika Sewa) untuk fasilitas penyimpanan berupa floating storage					
63	35201	Pengada-an Gas Alam	Kegiatan Usaha Pengola-	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi (Izin Usaha Sementara/	15 Hari	1. **Izin Usaha**: a. Menjamin dan ber-	- Perse-tujuan Layak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Buatan	han Minyak dan Gas Bumi untuk Komoditas Gas Bumi	- Mene-ngah - Besar			Tetap/Perpan-jangan/ Penyesuaian) a. Surat Per-mohonan b. Daftar Penerima Manfaat c. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan Badan Usaha 2. Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kela-yakan b. Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi atau Kesepakatan Kerja Sama Pengolahan		tanggung jawab atas pengguna-an peralatan, keakurat-an, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan b. Menjamin mutu produk atau komoditas	Operasi Instala-si Minyak dan Gas Bumi - Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Kegiat-an Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Gas Bumi dengan KKKS atau Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Kesepakatan awal dengan pengguna akhir atau Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-		sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku d. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat keterangan dari bank umum		d. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional e. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang berke-dudukan di Indone-sia, yang me-nerang-kan bahwa Badan Usaha me-miliki kemampu an penda-naan dengan nominal tertentu e. Rencana pemanfaatan atau pembangu-nan sarana dan fasilitas Pengolahan Gas Bumi		Usaha apabila terdapat perubahan data admi-nistratif dan teknis f. Melapor-kan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan, dimensi, kapasitas, serta sarana dan fasilitas dan data titik koordinat berupa *Data Geo-reference Standard Datum* WGS84 f. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara (apabila ada) 3. Teknis (Izin Usaha Tetap/		sewaktu-waktu apabila diperlukan g. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan h. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpanjangan/ penyesuaian) a. Studi Kelayakan b. Dokumen pasokan berupa Penetapan alokasi gas bumi dari Menteri atau Perjanjian jual beli Gas Bumi (PJBG/ GSA) dengan Badan Usaha Niaga Minyak Gas Bumi atau Dokumen kerja Sama Pengolahan gas bumi c. Dokumen kontrak jual beli dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengguna akhir atau Badan Usaha Niaga Gas Bumi/ LNG / LPG d. *BA commisioning* atau BA hasil pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditanda-tangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau Persetujuan Layak Operasi (PLO) e. Badan Usaha yang me-lakukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan dapat memiliki laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri atau dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja sama dengan Labotorium *independent* yang terakreditasi f. Bukti kepemilikan/ penguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas g. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangannya (apabila ada)					
64	19211	Industri Bahan Bakar	Seluruh	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persyaratan Administratif a. Surat Permohonan	15 Hari	1. Menjamin mutu produk atau	- Persetujuan Layak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi				(Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan Jenis Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi)	b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja		komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 2. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat 3. Melaksanakan penunjukkan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar	Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penyimpanan mineral ikutan radioaktif sebagai penunjang kegiatan utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan		Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional 4. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 5. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan		mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 6. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau perma-		8. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar		ditetapkan oleh instansi yang berwenang 10. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengembangan masyarakat setempat 11. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan 8) Kesang-gupan Badan Usaha menerima penunju-kan dan penuga-san dari Menteri untuk meng-hasilkan dan/ atau		pelaksanaan Izin Usaha Sementara 12. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 13. Menjamin keselamatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mengu-sahakan jenis BBM untuk peme-nuhan cadangan BBM Nasi-onal 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU/HoA/Perjanjian Jual Beli) dengan calon pemasok bahan baku		instalasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Minyak Bumi dan/atau dokumen lain yang mengindikasikan tersedianya pasokan dengan calon pemasok yang difasilitasi oleh SKK Migas c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kawasan yang ber-wenang mengenai lokasi untuk pembangu-nan fasilitas dan sarana d. SK Izin Usaha Sementara/ Perpanja-ngan (apabila ada) e. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Studi Kelayakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Persetujuan Lingkungan c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditanda-tangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Kontrak Perjanjian Pasokan Bahan Baku Minyak Bumi paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan e. Memiliki laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu produk yang dihasilkan sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							standar dan mutu yang ditetapkan Menteri f. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangan (apabila ada) g. Dokumen hasil uji laboratorium atas seluruh parameter sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah					
65	19214	Industri Peng-	Seluruh	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persyaratan Administratif	15 Hari	1. Izin Usaha:	Perse-tujuan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		olahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar				(Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan Jenis Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi)	a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan,		a. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Menjamin mutu	Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perun-		produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dang-undangan 4) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menja-min dan bertanggung jawab bahwa		d. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional e. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik		terdapat perubahan data administratif dan teknis f. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau perma-salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Doku-men persya-ratan dan ke-terang-an/ pernya-taan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemu-dian hari terbukti tidak		apabila diperlukan g. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun-dang-undangan h. Melak-sanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8) Kesanggupan Badan Usaha menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menghasilkan		i. Menjamin keselamatan instalasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Izin Usaha Sementara: a. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang ditetapkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/ atau mengu-sahakan jenis BBM untuk peme-nuhan cadang-an BBM Nasi-onal 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU/HoA/Perjanjian Jual Beli) dengan calon pemasok		oleh instansi yang ber-wenang b. Memenuhi aspek keselamat-an dan ke-sehatan kerja dan pengelola-an ling-kungan, serta pe-ngembang-an masya-rakat setempat c. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku Minyak Bumi dan/atau dokumen lain yang mengindikasikan tersedianya pasokan dengan calon pemasok yang difasilitasi oleh SKK Migas c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau		Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara 3. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementaran Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana d. SK Izin Usaha Sementara/ Perpanjangan (apabila ada) e. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun		melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terakhir yang sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Studi Kelayakan b. Persetujuan Lingkungan c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditanda-tangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan d. Kontrak Perjanjian Pasokan Bahan Baku Minyak Bumi paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan e. Memiliki laboratorium uji ter-akreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu produk yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dihasilkan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri f. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangan (apabila ada) g. Dokumen hasil uji laboratorium atas seluruh parameter sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. Spesifikasi dan hasil uji laboratorium produk yang dihasilkan (untuk produk bahan bakar dengan spesifikasi tertentu yang berbeda dengan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah)					
66	35202	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	1. Administrasi (Sementara/ Tetap/ Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Surat Permohonan	15 Hari	1. Menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinam-	Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						untuk jenis kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa dan Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi)	b. Daftar Penerima Manfaat/ *Beneficial Ownership* c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas		bungan pada jaringan distribusi niaganya 2. Menjamin harga jual komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri 3. Menjamin dan bertanggung-jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke	Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan sarana Dalam hal fasilitas berupa floating Storage diperlukan Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang d. Pernyataan tertulis di atas materai mengenai:		konsumen akhir sesuai dengan ketentuan peraturan 4. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha 3) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ke-		kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat 6. Bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tentuan peraturan perun-dang-undangan 4) Kesang-gupan badan usaha menjamin dan ber-tang-gung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang di-miliki/ di-kuasai layak berope-rasi dan mampu dijalan-kan sesuai		oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap: a. Sarana dan fasilitas maupun lokasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 5) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang		kegiatan usaha atau b. Jenis komoditas dan/atau merek-dagang 9. Menyampaikan laporan kepada Menteri energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal minyak dan gas bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diberikan adalah benar adanya dan apabila dike-mudian hari ter-bukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan per-aturan perun-dang-undangan 7) Kesang-gupan menerima penunju-		terdapat perubahan terhadap data administrasi 10. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penye-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diaan cadangan penya-ngga energi dan peme-nuhan kebu-tuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyim-panan miliknya (untuk ke-giatan usaha niaga bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bakar minyak) 9) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi) 10) Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silitas penyimpanan dan/ atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/ atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG) dan/ atau dikuasai termasuk penyalurnya secara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG) 2 Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Analisis kelayakan b. Kesepakatan jual beli Gas Bumi/ LNG/CNG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.1004

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Kesepakatan pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Hak Khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, (jika ada) e. Salinan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengem-bangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun pada wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional beserta tanda terima f. Rencana pemanfaatan atau pembangu-nan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi, yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jalur, dimensi, kapasitas, right of way pipa serta sarana dan fasilitas selain pipa dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard* Datum WGS84 g. Terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi, salinan dokumen penetapan pemenang lelang Hak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur/ salinan dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu h. Jaminan kecukupan pendanaan, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indone-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu (mini-mal 70% dari total nilai investasi) 4) SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpanja-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan IU Semen-tara (apabila ada) 3 Teknis (Izin Usaha Tetap/ perpanjanga/ penyesuaian) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat: 1) Sumber pasokan dan calon konsu-men 2) Neraca gas bumi 3) Spesifi-kasi gas bumi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat berupa data *georefe-rence stan-dard* datum wgs84 (tamba-han baru belum ada di aplika-si) 5) Skema usaha dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana pengem-bangan usaha 6) Peng-gunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal 7) Capaian tkdn dan 8) Harga beli gas bumi, kompo-nen dan besaran harga jual gas bumi b. Dokumen pasokan berupa Penetapan alokasi gas bumi/LNG					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari Menteri atau kontrak jual beli LNG/CNG dengan pemasok yang bukan kontraktor kontrak kerja sama hulu migas atau kontrak jual beli dengan BU Niaga gas bumi dengan skema in-terruptible sesuai ketentuan yang berlaku c. Kontrak jual beli Gas Bumi dengan konsumen akhir atau BU Pengo-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lahan LNG atau BU niaga CNG atau BU niaga BBG atau BU niaga gas bumi dengan skema interruptible sesuai ketentuan yang berlaku d. Perjanjian pengangkutan gas bumi dengan badan usaha yang telah mendapat izin Usaha Pengangkutan dan/atau hak khusus ruas transmisi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau wilayah jaringan distribusi, jika ada e. Salinan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pengem-bangan jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rencana pipa gas bumi yang telah dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wilayah jaringan distribusi ke dalam rencana induk gas bumi nasional beserta tanda terima f. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Insta-lasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandata-ngani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkung-an Migas/ PLO /					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							COI yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan g. Terhadap pemegang hak khusus wilayah jaringan distribusi, salinan dokumen penetapan pemenang lelang hak khusus wilayah jaringan distribusi dari badan pengatur/ salinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan wilayah jaringan distribusi dan/atau wilayah niaga tertentu h. Bukti kepemilikan/penguasan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas niaga i. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/Penye-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							suaian/ Perpan-jangannya (apabila ada)					
67	06100	Pertam-bangan Minyak Bumi	Kegiatan Survei Seismik 2D/3D/ Lainnya Minyak Bumi yang dilakukan secara tidak menetap kurang dari 30 hari, Kegiatan Eksplorasi Minyak Bumi, Kegiatan Eksploitasi Minyak	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Keputusan Menteri mengenai Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perpanjangan/ Alih Kelola/ Pengelolaan Bersama 2. Salinan Kontrak Kerja Sama 3. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)	30 Hari	BU/ BUT wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan Kontrak Kerja Sama	- Perse-tujuan Layak Operasi Instala-si Minyak dan Gas Bumi - Perse-tujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bumi, Kegiatan Penang-kapan, Penyim-panan, Peman-faatan Karbon di Wilayah Kerja Migas				4. Salinan Jaminan Pelaksanaan			- Perse-tujuan Penga-lihan Nilai Sisa Komit-men Pasti ke Wilayah Terbu-ka - Pe-nyimpa nan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai penun-jang kegia-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										tan utama		
68	39000	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Kegiatan Usaha Eksplorasi zona target injeksi Karbon di Formasi Geologi (Wilayah Izin Penyimpanan Karbon)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi Karbon)	1. Pemilik Manfaat *(Beneficial Ownership)* 2. Keputusan Menteri mengenai Pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas 3. Salinan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi Zona Target Injeksi 4. Surat keterangan fiskal untuk Badan Usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	20 Hari	1 Menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI serta menyusun analisis manajemen risikonya 2. Membuat perjanjian dengan Kontraktor yang memuat prinsip-prinsip kesepakatan (*mutually agreed*	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		*principles*), dalam hal Wilayah Izin Penyimpanan Karbon bertampalan (*overlay*) dengan Wilayah Kerja 3. Melaksanakan komitmen pasti Eksplorasi ZTI 4. Melaksanakan kegiatan Eksplorasi ZTI sesuai rencana kerja yang telah disetujui 5. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan Eksplorasi ZTI			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyediakan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI 7. Melaksanakan kewajiban penyerahan data Eksplorasi ZTI yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menjamin mutu data yang dihasil-kan dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kegiatan Eksplorasi ZTI 9. Melaksanakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pemerintah dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan permohonan persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi ZTI dalam hal akan melanjutkan ke			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahap kegiatan operasi penyimpanan Karbon 11. Menyertakan sertifikasi kapasitas penyimpanan Karbon dalam permohonan persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi ZTI 12. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi dan peralatan serta keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang meme-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia 14. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup 15. Menyediakan sistem tanggap darurat untuk menghadapi kondisi berbahaya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang ber-potensi mengancam keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Menyediakan asuransi yang minimal meliputi per-lindungan atas kerusakan fasilitas, pekerja,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerusakan lingkungan, pembongkaran akibat kecelakaan dengan *coverage* yang wajar berdasarkan paparan risiko dan biaya 17. Memastikan bahwa sub kontraktor yang terlibat dalam aktivitas juga menyediakan asuransi untuk pekerjanya 18. Melaksanakan kewajiban pasca operasi Kegiatan Eksplorasi ZTI			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									19. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 20. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan			
			Kegiatan Usaha Operasi Penyimpanan Karbon di Formasi Geologi (Wilayah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Operasi Penyimpanan Karbon)	1. Pemilik manfaat *(beneficial ownership)* 2. Peta usulan wilayah izin penyimpanan karbon yang dilengkapi	20 Hari	1. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan operasi Penyimpanan Karbon yang paling sedikit	- Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Izin Penyimpanan Karbon)				dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 3. Persetujuan rencana pengembangan dan operasi (*plan for development and operation*) 4. Salinan jaminan pelaksanaan operasi penyimpanan karbon 5. Surat pernyataan kesediaan membayar		meliputi kegiatan pengadaan, konstruksi, *commissioning*, injeksi, pemeliharaan, monitoring, MRV dan penutupan serta menyusun analisis manajemen risikonya 2. Melaksanakan Kegiatan Operasi penyimpanan karbon sesuai Rencana Pengembangan dan Operasi ZTI dan rencana kerja	Gas Bumi - Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komitmen sumur injeksi yang tidak dilaksanakan 6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.		yang telah disetujui 3. Melaksanakan kegiatan pengadaan, konstruksi, *commissioning*, injeksi, pemeliharaan, monitoring, MRV dan penutupan sesuai standar kaidah keteknikan yang baik 4. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Rencana Kerja Izin Operasi sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 5. Melaksanakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (royalti) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya kepada Pemerintah dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyediakan jaminan pelaksanaan operasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penyimpanan Karbon 7. Menyerahkan data hasil kegiatan Izin Operasi Penyimpanan Karbon yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi dan peralatan serta keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah 10. Mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia 11. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengelolaan lingkungan hidup 12. Menangani kebocoran pada saat operasi penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyediakan sistem tanggap darurat untuk menghadapi kondisi berbahaya yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyediakan asuransi yang minimal meliputi perlindungan atas kerusakan fasilitas, pekerja, kerusakan lingkungan, pembongkar-an akibat kecelakaan dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									coverage yang wajar berdasarkan paparan risiko dan biaya 15. Memastikan bahwa sub kontraktor yang terlibat dalam aktivitas juga menyediakan asuransi untuk pekerjanya 16. Menyediakan jaminan pasca operasi 17. Melaksanakan pengembalian Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dan kegiatan pasca operasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									18. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 19. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan			
69	06201	Pertambangan Gas Alam	Kegiatan Survei Seismik 2D/3D/ Lainnya Gas Bumi yang dilakukan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Keputusan Menteri mengenai Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Keputusan	30 Hari	BU/ BUT wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			secara tidak menetap kurang dari 30 hari, Kegiatan Eksplorasi Gas Bumi, Kegiatan Eksploitasi Gas Bumi, Kegiatan Penang-kapan, Penyim-panan, Peman-faatan Karbon di Wilayah Kerja Migas				Menteri mengenai Persetujuan Perpanjang-an/Alih Kelola/ Pengelolaan Bersama 2. Salinan Kontrak Kerja Sama 3. Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) 4. Salinan Jaminan Pelaksanaan		Kontrak Kerja Sama	dan Gas Bumi - Perse-tujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi - Perse-tujuan Penga-lihan Nilai Sisa Komit-men Pasti ke Wilayah Terbu-ka - Penyim-panan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		
70	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	Kegiatan usaha jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak Kegiatan	- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk perusahaan yang telah berdiri minimal 1 tahun 2. Laporan keuangan tahun terakhir untuk perusahaan yang telah berdiri minimal 1 tahun	15 Hari	Wajib mengikuti standar internasional, Standar Nasional Indonesia, dan standar lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penanda dan/-atau	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ini mencakup jasa penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang berkaitan dengan kegiatan pemboran/ *drilling*, pemboran inti/*coring*, pemboran berarah/ *directional drilling*, pemboran *unconventional* UBD & MPD,				3. Akta perusahaan yang mencantumkan maksud dan tujuan sesuai ruang lingkup KBLI 09100 4. Surat Pernyataan diatas meterai mengenai komitmen kemampuan/kapasitas produk/jasa meliputi: a. Daftar Peralatan b. Daftar Tenaga kerja c. Daftar Pengalaman perusahaan (kecuali			Perunut Menggunakan Zat Radioaktif		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pekerjaan ulang sumur/ *workover*, perawatan sumur/ *well service*, penyemenan sumur/ *cementing*, pelayanan *mud logging*, rekayasa lumpur pemboran, pelayanan *electrical logging* dan perforasi sumur, penanganan *casing* dan				untuk perusahaan baru) dan pengalaman personil 5. Analisis manajemen risiko keselamatan Minyak dan Gas Bumi 6. Surat Pernyataan diatas meterai mengenai: a. Kesanggupan Badan Usaha terhadap pemenuhan: 1) Aspek keselamatan, kesehatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tubing, pengujian kandungan lapisan/ *drill stem testing*, pelayanan *slickline* dan penyelesaian sumur/ *well completion*, stimulasi sumur/ *well stimulation* serta perekahan hidrolik dan *coil tubing*, *fishing*, perawatan				kerja dan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan b. Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain c. Kebenaran atas dokumen persyaratan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			alat produksi sampai kepala sumur, *monitoring* sumur minyak dan gas, pengelola-an limbah di area pemboran, penangan-an gas beracun, pelayanan *top drive*, pelayanan MWD dan LWD, penutupan sumur dan pekerjaan				keterangan/per nyataan yang disampaikan Badan Usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasca operasi pemboran, penanganan semburan liar, serta data *acquisition, processing, interpretation, operation,* dan *technical analysis*									
71	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG).	Sarana Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	(SPBU dengan skema CODO/ DODO, SPBN, SPDN, dll) dengan kapasitas penyimpanan <20 Kilo Liter						dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada Badan Usaha Niaga Migas			
			Sarana Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Transpor-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tasi Darat, Laut, dan Udara (SPBU dengan skema CODO/ DODO, SPBN, SPDN, dll) dengan kapasitas penyimpanan ≥ 20 Kilo Liter						2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada Badan Usaha Niaga Migas			
			Sarana Pengisian Bahan Bakar Gas	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			untuk Transp-ortasi Darat, Laut, dan Udara (SPBG, SPBLGV, dll)	- Besar			Badan Usaha Niaga Migas		Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada Badan Usaha Niaga Migas			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.1050

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
72	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi	Penyalur/ Agen LPG Umum	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Darat, Laut, dan Udara							Badan Usaha Niaga Migas 5. Memiliki/ menguasai sarana pengangkutan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait			
			Penyalur/ Agen LPG Tertentu (3 kg)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dari 1 (satu) Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu 5. Memiliki/ menguasai sarana pengangkutan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penyalur/ Agen Bahan Bakar Minyak selain SPBU	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Mengguna-kan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampai-kan laporan kegiatan penyaluran kepada	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Badan Usaha Niaga Migas 5. Memiliki/ menguasai sarana pengangkutan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait			
73	47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dengan Penyalur (Agen) LPG Tertentu (3 Kg) yang	-	Hanya untuk pelaku usaha yang memiliki perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dengan Penyalur (Agen) LPG 3 Kg	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masih berlaku 2. Mematuhi standar kegiatan usaha untuk kegiatan Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)			
			Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Memiliki surat penunjukan Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dari Pangkalan LPG (3 Kg) yang masih berlaku	-	Hanya untuk pelaku usaha yang memiliki surat penunjukan Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dengan Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)	Menteri/ Kepala Badan

E. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	32906	Industri Produksi Radioisotop	• Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop • Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Dokumen sistem manajemen		3. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									radiasi pengion			
			• Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop • Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan	- Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (untuk kegiatan produksi radioisotop dan/atau radiofarmaka yang digunakan untuk pasien) - Izin Edar Obat - Ekspor Zat Radioaktif/ Impor Zat Radioaktif	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Untuk kegiatan produksi radioisotop dan produksi radioisotop dan		ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							radiofarmaka, persyaratan harus dilengkapi dengan jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
			• Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop • Dekomisioning	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka				2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		dekomisioning setelah PB dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomision-ing 6. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomision-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing kepada BAPETEN			
			• Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop • Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka • Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2	26601	Industri Peralatan	Konstruksi Fasilitas	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis	45 Hari setelah memenuhi	1. Melaksanakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Iradiasi/ Sinar X, Perlengka-pan, dan Sejenisnya	Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif	- Besar			fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	persyaratan dan melakukan pembayaran	konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesu-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Operasi Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan	- Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan pengembangan - Surat Persetuju-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 6. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan		ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk	an Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dekomision-ing dan penanganan limbah radioaktif 8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampai-kan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	Dalam Negeri - Izin Edar Perbekal-an Kesehatan Rumah Tangga Impor - Surat kete-rangan pendu-kung eks-por impor – sertifikat bebas jual untuk produk dalam negeri - Surat persetuju-an pelaksa-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif	naan uji klinik - Surat keterangan pendukung ekspor impor - sertifikat pemberitahuan ekspor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dekomisioning Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
			Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			• Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Meng-	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gunakan Sumber Radioaktif • Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif • Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif				proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen		rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sistem manajemen 4. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
			• Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksana-kan kegiatan sesuai dengan PB	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Menggunakan Sumber Radioaktif • Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif • Operasi Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif				2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomision-	melakukan pembayaran	yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ing fasilitas sumber radiasi pengion 6. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif		BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengelolaan limbah radioaktif			
			• Dekomis-ioning Fasilitas Iradiator Kategori II Meng-gunakan Sumber Radioaktif • Dekomis-ioning Fasilitas Iradiator Kategori III Meng-gunakan Sumber Radioaktif • Dekomis-ioning Fasilitas	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomision-ing yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomision-ing	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghenti-kan kegiatannya secara tetap 2. Melaksana-kan kegiatan dekomision-ing setelah PB dekomision-ing diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif						pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesu-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
			• Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif • Pernyataan Pem-	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bebasan Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif • Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori IV Menggunakan Sumber Radioaktif									
			Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembangkit Radiasi Pengion				proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program komisioning		rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksana-kan konstruksi paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak PB konstruksi diterbitkan 3. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sistem manajemen 4. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
			Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PB yang diterbitkan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Radiasi Pengion				radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
			Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PB	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sumber Radioaktif				2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan		yang diterbitkan 2. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, serta ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							limbah radioaktif		5. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampai-kan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melaksana-kan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fasilitas Iradiator Kategori I Meng-gunakan Pembangkit Radiasi Pengion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksana-kan kegiatan sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampai-kan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 7. Melaksana-kan perawatan sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									program perawatan			
			Produksi Peralatan yang Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen	15 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan	- Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan teknis pembebasan bea masuk dalam rangka penelitian dan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan radiasi 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampai-kan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara	pengem-bangan - Surat Persetuju-an Penilaian TKDN Pengguna-an Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekal-an Kesehatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan	Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekal-an Kesehatan Rumah Tangga Impor - Surat kete-rangan pendu-kung eks-por impor – sertifikat bebas jual untuk produk dalam negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Surat persetujuan pelaksanaan uji klinik - Surat keterangan pendukung ekspor impor - sertifikat pemberitahuan eks-por - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										untuk Alkes)		
			Produksi Peralatan Pendukung Peralatan yang Menggunakan Zat Radioaktif atau Pembangkit Radiasi Pengion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas produksi 2. Dokumen sistem manajemen 3. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung menggunakan sumber radiasi pengion untuk pengujian, Pelaku Usaha melampirkan program	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung	- Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion/ Impor Pembangkit Radiasi Pengion - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 4. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung menggunakan zat radioaktif untuk pengujian, Pelaku Usaha melampirkan program pengelolaan limbah radioaktif		menggunakan sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha wajib melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti	untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dalam hal Pelaku Usaha tidak memiliki sumber radiasi pengion untuk pengujian, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain 6. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung		ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung menggunakan sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mengguna-kan dengan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pengelolaan limbah radioaktif		BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 7. Dalam hal kegiatan produksi peralatan pendukung mengguna-kan zat radioaktif, Pelaku Usaha wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pencurian, dan sabotase zat radioaktif			
3	52106	Fasilitas Penyimpan-an Sumber Radiasi Pengion	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis fasilitas penyimpanan 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksana-kan kegiatan sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							radiasi pengion 5. Dokumen sistem manajemen 6. Dokumen program perawatan		keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
4	46643	Perdagangan Besar Zat Radioaktif	• Impor Zat	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen teknis	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melakukan kegiatan impor,	Penetapan Pusat Penyedia	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Pembangkit Radiasi Pengion	Radio-aktif • Ekspor Zat Radio-aktif • Peng-alihan Zat Radio-aktif • Impor dan Peng-alihan Zat Radio-aktif				fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 5. Dokumen sistem manajemen 6. Jaminan finansial untuk	melakukan pembayaran	ekspor, pengalihan, dan kegiatan impor dan pengalihan zat radioaktif sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Untuk kegiatan Pengalihan Zat Radioaktif dan kegiatan Impor serta Pengalihan Zat Radioaktif, Pelaku Usaha wajib melakukan kegiatan pengalihan	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi) atau penempatan di tempat yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan 3. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Melaksana-kan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak-lanjuti ketidak-sesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 8. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 9. Menyampaikan rekapitulasi realisasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									impor, ekspor, dan/atau pengalihan, zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak PB diterbitkan 10. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• Impor Pembang-kit Radiasi Pengion • Ekspor Pembang-kit Radiasi Pengion • Peng-alihan Pembang-kit Radiasi Pengion • Impor dan Peng-alihan Pembang-kit Radiasi Pengion	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 3. Dokumen sistem manajemen	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor, ekspor, pengalihan, dan kegiatan impor dan pengalihan pembangkit radiasi pengion sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Untuk kegiatan Pengalihan Pembangkit Radiasi Pengion dan kegiatan Impor serta Pengalihan Pembangkit	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan (untuk kegiatan pengalih-an pembang-kit radiasi pengion untuk keperluan medik)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Radiasi Pengion, Pelaku Usaha wajib melakukan kegiatan pengalihan yang disertai dengan kegiatan pemasangan (instalasi) 3. Melaksana-kan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi 4. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Menyampai-kan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sejak PB diterbitkan 8. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor, ekspor, dan/atau pengalihan kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak PB diterbitkan			
			Pengalihan, ekspor, dan/atau impor:	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat penunjukan dari atau surat bukti kerja sama	14 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Pemegang PB melakukan perdagangan bahan nuklir dengan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• bahan nuklir • bahan bakar nuklir • bahan bakar nuklir bekas dan/atau • hasil olah ulang bahan bakar nuklir bekas				dengan penghasil bahan nuklir 2. Dokumen bukti kepemilikan fasilitas penyimpanan 3. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 5. Dokumen prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkut-an bahan		memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	dan/atau Bahan Penolong		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nuklir 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi					
5	72107	Penelitian dan Pengem-bangan Ketenaga-nukliran	Penelitian dan Pengembang-an Ketenaga-nukliran untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen hasil justifikasi penggunaan sumber radiasi pengion dalam penelitian dan pengembang-an 2. Dokumen program	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksana-kan kegiatan penelitian dan pengembang-an sesuai dengan PB yang diterbitkan 2. Melaksana-kan program proteksi dan keselamatan	- Ekspor Zat Radioaktif / Impor Zat Radioaktif - Ekspor Pembang kit Radiasi Pengion/ Impor Pembang	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen rencana teknis fasilitas radiasi 5. Dalam hal melakukan kegiatan penelitian dan pengembang-an dengan menggguna-kan zat radioaktif,		radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 3. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindak-lanjuti ketidaksesu-aian hasil inspeksi sesuai jangka	kit Radiasi Pengion		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pelaku Usaha melampirkan dokumen pengelolaan limbah radioaktif 6. Dalam hal melakukan kegiatan penelitian dan pengembang-an dengan fasilitas perizinan bertahap, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomision-ing dan/atau penanganan		waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan penelitian dan pengembang-an menggunakan zat radioaktif kategori I, II, III, dan IV, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							limbah radioaktif 7. Dalam hal melakukan kegiatan penelitian dan pengembang-an dengan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pengelolaan limbah radioaktif		dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampai-kan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan 8. Dalam hal kegiatan penelitian dan pengembang-an menggguna-kan zat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan dokumen pengelolaan limbah radioaktif			
			Kegiatan Penelitian dan Pengembang-an yang Mengguna-kan Bahan Nuklir atau Bahan dan Peralatan Nonnuklir	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir 2. Dokumen prosedur yang terkait dengan pemanfaatan bahan nuklir 3. Sertifikat	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Melakukan pemanfaatan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	Ekspor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Impor Bahan Nuklir	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang Terkait Daur Bahan Bakar Nuklir				kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 4. Pernyataan perencanaan penanganan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen sistem garda-aman			untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir		
6	43294	Instalasi Nuklir	Konstruksi Reaktor Daya Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melakukan kegiatan konstruksi	Ekspor Bahan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			D > 1000 MWt (D > 300 MWe)				desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi 7. Program manajemen penuaan 8. Program perawatan 9. Program dekomisioning 10. Dokumen rencana	melakukan pembayaran	sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan gardaaman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain,	Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Impor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi fisik 11. Dokumen sistem garda-aman 12. Dokumen sistem manajemen 13. Program kesiapsiaga-an nuklir 14. Daftar informasi desain 15. Jaminan finansial pelaksanaan konstruksi		pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning reaktor daya besar, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 6. Melakukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemantauan tapak reaktor nuklir 7. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 8. Menyerah-kan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Daya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Reaktor Daya Kecil 30 MWt < D ≤ 1000 MWt (10 MWe < D ≤ 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Program manajemen penuaan 8. Dokumen rencana proteksi fisik 9. Dokumen sistem garda-aman 10. Dokumen sistem manajemen 11. Program kesiapsiaga-an nuklir 12. Daftar informasi desain 13. Jaminan finansial pelaksanaan konstruksi		keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai standar kegiatan komisioning reaktor daya kecil, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 6. Menyampaikan laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 7. Melakukan pemantauan tapak 8. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing 9. Menyerah-kan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 10. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Daya Kecil telah berakhir, pemegang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomision-ing			
			Konstruksi Reaktor Daya Mikro D ≤ 30 MWt (D ≤ 10 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan	6 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program proteksi dan keselamatan radiasi 7. Program manajemen penuaan 8. Dokumen rencana proteksi fisik 9. Dokumen sistem garda-aman 10. Dokumen sistem manajemen 11. Program kesiapsiaga-an nuklir 12. Daftar informasi		nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamat-an, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desain 13. Program dekomision-ing 14. Jaminan finansial pelaksanaan konstruksi		3. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning reaktor daya mikro, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 5. Menyampai-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 6. Menyampai-kan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 7. Melakukan pemantauan tapak 8. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Daya Mikro telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Reaktor	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi	12 bulan setelah memenuhi	1. Melakukan kegiatan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Nondaya Besar D > 30 MWt				2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Program	persyaratan dan melakukan pembayaran	konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamat-an, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesiapsiaga-an nuklir 11. Daftar informasi desain		desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning reaktor nondaya besar, izin pemanfaatan bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara berkala 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Nondaya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Reaktor Nondaya Kecil D ≤ 30 MWt	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Desain rinci reaktor nuklir 4. Laporan analisis keselamatan 5. Dokumen batasan dan kondisi operasi 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan bakar nuklir maupun dengan bahan bakar nuklir sesuai persyaratan keselamatan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem garda-aman 8. Dokumen sistem manajemen 9. Program kesiapsiaga-an nuklir 10. Daftar informasi desain		keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Dalam hal akan melakukan perubahan desain, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan perubahan desain 3. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai standar kegiatan komisioning reaktor nuklir, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 4. Menyampai-kan laporan pelaksanaan program konstruksi 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan persyaratan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 6. Melakukan pemantauan tapak reaktor nuklir 7. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dekomision-ing 8. Menyerah-kan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 9. Dalam hal PB Konstruksi Reaktor Nondaya Kecil telah berakhir,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomision-ing			
			Operasi Reaktor Daya Besar D > 1000 MWt (D > 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program proteksi dan	24 bulan setelah memenuhi pesyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamat-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan radiasi 4. Program operasi dan perawatan 5. Program manajemen penuaan 6. Laporan hasil komisioning 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Program dekomision-ing 11. Program kesiapsiaga-an nuklir		an, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasi-an 3. Menyampai-kan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian kesela-matan berkala c. pertang-gung-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jawaban dan pengen-dalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Membuat program dekomision-ing dalam rangka			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengajuan persetujuan dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Reaktor Daya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Reaktor Daya Kecil 30 MWt < D ≤ 1000 MWt (10 MWe < D ≤ 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Program manajemen penuaan 5. Laporan hasil komisioning 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan gardaaman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem garda-aman 8. Dokumen sistem manajemen		komponen selama pengoperasi-an 3. Menyampai-kan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian kesela-matan berkala c. pertang-gung-jawaban dan pengen-dalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 8. Menyerah-kan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 9. Dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									PB Operasi Reaktor Daya Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Reaktor Daya Mikro	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen	6 bulan setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			D ≤ 30 MWt (D ≤10 MWe)				batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Laporan hasil komisioning 5. Dokumen rencana proteksi fisik 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Dokumen sistem manajemen 8. Sertifikat hasil uji produk	melakukan pembayaran	batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamat-an, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasi-an 3. Menyampai-kan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan berkala c. pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 5. Melakukan pemantauan tapak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jaminan finansial pertanggung -jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 9. Dalam hal PB Operasi Reaktor Daya Mikro telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Operasi Reaktor Nondaya Besar D > 30 MWt	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Program manajemen penuaan 5. Laporan hasil	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamatan, keamanan, dan gardaaman 2. Menerapkan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komisioning 6. Dokumen rencana proteksi fisik 7. Dokumen sistem garda-aman 8. Dokumen sistem manajemen		manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasi-an 3. Menyampai-kan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian kesela-matan berkala c. pertang-gung-jawaban dan pengen-dalian bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Menyerahkan bukti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jaminan finansial pertang-gungjawab-an kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 10. Dalam hal PB Operasi Reaktor Nondaya Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomision-ing			
			Operasi Reaktor Nondaya Kecil D ≤ 30 MWt	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Program operasi dan perawatan 4. Laporan hasil komisioning 5. Dokumen rencana	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyaratan keselamat-an, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proteksi fisik 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Dokumen sistem manajemen		manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasi-an 3. Menyampai-kan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian kesela-matan berkala c. pertang-gung-jawaban dan pengen-dalian bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Membuat program dekomisioning dalam rangka pengajuan persetujuan dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Menyerahkan bukti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 10. Dalam hal PB Operasi Reaktor Nondaya Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									reaktor nuklir, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
			Dekomisioning Reaktor Daya Besar D > 1000 MWt (D > 300 MWe)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Program dekomisioning 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Program kesiapsiagaan nuklir 4. Dokumen sistem manajemen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan dekomisioning sesuai dengan: a. program dekomisioning b. persyaratan keselamatan, keamanan, dan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garda-aman c. doku-men izin 2. Melakukan pemantauan tapak 3. Dalam hal kegiatan dekomision-ing telah selesai, pemegang PB wajib mengajukan permohonan persetujuan pernyataan pembebasan secara tertulis kepada BAPETEN dengan melampirkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan: a. hasil pelaksanaan dekomisioning b. hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif c. pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait persetujuan lingkungan d. hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengu-kuran paparan radiasi dan kontami-nasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak			
7	24206	Industri Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium	Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan nuklir maupun dengan bahan	Ekspor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Impor Bahan Nuklir untuk	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir 11. Daftar informasi desain		nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan, dan gardaaman serta dokumen PB 2. Sebelum melakukan komisioning pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan	Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir/ Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komisioning instalasi nuklir nonreaktor daur-awal besar, izin pemanfaatan bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetuju-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dekomi-sioning 8. Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar telah berakhir, pemegang PB wajib ber-tanggung jawab atas pengelola-an fasilitas, limbah radioaktif, dan pelaksana-an dekomision ing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamat-an 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Dokumen program proteksi dan keselamat-an radiasi 4. Dokumen program manajemen penuaan 5. Dokumen program Operasi dan perawatan 6. Laporan hasil	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyarat-an keselamat-an, keamanan, dan garda-aman 2. Menerap-kan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komisioning 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem gardaaman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program dekomisioning 11. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ing 9. Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Besar telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomision-ing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan nuklir maupun dengan bahan nuklir sesuai persyarat-an keselamat-an, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Sebelum		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiaga-an nuklir 11. Daftar informasi desain		melakukan komision-ing, pemegang PB wajib mem-peroleh persetuju-an komision-ing sesuai standar kegiatan komision-ing instalasi nuklir nonreaktor daur-akhir besar, izin pemanfaat an bahan nuklir, dan surat izin bekerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala 5. Melakukan pemantau-an tapak 6. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomis-ioning secara berkala sejak persetuju-an komision-ing diterbitkan hingga dekomis-ioning 7. Menyerah-kan bukti jaminan finansial			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pertang-gungjawab-an kerugian nuklir secara berkala sejak persetuju-an komision-ing diterbitkan hingga dekomi-sioning 8. Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar telah berakhir,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemegang PB wajib bertang-gung jawab atas pengelola-an fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksana-an dekomis-ioning			
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Dokumen	24 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							program proteksi dan keselamatan radiasi 4. Dokumen program manajemen penuaan 5. Dokumen program operasi dan perawatan 6. Laporan hasil komisioning 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen		persyarat-an keselamat-an, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasi-an 3. Menyampai-kan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian kesela-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Dokumen program dekomisioning 11. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		matan berkala dan c. pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerah kan bukti jaminan finansial dekomision-ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Besar telah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomision-ing			
			Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen tanpa bahan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiaga-		nuklir maupun dengan bahan nuklir sesuai persyarat-an keselama-tan, keamanan, dan garda-aman serta dokumen izin 2. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an nuklir 11. Daftar informasi desain		kegiatan komisioning instalasi nuklir nonreaktor daur-awal kecil, izin pemanfaat-an bahan nuklir, dan surat izin bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampai-kan laporan pelaksanaan program konstruksi 4. Menyampai-kan laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala 5. Melakukan pemantauan tapak 6. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dekomisioning 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Nonreaktor Daur-Awal Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas			
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Laporan hasil komisioning 4. Dokumen rencana proteksi fisik	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyarat-an keselamat-an, keamanan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dokumen sistem garda-aman 6. Dokumen sistem manajemen 7. Dokumen program dekomisioning 8. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. operasi secara berkala b. penilaian keselamatan berkala c. pertanggungjawaban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pengen-dalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerahkan bukti jaminan finansial dekomisioning secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Awal Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pelaksanaan dekomisioning			
			Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen program konstruksi 2. Persetujuan desain 3. Laporan analisis keselamatan 4. Dokumen batasan dan kondisi operasi 5. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 6. Dokumen program manajemen	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan konstruksi sampai pengujian struktur, sistem, dan komponen baik tanpa bahan nuklir maupun dengan bahan nuklir sesuai persyaratan keselamatan, keamanan,		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penuaan 7. Dokumen rencana proteksi fisik 8. Dokumen sistem garda-aman 9. Dokumen sistem manajemen 10. Dokumen program kesiapsiaga-an nuklir 11. Daftar informasi desain		dan garda-aman serta dokumen izin 2. Sebelum melakukan komisioning, pemegang PB wajib memperoleh persetujuan komisioning sesuai standar kegiatan komisioning instalasi nuklir nonreaktor daur-akhir kecil, izin pemanfaat-an bahan nuklir, dan surat izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bekerja untuk petugas instalasi nuklir dan bahan nuklir 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program konstruksi 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Melakukan pemantauan tapak 6. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-ing secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 7. Menyerah-kan bukti jaminan finansial pertanggung-jawaban kerugian nuklir secara berkala sejak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomision-ing 8. Dalam hal PB Konstruksi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dekomision-ing			
			Operasi Instalasi Nuklir Nonreaktor Daur-Akhir Kecil	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Laporan analisis keselamatan 2. Dokumen batasan dan kondisi operasi 3. Laporan hasil komisioning 4. Dokumen rencana proteksi fisik 5. Dokumen sistem garda-aman 6. Dokumen sistem manajemen 7. Dokumen program	12 bulan setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan operasi sesuai batasan dan kondisi operasi serta persyarat-an keselamat-an, keamanan, dan garda-aman 2. Menerapkan manajemen penuaan dan perawatan struktur, sistem, dan komponen		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dekomisioning 8. Dokumen program kesiapsiagaan nuklir		selama pengoperasian 3. Menyampaikan laporan: a. Operasi secara berkala b. Penilaian keselamatan berkala c. Pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir 4. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan utilisasi dari BAPETEN			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam hal akan melakukan utilisasi 5. Pemegang PB wajib memperoleh persetujuan modifikasi dari BAPETEN dalam hal akan melakukan modifikasi 6. Melakukan pemantauan tapak 7. Menyerah-kan bukti jaminan finansial dekomision-ing secara berkala sejak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 8. Menyerahkan bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir secara berkala sejak persetujuan komisioning diterbitkan hingga dekomisioning 9. Dalam hal PB Operasi Instalasi Nuklir			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Nonreaktor Daur-Akhir Kecil telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas, bahan nuklir, limbah radioaktif, dan pelaksanaan dekomisioning			
8	46642	Perdagangan Besar Mineral Radioaktif	Pengalihan, Ekspor, dan/atau Impor Bijih Uranium, Bijih Torium, Uranium	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat penunjukan dari atau surat bukti kerja sama dengan penghasil	14 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Dalam hal dilakukan ekspor, hanya terbatas pada keperluan pengkayaan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Terkonsen-trasi, dan Torium Terkonsen-trasi				mineral radioaktif 2. Dokumen bukti kepemilikan fasilitas penyimpanan 3. Dokumen spesifikasi teknis mineral radioaktif 4. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 5. Dokumen prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkutan mineral radioaktif 6. Dokumen		uranium atau torium dan digunakan kembali di dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pemegang PB melakukan pengalihan mineral radioaktif dengan memenuhi persyaratan keselamat-an, keamanan, dan garda-aman 3. Menyampai-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana proteksi fisik jika mineral radioaktif berbentuk uranium dan/atau torium konsentrat 7. Dokumen sistem garda-aman jika mineral radioaktif berbentuk uranium dan/atau torium konsentrat 8. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 9. Tidak memiliki PB		kan laporan realisasi pengalihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penambangan Mineral Radioaktif, Pengolahan Mineral Radioaktif, Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif, dan Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif					
9	07210	Pertambang-an Bijih Uranium dan Torium	Penambang-an dan/atau Pengolahan Mineral Radioaktif	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Surat Penugasan Pertambangan Mineral Radioaktif (SPPMR) dari lembaga yang menyelengga-rakan urusan	60 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah yang terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketenaganukliran 2. Dokumen analisis keselamatan 3. Program proteksi dan keselamatan radiasi 4. Program pengelolaan limbah radioaktif 5. Program dekomisioning pertambangan 6. Dokumen rencana proteksi fisik		negara bukan pajak 2. Melaksanakan ketentuan yang meliputi: a. keselamatan pertambangan bahan galian nuklir b. keamanan pertambangan bahan galian nuklir c. manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen sistem garda-aman 8. Izin bekerja petugas tertentu		keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir			
			Pengolahan Mineral Radioaktif dan/atau Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen analisis keselamatan 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Program pengelolaan limbah radioaktif 4. Program dekomisioning	60 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	3. Menyediakan dan menempatkan dana jaminan dekomisioning pertambangan 4. Melaksanakan: a. analisis keselamatan b. pembentukan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambang-an 5. Dokumen rencana proteksi fisik 6. Dokumen sistem garda-aman 7. Izin bekerja petugas tertentu		panitia penilai keselamatan c. analisis wilayah tambang d. perancangan desain e. konstruksi f. pengujian g. penambangan h. pengolahan i. perawatan, pemantauan, dan pemerik-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									saan j. proteksi radiasi k. pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup l. penanggulangan kecelakaan m. pengelolaan limbah radioaktif n. proteksi fisik o. gardaaman p. dekomi-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sioning pertam-bangan 5. Mengimple-mentasikan dan memu-takhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis keselamatan dan keamanan 6. Menyampai-kan rencana tahunan 7. Memperoleh persetujuan bila ada: a. peruba-han desain			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. modifikasi c. operasi produksi d. dekomisioning pertambangan 8. Menyampaikan laporan: a. konstruksi b. penambangan c. pengolahan d. pengendalian radioaktivitas lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. penanggulangan kecelakaan f. dekomisioning pertambangan 9. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan 10. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah tambang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Apabila terjadi kecelakaan dimana lepasan radioaktif berpotensi meluas ke luar wilayah tambang, menyatakan kecelakaan dan berkoordi-nasi dengan instansi terkait 12. Dalam hal izin telah berakhir, pemegang PB wajib bertanggung jawab atas keselamatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keamanan pertambang-an, bahan galian nuklir, dan limbah radioaktif			
10	52107	Penyimpan-an yang termasuk dalam *Naturally Occuring Radioactive Material* (NORM)	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen mineral radioaktif 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen rencana proteksi fisik 4. Dokumen garda-aman 5. Dokumen rencana tempat pembuangan permanen	60 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksana-kan ketentuan yang meliputi: a. kesela-matan pertam-bangan bahan galian nuklir b. keaman-an pertam-bangan bahan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									galian nuklir c. manajemen keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir 2. Melaksanakan: a. penyimpanan b. proteksi radiasi c. proteksi fisik d. gardaaman e. pembuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perma-nen, bila ada 3. Memutakhir-kan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis keselamatan keamanan 4. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan 5. Apabila mineral ikutan radioaktif yang disimpan akan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dimanfaat-kan, penghasil mineral ikutan radioaktif wajib mengajukan izin pemanfaatan bahan nuklir 6. Memperoleh persetujuan bila pengelolaan tempat pembuangan permanen melibatkan badan usaha lain dan/atau pemerintah daerah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	43293	Instalasi Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	Jasa Pekerjaan Konstruksi dan/atau Konsultan Konstruksi untuk Fasilitas Sumber Radiasi Pengion	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sistem manajemen 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi untuk konstruksi khusus atau memiliki sertifikat standar untuk kegiatan konstruksi khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memberikan konsultasi dan/atau melaksanakan konstruksi sesuai dengan rencana teknis bangunan penahan radiasi dan pendukungnya yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sistem manajemen 3. Memberikan akses BAPETEN untuk melakukan surveilan 4. Menindak-lanjuti hasil verifikasi dan surveilan			
12	71202	Jasa Pengujian Laboratori-um	• Laborato-rium Dosimetri untuk Kalibrasi Keluaran Radioterapi • Laborato-rium Dosimetri	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifkat Standar	1. Dokumen sistem manajemen 2. Metode uji 3. Bukti pemantauan dosis radiasi perorangan dan pemeriksaan kesehatan	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksana-kan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 2. Melaksana-kan pengujian	- Persetuju-an Pelaksa-naan Uji Bioekiva-lensi - Pemerik-saan Unjuk Kerja Peralatan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			untuk Evaluasi Peralatan Pemantauan Dosis Eksterna • Laboratorium Dosimetri untuk Evaluasi Pemantauan Dosis Interna • Laboratorium Dosimetri untuk Standardisasi Radionuklida				personel penguji		sesuai prosedur 3. Melaksanakan program kalibrasi alat ukur 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan surveilan 5. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan surveilan 6. Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia	dengan Zat Radioaktif (untuk kegiatan laboratorium mengguna-kan zat radioaktif)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• Lembaga Uji Kesesuai-an Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensi-onal • Laborato-rium Uji Bungkus-an Zat Radioaktif • Laborato-rium Uji Peralatan Uji Tak Rusak untuk Metode Radiografi						7. Berpartisipa-si dalam uji banding 8. Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan data PB 9. Melaporkan pelaksanaan dan hasil uji secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB diterbitkan kepada BAPETEN			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• Laboratorium Uji Radioaktivitas									
13	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran meliputi: • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran bagi Petugas Proteksi Radiasi Medik • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen sistem manajemen 2. Dokumen silabus, modul, dan bahan ajar pelatihan sesuai lingkup pelatihan 3. Dokumen acu silang standar kompetensi atau kurikulum dengan program pelatihan 4. Dalam hal lembaga	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 2. Menjamin pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai sistem mutu 3. Menjamin ketersediaan sumber daya 4. Menerima BAPETEN untuk melakukan surveilan	Untuk lembaga pelatihan yang menggunakan sumber radiasi pengion: Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			nukliran bagi Petugas Proteksi Radiasi Industri • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-nukliran bagi Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir pada Instalasi Nuklir Nonreak-tor • Kegiatan Lembaga Pelatihan				pelatihan tidak memiliki sumber radiasi pengion, Pelaku Usaha melampirkan surat perjanjian kerjasama penggunaan sumber radiasi pengion milik instansi lain		5. Menindaklan-juti hasil verifikasi dan surveilan 6. Menetapkan kerangka acuan kegiatan untuk disetujui di awal tahun 7. Melakukan pelatihan dan/atau penyegaran kompetensi sumber daya manusia 8. Melaporkan kepada BAPETEN jika ada perubahan terkait data PB			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Ketenaga-nukliran bagi Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir pada Reaktor Nondaya • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-nukliran bagi Petugas Instalasi Nuklir dan Bahan Nuklir pada Reaktor Daya						9. Menyampai-kan laporan kegiatan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BAPETEN			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			• Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-nukliran bagi Petugas pada Radiografi Industri • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-nukliran bagi Petugas pada Iradiator • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-nukliran bagi									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Petugas pada Fasilitas Produksi Radioisotop dan/atau Radiofarmaka • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran bagi Petugas pada Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			nukliran bagi Petugas Keaman-an Zat Radioaktif • Kegiatan Lembaga Pelatihan Ketenaga-nukliran bagi Personel Penguji Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnos-tik dan Interven-sional									

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1

F. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Sertifikat Pemenuhan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk	Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Persetu-juan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusa-haan - Sertifikat Pemenu-han Komit-men Variasi Promosi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan			Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
2	10215	Industri Peragian /Fermentasi Ikan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									plementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim plementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan	Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Pemenu-han Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenu-han Komit-men Produksi	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control			UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
3	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. 2. Memiliki dokumen berupa: a. spesifikasi mesin dan/atau		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. foto mesin/ peralatan c. perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksana-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan,			an Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
4	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis and*	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	*Critical Control Point* - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Kegiatan Utama - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggu-nakan Sumber Radioak-tif sebagai Penun-jang Kegiatan Utama - Sertifikat Pemenu-han Komit-men Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
5	10221	Industri Pengolahan dan	Seluruh	- Kecil	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng		- Menengah		NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses			Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangku-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
6	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-	TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penera-pan Program Mana-jemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelaya-kan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pengola-han - Sertifikat Pemenu-han Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Persetu-juan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusa-haan - Sertifikat Pemenu-han		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*			Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
7	10295	Industri Peragian /Fermentasi Biota	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Air Lainnya							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Penera-pan Program Manaje-men Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelaya-kan Pengola-han - Sertifikat Pemenu-han Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifika-si Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pe-nerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manaje-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			men Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
8	10296	Industri Berbasis Lumatan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Biota Air Lainnya							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-menuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerap-an Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerap-an Program Manaje-men Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
9	10298	Industri Pengola-han	Pengolahan rumput laut menjadi	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Rumput Laut	olahan lainnya						tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	Dalam Negeri - Sertifikat Penerap-an Program Manaje-men Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Ke-layakan Peng-olahan - Sertifikat Pe-menuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-menuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang	.	produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifika-si Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pe-nerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manaje-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			men Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
10	10299	Industri Pengola-han dan	Seluruh	- Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya		- Menengah		NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-menuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Pe-nerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pe-nerapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pe-nerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
11	10311	Industri Pengasi-nan	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Buah-buahan dan Sayuran		- Mene-ngah					Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	nen Dalam Negeri - Per-timbang-an Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin	Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	menuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
12	10312	Industri Peluma-tan Buah-buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk, serta penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		Produksi Pangan Olahan yang Baik 2. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 3. Menjamin keamanan dan keselamatan	Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control			Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
13	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Peme-		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-	nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri		plementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi	Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha			Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
14	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	Pangan Olahan - Izin Penerap-an Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pe-nerapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153641 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*			Kecil (PSAT-PDUK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
15	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dalam Kaleng							perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.111

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan. 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
16	10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan,	- Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.121

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
17	10391	Industri Tempe Kedelai	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
18	10392	Industri Tahu Kedelai	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) - Sertifikat Peme-	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi		
				Besar			-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan	berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.131

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
19	10393	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Tempe							dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pe-menuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
20	10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kacang-Kacangan							bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme-	lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
21	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men	lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control			- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
22	10412	Industri Margarine	Seluruh	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses			UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
23	10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
24	10414	Industri Minyak Ikan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
25	10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
26	10421	Industri Kopra	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik			
27	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Pene-litian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	- Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen	lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.195

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpa-			Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
28	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,		1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	- Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
29	10424	Industri Pelet Kelapa	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko	Provinsi bersangkutan Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	(PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
30	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Seluruh	- Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen: a. legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau	7 Hari	1. Menyampaikan laporan tahap pembangunan, atau tahap produksi jika telah berproduksi, secara akurat, lengkap dan tepat waktu setiap	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha ii. Sertifikat Hak		semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Izin Penerapan Cara	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pakai atau iii. Sertifikat Hak Pengelolaan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian		bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang-undangan	Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							luas lahan kebun dengan kemam-puan pemenu-han minimal 20 (dua puluh) persen kebutu-han bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah			Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani (koperasi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) perusahaan perdagangan besar hasil pertanian yang membuktikan adanya kontinuitas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sawit dari sumber yang sah. 2. Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutu-han bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutu-han energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun:					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.221

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutu-han energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. 3. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemili-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk					
				- Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen: a. Legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa:	7 Hari	1. Menyampaikan laporan tahap pembangunan, atau tahap produksi jika telah berproduksi, secara akurat,		Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Sertifikat Hak Milik atau 2) Legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha		lengkap dan tepat waktu setiap semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Sertifikat Hak Pakai atau iii. Sertifikat Hak Pengelolaan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesu-		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							aian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal 20 (dua puluh) persen kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan		ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) Perusahaan perdagangan besar hasil pertanian yang membuktikan adanya kontinuitas dan jaminan pasokan bahan baku berupa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buah kelapa sawit dari sumber yang sah. 2. Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutu-han bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutu-han energi dan air baku dalam 1					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/ buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutu-han energi dan air baku dalam 1					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan. 3. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan (kepemili-kan/ sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 5. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses dan membuktikan tersedianya a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) /atau b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi.					
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen: a. Legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau 2) Legalitas peman-faatan kebun buah kelapa sawit	7 Hari	1. Menyampaikan laporan tahap produksi secara akurat, lengkap dan tepat waktu, setiap Semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha ii. Sertifikat Hak Pakai atau iii. Sertifikat Hak Pengelolaan, yang membu-		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselama-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal		tan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							20 (dua puluh) persen kebutu-han bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan quality control secara periodik 7. Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani (koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) Perusahaan perdaga-		bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang-undangan 8. Memiliki dokumen yang terpelihara dan diperbaharui secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan besar hasil pertanian yang membuktikan adanya kontinuitas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah. 2. Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan		periodik mengenai spesifikasi teknis produk akhir dan/atau produk samping yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutuhan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutu-han energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan.					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/ buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan.					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.248

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemili-kan/ sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri turunan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab bagian pemasaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 5. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) /atau b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi.					
31	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		
				- Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Pangan Olahan	Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
32	10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Inti Kelapa Sawit					energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpa-			Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
33	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sawit Dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
34	10435	Industri Pemisa-	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat Tingkat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		han/ Fraksi-nasi Minyak Murni Kelapa Sawit		- Mene-ngah					wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin	berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35	10436	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.291

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur			Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
37	10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom--ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.301

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control		Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
38	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Registrasi Produk Hewan - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Mana-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
39	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Peme-nuhan	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.318

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpa-			Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi			- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
40	10531	Industri Pengola-	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		han Es Krim							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	(PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
41	10532	Industri Pengola-han Es	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kom-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sejenis-nya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)		- Mene-ngah					Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi	Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	(PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.340

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.347

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
43	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komit-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan			(PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
44	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous)	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Peme-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	nuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Pene-rapan Pe-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpa-			Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk			Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
45	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
46	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komit-	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*		Olahan yang Baik	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
47	10615	Industri Makanan Sereal	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
48	10616	Industri Tepung Terigu	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen			yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
49	10621	Industri Pati Ubi Kayu	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.394

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
50	10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen	lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.401

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153957 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
51	10623	Industri Glukosa dan Sejenis-nya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*		Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.412

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
52	10629	Industri Pati dan Produk	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pati Lainnya							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan	Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
53	10633	Industri Tepung Beras	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kom-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Tepung Jagung		- Menengah					Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	ponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Peme-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.429

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
54	10634	Industri Pati Beras dan Jagung	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komit-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan			(PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
55	10635	Industri Pemanis Dari Beras Dan Jagung	Seluruh	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak			Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri		plementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku,		prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
56	10636	Industri Minyak Dari Jagung dan Beras	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko	Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	(PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
57	10710	Industri Produk Roti dan Kue	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.455

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153902 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
58	10721	Industri Gula Pasir	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*		Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar			Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki dokumen bukti kepemilikan atau hak penggunaan/ pemanfaatan tanah, berupa: a. Sertifikat Hak Milik b. Sertifikat Hak Pakai c. Sertifikat Hak Pengelolaan atau d. Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah, yang membukti-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan penguasaan lahan perkebunan dengan luasan minimal sesuai peraturan perundang-undangan 6. Memiliki dokumen perjanjian kemitraan berupa suplai bahan baku hasil perkebunan dengan pelaku usahan sektor perkebunan yang membuktikan jaminan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketersediaan bahan baku hasil perkebunan dalam negeri.					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki dokumen bukti kepemilikan atau hak penggunaan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemanfaatan tanah, berupa: a. Sertifikat Hak Milik b. Sertifikat Hak Pakai c. Sertifikat Hak Pengelolaan atau d. Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah, yang membukti-kan penguasaan lahan perkebunan dengan luasan minimal sesuai peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan 6. Memiliki dokumen perjanjian kemitraan berupa suplai bahan baku hasil perkebunan dengan pelaku usahan sektor perkebunan yang membuktikan jaminan ketersediaan bahan baku hasil perkebunan dalam negeri.					
59	10722		Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kom-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Industri Gula Merah		- Menengah					Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	ponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.480

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	10723	Industri Sirop	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur			men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
61	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
62	10731	Industri Kakao	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.501

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153471 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
63	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label,	bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifi-kasi Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.511

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
64	10733	Industri Manisan Buah-buahan dan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sayuran Kering							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.518

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

SK No 153454 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
65	10734		Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat Tingkat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.520

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Industri Kembang Gula		- Menengah					wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.527

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66	10739	Industri Kembang Gula Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.534

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenis-nya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Pene-litian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
68	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.548

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
69	10761	Industri Pengolahan Kopi	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung - Sertifikat Pemenuhan Komitmen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan	- Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan			Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
70	10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melindungi pangan olahan yang diproduksi					
71	10763	Industri Pengolahan Teh	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Peman-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	faatan Langsung - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan	Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*		Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki dokumen bukti kepemilikan atau hak penggunaan/ pemanfaatan tanah, berupa: a) Sertifikat Hak Milik b) Sertifikat Hak Pakai c) Sertifikat Hak Pengelolaan atau d) Akta Notaris Pelepasan Hak atas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanah, yang membukti-kan penguasaan lahan perkebunan dengan luasan minimal sesuai peraturan perundang-undangan 6. Memiliki dokumen perjanjian kemitraan berupa suplai bahan baku hasil perkebunan dengan pelaku usahan sektor perkebunan yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan jaminan ketersediaan bahan baku hasil perkebunan dalam negeri.					
72	10771	Industri Kecap	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komit-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.574

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan	Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153398 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.575

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
73	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.581

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153391 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.584

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*			Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
74	10773	Industri Produk Masak dari Kelapa	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.588

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153384 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.590

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
75	10774	Industri Pengolahan Garam	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
76	10779	Industri Produk Masak Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Per-	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	tahanan dan Keamanan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komit-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.601

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.602

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan			- Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Kelayakan Pengolahan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Tingkat		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.604

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Produksi Dalam Negeri		
77	10791	Industri Makanan Bayi	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.607

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan Izin Penerapan Cara - Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak			yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri		plementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi,		prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
78	10792	Industri Kue Basah	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi		
				- Besar	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko	Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	(PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
79	10793	Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan	Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
80	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenis-nya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Terpadu/ Hazard Analysis and Critical Control Point - Sertifikat Ke-layakan Peng-olahan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.629

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifi-kasi Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153343 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*			Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
81	10795	Industri Krimer Nabati	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	- Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Olahan yang Baik	men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
82	10796	Industri Dodol	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produksi Pangan Olahan yang Baik	Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Rumah Tangga (IPP-IRT) - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
83	10799	Industri Produk	Seluruh	- Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat Tingkat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Makanan Lainnya		- Menengah					wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan	Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Perse-tujuan Mem-produksi Suplemen Kesehat-an di		
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara	Fasilitas Pangan - Izin Penerap-an Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerap-an Program Mana-jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelak-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			sanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			- Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
84	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Cara Pem-buatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) - Sertifikat Pen-daftaran Pakan Ikan - Pen-daftaran Pakan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikat Cara Pem-buatan Pakan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	yang Baik (CPPB) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk		produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diproduksi					
85	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pakan - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pangan olahan yang diproduksi					
86	11010	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi	Seluruh	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari KeMenteri/ Kepala badanan yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.671

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaa n, kepemilika natau penanggun g jawab Perusahaa n Industri Minuman Beralkohol	Akun Per-usahaan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-jemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan		b. Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha).	Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelak-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol			sanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang masih berlaku.					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.676

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaa n, kepemilika natau penanggun g jawab Perusahaa n Industri Minuman Beralkohol			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan		b. Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha) 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasi-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol		kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 5. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang masih berlaku 6. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengembangan SDM, penanggung-jawab bagian *quality control* 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas		Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control* 8. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja.					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.681

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
87	11020	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaan, kepemilikan atau penanggung jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol b. Perubahan alamat pabrik	- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur		c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha)	Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 6. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang masih berlaku.					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama perusahaan, kepemilika natau penanggung jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol b. Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses		d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha) 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang masih berlaku 6. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari		penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 5. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengembangan SDM, penanggung-jawab bagian *quality control* 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang *quality control* 8. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja.					
88	11031	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt	Seluruh	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol	Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Peme-nuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman		dari Kementerian yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi:	men Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*		a. Perubahan nama perusahaan, kepemilikan atau penanggung jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol b. Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi	- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar		satu lokasi /atau f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha).	Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang masih berlaku					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki rekomendasi persetujuan perubahan izin usaha minuman beralkohol dari Kementerian			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.699

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan		yang bertanggung jawab pada urusan pemerintah bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol dalam hal melakukan perubahan izin usaha, meliputi: a. Perubahan nama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpa-		perusahaan, kepemilikan atau penanggung jawab Perusahaan Industri Minuman Beralkohol b. Perubahan alamat pabrik c. Perubahan golongan Minuman Beralkohol d. Pindah lokasi e. Penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi /atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi		f. Penambahan kapasitas produksi (perluasan usaha) 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pangan olahan yang diproduksi 5. Memiliki perizinan berusaha Minuman Beralkohol yang masih berlaku 6. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengembangan SDM,		5. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung-jawab bagian *quality control* 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control* 8. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja.					
89	11032	Industri Malt	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan	Pengem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilaian TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pene-rapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Pene-rapan Program Mana-	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	jemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) Bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpa-		sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
90	11040	Industri Minuman Ringan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Izin Edar Suplemen	Kabupaten/ Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Kesehatan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Peme-		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.716

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta peng-angkutan, sesuai peraturan	nuhan Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifika-si Peme-nuhan Komit-men Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) - Izin Peme-nuhan Komit-men Produksi	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

SK No 153256 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) Bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plan layout facilities*			- Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			- Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehat-an - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehat-an - Perse-tujuan Iklan Suplemen Kesehat-an		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.721

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
91	11051	Industri Air Kemasan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penun-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	jang Kegiatan Utama - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang			Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penera-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			pan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana		
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk	Pro-duksi Pangan Olahan - Perse-tujuan Pelaksa-naan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
92	11052	Industri Air	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Minum Isi Ulang				NIB dan Sertifikat Standar	rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri		3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		prinsip cara produksi pangan olahan yang baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan:		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		produksi pangan olahan yang baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
93	11090	Industri Minuman Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengim-	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									plementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengim-plementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi	Pengem-bangan - Izin Edar Suple-men Kesehatan - Sertifikat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pangan olahan yang baik	Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib data industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk meng-		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan	- Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) - Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan - Izin Penerapan Cara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-		ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip cara produksi pangan olahan yang baik	Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur			Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.745

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi			- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Iklan Suplemen		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.746

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehatan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production):		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
94	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan industri hasil tembakau , berupa: a. Peralat-an pe-linting sigaret tangan		produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 5. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Mesin/ peralat-an pen-dukung pro-duksi, serta 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting sigaret tangan b. Mesin/ peralatan pen-		dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dukung Produksi, serta 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab bagian pengembangan SDM, penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities,yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 3) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan industri hasil tembakau , berupa: a. Peralat-an pe-linting		Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sigaret tangan b. Mesin/ peralat-an pen-dukung Pro-duksi, serta 1) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan 7. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 8. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi,		mesin/ peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
95	12012	Industri Rokok Putih	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan	Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk Dalam Rangka Pene-litian Dan Pengem-bangan	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting sigaret tangan b. Mesin/ peralatan pen-		dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 5. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan	- Sertifikasi Mesin Pelinting untuk Industri Hasil Tembakau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dukung Produksi, serta 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		perundang-undangan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab bagian pengembangan SDM, penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities,yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting		Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sigaret tangan b. Mesin/ peralat-an pen-dukung Pro-duksi, serta 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting sigaret tangan b. Mesin/peralatan pendukung Pro-		ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							duksi, serta 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-		pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan 7. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 8. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control 6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
96	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena	- Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Sertifi-kasi Mesin Pelin-ting untuk Industri Hasil Temba-kau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan industri hasil tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting sigaret tangan b. Mesin/peralatan pendukung Produksi, serta 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		Cukai (NPPBKC) 4. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				- Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil		3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting sigaret tangan b. Mesin/peralatan pendukung Produksi, serta 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities,yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control 7. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting		Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sigaret tangan b. Mesin/ peralat-an pen-dukung Pro-duksi, serta 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan 7. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 8. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi,		mesin/ peralatan quality control secara periodik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.793

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
97	12019	Industri Rokok Lainnya	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan	Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau, berupa: a. Peralatan pelinting sigaret tangan b. Mesin/ peralatan pen-		dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 6. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 7. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dukung Produksi, serta 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				- Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembaka 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.801

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari		pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.802

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities,yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.804

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan industri hasil tembakau 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab bagian		peraturan perundang-undangan 7. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 8. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities,yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control 6. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
98	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	Seluruh	- Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan	TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 5. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				- Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau 2) Kesesuaian kapasitas produksi		Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.815

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan, penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian, dalam hal produk yang dihasilkan dikenakan ketentuan SNI Wajib			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan industri hasil tembakau 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		dan/atau Spesifikasi Teknis Wajib 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) 6. Melakukan pengujian dan memiliki Sertifikat hasil pengujian, untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari pimpinan perusahaan,		kandungan Tar dan/atau Nikotin tiap-tiap varian produk sesuai peraturan perundang-undangan 7. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 8. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung-jawab bagian produksi, penanggung-jawab bagian pengem-bangan SDM, penanggung-jawab bagian quality control dan 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities,yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control 6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
99	13111	Industri Persiapan Serat Tekstil	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.822

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan	Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.826

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.831

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
100	13112	Industri Pemintal-an Benang	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Rekomendasi Penggu-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk	na Harga Gas Bumi Tertentu		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan a. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.837

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi.			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.843

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur:		Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.844

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
101	13113	Industri Pemintal-an Benang Jahit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.846

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan	Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.855

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersediaya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
102	13121	Industri Pertenunan (bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.858

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.864

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 153099 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.865

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
103	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.870

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.871

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
104	13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan	Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.885

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
105	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.892

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 153071 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan	- Reko-mendasi Peng-guna Harga Gas Bumi Tertentu		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
106	13132	Industri Penyem-purnaan Kain	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan	- Reko-mendasi Peng-guna Harga Gas Bumi Tertentu		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
107	13133	Industri Pencetakan Kain	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.920

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.921

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.926

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
108	13134	Industri Batik	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.944

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
109	13911	Industri Kain Rajutan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.946

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.947

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.951

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
110	13912	Industri Kain Sulaman	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.958

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113428 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.964

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113422 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
111	13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
112	13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.980

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Izin Edar Perbekal	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	an Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbeka-lan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.982

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi	Perbeka-lan Kesehatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT)		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

SK No 113404 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.987

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan a. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.989

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.990

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
113	13922	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.998

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113388 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1000

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1001

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1002

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
114	13923	Industri Bantal dan Sejenis-nya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1004

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1007

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1008

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1011

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1013

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1014

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
115	13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1017

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1019

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1022

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 130486 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1023

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1025

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
116	13925	Industri Karung Goni	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1030

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1035

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1037

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
117	13926	Industri Karung Bukan Goni	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1040

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1046

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 130462 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1050

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
118	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1053

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1059

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1061

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1062

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
119	13930	Industri Karpet dan Permadani	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1065

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1071

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
120	13941	Industri Tali	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1082

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 130426 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
121	13942	Industri Barang dari Tali	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1091

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
122	13991	Industri Kain Pita (Narrow Fabric)	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1100

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk		perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk		perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
123	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk		perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau	- Rekomendasi Harga Gas Bumi Tertentu		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Layanan garansi		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha		malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran		secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1125

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasa-an (kepe milikan/ sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan),					

SK No 130383 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1128

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka		a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
124	13993	Industri Non Woven (Bukan Tenunan)	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium	TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Izin Edar Alat	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbeka-lan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM			Kesehatan Rumah Tangga Impor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor – Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendu-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penang-gungjawab bagian pemasaran			kung Ekspor Impor – Sertifi-kat Pemberi-tahuan Ekspor - Surat Perse-tujuan Pelaksa-naan Uji Klinik		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1142

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1149

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
125	13994	Industri Kain Ban	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119765 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat		perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi,		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1153

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1158

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter •	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
126	13995	Industri Kapuk	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1165

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
127	13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat		perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
128	13999	Industri Tekstil Lainnya YTDL	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Izin Penetapan Industri Pertahanan	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
129	14111	Industri Pakaian	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jadi (Konveksi) dari Tekstil							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-an Fasilitas Pro-duksi Per-tahanan (Certifi-cate of Approval for Defence Produc-tion		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Facility Worthin-ess): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1201

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi	dan Keamanan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1206

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1207

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
130	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikat Perse-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	tujuan Kelaik-an Fasilitas Pro-duksi Per-tahanan (Certifi-cate of Approval for Defence Produc-tion Facility Worthin-ess): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Moda Udara - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1216

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1217

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
131	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1223

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1227

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113481 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1231

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
132	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113477 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval for Defence Production Facility Worthiness): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1234

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113474 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1236

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-		Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1241

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
133	14132	Industri Perleng-kapan Pakaian dari Kulit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1243

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	Kontrol Veteri-ner - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-an Fasilitas Pro-duksi Per-tahanan (Certifi-cate of Approval for Defence Produc-tion Facility Worthin-ess):		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1246

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1249

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113459 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1250

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1251

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1252

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1253

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
134	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1260

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113448 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan:		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1263

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran		6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
135	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1266

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 153018 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1272

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat		perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
136	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman /Bordir	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1278

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
137	14303	Industri Rajutan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1289

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaos Kaki dan Sejenis-nya							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 153246 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
138	15111	Industri Peng-awetan Kulit	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1201

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi	dan Keamanan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1206

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1207

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
130	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikat Perse-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	tujuan Kelaik-an Fasilitas Pro-duksi Per-tahanan (Certifi-cate of Approval for Defence Produc-tion Facility Worthin-ess): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1212

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Moda Udara - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1216

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1217

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
131	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1223

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1227

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113481 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1231

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
132	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113477 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval for Defence Production Facility Worthiness): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1234

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113474 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1236

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-		Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1241

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
133	14132	Industri Perleng-kapan Pakaian dari Kulit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1243

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	Kontrol Veteri-ner - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-an Fasilitas Pro-duksi Per-tahanan (Certifi-cate of Approval for Defence Produc-tion Facility Worthin-ess):		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1246

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1249

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113459 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1250

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1251

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1252

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1253

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
134	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1260

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 113448 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan:		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1263

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran		6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
135	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1266

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 153018 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1272

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat		perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penang-gungjawab bagian produksi		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
136	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman /Bordir	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1278

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
137	14303	Industri Rajutan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1289

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaos Kaki dan Sejenis-nya							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 153246 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
138	15111	Industri Peng-awetan Kulit	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	Kontrol Veteri-ner - Serti-fikat Laik Operasi Pengu-sahaan Panas Bumi untuk Peman-faatan Lang-sung		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab		penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1307

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepe-		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1312

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
139	15112	Industri Penyamakan Kulit	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1314

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119963 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan	- Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veteri-ner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1320

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1325

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
140	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1333

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1334

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							barang hasil produksi.					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. penang-gungjawab bagian produksi c. penang-gungjawab quality control d. penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
141	15114	Industri Kulit Komposisi	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1341

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1348

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
142	15121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1353

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1356

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan:		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1360

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. penanggungjawab bagian produksi c. penanggungjawab quality control d. penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran		6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi.					
143	15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposi-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1364

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		si untuk Keperlu-an Teknik/ Industri							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan	Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Reko-mendasi Fasilitas Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	litian dan Pengembanga - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1371

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka		a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, penang-gungjawab bagian produksi,		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1373

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1374

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu e. Alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot					
144	15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposi-si untuk Keperlu-an Hewan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1378

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembanga	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119896 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penangan-an trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan		penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1387

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an,		6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1389

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1391

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
145	15129	Industri Barang dari Kulit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1394

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	rangka Penelitian dan Pengembanga - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1398

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1399

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119875 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1400

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu,		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang gungjawab		pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1402

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1404

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa)					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1406

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1407

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1408

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
146	15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Rekomendasi Fasilitas Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119866 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1409

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembanga - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1411

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1417

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang gungjawab bagian produksi c. Penang-gungjawab quality control d. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM e. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpan-an bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1418

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
147	15202	Industri Sepatu Olahraga	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1420

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan	Pengembanga - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1427

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang gungjawab bagian produksi		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab quality control d. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
148	15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan /Keperluan Industri	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Serti-fikasi Nomor	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	Kontrol Vete-riner - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-an Fasilitas Pro-duksi Per-tahanan (Certifi-cate of Approval for Defence Produc-tion Facility Worthin-ess):		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				- Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1439

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang gungjawab bagian produksi		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1441

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab quality control d. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM e. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1442

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
149	15209	Industri Alas Kaki Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikasi Nomor	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	Kontrol Vete-riner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dilaksanakan-nya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1450

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1451

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hilir serta peralatan		3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan dan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
150	16101	Industri Penggergajian Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa:		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1458

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b. Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c. Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelanggan; dan 5. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Perse-tujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terdoku-mentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyim-panan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1466

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
151	16102	Industri Peng-awetan Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119808 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1467

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan.	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Peman-		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119807 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal	faatan Langsung		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Perse-tujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
152	16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1478

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas	dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Perse-tujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1480

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
153	16104	Industri Pengolahan Rotan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1490

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pene-bangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumen-tasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1492

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanga-nan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.1498

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
154	16105	Industri Partikel Kayu Dan Sejenis-nya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 119776 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan	Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Perse-tujuan Impor dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Perse-tujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis perizinan berusaha penge-lolaan kehutanan dan pene-bangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumen-tasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001)			
155	16211	Industri Kayu Lapis	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan	Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pene-bangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumen-tasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 6. Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Perse-tujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001) 7. Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan			
156	16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decora-tive Plywood	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktik an komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001)			
157	16213	Industri Panel	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kayu Lainnya							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Ber-bahaya	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan troublesho oting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pene-bangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumen-tasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001)			
158	16214	Industri Veneer	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang kehutanan			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Perse-tujuan Impor dalam hal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Managemen Mutu (ISO 9001) 7. Memperoleh sertifikat legalitas kayu melalui mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan			
159	16215	Industri Kayu Laminasi	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Ber-bahaya	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggu-naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kehutanan dan pene-bangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumen-tasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan pada pelanggan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001)			
160	16221	Industri Barang Bangun-an dari Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa:		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); (b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau (c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustria: 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
161	16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan.	Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Ber-bahaya		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
162	16230	Industri Wadah dari Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustria; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas	Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan;			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
163	16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan;			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Mutu (ISO 9001).			
164	16292	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
165	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bukan Mebeller							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan	Pene-litian dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan.			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshootin g); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
166	16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan;			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Mutu (ISO 9001).			
167	16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
168	16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan,	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Gabus Lainnya YTDL							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan.	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									distribusi dan layanan pada pelanggan; dan 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan.			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pada masing-masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; 5. Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan; 6. Memiliki Sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001).			
169	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian;	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan:		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan	Berbahaya		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha		secara periodik.			
				- Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		penataan rambu keselamatan kerja.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pembakaran), sarana instalasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan		panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi,		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu e. Alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot					
170	17012	Industri Kertas Budaya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja.			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshootin g); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen		produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengawet kayu. yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
171	17013	Industri Kertas Berharga	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan:		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi	Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5).	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		pelayanan minimal kepada pelanggan; 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-		penataan rambu keselamatan kerja.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pembakaran), sarana instalasi DAMKAR baik hydran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan		sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian		produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control,		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian kualitas produk,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
172	17014	Industri Kertas Khusus	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshootin g); atau b. Layanan garansi malfungsi	duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha		barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. foto mesin/ peralatan c. perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu,		peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab		pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM dan/ atau b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		keselamatan kerja.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penam-pung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu. yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan aneka 2) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan		sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. foto mesin/ peralatan c. perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian		produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshootin g); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control,		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM dan/ atau b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penam-pung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu.					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian kualitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
173	17019	Industri Kertas Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil	duksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja.			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. foto mesin/ peralatan c. perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM dan/ atau b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penam-pung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu. yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerajinan dan aneka 2) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
174	17021	Industri Kertas dan Papan Kertas	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Berge-lombang							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan	Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	litian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja.			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. foto mesin/ peralatan		perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk		perawatan, penanganan troubleshootin g); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM dan/ atau b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penam-pung Sementara (TPS) B3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu. yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian kualitas produk,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
175	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil	duksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja.			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. foto mesin/ peralatan c. perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM dan/ atau b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penam-pung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu. yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerajinan dan aneka 2) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
176	17091	Industri Kertas Tissue	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki dokumen hasil	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik; 4. Dalam hal industri memproduksi napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, serta produk	litian dan Pengem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Ber-bahaya - Izin Edar Alat Kesehatan dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tissue yang penggunaannya diaplikasikan pada kulit manusia memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memiliki Sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT/Alat Kesehatan dan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan	Perbekalan - Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik (CPB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perusahaan rumah tangga.	untuk PKRT - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi	- Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor – Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor – Sertifikat Pemberi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Dalam hal industri memproduksi napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, serta produk tissue yang penggunaannya diaplikasikan pada kulit manusia memiliki	-tahuan Ekspor - Surat Perse-tujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memiliki Sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT/Alat Kesehatan dan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan;		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta		3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik; 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja;			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab		5. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001); 6. Dalam hal industri memproduksi napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, serta produk tissue yang penggunaanny a diaplikasikan pada kulit manusia memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memiliki Sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT/Alat Kesehatan dan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi 7. Dalam hal industri memproduksi napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, serta produk tissue yang penggunaan-nya diaplikasikan pada kulit manusia, memiliki: a. Dokumen perjanjian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan/ PKRT b. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan/ PKRT					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.F.1785

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
177	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 138261 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik; 4. Dalam hal industri memproduksi kertas EKG, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Izin Edar Alat Kesehatan dalam Negeri - Izin Edar Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penanggung Jawab Teknis yang memiliki Sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	Kesehatan Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor – Sertifikat		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium	Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor – Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Dalam hal industri memproduksi kertas EKG, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memiliki Sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		secara periodik; 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja; 5. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001); 6. Dalam hal industri memproduksi kertas EKG, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		Penanggung Jawab Teknis yang memiliki Sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi 7. Dalam hal industri menghasilkan kertas EKG, memiliki: a. Dokumen perjanjian kerja yang membukti-kan kepemilikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan b. Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
178	18111	Industri Pencetak-an Umum	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan	Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja.			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk		perawatan, penanganan troubleshootin g); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan aneka 2) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
179	18112	Industri Pencetak-an Khusus	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian		(meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji	Pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha		laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik.			
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/		bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM		yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control, d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu. yang membuktikan:					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.F.1821

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(1) Penguasaan (kepemilikan / sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka (2) Penguasaan (kepemilikan / sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau cylo (dengan pembakaran), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyemprot (3) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu,		perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshootin g); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							furniture dan aneka serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penang-gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan sewa) mesin					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasaan (kepemilikan/sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(dengan pemba-karan), sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
180	18113	Industri Pencetakan 3D Printing	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifi- - nkat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembanga		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki: a. Dokumen		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan;		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri kayu, furniture dan aneka		3. Memiliki: a. Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshootin g); atau b. Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penang-gungjawab bagian produksi, penang-		kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gungjawab quality control, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001).			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control c. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) d. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil proses pengawet kayu yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan sewa) mesin untuk menghasilkan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri kayu, furniture, kerajinan dan aneka 2) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) peralatan pengujian kualitas produk, alat penyedot debu (dust collector) dan/atau cylo (dengan pemba-karan),					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana instalasi DAMKAR baik hydran dan/atau dalam bentuk kolam air lengkap dengan mesin penyem-prot 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 7. Memiliki SDM yang kompeten untuk melakukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							aktivitas pencetakan 3D Printing yang ditunjukkan dengan pendidikan dan/atau pengalaman yang relevan 8. Memiliki tempat khusus untuk melakukan aktivitas pencetakan 3D Printing dengan memperhati-kan sirkulasi udara yang baik 9. Memiliki hardware (PC/Laptop) dan software					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(aplikasi desain yang sesuai dengan peruntukannya					
181	18120	Kegiatan Jasa Penun-jang Pencetak-an	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa; 4. Memilki Sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa; 5. Memiliki Sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur.		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan;		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a. Industri skala kecil: 1 orang level teknis/operasional/staf b. Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/supervisor, dan 1 orang level teknis/operasional/staf c. Industri skala besar: 2 orang level manajer, 2		3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa; 4. Memilki Sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa; 5. Memiliki Sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b. Foto mesin/ peralatan, sebagai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana penunjang					
182	18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan	- Legalisasi Pendaftaran/ Registrasi Mesin dan Peralatan Produksi Cakram Optik	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a. Industri skala kecil: 1 orang level teknis/operasional/staf b. Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/supervisor, dan 1 orang level teknis/operasional/staf		perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa; 4. Memilki Sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa; 5. Memiliki Sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Industri skala besar: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan, sebagai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana penunjang b. Foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a. Industri skala kecil: 1 orang level teknis/operasional/staf b. Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/supervisor,		alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa; 4. Memilki Sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa; 5. Memiliki Sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf c. Industri skala besar: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/		untuk mengukur.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b. Foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
183	18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Legalisasi Pendaftaran/ Registrasi Mesin dan Peralatan Produksi	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian; dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa; 4. Memilki Sertifikat pelatihan kompetensi	Cakram Optik	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa; 5. Memiliki Sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur.			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a. Industri skala kecil: 1 orang level teknis/operasional/staf b. Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa; 4. Memilki Sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa; 5. Memiliki Sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf c. Industri skala besar: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa		kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b. Foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
184	19100	Industri Produk dari Batu Bara	Industri Kokas / semi kokas; Industri Coaltar.	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk pengolahan batubara 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	- Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penang-gulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penang-gulangan keadaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (self assesment) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkut-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk pengolah-an batubara 2) Kesesuai-an kapasitas produksi		penanggulang an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penang-gulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulan		sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakann ya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (self assesment) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil		Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
			Selain: Industri Kokas / semi kokas; Industri Coaltar.	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja; 4. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Penguasa-an (kepe-milikan/ sewa)		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulang an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. (Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk pengolahan batubara 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas:		minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (self assesment)		minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
185	19212	Industri Pembuat-an Minyak Pelumas	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Surat Perse-tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian		perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja.	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Per-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		keselamatan kerja.	tahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya			Pertaha nan dan Kea-manan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				- Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		penataan rambu keselamatan kerja.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penang-gungjawab bagian pemasaran d. Penang-gungjawab bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau		(SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakann ya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Penang-gungjawab bagian pemasaran d. Penang-gungjawab bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi		5. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralat an quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
186	19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Perse-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk	tujuan Peni-laian TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-		penataan rambu keselamatan kerja.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				- Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penang gungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pemasaran d. Penang-gungjawab bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian		peraturan perundang-undangan; 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penang-gungjawab bagian pemasaran d. Penang-gungjawab bagian keuangan		yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		mesin/peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
187	19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustria; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegia-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha industri kimia	tan Utama		
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri		penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulang an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA –			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penang-gungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penang-gungjawab bagian pemasaran		Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penang-gungjawab bagian keuangan e. Penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralat an quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
188	19292	Industri Briket Batu Bara	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja; 4. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulang	duksi Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pem-bebasan Bea Masuk dalam rangka Pene-litian dan Pengem-bangan	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki Sertifikat			

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan quality control secara periodik 7. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
189	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Seluruhnya Keterangan: Ruang lingkup usaha Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali yang menggunakan proses merkuri dilarang untuk diusahakan pelaku usaha dalam rangka investasi baru, perluasan usaha, dan	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustria 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengembangan.				2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian		perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Menjamin proses	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan		kegiatan usaha produksi chlor alkali tidak menggunakan merkuri	dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pendaftaran pestisida		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (self assesment) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang d. Sistem komunikasi tanggap darurat 2) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 3) Peralatan dan perleng-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapan tanggap darurat 4) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality contro d. Pengemasan, penyimpanan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Melampirkan Surat Pernyataan tidak menggunakan merkuri dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses produksi Chlor Alkali dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai larangan penggunaan proses merkuri sesuai dengan Minamata Convention on Mercury					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan , sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian		perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulang an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia; 4. (Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – Certificate of Analysis)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penang-gulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penang-gulangan keadaan		b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (self assesment) Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling		penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001); 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan quality control secara periodik; 8. Menjamin proses kegiatan usaha produksi chlor alkali tidak menggunakan merkuri.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkut-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Melampirkan Surat Pernyataan tidak menggunakan merkuri dalam proses produksi Chlor Alkali dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai larangan penggunaan proses merkuri sesuai dengan Minamata Convention on Mercury					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
190	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Industri Amoniak; Industri Green Hidrogen; Industri Blue Ammonia; Industri Green Ammonia.	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian		perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia; 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Bea Masuk dalam rangka Penelitian dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan			Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Pendaftaran pestisida		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (self assesment) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling			- Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 5) Perencana an latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/-sewa) mesin untuk menghasilkan produk kimia, berupa: a. Fasilitas pemisahan udara (ASP. Air					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Separation Plant) b. Fasilitas pengisian ulang (Filling Station) c. Tanki penyimpanan liquid/cairan (Storage Tank) 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta		pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulang an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. (Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penang-gulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan		Produk (COA – Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakann ya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (self assesment) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah		evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							personil paling sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat b. Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) c. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk kimia, berupa: a. Fasilitas pemisahan udara (ASP. Air Separation Plant) b. Fasilitas pengisian ulang (Filling Station)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Tanki penyimpanan liquid/cairan (Storage Tank) 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
			Selain: Industri Amoniak; Industri Green Hidrogen; Industri Blue	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Ammonia; Industri Green Ammonia.						sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; 3. Memiliki Sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penang-gulangan keadaan		darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun		Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							secara mandiri (self assesment) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: a. Koordinator 1 orang		Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan quality control secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan produksi 7. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia, berupa: a. Fasilitas pemisahan udara (ASP. Air Separation Plant) b. Fasilitas pengisian ulang (Filling Station) c. Tanki penyimpanan liquid/cairan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(Storage Tank) 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
191	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomenda-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi	si Pengguna Gas Bumi Tertentu - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam	bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System/*	Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik 7. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
192	20114	Industri Kimia Dasar Anorga-nik Lainnya	Seluruhnya Kete-rangan: Ruang lingkup usaha industri merkuri	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dilarang untuk diusaha-kan pelaku usaha dalam rangka investasi baru, perluasan usaha, dan pengem-bangan				bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan	- Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Sertifi-kat Tanda Sah		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan		kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Menjamin kegiatan usaha yang dijalankan tidak menghasilkan produk merkuri	Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia			Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pestisida - Izin Pemasaran Alat Peralatan Perta-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling			hanan dan Kea-manan - Izin Pendi-rian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Pro-duksi Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Usaha Peneli-tian dan Pe-ngem-bangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang i. Komandan 1 orang ii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan			Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Izin Usaha Perdagangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penam-pung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) 6. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Melampirkan Surat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pernyataan tidak memproduksi merkuri sesuai dengan *Minamata Convention on Mercury*					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses		penataan rambu keselamatan kerja 5. Menjamin kegiatan usaha yang dijalankan tidak menghasilkan produk merkuri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang ii. Ko-man-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 1 orang iii. Petugas 1 orang 1) Sistem komunikasi tanggap darurat 2) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 3) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 4) Perencanaan latihan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerima-an, penyimpan an bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Melampirkan Surat Pernyataan tidak memproduksi merkuri sesuai dengan *Minamata Convention on Mercury*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri		perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka		Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik 8. Menjamin kegiatan usaha yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi		dijalankan tidak menghasilkan produk merkuri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Melampirkan Surat Pernyataan tidak memproduksi merkuri sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Minamata Convention on Mercury					
193	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	Industri Etanol (etil alkohol), Industri Asetat Anhidrida, Industri Asam Fenil Asetat dan garamnya, Industri Asam Lisergat dan garamnya, Industri Asam 2-asetonido-benzoat (asam N-asetil-antranilat) dan	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomenda-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			garamnya, Industri Isosafrol, Industri Piperonal, Industri Safrol, Industri Asam Antranilat dan garamnya, Industri Dietil Eter, Industri Efedrin dan garamnya, Industri Ergometrin (INN) dan garamnya, Industri Ergotamin (INN) dan garamnya, Industri				lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	si Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Fenilpropa-nolamin HCI (PPA), Industri Norefedrin lainnya, Industri Pseudo-efedrin (INN) dan garamnya, Industri Piperidina dan garamnya, Industri Lisin, Industri Fatty Acid, Industri Gliserin, Industri Nitro Selulosa, Industri Karboksi-				menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar			- Pendaf-taran Pestisi-da - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusa-haan - Sertifi-kat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifi-kat Peme-nuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			metilselu-losa, Industri Akrilat, Industri Vinil Asetat.				bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-			men Variasi Promo-si Pangan Olahan - Sertifi-kat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Pro-duksi Pangan Olahan yang Baik (CPPO B) - Izin Pene-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang			rapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Sistem komunikasi tanggap darurat 2) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 3) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 4) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, peneri-			Sarana Produksi Pangan Olahan - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Izin Pemasaran Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan			Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Produksi Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Usaha Penelitian		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)			dan Pengembangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko		termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 1) Sistem komunikasi tanggap darurat 2) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 3) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 4) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya:: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen		kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan		sasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
			Selain Industri Etanol (etil alkohol), Industri Asetat Anhidrida, Industri Asam Fenil Asetat dan garamnya, Industri Asam	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Lisergat dan garamnya, Industri Asam 2-asetonido-benzoat, (asam N-asetil-antranilat) dan garamnya, Industri Isosafrol, Industri Piperonal, Industri Safrol, Industri Asam Antranilat dan garamnya, Industri Dietil Eter, Industri						2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Efedrin dan garamnya, Industri Ergometrin (INN) dan garamnya, Industri Ergotamin (INN) dan garamnya, Industri Fenilpropa-nolamin HCI (PPA), Industri Norefedrin lainnya, Industri Pseudo-efedrin (INN) dan garamnya, Industri Piperidina dan garamnya,						pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri Lisin, Industri Fatty Acid, Industri Gliserin, Industri Nitro Selulosa, Industri Karboksi-metilselu-losa, Industri Akrilat.				kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko		a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri		membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang		hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya a. Tempat Penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil sisa kegiatan produksi					
194	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	Industri zat warna reaktif, Industri zat warna disperse, Industri zat warna asam, Industri zat warna basa, Industri zat warna naftol, Industri zat warna mordan, Industri zat warna bejana, Industri zat warna	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bejana larut, Industri zat warna belerang, Industri zat warna oksidasi, Industri zat warna antara, Industri zat warna pigmen, Industri Metanil Yellow, Industri Rhodamin B				lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar			Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pendaf-taran Pestisi-da - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-			Akun Perusa-haan - Sertifi-kat Peme-nuhan Komit-men Pangan Olahan - Sertifi-kat Peme-nuhan Komit-men Variasi Promo-si Pangan Olahan - Sertifi-kat Perse-tujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang			Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, peneri-			Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan, penyim-panan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*			Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas:		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tor 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk		ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. (Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS –			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan		*Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 1) Sistem komunikasi tanggap darurat 2) Pedoman teknis operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 3) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 4) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku, b. Proses produksi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
			Selain Industri zat warna reaktif, Industri zat warna disperse, Industri zat warna asam, Industri zat	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			warna basa, Industri zat warna naftol, Industri zat warna mordan, Industri zat warna bejana, Industri zat warna bejana larut, Industri zat warna belerang, Industri zat warna oksidasi, Industri zat warna antara, Industri zat warna						bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja		lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pigmen, Industri Metanil Yellow, Industri Rhodamin B						4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas:		minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System/*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun		GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-		7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tor 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
195	20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Industri Fenil-aseton, Industri -1-(1,3 Benzo-dioksol-5-tl) propan-2-one, Industri Aseton, Industri Butanon, Industri Etilena, Industri Propilena, Industri Butadiena, Industri	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Benzena, Industri Toluena, Industri Silena, Industri Etil Benzena, Industri Monomer Stirena, Industri Etilena Diklorida, Industri Vinil Klorida, Industri Metanol, Industri Butanol, Industri Oktanol, Industri Etilena Glikol,				industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Sertifi-kat Tanda Sah Doku-men Pence-gahan dan Pe-nang-gulang-an Keada-an Daru-rat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri Capro-lactam, Industri Dimetil Eter, Industri Etilena Oksida, Industri Asam Akrilik, Industri Ftalat Anhidrida, Industri Maleat Anhidrida, Industri Benzoil Peroksida, Industri Asam Tereftalat, Industri Asam				an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap			Bahan Kimia dalam Kegiat-an Usaha Indus-tri Kimia - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Formiat, Industri Raffinate, Industri Pyrolysis Gasoline (Pygas), Industri Butene-1, Industri Crude C4, Industri MTBE				alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri			Dalam Negeri - Pendaf-taran Pestisi-da - Sertifi-kat Cara Pem-buatan Obat yang Baik (CPOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen		kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam		Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
			Selain: Industri Fenil-aseton, Industri -1-(1,3 Benzo-	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dioksol-5-tl) propan-2-one, Industri Aseton, Industri Butanon, Industri Etilena, Industri Propilena, Industri Butadiena, Industri Benzena, Industri Toluena, Industri Silena, Industri Etil Benzena, Industri Monomer Stirena, Industri						(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Etilena Diklorida, Industri Vinil Klorida, Industri Metanol, Industri Butanol, Industri Oktanol, Industri Etilena Glikol, Industri Capro-lactam, Industri Dimetil Eter, Industri Etilena Oksida, Industri Asam Akrilik,						termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri Ftalat Anhidrida, Industri Maleat Anhidrida, Industri Benzoil Peroksida, Industri Asam Tereftalat, Industri Asam Formiat, Industri Raffinate, Industri Pyrolysis Gasoline (Pygas), Industri Butene-1, Industri Crude C4,				dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri MTBE				b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen		usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan		(*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil		Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
196	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penang-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	gulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian		
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi:	TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pendaf-taran Pestisi-da - Sertifi-kasi Nomor Kontrol Veteri-ner - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko		a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang	Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri		membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen	Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Pro-duksi Pangan Olahan yang Baik (CPPO B) - Izin Pene-rapan Pro-gram Manaje-men Risiko (PMR) Berta-hap Sarana		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang		hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Sertifikat Cara Pembuatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan			Obat yang Baik (CPOB) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) prasarana mitigasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							risiko sesuai dokumen penilaian risiko					
197	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa)		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu	- Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Sertifi-kat Tanda Sah Doku-men Pence-gahan dan Pe-nang-gulang-an Keada-an Daru-rat Bahan Kimia		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan		keselamatan kerja 5. Menjamin kegiatan usaha tidak menghasilkan produk dan/atau terlibat dalam kerjasama untuk menghasilkan produk senjata kimia dan/atau bahan perusak ozon baik senyawa tunggal maupun senyawa campuran	dalam Kegiat-an Usaha Indus-tri Kimia - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-			- Pendaf-taran Pestisi-da - Izin Pene-rapan Cara Pro-duksi Pangan Olahan yang Baik (CPPO B) - Izin Pene-rapan Pro-gram Manaje-men Risiko (PMR) Berta-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang ii. Ko-man-dan 1 orang			hap Sarana Pro-duksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Pro-gram Manaje-men Risiko (PMR) Sarana Pro-duksi Pangan Olahan - Sertifi-kat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat			Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Melampirkan Surat Pernyataan tidak memproduksi senjata kimia dan industri yang menghasilkan Bahan Perusak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ozon/BPO sesuai dengan *Minamata Convention on Mercury*					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa)		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan		keselamatan kerja 5. Menjamin kegiatan usaha tidak menghasilkan produk dan/atau terlibat dalam kerjasama untuk menghasilkan produk senjata kimia dan/atau bahan perusak ozon baik senyawa tunggal maupun senyawa campuran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Melampirkan Surat Pernyataan tidak memproduksi senjata kimia dan industri yang menghasilkan Bahan Perusak					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2160

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ozon/BPO sesuai dengan *Minamata Convention on Mercury*					

				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustria 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk		dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem			

							3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam		Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelangga 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

							kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-		Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

							tor 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat					

							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan					

							Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan					

							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko 8. Melampirkan Surat Pernyataan tidak memproduksi senjata kimia dan industri yang menghasilkan Bahan Perusak Ozon/BPO sesuai dengan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2170

							Minamata Convention on Mercury					

SK No 138684 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2171

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
198	20121	Industri Pupuk Alam/ Non Sintetis Hara Makro Primer	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Sertifi-kat Tanda Sah	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 138685 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 5. Menjamin kegiatan usaha tidak	Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menghasilkan produk dan/atau terlibat dalam kerjasama untuk menghasilkan produk senjata kimia dan/atau bahan perusak ozon baik senyawa tunggal maupun senyawa campuran	Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pupuk An-Organik - Pendaftaran Pupuk		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-	Orga-nik, Pupuk Hayati, Pem-benah Tanah - Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Kegiat-an Utama	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk		ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan		dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat		keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2183

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
199	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	Industri Pupuk Urea	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna Gas	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

SK No 138697 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Bumi Tertentu - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Indus-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam			tri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pupuk An-Organik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat			- Pendaf-taran Pupuk Orga-nik, Pupuk Hayati, Pem-benah Tanah - Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Kegiat-an Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses		rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Koman-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-		usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan		(*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit		Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
			Selain: Industri Pupuk Urea	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa)		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan		*of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-		pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penam-pung Sementara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan produksi					
200	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Tanda	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan		
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan	Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pendaf-taran Pupuk An-Organik - Pendaf-taran Pupuk Orga-nik, Pupuk	berada pada Provinsi bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data	Hayati, Pembenah Tanah - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam		Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi	Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
201	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Makro Primer							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penang-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	gulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pupuk An-Organik - Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah - Penyimpanan Mineral	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal	Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Kegiat-an Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
202	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi:	- Pendaf-taran Pupuk An-Organik - Pendaf-taran Pupuk Orga-nik, Pupuk Hayati, Pem-benah Tanah - Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Kegiat-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko		a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-	an Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri		kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang		mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil sisa kegiatan produksi					
203	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Sertifi-kat	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaf-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pendaf-taran Pupuk An-Organik - Pendaf-taran Pupuk Orga-	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global	nik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik 7. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
204	20127	Industri Pupuk Peleng-kap	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Pe-	bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	nanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilai-		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pupuk An-Organik - Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									control secara periodik 7. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
205	20128	Industri Media Tanam	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	Dalam Negeri		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko		darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil sisa kegiatan produksi					
206	20129	Industri Pupuk Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaf-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pendaf-taran Pupuk An-Organik - Pendaf-taran Pupuk Orga-	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. (Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*	nik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam		*of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat		pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
207	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan	Industri selulosa asetat, Industri selulosa nitrat, Industri	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Baku Plastik	Polietilena, Industri Polipropilena, Industri Polistirena, Industri Poli (vinil klorida), Industri Polimer dari Vinil Asetat, Industri Superabsorbent Polymers, Industri Resin Alkid, Industri Resin Akrilik, Industri Poli (etilena tereftalat),				asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Sertifikat Tanda Sah		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri Unsaturated Polyester Resin (UPR), Industri Poliamida, Industri Resin Amino, Industri Poliasetal, Industri Resin Epoksida, Industri Resin Fenolik, Industri Poliuretan, Industri Resin Silikon				daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk		darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan			Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, peneri-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas:		a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun		kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-		mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tor 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
			Selain: Industri selulosa asetat, Industri selulosa nitrat, Industri Polietilena, Industri Polipropilena, Industri Polistirena, Industri Poli (vinil klorida),	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri Polimer dari Vinil Asetat, Industri Superab-sorbent Polymers, Industri Resin Alkid, Industri Resin Akrilik, Industri Poli (etilena tere-ftalat), Industri Unsatu-rated Polyester Resin (UPR), Industri						produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Poli-amida, Industri Resin Amino, Industri Poli-asetal, Industri Resin Epok-sida, Industri Resin Fenolik, Industri Poliure-tan, Industri Resin Silikon						kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar		b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, peneri-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
208	20132	Industri Karet Buatan	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan		dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	- Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan			- Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetrali-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses		rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang ii. Ko-man-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk		perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam		Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko					
209	20211	Industri Bahan Baku Pembe-	Industri pembuatan Buthyl Phenyl	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		rantas Hama (Bahan Aktif)	Methyl Carbamat (BPMC), Industri pembuatan Methyl Isoprophyl Carbamat (MIPC), Industri pembuatan Diazinon, Industri pembuatan Carbo-furan, Industri pembuatan Glyphosate, Industri pembuatan Copper Sulphate, Industri pembuatan				jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan	nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Sertifi-kat Tanda Sah Doku-men Pence-gahan dan Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Paraquat Dichloride, Industri pembuatan Metomil				a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan		dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	nanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilai-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan			an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pestisida		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya:					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2351

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetrali-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki foto dan perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 7. Memiliki dokumen pedoman dan tata cara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							formulasi pestisida					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. (Khusus industri skala besar) Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan		*of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan		pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, peneri-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki foto dan perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 8. Memiliki dokumen pedoman dan tata cara formulasi pestisida					
			Selain: Industri pembuatan Buthyl Phenyl Methyl Carbamat (BPMC),	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri pembuatan Methyl Isoprophyl Carbamat (MIPC), Industri pembuatan Diazinon, Industri pembuatan Carbo-furan, Industri pembuatan Glyphosate, Industri pembuatan Copper Sulphate, Industri pembuatan Paraquat Dichloride, Industri						peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pembuatan Metomil						rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-		usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan		(*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit		Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki foto dan perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pedoman dan tata cara formulasi pestisida 6. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) PKRT 7. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2372

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
210	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Industri pembuatan formulasi insektisida, Industri pembuatan formulasi fungisida, Industri pembuatan formulasi rodentisida, Industri pembuatan formulasi herbisida, Industri pembuatan formulasi molusida, Industri pemuatan formulasi nematisida, Industri	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Doku-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pembuatan formulasi akarsida				2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	men Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,			- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pestisida - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki foto dan perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 5. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-			Alat Kese-hatan Impor - Izin Edar Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga Impor - Sertifi-kat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan			Cara Pem-buatan yang Baik untuk Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 6. Memiliki dokumen pedoman dan tata cara formulasi pestisida					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki foto dan perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 7. Memiliki dokumen pedoman dan tata cara formulasi pestisida					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab		Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2392

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 8. Memiliki foto dan perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 9. Memiliki dokumen pedoman dan tata cara formulasi pestisida					
			Selain: Industri pembuatan formulasi insektisida, Industri pembuatan formulasi fungisida,	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Industri pembuatan formulasi rodenti-sida, Industri pembuatan formulasi herbisida, Industri pembuatan formulasi molusida, Industri pemuatan formulasi nematisida, Industri pembuatan formulasi akarsida						perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-		peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control*		*of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetrali-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 8. Memiliki foto dan perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 9. Memiliki dokumen pedoman dan tata cara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							formulasi pestisida					
211	20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Sertifi-kat Tanda	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Persetujuan Penilai-		
				Besar	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Pestisida	berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									zed System/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik 7. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia			
212	20214	Industri Bahan Ameliorran (Pembe-	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		nah Tanah)							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penang-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia	gulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan	Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen		usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan		(*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil		Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki foto dan perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* gudang penyimpanan non herbisida terpisah dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							herbisida, untuk bahan aktif maupun produk jadi 8. Memiliki dokumen pedoman dan tata cara formulasi pestisida					
213	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	satu hamparan lintas antar Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan	- Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan	bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia hilir serta		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data	Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran		Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi	Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses *quality control*		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
214	20222	Industri Pernis (termasuk Mastik)	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan	Dalam Negeri	berada pada Provinsi bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggung-		b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
215	20223	Industri Lak	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan	satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja	Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk		peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusaha-an b. Penang-gung-jawab Bagian produksi dan/atau		*of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan		pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
216	20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Keperlu-an Rumah Tangga							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Dalam hal industri memproduksi sediaan untuk mencuci, pembersih, antiseptik, desinfektan, dan pewangi, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kese-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(CPB) untuk PKRT dan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga	hatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-	Cara Pem-buatan yang Baik untuk Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT) - Sertifi-kat Cara Pem-buatan yang Baik untuk Alat Kese-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,	hatan dan PKRT Tertentu - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik 7. Dalam hal industri memproduksi sediaan untuk mencuci, pembersih, antiseptik, desinfektan,	Ekspor Impor - Sertifi-kat Pembe-ritahu-an Ekspor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pewangi, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis (PJT) yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT dan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga			
217	20232	Industri Kosmetik untuk	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Manusia, termasuk Pasta Gigi					jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta		pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Surat Kete-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan, dan	rangan Penanggung Jawab Teknis Industri Kosmetik - Izin Edar Kosmetik - Izin Edar Obat Kuasi - Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Ber-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area,		c. Proses produksi 6. Penggunaan bahan baku memperhatikan kodeks kosmetika Indonesia atau standar lain yang ditentukan 7. Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Industri Kosmetik	sama dengan Obat Kuasi - Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) - Sertifikat Cara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fungsi, dan foto 5. Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen standar operasional prosedur paling sedikit memuat tentang a. Higiene perorangan b. Sanitasi bangunan & Fasilitas c. Sanitasi peralatan			Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) - Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B - Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan	Pem-buatan Kosme-tik yang Baik (CPKB) Secara Berta-hap Golong-an A - Hasil Uji Klinik dan Peneli-tian Klinik Obat Kuasi - Hasil Uji Prakli-nik Obat Kuasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta		pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara	- Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Kosme-tik - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik Obat Kuasi - Perse-tujuan Pelak-sanaan Uji Prakli-nik Kosme-tik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan	- Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Iklan Obat Kuasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan, dan c. Proses produksi 7. Penggunaan bahan baku memperhatikan kodeks kosmetika Indonesia atau standar lain yang ditentukan 8. Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto 6. Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen standar operasional		Industri Kosmetik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prosedur paling sedikit memuat tentang a. Higiene perorangan b. Sanitasi bangunan & Fasilitas c. Sanitasi peralatan					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*, d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki bangunan, Fasilitas dan sarana pendukung yang dibuktikan dengan dokumen denah/layout		b. Penggunaan mesin/ peralatan, dan c. Proses produksi 8. Penggunaan bahan baku memperhatikan kodeks kosmetika Indonesia atau standar lain yang ditentukan 9. Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Industri Kosmetik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto, paling sedikit meliputi: a. Area Penerima-an dan Pengiriman Barang 1) Area peneri-maan barang dileng-kapi dengan area pengam-bilan contoh/ sampel bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku dan/atau kemas b. Area Penyim-panan 1) Area penyim-panan terdiri dari area penyim-panan bahan baku dan/atau kemas, dan area penyim-panan produk yang saling terpisah satu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sama lain 2) Setiap Area Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a memiliki area karantina sebelum bahan dan/atau produk dinyatakan lulus uji, dan area penolakan untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan dan/atau produk yang dinyata-kan tidak lulus uji c. Area Penim-bangan 1) Area Penim-bangan terpisah dan didesain khusus untuk kegiatan penimba ngan 2) Area Penim-bangan dapat menjadi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian dari Area Penyim-panan atau area produksi d. Area Produksi 1) Tata letak ruang produksi diran-cang sedemi-kian rupa untuk memung-kinkan kegiatan produksi dilaku-kan di area yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saling berhubungan mengikuti urutan tahap produksi 2) Area produksi harus diberikan ventilasi secara efektif dengan menggunakan Fasilitas pengendali udara termasuk filter udara dengan tingkat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							efisiensi yang dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang, pengendali suhu, dan bila perlu, pengendali kelembaban udara sesuai kebutuhan produk yang diproses					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan kegiatan yang dilaku-kan di dalam ruangan dan dampak-nya terhadap lingku-ngan luar pabrik e. Area Pengawa-san Mutu 1) Labora-torium pengawa-san mutu harus terpisah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari area produksi 2) Area pengujian kimia, biologi, mikrobiologi, dan/atau radioisotop harus terpisah satu dengan yang lain 3) Laboratorium pengawasan mutu didesain sesuai dengan kegiatan yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilaku-kan, memadai untuk mence-gah kontami-nasi silang, memiliki tempat penyim-panan untuk sampel, baku pemban-ding, pelarut, pereaksi, dan catatan, termasuk area khusus untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							barang berbaha-ya dan/atau beracun f. Sarana Pendukung 1) Ruang istirahat, ruang kantor, ruang rapat, dan kantin dipisah-kan dari area produksi dan laborato-rium pengawa-san mutu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan 3) Ruang ganti pakaian untuk area produksi harus berada di area produksi, namun terpisah dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ruang produksi 4) Bengkel perbaik-an dan pemeli-haraan peralatan sedapat mungkin terpisah dari area produksi 5) Sarana pemeli-haraan hewan harus diisolasi dengan baik terhadap area lain dan dileng-kapi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pintu masuk terpisah (akses hewan) serta Fasilitas pengen-dali udara yang terpisah, bila ada 6) Sarana dan Fasilitas pena-nganan kecela-kaan kerja 7) Sarana pendu-kung lainnya yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diperlu-kan					
218	20233	Industri Kosme-tik Untuk Hewan	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Obat Hewan - Sertifikat Cara Pembuatan Obat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyim-panan bahan baku berupa	Hewan yang Baik (CPOH B)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan, dan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyim-panan bahan baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan		bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
219	20234	Industri Perekat Gigi	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	- Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA –	untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor – Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor – Sertifikat	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan	Pemberitahuan Ekspor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
220	20291	Industri Perekat/ Lem	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-	lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	duksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasil-		perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control*		*of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
221	20292	Industri Bahan Peledak	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Sertifikat Tanda Sah		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk		kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Dokumen Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan keadaan			Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat			- Izin Pendi-rian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Pro-duksi Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Usaha Peneli-tian dan Pe-ngem-bangan Bahan Baku Bahan Peledak		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi			dan Bahan Peledak Aksesoris - Izin Usaha Perdagangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4) Peralatan dan perleng-kapan tanggap darurat 5) Perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetrali-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggula-ngan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap		rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2525

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi: 1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koor-dina-tor 1 orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat 3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggula-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian		ngan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a. Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penanggu-		dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							langan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) b. Prosedur pencegah-an dan penanggu-langan keadaan darurat bahan kimia meliputi:		keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/per-alatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2) Sistem komunikasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Pedoman teknis operasi tanggap darurat 4) Peralatan dan perlengkapan tanggap darurat 5) Perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko					
222	20293	Industri Tinta	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilai-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja	an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusaha-an b. Penang-gung-jawab Bagian		Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan		*control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolah-an Air Limbah) untuk menam-pung dan menetrali-sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
223	20294	Industri Minyak Atsiri	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat halal	Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat halal	men Variasi Promo-si Pangan Olahan - Sertifi-kat Perse-tujuan Pangan Olahan - Izin Pene-rapan Cara Pro-duksi Pangan Olahan yang Baik (CPPO B) - Izin Pene-	hamparan lintas antar Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan	rapan Pro-gram Manaje-men Risiko (PMR) Berta-hap Sarana Pro-duksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Pro-gram Manaje-men Risiko (PMR)	bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia hilir serta		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data	Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran		Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System*/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki sertifikat halal					
224	20295	Industri Korek Api	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja	Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk		peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusaha-an b. Penang-gung-jawab Bagian produksi dan/atau		*of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan		pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
225	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja	duksi Dalam Negeri - Izin Pene-rapan Cara Pro-duksi Pangan Olahan yang Baik (CPPO B) - Izin Pene-rapan Pro-gram Manaje-men Risiko (PMR) Berta-hap		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepemilik-		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa	Sarana Pro-duksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Pene-rapan Pro-gram Manaje-men Risiko (PMR) Sarana Pro-duksi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusaha-an b. Penang-gung-jawab Bagian		Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-kan dilaksana-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/peralatan *quality*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan		*control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
226	20299	Industri Barang Kimia	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Lainnya YTDL							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu	bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan informasi minimal meliputi:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an (kepemilik-an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia hilir serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusaha-an b. Penang-gung-		a. Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamat-an (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmoni-sasi Global (*Globally Harmoni-zed System*/ GHS) yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur:		kan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan		mesin/peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2584

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
227	20301	Industri Serat/ Benang/ Strip Filamen Buatan	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 140598 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium	Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant*		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities sesuai dengan bagan alur proses 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab		berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan, dan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membukti-kan dilaksana-kannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggung-		keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
228	20302	Industri Serat Stapel Buatan	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membukti-kan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan	tian Dan Pe-ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi, komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membukti-kan dilaksana-kannya		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggung-		keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Pencantuman spesifikasi,		Provinsi bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk		komposisi bahan dan/atau care label pada produk atau kemasan yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tekstil hulu serta peralatan pengujian kualitas produk 1) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggung-		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Penanggungjawab Bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur:		baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
229	21011	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap:	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan dan Penanggulang-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian		a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium	an Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi 6. Penggunaan bahan baku memperhati-	Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut - Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan		kan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan 7. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi Bahan Obat 8. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan	- Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi Bahan Obat - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rincian masing-masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu		sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 9. Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 10. Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 11. Dalam hal melakukan impor			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 12. Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi			
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian		a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control*		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan, dan c. Proses produksi 7. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan 8. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing-masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab		Farmasi Bahan Obat 9. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 10. Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemastian mutu c. Penang-gung jawab pengawa-san mutu		prekursor farmasi wajib menyampai-kan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 11. Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 12. Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									13. Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi		keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki bangunan, Fasilitas dan sarana pendukung yang dibuktikan dengan dokumen denah/layout pabrik yang berisi rincian daftar ruangan/area,		8. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan 9. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi Bahan Obat 10. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fungsi, dan foto, paling sedikit meliputi: a. Area Penerima-an dan Pengiriman Barang 1) Area peneri-maan barang dileng-kapi dengan area pengam-bilan contoh/ sampel bahan baku dan/atau kemas		penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 11. Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib menyampai-kan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Area Penyimpanan 1) Area penyimpanan terdiri dari area penyimpanan bahan baku dan/atau kemas, dan area penyimpanan produk yang saling terpisah satu sama lain 2) Setiap Area		psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 12. Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a memiliki area karantina sebelum bahan dan/atau produk dinyatakan lulus uji, dan area penolakan untuk bahan dan/atau produk yang		13. Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 14. Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dinyata-kan tidak lulus uji c. Area Penim-bangan 1) Area Penim-bangan terpisah dan didesain khusus untuk kegiatan penimba ngan 2) Area Penim-bangan dapat menjadi bagian dari Area Penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau area produksi d. Area Produksi 1) Tata letak ruang produksi dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan mengiku-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ti urutan tahap produksi 2) Area produksi harus diberikan ventilasi secara efektif dengan meng-gunakan Fasilitas pengen-dali udara termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mence-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gah kontami-nasi dan kontami-nasi silang, pengen-dali suhu, dan bila perlu, pengen-dali kelemba-ban udara sesuai kebu-tuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilaku-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan di dalam ruangan dan dampak-nya terhadap lingku-ngan luar pabrik e. Area Pengawa-san Mutu 1) Labora-torium pengawa-san mutu harus terpisah dari area produksi 2) Area pengujian kimia,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							biologi, mikro-biologi, dan/atau radio-isotop harus terpisah satu dengan yang lain 3) Labora-torium pengawa-san mutu didesain sesuai dengan kegiatan yang dilaku-kan, memadai untuk mence-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gah kontami-nasi silang, memiliki tempat penyim-panan untuk sampel, baku pemban-ding, pelarut, pereaksi, dan catatan, termasuk area khusus untuk barang berbaha-ya dan/atau beracun					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Sarana Pendukung 1) Ruang istirahat, ruang kantor, ruang rapat, dan kantin dipisah-kan dari area produksi dan laborato-rium pengawa-san mutu 2) Toilet tidak boleh berhubu-ngan langsung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan area produksi atau area penyim-panan 3) Ruang ganti pakaian untuk area produksi harus berada di area produksi, namun terpisah dari ruang produksi 4) Bengkel perbaik-an dan pemeli-haraan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan sedapat mungkin terpisah dari area produksi 5) Sarana pemeli-haraan hewan harus diisolasi dengan baik terhadap area lain dan dileng-kapi pintu masuk terpisah (akses hewan) serta Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengendali udara yang terpisah, bila ada 6) Sarana dan Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, dan 7) Sarana pendukung lainnya yang diperlukan 6. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing-masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengawa- san mutu					
230	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut - Penetapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa	Fasilitas Fraksionasi Plasma - Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi - Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja		bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi 6. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan 7. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi	Farmasi Bahan Obat - Izin Edar Obat - Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Sertifikat Peluluan Bets/ Lot Vaksin - Sertifikat Cara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing-masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu		8. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 9. Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib	Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) - Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat - Hasil Uji Klinik dan Penelitian		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 10. Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi	Klinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Praklinik Suplemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 11. Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 12. Memiliki Apoteker Penanggung	Kesehatan - Penilaian Obat Pengembangan Baru - Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat - Persetujuan Pelaksanaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jawab Distribusi	Uji Klinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal	Pelak-sanaan Uji Prakli-nik Suple-men Kese-hatan - Perse-tujuan Iklan Obat - Perse-tujuan Iklan Obat Kuasi - Perse-tujuan Iklan Suple-men Kese-hatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi 7. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu		lain yang ditentukan 8. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi 9. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing-masing sebagai: a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu		pengawasan obat dan makanan 10. Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi wajib menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang kesehatan 11. Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 12. Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 13. Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyim-panan bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki bangunan, Fasilitas dan sarana pendukung		baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi 8. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Indonesia atau standar lain yang ditentukan 9. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan dokumen denah/layout pabrik yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto, paling sedikit meliputi: a. Area Penerima-an dan Pengiriman Barang 1) Area peneri-maan barang dileng-kapi dengan area		Industri Farmasi 10. Menyampai-kan laporan kegiatan penerimaan bahan baku obat, realisasi produksi dan penyaluran obat setiap triwulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan 11. Industri farmasi yang memproduksi narkotika, psikotropika dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengambilan contoh/ sampel bahan baku dan/atau kemas b. Area Penyimpanan 1) Area penyimpanan terdiri dari area penyimpanan bahan baku dan/atau kemas, dan area penyimpanan produk		prekursor farmasi wajib menyampaikan laporan kegiatan realisasi produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 12. Dalam hal industri memproduksi obat yang tergolong narkotika, memiliki izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang saling terpisah satu sama lain 2) Setiap Area Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a memiliki area karantina sebelum bahan dan/atau produk dinyatakan lulus		khusus produksi narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan 13. Dalam hal melakukan impor dan/atau ekspor narkotika, memiliki izin khusus impor/ekspor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							uji, dan area penolak-an untuk bahan dan/atau produk yang dinyata-kan tidak lulus uji c. Area Penim-bangan 1) Area Penim-bangan terpisah dan didesain khusus untuk kegiatan penimba ngan		14. Memiliki Apoteker Penanggung Jawab Distribusi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Area Penim-bangan dapat menjadi bagian dari Area Penyim-panan atau area produksi d. Area Produksi 1) Tata letak ruang produksi diran-cang sedemi-kian rupa untuk memung-kinkan kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi dilaku-kan di area yang saling berhubu-ngan mengiku-ti urutan tahap produksi 2) Area produksi harus diberikan ventilasi secara efektif dengan meng-gunakan Fasilitas pengen-dali udara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang, pengendali suhu, dan bila perlu, pengendali kelembaban udara sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan dan dampaknya terhadap lingkungan luar pabrik e. Area Pengawasan Mutu 1) Laboratorium pengawa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							san mutu harus terpisah dari area produksi 2) Area pengujian kimia, biologi, mikrobiologi, dan/atau radioisotop harus terpisah satu dengan yang lain 3) Laboratorium pengawasan mutu didesain					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan kegiatan yang dilaku-kan, memadai untuk mence-gah kontami-nasi silang, memiliki tempat penyim-panan untuk sampel, baku pemban-ding, pelarut, pereaksi, dan catatan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk area khusus untuk barang berbaha-ya dan/atau beracun f. Sarana Pendukung 1) Ruang istirahat, ruang kantor, ruang rapat, dan kantin dipisah-kan dari area produksi dan laborato-rium					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengawasan mutu 2) Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan 3) Ruang ganti pakaian untuk area produksi harus berada di area produksi, namun					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpisah dari ruang produksi 4) Bengkel perbaik-an dan pemeli-haraan peralatan sedapat mungkin terpisah dari area produksi 5) Sarana pemeli-haraan hewan harus diisolasi dengan baik terhadap area lain dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dileng-kapi pintu masuk terpisah (akses hewan) serta Fasilitas pengen-dali udara yang terpisah, bila ada 6) Sarana dan Fasilitas pena-nganan kecela-kaan kerja, dan 7) Sarana pendu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kung lainnya yang diperlu-kan 6. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) yang bekerja penuh waktu paling sedikit 3 (tiga) orang dengan rincian masing-masing sebagai:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penanggung jawab produksi b. Penanggung jawab pemastian mutu c. Penanggung jawab pengawasan mutu					
231	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event)	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan	Dalam Negeri - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) - Sertifikat Pendaftaran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	Obat Ikan - Pendaftaran Obat Hewan - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOH B)		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyim-panan bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku berupa bahan kimia b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyim-panan bahan baku berupa bahan kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
232	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan	- Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pendaf-taran Obat Hewan - Sertifi-kat Cara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan	Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta		produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki bangunan, Fasilitas dan sarana pendukung yang dibuktikan dengan dokumen denah/layout pabrik yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto, paling					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit meliputi: a. Area Penerima-an dan Pengiriman Barang 1) Area peneri-maan barang dileng-kapi dengan area pengam-bilan contoh/ sampel bahan baku dan/atau kemas b. Area Penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Area penyim-panan terdiri dari area penyim-panan bahan baku dan/atau kemas, dan area penyim-panan produk yang saling terpisah satu sama lain 2) Setiap Area Penyim-panan sebagai-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mana dimak-sud pada poin 1 huruf a memiliki area karan-tina sebelum bahan dan/atau produk dinyata-kan lulus uji, dan area penolak-an untuk bahan dan/atau produk yang dinyata-kan tidak lulus uji					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Area Penim-bangan 1) Area Penim-bangan terpisah dan didesain khusus untuk kegiatan penimba ngan 2) Area Penim-bangan dapat menjadi bagian dari Area Penyim-panan atau area produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Area Produksi 1) Tata letak ruang produksi dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan mengikuti urutan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahap produksi 2) Area produksi harus diberikan ventilasi secara efektif dengan meng-gunakan Fasilitas pengen-dali udara termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mence-gah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontaminasi dan kontaminasi silang, pengendali suhu, dan bila perlu, pengendali kelembaban udara sesuai kebutuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilakukan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam ruangan dan dampak-nya terhadap lingku-ngan luar pabrik e. Area Pengawa-san Mutu 1) Labora-torium pengawa-san mutu harus terpisah dari area produksi 2) Area pengujian kimia, biologi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mikro-biologi, dan/atau radio-isotop harus terpisah satu dengan yang lain 3) Labora-torium pengawa-san mutu didesain sesuai dengan kegiatan yang dilaku-kan, memadai untuk mence-gah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontaminasi silang, memiliki tempat penyimpanan untuk sampel, baku pembanding, pelarut, pereaksi, dan catatan, termasuk area khusus untuk barang berbahaya dan/atau beracun					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Sarana Pendukung 1) Ruang istirahat, ruang kantor, ruang rapat, dan kantin dipisah-kan dari area produksi dan laborato-rium pengawa-san mutu 2) Toilet tidak boleh berhubu-ngan langsung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan area produksi atau area penyim-panan 3) Ruang ganti pakaian untuk area produksi harus berada di area produksi, namun terpisah dari ruang produksi 4) Bengkel perbaik-an dan pemeli-haraan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan sedapat mungkin terpisah dari area produksi 5) Sarana pemeli-haraan hewan harus diisolasi dengan baik terhadap area lain dan dileng-kapi pintu masuk terpisah (akses hewan) serta Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengendali udara yang terpisah, bila ada 6) Sarana dan Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, dan 7) Sarana pendukung lainnya yang diperlukan					
233	21015	Industri Alat Kesehatan	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dalam Sub-golongan 2101					jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan e. Foto mesin/ peralatan f. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) penguasa an (kepemili kan/sew a) mesin untuk menghas ilkan produk industri alat kesehata		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk	Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kese-hatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kese-hatan Impor - Izin Edar Perbe-kalan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							n serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		Alat Kesehatan dan surat keterangan telah mengikuti penyuluhan perusahaan rumah tangga	Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis			untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (CPB		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(PJT) Alat Kesehatan 5. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			untuk PKRT) - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor -		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	Sertifi-kat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Kete-rangan Pendu-kung Ekspor Impor - Sertifi-kat Pembe-ritahu-an Ekspor - Surat Kete-rangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk		dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk	Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan *Research Use Only* - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab *quality control*,		Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, Penang-gungjawab bagian produksi, Penang-gungjawab *quality control*, Penang-gung-jawab bagian		Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							barang hasil produksi 7. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 8. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.2738

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
234	21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisio-nal Untuk Manusia	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Ekstrak Bahan Alam - Sertifikat Cara Pem-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							meng-hasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa	buatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi 6. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan 7. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis Industri Ekstrak Bahan Alam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan			
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		7. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan 8. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Apoteker Penanggung Jawab Industri Industri Ekstrak Bahan Alam 9. Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemi-		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/peralatan c. Proses produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki bangunan, Fasilitas dan sarana pendukung yang dibuktikan dengan dokumen denah/layout pabrik yang berisi rincian daftar ruangan/area,		8. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan 9. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Ekstrak Bahan Alam 10. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Apoteker Penanggung Jawab			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fungsi, dan foto, paling sedikit meliputi: a. Area Penerima-an dan Pengiriman Barang 1) Area peneri-maan barang dileng-kapi dengan area pengam-bilan contoh/ sampel bahan baku dan/atau kemas		Industri Industri Ekstrak Bahan Alam 11. Menyampai-kan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Area Penyim-panan 1) Area penyim-panan terdiri dari area penyim-panan bahan baku dan/atau kemas, dan area penyim-panan produk yang saling terpisah satu sama lain 2) Setiap Area					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a memiliki area karantina sebelum bahan dan/atau produk dinyatakan lulus uji, dan area penolakan untuk bahan dan/atau produk yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dinyata-kan tidak lulus uji c. Area Penim-bangan 1) Area Penim-bangan terpisah dan didesain khusus untuk kegiatan penimba ngan 2) Area Penim-bangan dapat menjadi bagian dari Area Penyim-panan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau area produksi d. Area Produksi 1) Tata letak ruang produksi dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan mengiku-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ti urutan tahap produksi 2) Area produksi harus diberikan ventilasi secara efektif dengan meng-gunakan Fasilitas pengen-dali udara termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mence-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gah kontami-nasi dan kontami-nasi silang, pengen-dali suhu, dan bila perlu, pengen-dali kelemba-ban udara sesuai kebu-tuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilaku-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan di dalam ruangan dan dampak-nya terhadap lingku-ngan luar pabrik e. Area Pengawa-san Mutu 1) Labora-torium pengawa-san mutu harus terpisah dari area produksi 2) Area pengujian kimia,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							biologi, mikro-biologi, dan/atau radio-isotop harus terpisah satu dengan yang lain 3) Labora-torium pengawa-san mutu didesain sesuai dengan kegiatan yang dilaku-kan, memadai untuk mence-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gah kontami-nasi silang, memiliki tempat penyim-panan untuk sampel, baku pemban-ding, pelarut, pereaksi, dan catatan, termasuk area khusus untuk barang berbaha-ya dan/atau beracun					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Sarana Pendukung 1) Ruang istirahat, ruang kantor, ruang rapat, dan kantin dipisah-kan dari area produksi dan laborato-rium pengawa-san mutu 2) Toilet tidak boleh berhubu-ngan langsung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan area produksi atau area penyim-panan 3) Ruang ganti pakaian untuk area produksi harus berada di area produksi, namun terpisah dari ruang produksi 4) Bengkel perbaik-an dan pemeli-haraan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan sedapat mungkin terpisah dari area produksi 5) Sarana pemeli-haraan hewan harus diisolasi dengan baik terhadap area lain dan dileng-kapi pintu masuk terpisah (akses hewan) serta Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengendali udara yang terpisah, bila ada 6) Sarana dan Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, dan 7) Sarana pendukung lainnya yang diperlukan					
235	21022	Industri Produk Obat Tradisio-	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		nal Untuk Manusia					jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan	nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin	bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk farmasi serta		pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara	Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Obat Bahan Alam - Surat Keterangan Penang		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi	gung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam - Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam - Izin Edar Obat Bahan Alam		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area,		6. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan 7. Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam 8. Memiliki dokumen Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro	- Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama dengan Kosmetik dan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fungsi, dan foto 5. Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan dokumen standar operasional prosedur paling sedikit memuat tentang a. Higiene perorangan b. Sanitasi bangunan & Fasilitas c. Sanitasi peralatan 6. Memiliki dokumen standar operasional		Obat Bahan Alam 9. Menyampaikan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan	Pangan Olahan - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) - Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prosedur untuk menyusun standar operasional prosedur 7. Memiliki dokumen surat pernyataan kepemilikan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan kualifikasi Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja penuh waktu paling sedikit 1 (satu) orang			Baik Secara Berta-hap - Hasil Uji Klinik dan Peneli-tian Klinik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Klinik dan Peneli-tian Klinik Obat Kuasi		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Hasil Uji Klinik	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan	dan Peneli-tian Klinik Suple-men Kese-hatan - Hasil Uji Prakli-nik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Prakli-nik Obat Kuasi - Hasil Uji Prakli-nik Suple-	Kab /Kota bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*	men Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas:	Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelak-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi 7. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan 8. Memiliki dokumen Surat Keterangan	sanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam - Persetujuan Iklan Obat Kuasi - Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki bangunan, Fasilitas, dan peralatan, dibuktikan dengan dokumen denah/layout Fasilitas produksi yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto 6. Memiliki program higiene dan sanitasi yang dibuktikan dengan		Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam 9. Menyampai-kan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dokumen standar operasional prosedur paling sedikit memuat tentang a. Higiene peroranga b. Sanitasi bangunan & Fasilitas c. Sanitasi peralatan 7. Memiliki dokumen standar operasional prosedur untuk menyusun standar operasional prosedur 8. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							surat pernyataan kepemilikan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan kualifikasi Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja penuh waktu paling sedikit 1 (satu) orang					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk farmasi serta peralatan pengujian kualitas produk		(adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki bangunan,		bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi 8. Penggunaan bahan baku memperhatikan Farmakope Herbal Indonesia atau standar lain yang ditentukan 9. Memiliki dokumen Surat Keterangan Apoteker Penanggung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas dan sarana pendukung yang dibuktikan dengan dokumen denah/layout pabrik yang berisi rincian daftar ruangan/area, fungsi, dan foto, paling sedikit meliputi: a. Area Penerima-an dan Pengiriman Barang 1) Area peneri-maan barang dileng-		Jawab Industri Obat Bahan Alam 10. Menyampai-kan laporan penyaluran produk setiap 6 (enam) bulan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapi dengan area pengam-bilan contoh/ sampel bahan baku dan/atau kemas b. Area Penyim-panan 1) Area penyim-panan terdiri dari area penyim-panan bahan baku dan/atau kemas, dan area					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan produk yang saling terpisah satu sama lain 2) Setiap Area Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a memiliki area karantina sebelum bahan dan/atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk dinyatakan lulus uji, dan area penolakan untuk bahan dan/atau produk yang dinyatakan tidak lulus uji c. Area Penimbangan 1) Area Penimbangan terpisah dan didesain khusus untuk kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penimbangan 2) Area Penimbangan dapat menjadi bagian dari Area Penyimpanan atau area produksi d. Area Produksi 1) Tata letak ruang produksi dirancang sedemikian rupa untuk memung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kinkan kegiatan produksi dilaku-kan di area yang saling berhubu-ngan mengiku-ti urutan tahap produksi 2) Area produksi harus diberikan ventilasi secara efektif dengan meng-gunakan Fasilitas pengen-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dali udara termasuk filter udara dengan tingkat efisiensi yang dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang, pengendali suhu, dan bila perlu, pengendali kelembaban					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							udara sesuai kebutuhan produk yang diproses dan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan dan dampaknya terhadap lingkungan luar pabrik e. Area Pengawasan Mutu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Laboratorium pengawasan mutu harus terpisah dari area produksi 2) Area pengujian kimia, biologi, mikrobiologi, dan/atau radioisotop harus terpisah satu dengan yang lain 3) Laboratorium pengawa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							san mutu didesain sesuai dengan kegiatan yang dilaku-kan, memadai untuk mence-gah kontami-nasi silang, memiliki tempat penyim-panan untuk sampel, baku pemban-ding, pelarut,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pereaksi, dan catatan, termasuk area khusus untuk barang berbaha-ya dan/atau beracun f. Sarana Pendukung 1) Ruang istirahat, ruang kantor, ruang rapat, dan kantin dipisah-kan dari area produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan laboratorium pengawasan mutu 2) Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan area produksi atau area penyimpanan 3) Ruang ganti pakaian untuk area produksi harus berada di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							area produksi, namun terpisah dari ruang produksi 4) Bengkel perbaik-an dan pemeli-haraan peralatan sedapat mungkin terpisah dari area produksi 5) Sarana pemeli-haraan hewan harus diisolasi dengan baik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap area lain dan dileng-kapi pintu masuk terpisah (akses hewan) serta Fasilitas pengen-dali udara yang terpisah, bila ada 6) Sarana dan Fasilitas pena-nganan kecela-kaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja, dan 7) Sarana pendukung lainnya yang diperlukan 6. Memiliki dokumen surat pernyataan kepemilikan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dengan kualifikasi Apoteker yang bekerja penuh waktu paling sedikit 1 (satu) orang					
236	21023	Industri Produk	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifikat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Obat Tradisional Untuk Hewan				NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN	berada pada Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Pendaftaran Obat Hewan - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOH B)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Pengguna-an mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/ produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 6. Memiliki SOP keamanan dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki layanan keluhan pelanggan/		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk terhadap: a. Kejadian tidak diinginkan (adverse event) b. Kualitas produk (product quality) yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki SOP keamanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan atas: a. Penyimpanan bahan baku berupa bahan kimia b. Penggunaan mesin/ peralatan c. Proses produksi			
237	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-	lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet serta peralatan penguji-		atas produk yang dihasilkan secara periodik	duksi Dalam Negeri - Fasili-tas Iradiato r Kategori I Menggu nakan Pemban gkit Radiasi Pengion sebagai Penun-jang Kegiat-an Utama - Fasili-tas Iradiato r Kategori		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi			I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	Perta-hanan dan Kea-manan - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-an Fasili-tas Pro-duksi Perta-hanan (Certifi-cate of Approval Facility Worthi-ness of Defence Pro-duct-	bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan	ion): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan,		minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penanggungjawab bagian produksi, Penanggungjawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							barang hasil produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggungjawab bagian produksi, Penanggungjawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
238	22112	Industri Vulkani-sir Ban	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilai-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggungjawab bagian produksi, Penanggungjawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
239	22121	Industri Penga-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		sapan Karet							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen		Kab /Kota bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengemba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
240	22122	Industri Remilling Karet	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilai-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan	an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-		penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
241	22123	Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*)	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan	- Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab		6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
242	22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen		Provinsi bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan		hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
243	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperlu-an Industri	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	Produksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium		hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-jawab Bagian pemasaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
244	22193	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperlu-	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Infra-struktur							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
245	22194	Industri Barang Dari	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Karet Untuk Kesehatan					penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Perse-	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan		Kesehatan/ PKRT	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung			Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT) - Surat Keterangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan/ PKRT 5. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) Alat Kesehatan/ PKRT			Penduk ung Ekspor Impor - Sertifi-kat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Kete-rangan		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	Penduk ung Ekspor Impor - Sertifi-kat Pemberi tahuan Ekspor - Surat Perse-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	tujuan Pelak-sanaan Uji Klinik	lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) penguasa an (kepemili kan/sew a) mesin untuk menghas ilkan produk industri alat kesehata n serta peralatan pengujia n		atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab		(CPB) untuk Alat Kesehatan/ PKRT			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan/ PKRT					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) Alat Kesehatan/ PKRT					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membukti-kan: 1) penguasa an (kepemili kan/sew a) mesin untuk menghas ilkan produk industri alat kesehata n serta peralatan pengujia n kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpa-		secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, Penang-gung jawab bagian produksi, Penang-gung jawab *quality control*, Penang-gung-jawab bagian pengemba-		Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan/ PKRT			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan SDM /atau b. Penang-gung-jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan/ PKRT 8. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) Alat Kesehatan/ PKRT					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
246	22199	Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan	Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-		penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
247	22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangun-an	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	- Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, Penang-gung jawab bagian produksi, Penang-gung jawab *quality control*, Penang-gung-jawab bagian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet serta peralatan penguji-		atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penang-		pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gung jawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
248	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	tian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab		6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
249	22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk		dihasilkan secara periodik	Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian		barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-jawab Bagian pemasaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
250	22291	Industri Barang Plastik Lembar-an	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		berada pada Kab /Kota bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggung jawab bagian produksi c. Penanggung jawab *quality control* d. Penanggung jawab bagian pengembangan SDM /atau e. Penanggung-jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
251	22292	Industri Perleng-kapan dan Per-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		alatan Rumah Tangga (tidak termasuk Furnitur)							tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan	bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi		bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
252	22293	Industri Barang	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	berada pada Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, Penang-gung jawab bagian produksi, Penang-gung jawab *quality control*, Penang-gung-		penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
253	22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Dalam hal memproduksi peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik,	- Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggungja wab Teknis yang memiliki Sertifi-kat Cara Pem-buatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kese-hatan	Perleng kapan Jalan - Izin Edar Alat Kese-hatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kese-hatan Impor - Izin Edar Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga (PKRT)		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	Dalam Negeri - Izin Edar Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga Impor - Sertifi-kat Cara Pem-buatan yang Baik untuk Alat Kese-hatan (CPB untuk Alkes)	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Dalam hal memproduksi peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknis yang memiliki Sertifi-kat	- Sertifi-kat Cara Pem-buatan yang Baik untuk Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT) - Surat Kete-rangan Pendu-kung Ekspor Impor - Sertifi-kat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) penguasa an (kepemili		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Dalam hal memproduksi peralatan kesehatan/laboratorium dari plastik, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggungjawab Teknis yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, Penang-gung jawab bagian produksi, Penang-gung jawab *quality control*, Penang-gung-jawab bagian pengemba-ngan SDM /atau b. Penang-gung-jawab		Baik (CPB) untuk Alat Kese-hatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi 7. Dalam hal memproduksi peralatan kesehatan/laboratorium dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							plastik, memiliki: e. Dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan f. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
254	23111	Industri Kaca Lembaran	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang	- Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen		pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
255	23112	Industri Kaca Pengaman	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta		penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau	Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting)		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian		b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control*		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses *quality control*, d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta		penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
256	23119	Industri Kaca Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		berada pada Kab /Kota bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri material dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*		keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri material dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
257	23121	Industri Perleng-kapan dan Per-alatan Rumah Tangga dari Kaca	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Perse-	lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Dalam hal industri memproduksi botol susu bayi dari kaca, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3053

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	untuk Perbe-kalan Kese-hatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT) - Surat Kete-rangan Penduk ung Ekspor Impor - Sertifi-kat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 139067 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen	- Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja 6. Dalam hal industri memproduksi botol susu bayi dari kaca, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan		bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material		penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Dalam hal industri memproduksi botol susu bayi dari kaca, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk PKRT			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
258	23122	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
259	23123	Industri Kemasan dari Kaca	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Perse-	lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji	tujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpa-		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
260	23124	Industri Alat Laboratorium Klinis	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dari Kaca					jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri . dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material dari kaca serta		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kese-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan			hatan (CPB untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting)		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk		b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen		(CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control* 6. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(PJT) Alat Kesehatan 7. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material dari kaca serta peralatan pengujian kualitas produk		b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen		yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 8. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
261	23129	Industri Barang	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Lainnya dari Kaca							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi	berada pada Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Tertentu - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Produksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
262	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenis-nya yang Tahan Api	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiat-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	an Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
263	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku e. Proses produksi f. Proses *quality control* g. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
264	23921	Industri Batu Bata	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dari Tanah Liat/ Keramik							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Tertentu - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
265	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/ Keramik	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Produksi Dalam Negeri		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3150

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 139164 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
266	23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
267	23929	Industri Bahan Bangun-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an dari Tanah Liat/ Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang • membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
268	23931	Industri Perleng-kapan Rumah Tangga dari Porselen	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
269	23932	Industri Perleng-kapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/ Keramik	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
270	23933	Industri Alat Labora-	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		torium dan Alat Listrik/ Teknik dari Porselen							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3205

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

SK No 139219 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
271	23939	Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangun-an	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
272	23941	Industri Semen	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri material bangun-an dan kon-struksi serta		penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau	Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk semen, berupa: 1) i. Unit Produksi terintegrasi minimal memiliki: 1. Peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambangan 2. Crusher/ raw mill 3. raw mill silo 4. kiln 5. clinker silo 6. Cement grinding 7. Cement silo 8. Packing plant ii. Unit Produ					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ksi tidak terinte grasi mini-mal me-miliki: 1. clinker silo 2. Ce-ment grin-ding 3 pack-ing plant 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpa-sang pada					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: penguasa-an (kepemilik-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk semen, berupa: 1) i. Unit Pro-duksi terin-tegrasi mini-mal me-miliki: 1. per-alatan penam bang-an 2. Crus-her/ra					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							w mill 3. raw mill silo 4. kiln 5. clinker silo 6. Cement grinding 7. Cement silo 8 packing plant ii. Unit Produksi tidak terintegrasi minimal					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki: 1. clinker silo 2. Cement grinding 3. Packing plant 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material		an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangun-an dan kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*		Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control* 7. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk semen, berupa: 1) i. Unit Produksi terintegrasi minimal memiliki: 1. Peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambangan 2. Crusher/ raw mill 3. raw mill silo 4. kiln 5. clinker silo 6. Cement grinding 7. Cement silo 8. Packing plant ii. Unit Pro-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							duksi tidak ter-inte-grasi mini-mal me-miliki: 1. clinker silo 2. Ce-ment grin-ding 3. Pack-ing plant 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpa-sang pada					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha					
273	23942	Industri Kapur	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Lokasi industrinya berada pada Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan		bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material		penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangun-an dan kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
274	23943	Industri Gips	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting)	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, peneri-		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
275	23951	Industri Barang dari Semen	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan	nen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin	bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-		lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri material bangun-an dan kon-struksi serta		perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
276	23952	Industri Barang dari Kapur	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	ngembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		berada pada Kab /Kota bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
277	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
278	23954	Industri Barang dari Gips	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		untuk Konstruksi							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
279	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
280	23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperlu-	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Industri					jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,		hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta		penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri material bangun-an dan kon-		(meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
281	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
302	23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
283	23961	Industri Barang dari	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
284	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
285	23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		, dan Bahan Bangun-an							undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
286	23969	Industri Barang dari	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Marmer, Granit dan Batu Lainnya							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Kab /Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		satu hamparan lintas antar Kab /Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kon-struksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan,		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
287	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Dan Pengembangan - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Penyimpanan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau *quality control* c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang *quality control*					
288	24101	Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*)	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium	Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaf-taran Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri hulu logam serta		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri hulu logam serta peralatan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguji-an kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an, Penang-gung jawab bagian produksi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penanggung jawab *quality control*, Penanggungjawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggungjawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses					
289	24102	Industri Penggi-lingan Baja (*Steel Rolling*)	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Reko-menda-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	si Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:			Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certifi-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas			cate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							facilities sesuai dengan bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen		penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, Penanggung jawab bagian produksi, Penanggung jawab *quality control*, Penanggung-jawab bagian pengembangan SDM /atau b. Penanggung-jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
290	24103	Industri Pipa dan Sam-bungan Pipa dari Baja dan Besi	Industri pipa seamless/ tanpa kelim dan pipa hasil pengelasan (*green pipe, threaded seamless pipe, casing*	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tubing, line pipe) Industri sambung-an pipa				energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertem-tu - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian kualitas produk		atas produk yang dihasilkan secara periodik	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan,			- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses			Laut dan/ atau Moda Udara		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri hulu logam serta peralatan penguji-		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggung jawab bagian produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggung jawab *quality control* d. Penanggung jawab bagian pengembangan SDM /atau e. Penanggung-jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) dan penggunaan peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggung jawab bagian produksi c. Penanggung jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control d. Penanggung jawab bagian pengembangan SDM/atau e. Penanggung-jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3478

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Selain: Industri pipa seamless/ tanpa kelim dan pipa hasil pengelasan (green pipe, threaded seamless pipe, casing tubing, line pipe) , Industri sambungan pipa	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk mengha-		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab /Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab /Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hulu logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Penanggung jawab bagian produksi c. Penanggung jawab *quality control* d. Penanggung jawab bagian pengembangan SDM /atau e. Penanggung jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen		Provinsi bersangkut-an	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan		hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk industri hulu logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Penanggung jawab bagian produksi c. Penanggung jawab *quality control* d. Penanggung jawab bagian pengembangan SDM/atau e. Penanggung jawab Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, peneri-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses *quality control* d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3494

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3495

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
291	24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

SK No 138500 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan penguasa-an (kepe-		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Pe-nyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pe-ngadaan, penerima-an, penyim-panan bahan baku			Penun-jang Kegiat-an Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses 5. Memiliki dokumen perjanjian jual beli bahan baku hasil pertambangan (ore) untuk membuktikan legalitas bahan baku yang digunakan					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan		laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karet serta peralat-an peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3503

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab					

SK No 138492 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses 6. Memiliki dokumen perjanjian jual beli bahan baku hasil pertambangan (ore) untuk membuktikan legalitas bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang digunakan					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan . quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasi-		penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Penang-gung-jawab bagian produksi dan/atau quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses 8. Memiliki dokumen perjanjian jual beli bahan baku hasil pertambangan (ore) untuk membuktikan legalitas bahan baku yang digunakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
292	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Logam bukan besi dalam bentuk dasar (Ingot, Billet, Slab, Batang, Pellet, Block, Sheet, Pig, Paduan, Bubuk, dan lain-lain) Logam tanah jarang dan paduannya.	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada			- Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaik-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi			an Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses 5. Memiliki dokumen perjanjian jual beli bahan baku hasil pertambangan (ore) untuk membuktikan legalitas bahan baku			Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang digunakan 6. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi, memiliki dan menyampai-kan Surat Pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi dan Nickel Matte 7. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lurgi, memiliki dan menyampai-kan tidak memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian		secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses 6. Memiliki dokumen perjanjian jual beli bahan baku hasil pertambangan (ore) untuk membuktikan legalitas bahan baku yang digunakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi, memiliki dan menyampaikan Surat Pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi dan Nickel Matte 8. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyampai-kan tidak memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk		4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							facilities sesuai dengan bagan alur proses 7. Memiliki dokumen perjanjian jual beli bahan baku hasil pertambangan (ore) untuk membuktikan legalitas bahan baku yang digunakan 8. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki dan menyampaikan Surat Pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi dan Nickel Matte 9. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Selain: Logam bukan besi dalam bentuk dasar (Ingot, Billet, Slab, Batang, Pellet, Block, Sheet, Pig, Paduan, Bubuk, dan lain-lain) Logam tanah jarang dan paduannya	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3540

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan karet serta peralat-an peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3544

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab					

SK No 137970 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses 8. Memiliki dokumen perjanjian jual beli bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil pertambangan (ore) untuk membuktikan legalitas bahan baku yang digunakan 9. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi, memiliki dan menyampai-kan Surat Pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi dan Nickel Matte					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometa-lurgi, memiliki dan menyampai-kan tidak memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP)					
293	24203	Industri Peng-gilingan Logam Bukan Besi	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggu-naan Mesin Pro-	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	duksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certi-		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk	ficate of Appro-val Facility Worth-iness of Defen-ce Pro-duction): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Pro-duksi Alat Per-alatan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
294	24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	duksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan karet serta		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
295	24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan	Industri copper tube/pipe tanpa kampuh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Besi dan Baja					asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	duksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:			Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen berupa daftar			Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan		laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karet serta peralat-an peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3580

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab					

SK No 137935 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk		hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3585

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
			Selain Industri copper tube/pipe tanpa kampuh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji		hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian		secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencemaran lingkungan					
296	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	- Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan	lintas antar Provinsi	
				Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan	Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	Kab./Kota ber-sangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Penang-gung-jawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penang-gung-jawab bagian pemasaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
297	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium	Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian		secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses					
298	25111	Industri Barang dari	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

I.F.3627

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/		perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri material bangun-an dan kon-struksi serta perala-tan peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 5. Memiliki dokumen bagan alur:		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

I.F.3633

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control					
299	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.3636

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 137896 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian		hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
300	25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-	Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Tanda Daftar Badan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta		an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau	Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan			duksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk		produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri material bangun-an dan kon-struksi serta pera-latan peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi terpa-sang pada data usaha		peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta pera-		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							latan peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
301	25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	- Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/		perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri material bangun-an dan kon-struksi serta pera-latan peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control					
302	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki:		Provinsi ber-sangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan,		6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
303	25130	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
304	25200	Industri Senjata dan Amunisi	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Layanan asistensi teknik b. Penanganan layanan keluhan	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan		c. Lembar Data Keselamatan Bahan/ Material Safety Data Sheet d. Lembar Data Teknis Produk yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki sertifikat konformansi produk 5. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout			Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Layanan asistensi teknik b. Penangan-an layanan keluhan c. Lembar Data			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri plastik dan		Keselamat-an Bahan/ Material Safety Data Sheet d. Lembar Data Teknis Produk yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karet serta peralat-an peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas produksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari		laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat konformansi produk 7. Memiliki gudang penyimpanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab		pada setiap divisi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM f. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a. Tempat Penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetrali-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Layanan asistensi teknik b. Penangan-an layanan keluhan c. Lembar Data Keselamat-an Bahan/ Material Safety Data Sheet d. Lembar Data Teknis Produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. Penanggungjawab bagian produksi dan/atau		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki sertifikat konformansi produk 8. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Penanggungjawab bagian pemasaran d. Penanggungjawab bagian keuangan e. Penanggungjawab bagian pengembangan SDM f. Penanggungjawab bagian pemasaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
305	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam Meta-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		lurgi Bubuk							2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Indus-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik	tri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Pro-		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi	duc-tion): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Pro-duksi Alat Perala-tan Perta-hanan dan Kea-manan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerima-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencemaran lingkungan					
306	25920	Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pemberian jasa 3. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/opera-sional/staf		4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 5. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b. Foto mesin/peralatan, sebagai sarana					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penun-jang					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan usaha pemberian jasa 3. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pegawai paling sedikit: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/operasional/staf 4. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 5. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai sarana penunjang b. Foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
307	25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk	Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
308	25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Dalam Negeri -		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
309	25933	Industri Alat Potong	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri -		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
310	25934	Industri Peralat-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Umum							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri -		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, penerima-an, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
311	25940	Industri Ember, Kaleng,	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Drum dan Wadah Sejenis dari Logam							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri -		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
312	25951	Industri Barang	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dari Kawat							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
313	25952	Industri Paku,	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Mur dan Baut							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Komponen Dalam Negeri - Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
314	25991	Industri Bran-kas,	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Filling Kantor dan Sejenis-nya							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan	Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an	Kab./Kota ber-sangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri -		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
315	25992	Industri Peralat-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Dapur dan Peralat-an Meja dari Logam							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an	berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
316	25993	Industri Keperlu-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri -		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji		hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, penerima-an, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang		.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
317	25994	Industri Pembu-	Industri pembuatan profil hasil	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri	- Sertifi-kat Tingkat Kom-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		atan Profil	pengelasan untuk konstruksi berat				penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen	ponen Dalam Negeri - Reko-menda-si Peng-guna Gas Bumi Tertentu - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	ngembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 4. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM b. Penanggun gjawab bagian pemasar-an 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, penerima-an, penyim-panan bahan baku b. Proses produks					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) dan penggunaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanjian jual beli/sewa		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuai an kapasi-tas pro-duksi terpa-sang pada data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan, penang-gung-jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
			Selain: Industri pembuatan profil hasil pengelasan untuk konstruksi berat	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpan-an, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
318	25995	Industri Lampu dari Logam	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilik-		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Penilaian TKDN Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri hilir logam serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas pro-duksi terpa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilik-		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk indus-tri hilir logam serta per-alatan pengu-jian kuali-tas produk 2) Kese-suaian kapasi-tas pro-duksi terpa-		keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penanggun gjawab bagian pemasar-an 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, penerima-an, penyim-panan bahan baku b. Proses produks					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) dan penggunaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanjian jual		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian		4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2) Kesesuai an kapasi-tas pro-duksi terpa-sang pada data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan, penang-gung-jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membukti-kan penguasaan (kepemilik-an/sewa) dan penggunaan peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
319	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pene-	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	tapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defenc	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu	e Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan:		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapasitas produksi terpasang pada data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggung-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) dan penggunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
320	26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elek-tronik	Seluruh	- Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepe-		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/ kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang	tian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control, d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/ kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi		kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/ kode elektronik garansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri elektronika serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerima-		secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
321	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustria 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk meng-hasilkan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerima-an, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyimpa-nan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi		untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuk-tikan: 1) Pengua-saan (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-		(meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyimpa-nan, pengangkut-an dan distribusi		periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
322	26210	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana	Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu -naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkut-an	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control,		untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen		Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
323	26220	Industri Perlengkapan Komputer	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan	Dalam Negeri -		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
324	26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik	tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu -naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri elektronika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat,		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyimpa-nan, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi		dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Pro-duksi Alat Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuk-tikan: 1) Pengua-saan (kepe-milikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk meng-hasilkan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkut-an	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuk-tikan: 1) Penguasaan		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepe-milikan/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen		yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi		proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang		keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
325	26320	Industri Peralatan Komuni-	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Tanda Pendaf-taran	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		kasi Tanpa Kabel (Wireless)				NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Produk (TPP) Pro-duksi Telepo n Seluler, Kompu ter Gengga m (Handh eld), Dan Kompu ter Tablet - Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk meng-		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	duksi Dalam Negeri - Izin Pema-saran Alat Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-tujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	Kelaik-an Fasili-tas Pro-duksi Perta-hanan (Certifi cate of Approv al Facility Worthi ness of Defenc e Produc tion): Moda Darat, Moda Laut dan/		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuk-tikan: 1) Pengua-saan (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk		n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyimpa-nan, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi		yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuk-tikan: 1) Pengua-saan (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri		n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyimpa-nan, pengangkut-an dan		hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
326	26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana	Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu -naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri -	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
327	26399	Industri Peralatan Komuni-kasi Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu -naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	tujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk meng-		n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
328	26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang		hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasil-kan produk industri elektronika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4023

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
329	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Penggan-da Audio dan Video, bukan Industri Televisi	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 111992 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri -		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyimpa-nan, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi		untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuk-tikan: 1) Pengua-saan (kepe-milikan/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri		produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi		peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyimpa-nan, pengangkut-an dan		secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk meng-		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Penge-masan,penyi mpa-nan, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
330	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan	Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				- Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuk-tikan: 1) Pengua-saan (kepe-		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan/ sewa) mesin untuk meng-hasil-kan produk industri elektro-nika serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi		proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang		keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik /plant layout facilities, yang membukti-kan tersedianya a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
331	26511	Industri Alat Ukur dan Alat	Seluruh	- Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Uji Manual				NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Perta-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	hanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	-an Perta-hanan dan Kea-manan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				- Besar			-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Mutu (ISO 9001)			
332	26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu -naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	tujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				- Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
333	26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektro-nik	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Pemasaran Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik	Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-an Fasili-tas Pro-duksi Perta-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	hanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Peralat -an Perta-hanan dan Kea-manan	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
334	26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen	(Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralat-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
335	26520	Industri Alat Ukur Waktu	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium	- Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif - Konstruksi Fasilitas Produksi Barang Konsu-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	men yang Mengandung Zat Radioaktif - Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif - Pernyataan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi ber-sangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
336	26602	Industri Peralatan Elektro medikal dan Elektro-terapi	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan; dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri alat kesehat-an serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	Per-bekal-an Kese-hatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Per-bekal-an Kese-hatan Rumah Tangga Impor - Sertifi-kat Cara Pem-buatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencana-an tata letak			yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya bangunan fisik sekurang-kurangnya berupa: a. Ruang penerimaan dan penyimpanan bahan baku b. Ruang penyimpanan			- Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Fasilitas pengelo-laan limbah 6. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membukti-kan kepe-milikan karyawan yang bekerja sebagai Pe-nanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 7. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar per-alatan b. Foto mesin/ peralatan; dan c. Perjanjian jual		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehat-an serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyimpan an bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengema-san, penyim-panan, pengang-kutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membukti-kan terse-dianya bangunan fisik sekurang-kurangnya berupa: a. Ruang peneri-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							maan dan penyimpan an bahan baku b. Ruang penyim-panan hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan terse-dianya bangunan fisik se-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kurang-kurangnya berupa: a. Ruang peneri-maan dan penyim-panan bahan baku b. Ruang penyimpan an hasil produksi c. Fasilitas pengelo-laan limbah 6. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membukti-kan kepe-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							milikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 7. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana pe-	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk		3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							meng-hasilkan produk industri alat ke-sehatan serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu Peralatan Kesehatan (ISO 13485)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM dan/atau b. Penanggungjawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penangan-an kecela-kaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membukti-kan terse-dianya bangunan fisik sekurang-kurangnya berupa: a. Ruang peneri-maan dan penyimpan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b. Ruang penyimpanan hasil produksi c. Fasilitas pengelolaan limbah 8. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(PJT) Alat Kesehatan 9. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
337	26710	Industri Peralat-an Fotografi	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanji-an jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta per-		trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi ter-pasang pada data usaha; 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		7. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri elektronika serta		penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control; dan		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bagian pemasaran 5. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengema-san, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi		yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 6. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk		n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri elektronika serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengema-san, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-buktikan tersedianya Fasilitas penanga-nan kece-lakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencana-an					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control.					
338	26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 4. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanji-an jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta per-		trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi ter-pasang pada data usaha 5. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri elektro-nika serta		penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau quality		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengang-		yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mengha-silkan produk industri elektro-nika serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi terpasang pada data usaha 6. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 7. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengema-san, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 8. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-buktikan tersedianya Fasilitas penanga-nan kece-lakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
339	26792	Industri Teropon g dan In-strumen Optik Bukan	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaca Mata					asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	- Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	duksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri alat kesehat-an serta peralat-an pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyimpan an bahan baku,			(PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Per-bekal-an Kese-hatan Rumah Tangga Impor - Sertifi-kat Cara Pem-buatan yang Baik untuk Alat Kese-hatan (CPB		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Pe-			untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifi-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 5. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			kat Pemberitahuan Ekspor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Research Use Only - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		
				Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku,	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthi	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta per-		hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat	ness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas pro-duksi terpasang pada data usaha 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan, pe-nanggungj awab bagian produksi,		pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pe-nanggungj awab quality control, pe-nanggungj awab bagian pengemba ngan SDM; dan/atau b. Pe-nanggungj awab bagian pe-masaran 5. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyimp-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 6. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 7. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri alat kesehatan serta peralatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan, pe-		Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality control, penanggungjawab bagian pengembangan SDM dan/atau b. Penanggungjawab bagian pemasaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penangan-an kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi 7. Memiliki dokumen perjanjian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 8. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4180

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
340	26800	Industri Media Magne-tik dan Media Optik	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Legalis asi Pendaf-taran/ Registr asi Mesin dan Peralat -an Pro-duksi Cakra m Optik - Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 111834 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Kab/Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
341	27111	Industri Motor Listrik	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen	Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certifi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	cate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi		
				Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	Alat Peralat-an	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Pertahanan dan Keamanan	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: c. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
342	27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	ngembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Perse-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP	tujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
343	27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)							bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	ness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
344	27120	Industri Peralat-an Pe-	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ngontrol dan Pendistri-busian Listrik				NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN	Kab./Kota ber-sangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
345	27201	Industri Batu Baterai	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa		produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Tanda Daftar Badan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri elektronika serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi		5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi			Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar per-alatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan:		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri elektronika serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control; dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku, b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian; 2. Menjamin keamanan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/		dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan; dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri elektronika serta per-alatan pengujian kualitas produk		b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-buktikan tersedianya Fasilitas penanga-nan kece-lakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
346	27202	Industri Akumulator Listrik	Seluruh	- Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangana n trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi	Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu -naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									n barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
347	27203	Industri Baterai Untuk	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kendara-an Bermotor Listrik					penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan; dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktika: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri elektronika serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi,	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk		hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri elektro-nika serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi ter-pasang pada data usaha 7. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusaha-an		peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau quality control; dan c. Bagian pemasaran 8. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 9. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri elektronika serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi ter-pasang pada data usaha		yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-		kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas		8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
348	27310	Industri Kabel	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian	- Sertifi-kat	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Serat Optik				NIB dan Sertifikat Standar	rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selamalamanya 6		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 1. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/peralatan dan c. Perjanji-an jual beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	TKDN Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi ter-pasang pada data usaha 2. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, pene-		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengema-san, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi		6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan		
				- Mene-ngah	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Kab./Kota ber-sangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-		a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silkan produk industri elektro-nika serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesu-aian ka-pasitas produksi ter-pasang pada data usaha 7. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpinan perusaha-an b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 8. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, pene-rimaan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi		6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengema-san, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 9. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan	7 hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanjian jual		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri elektronika serta per-alatan peng-ujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto		rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanga-nan kece-lakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control					
349	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektro-nik Lainnya	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membu-ktikan:		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Fasili-tas Iradia-tor Kate-gori I	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1)Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2)Kesesuaian kapasitas produksi terpa-		produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usah 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan		5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi			Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membukti-kan:		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpa-		produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-		5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi		rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanga-nan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuk-tikan tersedia-nya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi 7	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-		peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pemasaran 4. Memiiki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengang-		Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanga-nan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							facilities, yang membuktikan tersedia-nya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
350	27330	Industri Perlengkapan Kabel	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Indus-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan c. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-an Fasili-tas Pro-duksi Perta-hanan (Certifi cate of Approv al Facility Worthi ness of De-fence Produc		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laborato-rium inde-penden atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 5. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium	tion): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Pro-duksi Alat Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangku-tan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kesesuaian kapasitas pro-		barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							duksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control,		secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggungjawab bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiiki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiiki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuk-tikan tersedia-nya: a. Ruang produksi khusu b. Ruang quality control					
351	27401	Industri Bola Lampu	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pijar, Lampu Pene-rangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet				NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustria 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN	Kab./Kota bersangku-tan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan	Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri - Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laborato-rium inde-penden atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk	- Kon-struksi Fasili-tas Pro-duksi Barang Konsu-men yang Me-ngan-dung Zat Radio-aktif - Operas i Fasili-tas Pro-duksi Barang Konsu-men		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	yang Mengandung Zat Radioaktif - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung		
				Menengah			-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Zat Radio-aktif	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelangga 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangku-tan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanga-nan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
352	27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pem-buang Listrik)							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Mesin Produksi Dalam Negeri - Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif - Konstruksi Fasili-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen	tas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif - Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	Zat Radio-aktif - Per-nya-taan Pembe-basan Fasili-tas Pro-duksi Barang Konsu-men yang Me-ngan-dung Zat Radio-aktif		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
353	27403	Industri Peralat-an Penera-ngan Untuk Alat Trans-portasi	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik	ness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangku-tan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
354	27404	Industri Lampu LED	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Tanda Daftar Badan Usaha	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau	Penye-dia Bahan Per-leng-kapan Jalan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangku-tan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengu-asaan		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab		kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengembangan SDM b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi		8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiiki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanga-nan kecelakaan kerja, ruang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiiki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuk-tikan tersedia-nya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
355	27409	Industri Peralat-an	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penera-ngan Lainnya				NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan	Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk	- Konstruksi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif - Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	yang Mengandung Zat Radioaktif - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Radio-aktif	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanga-nan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi matervallf ungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja)			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri hilir logam serta per-alatan		penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kese-suaian kapa-sitas pro-duksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiiki dokumen bagan alur:		yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiiki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanga-nan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiiki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuk-tikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Ruang quality control					
356	27510	Industri Peralat-an Listrik Rumah Tangga	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuh-kan untuk menjalan-kan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membukti-kan:		pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 4. Dalam hal industri memproduksi selimut listrik, sikat gigi listrik,	- Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kese-hatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kese-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpa-		alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	hatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-			- Sertifi-kat Cara Pem-buatan yang Baik untuk Alat Kese-hatan (CPB untuk Alkes) - Surat Kete-rangan Pendu-kung Ekspor Impor - Sertifi-kat Bebas Jual		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiiki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi			Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Kete-rangan Pendu-kung Ekspor Impor - Sertifi-kat Pember itahua n Ekspor - Surat Perse-tujuan Pelaksa naan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Dalam hal mempro-duksi selimut listrik, sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, memiliki:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Doku-men perjan-jian kerja yang membukti-kan kepemi-likan karya-wan yang bekerja sebagai Penang-gung Jawab Teknis (PJT) untuk Alat Keseha-tan b. Surat Pernya-taan Komit-men Pemenu-han Cara					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4393

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuh-kan untuk menjalan-kan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-buktikan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa)		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu		hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk mengha-silkan produk industri hilir logam serta per-alatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kese-suaian kapa-sitas pro-duksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen		keselamatan kerja 5. Dalam hal industri memproduksi selimut listrik, sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM		(CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanggungjawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyim-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan, pengang-kutan dan distribu-si hasil produksi 5. Dalam hal mempro-duksi selimut listrik, sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, memiliki: a. Doku-men perjan-jian kerja yang mem-bukti-kan kepemi-likan karya-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wan yang bekerja sebagai Penang-gung Jawab Teknis (PJT) untuk Alat Keseha-tan b. Surat Pernya-taan Komit-men Pemenu-han Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Keseha-tan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		Mutu (ISO 9001) 6. Dalam hal industri memproduksi selimut listrik, sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-		(CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pemasar-an 4. Memiiki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribu-si hasil produksi 6. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedia-nya Fasilitas penanga-nan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi 7. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntu-kan penggunaan barang hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dalam hal memproduksi selimut listrik, sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, memiliki: a. Dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gung Jawab Teknis (PJT) untuk Alat Keseha-tan b. Surat Pernya-taan Komitmen Peme-nuhan Cara Pembuat-an yang Baik (CPB) untuk Alat Keseha-tan					
357	27520	Industri Peralat-an Elektro-termal	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Rumah Tangga					spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk		an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri hilir logam serta per-alatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kese-suaian kapa-sitas pro-duksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian		laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemasar-an					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu)	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustria 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membukti-kan:		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) a. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpa-		yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-		kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiiki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribu-si hasil produksi 5. Memiiki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuk-tikan tersedia-nya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus d. Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membukti-kan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri hilir logam serta per-alatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kese-suaian kapa-		malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggungjawab quality		dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiiki dokumen bagan alur: a. Pengada-an, peneri-maan, penyim-panan bahan baku		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (IS0 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, pengang-kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiiki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanga-nan kecelakaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuk-tikan tersedia-nya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
358	27530	Industri Peralat-an	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan	Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				- Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralatan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengu-asaan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk mengha-silkan produk industri hilir logam serta per-alatan		penanga-nan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kese-suaian kapa-sitas pro-duksi terpa-sang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-jawab bagian pemasar-an 4. Memiiki dokumen bagan alur:		untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribu-si hasil produksi 5. Memiiki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanga-nan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiiki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuk-tikan tersedia-nya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control					
359	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Tanda Daftar Badan Usaha Penye-dia	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Bahan Perlengkapan Jalan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan	(Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralat		
				Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-	-an Perta-hanan dan Kea-manan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangku-tan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4452

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
360	28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangku-tan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 111562 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-	Penilaian TKDN Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi	Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk peralatan quality control	duksi Alat Peralat-an Perta-hanan dan Kea-manan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
361	28112	Industri Motor Pemba-karan Dalam	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan trouble-shooting b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	ness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangku-tan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Mutu (ISO 9001)			
362	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	- Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	an Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen rencana	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralata c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membuktikan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kuali-tas pro-duk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpi-nan perusa-haan, penang-gung-jawab bagian produksi, penang-gung-jawab quality control, penang-gung-jawab bagian pengem-bangan SDM b. Penang-gung-		6. Memiliki dokumen hasil uji laboratorium independen secara periodik untuk produk yang dihasilkan 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengang-		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiiki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							facilities, yang membuktikan tersedia-nya: a. Ruang produksi khusus e. Ruang quality control					
363	28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanga-nan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Mutu (ISO 9001)			
364	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/ Katup	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	- Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP	an Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralat-an Pertahanan dan Keamanan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gunaan jenis, spe-sifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk men-jalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang membukti-kan: 1) Pengasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk meng-		a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri per-mesinan dan ke-tenaga-listrikan serta pera-latan pengujian kualitas produk 2) Kese-suaian kapa-sitas produksi ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku		periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang		keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
365	28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Peng-	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		gerak Mesin							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	(Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4513

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	Perta-hanan dan Kea-manan	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 111513 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
366	28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/ kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4528

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 112998 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen		buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan baku		peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang		termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
367	28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pem-	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifikat Tingkat Komponen	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		bakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-	Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang0an an troubles0h ooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuk0t ikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		berada pada Kab/Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pera-latan dan c. Perjanj-ian jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri per-mesinan dan ketena-galis-trikan serta pera-		perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							latan pengu-jian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasi-tas produ-ksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality		quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan,		secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengang-kutan dan distri-busi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuk-tikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/ plant layout		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
368	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting)	Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar perala-tan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi		lintas antar Kab/Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Foto mesin/ perala-tan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri per-mesinan dan ke-tenaga-listrikan		perawatan, penang-anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodi 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan		6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan distri-busi hasil produksi 5. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggu-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri per-mesinan		naan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusahaan		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
369	28171	Industri Mesin Kantor Dan Akun-tansi Manual	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyam-paian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab/Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penang-anan troubles-hooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
370	28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntan-si Elektrik	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengu-asaan (kepemi-		serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi	ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri per-mesinan dan ketena-galis-trikan serta pera-latan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapa-sitas produksi terpasang		barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distr-		5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ibusi hasil produksi					
				- Mikro - Kecil - Meneng -ah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menja-lankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa)		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan , penerimaa n, penyim-		5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Penge-masan, penyim-panan, penga-ngkutan dan distri-busi hasil produksi 5. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapa-		b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan peru-sahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi		untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Ruang quality control					
371	28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/s		pengangkutan , sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang	- Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ewa) mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkut-an dan distri-busi hasil produksi		5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan , penerimaa n, penyim-panan bahan baku		kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan:		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buktikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4601

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
372	28174	Industri Mesin Fotocopi	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 112923 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemilik-an/ sewa) mesin untuk		perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-	Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							meng-hasilkan produk industri per-mesinan dan ke-tenaga-listrikan serta pera-latan pengujian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapa-sitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangku-tan dan distribusi hasil produksi		periodik untuk peralatan quality control			
				- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Kab/Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-		a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan , penerimaa n, penyim-panan bahan baku		peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan:		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan peru-sahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkut-an dan distri-busi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buktikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4616

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
373	28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	Seluruh	- Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 112938 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-	Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ peralatan dan perjanjian jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri per-mesinan		gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan ke-tenaga-listrikan serta pera-latan pengu-jian kualitas produk 2) Kesesu-aian kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control		peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
374	28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab/Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersang-kutan	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan		berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
375	28191	Industri Mesin untuk Pem-bungkus , Pem-	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		botolan dan Penga-lengan							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersan-gkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi		lintas antar Kab/Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4651

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
376	28192	Industri Mesin Timbang -an	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 112886 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Penilaian TKDN Penggu-naan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara	Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri		
				- Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan	- Surat Kete-rangan Pendu-kung Ekspor Impor - Sertifi-kat Pember itahua n Ekspor - Surat Perse-tujuan Pelaksa naan Uji Klinik	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Mutu (ISO 9001)			
377	28193	Industri Mesin Pendingin	Seluruh	Kecil	Menengah · Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil	- Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri - Izin Pene-tapan Indus-tri Perta-hanan - Sertifi-kat Perse-tujuan Kelaik-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP	an Fasilitas Produksi Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control	Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar pera-latan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan:		produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi		garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ter-pasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran		secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
				- Kecil - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menja-lankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin		(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ pera-latan dan c. Perjanji-an jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepemi-likan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri per-mesinan		gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/s urat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan ke-tenaga-listrikan serta pera-latan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapa-sitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pim-pinan perusa-haan		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. Bagian pema-saran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyim-panan bahan bakz b. Proses produksi c. Proses quality control		berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkut-an dan distri-busi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penang-anan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen peren-canaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
378	28199	Industri Mesin untuk Keper-luan Umum Lainnya YTDL	Seluruh	- Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab/Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Kab/Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab/Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting) b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan peng-gunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penang-anan trouble-shooting)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
379	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutan-an	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi	ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan c. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik d. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
380	28221	Industri Mesin dan Perka-kas Mesin	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		untuk Pengerja -an Logam							(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu -naan	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil	Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 8. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4705

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
381	28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerja-an Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 112812 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan,		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
382	28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerja-an Bahan Bukan Logam dan Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan c. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 5. Memiliki dokumen berupa SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Mutu (ISO 9001)			
383	28224	Industri Mesin dan Perka-kas Mesin untuk Pengelas-an yang Meng-gunakan Arus Listrik	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)		-	
384	28230	Industri Mesin Metalurgi	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-	Dalam Rangka Peneli-tian Dan Pe-ngem-bangan - Surat Perse-tujuan Penilai-an TKDN Penggu-naan Mesin Pro-duksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi		hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar per-alatan b. Foto mesin/ peralatan dan c. Per-janjian jual beli/ sewa yang mem-bukti-kan: 1) Pengua-saan (kepe-milikan		an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri permesinan dan ketenagalistrikan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas		buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan perusahaan b. Bagian produksi dan/atau quality control dan c. bagian pemasaran		periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Peng-adaan, pe-nerima-an, pe-nyim-panan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pe-ngemas-an, pe-nyimpan-an, pengangku t-an dan distri-busi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penangan-an kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencana-an tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
385	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi	Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar per-alata b. Foto mesin/		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan dan c. per-janjian jual beli/ sewa yang mem-buktik-an: 1) pe-ngu-asa-an (ke-pemi-likan/ sewa) me-sin un-tuk me-ng-hasil-kan pro-duk in-dus-tri per-me-sinan dan ke-tena-ga-		an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lis-trik-an serta per-alat-an peng-ujian ku-alitas pro-duk 2) ke-se-suai-an kapa-sitas pro-duksi ter-pa-sang pada data usa-ha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi		laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan per-usahaan b. bagian produksi dan/ atau quality control dan c. bagian pe-masaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Peng-adaan, pe-nerima-an, penyim-panan bahan baku b. Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant layout facilities, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang quality control					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a. Spesifi-kasi mesin dan/ atau daftar peralat-an b. foto mesin/ peralat-an dan c. per-janjian jual beli/ sewa yang mem-buktik-an:		penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting) b. Kartu/su-rat/kode elektronik garansi malfungsi barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) pe-ngu-asa-an (ke-pemi-lik-an/ sewa) me-sin un-tuk me-ng-hasil-kan pro-duk in-dus-tri per-me-sinan dan ke-te-naga-lis-trik-an serta per-alat-an peng-ujian		hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kua-litas pro-duk 2) ke-sesu-aian kapa-sitas pro-duksi ter-pa-sang pada data usa-ha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a. Pimpinan per-usahaan		5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. bagian produksi dan/ atau quality control dan c. bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerima-an, pe-nyimpanan bahan baku b. Proses produksi c. Proses quality control d. Pengemasan, pe-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nyimpan-an, peng-angkut-an dan distribu-si hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-buktikan tersedianya Fasilitas penangan-an kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/ plant					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities, yang membuktikan tersedianya: a. Ruang produksi khusus b. Ruang quality control					
386	28250	Industri Mesin Peng-olahan Makan-an, Minuma n dan Tem-bakau	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting)	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-an trouble-shooting)		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Mutu (ISO 9001)			
387	28261	Industri Kabinet Mesin Jahit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kapal Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggguna-an barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan-		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
388	28262	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pe-ngering untuk Keperlu-an Niaga	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Sertifi-kat Tingkat Kom-ponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneli-tian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang	Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 2. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota ber-sangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
389	28263		Seluruh	Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifi-kat Tingkat	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Industri Mesin Tekstil				NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan c. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik d. Memiliki dokumen SOP proses			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi periodik untuk peralatan quality control			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6		Lokasi industrinya berada pada Provinsi ber-sangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkut-an, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a. Buku panduan pengguna-an barang		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan trouble-shooting) b. Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan quality control 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4806

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
390	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir, dan Sejenis-nya	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control*			
				Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan		Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control*			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*)		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4815

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
391	28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membukti-kan komitmen pelayanan minimal	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control*			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 6. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 7. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) buku panduan penggunaan		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
392	28291	Industri Mesin Per-cetakan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-	- Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control*			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4828

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151523 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
393	28292	Industri Mesin Pabrik Kertas	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode	Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control*			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
394	28299	Industri Mesin Keperlu-an Khusus Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: *a)* Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Peng-	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan *trouble-shooting)* *b)* Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Per-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control*	tahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat,		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode	Moda Laut dan/ atau Moda Udara	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen SOP proses kalibrasi periodik untuk peralatan *quality control* 6. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 7. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4853

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
395	29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)Penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk alat trans-		3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan	Pengembangan - Surat Penetapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV) - Surat Penetapan Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifi-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							portasi seperti: i. Pengelasan/ penyambunga ii. Pengecatan iii. Perakitan iv. Pengujian dan pengendalian mutu 2)Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri	kasi Kendaraan (NIK) - Surat Penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV) - Surat Penetapan Perusahaan yang Mengimpor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			Kendaraan Bermotor IKD - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Uji Berkala Kendaraan Bermotor Swasta dan APM		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4857

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:	-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a) Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk alat trans-		a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							portasi, seperti: i. Pengelasan/penyambunga ii. Pengecatan iii. Perakitan iv. Pengujian dan pengendalian mutu 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki surat Penetapan Kode			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penang-gung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/ atau b) Penang-gungjawab bagian pemasaran		Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	-	Seluruhnya	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk alat transportasi seperti: i. pengelasan/penyambungan ii. Pengecatan iii. Perakitan iv. Pengujian dan		elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							v. Pengendalian mutu 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengem-bangan SDM dan/atau b) penang-gung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an pengangkut-		membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang mem-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
396	29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penangan an *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi	Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Penetap-an Kode Per-usahaan Dalam Rangka Penerap-an Nomor Identifi-kasi Kendar-aan (NIK)	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 3. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan a) foto mesin/ peralatan dan b) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin		yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan	- Surat Penetapan Perusahaan yang Mengimpor Kendaraan Bermotor IKD - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk alat transportasi seperti: i. Pengelasan/penyambungan ii. Pengecatan iii. Perakitan iv. Pengujian dan pengendalian mutu 2)Kesesuaian kapasitas		(NIK) dari instansi/lembaga yang membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produk alat transportasi seperti: i. Pengelasan/penyambungan ii. Pengecatan iii. Perakitan iv. Pengujian dan pengendalian mutu 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4875

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan per-usahaan, penanggung jawab bagian produksi, penang-gung,jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penang-gung jawab bagian pemasaran		6. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk alat transportasi seperti: i. Pengelasan/penyambungan ii. Pengecatan iii. Perakitan iv. Pengujian		elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengen-dalian mutu 2)Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penang-gungjawab		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penang-gung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, pnerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an,		membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
397	29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,	- Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Penetapan Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan	- Surat Penetapan Perusahaan yang Mengimpor Kendaraan Bermotor IKD - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri	an Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Sertifikat Per-setujuan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen	Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja 6. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1 Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk kendaraan bermotor seperti: 1)pengelasan/penyambungan 2)stamping 3)perakitan 4)pengujian dan pengendalian mutu		elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) penang-gung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi		membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
398	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi	- Surat Penetapan Perusahaan yang Mengimpor Kendaraan Bermotor IKD - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuaian kapasi-		*trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penang-gung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penang-gung jawab		atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pe-ngemasan, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Ruang *quality control*					
399	30111	Industri Kapal dan Perahu	Industri kapal	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Penetapan Per-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk meng-		perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	usahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal - Surat Penetapan Perusahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal - Surat Persetujuan Penilai-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan kapal, perahu, bangunan lepas pantai atau bangunan terapung paling, seperti: i. Fasilitas pembangunan kapal, perahu, bangunan lepas pantai atau bangunan terapung		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Penetapan Industri Pertahanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/ *crane* 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi			- Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			*Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buktikan: penguasa-an (ke-pemilikan/ sewa) mesin untuk meng-hasilkan kapal, perahu d) bangunan lepas pantai atau bangunan terapung paling, seperti: 1)Fasilitas pem-bangunan kapal, perahu, bangunan lepas pantai		elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau bangunan terapung 2)Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/ *crane* 3)Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan,		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab bagian produksi, penang-gung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penang-gung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak 6. Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan kapal,		perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/surat /kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perahu, bangunan lepas pantai atau bangunan terapung paling, seperti: 1)Fasilitas pem-bangunan kapal, perahu, bangunan lepas pantai atau bangunan terapung 2)Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat		kepada pelanggan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							angkat/ *crane* 3) Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penang gungjawab bagian produksi, penang-gung jawab bagian pengem-		5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan SDM dan/atau b) penang-gung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
			Industri Perahu	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang		elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penang-gung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penang-gung jawab bagian pemasaran		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4933

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan a) foto mesin/ peralatan dan b) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan kapal,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perahu, bangunan lepas pantai atau bangunan terapung paling, seperti: i. Fasilitas pembangunan kapal, perahu, bangunan lepas pantai atau bangunan terapung ii. Fasilitas produksi,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bengkel produksi, alat angkat/ *crane* 2)Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha					
400	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Penetapan Perusahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal - Surat Penetapan Perusahaan Industri Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	manfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4938

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Dokumen Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin		Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-pemilikan /sewa) mesin untuk meng-hasilkan kapal, perahu, bangunan lepas pantai atau		barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangunan terapung paling, seperti: i. Fasilitas pembangunan kapal, perahu, bangunan lepas pantai atau bangunan terapung ii. Fasilitas produksi, bengkel produksi, alat angkat/ *crane*		*quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2)Kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) penang-gung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
401	30113	Industri Peralat-an, Perleng-kapan dan Bagian Kapal	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Penetapan Industri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of*		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	*Defence Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)Penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk 2)Kesesuaian kapasitas		b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penang-gung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penang-gung,jawab		yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang *quality control*					
402	30120	Industri Pembuat-an Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Industri pembuatan kapal untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Penetap-an Per-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk meng-		perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	usahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal - Surat Penetapan Perusahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal - Surat Persetujuan Penilai-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi					
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang		b) Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penang-gung jawab bagian produksi, penang-gung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penang-gung jawab bagian pemasaran		yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tata letak fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan a) foto mesin/ peralatan dan b) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting)* b) Kartu/ surat/kode			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha		elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4969

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4970

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
			Industri pembuatan perahu	Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga			NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan		Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: a) penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk meng-		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk b) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan,		minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penang-gung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, peny-impanan bahan baku b) Proses produksi		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
403	30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki:		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control* 3. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/peralatan dan		a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan kereta api dan komponennya, seperti: i. Fasilitas pemotongan dan/ atau pem-		4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.4991

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bentuk-an ii. Fasilitas perakit-an iii. Fasilitas penang anan material iv. Fasilitas penge-catan dan per-lakuan material lain v. Fasilitas peng-ujian dan pengen-dalian mutu		Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2)kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 4. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) penanggung jawab bagian pemasaran 5. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 6. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					
404	30300	Industri Pesawat Terbang dan Perleng-kapannya	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*	Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengemb angan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikat Organisa si Pe-megang Sertifikat Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan pesawat dan komponennya, seperti: i. Fasilitas perakitan dan/ atau Fasilitas produksi lainnya ii. Fasilitas penang-		b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan c) Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium	(*Production* Approval Holder) Pesawat Udara Dan/ Atau Komponen Pesawat - Sertifikat Organisasi Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anan material iii. Fasilitas peng-ujian dan pengen-dalian mutu 2) kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Udara, Dan Baling-baling Pesawat Udara *(Design Organiza tion Approval)* - Izin Pemasar -an Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Izin Penetap-an Industri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Proses produksi c) Proses *quality control* a) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of*		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*)	*Defence Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan pesawat dan komponennya, seperti: i. Fasilitas perakitan dan/ atau Fasilitas produk-		b) Kartu/ surat/ kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							si lainnya ii. Fasilitas penang-anan material iii. Fasilitas peng-ujian dan pengen-dalian mutu 2)kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM		yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian peng-embangan SDM dan/atau b) penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang mem-buktikan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-pemilikan /sewa) mesin		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk meng-hasilkan pesawat dan kompo-nennya, seperti: i. Fasilitas perakit-an dan/ atau Fasilitas produk-si lainnya ii. Fasilitas pena-nganan material iii. Fasilitas peng-ujian dan pengen-		buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalian mutu 2)kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian pengem-		rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan SDM dan/atau b) penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membukti-kan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
405	30400	Industri Kendaraan Perang	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Layanan asistensi teknik b) Penanganan layanan keluhan c) Lembar Data Keselamatan Bahan/ *Material Safety Data Sheet* d) Lembar Data Teknis Produk yang membuktikan komitmen	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Penetapan Industri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menghasilkan produk industri pertahanan dan keamanan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan,		pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki sertifikat konformansi produk 6. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi	Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthi-*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan			*ness of Defence Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagan alur proses dan membuktikan tersedianya a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-pemilikan /sewa) mesin		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Layanan asistensi teknik b) Penanganan layanan keluhan c) Lembar Data Keselamatan Bahan/ *Material Safety Data Sheet* d) Lembar Data Teknis Produk yang mem-buktikan komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk meng-hasilkan produk industri pertahan-an dan keamanan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM		pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat konformansi produk 7. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalan-kan kegiatan usaha	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-pemilikan		penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Layanan asistensi teknik b) Penanganan layanan keluhan c) Lembar Data Ke-selamatan Bahan/ *Material Safety Data Sheet* d) Lembar Data Teknis Produk yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri pertahan-an dan keamanan serta per-alatan pengujian kualitas produk 2) kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usah 3. Memiliki dokumen struktur		buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan e) Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laborato-rium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control* penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran		4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki sertifikat konformansi produk 7. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 9. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 10. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi - Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
406	30911	Industri Sepeda	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian	- Tanda Pendaf-	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Motor Roda Dua dan Tiga				NIB dan Sertifikat Standar	rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa:		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan	taran Tipe Kendaraan Bermotor - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk alat transportasi, seperti:		penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	- Surat Penetapan Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							i. Pengelasan/ penyambungan ii. Pengecatan iii. Perakitan iv. Pengujian dan pengendalian mutu 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certifi-*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi			*cate of Approval Facility Worthi-ness of Defence Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau		setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk alat transportasi, seperti: i. pengelasan/		(meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pe-nyam-bunga ii. Penge-catan iii. Perakit-an iv. Peng-ujian dan pengen-dalian mutu 2)Kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM		atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-		membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produks 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plant layout facilities, yang mem-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 siklus produksi atau selama-lamanya 6 bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/ kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemilikan /sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk alat trans-portasi, seperti: i. peng-elasan/ pe-nyam-bungan ii. peng-ecatan iii. perakit-an iv. penguji-an dan pengen-dalian mutu		yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2)kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau		penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki surat Penetapan Kode Perusahaan/ Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari instansi/ lembaga yang membidangi industri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengema-san, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membukti-kan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
407	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/ kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*)		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat transportasi dan peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuaian kapasi-		b) Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5051

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusaha-an, pe-nanggung-jawab bagian produksi, penang-gungjawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau		yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku, b) Proses produksi c) Proses *quality contro* d) *I*Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang membukti-kan tersedianya:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
408	30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Dalam hal industri memproduksi kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehat-	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pasien, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	an Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehat-		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk	an (CPB untuk Alkes) - Surat Ketera-ngan Pendu-kung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Kete-rangan Pendu-kung Ekspor Impor - Sertifikat	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Dalam hal industri memproduksi kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda pasien, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis	Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Dalam hal industri mem-produksi kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda pasien, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
409	30922	Industri Per-lengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*)		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik			
410	30990	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilai-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/ kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	an TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) b) Kartu/ Surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/besara n dari energi dan air baku,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/peralatan dan c) perjanjian jual		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*)		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk alat transportasi, seperti: i. pengelasan/penyambungan ii. pengecatan iii. perakitan		b) Kartu/surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iv. pengujian dan pengendalian mutu 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) pimpinan perusahaan, penanggungjawab bagian produksi, penanggung		yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) pen-anggung-jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, pe-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nyimpanan, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membukti-kan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities,*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
411	31001	Industri Furnitur dari Kayu	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	satu hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan		satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan pengusaha-an sumber bahan baku berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan dan 5. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan peng-usahaan sumber bahan baku berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan dan 6. Memiliki sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001)			
412	31002	Industri Furnitur dari Rotan	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan atau Bambu							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen	Dalam Negeri	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-masing jenis perizinan pengusaha-an sumber bahan baku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan pada pelanggan dan 5. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a) dokumen legalitas bahan baku, berupa b) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) c) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atau d) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masing jenis perizinan pengusaha-an sumber bahan baku berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ter-dokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan 5. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan dan 6. Memiliki sertifikat Sistem Managemen Mutu (ISO 9001)			
413	31003	Industri Furnitur dari Plastik	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi	Dalam Negeri		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki dokumen berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b) foto mesin/peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1) penguasa-an (kepemilikan/sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri plastik dan karet serta peralatan penguji-		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an kualitas produk 2) kesesuai-an kapasitas produksi terpa-sang pada data usah 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung		berupa SOP layanan minimal pelanggan terhadap penggunaan barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produks 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
414	31004	Industri Furnitur dari Logam	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium		satu hamparan lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5115

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri hilir logam serta peralatan pengujian kualitas produk		independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku, b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-buktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen berupa daftar peralatan, foto peralatan yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) dan peng-gunaan peralatan untuk memitigasi risiko pencemaran lingkungan					
415	31009	Industri Furnitur Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil	Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
416	32111	Industri Permata	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji	- Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif - Konstruksi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	- Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	Radio-aktif	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk meng-		perundang-undangan 3. Memiliki: a) Buku panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) b) Kartu/ surat/kode elektronik garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri material bangunan dan konstruksi serta peralatan peng-ujian kuali-tas produk 2) kesesuaian kapasitas produk-si terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari:		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) pimpinan perusahaan b) bagian produksi dan/atau *quality control* dan c) bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan,		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengangkutan dan distribusi hasil produksi e) Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*, yang mem-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							buktikan tersedianya: a) Ruang produksi khusus b) Ruang *quality control*					
417	32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium		berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
418	32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Keperluan Pribadi							peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Mesin Produksi Dalam Negeri		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
419	32114	Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	- Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
420	32115	Industri Perhiasan Mutiara	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
421	32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji		berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
422	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji	- Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
423	32201	Industri Alat Musik Tradisio-nal	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an,	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penangaan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang mem-buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-*		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									shooting) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
424	32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisio-nal	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5185

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Mutu (ISO 9001)			
425	32300	Industri Alat Olahraga	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-*		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									shooting) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
426	32401	Industri Alat Permain-an	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis	Lokasi industri-nya berada pada Kab./ Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									trouble-shooting) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpan-an, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Mutu (ISO 9001)			
427	32402	Industri Mainan Anak-anak	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-*		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									shooting) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
428	32501	Industri Furnitur untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5215

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk		atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku, a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-			Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 5. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			Kesehatan dan PKRT Tertentu - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5218

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan	Ekspor Impor - Sertifikat Pemberi-tahuan Ekspor - Surat Per-setujuan Pelak-sanaan Uji Klinik - Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151141 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk		3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang	dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuai-an kapasi-tas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab		Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(PJT) Alat Kesehatan 6. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu Peralatan Kesehatan (ISO 13485) 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5226

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau		Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Penanggun jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas-an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi 7. Memiliki dokumen perjanjian kerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 8. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
429	32502	Industri Peralat-an Kedokter-an dan Kedokter-an Gigi, Per-	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		lengkapan Ortho-pedic dan Prosthetic					asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau		sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji	- Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Pendaf-taran Bahan Berba-haya - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian		laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kualitas produk 2)kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pe-ngemasan, penyimpan-			- Izin Edar Per-bekalan Kesehat-an Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pem-buatan yang Baik untuk Alat Kesehat-an (CPB untuk Alkes) - Surat Kete-rangan Pen-dukung		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 5. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB)			Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Kete-rangan Pen-dukung Ekspor Impor Sertifikat Pemberi-tahuan Ekspor - Surat Per-setujuan Pelaksan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk Alat Kesehatan			aan Uji Klinik		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, pe-nyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk meng-		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan,		5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku, b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 6. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu Peralatan Kesehatan (ISO 13485) 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggungj awab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab		Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi 7. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan 8. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
430	32503	Industri Kaca Mata	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi	hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Dalam hal industri memproduksi kacamata dan lensa sebagai alat bantu kesehatan, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehat-an Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehat-an Impor - Izin Edar Per-bekalan Kesehat-an Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri		
				Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Izin Edar Per-bekalan	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5248

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi	Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Dalam hal industri memproduksi kacamata dan lensa sebagai alat bantu	Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kesehatan, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 6. Dalam hal industri memproduksi kacamata dan lensa sebagai alat bantu kesehatan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
431	32509	Industri Peralat-an Kedokter-an dan Kedokter-an Gigi serta Perleng-kapan Lainnya	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Alat	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi			Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) alat kesehatan yang bekerja penuh waktu dengan rincian sebagai berikut: 5. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dengan kualifikasi yang sesuai masing-masing sebagai:			Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik - Izin Penetapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Penanggung jawab produksi b) Penanggung jawab pemastian mutu dan c) Penanggung jawab pengawasan mutu 6. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthi-*		
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis,	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpaan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control*	*ness of Defence Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan		secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengujian kualitas produk 2)kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality*		Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							control, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) alat kesehatan yang bekerja penuh waktu dengan rincian sebagai berikut:					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5264

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dengan kualifikasi yang sesuai masing-masing sebagai: 1) Penanggung jawab produksi 2) Penanggung jawab pemastian mutu dan 3) Penanggung jawab pengawasan mutu					

SK No 151789 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan a) foto mesin/peralatan dan b) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan:		alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1)penguasa-an (ke-pemilikan /sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha		bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu Peralatan Kesehatan (ISO 13485) 6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi 7. Memiliki dokumen perjanjian kerja yang membuktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) alat kesehatan yang bekerja penuh waktu dengan rincian sebagai berikut: a) Memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang dengan kualifikasi yang sesuai masing-masing sebagai: 1)Penang-gung jawab produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2)Penang-gung jawab pemastian mutu dan 3)Penang-gung jawab pengawas-an mutu 8. Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
432	32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Perleng-kapannya							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil	Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik	Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
433	32902	Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan	- Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble*		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									shooting) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
434	32903	Industri Kerajinan YTDL	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5295

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Mutu (ISO 9001)			
435	32904	Industri Peralatan untuk Pelindung Kesela-matan	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan		
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamaan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk	Keamanan - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dihasilkan secara periodik 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	(*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) Perjanjian jual beli/sewa		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5303

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan: 1)Penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri alat kesehatan serta peralatan pengujian kualitas produk 2)Kesesuaian kapasitas produksi terpasang		4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen rencana spesifikasi dan peruntukan penggunaan barang hasil produksi					
436	32905	Industri Serat	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Sertifikat Tingkat Kompo-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5307

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sabut Kelapa							industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan	nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan	Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									quality control secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
437	32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulang-an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia 4. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu	- Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							meng-hasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulang-an keadaan darurat bahan kimia yang terdiri atas: a) penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelolaan		keselamatan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar bahan kimia dalam rangka pencegahan dan penang-gulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment)* b) prosedur pencegahan dan penang-gulangan keadaan darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan kimia meliputi: 1)personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit terdiri dari: i. Koordinator 1 orang ii. Komandan 1 orang iii. Petugas 1 orang 2)sistem komunikasi tanggap darurat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3)pedoman teknis operasi tanggap darurat 4)peralatan dan perlengka-pan tanggap darurat 5)perenca-naan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-an bahan baku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membukti-kan tersedianya a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk me-nampung dan menetralisir limbah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 6. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan / sewa) prasarana mitigasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							risiko sesuai dokumen penilaian risiko 7. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan mem-buktikan tersedianya bangunan fisik sekurang-kurangnya berupa: a) ruang penerimaan dan penyimpan-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku a) ruang produksi Elemen Bakar Uranium b) ruang penyimpan-an Elemen Bakar Uranium c) Fasilitas pengelolaan limbah					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat pencegahan dan penanggulang-an keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan usaha industri kimia		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri kimia serta peralatan pengujian kualitas produk 3. Memiliki dokumen pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan		4. Menyediakan informasi minimal meliputi: a) Sertifikat Analisa Produk (COA – *Certificate of Analysis*) b) Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (*Globally Harmonized System/*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kimia yang terdiri atas: 1)Penilaian risiko terhadap alur proses produksi dan pengelola-an daftar bahan kimia dalam rangka pencegah-an dan penang-gulangan keadaan darurat bahan kimia dalam kegiatan		*GHS*) yang mem-buktikan dilaksana-kannya pelayanan minimal pada pelanggan 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha industri kimia yang disusun secara mandiri (*self assesment*) 2) Prosedur pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia meliputi: i. Personil tanggap darurat jumlah personil paling sedikit		7. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan *quality control* secara periodik			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5330

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari: a. Koordinator 1 orang b. Komandan 1 orang c. Petugas 1 orang 3) sistem komunikasi tanggap darurat 4) pedoman teknis operasi tanggap darurat 5) peralatan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perlengkapan tanggap darurat 6) perencanaan latihan tanggap darurat 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpan-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto yang mem-buktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya: a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila mengguna-kan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi 7. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan penguasaan (kepemilikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/sewa) prasarana mitigasi risiko sesuai dokumen penilaian risiko 8. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya bangunan fisik sekurang-kurangnya berupa: a) ruang penerimaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan penyimpan-an bahan baku a) ruang produksi Elemen Bakar Uranium b) ruang penyimpan-an Elemen Bakar Uranium c) Fasilitas pengelolaan limbah					
438	32909	Industri Pengolaan Lainnya YTDL	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan,	Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Sertifikasi Nomor	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen	Kontrol Veteriner - Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Izin Edar Per-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Dalam hal industri memproduksi tongkat sebagai alat bantu jalan, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan	bekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk		
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil	Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Pen-	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik	dukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 6. Dalam hal industri memproduksi tongkat sebagai alat bantu jalan, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan *trouble-shooting*) atau b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5346

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penataan rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Dalam hal industri mem-produksi tongkat sebagai alat bantu jalan, memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk Alat Kesehatan			
439	33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangu-nan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses pe-nyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5351

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
440	33112	Reparasi Produk Senjata dan Amunisi	Seluruh	Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai	- Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri - Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan: 1)penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk meng-		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Layanan asistensi teknik b) Penanganan layanan keluhan c) Lembar Data Keselamatan Bahan/ *Material Safety Data Sheet* d) Lembar Data Teknis Produk yang membuktikan komitmen pelayanan minimal	Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Per-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hasilkan produk industri pertahanan dan keamanan serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpan-		kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki sertifikat konformansi produk 6. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi	setujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemas- e) an, penyimpan-an, pengangkut-an dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur			Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses dan membuktikan tersedianya: a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila meng-gunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk me-nampung dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-pemilikan /sewa)		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Layanan asistensi teknik b) Penanganan layanan keluhan c) Lembar Data Keselamatan Bahan/ *Material Safety Data Sheet* d) Lembar Data Teknis Produk yang mem-buktikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk meng-hasilkan produk industri pertahan-an dan keamanan serta peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur organisasi SDM		komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran 4. Memiliki dokumen bagan alur:		keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat konformansi produk 7. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5361

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan mem-buktikan tersedianya: a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila meng-gunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi Peng-olahan Air Limbah)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk me-nampung dan me-netralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen rencana peng-gunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) siklus produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-pemilikan		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki: a) Layanan asistensi teknik b) Penanganan layanan keluhan c) Lembar Data Keselamatan Bahan/ *Material Safety Data Sheet* d) Lembar Data Teknis Produk yang mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/sewa) mesin untuk meng-hasilkan produk industri pertahan-an dan keamanan serta peralatan pengujian kualitas produk 2)kesesuai-an kapasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen struktur		buktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan 4. Memiliki dokumen hasil kalibrasi peralatan *quality control* secara periodik atau hasil uji laboratorium independen atas produk yang dihasilkan secara periodik 5. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							organisasi SDM minimal terdiri dari: a) Pimpinan perusahaan, penanggung jawab bagian produksi, penanggung jawab *quality control*, penanggung jawab bagian pengem-bangan SDM dan/atau b) Penanggung jawab bagian pemasaran		rambu keselamatan kerja 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) 7. Memiliki sertifikat konformansi produk 8. Memiliki gudang penyimpanan pada setiap divisi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen bagan alur: a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku b) Proses produksi c) Proses *quality control* d) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 5. Memiliki dokumen berupa foto					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja 6. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant layout facilities* sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya a) Tempat Penampung Sementara (TPS) B3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) b) Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi					
441	33119	Reparasi Produk	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	-	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Logam Pabrikasi Lainnya							wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan		berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa			
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyeleng-garaan jasa,		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyeleng-garaan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
442	33121	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa	an Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*):	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan 6. Dalam hal barang yang dilakukan reparasi merupakan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi: a) pesawat uap, bejana tekanan, dan tangki timbun b) pesawat angkat dan	Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5377

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pesawat angkut c) pesawat tenaga dan produksi d) listrik, elevator, dan escalator e) penyalur petir dan peralatan elektronik f) proteksi kebakaran, dan/atau g) angkur, memenuhi ketentuan: 1)Memiliki dokumen pas photo penang-gung jawab per-usahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2)Memiliki dokumen Sertifikat Ahli K3 dan tenaga teknis K3 sesuai bidan 3)Memiliki dokumen Tenaga Ahli K3 dan Te-naga Teknis K3, meliputi: i. surat pernya-taan bekerja penuh waktu di per-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha-an ii. fotocopy digital (hasil scan) KTP dan daftar riwayat hidup dan iii. Sertifi-kat ke-peserta-an BPJS Ketena-gakerja-an dan BPJS Kesehe-tan 4) Memiliki dokumen bukti			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5380

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Wajib Lapor Ketenaga-kerjaan di Perusaha-an (WLKP) online 5) Memiliki NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan keterang-an status valid 6) Memiliki dokumen Standar Opera-tional Prosedure (SOP) reparasi teknik K3			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7) Memiliki dokumen Standar Operational Prosedure (SOP) kegiatan usaha pemberian jasa reparasi teknik K3 8) Memelihara dokumen kegiatan usaha pemberian jasa reparasi Teknik K3			
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen struktur	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5382

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa, disertai dengan uraian tugas dan fungsi kerja masing-masing posisi jabatan/ pekerjaan 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151907 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor, dan 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses pemberian jasa reparasi mesin 4. Memiliki dokumen berupa:		4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 7. Dalam hal barang yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/peralatan, sebagai sarana penunjang c) Dalam hal barang yang dilakukan reparasi merupakan objek Keselamatan dan Kesehatan		dilakukan reparasi merupakan objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), meliputi: a) pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun b) pesawat angkat dan pesawat angkut c) pesawat tenaga dan produksi d) listrik, elevator, dan escalator e) penyalur petir dan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5385

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kerja (K3), meliputi 1)Pesawat uap, bejana tekanan , dan tangki timbun 2)Pesawat angkat dan pesawat angkut 3)Pesawat tenaga dan produksi listrik, elevator, dan escalator 4)Penyalur petir dan peralatan elettronik		peralatan elektronik f) proteksi kebakaran, dan/atau g) angkur, memenuhi ketentuan: 1)Memiliki dokumen bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) online 2) Memiliki NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5)Proteksi kebakar-an, dan/ atau 6)angkur, memiliki dokumen tambahan berupa: i. Pas poto penang-gung jawab per-usaha-an Sertifi-kat Ahli K3 dan tenaga teknis K3 se-sesuai bidang		dengan kete-rangan status valid 3) Memiliki dokumen Standar Operat-ional Prosedure (SOP) reparasi teknik K3 4) Memiliki dokumen Standar Opera-tional Prosedure (SOP) kegiatan usaha pemberi-an jasa			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5387

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Dokumen Tenaga Ahli K3 dan Tenaga Teknis K3, meliputi a. surat pernyataan bekerja penuh waktu di perusahaan b. foto copy digital		reparasi teknik K3 5) Memelihara dokumen kegiatan usaha pemberian jasa reparasi Teknik K3			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(hasil scan) KTP dan daftar riwayat hidup dan c. Sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan					
443	33122	Reparasi Mesin	Seluruh	- Kecil	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian	-	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		untuk Keperluan Khusus		- Menengah		NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa		berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar			1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa		berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/supervisor 4 orang level teknis/operasi-onal/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana		4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5393

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
444	33131	Repara-si Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralat-an Navigasi Dan Pe-ngontrol	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses	- Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Sertifikat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur	Kelaikan Fasilitas Pemeli-haraan Per-tahanan (*Certifi-cate of Approval Facility Worthi-ness of Defence Main-tenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara	lintas antar Provinsi	
				Besar			-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian		Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
					Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar			wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna		berada pada Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5397

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
445	33132	Reparasi Peralatan Iradiasi, Elektro-medis dan Elektroterapi	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
446	33133	Reparasi Peralatan Fotografi dan Optik	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence*	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	*Main-tenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
447	33141	Reparasi Motor Listrik,	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Izin Penetap-an	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Generator dan Transformator							Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses pe-nyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa	Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval*	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur	*Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
448	33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	Seluruh	- Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
449	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Sertifikat Per-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur	setujuan Kelaikan Fasilitas Pemeli-haraan Per-tahanan (*Certifi-cate of Approval Facility Worthi-ness of Defence Main-tenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau	hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	Moda Udara		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
450	33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	Reparasi Kapal	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	- Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Kegiatan Utama - Izin Penetap-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi	an Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajer, 1 orang level profesio-nal/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasio-nal/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana		untuk mengukur	*Approval Facility Worthi-ness of Defence Main-tenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/supervisor 4 orang level teknis/operasional/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa		an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
			Reparasi Perahu dan Bangunan Terapung	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: Industri skala besar: 2 orang		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							level manajer, 2 orang level profesional/supervisor 4 orang level teknis/operasional/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan		kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) foto mesin/peralatan, sebagai sarana penunjang					
451	33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesio-nal/ supervisor, dan 1 orang level teknis/		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5429

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/supervisor 4 orang level teknis/operasional/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai		jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
452	33153	Reparasi Pesawat Terbang	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses	- Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Sertifikat Per-	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor,		penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur	setujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 4. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 5. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana penunjang					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5435

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/opera-sional/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar		3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
453	33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	Reparasi Kendaraan Perang	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasio-nal/staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level		keselamatan alat dan proses pe-nyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur	- Sertifikat Per-setujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliha raan Per-tahanan (*Certifi-cate of Approval Facility Worthi-ness of Defence Main-tenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf c) Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 3. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan			Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan		Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5440

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa:		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
			Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Perang	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
464	33190	Reparasi Peralatan Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 5. Memiliki sertifikat		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
455	33200	Instalasi/ Pe-masangan Mesin dan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Peralat-an Industri							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
456	35301	Pengada-an Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jas 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf a) Industri skala menengah: 1 orang level		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5455

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajer, 1 orang level profesio-nal/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jas 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana		untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/opera-sional/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa		an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
457	35302	Produksi Es	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan meng-implementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan	Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri - Izin Edar Pangan Olahan	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 5. Memiliki Label Higiene	- Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sanitasi Pangan 6. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Pangan Olahan - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan,		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi atau selama-lamanya 6 (enam) bulan ke depan 2. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b) foto mesin/ peralatan dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan: 1)penguasa-an (ke-pemilikan /sewa)		serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP dan meng-implementasi-kan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpan-an produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 4. Memiliki dokumen SOP dan	Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penera-pan Program Manaje-men Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Per-setujuan Pelaksan aan Uji Klinik Pangan Olahan - Label Higiene		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mesin untuk meng-hasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) kesesuai-an ka-pasitas produksi terpasang pada data usaha 3. Memiliki dokumen bagan alur:		mengimplemen-tasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 5. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Sanitasi Pangan (HSP)		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5464

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku a) Proses produksi b) Proses *quality control* c) Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi 4. Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/*plant*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi					
458	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja	basan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5467

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyediakan informasi minimal meliputi: a) Sertifikat Analisa Produk (*COA – Certificate of Analysis*) b) Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS – *Safety Data Sheet*) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally *Harmonized System/ GHS)*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan 3. Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja 4. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan *quality control* secara periodik			
459	38301	Pemulih-an Material Barang Logam	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-an Dan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi	Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen jenis dan volume	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pemberian jasa 3. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/operasi-onal/staf 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) bisnis proses penjualan jasa b) proses layanan purna jual penjualan jasa		SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5476

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sewa) mesin/ peralatan sebagai sarana penunjang untuk menghasil-kan jasa					
460	38302	Pemulih-an Material Barang Bukan Logam	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan	- Sertifikat Tingkat Kompo-nen Dalam Negeri - Pertim-bangan Teknis Pembe-basan Bea Masuk Dalam Rangka Peneliti-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang	an Dan Pengem-bangan - Surat Per-setujuan Penilai-an TKDN Peng-gunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	satu hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha pemberian jasa 3. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4		peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang level teknis/operasi-onal/staf 4. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 5. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5481

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
461	45201	Reparasi Mobil	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	- Uji Berkala Kendara an Ber-motor Swasta dan APM - Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Sertifikat Per-setujuan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi	Kelaikan Fasilitas Pemeli-haraan Per-tahanan (*Certifi-cate of Approval Facility Worthi-ness of Defence Main-tenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5485

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
462	45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
463	58120	Penerbit-an Direktori Dan Mailing List	Khusus penerbitan daftar informasi (database) yang dapat dipublikasi-kan dalam bentuk elektronik	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik 3. Memiliki sertifikat	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa		lintas antar Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/supervisor 4 orang level teknis/		bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa.		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pen-dukung dan b) foto peralatan prasarana pen-dukung					
464	58130	Penerbit-an Surat Kabar, Jurnal dan	Khusus Komik	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Buletin atau Majalah							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 7. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									konten SARA dan 8. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa		an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Menjamin konten dalam produk tidak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang		mengandung konten SARA dan 7. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			
465	58190	Aktivitas Penerbit-an Lainnya	Khusus penerbitan secara elektronik atau secara online, untuk materi	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penerbitan lainnya seperti foto-foto, seni grafis, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan), material periklanan, informasi statistik dan informasi						peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf c) Industri skala besar:		SDM penyedia jasa			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5501

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5502

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana pen-dukung					
466	58200	Penerbit-an Piranti Lunak (Software)	Selain Penerbitan Gim	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	- Izin Pe-masaran Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an - Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan dan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5504

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/operasi-onal/staf 3. Memiliki dokumen bagan		2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa	Moda Udara - Klasifi-kasi Produk Gim		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
467	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Khusus untuk Animasi	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Tanda Lulus Sensor	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5506

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151353 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 7. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/operasi-onal/sta 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan,		kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 7. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai sarana penunjang					
468	59122	Aktivitas Pasca-produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Khusus untuk Animasi	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan	- Pemberi-tahuan Pem-buatan Film	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 7. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 8. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5513

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4		perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai		5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 7. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5515

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana penunjang					
469	61929	Jasa Multi-media Lainnya	Khusus untuk teknologi *augmented/ virtual reality*	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5516

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151363 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/operasi-onal/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana		SDM penyedia jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
470	62011	Aktivitas Pengem-bangan Video Game	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 5. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 6. Memberikan rekomendasi batas usia		lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5520

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengguna produk			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151367 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5521

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/supervisor 4 orang level teknis/operasi-onal/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa a) Memiliki dokumen berupa daftar peralatan prasarana		SDM penyedia jasa 4. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 5. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
471	62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan melalui Internet (*E-Commerce*)	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa		lintas antar Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ope-rasional/staf		bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
472	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Izin Penetapan Industri Pertahanan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Media Imersif							sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 4. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 5. Memberikan rekomendasi	- Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence*	berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									batas usia pengguna produk	*Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5528

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/operasi-onal/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana		SDM penyedia jasa 4. Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan 5. Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
473	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa		lintas antar Provinsi	
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/		bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional/ staf 5. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 6. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
474	62021	Aktivitas Konsulta-si Keaman-	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Izin Pemasar an Alat Peralatan Per-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Informasi					ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa	tahanan dan Keaman-an - Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Per-tahanan dan Keaman-an - Sertifikat Per-setujuan Kelaikan Fasilitas Produksi	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa:			Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5536

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis		jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
475	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf		undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB)	- Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes) - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk	lintas antar Kab./Kota bersamgkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) Daftar peralatan prasarana pendukung dan		untuk Alat Kesehatan	Dalam Negeri - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Foto peralatan prasarana pendukung 5. Dalam hal memproduksi Alat Kesehatan, memiliki: a) Dokumen perjanjian kerja yang membuktikan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat Kesehatan b) Memiliki Surat Pernyataan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5541

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151388 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5542

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa		jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 4. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penanggung Penanggung Jawab Teknis yang memiliki sertifikat pelatihan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung 5. Dalam hal memproduksi Alat Kesehatan, memiliki: a) Dokumen perjanjian kerja yang membukti-kan kepemilikan karyawan yang bekerja sebagai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penanggung Jawab Teknis (PJT) Alat KesehataN b) Memiliki Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Cara Pembuatan yang Baik (CPB) untuk Alat Kesehatan					
476	62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Kom-puter Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		satu hamparan lintas antar Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa		hamparan lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5547

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
477	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki SOP keamanan data	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan sistem elektronik 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	(*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5549

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki SOP keamanan data		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151396 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan,		dan sistem elektronik 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai sarana penunjang b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
478	63112	Aktivitas Hosting dan YBDI	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor,		jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
				Besar	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen struktur	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar	organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		Provinsi bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pen-dukung dan b) foto peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana pen-dukung					
479	63121	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kom-petensi SDM penyedia jasa	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5557

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/supervisor 4 orang level teknis/operasional/staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) foto peralatan prasarana pendukung					
480	63122	Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Selain Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP)	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	- Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Distribusi - Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	- Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Kawasan Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf		bidang perindustrian 2. Memiliki SOP keamanan data dan sistem elektronik dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pen-dukung dan b) foto peralatan prasarana pen-dukung					
481	68130	Kawasan Industri	Seluruh	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen bukti kepemilikan atau hak peng-gunaan/pe-manfaatan tanah, berupa:	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Kawasan Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali	- Sertifikat Akredita-si Kawasan Industri - Surat Kete-rangan	Seluruhnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Sertifikat Hak Milik b) Sertifikat Hak Guna Banguna c) Sertifikat Hak Pakai d) Sertifikat Hak Pengelolaan atau e) Akta Notaris Pelepasan Hak atas tanah, yang mem-buktikan kesesuaian batas minimal ke-pemilikan dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu		sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memenuhi Standar Kawasan Industri 3. Menyediakan lahan bagi kegiatan Industri Kecil dan Menengah 4. Memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai peraturan perundangan	Kawasan Industri Halal		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5564

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hamparan dan batasan paling sedikit penyediaan lahan bagi kegiatan industri kecil dan menengah 2. Memiliki dokumen berupa: a) Rencana pemanfaat-an lahan b) laporan proses dan kemajuan pembangun-an Kawasan Industri c) rencana induk		5. Memfasilitasi hubungan industrial bagi Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5565

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*master-plan*) Kawasan Industri yang membuktikan kesesuaian persentase penggunaan lahan berdasarkan ketentuan standar kawasan industri d) Tata Tertib Kawasan Industri e) struktur organisasi dilengkapi dengan tugas dan fungsi jabatan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5566

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen foto yang membuktikan ketersediaan/ realisasi pembangunan a) Infrastruktur dasar, meliputi jaringan jalan, saluran drainase, dan instalasi pengolahan air baku b) Infrastruktur penunjang berupa gedung pengelola Kawasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Industri meliputi sarana dan prasarana serta ruangan					
482	70204	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan	- Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, *Heli-port* Dan *Water-base*	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa		lintas antar Provinsi	
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5569

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa		hamparan lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5570

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
483	71102	Aktivitas Keinsi-nyuran dan Konsulta-si Teknis YBDI	Sektor Industri	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151472 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pen-dukung dan b) foto peralatan prasarana pen-dukung					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/		bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
484	71201	Jasa Sertifikasi	Sertifikasi produk, manajeman mutu,	- Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Pendaf-taran Lembaga Penilai-an	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			haccp, dan lingkung-an				ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil:		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup	Kesesu-aian (LPK)	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 orang level teknis/ operasio-nal/staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) bisnis proses penjualan jasa b) proses layanan		usaha pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							purna jual penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang dan c) perjanjian jual beli/sewa yang mem-buktikan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan (ke-pemilikan/ sewa) mesin/ peralatan sebagai sarana penunjang untuk menghasil-kan jasa					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf		2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5580

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risikc	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dokumen bagan alur: a) bisnis proses penjualan jasa b) proses layanan purna jual penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b) foto mesin/peral		5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atan, sebagai sarana penunjang dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin/peralatan sebagai sarana penunjang untuk menghasilkan jasa					
485	71205		Seluruh	- Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen struktur	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	- Dekomisioning	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Jasa Kalibrasi/ Metrologi					organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit:		Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada	Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan	Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) bisnis proses penjualan jasa		ruang lingkup usaha pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur	Sumber Radiasi Pengion - Pernyata-an Pembe-basan Fasilitas Kalibrasi yang Meng-gunakan Sumber Radiasi Pengion		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) proses layanan purna jual penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang dan c) perjanjian jual beli/sewa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin/ peralatan sebagai sarana penunjang untuk menghasilkan jasa					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/		bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur: a) bisnis proses penjualan jasa b) proses layanan purna jual penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang		SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang dan c) perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin/ peralatan sebagai sarana penunjang untuk menghasilkan jasa					
486	71206	Jasa Commis-	Seluruh	- Kecil	Menengah Tinggi		1. Memiliki dokumen	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian	-	Lokasi industrinya	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5589

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		sioning Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality control* (QC)		- Mene-ngah		NIB dan Sertifikat Standar	struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan		wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa		berada pada Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf c) Industri skala besar: 2 orang level manajer, 2 orang level		4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							profesio-nal/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/		perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional/ staf c) Industri skala besar: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf d) Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa e) Memiliki dokumen berupa: 1)spesifikasi mesin		Mutu (ISO 9001)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan 2)foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
487	71209	Analisis dan Uji Teknis Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Dekomi-sioning Fasilitas Kalibrasi yang Meng-gunakan Sumber Radiasi Pengion	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf		undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat	- Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pernyataan Pembebasan Fasilitas	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan,		kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan 6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa	Kalibrasi yang Meng-gunakan Sumber Radiasi Pengion - Penanda dan/atau Perunut Meng-gunakan Zat Radioaktif		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis		alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang		6. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)			
488	72102	Peneliti-an dan Pengem-bangan Teknologi	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Rekayasa							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses pe-nyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk mengukur			
489	72104	Peneliti-an Dan Pengem-bangan Bioteknol ogi	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan	- Penye-lengga-raan Bank Plasma	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasio-nal/staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesio-nal/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasio-nal/staf		3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 3. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/peralatan, sebagai sarana penunjang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan,		jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
490	72109	Peneliti-an Dan Pe-ngembang an Ilmu Pengetahu an Alam Dan Teknologi Rekayasa Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur		satu hamparan lintas antar Provinsi	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5611

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
491	74111	Aktivitas Desain Alat Transportasi dan Permesinan	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	- Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, *Heli-port* Dan	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	*Water-base*	lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			
492	74112	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			
493	74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Apparel							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5620

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

SK No 151186 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			
494	74114	Aktivitas Desain Industri Strategis	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Izin Penetap-an Industri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Pertahanan							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan	Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthi-*	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	*ness of Defence Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			
495	74115	Aktivitas Desain Alat Komuni-kasi dan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Izin Penetap-an Industri	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Elektronika							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan	Pertahanan - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthi-*	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	*ness of Defence Pro-duction*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			
496	74116	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5628

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Permai-nan							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			
497	74117	Aktivitas Desain Produk Kesehat-an,	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi	- Hasil Uji Klinik dan Peneliti-an Klinik	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kosmetik dan Perlengkapan Laboratorium							setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan	Obat Bahan Alam - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam	Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	- Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Praklinik Suple-men Kesehat-an - Per-setujuan Pelaksa-naan Uji Klinik Kosme-tik - Per-setujuan Pelaksan aan Uji Klinik Obat Bahan Alam		
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa	- Per-setujuan Pelaksan aan Uji Klinik Obat Kuasi - Per-setujuan Pelaksan aan Uji Klinik Suple-men Kesehat-an - Per-setujuan Pelaksan aan Uji Praklinik Kosme-tik - Per-setujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan		
498	74118	Aktivitas Desain	Seluruh	- Kecil - Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data	-	Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5635

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penge-masan				NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang		Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5638

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
499	74119	Aktivitas Desain Industri Lainnya	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 4. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa dan 5. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ruang lingkup usaha pemberian jasa			
500	74909	Aktivitas Profesi-onal, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	Selain pengangkat-an bmkt	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	- Sertifikat Lembaga Inspeksi Kesela-matan Bandar Udara, *Heli-port* Dan *Water-base*	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: a) Industri skala kecil: 1 orang level teknis/ operasional/ staf b) Industri skala menengah: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf		SDM penyedia jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c) Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 3. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pen-dukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2		setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 3. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 3. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 4. Memiliki dokumen berupa: a) daftar peralatan prasarana pendukung dan b) foto peralatan prasarana pendukung					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5646

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
501	77391	Aktivitas Penyewa-an dan sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolah-an	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									teknis sesuai usaha jasa			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
502	82920	Aktivitas Pengepakan	Seluruh	Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan,	- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur	Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Penerap-an Cara - Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) - Izin Penerap-an Program Manaje-men Risiko		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa	(PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan		
				Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi,		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pemberian jasa 3. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 1 orang level		penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur	Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staf 4. Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa 5. Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang					
				Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa 2. Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan	7 Hari	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk menjalankan usaha pemberian jasa 3. Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level		pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staf 4. Memiliki dokumen bagan alur: a) bisnis proses penjualan jasa b) proses layanan purna jual penjualan jasa c) Memiliki dokumen berupa: 1)Spe-sifikasi mesin dan/ atau		untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar peralatan, sebagai sarana penunjang 2)foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang dan 3)perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin/ peralatan sebagai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana pe-nunjang untuk meng-hasilkan jasa					
503	95110	Reparasi Kom-puter dan Peralatan Sejenis-nya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Provinsi	
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
504	95120	Reparasi Peralatan Komuni-kasi	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan	- Izin Penetap-an Industri Per-tahanan - Izin Produksi Alat Peralat-an Per-tahanan dan Keaman-an	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau	hamparan lintas antar Provinsi	
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi	Moda Udara	satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
505	95210	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsu-men	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
				Menengah	Menengah Rendah		-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data		Lokasi industrinya berada pada	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5671

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						NIB dan Sertifikat Standar			Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa		Kab./Kota bersangkutan	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk		lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
506	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.F.5676

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		hamparan lintas antar Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
507	95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi		satu hamparan lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
508	95240	Reparasi Furnitur Dan Perleng-kapan Rumah	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian dan 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur 6. Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa			
509	95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	Seluruh	Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan	-	Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa dan 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa		lintas antar Provinsi	
				Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-		Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan	Bupati/ Walikota
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 5. Memiliki sertifikat		lintas antar Kab./Kota	
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur			
				Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian 2. Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggara-		Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur
											Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an jasa, sesuai peraturan perundang-undangan 3. Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa 4. Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa dan 5. Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur		Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

G. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	68200	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Seluruh	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Daftar tenaga ahli yang kompeten di bidang Jasa Perantaraan Perdagangan Properti sebagai berikut: a. Seluruh Broker	3 Hari	1. Memiliki perjanjian tertulis dengan pengguna jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menggguna-kan sistem pembayaran	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia dengan area pekerjaan perantaraan perdagangan properti (*property brokerage*) b. Paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dengan area pekerjaan manajemen perantaraan		yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi 4. Menunjukkan tanda pengenal dalam menjalankan kegiatan usaha yang paling sedikit memuat informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Mencantumkan nomor Perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perdagang-an properti (*manage-ment broker property*) c. Dalam hal melakukan aktivitas jasa manajemen pengelola-an Properti dan konsul-tansi investasi Properti, wajib didukung paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli		Berusaha P4 di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik media cetak, media elektronik, maupun media lainnya 6. Menentukan besaran/ nilai komisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan area pekerjaan manajemen properti dan investasi (*property management and investment*) Setiap tenaga ahli dilengkapi dengan: a. Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang b. Surat pernyataan		kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 8. Menyampaikan perubahan data P4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Menteri Perdagangan 9. Dalam hal P4 melakukan aktivitas perdagangan melalui sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyata-kan bahwa tenaga ahli tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis c. Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae*		elektronik wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.			
2	71202	Jasa Pengujian Laboratori-um	1. Survei Lingku-ngan Hidup (*Ecologi-cal Survey*) 2. Survei Kualitas	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah	5 Hari	1. Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survei yang paling sedikit memuat	Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekiva-lensi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(*Quality Survey*)				hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Daftar tenaga jasa survei (*Surveyor*) yang kompeten di bidang Jasa Survei sebagai berikut: a. Paling sedikit 5 (lima) orang *Surveyor* memiliki kewarga-negaraan Indonesia di kantor pusat dan 1 (satu) orang di kantor cabang yang masing-		klausula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa survei 2. Menyampai-kan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menetapkan dan menerapkan standar, prosedur dan tata cara Jasa Survei			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masing dilengkapi dengan: • Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang • Surat pernyataan yang menyata-kan bahwa *Surveyor* tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis		4. Menjaga kerahasiaan Laporan Survei 5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei (*Surveyor*) yang termuat dalam Laporan Survei dan/atau dokumen lainnya 6. Menggunakan fasilitas spengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							• Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae* b. Dalam hal diperlukan, dapat mempekerja-kan warga negara asing sebagai penasihat teknis (*technical advisor*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		atau lembaga yang berwenang 7. Mencantum-kan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat Kompetensi/ Pelatihan Tenaga Survei (*Surveyor*) di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									maupun media lainnya			
			Kegiatan Pemeriksa-an dan Pengujian Laborato-rium Keselamat-an dan Kesehatan Kerja meliputi lingkungan kerja; Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Orang (APJP); pengujian merusak	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi persyaratan penunjukan Pemeriksaan Laboratorium K3 meliputi lingkungan kerja; Alat pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP); Pengujian merusak (*Destructive Test*) dan Tidak merusak (*Non destructive Test*) secara radiasi maupun non radiasi atau obyek komponen peralatan lainnya	3 Hari	Memenuhi kewajiban Pemeriksaan Laboratorium K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerja-an (sebagai K/L Pendukung), yaitu: 1. Mempunyai laboratorium yang terakreditasi 17025 dari KAN dengan ruang lingkup Pengujian		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(*destructive test*) dan tidak merusak (*non destructive test*) secara radiasi maupun non radiasi atau obyek komponen peralatan lainnya yang berisiko tinggi untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 sebagai penunjang pemeriksa-an dan				yang berisiko tinggi untuk melakukan tes ilmiah bidang K3 Sebagai penunjang pemeriksaan dan pengujian obyek K3 yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (sebagai K/L Pendukung) dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Penunjukan sesuai Bidang yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan		Lingkungan Kerja 2. Memiliki peralatan Pemeriksaan dan Pengujian laboratorium yang sudah terkalibrasi 3. Memiliki Laporan pelaksanaan kegiatan dan/ atau Berita acara pemeriksaan dokumen dari Kementerian Ketenaga-kerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pengujian obyek K3									
			Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat-Tenaga Listrik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi persyaratan pendirian Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan diverifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai K/L Pendukung), yaitu Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium	5 Hari	Memenuhi kewajiban pendirian Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (sebagai K/L Pendukung), yaitu:		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		1. Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik 2. Menyampai-kan Laporan Berkala			
3	71203	Jasa Inspeksi Periodik	1. Survei Komo-ditas Perda-gangan 2. Survei Sarana Ang-kutan Darat,	– Mikro – Kecil – Mene-ngah – Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) 2. Daftar tenaga jasa survei (*Surveyor*) yang kompeten di	5 Hari	1. Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survei yang paling sedikit memuat	Uji Berkala Kendaraan Bermotor Swasta dan APM	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Laut dan Udara Berikut Perlengkapannya 3. Survei Sarana Penyimpanan dan Pengangkutan Komoditas Perdagangan *(Warehousing Supervision)*				bidang Jasa Survei sebagai berikut: a. Paling sedikit 5 (lima) orang *Surveyor* memiliki kewarganegaraan Indonesia di kantor pusat dan 1 (orang) di kantor cabang yang masing-masing dilengkapi dengan: • Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja dan/atau Sertifikat Pelatihan yang		klausula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa survei 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menetapkan dan menerapkan standar,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			4. Survei Dengan Merusak Obyek (*Destructive Testing*) dan/atau Survei Tanpa Merusak Obyek (*Non Destructive Testing*) dengan metode non-radioaktif				diterbitkan oleh instansi yang berwenang • Surat pernyataan yang menyatakan bahwa *Surveyor* tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis • Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* b. Dalam hal diperlukan, dapat mempekerjakan warga negara asing sebagai		prosedur dan tata cara Jasa Survei 4. Menjaga kerahasiaan Laporan Survei 5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei (*Surveyor*) yang termuat dalam Laporan Survei dan/atau dokumen lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			5. Survei Kuantitas (*Quantity Survey*) 6. Survei Pengawasan dari Proses Kegiatan Sesuai Standar (*Supervision Survey*) 7. Survei Pembiayaan atau Pengawasan				penasihat teknis (*technical advisor*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		6. Menggunakan fasilitas pengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang. 7. Mencantumkan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat Kompetensi/ Pelatihan Tenaga Survei (*Surveyor*) di tempat yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persediaan Barang 8. Survei untuk Kepentingan Asuransi 9. Survei Pergudangan dan/atau Pengawasan Persediaan Barang 10. Survei Kesesuaian Standar						mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dalam Proses Produksi Komoditas Perdagangan									
			Kegiatan Pemeriksaan dan Pengujian Obyek K3, meliputi pesawat uap, bejana tekanan dan tangki timbun, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi persyaratan penunjukan pemeriksaan dan pengujian obyek K3, meliputi Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun; Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; Pesawat Tenaga dan Produksi Listrik; Elevator dan Eskalator,	3 Hari	Memenuhi kewajiban Pemeriksaan dan Pengujian Obyek K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan dan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (sebagai K/L Pendukung), yaitu: 1. Memiliki peralatan pemeriksaan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tenaga dan produksi, listrik, elevator dan eskalator, penyalur petir dan peralatan elektronik, instalasi proteksi kebakaran, konstruksi dan bangunan, lingkungan kerja dan bahan berbahaya, angkur, Alat Pelindung Diri (APD), Alat				Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik, Instalasi Proteksi Kebakaran; Konstruksi dan Bangunan; Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya; Angkur; Alat Pelindung Diri (APD); Alat Pelindung Jatuh Perorangan (APJP), Pengujian Merusak (Destructive Test) dan tidak merusak (*Non Destructive Test*) secara radiasi maupun non radiasi untuk memastikan		dan pengujian yang sudah terkalibrasi 2. Memiliki laporan pelaksanaan kegiatan dan/atau Berita acara pemeriksaan dari Kementerian Ketenaga-kerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelindung Jatuh Perorangan (APJP), pengujian merusak (*destructive test*) dan tidak merusak (*non destructive test*) secara radiasi maupun non radiasi untuk memastikan obyek tersebut layak untuk dioperasikan/dimanfaat-				obyek tersebut layak untuk dioperasikan/ dimanfaatkan oleh pekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan dan diverifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (sebagai K/L Pendukung) yaitu Surat Keputusan Penunjukan sesuai Bidang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kan oleh pekerja									
4	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Survei Sarana Keteknikan dan Industri Termasuk Rekayasa Teknik *(Technical and Industri Survey)*	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) 2. Daftar tenaga jasa survei (*Surveyor*) yang kompeten di bidang Jasa Survei sebagai berikut: 1. Paling sedikit 5 (lima) orang *Surveyor* memiliki kewarganegaraan Indonesia di kantor	5 Hari	1. Membuat perjanjian tertulis dengan Pengguna Jasa Survei yang paling sedikit memuat klausula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa survei 2. Menyampaikan laporan kepada Menteri	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pusat dan 1 (orang) di kantor cabang yang masing-masing dilengkapi dengan: • Salinan Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang • Surat pernyataan yang me-		Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Menetapkan dan menerapkan standar, prosedur dan tata cara Jasa Survei. 4. Menjaga kerahasiaan Laporan Survei 5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan Tenaga Jasa Survei			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nyatakan bahwa *Surveyor* tidak terdaftar pada Pelaku Usaha lain yang sejenis dan • Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* 2. Dalam hal diperlukan, dapat mempekerjakan warga negara asing sebagai penasihat teknis (technical		(*surveyor*) yang termuat dalam laporan Survei dan/atau dokumen lainnya 6. Menggunakan fasilitas pengujian sampel yang telah terakreditasi oleh instansi atau lembaga yang berwenang 7. Mencantumkan nomor perizinan berusaha dan nomor Sertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							advisor) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Kompetensi/ Pelatihan Tenaga Survei (*Surveyor*) di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha dan pada setiap kegiatan publikasi, baik, pada media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.			
5	63122	Portal web dan/atau platform digital	1. Peny-elenggara Per-dagang-	Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan data dan/atau informasi	- Tanda Daftar Penye-lenggara	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dengan tujuan komersial	an Melalui Sistem Elektro-nik (PPMSE) dan Penye-leng-gara Sarana Per-antara (PSP) yang tidak di-kecuali-kan yang berke-dudukan dalam wilayah hukum Negara						secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyeleng-garakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau menyampai-kan data / informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu-waktu dalam rangka pembinaan dan	Sistem Elektro-nik Farmasi (PSEF) - Tanda Daftar Penye-lenggara Sistem Elektro-nik Farmasi (PSEF) Distri-busi - Sertifikat Cara Distri-busi Obat yang Baik (CDOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kesatuan Republik Indonesia 2. PPMSE dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) yang tidak dikecualikan yang berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik						pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data mutakhir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak tercakup dalam data dan /atau informasi yang disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menye-	- Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia						lenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik 2. Memiliki Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan informatika 3. Memiliki layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (*email*) 4. Menayang-kan layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga			
				- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE)	1. Surat Tanda Terdaftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi	3 Hari	1. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik dan/atau		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan informatika 2. Alamat website dan/atau nama aplikasi 3. Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan/atau alamat surat elektronik (*email*) 4. Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan konsumen oleh unit kerja di		menyampaikan data/ informasi perusahaan dan kegiatan usaha sewaktu-waktu dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam hal: a. Diperlukan data mutakhir, akurat dan cepat b. Data yang diminta tidak ter-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan Kementerian Perdagangan yang membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga 5. Dalam hal sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile, wajib menyediakan sistem elektronik berbasis situs atau web yang identic (*mirroring*) dengan sistem elektronik		cakup dalam data dan /atau informasi yang disampai-kan kepada lembaga pemerin-tah yang menye-lenggara-kan urusan pemerin-tahan di bidang statistik 2. Menyimpan data dan informasi PMSE yang terkait			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbasis aplikasi *mobile*		dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung dan data dan informasi PMSE yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak data dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									informasi diperoleh 3. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Memiliki atau menyedia-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan mekanisme yang dapat memastikan pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen 6. Menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen 8. Memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) Hari untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh Konsumen 9. Meng-utamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia bagi sistem elektronik yang berbentuk situs 10. Menyedia-kan pusat atau unit pe-ngembangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									di dalam negeri secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan instansi atau badan usaha dalam negeri			
6	45101	Perdagang-an Besar Mobil Baru	Seluruh	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftar-an Distri-butor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Tanda Pendaftar-an Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
7	45102	Perdagang-an Besar Mobil Bekas	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendaftar-an Tipe Kendaraan Bermotor - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
8	45103	Perdagang-an Eceran Mobil Baru	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pen-daftaran Tipe Kendara-an Bermotor - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
9	45104	Perdagang-an Eceran Mobil Bekas	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pen-daftaran Tipe Kendara-an Bermotor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
10	45202	Pencucian dan Salon Mobil	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
11	45301	Perdagang-an Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
12	45302	Perdagang-an Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	45401	Perdagang-an Besar Sepeda Motor Baru	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftar-an Distri-butor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Tanda Pendaftar-an Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	45402	Perdagang-an Besar Sepeda Motor Bekas	Seluruh	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendafta-ran Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota
15	45403	Perdagang-an Eceran Sepeda Motor Baru	Seluruh	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendaftar-an Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	45404	Perdagang-an Eceran Sepeda Motor Bekas	Seluruh	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendafta-ran Tipe Kendaraan Bermotor - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
17	45405	Perdagang-an Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori-nya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
18	45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota
19	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Seluruh, kecuali Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Penanga-nan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbu-han (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemas-an - Sertifikasi Nomor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kontrol Veteriner		
20	46202	Perdagang-an Besar Buah Yang Me-ngandung Minyak	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an Penanga-nan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registra-si PSAT Produksi Dalam		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Pengemas-an		
21	46203	Perdagang-an Besar Bunga dan Tanaman Hias	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/atau Bahan Penolong		
22	46204	Perdagang-an Besar Tembakau Rajangan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	46205	Perdagang-an Besar Binatang Hidup	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
24	46207	Perdagang-an Besar Hasil Kehutanan	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Perburuan		– Besar					Menteri Perdagangan	Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
25	46208	Perdagang-an Besar Kulit dan Kulit Jangat	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
26	46312	Perdagang-an Besar Buah-Buahan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Penanga-nan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate		
27	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Penanga-nan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan - Izin Keaman-an PSAT/Heal th Certifi-cate		
28	46314	Perdagang-an Besar Kopi, Teh Dan Kakao	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftar-an Distri-butor atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan		
29	46323	Perdagang-an Besar Daging Dan Daging	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pendaftar-an Distri-butor atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Olahan Lainnya		– Besar					Menteri Perdagangan	Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetuju-an Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Registrasi produk hewan - Sertifikasi nomor kontrol veteriner		
30	46326	Perdagang-an Besar Susu dan Produk Susu	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pemenuh-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredara - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi produk hewan - Sertifikasi nomor kontrol veteriner	.	
31	46327	Perdagang-an Besar Minyak dan Lemak Hewani	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Pe-netapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi produk hewan - Sertifi-kasi nomor kontrol veteriner		
32	46329	Perdagang-an Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Pe-netapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten / Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										men Variasi Promosi Pangan Olahan - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi produk hewan - Sertifikasi nomor kontrol veteriner		
33	46332	Perdagang-an Besar Produk Roti	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Pe-nolong - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
34	46333	Perdagangan Besar Minuman Berakohol	Distributor Minuman Berakohol	-Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Distributor)	1. Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), kecuali PT Perorangan 2. Surat Penunjukkan sebagai Distributor Minuman Beralkohol dari Produsen dan/atau Importir	5 Hari	1. Menerapkan standar K3L 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan	- Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (SK IT-MB) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Terdaftar Minuman Beralkohol 3. Tanda Daftar Gudang untuk setiap Gudang yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menyimpan dan mendistribusikan minuman beralkohol 4. Rekomendasi Gubernur untuk setiap wilayah pemasaran, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelitian		wilayah pemasarannya 3. Penjualan Minuman beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran dan tempat lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah 4. Penjualan Minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di	Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai alamat kantor pusat perusahaan untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C		supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB), dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah 5. Mengajukan perubahan SKMB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKMB 6. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap	Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredara - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									triwulan, mengenai: • Penunjukan Sub-Distributor, Pengecer, dan/atau Penjual Langsung • Pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol			
			Sub Distributor Minuman Beralkohol	- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB)	1. Badan Usaha berbentuk CV, Firma, Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT), kecuali PT Perorangan	5 Hari	1. Menerapkan standar K3L 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Sub Distribu-tor)	2. Surat Penunjukan Sub-Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol Terdaftar 3. Tanda Daftar Gudang untuk setiap Gudang yang dikuasai 4. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai alamat kantor pusat		Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasaran-nya 3. Penjualan Minuman beralkohol yang diminum langsung hanya dapat dijual di hotel, bar, restoran dan tempat2 lainnya yang ditentukan oleh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C		Pemerintah Daerah 4. Penjualan Minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual di super-market, hyper-market, TBB, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah 5. Mengajukan perubahan SKMB apabila terdapat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubahan data atau informasi pada SKMB 6. Menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan setiap triwulan, mengenai: a. Penunjukan Pengecer, dan/atau Penjual Langsung b. Pengadaan dan realisasi peredaran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Minum-an Ber-alkohol			
35	46334	Perdagang-an Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaf-taran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar Suplemen Kesehat-an - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pemenuh-an Komit-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										men Variasi Promosi Pangan Olahan - Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Praklinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Suplemen Kesehatan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan		
36	46335	Perdagang-an Besar Rokok dan Tembakau	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor / Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										atau Bahan Penolong		
37	46411	Perdagang-an Besar Tekstil	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	46412	Perdagang-an Besar Pakaian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	46413	Perdagang-an Besar Alas Kaki	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40	46414	Perdagang-an Besar Barang Lainnya dari Tekstil	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
41	46419	Perdagang-an Besar Tekstil, Pakaian	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Alas Kaki Lainnya		–Besar					Menteri Perdagangan	Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
42	46421	Perdagang-an Besar Alat Tulis	Seluruh	– Mikro, – Kecil – Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pendaftar-an Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Gambar		– Besar					Menteri Perdagangan	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
43	46422	Perdagang-an Besar Barang Percetakan dan Penerbitan Dalam	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaf-taran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Berbagai Bentuk								dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
44	46430	Perdagang-an Besar Alat Fotografi Dan Barang Optik	Seluruh	– Mikro – Kecil – Me-nengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
45	46491	Perdagang-an Besar Peralatan Dan Per-lengkapan Rumah Tangga	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaf-taran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
46	46492	Perdagang-an Besar Alat Olahraga	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
47	46493	Perdagang-an Besar Alat Musik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
48	46494	Perdagang-an Besar Perhiasan Dan Jam	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kontrol Veteriner		
49	46495	Perdagang-an Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-Anak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
50	46499	Perdagang-an Besar	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Berbagai Barang dan Per-lengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Pen-daftaran Distribu tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Keterangan Penduku-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ng Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor - Surat Keterang-an Penduku-ng Ekspor Impor - Sertifikat Pemberi-tahuan Ekspor		
51	46511	Perdagang-an Besar Komputer dan Per-lengkapan Komputer	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
52	46512	Perdagang-an Besar Piranti Lunak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
53	46521	Perdagang-an Besar Suku Cadang Elektronik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
54	46522	Perdagang-an Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio Dan Video, CD dan DVD Kosong	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
55	46523	Perdagang-an Besar Peralatan Teleko-munikasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Tanda Pendaf-taran Produk (TPP) Produksi Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), Dan Komputer Tablet - Surat Tanda Pendaf-taran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
56	46530	Perdagang-an Besar Mesin, Peralatan dan Per-lengkapan Pertanian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
57	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/ atau Bahan Penolong		
58	46592	Perdagang-an Besar Alat Transpor-tasi Laut, Suku Cadang Dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
59	46593	Perdagang-an Besar Alat Transpor-tasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenis-nya), Suku Cadang dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada P Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
60	46594	Perdagang-an Besar Alat Transpor-	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Surat Tanda Pendaf-taran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		tasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya		-Besar					Menteri Perdagangan	Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
61	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
62	46632	Perdagang-an Besar Kaca	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
63	46635	Perdagang-an Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong		
64	46637	Perdagang-an Besar Cat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
65	46651	Perdagang-an Besar Bahan dan Barang Kimia	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Usaha Pendistri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										busian Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Izin Usaha Pergu-dangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Pendaftar-an pestisida		
66	46693	Perdagang-an Besar Karet dan Plastik dalam	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distributor	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bentuk Dasar								atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
67	46694	Perdagang-an Besar Kertas dan Karton	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
68	46695	Perdagang-an Besar Barang dari Kertas dan Karton	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
69	46696	Perdagang-an Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa tak Terpakai (*Scrap*)	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
70	46699	Perdagang-an Besar	Seluruh	– Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Produk Lainnya YTDL		– Kecil – Menengah – Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
71	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Grosir/ Perkulakan dengan sistem	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pelayanan mandiri						undangan di bidang Toko Swalayan 2. Menerapkan standar K3L 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 4. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan setiap tahun mengenai a. Jumlah gerai yang dimiliki b. Jumlah UMKM yang bermitra	dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Jumlah tenaga kerja yang diserap d. Omset penjualan seluruh gerai yang dimiliki 5. Mengikut-sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang. 6. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri	Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan - Pen-daftaran Pakan - Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual a. Membina pengembangan	Perlengkapan Jalan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah b. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan di-distribusi-kan			
			Grosir/ Perkulakan Tradisional	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Menyampai-kan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat setiap tahun 3. Memiliki perikatan dengan Produsen atau Supplier		Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atau Importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusi-kan			
72	47111	Perdagang-an Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan,	Minimarket	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Minuman Atau Tembakau di Minimarket /Super-market/ Hyper-market							2. Memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan. 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 4. Menyampai-kan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan	- Izin Edar Kosmetik - Rekomen-dasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Sistem Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Pe-menuhan Standar Sistem		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Mengikut-sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang.	Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Kosmetik - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri 8. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kekayaan intelektual b. Membina peng-embangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kecil (PSAT-PDUK) - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veterine		
			Super-market	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan		Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Mengikut-sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang 6. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri 7. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Ber-tanggung-jawab terhadap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									barang dagangan-nya telah memenuhi ketentuan peraturan per-undang-undangan di bidang kekayaan intelektual b. Membina pengem-bangan produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kecil dan Menengah			
			Hyper-market	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan 2. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 3. Menyampai-kan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Mengikut-sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang 6. Menyediakan barang dagangan produk dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggungjawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual b. Membina pengembang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an produk dan merek sendiri bagi barang dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah			
73	47112	Perdagang-an Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket /Super-	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		market/ Hypermarket (Tradisional)								Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik - Izin Edar Kosmetik - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Mana-jemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		
74	47191	Perdagang-an Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (*Depart-ment Store*)	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Toko Swalayan 2. Memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai/outlet Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Rekomen-dasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Per-setujuan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang Toko Swalayan 3. Memiliki kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil 4. Menyampaikan laporan kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Memenuhi ketentuan jam operasional yang ditetapkan sesuai dengan	Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Mengikut-sertakan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kerjasama pasokan barang 7. Wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri 8. Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sendiri, Toko Swalayan: a. Bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual b. Membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dagangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			
75	47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (*Department Store*)	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
76	47211	Perdagang-an Eceran Padi dan Palawija	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
77	47212	Perdagang-an Eceran Buah-Buahan	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Penangan-an Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
78	47213	Perdagang-an Eceran Sayuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
79	47214	Perdagang-an Eceran Hasil Peternakan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
80	47216	Perdagang-an Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
81	47219	Perdagang-an Eceran Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Registrasi Produk Hewan		
82	47221	Perdagang-an Eceran Minuman Beralkohol	Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A	-Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterang-an Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A))	1. Perizinan Berusaha sebagai Supermarket/ Hypermarket atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur	5 Hari	1. Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/ pramuniaga	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Standar	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Daerah Khusus Jakarta sebagai tempat penjualan eceran minuman beralkohol golongan A 2. Surat Penunjukan sebagai Pengecer Minuman Beralkohol dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas		2. Melarang Konsumen meminum di lokasi penjualan 3. Menempat-kan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain 4. Mengajukan perubahan SKP-A apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKP-A	Sistem Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kabupaten/ Kota tempat lokasi usaha					
			Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C	-Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterang-an Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C (SKP-B&C))	1. Penetapan dari Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Jakarta sebagai tempat penjualan eceran minuman beralkohol golongan B dan/atau Golongan C 2. Surat Penunjukan sebagai Pengecer Minuman Beralkohol dari Distributor	5 Hari	1. Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/ pramuniaga 2. Melarang Konsumen meminum di lokasi penjualan 3. Menempat-kan minuman beralkohol pada tempat		Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau Sub-distributor Minuman Beralkohol terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/ Kota tempat lokasi usaha 4. Bagi Pengecer yang mengajukan perpanjangan SKP-B&C, selain menyampaikan persyaratan di atas, juga menyampaikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena		khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain 4. Mengajukan perubahan SKP-B&C apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKP-B&C 5. Menyampai-kan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bea Cukai (NPPBKC)		Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/ Walikota setempat			
			Pengecer Minuman Beralkohol pada Toko Bebas Bea (TBB)	– Menengah – Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Surat Keterang-an Pengecer	1. Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas (PT), kecuali PT Perseorangan	5 Hari	1. Menjual kepada konsumen yang telah berusia minimal 21		Provinsi Seluruh	Gubernur Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Toko Bebas Bea (SKP-TBB)	2. Surat penunjukkan dari IT-MB kepada Toko Bebas Bea sebagai pengecer Minuman Beralkohol 3. Surat izin Toko Bebas Bea dari Menteri Keuangan 4. Bagi Pengecer Minuman Beralkohol pada TBB yang mengajukan perpanjangan SKP-TBB, selain menyampaikan persyaratan di atas, juga menyampaikan		(dua puluh satu) tahun dan dilayani oleh petugas/ pramuniaga 2. TBB sebagai pengecer yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol kepada: a. Orang yang bepergian keluar negeri atau b. Pe-numpang yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC)		sedang transit di kawasan pabean, dan wajib dibuktikan dengan Paspor dan tanda bukti penumpang (*Boarding Pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. TBB sebagai pengecer yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menjual Minuman Beralkohol kepada: a. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarga-nya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik b. Pejabat/ tenaga ahli yang bekerja pada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya atau c. Turis asing yang akan keluar dari daerah pabean, dan wajib dibuktikan dengan Paspor dan/atau Kartu Identitas sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perun-dang-undangan 4. Menempat-kan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain 5. Mengajukan perubahan SKP-TBB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKP-TBB			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
83	47222	Perdagang-an Eceran Minuman Tidak Beralkohol	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
84	47230	Perdagang-an Eceran Khusus Rokok Dan	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tembakau Di Toko								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
85	47241	Perdagang-an Eceran Beras	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
86	47242	Perdagang-an Eceran Roti, Kue Kering,	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Serta Kue Basah, dan Sejenisnya		–Besar					Menteri Perdagangan	Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
87	47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir, dan Gula Merah	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran		
88	47244	Perdagang-an Eceran Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
89	47245	Perdagang-an Eceran Daging dan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ikan Olahan		-Besar					Menteri Perdagangan	Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
90	47249	Perdagang-an Eceran Makanan Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Manaje-men Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Penerap-an Pe-nangan-an Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
91	47303	Perdagang-an Eceran Minyak Pelumas di Toko	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
92	47411	Perdagang-an Eceran Komputer Dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
93	47412	Perdagang-an Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
94	47413	Perdagang-an Eceran Piranti Lunak (*Software*)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
95	47414	Perdagang-an Eceran Alat Tele-komunikasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
96	47415	Perdagang-an Eceran Mesin Kantor	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
97	47420	Perdagang-an Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video Di Toko	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
98	47511	Perdagang-an Eceran Tekstil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
99	47512	Perdagang-an Eceran Per-lengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
100	47513	Perdagang-an Eceran Per-lengkapan Jahit Menjahit	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
101	47521	Perdagang-an Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
102	47522	Perdagang-an Eceran Kaca	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
103	47523	Perdagang-an Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Liat, Kapur, Semen atau Kaca									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
104	47524	Perdagang-an Eceran Semen, Kapur, Pasir, dan Batu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
105	47525	Perdagang-an Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
106	47526	Perdagang-an Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
107	47527	Perdagang-an Eceran Cat, Pernis. dan Lak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
108	47528	Perdagang-an Eceran berbagai Macam Material Bangunan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
109	47529	Perdagang-an Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
110	47530	Perdagang-an Eceran Khusus Karpet, Permadani Dan Penutup Dinding Dan Lantai Di Toko	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
111	47591	Perdagang-an Eceran Furnitur	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
112	47592	Perdagang-an Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
113	47593	Perdagang-an Eceran Barang Pecah Belah Dan Per-lengkapan	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dapur Dari Plastik									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
114	47594	Perdagang-an Eceran Barang Pecah Belah Dan Per-lengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
115	47595	Perdagang-an Eceran Barang Pecah Belah dan Per-lengkapan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
116	47596	Perdagang-an Eceran Barang Pecah Belah Dan Per-lengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
117	47597	Perdagang-an Eceran Alat Musik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
118	47599	Perdagang-an Eceran Peralatan dan Per-lengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
119	47611	Perdagang-an Eceran Alat Tulis Menulis	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Gambar		-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
120	47612	Perdagang-an Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
121	47620	Perdagang-an Eceran Khusus Rekaman	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Musik dan Video di Toko		– Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
122	47630	Perdagang-an Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
123	47640	Perdagang-an Eceran Khusus Alat	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko		– Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
124	47650	Perdagang-an Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/ Karton	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
125	47711	Perdagang-an Eceran Pakaian	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
126	47712	Perdagang-an Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
127	47713	Perdagang-an Eceran Pelengkap Pakaian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
128	47714	Perdagang-an Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
129	47731	Perdagang-an Eceran Alat Fotografi dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
130	47732	Perdagang-an Eceran Alat Optik dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
131	47733	Perdagang-an Eceran Kaca Mata	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
132	47734	Perdagang-an Eceran Jam	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
133	47735	Perdagang-an Eceran Barang Perhiasan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
134	47736	Perdagang-an Eceran Per-lengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
135	47737	Perdagang-an Eceran Pem-bungkus Dari Plastik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
136	47739	Perdagang-an Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
137	47741	Perdagang-an Eceran Barang Bekas Per-lengkapan Rumah Tangga	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
138	47742	Perdagang-an Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pe-lengkap Pakaian Bekas	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada P Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
139	47743	Perdagang-an Eceran Barang Per-lengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
140	47744	Perdagang-an Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
141	47745	Perdagang-an Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
142	47746	Perdagang-an Eceran Barang Antik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
143	47749	Perdagang-an Eceran Barang Bekas Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
144	47751	Perdagang-an Eceran Hewan Piaraan (*Pet Animals*)	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
145	47752	Perdagang-an Eceran Hewan Ternak	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
146	47754	Perdagang-an Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
147	47761	Perdagang-an Eceran Bunga Potong/ Florist	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	* Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
148	47762	Perdagang-an Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
149	47763	Perdagang-an Eceran Pupuk Dan Pem-berantas Hama	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Pendaftaran Pestisida - Pendaftaran Pupuk An-Organik - Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
150	47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
151	47773	Perdagang-an Eceran Bahan Kimia	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
152	47774	Perdagang-an Eceran Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
153	47781	Perdagang-an Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
154	47782	Perdagang-an Eceran Barang Kerajinan Dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading,	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bulu dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan								- Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
155	47783	Perdagang-an Eceran Barang Kerajinan dari Logam	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
156	47784	Perdagang-an Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
157	47785	Perdagang-an Eceran Lukisan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
158	47789	Perdagang-an Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
159	47791	Perdagang-an Eceran Mesin Pertanian dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
160	47792	Perdagang-an Eceran Mesin Jahit dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
161	47793	Perdagang-an Eceran Mesin Lainnya dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
162	47794	Perdagang-an Eceran Alat Transpor-tasi Darat Tidak Bermotor dan Per-	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		lengkapan-nya									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
163	47795	Perdagang-an Eceran Alat Transpor-tasi Air dan Per-lengkapan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
164	47796	Perdagang-an Eceran Alat-Alat Pertanian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
165	47797	Perdagang-an Eceran Alat-Alat Per-tukangan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
166	47811	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
167	47812	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
168	47813	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										(SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
169	47814	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
170	47816	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
171	47819	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
172	47821	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Penangan-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
173	47822	Perdagang-an Eceran	Seluruh	– Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	- Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya		– Kecil – Menengah – Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Manaje-men Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
174	47823	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sejenisnya								Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Manaje-men Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
175	47824	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe,	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tauco dan Oncom									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
176	47826	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	Perdagang-an minuman non-alkohol	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Sistem Mana-jemen Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Perdagang-an minuman beralkohol	Tertutup untuk penanam-an modal								

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
177	47827	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
178	47829	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman YTDL	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
179	47831	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Tekstil		–Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
180	47832	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
181	47833	Perdagang-an Eceran	Seluruh	– Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya		– Kecil – Menengah – Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
182	47834	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
183	47841	Perdagang-an Eceran	Seluruh	–Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
184	47845	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pem-berantas Hama	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Pen-daftaran Pestisida - Pen-daftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pupuk An-Organik - Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah		
185	47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
186	47849	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laborator-ium dan YBDI YTDL	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
187	47851	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
188	47852	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
189	47853	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
190	47854	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
191	47855	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Per-lengkapan Pengendara Sepeda Motor	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
192	47859	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
193	47861	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
194	47862	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Per-lengkapan Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
195	47863	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Per-lengkapan Dapur Dari	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Plastik/ Melamin										
196	47864	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Per-lengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
197	47865	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Per-lengkapan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
198	47866	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkap an Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
199	47867	Per-dagangan Eceran Kaki Lima	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Los Pasar Alat Kebersihan		-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
200	47869	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Per-lengkapan Rumah Tangga Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
201	47871	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Kertas, Karton Dan Barang Dari Kertas		-Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
202	47872	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
203	47873	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan		– Besar					Menteri Perdagangan	dan/atau Bahan Penolong		
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
204	47874	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
205	47875	Perdagang-an Eceran	Seluruh	– Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
206	47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
207	47877	Perdagangan Eceran	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
208	47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Gambar, Hasil Pencetak-an, Penerbitan dan Lainnya										
209	47881	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
210	47882	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Mainan Anak-Anak								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
211	47883	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
212	47891	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Hewan hidup								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
213	47893	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Antik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
214	47894	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
215	47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
216	47896	Perdagangan Eceran	Seluruh	– Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas		- Kecil - Menengah - Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
217	47897	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
218	47899	Perdagang-an Eceran	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	Penetapan Pusat	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan	Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
219	47911	Perdagang-an Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Reko-mendasi Sebagai Pemohon	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Labo-ratorium								Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pe-menuhan Standar Sistem Manaje-men Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Per-setujuan Pe-laksanaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Uji Klinik Kosmetik - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										(PSAT-PDUK)		
220	47912	Perdagang-an Eceran Melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
221	47913	Perdagang-an Eceran Melalui Media Untuk Barang Per-lengkapan	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Rumah Tangga dan Per-lengkapan Dapur									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
222	47914	Perdagang-an Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Se-bagaimana Tersebut Dalam 47911 s.d. 47913	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Reko-mendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Sertifikat Pe-menuhan Standar	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sistem Mana-jemen Kea-manan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Kosmetik		
223	47919	Perdagang-an Eceran Melalui Media	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya		-Besar					Menteri Perdagangan	Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Standar Sistem Manaje-men Keaman-an Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
224	47920	Perdagang-an Eceran Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
225	47991	Perdagang-an Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
226	47992	Perdagang-an Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)		
227	47993	Perdagang-an Eceran Keliling Bahan Kimia,	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Farmasi, Kosmetik dan Alat Labo-ratorium								Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
228	47994	Perdagang-an Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
229	47995	Perdagang-an Eceran Keliling Per-lengkapan Rumah Tangga dan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Per-lengkapan Dapur									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
230	47997	Perdagang-an Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
231	47998	Perdagang-an Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak dan Lukisan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
232	47999	Perdagang-an Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL	Selain Penjualan Langsung	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Izin Edar Kosmetik - Reko-mendasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Penjualan Langsung	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2	5 Hari	1. Perusahaan memberikan keterangan secara lisan dan tertulis dengan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(dua) orang atau lebih 2. Memenuhi Kriteria: a. Memiliki hak distribusi eksklusif terhadap barang yang akan didistribusikan melalui penjualan secara langsung b. Memiliki program pemasaran (*marketing plan*) c. Memiliki kode etik d. Melakukan perekrutan penjual		benar kepada calon penjual langsung paling sedikit mengenai: a. Identitas perusahaan b. Mutu dan spesifikasi barang c. Kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan,	Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							langsung melalui sistem jaringan e. Melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung f. Mempekerjakan paling sedikit 1 orang WNI sebagai anggota dewan direksi dan 1		perbaikan dan pemeliharaannya d. Program pemasaran (*marketing plan*) e. Kode etik 2. Perusahaan yang telah melakukan perekrutan penjual langsung wajib: 1. Memberikan alat bantu penjualan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							orang WNI sebagai anggota dewan komisaris 3. Program pemasaran dan kode etik dibuat dalam Bahasa Indonesia		(*starter kit*) kepada setiap penjual langsung yang paling sedikit berisikan keterang-an mengenai barang, program pemasar-an (*market-ing plan*) dan kode etik 2. Me-mastikan kegiatan yang di-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lakukan oleh penjual langsung sesuai dengan program pemasaran (*marketing plan*) dan kode etik 3. Mencantumkan label pada barang dan/atau kemasan yang memuat paling sedikit nama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perusahaan dan keterangan bahwa barang dijual dengan sistem penjualan langsung (*direct selling*) 4. Menetapkan harga barang yang dijual dalam mata uang rupiah dan berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									untuk penjual langsung dan konsumen 5. Memberikan komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh penjual langsung dan jaringannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan yang diperjanjikan 6. Memberikan tenggang waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak barang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diterima, apabila ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang ditimbulkan akibat peng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan 8. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan ber-tanggung jawab paling sedikit 1 (satu) sekali dalam 1 (satu) tahun 9. Mem-berikan ke-sempatan yang sama kepada semua			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penjual langsung untuk ber-prestasi dalam me-masar-kan barang 10. Memiliki daftar penjual langsung yang menjadi anggota jaringan pe-masaran-nya yang di-lengkapi dengan data			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									identitas penjual langsung dimaksud 11. Menjual barang yang telah memiliki izin edar atau telah memenuhi ketentuan standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undang-an 12. Memasti-kan penjual langsung tidak menjual barang melalui saluran distribusi tidak langsung dan/atau *online market place* 3. Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan usaha penjualan langsung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
233	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Bagi Pemilik Gudang: Memiliki Tanda Daftar Gudang Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 2. Menyelenggara-	- Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang 3. Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang sesuai dengan ketentuan peraturan	- Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 4. Bagi yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampai-kan laporan pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
234	52102		Seluruh	–Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Bagi Pemilik Gudang:	- Sertifikat Pemenuh-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Aktivitas *Cold Storage*		-Kecil -Menengah -Besar					Memiliki Tanda Daftar Gudang Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 2. Menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang	an Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan - Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical	Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keluar dari gudang 3. Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Bagi yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampai-	Control Point - Sertifikat Penerapan Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan laporan pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
235	52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Pergudangan Lainnya yang tidak termasuk KBLI 52101 s.d. 52108	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Bagi Pemilik Gudang: Memiliki Tanda Daftar Gudang Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	- Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris - Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang 3. Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di gudang sesuai dengan	- Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Bagi yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampai-kan laporan pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
236	63990	Aktivitas Jasa	Seluruh	– Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Informasi Lainnya YTDL		– Kecil – Menengah – Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
237	61999	Aktivitas Telekomu-nikasi Lainnya YTDL	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
238	73100	Periklanan	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Besar					Menteri Perdagangan			
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
239	73201	Penelitian Pasar	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
240	73202	Jajak Pendapat Masyarakat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
241	74202	Aktivitas Angkutan Udara Khusus Pemotret-an, Survei dan Pemetaan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
242	74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
243	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
244	77210	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Rekreasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Olahraga									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
245	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
246	77292	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
247	77293	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan dan Penerbitan	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
248	77294	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga	Seluruh	–Mikro –Kecil –Menengah –Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Tanaman Hias									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
249	77295	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
250	77299	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya Ytdl									Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
251	77311	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
252	77312	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transpor-tasi Air		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
253	77313	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Trans-portasi Udara	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
254	77319	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	- Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transpor-tasi Lainnya		– Kecil – Menengah – Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
255	77321	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
256	77322	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	–Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Alat Bantu Teknologi Digital		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
257	77323	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Kebutuhan MICE	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
258	77329	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Kreatif Lainnya		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
259	77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatan-nya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
260	77393	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
261	77394	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor Dan Peralatan-nya	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah dan Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
262	77395	Aktivitas Penyewaan	Seluruh	-Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan	-	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya		-Kecil -Menengah -Besar					usaha kepada Menteri Perdagangan		Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
263	77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	Pemeriksaan Nonmedik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
264	77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
265	81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
266	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
267	81300	Aktivitas Perawatan dan Pe-meliharaan Taman	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
268	82110	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
269	82190	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
270	95291	Aktivitas Vermak Pakaian	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
271	96111	Aktivitas Pangkas Rambut	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
272	96112	Aktivitas Salon Kecantikan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
273	96200	Aktivitas Penatu	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
274	96990	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan	-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
275	46653	Perdagang-an Besar Bahan Berbahaya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bentuk usaha Perseorangan atau badan	5 Hari	1. Menyampai-kan laporan kepada Menteri	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				– Besar			usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, badan hukum atau bukan badan hukum dengan menunjukan: 1. Surat penunjuk-an dari produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang		Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mendistri-busikan jenis B2 dilengkapi dengan Lembar Data Keamanan (LDK)/ *System Data Sheet* 3. Melaporkan posisi stok B2 disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari	dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki API-U; 2. Bukti penguasa-an gudang yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Surat rekomen-dasi dari Kepala Dinas Provinsi dengan me-lampirkan Berita		sejak usahanya dihentikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan penghentian kegiatan usaha 4. Mendistri-busikan formalin dan Paraformal-dehyde wajib menambah-kan bahan pemahit sesuai dengan rekomendasi teknis dari lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Acara Pemeriksaan Fisik gudang tempat penyimpanan B2 4. Surat pernyataan yang menyatakan telah memiliki sistem tanggap darurat yang dilengkapi dengan nama tenaga ahli yang memiliki		pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan 5. Mendistribusikan bahan berbahaya dan wilayah pendistribusian sesuai dengan surat penunjukannya (instansi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengetahuan di bidang kimia yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi bidang kimia dari instansi yang berwenang 5. Rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah non-kementerian yang me-		bertanggung jawab) 6. Mencantumkan label pada kemasan dan menggunakan kemasan ukuran minimal sesuai peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nyeleng-garakan urusan pe-merintahan di bidang pengawas-an obat dan makanan dalam hal DT-B2 mem-perdagang-kan B2 jenis Formalin dan Parafor-maldehyde					
276	46631	Perdagang-an Besar	Seluruh	– Mikro	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Barang Logam untuk Bahan Konstruksi		– Kecil – Menengah – Besar					Distribusi Barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Khusus Jakarta Kabupaten /Kota Seluruh	Khusus Jakarta Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
277	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata,	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan Distribusi Barang	- Surat Tanda Pendaftaran	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca		– Besar					kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
278	46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur,	Usaha Perdagangan Besar semen seperti	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan Distribusi Barang kepada	- Surat Tanda Pendaftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasir, dan Batu	Portland putih, semen protland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan						Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe-nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Pe-nolong	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
279	46636	Perdagang-an Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan Distribusi Barang kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe-nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Pe-nolong	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
280	46638	Perdagang-an Besar Berbagai Macam	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan distribusi barang kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Material Bangunan							Menteri Perdagang-an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe-nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Pe-nolong	Kabupaten /Kota Seluruh	Bupati/ Walikota Menteri/ Kepala Badan
281	46639	Perdagang-an Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan distribusi barang kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Perdagang-an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi	butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe-nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Pe-nolong	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusi-kan 3. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas			
282	46652	Perdagang-an Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Pe-nyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Pe-nolong - Pen-daftaran Pestisida - Pen-daftaran Pupuk An-Organik - Pen-daftaran Pupuk Organik,	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pupuk Hayati, Pembenah Tanah		
283	46201	Perdagang-an Besar Padi dan Palawija	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampai-kan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	- Sertifikat Penerapan Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan - Izin Ke-amanan PSAT/ Health Certificate		
284	46209	Perdagang-an Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampai-kan laporan distribusi kepada	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nangan-an Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
285	46311	Perdagang-an Besar Beras	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampai-kan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang	- Surat Tanda Pen-daftaran Distri-butor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuh-an (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan - Izin Ke-amanan PSAT/ Health Certificate		
286	46315	Perdagang-an Besar Minyak dan Lemak Nabati	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampai-kan laporan distribusi	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat benar, tetap dan jelas	Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
287	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										menuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pe-menuhan Standar Sistem Manaje-men Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Penerapan Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD) - Registrasi PSAT Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan - Izin Keamanan PSAT/ Health Certificate - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
288	46321	Perdagang-an Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampai-kan laporan distribusi kepada Menteri Perdagang-an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar,	- Surat Tanda Pen-daftaran Distribu-tor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tetap, dan jelas	Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Per-usahaan - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuh-an Standar		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
289	46322	Perdagangan Besar	Seluruh	– Mikro – Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang	- Surat Tanda	Provinsi Daerah	Gubernur Daerah

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan		– Menengah – Besar					Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang	Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	Khusus Jakarta	Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									benar, tetap, dan jelas	- Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Pe-rusahaan - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuh-an Standar Sistem Manaje-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										men Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
290	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampai-	- Surat Tanda Pendaftaran Distribu-	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Olahan Telur							kan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	tor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikat Pe-menuhan Komitmen Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan	Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Registrasi Produk Hewan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner		
291	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat, dan Kembang Gula	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen	Provinsi Daerah Khusus Jakarta Kabupaten /Kota	Gubernur Daerah Khusus Jakarta Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Barang dan/ atau Jasa (STP Distri-butor/ Agen) - Penetap-an Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Sarana Peredaran - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan		
292	46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Distributor Barang Kebutuhan Pokok wajib menyampaikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/ atau Jasa (STP Distributor/ Agen) - Penetapan Pusat Penyedia	Provinsi Daerah Khusus Jakarta	Gubernur Daerah Khusus Jakarta
											Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
											Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas	Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong - Izin Edar Suplemen Kesehat-an - Sertifikat Pemenuh-an Komit-men Pangan Olahan - Sertifikat Per-setujuan Pangan Olahan - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan - Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suple-men Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran - Persetujuan Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										laksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehat-an - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehat-an - Per-setujuan Pe-laksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Per-setujuan Iklan Suplemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehat-an - Sertifikat Penerap-an Pe-nanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tum-buhan (SPPB-PSAT) - Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL) - Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) - Izin Rumah Peng-emasan - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Sertifikat Pen-daftaran Pakan Ikan		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.1

H. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	36001	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum (*Pelaku Usaha dibatasi : 1.BUMN Air Minum (Perum, Persero) 2.BUMD Air Minum (Perumda,	Pengambilan air baku, pengolahan air baku menjadi air minum dan pendistribusian air minum kepada konsumen/ pelanggan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah/ BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum terkait Pemanfaatan IPSDA (*khusus untuk Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum /BUMDes) 2. Dokumen Rencana Bisnis 3. Dokumen Kajian Kelayakan 4. Dokumen Perencanaan (*Khusus untuk badan usaha yang akan melakukan	30 Hari	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) (*Khusus untuk BUMN Air Minum/BUMD Air Minum /BUMDes) 2. Berita Acara Layak Operasi 3. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 4. Memperbaiki lingkungan jika terjadi	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IPSDA) (*Khusus untuk BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum/ BUMDes)	1. SPAM di Wilayah Perdesaan 2. SPAM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											SPAM Strategis Provinsi atau Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											SPAM Strategis Nasional atau Lintas Provinsi	Menteri / Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban .	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persero-da) 3.BUM-Des/ BUM-Des bersa-ma 4.Badan Usaha Pelaksa-na Proyek KPBU SPAM (BUP)/ Badan Usaha untuk me-menuhi kebutu-han					kegiatan konstruksi) 5. Surat Rekomendasi Teknis dari BUMN Air Minum /BUMD Air Minum atau Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (*khusus untuk Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 6. Surat Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa (*khusus BUMDes) 7. Dokumen Perjanjian		kerusakan secepat mungkin 5. Pelibatan masyarakat lokal 6. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan 7. Pelaporan hasil pengawasan kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggara-kan urusan di bidang kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		sendiri (BUKS yaitu badan usaha yang ber-badan hukum atau tidak ber-badan hukum yang bidang usaha pokok-nya bukan merupa-kan					Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Khusus untuk BUP) atau Perjanjian Kerja sama antara Badan Usaha (*Khusus untuk Badan Usaha yang bekerja sama dengan BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)					
			Pengambilan air baku dan pengolahan air baku menjadi air minum	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah/ BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum terkait Pemanfaatan IPSDA (*khusus untuk Badan	30 Hari	1. Izin Pengusaha-an Sumber Daya Air (IPSDA) (*Khusus untuk BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)	Izin Pengusa-haan Sumber Daya Air (IPSDA)	SPAM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											SPAM Strategis Provinsi atau Lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		usaha penyediaan air minum dan salah satu kegiatanya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri) sesuai dengan ketentuan perundangan)					Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 2. Dokumen Rencana Bisnis 3. Dokumen Kajian Kelayakan 4. Dokumen Perencanaan (*Khusus untuk badan usaha yang akan melakukan kegiatan konstruksi) 5. Surat Rekomendasi Teknis dari BUMN Air Minum /BUMD Air Minum atau Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (*khusus untuk		2. Berita Acara Layak Operasi 3. Menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 4. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin 5. Pelibatan masyarakat lokal 6. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas	(*Khusus untuk BUMN Air Minum/ BUMD Air Minum)	Kabupaten/ Kota	
											SPAM Strategis Nasional atau Lintas Provinsi	Menteri / Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(*UPT/ UPTD diproses diluar OSS)					Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 6. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Khusus untuk BUP) atau Perjanjian Kerja sama antara Badan Usaha (*Khusus untuk Badan Usaha yang bekerja sama dengan BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)		sesuai dengan kebutuhan 7. Pelaporan hasil pengawasan kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan			
			Pendistribusi-an air minum kepada konsumen/ pelanggan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen Rencana Bisnis 2. Dokumen Kajian Kelayakan	30 Hari	1. Berita Acara Layak Operasi 2. Menyampaikan laporan tahunan kepada	-	1. SPAM di Wilayah Perdesaan 2. SPAM di Wilayah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			3. Dokumen Perencanaan (*Khusus untuk badan usaha yang akan melakukan kegiatan konstruksi) 4. Surat Rekomendasi Teknis dari BUMN Air Minum /BUMD Air Minum atau Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (*khusus untuk Badan Usaha selain BUMN Air Minum /BUMD Air Minum) 5. Surat Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota		Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing 3. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin 4. Pelibatan masyarakat lokal 5. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan 6. Pelaporan hasil pengawasan kualitas air minum sesuai		Kabupaten/ Kota	
											SPAM Strategis Provinsi atau Lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											SPAM Strategis Nasional atau Lintas Provinsi	Menteri / Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepada Pemerintah Desa (*khusus BUMDes) 6. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (*Khusus untuk BUP) atau Perjanjian Kerja sama antara Badan Usaha (*Khusus untuk Badan Usaha yang bekerja sama dengan BUMN Air Minum/BUMD Air Minum)		dengan Peraturan Menteri yang menyelenggara-kan urusan di bidang kesehatan			
2	36002	Penam-pungan dan Penyalur-	Penampu-ngan dan Penyaluran Air Baku yang	- Mikro - Kecil	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Air Baku	berasal dari air permukaan selain air laut	- Mene-ngah - Besar					Tahunan Badan Usaha 2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu			
3	41011	Konstruk-si Gedung Hunian	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Hunian : BG001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai sub-klasifikasi setiap 3 tahun dan membayar biaya administrasi perpanjangan perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Hunian : BG010	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Bangunan Gedung Hunian : GT001	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		dan membayar biaya administrasi perpanjangan perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
4	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran : BG002	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: BG002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan jasa konstruksi 2. Melakukan perpanjangan SBU setiap 3 tahun 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor		konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Perkantoran : GT002	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
5	41013	Konstruksi Gedung Industri	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Industri : BG003	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: BG003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Industri : GT003	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:		4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang		konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
6	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan : BG004	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Perbelanjaan : GT004	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
7	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan : BG005	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan : GT005	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
8	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan : BG006	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Pendidikan : GT006	Besar	Mene-engah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
9	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan : BG007	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG007	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Penginapan : GT007	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: GT007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksana-an konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
10	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga : BG008	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG008	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri		sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tempat Hiburan dan Olahraga : GT008				/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: GT008 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kode Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya : BG009	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat,	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat,		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BG009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga	Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari	Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO	Keaman-an		
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya : BG011	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kelaikan Fasilitas Pemelihaaraan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
12	41020	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	Kode Subklasifikasi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung : KP001	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KP001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: KP001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan : BS001	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
14	42102	Konstruksi Bangunan Sipil embatan, Jalan Layang, Fly Over,	Kode Subklasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS002	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Under-pass	Underpass : BS002				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass : ST001	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
15	42103	Konstruksi Jalan rel	Kode Subklasifikasi Konstruksi Jalan rel : BS003	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 Tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
16	42104	Konstruksi Terowongan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Terowongan : KK014	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK014 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK014 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
17	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kode Subklasifikasi Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase : BS004	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melakukan Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
18	42202	Konstruksi Bangunan Sipil	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pe-ngolahan Air Bersih	Sipil Pengolahan Air Bersih : BS005	- Mene-ngah			/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi		Kecil, Menengah	
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih : ST002	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
19	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS006	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas	Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas : BS006				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
20	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal : BS007	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 3. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO d. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal : ST003	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
21	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi : BS008	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility*	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthi-*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ness of Defence Mainten-ance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetap-an Industri	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS008 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi	Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan	- Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Pemeliha-raan Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility Worthi-ness of Defence Mainten-ance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO	- Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	Kode Subklasifikasi Konstruksi Sentral Telekomunikasi : BS009	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga	Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahan-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari	an (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
23	42207	Pembuat-an/ Pengebor-an Sumur Air Tanah	Kode Sub-klasifikasi Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah : PL005	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL005	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah : PL009	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
24	42209	Konstruk-si Jaringan Irigasi,	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Jaringan	- Mikro - Kecil	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetap-an Industri	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Komunikasi, dan Limbah Lainnya	Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya : BS020	- Menengah			/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS020 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara	Kecil, Menengah	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS020 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certi-*	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:		4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa	*ficate of Approval Facility Worthi-ness of Defence Product-ion*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Pemeliha-raan Pertahan-an (*Certifica-te of*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang		konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan	*Approval Facility Worthi-ness of Defence Mainten-ance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
25	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air : BS010	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS010	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air : ST004	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
26	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan : BS011	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi	Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahan-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS011 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility Worthi-ness of Defence Product-ion*): Moda Darat, Moda	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan : ST005	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility Worthi-ness of Defence Product-*	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan	*ion*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*):		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya	Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
27	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan : BS012	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS012 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: BS012 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28	42914	Pengeruk-an	Kode Sub-klasifikasi Pengerukan : PL002	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerukan : PL010	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
29	42915	Konstruk-si Bangun-an Sipil Minyak dan Gas Bumi	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi : BS013	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS013	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS013 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi : ST006	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
30	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan : BS014	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS014 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS014 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Pertambang-an : ST007	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
31	42917	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi : BS015	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS015 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Persetujuan Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) Proyek PLTP	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	Persetujuan Studi Kelayakan / Feasibility	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS015 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi	Study (FS) Proyek PLTP		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi : ST008	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST008 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	Persetujuan Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) Proyek PLTP	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
32	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga : BS016	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS016 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS016	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga :	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ST009				Subklasifikasi: ST009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.190

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33	42919	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl : BS017	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS017 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS017 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl : BS021	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengka-pan Jalan	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
34	42921	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air: KK002	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: KK002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air : KK003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
35	42922	Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai	Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai : KK004	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
36	42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya : BS018	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS018 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS018 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya : ST010	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
37	42924	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran	Kode Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit : BS019	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS019 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Product-*	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ion): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: BS019	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetuju-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi	an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility Worthi-ness of Defence Product-ion*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha		sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:	Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Bangunan	Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetap-an Industri	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit : ST011				/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: ST011 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA:		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi	Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan	- Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
38	42930	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	Kode Subklasifikasi Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil : KP002	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KP002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KP002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
39	43110	Pembong-karan	Kode Sub-klasifikasi Pembongkar-an Bangunan: PL001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL001	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pembongkar-	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an Bangunan: PL011						2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
40	43120	Penyiap-an Lahan	Kode Sub-klasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi : PL003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan:		4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa	- Izin Usaha Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang		konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi : PL012	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Tanah : PL004	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: PL004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	•	3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi	kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Tanah: PL013	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergida-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peledak Aksesoris		
			Kode Sub-klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas : PL006	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergida-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Peledak Aksesoris		
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan	dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas : PL014	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergida-ngan	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
			Kode Sub-klasifikasi Survei Penyelidikan Lapangan : PL007	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Perguda-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	- Izin Penetap-an Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti	Perguda-ngan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
41	43212	Instalasi Teleko-munikasi	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Telekomuni-kasi : IN002	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi	Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahan-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										an (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility Worthi-ness of Defence Product-ion*): Moda Darat, Moda	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi	Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Telekomuni-kasi : IN015	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility Worthi-ness of Defence Product-*	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ion): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*):		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
42	43213	Instalasi Elektronika	Kode Subklasifikasi Instalasi Elektronika : IN006	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN006	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi	Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliha-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										raan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Keaman-an		
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility Worthi-ness of Defence Product-*	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan	*ion*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*):		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari	Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Elektronika : IN016	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an - Sertifikat Persetuju-an Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahan-an (*Certifica-te of Approval Facility*	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthi-*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ness of Defence Mainten-ance): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-an dan Keaman-an		
43	43214	Jasa Instalasi Konstruk-si Navigasi Laut,	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Konstruksi Navigasi Laut,	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	- Izin Penetap-an Industri Pertahan-an	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sungai, dan Udara	Sungai, dan Udara : IN005				Subklasifikasi: IN005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	- Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility*	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengembangan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan	*Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
44	43215	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	Kode Subklasifikasi Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api : IN012	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN012 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN012 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
45	43216	Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Sinyal Dan Rambu-rambu Jalan Raya : IN011	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN011	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Sinyal Dan Rambu-	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			rambu Jalan Raya : IN017						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
46	43221	Instalasi Saluran Air (Plambing)	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Saluran Air (Plambing) : IN007	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Saluran Air (Plambing) : IN018	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
47	43222	Instalasi Pemanas dan Geo-termal	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal : IN013	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN013 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN013 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pemanas dan Geotermal : IN019	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
48	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Minyak Dan Gas : IN004	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Minyak Dan Gas : IN020	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
49	43224	Instalasi Pendingin Dan	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pendingin	- Mikro - Kecil	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ventilasi Udara	Dan Ventilasi Udara : IN008	- Mene-ngah			/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi		Kecil, Menengah	
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN008 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara : IN009	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
50	43291	Instalasi Mekanikal	Kode Sub-klasifikasi Instalasi Mekanikal : IN001	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
51	43292	Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kode Subklasifikasi Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika : IN014	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: IN014 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN014 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
52	43299	Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	Kode Subklasifikasi Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur : IN003	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara		subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan b. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik : IN010	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN010 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IN010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
53	43301	Pengerja-an Pemasa-ngan Kaca Dan Alumuni-um	Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium : PB001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB001	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Aluminium : PB002	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
54	43302	Pengerja-an Lantai, Dinding, Peralatan	Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi	- Mikro - Kecil	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro,	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Saniter Dan Plafon	Kedap Suara : KK007	- Mene-ngah			/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi		Kecil, Menengah	
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara : KK017	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon : PB003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Saniter Dan Plafon: PB012						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
55	43303	Pengecatan	Kode Sub-klasifikasi Pengecatan : PB007	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Pengecatan : PB008	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
56	43304	Dekorasi Interior	Kode Sub-klasifikasi Dekorasi Interior : PB004	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Dekorasi Interior : PB013	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni : PB005	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: PB005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni : PB006	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57	43305	Dekorasi Eksterior	Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi : PB010	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB010 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Lansekap, Pertamanan, dan Penanaman	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Vegetasi: PB014						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
58	43309	Pe-nyelesai-an Konstruk-si Bangun-an Lainnya	Kode Sub-klasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil : PB009	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA:		2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi		Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan/atau Bangunan Sipil : PB015	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
59	43901	Pemasa-ngan Pondasi Dan Tiang Pancang	Kode Sub-klasifikasi Pondasi Konstruksi : KK001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pondasi Konstruksi: KK018	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
60	43902	Pemasa-ngan Perancah (Steiger)	Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Perancah (Steiger): PL008	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: PL008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PL008 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Perancah (Steiger): PL015	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
61	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/ RoofCovering	Kode Subklasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap / Roofcovering : KK011	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK011 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Rangka dan Atap / Roof-covering : KK019	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
62	43904	Pemasa-ngan Kerangka Baja	Kode Sub-klasifikasi Pemasangan Kerangka Baja : KK016	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK016 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: KK016 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO d. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
63	43905	Penyewa-an Alat Konstruk-si Dengan Operator	Kode Sub-klasifikasi Penyewaan Peralatan Konstruksi : PA001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PA001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PA001	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
64	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Kode Subklasifikasi Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pavement) : KK005				Subklasifikasi: KK005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak, dan Gas : KK006	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK006 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Perkerasan Aspal : KK008	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK008 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK008	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Perkerasan Berbutir : KK009	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: KK009 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK009 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pengeboran dan Injeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) : KK010	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK010 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK010 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton: KK012	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK012 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK012	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Konstruksi Struktur Beton Pascatarik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(Post Tensioned) : KK013				Subklasifikasi: KK013 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK013 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan		Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau Incenerator) : KK015	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK015 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: KK015 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi : PB011	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB011 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: PB011	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Paling rendah 50%			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		(lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri 2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Pemulihan Lahan Pekerjaan	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Konstruksi : PB016						3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
65	52213	Aktivitas jalan tol	Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan jalan atau jembatan tol termasuk pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan dan jembatan tol	Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan badan usaha 2. Menyampaikan laporan keuangan tahunan badan usaha yang telah diaudit 3. Menyampaikan laporan pemenuhan SPM (khusus jalan tol beroperasi) 4. Menyampaikan rencana program pemeliharaan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jalan tol (khusus jalan tol beroperasi) 5. Menyampaikan laporan jumlah kecelakaan kerja di jalan tol termasuk karakteristik kecelakaan, waktu, dan tanggal serta upaya penanganannya (khusus jalan tol konstruksi) 6. Menyampaikan laporan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan tol termasuk karakteristik kecelakaan, waktu, dan tanggal, serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									upaya penanganannya (khusus jalan tol beroperasi) 7. Seluruh kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)			
66	68111	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Pengembangan Hunian dan/atau hunian campuran: Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasi-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	A. Pengembangan Perumahan MBR: 1. Memiliki KKPR untuk pengembangan perumahan 2. Memperoleh SK Pengesahan dari	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an perumahan baik yang dimiliki sendiri maupun disewa						Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana induk kawasan perumahan dan/atau Rencana tapak perumahan b) Rencana pemisahan sertipikat HGB induk per kaveling dan/atau per rumah susun c) Rencana pertelaan per rumah susun		Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d) Rencana fungsi dan pemanfaat-an per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun dan/atau f) Revisi terhadap dokumen a), b), c), d), dan/atau e) 3. Memperoleh tanda terima dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan standar yang telah diaudit oleh akuntan publik b) Proyeksi/analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d) Laporan pembentuk-an perhimpun-an pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun B. Pengembangan Perumahan: 1. Memiliki KKPR untuk pengembang-an perumahan 2. Memperoleh SK Pengesahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Rencana Induk Kawasan Perumahan dan/atau Rencana Tapak Perumahan b) Rencana pemisahan sertipikat HGB induk per kaveling dan/atau per rumah susun c) Rencana Pertelaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									per rumah susun d) Rencana fungsi dan pemanfaat-an per rumah susun e) Rencana pemisahan pengelolaan area hunian dengan non hunian per rumah susun f) Perhitungan dana konversi dan/atau g) Revisi terhadap dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rencana a), b), c), d), e), dan/atau f) 3. Memperoleh tanda terima dari Pemerintah Daerah meliputi: a) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan memuat rekapitulasi berupa: 1) Rasio hutang terhadap aktiva lancar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2) Rasio hutang terhadap aktiva tetap 3) Rasio hutang terhadap ekuitas b) Proyeksi/ analisis arus kas c) Laporan pelaksanaan sistem perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah tapak dan rumah susun dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d) Laporan pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun per rumah susun			
			Pengembangan dan/atau pengoperasian pusat perbelanjaan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Tunduk kepada ketentuan perundang undangan sektor perdagangan	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran	Dalam satu Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota
											Lintas Kabupaten/Kota dan Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengembangan selain huruf a dan b	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Memperoleh Persyaratan Dasar perizinan berusaha	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan
			Pengembangan campuran antara huruf a, b dan/ atau c	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Memenuhi seluruh kewajiban sesuai dengan lingkup pengembangan campuran	-	Dalam satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
											Lintas Kabupaten/ Kota dan Daerah Khusus Jakarta	Gubernur
											Lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67	71101	Aktivitas Arsitektur	Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : AR001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian : AR004	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya : AR002	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Arsitektural Lainnya : AR005	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengemba-ngan Pemanfaatan Ruang : AL001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum		undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengem-bangan Wilayah : AL002	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengemba-ngan Perkotaan : AL003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengemba-ngan Lingkungan Bangunan dan Lanskap : AL004	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AL004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
68	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian : RK001	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian : RK006	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air : RK002	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi: RK003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan : RK004	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Mekanikal Dalam Bangunan : RK007	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya : RK005	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RK005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya : RK008	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur : RT001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tenaga Listrik : RT002						bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Rekayasa Proses Industrial, Produksi, dan Fasilitas Produksi : RT003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT003 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: RT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA:	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal		bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi		pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika : IT001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT001 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang		b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor		dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi					
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Bawah Tanah : IT002	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT002 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT002	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Permukaan Tanah dan Pembuatan Peta : IT003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum : IT004	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT004	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultasi Ilmiah dan Teknis Prasarana dan Sarana Umum : IT009	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem Kendali Lalu Lintas : IT005	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT005 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT005	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Konstruksi Sistem	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kendali Lalu Lintas : IT006						perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceano-graphy : IT007	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: IT007	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Konsultansi Ilmiah dan Teknis Hidrolika, Hidrologi dan Oceanograp-hy : IT008	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Geologi, Geofisika dan Geokimia : AT001	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi / Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT001 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT001	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT002	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kemurnian : AT002				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT002 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Komposisi dan Tingkat Kemurnian : AT008	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Fasilitas Laboratorium : AT003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha		subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi		Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi					
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Parameter Fisikal : AT004	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT004 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: AT004 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Teknis Hidrolika, Hidrologi dan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT005	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Oceanograp-hy : AT005				2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT005 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan *vibrator* Gedung Hunian dan Nonhunian : AT006	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT006 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT006	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi		perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi		tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		dilakukan di dalam negeri 2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Pengujian dan Analisis Akustik dan vibrator Gedung	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Hunian dan Nonhunian : AT009						peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Commission-ing Proses Industrial: AT007	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AT007 2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU)	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Subklasifikasi: AT007 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan		3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan		klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha subsektor jasa konstruksi		jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
69	74120	Aktivitas Desain Interior	Kode Sub-klasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil : AR003	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR003	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam	-	BUJKN dengan skala usaha Mikro, Kecil, Menengah	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Merupakan BUJKN bukan usaha orang perseorangan		peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi			
				Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi /Sertifikat Badan Usaha (SBU) Subklasifikasi: AR003 2. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal b. Membayar biaya administrasi perizinan berusaha per	15 Hari	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SBU masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi 4. Untuk Kantor Perwakilan BUJKA: a. Melakukan perpanjangan Sertifikat Standar	-	BUJK dan Kantor Perwakilan BUJKA	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jenis usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Untuk BUJK PMA: a. Penanam modal asing/ pemegang saham asing merupakan badan usaha jasa konstruksi berbadan hukum di negara asal yang dibuktikan dengan: 1) Akta pendirian yang dilegalisasi 2) Sertifikat perizinan bidang usaha jasa konstruksi		sesuai subklasifikasi setiap 3 tahun b. Melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan BUJKN berkualifikasi Besar dan memiliki klasifikasi/ subklasifikasi sejenis yang tercatat di lembaga pengemba-ngan jasa konstruksi sebelum mengikuti proses pemilihan c. KSO untuk pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkualifikasi Besar di negara asal atau yang sejenis yang dilegalisasi b. Penanam modal dalam negeri/ pemegang saham dalam negeri merupakan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi Besar yang dibuktikan dengan: 1) Perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi 2) Sertifikat Badan Usaha		Jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan kriteria teknis KSO sebagai berikut: 1) Seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri 2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							subsektor jasa konstruksi		dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO			
			Kode Sub-klasifikasi Jasa Desain Interior pada Bangunan Gedung dan Bangunan Sipil : AR006	Mikro	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan 2. SKK masih berlaku 3. Melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi	-	Usaha Orang Perseorangan dengan skala usaha Mikro	Bupati/ Walikota
70	71201	Jasa Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Jasa Konstruksi	Seluruh	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	30 Hari	1. Lisensi LSBU masih berlaku 2. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi 3. Memiliki bukti akreditasi oleh	Pendafta-ran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi			
71	74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Jasa Konstruksi	Seluruh	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Standar Penetapan Kemampuan Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi/ Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi	65 hari	1. Lisensi LSP masih berlaku 2. Menyampaikan laporan kegiatan operasional lembaga sertifikasi 3. Memiliki bukti akreditasi oleh lembaga independen sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 1	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.H.515

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(satu) tahun setelah diterbitkannya lisensi			

I. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	49110	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	Sarana Perkeretaapian Umum	- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian 2. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan 3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian	- Izin operasi sarana perkeretaapian umum - Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian - Persetujuan peng-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesela-matan yang akan tersedia di dalam sarana per-kereta-apian d. Jadwal pelak-sanaan penga-daan, pegoperasi-an, perawatan, dan pemerik-saan sarana per-kereta-apian e. Jumlah dan jenis sarana per-kereta-			operasi-an fasilitas perawa-tan sarana per-kereta-apian - Persetu-juan peng-opera-sian per-alatan khusus		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							apian yang akan dioperasi-kan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana per-kereta-apian g. Kepemili-kan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasi-kan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum				1. Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan		1. Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam	- Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							waktu pelak-sanaan kegiatan 2. Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkereta-apian		hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Dalam hal seluruh investasinya		Lingkup Operasio-nalnya Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Kemampuan keuangan		tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung 3. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian		Lingkup Operasio-nalnya Kabupa-ten/Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum				1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 2. Gambar teknis 3. Data lapangan 4. Jadwal pelaksanaan 5. Spesifikasi teknis 6. Metode pelaksanaan 7. Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan	30 Hari	1. Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian 2. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian 3. Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan	- Izin operasi prasarana perkeretaapian umum	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup Operasionalnya Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkereta-apian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan-nya		Lingkup Operasio-nalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
2	49120	Angkut-an Jalan Rel Untuk Barang	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian	- Izin operasi sarana per-kereta-apian umum	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkereta-apian d. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pegoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkereta-apian e. Jumlah dan Jenis Sarana		2. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan 3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian 4. Rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga terkait untuk pengangkutan Barang B3 dan Limbah B3	- Persetu-juan Pem-bangu-nan Fasilitas Perawa-tan Sarana Per-kereta-apian - Persetu-juan Pengo-perasian Fasilitas Perawa-tan Sarana Per-kereta-apian - Persetu-juan peng-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perkereta-apian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana perkereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkereta-apian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyeleng-garaan sarana			operasian per-alatan khusus		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkereta-apian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkereta-apian					
3	49441	Angkut-an Jalan Rel Per-kotaan	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian 2. Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan	- Izin operasi sarana per-kereta-apian umum - Persetu-juan Pem-bangu-nan Fasilitas Perawa-tan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkereta-apian d. Jadwal pelaksanaan pengadaan, pegoperasian, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkereta-apian e. Jumlah dan Jenis Sarana Perkereta-apian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana		3. Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian	Sarana Per-kereta-apian - Persetu-juan Peng-operasi-an Fasilitas Perawa-tan Sarana Per-kereta-apian - Persetu-juan peng-opera-sian peralatan khusus		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perkereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkereta-apian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyeleng-garaan sarana perkereta-apian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana perkereta-apian					
4	49442	Angkut-an Jalan Rel Wisata	Penyeleng-garaan Per-keretaapian Khusus	- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkereta-apian khusus dan kegiatan pokoknya 2. Izin usaha kegiatan pokok 3. Peta lokasi prasarana perkereta-apian khusus	14 Hari	1. Melaksanakan pengadaan tanah 2. Melakukan perencanaan teknis 3. Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik 4. Sertifikat Standar usaha yang diverifikasi Lembaga	- Izin Pening-katan per-kereta-apian khusus - Izin Inter-koneksi pe-nyeleng-garaan per-kereta-apian khusus - Izin operasi per-kereta-	Lingkup Operasio-nalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup Operasio-nalnya Provinsi	Gubernur
											Lingkup Operasio-nalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sertifikasi Usaha Pariwisata	apian khusus - Izin Penga-		

			Pembangunan perkeretaapian khusus	- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan 2. Spesifikasi Teknis kinerja, dan gambar teknis sarana Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun 3. Spesifikasi Teknis Prasarana Perkeretaapian yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 4. Spesifikasi Sarana Perkeretaapian yang memuat	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan 2. Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana dan 3. Melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin pembangunan	lihan izin operasi perkeretaapian khusus - Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian - Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan

							komponen dan konstruksi, sarana perkereta-apian khusus yang akan dibangun dan ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkereta-apian khusus yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal Perkereta-apian 5. Gambar teknis yang merupakan gambar desain prasarana perkereta-apian disahkan oleh Direktur Jenderal			- Perse-tujuan peng-opera-sian per-alatan khusus	Lingkup Operasio-nalnya Provinsi	Gubernur

							Perkereta-apian 6. Data lapangan 7. Jadwal pelaksanaan 8. Metode pelaksanaan 9. Bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas tanah yang dibutuhkan 10. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.I.20

											Lingkup Operasio-nalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

SK No 144612 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	49450	Angkut-an Jalan Rel Lainnya	Penyeleng-garaan Per-keretaapian Khusus	- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Perizinan Berusaha kegiatan pokok 2. Peta lokasi prasarana perkereta-apian khusus 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkereta-apian khusus dan kegiatan pokoknya	14 Hari	1. Melakukan perencanaan teknis 2. Melaksanakan pengadaan tanah 3. Mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik	- Izin Pening-katan per-kereta-apian khusus - Izin Inter-koneksi penye-lenggar-an per-kereta-apian khusus - Izin operasi	Lingkup Operasio-nalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup Operasio-nalnya Provinsi	Gubernur
											Lingkup Operasio-nalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pembangunan perkeretaapian khusus	- Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rancang bangun dibuat berdasarkan perhitungan 2. Spesifikasi Teknis kinerja, dan gambar teknis sarana Perkeretaapian Khusus yang akan dibangun. 3. Spesifikasi Teknis Prasarana Perkeretaapian yang akan dibangun disahkan oleh Direktur Jenderal	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana paling lambat 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan 2. Bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana dan 3. Melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan	perkeretaapian khusus - Izin Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus - Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian	Lingkup Operasionalnya Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perkereta-apian 4. Spesifikasi Sarana Perkereta-apian yang memuat komponen dan konstruksi, sarana perkereta-apian khusus yang akan dibangun dan ukuran, kinerja, dan gambar teknis sarana perkereta-apian khusus yang akan dibangun disahkan oleh Direktur		kepada pemberi izin pembangunan	- Persetu-juan peng-operasi-an fasilitas perawa-tan sarana per-kereta-apian - Persetu-juan peng-operasi-an pera-latan khusus - Izin perpo-tongan dan/ atau persing-	Lingkup Operasio-nalnya Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jenderal Perkereta-apian 5. Gambar teknis yang merupakan gambar desain prasarana perkereta-apian disahkan oleh Direktur Jenderal Perkereta-apian 6. Data lapangan 7. Jadwal pelaksanaan 8. Metode pelaksanaan 9. Bukti pembebasan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari luas			gungan antara jalan dengan kereta api dan bangu-nan lainnya	Lingkup Operasio-nalnya Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanah yang dibutuhkan 10. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	49211	Angkut-an Bus Antar-kota Antar-provinsi (AKAP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasional antarkota antar-provinsi.	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*)		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perusahaan Angkutan Umum		usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha penyeleng-garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	49212	Angkut-an Bus Per-batasan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasio-nalnya dalam satu kabupaten /kota.	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*)		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perusahaan Angkutan Umum		usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berusaha penyeleng-garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	49213	Angkut-an Bus Antar-kota Dalam Provinsi (AKDP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasio-nalnya antarkota dalam provinsi.	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memperba-harui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			
9	49214	Angkut-an Bus Kota	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup Operasio-nalnya	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Besar			kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha		dalam satu kabupaten/ kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			
10.	49215	Angkutan Bus Lintas	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasionalnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Batas Negara		- Menengah - Besar			dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam		lintas batas negara	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum.		asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggaraan Angkutan 9. Mengoperasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang telah ditentukan 15. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	49219	Angkut-an Bus Dalam Trayek Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning*	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan	-	Lingkup operasional antar provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							System yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan		paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bukti lulus uji berkala 10.Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11.Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12.Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13.Melayani Trayek sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perizinan berusaha penyeleng-garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasionalnya dalam satu kabupaten/kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			
13	49412	Angkut-an Antar-kota Dalam Provinsi (AKDP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal	-	Lingkup operasional-nya antar-kabupaten/ kota dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bukan Bus, Dalam Trayek					dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan		2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng-garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			
14	49413	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenagakerja	-	Lingkup operasional-nya dalam satu perkotaan	Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan		an bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng-garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			
15	49414	Angkut-an Per-desaan Bukan Bus, Dalam Trayek	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat	-	Lingkup operasional-nya dalam satu kabupaten	Bupati

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business*		6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							plan) Perusahaan Angkutan Umum		data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perizinan berusaha penyeleng-garaan yang diberikan 14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
16	49415	Angkut-an Darat Khusus Bukan Bus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 4. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan	-	Lingkup operasional-nya kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		perizinan berusaha 5. Terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum jalan 6. Membangun sistem informasi perusahaan Angkutan umum yang terintegrasi 7. Menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik 8. Melaporkan kegiatan usaha setiap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun kepada pejabat pemberi izin penyeleng-garaan Angkutan 9. Meng-operasikan kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, bukti lulus uji berkala 10. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang ditetapkan 11. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan 12. Melengkapi kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS 13. Melayani Trayek sesuai perizinan berusaha penyeleng-garaan yang diberikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									14. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan 15. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 16. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun 17. Mematuhi ketentuan tarif.			
17	49216	Angkut-an Bus Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal	-	Lingkup operasional antar provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang		2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan kepada penyandang		Lingkup operasional dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
18	49221	Angkutan Bus Pariwisata	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal	-	Lingkup operasional nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang		2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan kepada penyandang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
19	49229	Angkutan Bus Tidak Dalam	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasional antar provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Trayek Lainnya		-Besar			yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan		Lingkup operasional dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional kabupaten/ kota.	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
20	49421	Angkut-an Taksi	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasional antar	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Mene- ngah -Besar			kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan		provinsi dan nasional	
											Lingkup operasional dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional kabupaten/ kota.	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			
21	49422	Angkutan Sewa	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar	-	Lingkup operasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				-Mene- ngah -Besar			kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 3. Memiliki dan/atau bekerjasama		Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan		antar provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	49429	Angkut-an Darat Lainnya Untuk Penum-pang	Angkutan Orang Dalam Trayek	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool)	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan 3. Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha 4. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi	-	Lingkup operasional antar provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup opersional dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan 5. Menyusun rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan Umum		awak kendaraan 5. Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit 6. Memper-baharui kartu pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	49426	Angkut-an Sewa Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki Salinan STNK 2. Buku pemeliharaan (*service*) berkala 3. Foto kendaraan yang akan diberi izin 4. Persetujuan kuota dari Pemerintah Provinsi 5. Menyiapkan dokumen sistem	5 Hari	1. Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal 2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum	-	Wilayah operasinya dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagai tugas dekonsentrasi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen keselamatan (untuk Badan Hukum) atau surat pernyataan komitmen kesanggupan melaksanakan SMK (untuk UMKM)		3. Melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan 4. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pemberi izin penyeleng-garaan angkutan		- Wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jabode-tabek - wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jabode-tabek	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	49431	Angkut-an Bermotor Untuk Barang Umum	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkan-nya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan 2. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 3. Foto dan denah tempat penyimpanan	5 Hari	1. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui 2. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan ketenaga-kerjaan 3. Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang 4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan - Serti-fikat Peme-nuhan Komit-men Sistem Mana-jemen Kea-manan Pang-an Olah-an di Sarana Pere-daran	Lingkup Operasionalnya Nasional Dan/Atau Internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kendaraan (pool) 4. Tersedianya fasilitas bongkar muat 5. IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan		sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur	- Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	49432	Angkut-an Bermotor Untuk Barang Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan dengan melengkapi foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan 2. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) dan/atau fasilitas bongkar muat 3. Dokumen rencana lintasan	5 Hari	1. Menjamin muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang telah diasuransikan yang dibuktikan dengan dokumen polis asuransi 2. Mengansuran sikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan yang dibuktikan dengan	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan	Lingkup Operasional-nya antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Melampirkan sertifikat kompetensi awak angkutan barang khusus 5. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 6. IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan		dokumen kartu asuransi ketenaga-kerjaan 3. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus 4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Memper-baharui kartu		Lingkup Operasionalnya Nasional Dan/Atau Internasional	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengawasan setiap tahun 7. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin 8. Memiliki Rekomendasi khusus untuk angkutan barang berbahaya dari Menteri/ Kepala Lembaga terkait			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
26	37011	Pengum-pulan Air Limbah Tidak Berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkan-nya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan 2. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang	5 Hari	1. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui 2. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan ketenaga-kerjaan 3. Memenuhi standar minimal pelayanan angkutan barang	-	Lingkup Operasional-nya Kabupaten/ Kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 3. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 4. Tersedianya fasilitas bongkar muat 5. IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 6. Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestik		4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur		Lingkup Operasional-nya antar Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
27	37012	Pengum-pulan Air Limbah Berbahaya	Pengangkut-an air limbah domestik	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan sesuai dengan peruntukkannya yang dilengkapi dengan foto dokumentasi kendaraan pada setiap sisi kendaraan	5 Hari	1. Dioperasikan di jalan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui 2. Memiliki kartu asuransi ketenaga-kerjaan bagi awak kendaraan ketenaga-kerjaan 3. Memenuhi standar minimal pelayanan	-	Lingkup Operasional-nya Kabupaten/ Kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti kartu lulus uji 3. Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) 4. Tersedianya fasilitas bongkar muat 5. IP *Global Positioning System* yang terpasang dikendaraan 6. Memiliki rekomendasi untuk angkutan limbah domestic		angkutan barang 4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan 5. Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan 6. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada Menteri dan/atau Gubernur		Lingkup Operasional Provinsi DKI Jakarta	Gubernur DKI Jakarta

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28	52215	Aktivitas Per-parkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki atau menguasai lahan yang dibuktikan dengan bukti penguasaan hak 2. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat: a. Gambar layout fasilitas parkir b. Gambar Penentuan kebutuhan dan Per-syaratan satuan ruang parkir	7 Hari	1. Melakukan pelaporan data transaksi usaha parkir 2. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan 3. Mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir	-	Lingkup Operasional Provinsi DKI Jakarta Lingkup Operasional Kabupaten/ Kota	Gubernur DKI Jakarta Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Gambar rencana penem-patan rambu, marka dan media informasi 3. Dilakukan verifikasi lapangan yang mencakup: a. Ketersedia an fasilitas pejalan kaki b. Alat penerang-an yang cukup c. Penga-turan sirkulasi udara yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							baik bagi gedung parkir d. Penga-turan radius putar bagi gedung parkir e. Penyediaan sarana Jalur keluar darurat bagi gedung parkir f. Penyediaan Fasilitas pemadam kebakaran g. Memiliki petugas parkir yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki kompetensi serta sistem penga-manan berupa pos security atau cctv h. Keter-sediaan *wheel stop* dan area titik kumpul darurat					
29	52214	Aktivitas Per-parkiran di Dalam Badan Jalan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti surat kerjasama atau penunjukkan oleh	7 Hari	1. Melakukan pelaporan data transaksi usaha parkir 2. Menyediakan tempat parkir sesuai dengan	-	Lingkup Operasional Kabupaten/ Kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(*On Street Parking*)					Pemerintah Daerah 2. Hasil verifikasi lapangan yang mencakup: a. Kondisi jalan yang memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten /kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa b. Pema-sangan rambu,		standar teknis yang ditentukan 3. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan mem-prioritaskan kelancaran lalu lintas 4. Mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							marka dan media informasi keter-sediaan fasilitas pejalan kaki c. Alat penerang-an jalan yang cukup d. Memiliki petugas parkir yang memiliki kompetensi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30	52222	Aktivitas Kepelabuhanan Sungai dan Danau	Seluruh	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	Proposal rencana kegiatan kepelabuhan yang memuat: 1. Rencana tahapan Pembangunan 2. Rencana Pengoperasian Pelabuhan 3. Rencana Jumlah sumber daya manusia dan Kompetensi	4 Hari	1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan 2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemberi izin	- Dekomisioning Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Meng-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap 3 (tiga) bulan sekali	gunakan Sumber Radiasi Pengion - Operasi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pernyataan Pembebasan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pemeriksaan Non-medik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peng-ion		
31	52223	Aktivitas Ke-pelabu-hanan Penye-berangan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan sertifikat standar	Proposal rencana kegiatan kepelabuhan yang memuat: 1. Rencana tahapan Pembangunan 2. Rencana Pengoperasian Pelabuhan	4 Hari	1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan 2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan	- Deko-misio-ning Fasi-litas Peme-riksaan Peti Kemas Meng-guna-kan	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana Jumlah sumber daya manusia dan Kompetensi		standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan kepada pemberi izin setiap 3 (tiga) bulan sekali	Sumber Radiasi Pengion - Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Operasi Fasilitas Pemeriksaan	Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Menteri/ Kepala Badan Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peng-ion - Peme-riksaan Non-medik pada Manu-sia dengan Pem-bangkit Radiasi Peng-ion		
32	50211	Angkut-an Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap Dan Teratur)	Seluruh	– Mikro – Kecil – Mene-ngah – Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/Kepa la Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Untuk Penum-pang					trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan		memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyam-paikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan		kota dalam provinsi	
											Lingkup operasional dalam kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut			
33	50212	Angkut-an Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Teratur) Untuk Penum-pang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Mengasuransikan tanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggungjawab pengangkut		dalam kabupaten/ Kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
34	50213	Angkut-an Sungai Dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan	5 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyam-paikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Meng-asuransikan	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional dalam kabupaten/ kota	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut			
35	50214	Angkut-an Penye-berang-an Antar-pro-vinsi Untuk	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-	-	Lingkup Operasiona-lnya Nasional dan/Atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penum-pang					memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaik-lautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
36	50215	Angkut-an Penye-berangan Perintis Antar-	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal	-	Lingkup Operasional-nya Nasional Dan/Atau Internasional ,	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		provinsi Untuk Penum-pang					operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37	50216	Angkut-an Penye-berangan Antar kabu-paten/ Kota Untuk Penum-pang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan	-	Lingkup Operasional-nya Antar-kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bulan berikutnya			
38	50217	Angkut-an Penye-berangan Perintis Antar-kabu-paten/ Kota Untuk Penum-pang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab	-	Lingkup Operasiona-lnya Antar-kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
39	50218	Angkut-an Penye-berangan Dalam Kabu-paten/ Kota Untuk Penum-pang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh peng-operasian kapalnya dan melak-sanakan asuransi perlindungan	-	Lingkup Operasional-nya Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan peng-operasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
40	50219	Angkut-an Penye-berangan Lainya Untuk Penum-pang Ter-masuk Penye-beranan Antar-negara	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh	-	Lingkup Operasional-nya Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
41	50224	Angkut-an Penye-berangan Umum Antar-provinsi Untuk Barang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas	-	Lingkup Operasional-nya Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
42	50225	Angkut-an Penye-berangan Perintis Antar-provinsi	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan	-	Lingkup Operasional-nya Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		untuk Barang					yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui sertifikat pengawasan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
43	50226	Angkut-an Penye-berangan	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan	-	Lingkup Operasional-nya Antar-kabupaten/	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Umum Antar-kabu-paten/ Kota Untuk Barang					dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Kota Dalam Satu Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44	50227	Angkut-an Penye-berangan Perintis Antar-kabu-paten/ Kota untuk Barang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan	-	Lingkup Operasional-nya Antar-kabupaten/ Kota Dalam Satu Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bulan berikutnya			
45	50228	Angkut-an Penye-berangan Umum Dalam Kabu-paten/ Kota Untuk Barang	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab	-	Lingkup Operasional-nya Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memperbaharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
46	50229	Angkutan Penye-berangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penye-berangan Antar-negara	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan	Lingkup Operasional-nya Nasional Dan/Atau Internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
47	50221	Angkut-an Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan/ Atau Hewan	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penye-berangan 2. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/ Kepala Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional dalam	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sementara 3. Kesesuaian lintas yang dilayani 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan 5. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta)		asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memper-baharui sertifikat pengawasan setiap tahun atau sampai masa docking berikutnya 4. Melaporkan kegiatan operasional kapal setiap bulan kepada pemberi		kabupaten/ kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persetujuan pengoperasian kapal angkutan penye-berangan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya			
48	50222	Angkut-an Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/Kepa la Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Sertifikasi Pengawakan		peraturan perundang-undangan 3. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada pemberi izin 4. Mengasuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-		Lingkup operasional dalam kabupaten/kota.	Bupati/ Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jawab pengangkut			
49	50223	Angkut-an Sungai dan Danau Untuk Barang Berbaha-ya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaik-lautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani 2. Sertifikasi Pengawakan	7 Hari	1. Menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau 2. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyam-paikan laporan bulanan kegiatan operasional	-	Lingkup operasional antar provinsi dan antar negara	Menteri/Kepa la Badan
											Lingkup operasional antar kabupaten/ kota dalam provinsi	Gubernur
											Lingkup operasional dalam kabupaten/ kota	Bupati/Wali Kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pemberi izin 4. Meng-asuransikan tanggung-jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang dan tanggung-jawab pengangkut 5. Memiliki Rekomendasi khusus untuk angkutan barang berbahaya dari Menteri/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Lembaga terkait			
50	52295	Angkutan Multimoda	Seluruh	Mene-ngah dan Besar	Menengah Tinggi	NIB Dan Sertifikat Standar	1. Memiliki dan/atau menguasai kantor tetap 2. Memiliki dan/atau menguasai alat angkut paling sedikit 1 (satu) unit kendaraan angkutan barang yang dapat berupa mobil truk dan/atau 1 (satu) rangkaian kereta api (iokomotif dan gerbong atau kereta), kapal	7 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan-nya perizinan berusaha angkutan multimoda 2. Memiliki dokumen asuransi kegiatan penyelenggara angkutan multimoda 3. Memberikan laporan kegiatan	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan	Lingkup Operasional-nya Nasional dan/atau Internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laut atau pesawat udara yang dibuktikan dengan dokumen yang sah 3. Memiliki dan/atau menguasai peralatan bongkar muat minimal 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan dokumen yang sah 4. Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang		operasional minimal setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin 4. Melaporkan kepada pemberi izin setiap terjadi perubahan anggaran dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada perubahan 5. Meningkatkan dan mengembang-kan kompetensi sumber daya manusia di bidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							angkutan multimoda yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi		angkutan multimoda yang dimiliki			
51	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penum-pang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Lingkup Operasional-nya Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota
52	51101	Angkut-an udara Niaga Ber-jadwal Dalam Negeri Untuk Penum-pang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-*	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Atau Penum-pang Dan Kargo					pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang		diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan	*rator Certi-ficate/* AOC) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak (*Remo-tely Piloted Air-craft Ope-rator Certi-ficate/* ROC)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara. Aspek ekonomi dan keuangan		operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas 8. rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada menteri 9. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan pesawat udara kepada Menteri 10. Memenuhi standar pelayanan penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri			
53	51103	Angkut-an Udara Niaga Ber-jadwal Luar Negeri Untuk Penum-pang Atau Penum-	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-rator Certi-ficate/ AOC*)	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		pang Dan Kargo					(karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan		minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki pesawat udara dengan jumlah paling sedikit 1 (satu) unit dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan	- Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (*Remotely Piloted Aircraft Operator Certificate/ ROC*)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							personel pesawat udara Aspek ekonomi dan keuangan		rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada menteri			
54	51102	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Dalam Negeri Untuk Penum-pang Atau Penum-pang Dan Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-rator Certi-ficate/ AOC*) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan	(*Remo-tely Piloted Air-craft Ope-rator Certi-ficate/ ROC*)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri			
55	51104	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Luar Negeri Untuk Penum-pang Atau	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-rator Certi-*	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penum-pang Dan Kargo					dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang		operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan	*ficate/ AOC*) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak (*Remo -tely Piloted Air-craft Ope-rator Certi-ficate/ ROC*)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan penumpang dan kargo angkutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar-golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
56	51105	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-rator Certi-ficate/ AOC*) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak (*Remo-tely Piloted*	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 3. Rencana kebutuhan sdm yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang–undangan	*Air-craft Ope-rator Certi-ficate/ ROC*) - Serti-fikat Penye-leng-gara Kali-brasi Fasi-litas Navi-gasi Pener-bang-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menutup asuransi tanggung-jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ras, antar-golongan, serta strata ekonomi dan sosial 6. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 7. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 8. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri			
57	51108	Angkutan Udara Bukan Niaga	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Untuk badan usaha, dan lembaga tertentu: a. Surat keterangan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya b. Surat Rekomen-dasi dari penyeleng-gara	3 Hari	1. Meng-operasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah perizinan berusaha diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan	- Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak (*Remo-tely Piloted Air-craft Ope-rator Certi-*	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan sebagai tempat Latihan (training area) bagi pemohon angkutan udara bukan niaga (khusus untuk flying school) c. Rencana kegiatan angkutan		perundang-undangan lain yang berlaku 3. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri 4. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili	*ficate/ ROC*) - Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (*Operating Certificate*) -OC 91 - Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navi-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							udara yang paling sedikit memuat: 1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan diopera sikan 2) Renca-na base atau penem-patan pesawat udara dan daerah kegia-tan operasi dan		kantor pusat kegiatan kepada menteri (kecuali untuk perorangan)	gasi Pener-bang-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara 2. Untuk Perorangan, menyampaikan dokumen rencana kegiatan angkutan udara yang paling sedikit memuat: a. Jenis dan jumlah pesawat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							udara yang akan dioperasikan b. Rencana base atau penempatan pesawat udara dan daerah kegiatan operasi dan c. Sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara					
58	51201	Angkutan Udara Niaga	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)*	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan	- Sertifikat Ope-	Lingkup operasional-nya nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Ber-jadwal Dalam Negeri untuk Kargo		-Mene-ngah -Besar			untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan		udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam	rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-rator Certi-ficate/ AOC*) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak (*Remo-tely Piloted Air-craft Ope-rator*	dan/atau internasional	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*operation base*) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi tanggung-jawab pengangkut	*Certi-ficate/ ROC*)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung-jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
59	51203	Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri untuk Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara) 2. Rencana pusat	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara	- Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate/ AOC*) - Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (*Remo-tely Piloted*	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana rute penerbangan 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan rute yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Menutup asuransi	*Air-craft Ope-rator Certi-ficate/ ROC*)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tanggung-jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
60	51202	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Dalam Negeri Untuk Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-rator Certi-ficate/ AOC*) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak (*Remo-tely*	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) dan rencana daerah operasi penerbangan. 3. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 4. Aspek ekonomi dan keuangan		pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan	*Piloted Air-craft Ope-rator Certi-ficate/ ROC*)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menutup asuransi tanggung-jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan kepemilikan pesawat udara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada Menteri			
61	51204	Angkut-an Udara Niaga Tidak Ber-jadwal Luar Negeri untuk Kargo	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Rencana usaha *(business plan)* untuk kurun waktu minimal 5 tahun yang akan datang, paling sedikit memuat: 1. Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (operation base) dan rencana daerah operasi penerbangan 2. Rencana kebutuhan SDM yang terdiri dari	7 Hari	1. Melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan meng-operasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya	- Serti-fikat Ope-rator Pesa-wat Udara (*Air Ope-rator Certi-ficate/ AOC*) - Serti-fikat Ope-rator pesa-wat udara tanpa awak	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen, teknisi dan personel pesawat udara 3. Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan (karakteristik dan spesifikasi pesawat, cara perolehan, jumlah kebutuhan pesawat, utilisasi pesawat udara)		2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit pesawat udara dan pesawat udara yang lainnya dalam bentuk menguasai dengan jenis yang mendukung kelangsungan operasional penerbangan sesuai dengan daerah operasi yang dilayani 3. Mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan	(*Remo -tely Piloted Air-craft Ope-rator Certi-ficate/ ROC*)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang–undangan 4. Menutup asuransi tanggung-jawab pengangkut dengan nilai per-tanggungan sebesar santunan kargo angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi 5. Menyerahkan laporan kegiatan angkutan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada menteri 6. Menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada Menteri 7. Melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kepemilikan pesawat udara kepada Menteri			
62	52231	Aktivitas Kebandar udaraan	Pelayanan jasa kebandar-udaraan	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen Penetapan sebagai penyelenggara bandar udara sebagai komersial yang berupa a. Dokumen perjanjian kerjasama atau penugasan pemerintah atau b. Peraturan pemerintah tentang penyertaan modal negara	5 Hari	1. Memiliki sertifikat bandar udara atau register bandar udara 2. Menyediakan fasilitas bandar udara yang laik operasi, serta memelihara kelaikan fasilitas bandar udara 3. Menyediakan personel yang mempunyai kompetensi untuk perawatan	- Serti-fikat/ regis-ter ban-dar udara - Deko-misio-ning Fasi-litas Peme-riksaan Peti Kemas Meng-guna-kan	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Dokumen Kemampuan finansial perusahaan untuk membangun, mengem-bangkan, dan meng-operasikan bandar udara yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan yang telah di audit dari badan hukum indonesia dan/atau masing-masing perusahaan		dan pengoperasian fasilitas bandar udara 4. Mempertahan kan dan meningkatkan kompetensi personel yang merawat dan meng-operasikan fasilitas bandar udara 5. Menyediakan dan memperbarui setiap prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas bandar udara 6. Memberikan pelayanan	Sum-ber Radiasi Peng-ion - Kons-truksi Fasi-litas Peme-riksaan Peti Kemas Meng-guna-kan Sum-ber Radiasi Peng-ion - Ope-rasi Fasi-litas		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham 3. Dokumen Besaran modal dasar perusahaan paling sedikit 30% dari belanja modal selama masa konsesi, ditambah besaran biaya operasional untuk 12 (dua belas) bulan dan 4. Dokumen Organisasi dan personil pengoperasian bandar udara sesuai dengan standar keselamatan dan		kepada pengguna jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh menteri 7. Menyediakan fasilitas kelancaran lalu lintas personel pesawat udara dan petugas operasional 8. Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara	Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sum-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keamanan penerbangan sipil, serta standar pelayanan jasa kebandarudaraan 5. Dokumen rencana usaha *(business plan)* untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan rencana induk Bandar Udara		9. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban bandar udara 10. Memelihara kelestarian lingkungan 11. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal atas kelaikan fasilitas bandar udara, pelaksanaan prosedur perawatan dan	ber Radiasi Peng-ion - Peme-riksaan Non-medik pada Manu-sia dengan Pem-bangkit Radiasi Peng-ion		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengoperasian fasilitas bandar udara, serta kompetensi personel bandar udara 13. Memberikan laporan secara berkala kepada menteri dan otoritas bandar udara			
63	52296	Jasa Penun-jang Angku-tan Udara	Pemasaran dan penjualan *(marketing and selling)* untuk perusahaan angkutan udara asing, dengan kegiatan	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaporkan kegiatan pemasaran dan penjualan untuk perusahaan angkutan udara asing setiap 6 bulan, termasuk	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			untuk menjual dan memasarkan jasa angkutan udara termasuk seluruh aspek pemasaran seperti riset pasar, promosi dan distribusi. Kegiatan ini tidak temasuk penjualan tiket pesawat udara						rekapitulasi kerjasama dengan perusahaan angkutan udara asing kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 2. Memenuhi ketentuan perundang undangan terkait perlindungan konsumen 3. Melaksanakan kegiatan usaha Pemasaran dan penjualan perusahaan angkutan udara asing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterbit-kan Sertifikat Standar			
			Regulated Agent/ Known Consignor		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki asuransi terhadap tanggung-jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan kargo dan pos pada lokasi Regulated Agent/Known Consignor sampai area pergudangan bandar udara 2. Laporan keuangan 1 (satu) tahun	14 Hari	1. Melakukan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak sertifikat diterbitkan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terakhir yang telah diaudit instansi yang berwenang atau kantor akuntan publik kecuali untuk badan hukum yang baru berdiri dibawah 1 tahun 3. Surat keterangan kesiapan mengangkut dari Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing 4. Persyaratan Teknis meliputi:		dengan pengangkutan kargo dan pos 3. Melak-sanakan, memelihara dan memper-tahankan program keamanan kargo dan pos dan standar prosedur pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos 5. Melaksanakan pengawasan internal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Memiliki Personel sesuai dengan standar b. Memiliki Fasilitas dan Peralatan sesuai dengan standar c. Memiliki prasarana untuk penang-anan kargo dan pos sesuai dengan standar d. Memiliki manual atau dokumen		(*quality control*) 6. Memenuhi standar fasilitas dan personel yang ditetapkan 7. Melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan keamanan yang digunakan pada saat pergantian shift kerja 8. Melakukan pemeliharaan peralatan fasilitas keamanan penerbangan 9. Melaporkan apabila terjadi perubahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Program Keamanan Kargo dan Pos 2) Standar Operasi Prosedur (SOP) Petunjuk teknis penanganan barang berbahaya (IATA DGR) original dengan edisi terbaru		program keamanan kargo dan pos, penanggung jawab atau pemilik badan hukum, domisili, fasilitas dan personel kepada menteri 10. Melaporkan kegiatan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara dan pengawasan internal kepada menteri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Melaporkan apabila terjadi insiden keamanan penerbangan selambat - lambatnya 1x 24 jam kepada menteri dan 12. Melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan inspektur keamanan penerbangan direktorat jenderal			
			Organisasi Perawatan Pesawat Udara (*approved*		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki DGCA Form 145-01 2. Memiliki AMO Manual yang	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AMO	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			maintenance organization)				telah disahkan 3. Memiliki Quality Manajemen System Manual yang telah disahkan 4. Memiliki SMS Manual yang telah disahkan 5. Memiliki *Training Procedure Manual* (TPM) yang telah disahkan 6. Memiliki pernyataan kepatuhan (*compliance statement*) terhadap CASR 145		2. Melaksakaan kegiatan operasional sesuai batasan kemampuan yang disahkan (*operation specification*) 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (AMO manual, QMS manual, TPM manual, dan SMS manual)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Memiliki pedoman perawatan dan pemeriksaan terkini yang dikeluarkan oleh pabrikan sesuai jenis kemampuan organisasi perawatan pesawat udara 8. Daftar kemampuan (*Capability List*) yang telah disahkan					
			Agen Pengurus Persetujuan Terbang (*Flight Approval*)		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Pada saat melakukan pengurusan persetujuan terbang (flight approval),	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									harus memiliki dokumen kerjasama operasi dengan operator jasa terkait bandar udara (ground handling) 2. Menyerahkan surat kesanggupan pembayaran jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa penerbangan dari pemohon persetujuan terbang (flight approval) pada saat melakukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengajuan persetujuan terbang (flight approval) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 3. Menyam-paikan laporan penggunaan persetujuan terbang (flight approval) setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perhubungan Udara 4. Memastikan pemilik dari pesawat udara sipil asing yang melakukan kegiatan angkutan udara bukan niaga dan niaga tidak berjadwal luar negeri bertanggung-jawab terhadap penyelesaian permasalahan dan kerugian yang ditimbulkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat *(ground handling)*, pelayanan penumpang dan bagasi, dan penanganan kargo dan pos		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki asuransi terhadap tanggung jawab atas kerusakan, musnah, atau kehilangan 2. Menyusun rencana Usaha (bussines plan) 3. Memiliki Standar Operasional Prosedur kegiatan sesuai bidang 4. Memiliki personel yang berkompetensi sesuai degan kegiatan yang dilakukan	5 Hari	1. Pada saat beroperasi dan melakukan kegiatan pelayanan jasa terkait wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing 2. Meng-operasikan fasilitas/ peralatan pelayanan jasa terkait Bandar Udara yang laik operasi	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional -	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki fasilitas dan peralatan yang laik operasi yang dibuktikan dengan surat laik peralatan oleh Badan Usaha Angkutan Udara		3. Memperkerjakan personel yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya 4. Melaksanakan pelayanan, dan mengoperasikan fasilitas/ peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan 5. Melaksanakan perawatan fasilitas/ peralatan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan dan menyam-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paikan program perawatan 6. Mempertahan-kan kinerja operasi, fasilitas peralatan, dan personel 7. Menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di Bandar Udara 8. Memelihara kelestarian lingkungan 9. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									10. Bertanggung-jawab terhadap pelayanan yang diberikan dan mempunyai jaminan asuransi 11. Melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara Bandar Udara			
			Penyewaan pesawat udara (*aircraft leasing*)		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi ketentuan pengoperasian dan keselamatan penerbangan terkait penerbangan	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional,	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									umum (*general aviation*) 2. Memenuhi standar Penyewaan pesawat udara (*aircraft leasing*) 3. Memastikan pesawat udara yang dioperasikan memenuhi ketentuan sesuai standar kelaikudaraan pesawat udara			
64.	85496	Pen-didikan Awak Pesawat dan jasa Angku-tan	Kelompok ini mencakup jasa pendidikan dan/atau pelatihan bagi	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki perizinan angkutan udara bukan niaga	7 Hari	1. Beroperasi dengan sertifikat sekolah penerbang yang masih berlaku	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Udara Khusus Pen-didikan Awak Pesawat	penerbang dan instruktur terbang				2. Melengkapi DGCA Form 141-01 3. Memiliki *Training Course Outline* (TCO) yang telah disahkan 4. Memiliki *Training Procedure Manual* (TPM) yang telah disahkan 5. Memiliki Dokumen *Safety Management System* (SMS) Manual yang telah disahkan 6. Memiliki Dokumen sistem kendali		2. Menyampai-kan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali 3. Mengevaluasi *training procedure manual* (TPM) dan *training course outline* (TCO) yang telah disetujui selalu dalam keadaan terkini 4. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (*operation specification*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mutu (QMS) yang telah disahkan 7. Memiliki pernyataan kepatuhan (*compliance statement*) 8. Memiliki Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (*Operating Certificate*)		5. Menjaga kecukupan personel, pesawat udara dan fasilitas yang memadai 6. Memelihara catatan-catatan dan dokumen-dokumen pelatihan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 7. Menunjukkan hak penggunaan berkelanjutan atas setiap bandar udara yang digunakan sebagai tempat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelatihan terbang 8. Melaksanakan kurikulum dan silabus yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki 10. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyeleng-garaan pendidikan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal perhubungan udara 11. Memenuhi standar, keselamatan dan keamanan penerbangan 12. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/ mutu Pendidikan dan pelatihan yang diseleng-garakannya 13. Menindak-lanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh ditjen perhubungan udara			
65	85499	Pen-didikan	Khusus untuk lembaga	-Mikro -Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Kurikulum dan silabus pendidikan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan pendidikan	- Perpan-jangan Serti-	Lingkup operasional-nya nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Lainnya Swasta	pendidikan dan/atau pelatihan yang melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi personel bandar udara	-Mene-ngah -Besar			dan/atau pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Dokumen Jumlah dan kualifikasi dan/atau kompetensi tenaga pengajar (instruktur) sesuai bidang diklat yang diseleng-garakan 3. Memiliki fasilitas pendidikan dan/atau pelatihan teori dan praktek sesuai bidang diklat yang		dan/atau pelatihan kepada direktur jenderal 2. Menerbitkan sertifikat kompetensi yang memuat rekapitulasi nilai tiap mata pelajaran sesuai dengan kurikulum dan silabus pendidikan dan/atau pelatihan tersebut 3. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelang-	fikat Pengesa han (Appro-val) Prog-ram Studi Lem-baga Diklat Kepe-lautan	dan/atau internasional	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diseleng-garakan 4. Dokumen pedoman penyeleng-garaan pendidikan dan/atau pelatihan 5. Buku-buku kerja pendukung dan peraturan		garaan pendidikan dan/atau pelatihan dan melaporkan hasilnya kepada direktur jenderal 4. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan serta peraturan perundangan negara republik indonesia 5. Memiliki bukti pemenuhan penyeleng-garaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara sesuai bidang yang diseleng-garakan 6. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan dan/atau pelatihan yang diseleng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									garakannya dan 7. Menindak-lanjuti setiap saran/reko-mendasi perbaikan dari direktorat jenderal perhubungan udara 8. Pemegang sertifikat lembaga pendidikan dan/atau pelatihan personel bandar udara tidak boleh mengiklankan bahwa organisasi tersebut sudah bersertifikat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kecuali hanya terbatas pada bidang dan/atau jenis pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diberikan izin			
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan/ atau pelatihan yang melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi penerbang tingkat		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melengkapi DGCA Form 142-01 2. Memiliki *Training Course Outline* (TCO) yang telah disahkan 3. Memiliki *Training Procedure Manual* (TPM) yang telah disahkan	7 Hari	1. Beroperasi dengan sertifikat *training center* yang masih berlaku 2. Menyam-paikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 6 (enam) bulan sekali	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			lanjut, juru mesin pesawat udara, personel penunjang operasi penerbangan, dan personel kabin				4. Memiliki Dokumen *Safety Management System* (SMS) Manual yang telah disahkan 5. Memiliki sistem Dokumen kendali mutu (QMS) disahkan 6. Memiliki pernyataan kepatuhan (*compliance statement*)		3. Mengevaluasi *training procedure manual* (TPM) dan *training course outline* (TCO) yang telah disetujui selalu dalam keadaan terkini 4. Melaksanakan ketentuan didalam batasan operasi (*training specification*) 5. Menjaga kecukupan personel dan fasilitas yang memadai 6. Memelihara catatan - catatan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dokumen-dokumen pelatihan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 7. Melaksanakan kurikulum dan silabus yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku 8. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki 9. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									mutu penyeleng-garaan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 10. Memenuhi standar, keselamatan dan keamanan penerbangan 11. Mempunyai program peningkatan kompetensi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terhadap tenaga pengajarnya (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan dan pelatihan yang diseleng-garakannya 12. Menindak-lanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Perhubungan Udara			
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi personel perawatan pesawat udara		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melengkapi DGCA Form 147-01 2. Memiliki dokumen materi ajar sesuai *curriculum* dan *syllabus* yang telah disahkan 3. Memiliki *Training Procedure Manual* (TPM) yang telah disahkan 4. Memiliki Dokumen *Safety Management System* (SMS) Manual yang	7 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan setiap 3 (tiga) bulan sekali 2. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disahkan 5. Memiliki Dokumen sistem kendali mutu (QMS) disahkan 6. Memiliki pernyataan kepatuhan (*compliance statement*)		kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara 3. Memenuhi keselamatan standar, dan keamanan penerbangan 4. Mempunyai program peningkatan kompetensi terhadap pengajarnya tenaga (instruktur) dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas/ mutu pendidikan dan pelatihan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang diseleng-garakannya 5. Menindak-lanjuti setiap hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara			
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang melakukan pendidikan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memenuhi ketentuan organisasi 2. Memenuhi Ketentuan SDM 3. Memenuhi ketentuan pedoman	7 Hari	1. Melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki 2. Menyusun dan	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan/atau pelatihan bagi Personel Navigasi Penerbangan				penyeleng-garaan pendidikan dan/atau pelatihan dalam bentuk *training procedures manual* (TPM) 4. Memenuhi ketentuan kurikulum dan syllabus 5. Memenuhi ketentuan fasilitas dan peralatan pelatihan 6. Memenubi ketentuan system penyimpanan dokumen dan rekaman 7. Memenuhi ketentuan		melaksanakan program peningkatan kompetensi tenaga pengajar 3. Menyusun dan memelihara *training procedures manual* (tpm) sehingga selalu dalam keadaan terkini 4. Menyusun dan memelihara modul pembelajaran (*courseware*) sehingga selalu dalam keadaan terkini			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							system kendali mutu		5. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada *training procedures manual* (tpm) dan *courseware* 6. Menyimpan dan memajang (display) sertifikat yang dimilikinya 7. Menunjukkan sertifikat yang dimilikinya pada saat dilakukan pengawasan keselamatan penerbangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Melaporkan pelaksanaan pelatihan di kantor pusat dan diluar pusat kegiatan kepada direktur jenderal 9. Melaksanakan pelatihan yang telah disetujui minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun 10. Menerbitkan sertifikat kelulusan/ sertifikat kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dinyatakan lulus 11. Melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu penyeleng-garaan pendidikan dan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Khusus untuk lembaga pendidikan dan pelatihan yang melakukan pendidikan dan pelatihan bagi personel pengamanan penerbangan, instruktur keamanan penerbangan, dan inspektur keamanan penerbangan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyusun pedoman penyeleng-garaan pendidikan dan pelatihan (*Training Procedure Manual*) 2. Memiliki dokumen peraturan keamanan penerbangan dan modul pelatihan 3. Memiliki instruktur keamanan penerbangan 4. Memiliki dan/atau menguasai sarana dan prasarana penyeleng-	7 Hari	1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai sertifikat standar yang diberikan 2. Menyeleng-garakan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan sesuai dengan *training procedure manual* (TPM) 3. Menyam-paikan rencana penyeleng-garaan pendidikan dan pelatihan	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garaan pendidikan dan pelatihan 5. Memiliki instruktur yang berlisensi		paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyeleng-garaan 4. Menyeleng-garakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun 5. Menyam-paikan laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Melakukan pengawasan internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal 7. Mengem-bangkan *training procedure manual* (TPM) sesuai dengan kondisi terkini dan 8. Melaksanakan peningkatan kompetensi instruktur 9. Memastikan kompetensi instruktur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai materi ajar dan 10. Melaksanakan tindakan korektif hasil pengawasan Inspektur Keamanan Penerbangan			
			Khusus untuk lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi personel fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Mematuhi ketentuan keamanan penerbangan dalam melaksanakan kegiatannya	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Khusus untuk lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi Personel penanganan barang berbahaya *(dangerous goods)*		Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Mematuhi ketentuan keselamatan penerbangan dalam melaksanakan kegiatannya	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan
			Perusahaan Penyeleng-gara Pelatihan Personil Penang-gulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Persetujuan sebagai penyelenggara personil penanggulangan pencemaran: 1. Administrasi a. Surat Permohonan b. Copy Akta Pendirian Badan Dan/Atau	5 Hari	1. Melaporkan secara berkala kegiatan pelatihan personil penanggulan gan pencemaran kepada Direktur Jenderal	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Lembaga Dari Notaris c. Copy Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum & HAM d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. Copy Surat Keterangan Domisili Badan Dan/Atau Lembaga f. Surat Keterangan Memiliki Dan/Atau Menguasai Bangunan Dan Tanah Minimum 10		Perhubungan Laut 2. Melaporkan apabila terdapat perubahan dalam data administrasi persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(Sepuluh) Tahun g. Copy KTP/ Identitas Penanggung Jawab Badan dan/atau Lembaga h. Struktur Organisasi Perusahaan 2. Teknis a. Ruang Kantor b. Ruang Belajar c. Alat Peraga Peralatan Penanggulangan Pencemaran: 1) Oil Boom 2) Skimmer 3) Sorbent					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Storage Tank 5) Dispersant d. Tenaga Pengajar 1) Sertifikasi IMO Level 1 2) Sertifikasi IMO Level 2 3) Sertifikasi IMO Level 3 e. Materi Dan Jam Pelajaran (Kurikulum/ Silabus)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66	52221	Aktivitas Pelayanan Ke-pelabuha-nan Laut	Seluruh kecuali Penggunaan sumber radiasi pengion	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan 2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas	- Deko-misio-ning Fasi-litas Peme-riksaan Peti Kemas Meng-guna-kan Sum-ber Radiasi Peng-ion - Kons-truksi Fasi-litas Peme-riksaan Peti Kemas Meng-	Hierarki pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul	Menteri/ Kepala Badan
											Hierarki pelabuhan pengumpan regional	Gubernur
											Hierarki pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelabuhan yang dioperasikan 4. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan 5. Memelihara kelestarian lingkungan 6. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian dan 7. Mematuhi ketentuan peraturan	gunakan Sumber Radiasi Pengion - Operasi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pernyataan Pembebasan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional	Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion - Pemeriksaan Non-medik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peng-ion		
67	52240	Pena-nganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkewarga-negaraan Indonesia, dengan syarat minimal: a. Pelabuhan Utama: ANT II dan/atau	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha bongkar muat barang 2. Menyam-paikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan surat penunjukan sebagai pelaksana bongkar muat kepada	- Serti-fikat Peme-nuhan Komit-men Sistem Mana-jemen Kea-manan Pangan Olahan di Sarana Pere-daran - Serti-fikat Peme-nuhan Standar Sistem Mana-	Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							D.III Pelayaran/ Trans-potrasi Laut b. Pelabuhan Pengumpul: ANT III dan/atau D.III Pelayaran/ Trans-potrasi Laut c. Pelabuhan Pengum-pan: ANT IV dan/ atau SMA/SMK atau Sederajat yang memiliki sertifikat		penyeleng-gara pelabuhan setempat 3. Menyam-paikan laporan kegiatan bongkar muat barang setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyeleng-gara pelabuhan setempat 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar	jemen Kea-manan Pangan Olahan di Sarana Pere-daran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketrampilan. Dengan kompetensi dan/atau keteram-pilan dibidang bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang		usaha bongkar muat barang 5. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentinga-nya sendiri 6. Melakukan pemuta-khiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bongkar muat yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau		mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Memiliki peralatan, meliputi: a. Forklift c. Pallet, d. Ship side-net e. Rope sling f. Rope net dan g. Wire net Dengan jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelabuhan setempat 6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha bongkar muat berdasarkan jumlah perusahaan bongkar muat dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
68	52291	Jasa Peng-urusan Trans-portasi (JPT)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli WNI berijazah minimum D-III Pelayaran/ Maritim/ Penerbangan/ Transportasi/ IATA Diploma/ FIATA Diploma, S-1 Logistik atau sertifikat	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha jasa pengurusan transportasi 2. Menyam-paikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan jasa pengurusan transportasi dan surat penunjukan pelaksana jasa pengurusan transportasi kepada penyeleng-	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan	Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi profesi di bidang forwarder atau manajemen supply chain atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif) 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan		gara pelabuhan setempat 3. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pengurusan transportasi setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat 4. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang jasa pengurusan transportasi yang di buktikan dengan sertifikat. 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal		pengurusan transportasi 5. Melakukan kegiatan tally hanya untuk kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping bagi kepentinga-nya sendiri 6. Melakukan pemuta-khiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemuta khiran sistem manajemen mutu sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah 6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem		dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara, atau perkeratapian sesuai dengan perkembangan teknologi 7. Memiliki dan/atau menguasai gudang sesuai dengan kebutuhannya 8. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan atau intansi pemerintah daerah yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							membidangi urusan perhubungan sesuai kewenangan-nya terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang berkegiatan di wilayah setempat 9. Apabila melakukan pengembangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. Pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha b. Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat 10. Apabila menyelenggarakan kegiatan pengang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kutan barang harus memiliki perizinan berusah yang berkaitan dengan pengangkutan barang 11. Apabila menyeleng-garakan kegiatan gudang secara komersial harus memiliki perizinan berusaha yang berkaitan dengan pergudangan					
69	50112	Angkutan Laut Perairan Pelabu-han	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-	Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dalam Negeri Untuk Penum-pang		- Besar			selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkewarga-negaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalak-sanaan Angkutan Laut dan Kepelabu-hanan (KALK)		sesuai Standar Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 2. Menyampai-kan laporan rencana angkutan perairan pelabuhan kepada penyeleng-gara pelabuhan dan Syahbandar setempat 3. Menyampai-kan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan	busi Ikan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau Transportasi Laut/Teknik Perkapalan Dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang angkutan perairan pelabuhan yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki		kepada Penyeleng-gara Pelabuhan dan syahbandar, Gubernur setempat setempat 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha angkutan perairan pelabuhan 5. Melakukan pemuta-khiran data perizinan berusaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi dan/atau keterampilan dibidang angkutan perairan pelabuhan yang di buktikan dengan sertifikat. 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat		setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan		undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 6. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan sesuai kegiatan 7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							harus dilengkapi dengan: a pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.					
70	50132	Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun,	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai Standar	-	Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Untuk Barang					peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkewarga-negaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalaksana-an Angkutan Laut dan Kepela-buhanan (KALK) atau Transportasi		Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan 2. Menyampai-kan rencana kegiatan peng-operasian kapal kepada penyeleng-gara pelabuhan dan Syahbandar setempat 3. Menyampai-kan permohonan olah gerak kapal kepada Penyeleng-gara Pelabuhan setempat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Laut/Teknik Perkapalan dengan memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun di bidangnya, dengan pengalaman 5 (lima) tahun dibidang pelayaran yang dibuktikan dengan Ijazah dan Surat Pengangkatan dari perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan setiap 6 (enam) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan Gubernur setempat 5. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha angkutan perairan pelabuhan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang angkutan perairan pelabuhan yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional		6. Melakukan pemutakhi-ran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat tentang keseimbangan		pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyediaan dan permintaan usaha angkutan perairan pelabuhan berdasarkan jumlah perusahaan angkutan perairan pelabuhan dan jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 6. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dan sesuai kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
71	52229	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	Perantara jual beli dan/atau sewa kapal	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang tenaga ahli kementeriaan, keuangan, hukum arbitrase, hukum kemaritiman internasional. Dengan	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan	-	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi dan/atau keterampilan di bidang ship broker yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan di bidang ship broker yang di buktikan dengan sertifikat.		syahbandar setempat 3. Menyampai-kan laporan kegiatan perantara jual beli dan/atau sewa kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyeleng-gara pelabuhan dan syahbandar setempat dan direktur jenderal 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan		standar usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal 5. Melakukan pemuta-khiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha 5. Memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah 6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi		7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perhubungan laut 7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelabuhan setempat					
			Salvage dan/atau pekerjaan bawah air		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan *salvage* dan/ atau pekerjaan bawah air 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) tim penyelam yang terdiri atas 4 (empat) orang tenaga penyelam yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang relevan	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha salvage dan pekerjaan bawah air 2. Menyampai-kan laporan hasil kegiatan kepada direktur jenderal 3. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	-	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki peralatan kerja yang terdiri atas: a. 1 (satu) set alat las dan potong bawah air b. 1 (satu) set pompa *salvage* dan/ atau pekerjaan bawah air c. 1 (satu) set alat survei d. 1 (satu) set kompresor selam tekanan rendah dan e. 1 (satu) set kompresor selam tekanan tinggi		sektor perhubungan 4. Mengajukan permohonan dan persetujuan kegiatan kepada direktur jenderal setiap akan melak-sanakan kegiatan 5. Bertanggung jawab atas kerugian kepada pihak ke 3 (tiga) akibat yang di timbulkan dalam pelaksanaan kegiatan 6. Melaporkan secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki 4 (empat) set alat selam *self contained underwater breathing apparatus (scuba)* atau 1 (satu) set alat selam *surface supplied breathing apparatus (ssba)* 5. Untuk kegiatan *salvage* memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *crane barge* atau *tugboat* berbendera Indonesia dan		tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud 7. Membayar penerimaan negara bukan pajak (pnbp) sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Untuk kegiatan pekerjaan bawah air memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal kerja jenis *pipe cable laying barge vessel* atau *tug boat* berbendera indonesia					
			Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau	-	Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan keselamatan 2. Memliki tenaga ahli ber-kerwarnagera-an Indonesia dengan ijazah S1/D.III umum Dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut yang dibuktikan dengan sertifikat		peralatan jasa terkait dengan angkutan laut 2. Menyampai-kan laporan rencana pelaksanaan kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut kepada penyeleng-gara pelabuhan dan syahbandar setempat apabila di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan		dalam dlkr/dlkp, dan gubernur setempat 3. Menyampaikan laporan kegiatan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut setiap 6 (enam) bulan kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar setempat apabila di			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perizinan berusaha 4. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahanya 5. Surat rekomendasi		dalam dlkr/dlkp, dan gubernur setempat 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut 5. Melakukan pemuta-khiran data perizinan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut berdasarkan jumlah perusahaan Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut		berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Melakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk pengem bangan lokasi usaha/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan jumlah permintaan Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut		kantor cabang operasional pada setiap lokasi dan memiliki penanggung jawab/ kepala cabang 8. Ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			
72	52298	Aktivitas Tally Mandiri	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki tenaga ahli berkewarga-negaraan	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-	-	Provinsi.	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar			Indonesia di bidang tally, sebagai berikut: a. Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau D III ahli kepelabuhanan dan Pelayaran atau transportasi laut atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan		menerus sesuai standar usaha tally mandiri 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan tally dan surat penunjukan pelaksana tally kepada penyelenggara pelabuhan 3. Menyampaikan laporan kegiatan tally setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyeleng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tally di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul atau b. Tenaga ahli disesuai-kan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpa Dengan kompetensi dan/atau keteram-pilan dibidang		gara pelabuhan setempat 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha tally mandiri 5. Melakukan pemuta-khiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen mutu sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Tally Mandiri yang dibuktikan dengan sertifikat 2. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang Tally Mandiri yang di buktikan dengan sertifikat. 3. Memiliki sistem		ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan 5. Memiliki Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha tally mandiri berdasarkan jumlah perusahaan tally mandiri dan jumlah kunjungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 6. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelengg					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ara pelabuhan setempat					
73	52109	Per-gudangan dan Penyim-panan Lainnya	Depo Peti Kemas	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkerwargane garaan Indonesia. paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III,	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha depo peti kemas 2. Menyampai-kan laporan rencana pelaksanaan kegiatan kegiatan depo peti kemas kepada penyeleng-gara pelabuhan setempat dan gubernur	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-busi Ikan - Serti-fikat Pene-rapan Pena-nganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbu-han (SPPB-PSAT)	Provinsi.	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksana an atau transportasi laut berijazah Diploma III, atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Depo Peti Kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan		apabila di dalam dlkr atau kepada gubernur apabila di luar dlkr 3. Menyampai-kan laporan kegiatan depo peti kemas setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyeleng-gara pelabuhan setempat 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam	- Izin Usaha Pergu-dangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Akse-soris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang depo peti kemas yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi		standar usaha depo peti kemas 5. Melakukan pemuta-khiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha 5. Persetujuan studi lingkungan dari instasi pemerintah kabupaten/		perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas 6. Dalam hal rencana depo peti kemas dalam dlkr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat 7. Dalam hal rencana depo peti kemas di luar DLKr pelabuhan harus dilengkapi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi urusan perhubungan pada pemerintah provinsi setempat 8. Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m² yang dibuktikan dengan hak penguasaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar dlkr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam dlkr pelabuhan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: a. Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet b. Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (empty)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ukuran 20 (dua puluh) feet 10. Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: a. Paving b. Aspal atau c. Beton/ concrete 11. Memiliki peralatan antara lain: a. 1 (satu) unit reach stacker b. 1 (satu) unit top loader c. 1 (satu) unit side loader					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. 1 (satu) unit forklift dan/atau e. Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi per-syaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha depo peti kemas 12. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha; b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					
74	52297	Jasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus	-	Nasional dan Internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Perusahaan Pelayaran		- Besar			selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur		sesuai standar usaha pengelolaan keagenan kapal 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan keagenan kapal dan surat penunjukan pelaksana keagenan kapal kepada penyelenggara pelabuhan 3. Menyampaikan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jenderal Perhubungan Laut 3. Memiliki tenaga ahli berkerwarnage raan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketatalak-sanaan Angkutan Laut dan Kepela-buhanan (KALK) atau Transportasi Laut Dengan kompetensi dan/atau		bulan kepada penyeleng-gara pelabuhan setempat 4. Melaksana-kan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha keagenan kapal 5. Melakukan pemutak-hiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemutak-hiran sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keterampilan di bidang jasa keagenan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat 4. Memiliki 1 (satu) orang tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang keagenan kapal yang di buktikan dengan sertifikat.		manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Memiliki kendaraan bermotor yang laik sebagai transportasi penunjang usahanya 6. Surat rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan usaha jasa keagenan kapal berdasarkan jumlah perusahaan keagenan kapal dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jumlah kunjungan kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat 7. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. pengangkatan penanggung jawab pada masing-masing lokasi usaha;					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					
75	70202	Aktivitas Konsultansi Transportasi	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki sekurang kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Ahli yang dibuktikan dengan sertifikat dan memiliki pengetahuan tentang koda untuk masing masing bidang yang meliputi: a. Keamanan b. Perkapalan c. Kepelabuhanan	7 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai standar usaha aktivitas konsultansi manajemen keamanan pelabuhan 2. Melaksanakan peraturan mengenai perjanjian kerja, dan	- Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase	Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Manajemen Resiko e. Intelijen f. Harus Mempunyai Akta Notaris Pendirian RSO yang sah dari Kemenkum ham yang dalam akta notaris yang bergerak di bidang konsultan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan 2. Tenaga Ahli yang dimaksud pada nomor 1		jaminan sosial sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku 3. Menyampai-kan laporan setiap kegiatan kepada direktur jenderal selambat lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesainya kegiatan 4. Menyampai-kan laporan berkala seitan 6 (enam) bulan tentang kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) diatas hanya dapat didaftarkan pada 1 (satu) *Recognized Security Organization*		perusahaan kepada direktur jenderal 5. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan akte dan alamat perusahaan 6. Melaporkan secara tertulis kepada direktur jenderal setiap kali terjadi perubahan tenaga ahli			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan pembukaan cabang perusahaan			
76	52225	Aktivitas Pengelolaan Kapal	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan 2. Memiliki tenaga ahli berkewarganegaraan Indonesia minimal Ahli Nautika Tingkat III (ANT-III) atau	5 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha pengelolaan kapal 2. Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan pengelolaan kapal kepada penyelenggara pelabuhan dan syahbandar	-	Nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ahli Tehnika Tingkat III (ATT-III) atau Diploma III Ketata-laksanaan Angkutan Laut dan Kepela-buhanan (KALK) atau atau Transportasi Laut/ Teknik Perkapalan Dengan kompetensi dan/atau keterampilan di bidang pengelolaan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Memiliki 1 (satu) orang		setempat dan direktur jenderal 3. Menyampai-kan laporan kegiatan keagenan kapal setiap 6 (enam) bulan kepada penyeleng-gara pelabuhan dan syahbandar setempat dan direktur jenderal 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga operasional minimal pengalaman 1 (satu) Tahun di bidang pelayaran dan memiliki kompetensi dan/atau keterampilan dibidang pengelolaan kapal yang di buktikan dengan sertifikat 4. Memiliki sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional		usaha pengelolaan kapal 5. Pemuta-khiran data perizinan berusaha setiap 2 (dua) tahun 6. Melakukan pemuta-khiran sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan atau sistem manajemen usaha setiap 2 (dua) tahun 7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau memiliki sistem manajemen usaha yang telah mendapat persetujuan (*approval*) dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Apabila melakukan pengembangan usaha/pembukaan kantor cabang operasional harus dilengkapi dengan: a. Pengangkatan penanggung		undangan dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab pada masing-masing lokasi usaha b. Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat					
77	50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi	3 Hari	1. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan	-	Lintas Pelabuhan antar provinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lintas pelabuhan antar kabupaten/ kota dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau		operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-		wilayah provinsi	
											Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 4. Memiliki Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) 5. Bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang		undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu *gross tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan		(empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasika 7. Melaporkan kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera		pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut 8. Melaporkan perkem-bangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampai-kan rencana kedatangan dan/atau keberang-katan kapal ~~(lk3)~~ serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat		laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyeleng-gara pelabuhan 10. Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyeleng-gara pelabuhan yang merupakan realisasi dari laporan rencana kedatangan dan keberang-katan kapal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan melalui: a. *Grosse* akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. *Crew list* bagi tongkang bermesin		11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 13. Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perusahaan kepada pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
78	50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penum-pang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran	3 Hari	1. Melak-sanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua	-	Lintas Pelabuhan antar provinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan
											Lintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi	Gubernur
											Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling		ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu *gross tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an Indonesia 6. Memiliki kapal tunda		pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) 7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling		pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut ~~8.~~ Melaporkan perkem-bangan komposisi kepemilikan modal perusahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8		kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal ~~(Ik3)~~ serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyelenggara pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. *Grosse* akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat kesela-matan kapal yang masih berlaku		penyeleng-gara pelabuhan yang merupakan realisasi-dari rencana kedatangan dan keberang-katan kapal 11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan 11. *Crew list* bagi tongkang bermesin.		kunjungan kapal 12. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin kewenangan nya dan 13. Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data kegiatan keagenan kapal serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
79	50121	Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penum-pang	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat	3 Hari	1. Melak-sanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan inter-nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diploma iii di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan)		laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki		nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh awak kapal ber-kewarganega-raan indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh		perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lima gross tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh		8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyeleng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							puluh lima *gross tonnage*). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri sesuai 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. *Grosse* akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih		gara Pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal 11. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku c. Sertifikat kesela-matan kapal yang masih berlaku dan d. *Crew list* bagi tongkang bermesin		pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Melaporkan perubahan armada kepada direktur jenderal/ gubernur/ bupati atau wali kota sesuai kewenangan-nya dan 13. Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
80	50131	Angkutan Laut Dalam	Seluruh	-Mikro -Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang	- Serti-fikat Pene-	Lintas pelabuhan antarprovinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Negeri Untuk Barang Umum		-Mene-ngah -Besar			milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan		tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di	rapan Distri-busi Ikan	dan internasional	
											Iintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi	Gubernur
											Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota.	Bupati/ WaliKota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/ kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh		bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							puluh lima gross tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang		domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan		kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut 8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 9. Menyampaikan pem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 merupakan tongkang yang		beritahuan rencana kedatangan dan/atau keberang-katan kapal (serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyeleng-gara pelabuhan 10. Menyampai-kan laporan kegiatan bulanan kunjungan kapal kepada penyeleng-gara pelabuhan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. *Grosse* akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat kesela-matan kapal yang masih berlaku dan d. Crew *list*		yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberang-katan kapal 11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin 12. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin direktur jenderal/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagi tongkang bermesin		gubernur/ bupati atau wali kota sesuai kewenangan-nya dan 13. Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
81	50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang dan 2. Memiliki paling sedikit	3 Hari	1. Melak-sanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan
											Iintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi	Gubernur
											lintas pelabuhan dalam wilayah	Bupati/ WaliKota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalak-sanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha		usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila		kabupaten/kota.	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 4. Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) 5. Bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan		terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu *Gross Tonnage*) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarganegara-an Indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit		untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling		angkutan laut 8. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin. 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal (lk3) serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima *gross tonnage*). 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:		*manifest*) kepada penyeleng-gara pelabuhan 10. Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyeleng-gara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberang-katan kapal 11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (*voyage*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. *Grosse* akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan 11. *Crew list* bagi tongkang bermesin		*report*) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 13. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
82	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki tenaga ahli bidang ketatalak-sanaan nautis tingkat dasar	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pelayaran niaga tingkat dasar 2. Memiliki kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin 3. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak		standar usaha angkutan pelayaran rakyat paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan 2. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 3. Melengkapi semua kapal		Lintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi	Gubernur
											Lintas pelabuhan dalam kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu 4. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT 7 serta paling besar GT 174 5. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir 2, butir 3, dan butir 4 harus dapat dibuktikan melalui:		yang dimiliki dengan spesifikasi kapal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran-rakyat 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku dan c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku		direktur utama atau nama penanggung jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat) belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut 5. Melaporkan kepada pejabat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemberi izin semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang 7. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyeleng-gara pelabuhan 8. Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyeleng-gara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberang-katan kapal 9. Melaporkan realisasi peng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									operasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan 10. Melaporkan perubahan armada baik yang dimiliki maupun yang dioperasikan kepada pejabat pemberi izin 11. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepada pejabat pemberi izin yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dioperasikan, dan data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal yang dioperasikan			
83	50141	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	Seluruh	-Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan	3 Hari	1. Melak-sanakan ketentuan yang tercantum dalam izin	- Serti-fikat Pene-rapan Distri-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salina ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang		usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran	busi Ikan	Lintas pelabuhan antar-kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi	Gubernur
											Lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling		serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal ber-kewarga-negaraan Indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan		dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera		angkutan laut 7. Menyampai-kan laporan kunjungan kapal kepada penyeleng-gara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberang-katan kapal 8. Melaporkan perkem-bangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang		pejabat pemberi izin 9. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 10. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (*voyage report*)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan 11. *Crew list* bagi tongkang bermesin		kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyeleng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gara pelabuhan 13. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			
84	71207	Jasa Klasifikasi Kapal	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 2. Struktur organisasi 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama 4. Untuk memperoleh izin usaha Jasa Klasifikasi	5 Hari	1. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan terhadap persyaratan yang telah diverifikasi sebelumnya kepada direktur jenderal 2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai	-	Lingkup operasional-nya nasional dan/atau internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhadap Badan Klasifikasi Asing yaitu: a. Diakui oleh pemerintah yang dtuangkan dalam Peraturan Menteri Perhu-bungan b. Terdaftar sebagai Anggota Badan Klasifikasi Inter-nasional (IACS members) c. Struktur organisasi		standar jasa klasifikasi kapal 3. Menyampai-kan laporan tahunan secara tertulis kepada direktur jenderal 4. Melak-sanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sertifikat standar 5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Identitas Pimpinan tertinggi 5. Memiliki kantor perwakilan/ cabang di Indonesia beserta fasilitas, perlengkapan dan peralatan pendukung kegiatan jasa klasifikasi 6. Daftar nama dan Jumlah Surveyor yang bekerja sebagai pegawai badan klasifikasi 7. Memiliki surveyor ber-kewarga-negaraan		dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia bagi badan klasifikasi asing 8. Pernyataan melakukan kegiatan Jasa inspeksi, survey, sertifikasi klasifikasi maupun dan keselamatan maritime sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 9. Surat penunjukkan pendelegasian kewenangan statutory atas nama pemerintah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagi badan klasifikasi yang telah ditunjuk sebagai R.O 10. Memiliki laboratorium penelitian dan pengembangan 11. Daftar Rule/aturan yang diterbitkan 12. Memiliki Sistem Informasi layanan atau data yang bisa diakses					
85	50143	Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki tenaga ahli bidang ketata-laksanaan atau pelayaran dasar	3 Hari	1. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus sesuai	-	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu 3. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran GT		standar usaha angkutan pelayaran rakyat 2. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung-jawab dan/atau nama pemilik, nomor pokok			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7 serta paling besar GT 174		wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal 3. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha semua data kapal milik atau kapal yang dioperasikan 4. Melengkapi semua kapal yang dimiliki dengan spesifikasi kapal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat standar usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan 5. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi perizinan berusaha setiap pembukaan kantor cabang 6. Mematuhi semua			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan perundang-undangan dibidang peraturan pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			
86	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	Pengang-kutan barang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus	- Surat Izin Kapal Peng-angkut Ikan	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja		sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 4. Memiliki Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling		pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung-jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit -74- dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarga-negaraan Indonesia 6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda		5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin		kantor cabang perusahaan angkutan laut 8. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal ~~(Ik3)~~ serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyelenggara pelabuhan 9. Melaporkan perkem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri. 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang		bangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 10. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat kesela-matan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 12. Menyampai-kan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan 13. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan dari kedatangan dan keberangkatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
87	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	Pengang-kutan barang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalak-sanaan, nautis, atau teknis pelayaran	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan laut 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin usaha diterbitkan 3. Mematuhi semua ketentuan	- Surat Izin Kapal Peng-angkut Ikan - Surat Izin Kapal Pendu-kung Operasi Penang-kapan Ikan	Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/ kontrak kerja 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 4. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling		peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 5. Bagi perusahaan patungan (*joint venture*) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarga-negaraan Indonesia		nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut 6. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus		semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan perubahan armada kepada pejabat pemberi izin 8. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tujuh puluh lima Gross Tonnage) 7. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) atau 8. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175		angkutan laut 9. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada penyelenggara pelabuhan 10. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) 9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 8 merupakan tongkang yang memiliki mesin penggerak sendiri 10. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal		pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberang-katan kapal 11. Melaporkan realisasi peng-operasian kapal (*voyage report*) kepada pejabat pemberi izin yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		12. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada pejabat pemberi izin 13. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
88	39000	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Perusahaan Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan	– Mikro – Kecil – Menengah – Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan usaha penanggulangan pencemaran : a. Aspek administratif: 1) Akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang salah satu bidang usaha-	15 Hari	1. Melaporkan secara berkala kegiatan usaha penanggulangan pencemaran kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 2. Melaporkan apabila terdapat perubahan dalam data administrasi persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Persetujuan Gudang Bahan Peledak - Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nya bergerak di bidang penang-gulang-an pence-maran 2) Surat keterang-an domisili perusa-haan 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 4) Fotokopi Kartu Tanda Pen-duduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(KTP) penanggung jawab perusahaan b. Aspek teknis: 1) Tenaga ahli meliputi: i. 6 (enam) orang personil operator ii. 1 (satu) orang penyelia (supervisor] dan iii. 1 (satu) orang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknisi pemeliharaan peralatan penanggulangan pencemaran 2. Memiliki peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran paling sedikit terdiri atas: a. Alat pelokalisir (oil boom) sepanjang 200 m (dua raius meter) b. 1 (satu) set alat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penghisap (skimmer] dengan kapasitas 10 (sepuluh) m3jjam c. 1 (satu) buah alat penampung sementara (*temporary storage*) dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) m3 d. 1 (satu) pack bahan penyerap (sorbent) dan e. 100 (seratus) liter bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguran (dispersant)					

J. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	46441	Perdaga-ngan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia	Pedagang Besar Farmasi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1.Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang	4 Hari	1.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 12 bulan sejak Izin diterbitkan 2.Memiliki surat izin praktik apoteker bagi apoteker	- Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) - Izin Edar Obat Bahan Alam - Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Suplemen Keseha-tan - Reko-mendasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disahkan oleh notaris 2.Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF b. Gudang PBF 3.Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		penanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan dan distribusi obat	Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Rekom-endasi Badan Usaha di Bidang Pemasa-ran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Persetu-juan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehatan - Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam - Persetujuan Iklan Obat Kuasi - Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Baku dan/atau Bahan Penolong - Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Praklinik Suplemen Keseha-tan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Klinik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Keseha-tan		
			Pedagang Besar	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1.Dokumen perizinan	4 Hari	1.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi	Sertifikat Cara Distribusi	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Farmasi Cabang	- Besar			berusaha PBF Pusat 2. Dokumen penunjukan sebagai pimpinan PBF Cabang dari pimpinan PBF Pusat 3. Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)		Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 12 bulan sejak Izin diterbitkan 2. Memiliki surat izin praktik apoteker bagi apoteker penanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan	Obat yang Baik (CDOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang disahkan oleh notaris 4. Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF Cabang b. Gudang PBF Cabang		dan distribusi obat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Bukti Pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	46442	Perdagang-an Besar Obat Tradisional untuk Manusia	Pedagang Besar Obat Bahan Alam	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Data rencana distribusi/ penyaluran obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi 2.Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis, yang dibuktikan dengan per-janjian kerja sama 3.Bukti pembayaran	4 Hari	1.Surat izin praktik penanggung jawab teknis 2.Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sesuai standar usaha 3.Menyalurkan obat bahan alam,	- Izin Edar Obat Bahan Alam - Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Suplemen Kesehatan - Rekomen-dasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		suplemen kesehatan, dan obat kuasi yang memiliki Izin Edar 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan	Kesehatan - Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Rekomendasi Badan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam - Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan - Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Persetujuan Iklan Obat Kuasi - Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Hasil Uji Praklinik Obat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Alam - Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Praklinik Suplemen Keseha-tan - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam - Hasil Uji Klinik dan Penelitian		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Klinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan		
3	46443	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia	Pedagang Besar Kosmetik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Data rencana distribusi/ penyaluran kosmetika 2. Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis,	4 Hari	1. Surat izin praktik penanggung jawab teknis 2. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran	- Izin Edar Obat Kuasi - Izin Edar Kosmetik - Rekomendasi Sebagai Pemohon	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama 3.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		kosmetik sesuai standar usaha 3. Menyalurkan kosmetik yang memiliki izin edar/ notifikasi 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan	Notifikasi Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Obat Kuasi - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik - Persetujuan Iklan Obat Kuasi - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi - Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi		
4	46447	Perdagang-an Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1.Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)	4 Hari	1.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat	- Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) - Reko-mendasi Untuk Menda-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang disahkan oleh notaris 2. Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF Bahan Obat b. Gudang PBF Bahan Obat		12 bulan sejak Izin diterbitkan 2. Memiliki surat izin praktik apoteker bagi apoteker penanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan dan distribusi bahan obat	patkan Pengaku-an Sebagai Importir Produsen Bahan Berbah-aya - Peneta-pan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3.Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
			Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat Cabang	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1.Dokumen perizinan berusaha PBF Bahan Obat Pusat 2.Dokumen penunjukan sebagai pimpinan PBF Bahan Obat Cabang dari pimpinan PBF Bahan Obat Pusat	4 Hari	1.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban paling lambat 12 bulan sejak Izin diterbitkan 2.Memiliki surat izin praktik	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Dokumen apoteker penanggung jawab, meliputi: a. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) b. Surat pernyataan bekerja penuh waktu c. Perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha yang disahkan oleh notaris		apoteker bagi apoteker penanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan penerimaan dan distribusi bahan obat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4.Data lokasi usaha, meliputi: a. Kantor PBF Bahan Obat Cabang b. Gudang PBF Bahan Obat Cabang 5.Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	46448	Perdagang-an Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	Perdagang-an Besar Bahan Obat Bahan Alam untuk Manusia	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Data rencana distribusi/ penyaluran bahan obat bahan alam 2. Memiliki paling rendah tenaga vokasi farmasi sebagai penanggung jawab teknis, yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan	4 Hari	1. Surat izin praktik penanggung jawab teknis 2. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran bahan obat bahan alam sesuai standar usaha 3. Menyalurkan bahan obat bahan alam yang memenuhi standar dan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		persyaratan kemanan, mutu, dan khasiat/ manfaat 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
6	46691	Perdagang-an Besar Alat Laboratori-um, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran	Distributor Alat Kesehatan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi umum 2. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan didistribusikan	7 Hari	1. Penanggung jawab teknis memiliki pelatihan Sertifikat Cara Distribusi yang baik	- Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		untuk Manusia					3.Bangunan dan prasarana 4.Daftar peralatan 5.Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 6.Laporan kesiapan sarana 7.Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		(CDB) untuk Alat Kesehatan 2.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan 3.Mendistribusikan produk alat kesehatan yang telah memiliki izin edar 4.Menyampaikan laporan *e-report* setiap 6 bulan	- Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor - Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5.Menyampaikan laporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 6.Menyampaikan laporan *recall* 7.Menyampaikan laporan alat kesehatan palsu 8.Menyampaikan permohonan perubahan: a. Penanggung Jawab Teknis (PJT) b. Alamat	Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Surat Ketera-ngan Penduku ng Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Ketera-ngan Penduku ng Ekspor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Jenis produk d. Denah bangunan	Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor - Surat Ketera-ngan Penduku ng Ekspor Impor - Sertifikat Pemberita huan Ekspor - Surat Ketera-ngan Penduku ng Ekspor Impor - Surat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Ketera-ngan *Research Use Only* - Surat Ketera-ngan Penduku ng Ekspor Impor - Surat Ketera-ngan Kuasa Impor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Cabang Distributor Alat Kesehatan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Administrasi umum 2. Bangunan dan prasarana 3. Peralatan 4. Sumber Daya Manusia (SDM) 5. Izin distribusi alat kesehatan pusat 6. Penunjukkan dari distributor alat kesehatan pusat 7. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan	7 Hari	1.Penanggung Jawab Teknis memiliki Sertifikat pelatihan Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan 2.Memiliki Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan 3.Mendistribusikan produk alat kesehatan yang telah	- Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri - Izin Edar Alat Kesehatan Impor - Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri - Sertifikat Cara Distribusi yang baik	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)		memiliki izin edar 4.Menyampaikan laporan e-report setiap 6 bulan 5.Menyampaikan laporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 6.Menyampaikan laporan *recall* 7.Menyampaikan laporan alat kesehatan palsu	(CDB) untuk Alat Kesehatan Cabang - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor -		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyampaikan permohonan perubahan: 1. Penanggung Jawab Teknis (PJT) 2. Alamat 3. Jenis produk 4. Denah bangunan	Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri - Surat Ketera-ngan Penduku ng Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor - Surat Ketera-ngan Penduku ng Ekspor		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Impor - Sertifikat Pemberitahuan Ekspor - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan *Research Use Only* - Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Ketera-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ngan Kuasa Impor		
7	47721	Perdagang-an Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek	Apotek	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Denah bangunan 2.Daftar sarana, prasana dan peralatan 3.Data Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki	9 Hari	1.Menyampaikan laporan *self-assessment* penyelengga-raan apotek 1 kali dalam setahun 2.Menyampaikan laporan pelayanan kefarmasian setiap bulan 3.Menyampaikan laporan SIPNAP setiap bulan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	47722	Perdagang-an Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek	Toko Obat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Setelah perizinan berusaha terbit, wajib memenuhi Standar Toko Obat yang meliputi ketentuan: a. Lokasi b. Bangunan c. Sarana, prasarana dan peralatan d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. Standar Operasional Prosedur 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
9	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	Toko Obat Bahan Alam	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk obat bahan alam,	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									suplemen kesehatan dan obat kuasi yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
10	47724	Perdagang-an Eceran Kosmetik untuk Manusia	Toko Kosmetik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran	- Izin Edar Kosmetik - Rekomen dasi Sebagai Pemohon	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar/ notifikasi sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan	Notifikasi Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Bahan Penolong		
11	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia	Toko Alat Kesehatan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyediakan: a. Data Sumber Daya Manusia (SDM) b. Data sarana dan prasarana c. Daftar alat kesehatan yang dijual 2. Memiliki penanggung jawab pendidikan	- Sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Diploma III dan telah mengikuti pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik 3. Mengedarkan produk alat kesehatan tertentu yang telah memiliki izin edar 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berkala setiap 6 bulan			
12	47842	Perdagang-an Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	Los Pasar Farmasi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Setelah perizinan berusaha terbit, wajib memenuhi Standar Los Pasar Farmasi yang meliputi ketentuan: a. Sarana, prasarana dan peralatan b. Sumber Daya Manusia (SDM)	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									c. Standar Operasional Prosedur 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
13	47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Obat Bahan Alam	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk obat	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
14	47844	Perdagang-an Eceran Kaki Lima Dan Los	Pedagang Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran	- Surat Ketera-ngan Ekspo	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pasar Kosmetik							produk sesuai standar usaha 2. Mengedarkan produk kosmetik yang telah memiliki izin edar/notifikasi sesuai dengan ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan	- Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		
15	56305	Rumah/ Kedai Obat Tradisional	Kedai Jamu/	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melaksanakan cara pembuatan	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Depot Jamu	- Besar					jamu sesuai standar usaha 2. Menggunakan produk jadi obat bahan alam yang telah memiliki izin edar sesuai ketentuan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 bulan			
16	71208	Aktivitas Pengujian dan/atau	Institusi Pengama-nan Alat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen penunjukan/ pengangkatan	14 Hari	1. Memiliki nomor register institusi	- Izin Peneta-pan Industri	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	dan Fasilitas Kesehatan	- Besar			sebagai kepala/ pimpinan Institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan 2. Persyaratan Teknis, meliputi: a. Daftar sarana b. Daftar prasarana c. Data SDM yang dimiliki d. Daftar peralatan		pengamanan alat dan fasilitas kesehatan 2. Terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
17	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industrinya	Penyelenggaraan pengendalian vektor, binatang pembawa penyakit, dan hama pemukiman pada bangunan,	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Izin operasi/ surat rekomendasi dari otoritas bandar udara, pelabuhan, atau lintas batas darat negara	20 Hari	1. Berkoordinasi kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kab/kota atau instansi kekarantinaan kesehatan di		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			permukim-an, industri, dan tempat usaha lainnya di bandar udara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara				2. Daftar sarana dan peralatan 3. Data sumber daya manusia yang dimiliki 4. Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5. Standar Operasional Prosedur (SOP)		pintu masuk negara) saat akan melakukan kegiatan 2. Pelaporan pelayanan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kab/kota atau instansi kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industrinya	Penyelenggaraan Pengendalian vektor, binatang pembawa penyakit, dan hama pemukiman pada bangunan, permukiman,industri, dan tempat usaha lainnya di wilayah kabupaten/kota	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi,	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat rekomendasi/berita acara verifikasi lapang dari penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kabupaten/kota) 2. Daftar sarana dan peralatan 3. Data sumber daya manusia yang dimiliki 4. Bukti pembayaran	20 Hari	1. Berkoordinasi kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kabupaten/kota saat akan melakukan kegiatan 2. Pelaporan pelayanan kepada penanggung jawab wilayah kerja setempat (dinas kesehatan kab/kota)	-	Seluruh	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5. Standar Operasional Prosedur (SOP)		3. Membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
18	86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat tidur 50 sampai dengan 200	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi umum, meliputi dokumen badan hukum publik BLU/BLUD 2. Teknis, meliputi	28 Hari	1. Mendapatkan akreditasi rumah sakit setelah beroperasi 2 tahun 2. Melakukan pelaporan melalui Sistem	- Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/ atau Sel	BLU/ BLUD	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dokumen studi kelayakan (*feasibility study*), dokumen *detail engineering design* dan *master plan* 3. Rencana struktur organisasi sumber daya manusia dan sumber daya manusia kesehatan 4. Dokumen pelayanan		Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 3. Memiliki nomor register rumah sakit 4. Melakukan pengukuran indikator mutu (internal) 1 tahun sekali	Punca di Rumah Sakit - Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit - Penetapan Penyelenggaraan Penelitian Berbasis		
			Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat tidur 201 sampai dengan 250	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		28 Hari			BLU/ BLUD	Gubernur
			Rumah Sakit Pemerintah dengan jumlah tempat	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		28 Hari			BLU/ BLUD	Menteri

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tidur lebih dari 250							Pelayanan Terapi Sel Punca dan/atau Sel - Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis - Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Penetapan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir - Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi - Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah - Penyelenggaraan Transplantasi Organ di Rumah Sakit - Penyelenggaraan Bank Mata di Rumah Sakit		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit - Penyelenggaraan Bank Plasma - Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) - Izin Edar Obat - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Izin Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja - Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Me-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nunjang Layanan Kedok-teran Nuklir - Operasi Fasilitas Produksi Radioiso-top dan Radio-farmaka yang Me-nunjang Layanan Kedokte-ran Nuklir - Dekomi-sioning Fasilitas		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Layanan Kedokteran Nuklir - Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Operasi Fasilitas Radiofarmaka yang Me-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Dekomisioning Fasilitas Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Radio-farmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Dekomis-sioning Fasilitas Kedokte-ran Nuklir Terapi - Pernyata-an Pem-bebasan Fasilitas Kedokte-ran Nuklir Terapi - Kons-truksi Fasilitas Kedokte-ran Nuk-lir Diag-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nostik In Vivo - Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo - Dekomissioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Diag-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nostik In Vivo - Konstruksi Fasilitas Radioterapi - Operasi Fasilitas Radioterapi - Dekomissioning Fasilitas Radioterapi - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Radioterapi - Radiologi Diagnos-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										tik dan/ atau Inter-vensional - Radiologi Diagnos-tik untuk Pengukur-an Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokte-ran Nuk-lir Diag-nostik In Vitro - Surat Persetu-juan Pelaksa-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										naan Uji Klinik Alat Kesehatan		
19	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	Rumah Sakit Swasta dengan jumlah tempat tidur 50 sampai dengan 200	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi umum, meliputi: dokumen badan hukum nirlaba atau profit, profil rumah sakit dan komitmen untuk melakukan akreditasi 2. Teknis, meliputi: dokumen studi	28 Hari	1. Mendapatkan akreditasi rumah sakit setelah beroperasi 2 tahun 2. Melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS)	- Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di Rumah Sakit	Seluruh	Bupati/ Walikota
			Rumah Sakit Swasta dengan jumlah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		28 Hari		- Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tempat tidur 201 sampai dengan 250				kelayakan (*feasibility study*), dokumen *detail engineering design* dan *master plan* rumah sakit 3. Daftar bangunan, prasarana dan peralatan 4. Rencana struktur organisasi sumber daya manusia dan daftar sumber daya manusia		3. Memiliki nomor register rumah sakit 4. Melakukan pengukuran indikator mutu (internal) 1 tahun sekali	Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit - Penetapan Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Pelayanan Terapi Sel Punca dan/atau Sel - Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelaya-		
			Rumah Sakit Swasta dengan jumlah tempat tidur lebih dari 250	Besar	Tinggi	NIB dan Izin		28 Hari			Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Dokumen pelayanan			nan Dialisis - Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik - Penetapan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir - Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi - Penetapan Pe-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										nyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah - Penyelenggaraan Transplantasi Organ di Rumah Sakit - Penyelenggaraan Bank Mata di		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Rumah Sakit - Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit - Penyelenggaraan Bank Plasma - Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) - Izin Edar Obat - Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat - Izin Pemeriksaan/ Pengujian Keseha-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										tan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja - Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Operasi Fasilitas Produksi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Dekomisioning Fasilitas Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Layanan Kedokteran Nuklir - Operasi Fasilitas Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Dekomisioning Fasilitas Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokte-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ran Nuklir - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir - Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Operasi Fasilitas		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Kedokteran Nuklir Terapi - Dekomissioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi - Konstruksi Fasilitas Kedokteran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Nuklir Diagnostik In Vivo - Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo - Dekomissioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vivo - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokte-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										ran Nuklir Diagnostik In Vivo - Konstruksi Fasilitas Radioterapi - Operasi Fasilitas Radioterapi - Dekomissioning Fasilitas Radioterapi - Pernyataan Pembebasan Fasilitas Radioterapi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										- Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional - Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokteran Nuklir Diagnostik In Vitro - Surat Persetu-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										juan Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan		
20	86104	Aktivitas Klinik Pemerintah	Seluruh Klinik Pratama dan Klinik Utama Pemerintah	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil klinik 2. *Self assesment* klinik 3. Daftar obat dan BMHP 4. Daftar SDM klinik 5. Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan	25 Hari	1. Melakukan registrasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku 2. Menyelenggarakan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan,	- Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis - Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik	BLU/ BLUD	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3 7. Data pendukung (jika diperlukan): a. Dokumen mempekerja-kan TK-WNA b. Dokumen perpan-jangan perizinan (perizinan sebelumnya, pera-		standar prosedur operasional, dan standar profesi masing-masing tenaga medis/ tenaga kesehatan 3. Melakukan input/pembaharuan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM,	- Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) - Penyelenggaraan Bank Plasma		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							turan internal klinik/ kebijakan lain tentang penyelenggaraan klinik, bukti registrasi, kewajiban klinik lainnya) c. Dokumen perubahan perizinan (perizinan		DFO, dan lain sebagainya) 4. Menyelenggarakan rekam medis elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku 5. Menjamin mutu dan keselamatan pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku	- Radiologi Diagnostik dan/ atau Interventional - Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokteran Nuklir Diag-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebelumnya, surat keterangan alasan perubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya)		6. Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku 7. Mendukung pelaksanaan program nasional	nostik In Vitro - Izin Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja		
21	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Seluruh Klinik Pratama dan Klinik Utama Swasta	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil klinik 2. Self assesment klinik 3. Daftar obat dan BMHP	25 Hari	1. Melakukan registrasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku	- Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelaya-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Daftar SDM klinik 5. Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan 6. Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3 7. Data pendukung (jika diperlukan): a. Dokumen mempeker-		2. Menyelenggara kan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan standar profesi masing-masing tenaga medis/ tenaga kesehatan 3. Melakukan input/pembah	nan Dialisis - Peneta-pan Pe-layanan Medis Hi-perbarik - Peneta-pan Fasi-litas Pela-yanan Kesehatan sebagai Penye-lenggara Pemerik-saan Ke-sehatan Calon Pekerja Migran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jakan TK-WNA b. Dokumen perpanjangan perizinan (perizinan sebelumnya, peraturan internal klinik/ kebijakan lain tentang penyelenggaraan klinik, bukti registrasi, kewajiban		aruan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM, DFO, dan lain sebagainya) 4. Menyelenggarakan rekam medis elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku 5. Menjamin mutu dan keselamatan	Indonesia (CPMI) - Penyelenggaraan Bank Plasma - Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional - Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							klinik lainnya) c. Dokumen perubahan perizinan (perizinan sebelum-nya, surat keterangan alasan perubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya)		pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku 6. Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku 7. Mendukung pelaksanaan program nasional	Pesawat Gigi Intra Oral - Kedokte-ran Nuk-lir Diag-nostik In Vitro - Izin Pemeriks aan/ Pengujian Kesehatan Tena-ga Kerja dan atau Pelaya-nan Kese-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										hatan Kerja		
			Klinik Pratama Pendukung (PMA)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil klinik 2. *Self assesment* klinik 3. Daftar obat dan BMHP 4. Daftar SDM klinik 5. Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan 6. Perjanjian kerja sama	25 Hari	1. Melakukan registrasi Klinik sesuai ketentuan yang berlaku 2. Menyelenggara kan tata kelola klinik yang baik, termasuk pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan standar	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan limbah B3 7. Data dukung (jika diperlukan): a. Surat pernyataan pendirian Klinik Pratama dengan PMA b. PKS internasional/ nota kesepahaman/ surat keterangan dari pemda		profesi masing-masing tenaga medis/ tenaga kesehatan 3. Melakukan input/pembaharuan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK, INM, DFO, dan lain sebagainya) 4. Menyelenggarakan rekam medis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kab/kota setempat tentang kebutuhan akses pelayanan bagi masyarakat sekitar Klinik Pratama dengan PMA c. Dokumen perpanjangan perizinan (perizinan sebelumnya, peraturan		elektronik di klinik sesuai ketentuan yang berlaku 5. Menjamin mutu dan keselamatan pasien serta melakukan akreditasi klinik sesuai ketentuan yang berlaku 6. Melaporkan hasil kegiatan klinik sesuai ketentuan yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							internal klinik/ kebijakan lain tentang penyelenggaraan klinik, bukti registrasi, kewajiban klinik lainnya) d. Dokumen perubahan perizinan (perizinan sebelumnya, surat keterangan alasan pe-		7. Mendukung pelaksanaan program nasional			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rubahan dari pemilik klinik, kewajiban klinik lainnya)					
22	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	Griya Sehat	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil Griya Sehat 2. Dokumen sarana, prasarana dan peralatan 3. Dokumen sumber daya manusia 4. Dokumen pelayanan	10 Hari	Melakukan pelaporan pelayanan	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
23	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Panti Sehat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil Panti Sehat 2. Dokumen sarana dan prasarana 3. Dokumen sumber daya manusia 4. Dokumen pelayanan	10 Hari	1. Melakukan pelaporan pelayanan 2. Memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) 3. Menggunakan ramuan dalam bentuk minuman segar atau sediaan jadi jamu yang telah memiliki izin edar	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	Rumah Sakit Pratama	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Administrasi umum, dokumen badan hukum nirlaba atau profit, profil rumah sakit dan komitmen untuk melakukan akreditasi 2. Teknis, meliputi: a. Dokumen studi kelayakan (*feasibility study*), b. Dokumen *detail*	28 Hari	1. Mendapatkan akreditasi Rumah Sakit setelah beroperasi 2 tahun 2. Melakukan pelaporan melalui Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) 3. Memiliki Nomor Register Rumah Sakit 4. Melakukan pengukuran indikator mutu	1. Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di Rumah Sakit 2. Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							engineering design dan *master plan* rumah sakit 3. Daftar bangunan, prasarana dan peralatan 4. Struktur organisasi sumber daya manusia dan daftar sumber daya manusia 5. Dokumen pelayanan		(internal) 1 tahun sekali	3. Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit 4. Izin Edar Obat 5. Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 6. Penilaian Obat Pengembangan Baru 7. Persetujuan Pelaksanaan Uji		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Klinik Obat 8. Izin Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja		
			Rumah Sakit Kapal	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen studi kelayakan 2. Lokasi pelayanan 3. Dokumen sarana, prasarana, dan peralatan, dan	28 Hari	1. Mendapatkan bukti akreditasi rumah sakit kapal setelah beroperasi 2 tahun	1. Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sumber daya manusia 4. Dokumen jenis pelayanan kesehatan 5. Ketersediaan tempat tidur rawat inap 6. Kelaiklautan Kapal		2. Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun 3. Memiliki nomor register rumah sakit kapal 4. Melakukan standar pengukuran indikator mutu (internal) 1 tahun sekali	di Rumah Sakit 2. Peneta-pan-Pe-nyeleng-garaan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit 3. Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Unit Pengelola Darah (UPD)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil UPD 2. Denah bangunan UPD 3. Dokumen *self assessment* UPD yang meliputi: sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia UPD, dan pelayanan UPD 4. Daftar nama SDM UPD 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga	25 Hari	1. Melakukan registrasi UPD 2. Menyelenggara kan tugas dan fungsi UTD sesuai standar yang berlaku 3. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan UPD sesuai ketentuan yang berlaku 4. Melakukan *update*/ pembaharuan data jika terjadi	1. Penye-lenggara-an Bank Plasma 2. Sertifikat Cara Pembua-tan Obat yang Baik (CPOB)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							medis dan tenaga kesehatan yang berkerja di UPD untuk UPD yang sudah berjalan atau perpanjangan izin STR/SP Kepala UPD untuk UPD yang mengajukan izin awal operasional 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan		perubahan data UPD			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berbahaya dan beracun (B3) 7. Perizinan berusaha UPD yang masih berlaku (opsional bagi UPD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 8. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UPD dengan perubahan perizinan terkait					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggantian badan hukum)					
			Optik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi persyaratan umum yang meliputi: a. perjanjian kerja sama antara optik dengan rumah sakit, bagi optik yang berada di dalam rumah sakit, b. profil optik 2. Memenuhi persyaratan	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									khusus yang meliputi: a. Data sarana dan prasarana, dan peralatan (jenis dan jumlah) b. Data sumber daya manusia (jumlah dan kualifikasi) 3. Staf teknis memiliki Surat Tanda Registrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) 4. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan optik sesuai ketentuan yang berlaku			
			Laboratorium Pengolahan Sel dan/ atau Sel Punca	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Profil laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca 2. Dokumen laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca	25 Hari	Melaporkan hasil kegiatan pelayanan laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca	1. Izin Edar Obat 2. Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 3. Penilaian Obat Pengem-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(termasuk sarana, prasarana, peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia			bangan Baru 4. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat		
			Laboratorium Medis Kelas Utama	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil laboratorium medis kelas utama 2. Dokumen laboratorium medis kelas utama (termasuk sarana, prasarana,	25 Hari	1. Memenuhi standar pelayanan patologi klinik 2. Memenuhi standar mikrobilogi klinik 3. Memenuhi standar	Penyelenggaraan Bank Plasma	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia		parasitologi klinik 4. Memenuhi standar patologi anatomik 5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan laboratorium medis			
			Laboratorium Medis Kelas Pratama	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil laboratorium medis kelas pratama 2. Dokumen laboratorium medis kelas pratama	25 Hari	1. Memenuhi standar pelayanan patologi klinik 2. Memenuhi standar	Penyelenggaraan Bank Plasma	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(termasuk sarana, prasarana, peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia		mikrobilogi klinik 3. Memenuhi standar parasitologi klinik 4. Memenuhi standar patologi anatomik 5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan laboratorium medis			
			Bank Mata	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Mene-ngah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Profil bank mata 2. Dokumen bank mata (termasuk	25 Hari	Melaporkan hasil kegiatan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Besar			sarana, prasarana, peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia		pelayanan bank mata			
			Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Profil bank sel, bank sel punca, dan/atau bank jaringan 2. Dokumen bank sel, bank sel punca, dan/atau bank Jaringan (termasuk sarana, prasarana,	25 Hari	Melaporkan hasil kegiatan pelayanan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan dan pelayanan) 3. Dokumen sumber daya manusia					
			Bank Plasma	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen profil bank plasma 2. Dokumen fasilitas bank plasma (termasuk denah bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan) 3. Dokumen penanggung	25 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk penyelenggara-an bank plasma 2. Menyampai-kan laporan kegiatan pengelolaan plasma	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bank plasma					
25	86904	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*)	Evakuasi Medis	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Administrasi umum yang meliputi profil pelayanan evakuasi medis, bukti kepemilikan kendaraan ambulans atau dokumen kerja sama untuk ambulans yang bukan milik sendiri dan dokumen kerja sama dengan fasilitas pelayanan	28 Hari	Pelaporan kegiatan evakuasi medis	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan di Indonesia atau luar negeri 2. Dokumen sarana dan prasarana yang meliputi sarana lokasi dan komunikasi, bangunan, kendaraan, dan peralatan 3. Dokumen sumber daya manusia, yang meliputi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), tenaga medis, tenaga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan, tenaga non kesehatan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.K.1

K. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	58110	Penerbitan buku	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi standar mutu buku 2. memenuhi standar proses dan kaidah pemerolehan naskah 3. Memenuhi standar proses dan kaidah penerbitan buku 4. Memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penerbitan buku secara reguler melalui Sistem	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI			
2	85321	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	Pendirian Pendidikan Tinggi Akademik (Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi) Swasta dan Lembaga Negara lain di KEK	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Struktur organisasi kampus cabang 2. Struktur organisasi Perguruan Tinggi negara asal (atau Perguruan Tinggi Swasta Akademik induknya di Indonesia) 3. Daftar dosen dan tenaga kependidikan serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan 4. Daftar prasarana dan fasi-	13 Hari	Melaporkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi	- Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan - Surat Persetujuan Pelaksnaan Uji Klinik Alat Kesehatan	Seluruh (khusus untuk yang berlokasi di KEK)	Administrator KEK

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							litas perkuliahan 5. Dokumen kurikulum dari program studi yang diusulkan 6. Dokumen rencana pengembangan kampus cabang paling sedikit memuat: a. Studi kelayakan b. Desain kampus					
3	85322	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	Pendirian Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (Politeknik, Akademi) Swasta dan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan izin	1. Struktur organisasi kampus cabang 2. Struktur organisasi Perguruan Tinggi negara asal (atau	13 Hari	Melaporkan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui pangkalan data pendidikan tinggi	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan	Seluruh (khusus untuk yang berlokasi di KEK)	Administrator KEK

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Lembaga Negara lain di KEK				perguruan tinggi swasta akademik induknya di Indonesia) 3. Daftar dosen dan tenaga kependidikan serta kualifikasinya dan status kewarganegaraan 4. Daftar prasarana dan fasilitas perkuliahan 5. Dokumen kurikulum dari program studi yang diusulkan 6. Dokumen rencana pengembangan kampus cabang			Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit memuat: a. Studi kelayakan b. Desain kampus					
4	59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Seluruh kecuali animasi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Melakukan pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film 3. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan	- Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film - Surat Tanda Lulus Sensor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
5	59122	Aktivitas Pascaproduksi Film,	Seluruh kecuali animasi	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memiliki pemberitahuan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Video dan Program Televisi oleh Swasta		- Besar					pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film			
6	59132	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan	- Surat Rekomendasi Impor Film - Surat Tanda Lulus Sensor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
7	59140	Aktivitas Pemutaran Film	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memastikan film yang diputar telah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor 3. Melaporkan data penonton untuk setiap	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									judul film kepada pemerintah pusat			
8	77220	Aktivitas Penyewa-an Kaset Video, CD, VCD/ DVD, dan Sejenis-nya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Memastikan film yang disewakan te-lah memiliki Surat Tanda Lulus Sensor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.1

L. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	49425	Angkut-an Darat Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr (khusus PMA); 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Angkutan Darat Wisata meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM,	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

I.L.2

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha; 3. Memiliki sarana angkutan darat wisata yang laik jalan dan surat kendaraan masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan.			
2.	50113	Angkut-an laut dalam	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	A. Dokumen Penilaian Mandiri	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		negeri untuk wisata					Kesiapan Penerapan Standar B. Persyaratan yang akan diverifikasi oleh Menteri/ Kepala Lembaga pengampu sektor transportasi: 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksa-naan, nautis, atau		usaha pariwisata dari LSPr 2. Memiliki Sertifikat laik sehat untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenan 2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan) 3. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan					

I.L.5

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) **atau** memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage **atau** memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lima gross tonnage **atau** memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima) gross tonnage **atau** Tongkang bermesin sebagai-mana					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan pengguna-annya dilampiri dengan general arrange-ment (ga). 4. Bagi perusahaan patungan (joint venture) dengan membentuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan angkutan laut memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berke-warganega-raan Indonesia					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku c. Sertifikat kesela-matan kapal yang masih berlaku; dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Crew list					
3.	50122	Angkut-an Laut Luar Negeri untuk Wisata	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	A. Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar B. Persyaratan yang akan diverifikasi oleh Menteri/ Kepala Lembaga pengampu sektor transportasi: 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr 2. Memiliki Sertifikat laik sehat untuk usaha yang memiliki fasilitas akomodasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketata-laksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang 2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(bussines plan) 3. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage) **atau** memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage **atau** memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage **atau** memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lima gross tonnage **atau** Tong-kang bermesin sebagaiman a dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan pengguna-annya dilampiri dengan general arrange-ment (ga).					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Bagi perusahaan patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan diawaki oleh awak kapal berke-warganegar aan Indonesia 5. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Sertifikat keselamat-an kapal yang masih berlaku; dan d. Crew list					
4.	55110	Hotel Bintang	Dengan Luas bangunan ≤ 6.000 M²	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Hotel Bintang meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk	- Sertifikat laik sehat - Surat Ketera-ngan Pen-jualan Langsung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat laik sehat			
		Hotel Bintang	Dengan Luas bangunan > 6.000 M²	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen penilaian mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr 2. Memiliki Sertifikat laik sehat 3. Dalam hal mempekerja-kan TKA, wajib memiliki dokumen pengesahan Rencana Penggunaan	- Sertifikat laik sehat - Surat Ketera-ngan Penjual-an Lang-sung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Tenaga Kerja Asing (RPTKA)			
5.	55120	Hotel Melati	Dengan luas bangunan ≤ 6.000 M²	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Hotel Melati meliputi	- Sertifikat laik sehat - Surat Ketera-ngan Penjual-an Lang-sung Minuman Beralkoho	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	1 (SKPL) A atau B dan C		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Hotel Melati	Dengan Luas bangunan > 6.000 M²	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen penilaian mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Dalam hal mempekerja kan TKA, wajib memiliki dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	- Sertifikat laik sehat - Surat Ketera-ngan Penjual-an Lang-sung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur
6.	55130	Pondok Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kesiapan Penerapan Standar usaha Pondok Wisata meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat laik sehat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	55191	Pengi-napan Remaja (Youth Hostel)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota
8.	55192	Bumi Perkema-han, dan Taman Karavan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat STandar	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	55193	Villa	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat laik sehat 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha villa meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota
10.	55194	Aparte-men Hotel	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Menengah - Besar			Penerapan Standar		2. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr			
11.	55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat laik sehat 2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota
12.	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	Jasa manajemen hotel	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan LSPr	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha penyediaan akomodasi jasa manajemen hotel meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Sertifikat laik sehat			
			Hunian wisata senior/ lansia	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan LSPr (Khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha penyediaan akomodasi hunian wisata senior/lansia	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat laik sehat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	56101	Restoran	Seluruh	Mikro	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Restoran meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) - Sertifika-si Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Bupati/ Walikota

I.L.32

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 3. Dalam hal mem-pekerjakan TKA, wajib memiliki dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) - Surat Ketera-ngan Penjual-an Lang-sung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14.	56102	Warung/ Rumah Makan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Menyampai-kan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampai-kan dokumen penerapan standar	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota
15.	56103	Kedai Makanan	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil	- Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro - Sertifikat Laik Higiene	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Menyampai-kan laporan kegiatan secara 3. Menyampai-kan dokumen penerapan standar berkala	Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil		
16.	56104	Penye-diaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Menyampai-kan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampai-kan dokumen penerapan standar	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17.	56109	Restoran dan Penye-diaan Makanan Keliling lainnya	Seluruh	Mikro dan Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Usaha			
18.	56210	Jasa Boga untuk suatu event tertentu	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Menyampai-kan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampai-kan dokumen penerapan standar	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 2. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr	Serrtifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	Seluruh	Gubernur
19.	56290	Penye-diaan Jasa Boga	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Periode Tertentu							Pangan (HSP) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha jasa boga periode tertentu meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			
							Dokumen Penilaian Mandiri	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat	Sertifikat Laik Higiene	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				Mene-ngah dan Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Kesiapan Penerapan Stand`ar		Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 2. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr	Sanitasi (SLHS)		
20.	56301	Bar	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr	- Sertifikat Laik Sehat - Surat Ketera-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerapan Standar		2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	ngan Penjual-an Lang-sung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C		
21.	56302	Kelab Malam atau Diskotek yang utama-nya menye-diakan minu-man	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	- Sertifikat Laik Sehat - Surat Ketera-ngan Penjual-an Lang-sung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.	56303	Rumah Minum/ Kafe	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha rumah minum/kafe meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan,	- Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro - Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil, Mene-ngah, dan Besar - Surat Ketera-ngan Penjual-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) untuk Skala Mikro, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Skala Kecil, Menengah, dan Besar	an Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C		
23.	56304	Kedai Minuman	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi	Label Higiene Sanitasi	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pangan (HSP) 2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Pangan (HSP)		
24.	56306	Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 2. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Menyampai-kan dokumen penerapan standar			
25.	68112	Penyewa-an Venue Penye-lenggara-an Aktifitas MICE dan Event Khusus	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Penyewaan Venue Penyelenggra	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aan Aktifitas MICE dan Event Khusus meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			
26.	68120	Kawasan Pari-wisata	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat laik higiene Sanitasi 2. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr	- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) - Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)			
27.	70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
28.	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
29.	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
30.	79121	Aktivitas Biro Perjalan-	Seluruh	- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan	14 Hari	Memiliki sertifikat standar yang	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Wisata					Penerapan Standar		diterbitkan oleh LSPr			
31.	79129	Aktivitas Biro Perjalan-an Lainnya	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr	-	Seluruh	Gubernur
32.	79911	Jasa Informasi Pari-wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
33.	79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
34.	79921	Jasa Pramu-wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah								
35.	79922	Jasa Inter-preter Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
36.	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
37.	82301	Jasa penye-lenggara pertemu-an, perjalan-an insentif, Konfe-rensi dan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		pameran (MICE)							Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Jasa penye-lenggara pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan pameran (MICE) meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Dalam hal akan menyelenggarakan kegiatan atau event, pelaku usaha wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Event sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.			
38.	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Jasa Penye-lenggara Event Khusus (Special Event) meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Dalam hal akan menyeleng-garakan kegiatan atau event, pelaku usaha wajib memiliki Izin Penyeleng-garaan Event sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku			
39.	90030	Aktivitas Impre-sariat Bidang Seni dan Festival	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	-	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40.	90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
41.	91022	Museum yang dikelola Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Museum yang dikelola Swasta	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			
42.	91024	Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
43.	91029	Wisata budaya lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44.	93111	Fasilitas Stadion	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Fasilitas Stadion meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki sertifikat laik sehat			
45.	93112	Fasilitas Sirkuit	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr 2. Menerapkan standar usaha Fasilitas Sirkuit meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki sertifikat laik sehat			
46.	93113	Fasilitas Gelang-gang/ Arena	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan LSPr 2. Menerapkan standar usaha Fasilitas Gelanggang/ Arena meliputi	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat laik sehat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
47.	93114	Fasilitas Lapa-ngan	Seluruh termasuk Driving Range, *Minisoccer*, Bulutangkis , Bola Voli, Bola Basket, Tenis dan sejenisnya kecuali Lapangan Golf	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampai-kan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Menyampai-kan dokumen penerapan standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.61

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Fasilitas Lapa-ngan	Lapangan Golf	- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Menerapkan standar usaha Fasilitas Lapangan Golf meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Memiliki Sertifikat laik sehat			
48.	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Menyampaikan dokumen penerapan standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota
49.	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/*Fit-*	Seluruh	- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		ness Center							(khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Fasilitas Pusat Kebugaran/ *Fitness Center* meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Sertifikat Laik Sehat			
50.	93119	Pe-ngelola-an Fasilitas Olahraga lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
51.	93191	Promotor Kegiatan Olahraga	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Promotor Kegiatan Olahraga meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
52.	93193	Aktivitas Perburu-an	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA)	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Aktivitas Perburuan meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53.	93195	Aktivitas Olahraga Tradi-sional	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.69

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
54.	93211	Taman Rekreasi	Seluruh	- Mene-ngah Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55.	93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	Seluruh, kecuali yang menggunakan mesin/peralatan mekanik yang membutuhkan kecakapan tertentu dalam pengoperasiannya, dan/atau	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 2. Memiliki sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 3. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			merupakan wahana berisiko (ekstrem) masuk dalam KBLI 93211 (Taman Rekreasi)						usaha Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.72

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
56.	93221	Pemandi-an Alam	Seluruh	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Sertifikat Laik Operasi Pengusaha-an Panas Bumi untuk Pemanfaat-an Langsung 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Memiliki sertifikat standar	- Sertifikat Laik Operasi Peng-usahaan Panas Bumi untuk Peman-faatan Langsung - Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) 4. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Pemandian Alam meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.74

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Manajemen Usaha			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.75

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
57.	93222	Pengelola -an Goa	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Bukti hak pengelolaan untuk usaha goa yang dikeluarkan oleh pihak terkait 2. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pengelolaan Goa yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat	Sertifikat Laik Sehat	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.76

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
58.	93223	Wisata Petualangan Alam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr	-	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
59.	93224	Wisata Pantai	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Wisata Pantai meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
60.	93229	Daya Tarik Wisata	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Alam Lainnya		- Mene-ngah - Besar					Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Daya Tarik Wisata Alam Lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
61.	93231	Wisata Agro	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Wisata Agro meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan	Sertifikat Laik Operasi Pengusaha-an Panas Bumi untuk Pemanfaat-an Langsung	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Usaha			
62.	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/ Binaan Manusia Lainnya	Seluruh, kecuali yang menggunakan mesin/peralatan mekanik yang membutuhkan kecakapan tertentu dalam pengopera-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr (khusus PMA) 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha daya	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) - Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			siannya, dan/ atau merupakan wahana ekstrem masuk dalam KBLI 93293 (Usaha Arena Permainan)						tarik wisata buatan/ binaan meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat laik sehat			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.82

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
63.	93241	Arung Jeram	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr	Izin Pengusaha-an Sumber Daya Air	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memiliki Izin Pengusaha-an Sumber Daya Air, apabila mengguna-kan sumber daya air permukaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
64.	93242	Wisata Selam	Seluruh	- Mikro - Kecil	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar		Otomatis	1. Memiliki kapal atau surat tanda kerjasama dengan pemilik kapal 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Wisata Selam meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan	Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Sistem Manajemen Usaha; 3. Memiliki Sertifikat Keselamatan Kapal atau Sertifikat Laik Operasi (SLO) Kapal 4. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di wilayah laut			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.86

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap	- Surat Izin Wisata Bahari - Sertifi-kat operasi angkutan laut khusus	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lebih dari 30 hari di wilayah laut 3. Apabila mengoperasikan kapal *diving* milik sendiri untuk menunjang kegiatan usaha, maka wajib	-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memiliki Sertifikat operasi angkutan laut khusus.			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
65.	93243	Dermaga Marina	Seluruh	- Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat 3. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) - Sertifikat Pem-bangunan / Pe-ngem-bangan Terminal Khusus - Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha menetap lebih dari 30 hari di wilayah laut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66.	93244	Kolam Pemanci-ngan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
67.	93245	Wisata Meman-cing	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap lebih dari 30 hari di wilayah laut 3. Apabila mengoperasi kan kapal milik sendiri untuk menunjang kegiatan	- Surat Izin Wisata Bahari - Sertifikat Operasi Angkutan Laut Khusus	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									usaha, maka wajib memiliki izin operasi angkutan laut khusus.			
68.	93246	Aktivitas Wisata Air	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap	Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lebih dari 30 hari di wilayah laut			
69.	93249	Wisata Tirta Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Surat Izin Wisata Bahari, apabila kegiatan usaha menetap lebih dari 30	Surat Izin Wisata Bahari	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									hari di wilayah laut			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.96

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
70.	93291	Klub Malam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr Memiliki sertifikat laik sehat	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
71.	93292	Karaoke	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Karaoke meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan, Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) Surat Ketera-ngan Pen-jualan Langsung Minuman Ber-alkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Memiliki Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh LSPr (khusus PMA) .			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.99

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
72.	93293	Usaha Arena Permai-nan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
73.	93294	Diskotek	Seluruh	- Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	- Sertifikat Laik Sehat (SLS) - Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) A atau B dan C	Seluruh	Gubernur
74.	93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL	Seluruh	- Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.101

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
75.	96121	Rumah Pijat	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
76.	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	Seluruh, kecuali usaha SPA yang mengarah kepada Medical SPA	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar	14 Hari	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.102

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Laik Sehat (SLS)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Usaha Spa yang sudah mengarah kepada Medical Spa	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar 2. Sertifikat kompetensi tenaga medis	-	1. Memiliki Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh LSPr 2. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.104

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
77.	96129	Aktivitas Kebuga-ran Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar		Otomatis	1. Memiliki sertifikat standar usaha pariwisata dari LSPr (khusus PMA); 2. Memiliki Dokumen Penilaian Mandiri Kesiapan Penerapan Standar usaha Aktivitas Kebugaran Lainnya meliputi Sarana, Struktur Organisasi dan SDM, Pelayanan,	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/ Walikota

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.L.105

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Produk usaha dan Sistem Manajemen Usaha 3. Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.1

M. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEAGAMAAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
1	79122	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Perizinan Berusaha Aktivitas Biro Perjalanan Wisata dan telah beroperasi minimal selama 1 (satu) tahun 2. Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi,	14 Hari	1. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang Pembimbing Ibadah dari setiap 45 (empat puluh lima) orang Jamaah Umroh 2. Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melaku-kan pelang-garan hukum terkait penye-lengaraan perjala-nan ibadah umrah dan penyeleng-garaan ibadah		kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara PPIU (Penyeleng-gara Perjala-nan Ibadah Umroh) dan Jemaah Umroh 3. Memberang-katkan dan memulang-kan Jemaah Umroh sesuai dengan masa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelang-		berlaku visa umroh di Arab Saudi 4. Menyampai-kan rencana perjalanan umroh kepa-da Menteri Agama seca-ra tertulis sebelum ke-berangkatan 5. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat kedatangan di Arab			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							garan hukum terkait penye-lenggara-an perja-lanan ibadah umrah dan pe-nyeleng-garaan ibadah haji khu-sus yang memiliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksa-		Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia 6. Memberang-katkan Jemaah Umroh yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan 7. Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi 8. Membuka Rekening			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							nakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sesuai		Penampungan yang digunakan untuk menampung dana Jemaah untuk kegiatan umroh 9. Melaporkan pembukuan Rekening Penampungan yang digunakan untuk menampung dana jemaah untuk kegiatan umroh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komisaris, Direksi, atau atas nama Perusahaan) atau perjanjian sewa menyewa kantor yang masih		10. Melaporkan jemaah umrah yang telah menyetorkan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh (BPIU) ke Rekening Penampungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) pada Bank Penerima Setoran (BPS)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris 4. Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian		11. Melaporkan Jemaah Umroh yang telah didaftarkan Asuransinya 12. Memperoleh Akreditasi PPIU setiap 5 (lima) tahun 13. Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan Alamat Perusahaan PPIU maksimal 3 (tiga) bulan sejak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5. Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan 6. Memiliki Surat Rekomendasi Asli dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang masih berlaku minimal 3 (tiga) bulan		terjadi perubahan 14. Melaporkan jika ada Pembukaan Kantor Cabang 15. Melaporkan Progres penyelenggaraan perjalanan 16. Melaporkan apabila menawarkan Paket di bawah harga referensi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							7. Jaminan bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perjalanan Wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.M.10

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
			Aktivitas Biro Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Telah menjadi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) paling singkat selama 3 (tiga) tahun atau telah memberangkatkan jemaah umrah paling sedikit 1.000 (seribu) orang 2. Sertifikat PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah)	14 Hari	1. Memfasilitasi pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji khusus 2. Memberikan bimbingan dan pembinaan ibadah haji khusus 3. Memberikan pelayanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelindungan 4. Memberangkatkan,	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							3. Surat Pernyataan Bermaterai pemilik saham, Komisaris, dan Direksi, yang menyatakan bahwa : a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjala-		melayani, dan memulangkan Jemaah Haji Khusus sesuai dengan perjanjian 5. Memberangkatkan penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), petugas Kesehatan, dan pembimbing ibadah haji khusus se-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							nan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir b. Tidak pernah		suai dengan ketentuan pelayanan haji khusus 6. Memfasilitasi pemindahan calon Jemaah Haji Khusus kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lain atas permohonan jemaah 7. Memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang me-		45 (empat puluh lima) jemaah 8. Memberangkat-kan 1 (satu) orang penanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							miliki kekuatan hukum tetap c. Bersedia melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan bersedia meningkatkan kualitas penyelenggaraan		sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji hhusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi 9. Memperoleh akreditasi setiap 5 (lima) tahun 10. Melaporkan perubahan pemilik saham, komisaris, direksi dan alamat perusahaan Penyeleng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							ibadah haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Salinan sertifikat hak milik (pemilik saham, Komisaris, Direksi, atau atas nama Perusahaan) atau perjanjian sewa menye-		gara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan 11. Melaporkan jika ada pembukaan Kantor Cabang 12. Melaporkan progres penyelenggaraan ibadah haji khusus 13. Melaporkan keberangkatan warga negara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							wa kantor yang masih berlaku minimal 5 (lima) tahun kedepan, yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris 5. Dokumen laporan keuangan Perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang		Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah 14. Melaporkan jumlah jemaah haji khusus yang akan dibadalhajikan sebelum pelaksanaan wukuf kepada petugas penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6. Salinan surat keterangan fiskal atas nama Perusahaan 7. Jaminan Bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama Biro Perja-lanan Wisata yang diter-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
							bitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 6 (enam) tahun					

N. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	53201	Aktivitas Kurir	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki modal paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 2. Menyampaikan proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi: a. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas b. Aspek teknis	1 Hari	1. Memulai operasional Penyelenggara-an Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha penyelenggara-an pos 2. Memenuhi kewajiban kontribusi penyelenggara-an Layanan Pos Universal: a. Membayar kontribusi dan b. Menyampai-kan	- Sertifi-kat Peme-nuhan Komit-men Sistem Mana-jemen Ke-aman-an Pang-an Olah-an di Sara-na Per-edaran - Sertifi-kat Peme-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Aspek bisnis d. Aspek keuangan 3. Menyampaikan pernyataan: a. Kesanggupan mematuhi ketentuan penyelenggaraan pos b. Data yang valid dan benar 4. Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan		dokumen kontribusi 3. Menyediakan jaringan Pos sesuai Perizinan Berusaha yang diperoleh 4. Menjaga keamanan dan keselamatan kiriman 5. Melaksanakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 6. Menyampaikan laporan penyelenggara-	nuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam daftar hitam penyelenggara 5. Memenuhi persyaratan pembayaran biaya izin penyelenggara-an pos berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran		an pos kepada Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara tertulis yang paling sedikit memuat: a. Jenis layanan b. Jumlah produksi c. Tarif layanan d. Pencapaian terhadap standar pelayanan e. Wilayah operasi f. Jumlah sumber daya manusia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaporkan kepada Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam hal melakukan perubahan akta pendirian atau susunan pemegang saham dan/atau besaran kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyediakan Interkoneksi Layanan Pos Universal terhadap penyelenggara-an pos lainnya 9. Memenuhi kewajiban penyelenggara-an pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
2	53202	Aktivitas Agen Kurir	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi standar usaha aktivitas agen kurir 2. Menyediakan informasi yang valid dan benar kepada	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									konsumen mengenai produk layanan, tarif atau biaya layanan, kepastian waktu layanan, prosedur layanan, standar operasional dan prosedur layanan, dan tata cara pengaduan, serta saluran penyampaian saran dan masukan 3.Tidak melakukan aktivitas pengumpulan dan pemrosesan kiriman pos			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang sifatnya berbahaya 4. Memiliki perjanjian kerja sama sebagai agen kurir dengan penyelenggara pos 5. Menjamin perlindungan konsumen 6. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pos dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	60102	Penyiaran Radio Oleh Swasta	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggara-an penyiaran yang memuat: a. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta mencantum-kan nama, visi, misi, dan format siaran b. Uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah	29 Hari (7 Hari untuk verifikasi persyara-tan admi-nistratif; 15 Hari untuk verifikasi persyara-tan uji laik operasi; dan 7 Hari untuk verifikasi persyara-tan biaya izin)	1. Tidak melanggar ketentuan larangan berupa siaran iklan niaga yang dilakukan dengan: a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain,	Izin Stasiun Radio (dalam hal meng-guna-kan Spek-trum Fre-kuensi Radio dalam bentuk Kanal Fre-kuensi Radio)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran c. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta susunan kepemilikan saham perusahaan d. Mencantumkan kepemilikan saham pada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio yang sudah dimiliki oleh		atau kelompok lain b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama e. Eksploitasi anak di bawah umur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham e. Mencantum-kan daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi dan/atau lembaga penyiaran berlangganan yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha f. Peta wilayah jangkauan siaran		18 (delapan belas) tahun 2. Isi siaran sesuai dengan perlindungan hak cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Membayar biaya izin penyelenggara-an penyiaran berdasarkan zona sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Dilarang memindah-tangankan Perizinan Berusaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. Sarana dan prasarana penyiaran mencakup kantor, spesifikasi perangkat, dan konfigurasi teknis sistem penyiaran 2. Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan direksi dan komisaris badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara		penyelenggara-an penyiaran kepada pihak lain 5. Tidak melanggar ketentuan larangan tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah 6. Memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Menyampaikan surat pernyataan: a. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Sanggup memenuhi dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing dalam hal akan		perangkat penyiaran 7. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 8. Memenuhi ketentuan isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggarakan penyiaran dengan teknologi digital melalui media terestrial c. Sanggup memenuhi persyaratan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan d. Sanggup memenuhi		an penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Memperoleh PB UMKU izin Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Sanggup membangun dan/atau menyediakan sarana dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran g. Sanggup menyampai-kan dokumen yang valid dan benar 4. Dalam hal penyelenggara-an jasa penyiaran radio digital dengan media terrestrial,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wajib melampirkan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing 5. Mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran setelah membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memperoleh surat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keterangan laik operasi penyiaran berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi penyiaran sesuai standar kegiatan usaha 7. Membayar biaya izin penyelenggara-an penyiaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah pembayaran diterbitkan 8. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyelenggara-an penyiaran dapat memperpan-jang Perizinan Berusaha penyelenggara-an penyiaran setelah dilakukan evaluasi pada bulan ke 6 (enam) sampai dengan bulan ke 5 (lima) sebelum masa laku Perizinan Berusaha penyelenggara-an penyiaran berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Pengajuan perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran dan memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampai-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku d. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan e. Membayar biaya Izin penyelenggaraan Penyiaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat perintah pembayaran diterbitkan					
4	60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan penyiaran yang memuat: a. Latar belakang, maksud, dan tujuan pendirian, serta	29 Hari (7 Hari untuk verifikasi persyaratan administratif; 15 Hari untuk verifikasi persyaratan uji laik	1. Tidak melanggar ketentuan larangan berupa siaran iklan niaga yang dilakukan dengan: a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran	- Izin Stasiun Radio (dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mencantum-kan nama, visi, misi, dan format siaran b. Mencantum-kan uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iklan dan/atau pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyeleng-garaan penyiaran c. Daftar modal yang ditempatkan dan disetor, serta	operasi; dan 7 Hari untuk verifikasi persyara-tan biaya izin)	suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif c. Promosi rokok yang	Radio dalam Bentuk Kanal Fre-kuensi Radio) - Hak Labuh Satelit (dalam hal Pelaku Usaha yang akan meng-guna-kan satelit asing)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepemilikan saham d. Mencantum-kan kepemilikan saham pada lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh pemegang saham e. Mencantum-kan daftar media cetak, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran		memperagakan wujud rokok d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan/atau e. Eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 2. Menyampaikan laporan penyelenggara-an penyiaran kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							swasta jasa penyiaran televisi dan/atau lembaga penyiaran berlangganan yang sudah dimiliki oleh Pelaku Usaha f. Peta wilayah jangkauan siaran g. Sarana dan prasarana penyiaran mencakup kantor, spesifikasi perangkat, dan konfigurasi teknis sistem penyiaran		di bidang komunikasi dan informatika 3. Isi siaran sesuai dengan perlindungan hak cipta dan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran 5. Dilarang memindah-tangankan Perizinan Berusaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Menyampaikan daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi dan komisaris badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Menyampaikan surat pernyataan: a. Sanggup membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan		penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain 6. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran berdasarkan zona sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Tidak melanggar ketentuan larangan tidak melakukan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan secara akumulatif tanpa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan b. Sanggup memenuhi dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing c. Sanggup memenuhi persyaratan izin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		pemberitahuan berdasarkan alasan yang sah 8. Bagi lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan layanan multipleksing wajib: a. Melaksanakan pembangunan dan/atau penyediaan multipleksing sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Sanggup memenuhi ketentuan penyeleng-garaan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Sanggup memenuhi ketentuan terkait isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan f. Sanggup membangun dan/atau		ketentuan peraturan perundang undangan b. Menyedia-kan *set top box* sesuai dengan komitmen dalam Perizinan Berusaha yang diperolehnya dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan c. Melakukan kerja sama penggunaan slot multiplek-sing kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran g. Sanggup menyampai-kan dokumen yang valid dan benar 4. Dalam hal penyelenggara-an layanan program siaran dan/atau		lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan/atau lembaga penyiaran komunitas yang menyedia-kan layanan program siaran penyelengga-raan siaran digital d. Menetapkan tarif sewa multiplek-sing sesuai dengan formula tarif dan hasil			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layanan tambahan jasa penyiaran televisi digital melalui media terestrial, wajib melampirkan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing 5. Mengajukan permohonan uji laik operasi penyiaran setelah membangun dan/atau menyediakan sarana dan prasarana penyiaran berdasarkan ketentuan		evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyeleng-garakan urusan pemerintah-an di bidang komunikasi dan informatika 9. Memenuhi ketentuan isi siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 10. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an penyiaran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 6. Memperoleh surat keterangan laik operasi penyiaran berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi penyiaran sesuai standar kegiatan usaha 7. Membayar biaya izin penyelenggara-an penyiaran dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak surat perintah pembayaran diterbitkan		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Memperoleh PB UMKU izin Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggara-an penyiaran dapat memper-panjang Perizinan Berusaha penyelenggara-an penyiaran setelah dilakukan evaluasi pada bulan ke 6 (enam) sampai dengan bulan ke 5 (lima) sebelum masa laku Perizinan Berusaha penyelenggara-an penyiaran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berakhir, dengan persyaratan sebagai berikut: a. Pengajuan perpanjangan Perizinan Berusaha penyeleng-garaan penyiaran paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perizinan Berusaha penyeleng-garaan penyiaran dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memenuhi catatan hasil evaluasi atau dinyatakan layak b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Dalam hal meng-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gunakan spektrum frekuensi radio, wajib menyampaikan izin penggunaan spektrum frekuensi radio (ISR) yang masih berlaku d. Dalam hal menggunakan slot multipleksing, wajib menyampaikan dokumen kerja sama dengan penyelenggara layanan multipleksing					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan e. Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak surat perintah pembayaran diterbitkan f. Bagi lembaga penyiaran swasta penyelenggara penyiaran layanan multipleksing					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dapat memperpanjang Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran setelah dilakukan evaluasi terhadap: a. data penyelenggaraan penyiaran b. laporan tahunan kinerja operasional					
5	61100	Aktivitas Teleko-	Seluruh	-Mikro -Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau	- Penomoran	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		munikasi Dengan Kabel		-Menengah -Besar			penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memuat: a. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan b. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun c. Peta jaringan dan/atau rute jaringan d. Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (*roll*		perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*)	Telekomunikasi (dalam hal penyelenggara telekomunikasi akan menggunakan penomoran telekomunikasi) - Hak Labuh SKKL Internasio-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							out plan) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun e. Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun f. Data alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun g. Bukti kepemilikan perangkat h. Perjanjian kerja sama		Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakan	nal (dalam hal Pelaku Usaha (Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Tetap Tertutup) bekerja sama dengan badan usaha asing yang		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya i. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual j. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, billing dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/		serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati	akan menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL Transmisi Telekomunikasi Internasional secara		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelanggan, dan pelayanan pengguna/ pelanggan 2. Menyampaikan surat pernyataan: a. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan dan menyampaikan data yang valid dan benar b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak		7. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase	langsung ke Indonesia) - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang terhutang kepada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak		tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi	(*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Mengajukan permohonan uji laik operasi 4. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/USO 10. Memenuhi komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi 11. Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh 12. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi	Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam perjanjian tertulis 13. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi	Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi 16. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 17. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 18. Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia 19. Memperoleh PB UMKU Hak Labuh Sistem Komunikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi bekerja sama dengan badan usaha asing yang akan menyediakan sarana transmisi telekomunikasi internasional melalui SKKL secara langsung ke Indonesia 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6	61200	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memuat: a. Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan b. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang	- Penomoran Telekomunikasi (dalam hal penyelenggara telekomunikasi akan menggunakan peno-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Peta jaringan dan/rute jaringan d. Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (*roll out plan*) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun e. Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun f. Data alat/perangkat, sarana dan/atau		memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan	moran teleko-muni-kasi) - Izin Pita Freku-ensi Radio (dalam hal aktivi-tas meng-guna-kan Spek-trum Freku-ensi Radio dalam bentuk Pita Freku-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana telekomunikasi yang akan dibangun g. Bukti kepemilikan perangkat h. Perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya i. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual j. Standar Operasional Prosedur		perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menjamin tersedianya interkoneksi, dengan ketentuan dilarang	ensi Radio) - Izin Stasiun Radio (dalam hal menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio) - Izin Penetapan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, *billing* dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/ pelanggan, dan pelayanan pengguna/ pelanggan 2. Menyampaikan surat pernyataan: a. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelenggaraan jaringan dan		melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati 7. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memenuhi kewajiban	Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defen-*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyampaikan data yang valid dan benar b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika c. Daftar susunan pengurus		Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan dokumen	*ce Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certifi-*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Mengajukan permohonan uji laik operasi dan 4. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO 10. Memenuhi komitmen minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi 11. Memenuhi komitmen	*cate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan uji laik operasi		pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh 12. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an Jaringan Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 13. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan	Per-tahan-an dan Ke-aman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan 14. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggara-an telekomunikasi 15. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									16. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 17. Menyampaikan laporan penyelenggara-an Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 18. Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia 19. Memperoleh PB UMKU Izin Pita Frekuensi Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan			
7	61911	Jasa Panggilan Premium (Premium Call)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampai-kan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampai-kan daftar alat/perang-kat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran		3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telekomunikasi 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi dan 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									(awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jasa telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	61912	Jasa Konten SMS Premium	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampai-kan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampai-kan daftar alat/perang-kat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomuni-kasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutama-kan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomuni-kasi produksi dalam negeri sepanjang memungkin-kan dan tersedia	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran telekomunikasi		3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggara-kannya serta sarana dan prasarana telekomuni-kasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelengga-raan telekomuni-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pelayanan Universal/ USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunika-si sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelengga-raan telekomuni-kasi 13. Mempublika-sikan pencapaian standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunika-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									si secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunika-si yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunika-si selama 1 (satu) tahun buku dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyimpan-nya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunika-si 20. Melaksanakan kewajiban penyelengga-raan telekomuni-kasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	61913	Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggara-an jaringan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis	Peno-moran Teleko-munika-si (Dalam hal penye-lenggara teleko-munika-si akan menggu-nakan peno-moran telekom unikasi)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban		(*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau		layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyeleng-gara 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) 10. Menuangkan setiap kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sama penyelenggara-an jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggara-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an telekomunikasi 13. Memublikasi-kan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jasa telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunkasi setiap tahun 21. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
10	61914	Jasa Panggilan Terkelola (Calling card)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampai-kan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan		ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran telekomunikasi 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi		4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pelayanan Universal/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelenggara-an telekomunikasi 13. Memublikasi-kan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggara-kan urusan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan			
11	61919	Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Menyampai-kan komitmen Layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi Teknis 3. Menyampai-kan daftar alat/ perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutama-kan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkin-kan dan tersedia	- Izin Peneta pan Indus-tri Per-tahan-an - Sertifi-kat Per-setuju-an Ke-laikan Fasili-tas Pro-duksi Per-tahan-an (*Certifi-cate of*	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Memperoleh dokumen penetapan penomoran		3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	*Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahan-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telekomuni-kasi 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi secara mandiri		5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggara-kannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan	an dan Ke-aman-an		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso 9. Memenuhi komitmen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggara-an telekomunikasi 13. Memublikasi-kan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan informasi milik penyelenggara jasa telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara-an telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
12	61921	Internet Service Provider	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampai-kan daftar alat/perang-kat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam	- Izin Peneta pan Indus-tri Per-tahan-an - Sertifi-kat Per-setuju-an Ke-laikan Fasili-tas Pro-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh		negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan	duksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang terhutang kepada KeMenterian yang menyelenggarakan urusan		peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-	duksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam		an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyelenggara 8. Memperoleh surat penetapan *Internet Protocol Address/IP Address* dan *Autonomous System Number*/AS Number yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional atau dialokasikan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang		an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyelenggarakan layanan gerbang akses internet (NAP) 9. Mengajukan permohonan uji laik operasi 10. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		Pelayanan Universal/uso 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggara-an telekomunikasi 13. Memublikasi-kan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
13	61922	Jasa Sistem Komuni-kasi Data	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang	- Izin Sta-siun Radio (dalam hal meng-guna-kan Spek-trum Fre-kuensi Radio dalam ben-tuk Kanal Fre-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggara-an jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual		memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan	kuensi Radio) - Hak Labuh Satelit (dalam hal Pelaku Usaha yang akan meng-guna-kan satelit asing) - Izin Peneta pan Indus-tri Per-tahan-an - Sertifi-kat		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus		perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan	Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan		telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan	Laut dan/ atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							uji laik operasi		telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan			
14	61923	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen Layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Izin	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyelenggara-an Jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan:		Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada keMenterian yang menyeleng-garakan urusan pemerintah-an di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membukti-kan bahwa		perlindungan terhadap layanan yang diselenggara-kannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara 8. Mengajukan permohonan uji laik operasi 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelenggara-an telekomunikasi 13. Memublikasi-kan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggaraan telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
15	61924	Jasa Interko-neksi Internet (NAP)	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							konfigurasi teknis 3. Menyampai-kan daftar alat/perang-kat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/ perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelengga-raan jaringan yang sesuai dengan ketentuan		persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Memenuhi ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban penerimaan negara		perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bukan pajak yang terhutang kepada keMenterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan		ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyeleng-gara 8. Memperoleh surat penetapan *Internet Protocol Address/IP Address* dan *Autonomous System Number*/AS Number yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol		(KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Internet Nasional 9. Mengajukan permohonan uji laik operasi 10. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/uso 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an jasa telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggara-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
16	61929	Jasa Multi-media Lainnya	Seluruh kecuali Realitas Virtual	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampai-kan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis 3. Menyampai-kan daftar	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,		2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							termasuk penggunaan satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang		4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau		perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetap-kan dalam daftar hitam penye-lenggara 8. Dalam hal menggunakan penomoran protokol internet, wajib memperoleh surat penetapan *Internet Protocol Address/IP Address* dan *Autonomous*		dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							System Number/AS Number yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional atau dialokasikan oleh penyelenggara jasa telekomunika-si yang menyelengga-rakan layanan gerbang akses internet (NAP) 9. Mengajukan permohonan uji laik operasi		penyelenggara-an telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an jasa telekomunikasi dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas layanan penyelenggaraan telekomunikasi 13. Memublikasikan pencapaian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan 18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									20. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
17	61992	Aktivitas Teleko-munikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri	Seluruh Catatan: Perizinan Berusaha untuk Aktivitas Telekomu-nikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri yang	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggara-an telekomunikasi khusus yang memuat: a. Maksud, tujuan, dan alasan membangun telekomuni-kasi khusus	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Menyampaikan laporan penyelenggara-an kepada	Izin Stasiun Radio (dalam hal menggu nakan Spek-trum Fre-kuensi Radio dalam bentuk	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Perseorangan, dan Dinas Khusus tidak melalui sistem OSS				b. Data teknis yang terdiri atas: 1) Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi khusus yang akan dibangun 2) Data cakupan wilayah layanan penyelenggaraan telekomunikasi khusus		Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 3. Mengembalikan Perizinan Berusaha apabila jaringan telekomunikasi khusus tidak diperlukan lagi 4. Melaksanakan kewajiban penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kanal Frekuensi Radio)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Daftar perangkat, bukti kepemilikan perangkat dan sertifikat perangkat yang digunakan 2. Menyampaikan surat pernyataan: a. Akan mengembalikan Perizinan Berusaha apabila jaringan telekomunikasi khusus		5. Memperoleh PB UMKU izin Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tidak diperlukan lagi b. Data yang disampaikan valid dan benar c. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Dalam hal terdapat penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi di cakupan wilayah yang bersangkutan, Pelaku Usaha menyampaikan dokumen bukti ketidak-sanggupan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyediakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layanan yang dibutuhkan 4. Memperoleh izin galian dari Pemerintah Daerah/Kementerian terkait dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum membangun jaringan kawat/serat optik dengan jalur yang melintasi jalan umum 5. Mengajukan permohonan uji laik operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi					
18	61994	Jasa Jual Kembali Jasa Teleko-munikasi	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi standar usaha aktivitas jasa jual kembali jasa telekomunikasi 2. Adanya perjanjian kerja sama antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi, dengan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketentuan sebagai berikut: a. Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang dijual kembali dan dapat menambahkan merek dagang pelaksana jual kembali jasa telekomuni-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kasi kepada pelanggan (*end user*) b. Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi c. Seluruh pendapatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi d. Penagihan (*billing*) mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi e. Dalam hal jual kembali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									layanan jasa telekomuni-kasi berbasis protokol internet, pelaksana jual kembali jasa telekomuni-kasi wajib menggunakan alamat protokol internet (*Internet Protocol Address/IP Address*) publik dan nomor sistem otonom (*Autonomous System Number*) milik penyelengga-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ra jasa telekomunikasi 3. Menjamin perlindungan konsumen 4. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melakukan kerja sama jual kembali jasa telekomunikasi wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan telekomunikasi yang diselenggarakannya 5. Melaksanakan kewajiban penyelenggara-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
19	61300	Aktivitas Teleko-munikasi Satelit	Seluruh	-Mikro -Kecil -Mene-ngah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan rencana penyelenggara-an jaringan telekomunikasi yang memuat: a. Jenis layanan sesuai dengan penyelengga-raan yang dimohonkan b. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunika-si yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutama-kan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunika-	- Hak Labuh Satelit (dalam hal Pelaku Usaha yang akan meng-guna-kan satelit asing) - Peno-moran Teleko-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Peta jaringan dan/atau rute jaringan d. Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (*roll out plan*) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun e. Komitmen kinerja layanan untuk 5 (lima) tahun f. Data alat/perangkat, sarana dan/atau		si produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) telekomunikasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan	munikasi (Dalam hal penyelenggara telekomunikasi akan menggunakan penomoran telekomunikasi) - Izin Stasiun Radio (dalam hal		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							prasarana telekomunikasi yang akan dibangun g. Bukti kepemilikan perangkat h. Perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya i. Pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual j. Standar Operasional		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menjamin tersedianya	menggunakan Spektrum Frekuensi Radio dalam bentuk Kanal Frekuensi Radio) - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Prosedur (SOP) terkait monitoring jaringan, penanganan gangguan, *billing* dan penagihan, aktivasi dan deaktivasi pengguna/ pelanggan, dan pelayanan pengguna/ pelanggan 2. Menyampaikan surat pernyataan: a. Kesanggupan melaksanakan ketentuan penyelengga-		interkoneksi, dengan ketentuan dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi, dan saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati 7. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sesuai	Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/ atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							raan jaringan dan menyampaikan data yang valid dan benar b. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memenuhi kewajiban Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KPU/USO) dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunika-	Moda Udara - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenan-*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Daftar susunan pengurus untuk membuktikan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara 3. Mengajukan permohonan uji laik operasi 4. Memperoleh surat keterangan		si sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran BHP telekomunikasi dan kontribusi KPU/USO 10. Memenuhi komitmen minimal	*ce*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi 11. Memenuhi komitmen pembangunan dan/atau penyediaan jaringan secara menyeluruh 12. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 13. Memenuhi ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									struktur kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara jaringan telekomunika-si sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Memenuhi standar kualitas layanan penyelengga-raan telekomunika-si 15. Memublikasi-kan pencapaian standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik penyelenggara jaringan telekomunika-si 16. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunika-si setiap tahun 17. Menyampai-kan laporan penyelengga-raan jaringan telekomunika-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									si sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 18. Memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunika-si yang telah memenuhi syarat berlangganan jaringan telekomunika-si sepanjang jaringan telekomunika-si tersedia 19. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terkait penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 20. Memperoleh PB UMKU penomoran telekomunikasi dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menggunakan penomoran telekomunikasi 21. Memperoleh PB UMKU Izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Stasiun Radio dalam hal menggunakan spektrum frekuensi radio 22. Memperoleh PB UMKU hak labuh satelit dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi menggunakan satelit asing			
20	82200	Aktivitas Call Centre	Seluruh	-Mikro -Kecil -Menengah -Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Menyampaikan komitmen layanan 5 (lima) tahun 2. Memenuhi ketentuan konfigurasi teknis	3 Hari	1. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang	Penomoran Telekomunikasi (Dalam hal penye-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Menyampaikan daftar alat/perangkat dan sertifikat perangkat 4. Memiliki bukti kepemilikan alat/perangkat 5. Memiliki perjanjian kerja sama dengan penyelenggara lain dan/atau Perizinan Berusaha penyelenggara-an jaringan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan		ditetapkan dan tersertifikasi 2. Mengutamakan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia 3. Mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan	lengga-ra tele-komuni-kasi akan meng-gunakan peno-moran tele-komuni-kasi)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							satelit asing yang telah memiliki hak labuh 6. Memiliki pusat kontak informasi berkaitan dengan layanan prajual dan purnajual 7. Menyampaikan surat pernyataan: a. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang		perundang-undangan 4. Memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggara-kannya serta sarana dan prasarana telekomunikasi sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyeleng-garakan urusan pemerintah-an di bidang komunikasi dan informatika b. Daftar susunan pengurus untuk membukti-kan bahwa direksi, pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam		ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penyelenggara 8. Mengajukan permohonan pelaksanaan uji laik operasi dan 9. Memperoleh surat keterangan laik operasi berdasarkan pelaksanaan uji laik operasi		pendapatan kotor penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memenuhi kewajiban pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan Kontribusi KPU/USO 9. Memenuhi komitmen minimal layanan pada tahun pertama (awal operasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menuangkan setiap kerja sama penyelenggara-an telekomunikasi dalam perjanjian tertulis 11. Memenuhi ketentuan struktur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kepemilikan saham pada badan hukum penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi standar kualitas penyelenggara-an telekomunikasi 13. Memublikasi-kan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kontak layanan informasi milik penyelenggara telekomunikasi 14. Menyampaikan laporan penyelenggara-an jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menetapkan besaran tarif penyelenggara-an telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggara-kan urusan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 16. Memenuhi komitmen layanan dan/atau penyediaan jasa telekomunikasi secara menyeluruh 17. Mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									18. Memelihara rekaman data pengukuran kualitas layanan jasa telekomunikasi selama 1 (satu) tahun buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) tahun buku ke depan 19. Memenuhi ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi 20. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun 21. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penyelenggara-an telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 22. Memperoleh PB UMKU penomoran telekomunikasi			

O1. PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PERTAHANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	61993	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Dokumen penjelasan *Core Competency* Alpalhankam; Dokumen Alat *Quality Control Test*; Dokumen Fasilitas pengawasan suhu dan kelembaban; dan Dokumen Fasilitas keamanan Informasi teknologi pertahanan 2. Surat keterangan	22 Hari	1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan setiap semester kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian	- Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tidak sedang menjalani proses hukum dari pengadilan negeri dan/atau masuk dalam daftar hitam 3. Surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register kepailitan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga setempat 4. Data teknis berupa		manusia atau karena bencana alam yang mengakibat-kan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralat-an Perta-hanan dan Ke-amanan - Izin Pema-saran Alat Peralat-an Perta-hanan dan Ke-amanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan telekomunikasi yang akan dibangun 5. Memiliki: a. fasilitas operasi, infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya b. persyaratan teknis sesuai bidang dan sub-bidangnya,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta personel yang terdidik dan/atau terlatih dan bersertifikat untuk bidang dan/atau sub-bidangnya c. standar mutu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.O2.1

O2. PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR KEAMANAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	80100	Aktivitas Keamanan Swasta	Jasa Konsultasi Keamanan (*security consultation*)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan** 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kemenimipas dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Gada Utama bagi Dirut/ direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang					
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki tenaga ahli konsultasi minimal 1 orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan teknis dalam sistem pengamanan dibuktikan dengan sertifikat personel manajemen pengamanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Polri (LSP) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jasa Penerapan Peralatan Keamanan (*security devices*)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan** 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas dan Baintelkam Polri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di kantor pusat maupun kantor cabang					
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha Memiliki peralatan keamanan yang telah memenuhi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							uji kelayakan sesuai standar yang dibuktikan dengan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia (SNI), laporan hasil uji produk atau hasil uji kelayakan spesifikasi produk dari produsen					
			Jasa Pelatihan Keamanan (*security training*)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan** 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menggunakan seragam Steward sesuai ketentuan Polri 7. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Lifeguard sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang					
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Steward sesuai ketentuan Polri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Lifeguard sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 10. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Negara Bukan Pajak (PNBP) 11. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 12. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha 1. Memiliki sarana dan prasarana pelatihan yang memenuhi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP 2. Memiliki tenaga instruktur pelatihan keamanan yang memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP 3. Memiliki bahan pengajaran/ silabus yang sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP					
			Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Persyaratan Umum Perizinan**	7 Hari	1. Melaporkan laporan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Berharga (*valuables security transport*)	- Mene-ngah - Besar			**Baru dan Perizinan Baru Perluasan** 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar		kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 8. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang					
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Memiliki sarana dan prasarana angkutan khusus (*armored car*) yang memenuhi standar yang ditentukan oleh bank Indonesia tentang penyelenggara-an jasa pengolahan uang rupiah 2. Memiliki ruang penyimpanan khusus (*strong room/vault*) untuk uang dan barang berharga yang memenuhi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia tentang penyelenggara-an jasa pengolahan uang rupiah					
			Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan *(Guard Services)*	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan** 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap,	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam *Steward* sesuai ketentuan Polri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam *Lifeguard* sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 10. Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang					
							B. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Surat pernyataan di atas meterai akan menggunakan seragam Steward sesuai ketentuan Polri 7. Surat pernyataan di atas meterai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							akan menggunakan seragam *Lifeguard* sesuai ketentuan Polri 8. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 9. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 10. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 12. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							C. Persyaratan Khusus Usaha 1. Wajib mengasuransikan tenaga Satpam melalui BPJS Kesehatan dan BPJS					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ketenagakerja-an 2. Memiliki tenaga Satpam yang memenuhi kualifikasi minimal Gada Pratama 3. Memiliki tenaga pengamanan Steward yang memenuhi kualifikasi minimal Gada Pratama dan spesialisasi steward 4. Memiliki tenaga pengamanan *Lifeguard* yang memenuhi kualifikasi minimal Gada					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pratama dan spesialisasi *Lifeguard*					
			Jasa Penyediaan Satwa Keamanan (K9 Services)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	- Persyaratan Umum Perizinan Baru dan Perizinan Baru Perluasan - - Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat - Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan - Daftar personel sesuai dengan	7 Hari	1. Melaporkan laporan kegiatan setiap semester 2. Menerapkan standar K3L 3. Merahasiakan sistem jasa pengamanan para penggunanya		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan - Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas, dan Baintelkam Polri - Surat pernyataan di atas meterai akan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri - Badan usaha berbentuk PT non perseorangan - Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Sertifikasi/ ijazah pelatihan kompetensi Gada Utama bagi Dirut/direktur dan manager operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang					
							A. Persyaratan Umum Perizinan Perpanjangan dan Perizinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Perluasan 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Polda setempat 2. Struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama lengkap, ditandatangani oleh pimpinan/ direktur badan usaha serta distempel perusahaan 3. Daftar personel sesuai dengan struktur organisasi berikut daftar riwayat hidup					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							masing-masing dan ditandatangani oleh yang bersangkutan 4. Surat pernyataan di atas meterai tidak menggunakan tenaga kerja asing, apabila menggunakan tenaga asing agar melampirkan surat izin sebagai tenaga asing dari Kemenaker, Kemenimipas , dan Baintelkam Polri 5. Surat pernyataan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atas meterai akan menggunakan seragam Satpam sesuai ketentuan Polri 6. Badan usaha berbentuk PT non perseorangan 7. Memiliki sertifikat keanggotaan asosiasi bidang pengamanan yang terintegrasi/ terdaftar di Polri 8. Bukti pembayaran administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Sertifikasi/ Ijazah Pelatihan Kompetensi Gada Utama bagi Dirut/ Direktur dan Manager Operasional baik di kantor pusat maupun kantor cabang 10. Laporan semester selama 4 (empat) periode					
							B. Persyaratan Khusus Usaha 1. Memiliki pawang satwa yang memiliki kemampuan melatih satwa 2. Memiliki fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kandang satwa sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP 3. Memiliki tempat pelatihan satwa sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Polri terkait BUJP					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.P.1

P. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR EKONOMI KREATIF

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	74130	Aktivitas Desain Komu-nikasi Visual/ Desain Grafis	Kegiatan penyediaan jasa desain komunikasi visual/ desain grafis secara manual maupun digital, serta statis (tidak bergerak) maupun dinamis (bergerak, interaktif), pada media	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			cetak, layar (gawai, tv, komputer, layar LED dan sejenisnya), luring, daring atau virtual, yang ber-hubungan dengan pembuatan materi dengan fungsi identifikasi, informasi dan persuasi yang									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			diimplementasikan pada identitas jenama (brand), logo, desain iklan, infografik, dan stasioneri									
2.	74141	Aktivitas Desain Khusus Film, Video, Program TV, Animasi dan Komik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	74142	Aktivitas Desain Konten Game	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
4.	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya	Kegiatan perencana-an konten kreatif lainya yang belum masuk dalam kelompok 74141-74142	- Mikro - Kecil	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	74201	Aktivitas Fotografi	kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis, seperti fotografi untuk paspor, sekolah, pernikahan dan lain-lain; fotografi untuk tujuan komersil,	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			publikasi, mode, real estat atau pariwisata; fotografi dari udara (pemotretan dari udara atau aerial photo-graphy) dan perekaman video untuk acara seperti pernikahan, rapat dan lain-lain									

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	59201	Aktivitas Perekam-an Suara	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
7.	59202	Aktivitas Penerbit-an Musik Dan Buku Musik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
8.	91025	Taman Budaya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
9.	70203	Aktivitas Ke-humasan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	Seluruh	Bupati/ Walikota
11.	90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
12.	90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
13.	90022	Pelaku Kreatif Seni Musik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14.	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
15.	90029	Aktivitas Pekerja Seni Dan Pekerja Kreatif Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala	-	Seluruh	Bupati/ Walikota
16.	90090	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreati-vitas lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala 2. Dalam hal akan menyelenggara kan kegiatan atau *event*, pelaku usaha wajib memiliki Izin	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penyelenggara-an *Event* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku			

Q. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR INFORMASI GEOSPASIAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	71102	Aktivitas Ke-insinyur-an dan Konsul-tansi Teknis YBDI	**Kode subklasifi-kasi: IG001** Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait penyiapan dokumen perencana-an dan pengawas-an untuk pelaksana-an akuisisi data geospasial (berbasis metode	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pekerjaan perencana-an dan pengawasan survei dan pemetaan, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa perencanaan dan pengawasan survei dan pemetaan 2. Menyampai-kan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terestrial, teknik fotogra-metri, pengindera-an jauh, dan hidrografi), pengolahan foto udara dan citra, perancang-an dan pem-bangunan sistem basis data serta analisis spasial, analisis kewilayah-an, penyajian informasi				Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri		3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjut-an meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar ke-selamatan dan kesehat-an kerja c. Standar Prosedur perencan-an dan pengawas-an survei dan pemetaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			geospasial, dan pengelolaan dan penyebar-luasan Data Geospasial /Informasi Geospasial						d. Standar mutu hasil pe-rencanaan dan pengawas-an survei dan pemetaan e. Pedoman per-lindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan 4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG			
			Kode subklasifikasi: IG002 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait dengan pelaksanaan survei terestris, yang	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa Survei Terestris 2. Menyampaikan laporan kegiatan Usaha	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			metode terestrial, utamanya keahlian penentuan posisi 3 (tiga) dimensi titik kontrol geodesi, pengukur-an sudut, jarak, luas, dan beda tinggi dalam lingkup survei titik kontrol tanah, survei Jaring Kontrol Horizontal, survei				diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri		tahunan Badan Usaha. 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjut-an meliputi: a. Standar mutu peralatan b. Standar keselamat-an dan kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksana-an akuisisi data geospasial			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jaring Kontrol Vertikal, survei detail situasi, survei utilitas, survei toponim, survei penegasan batas, dan survei gaya berat						berbasis metode terestrial d. Standar mutu hasil pelaksana-an Jasa akuisisi data geospasial berbasis metode terestrial e. Pedoman per-lindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG			
			Kode subklasifikasi: IG003 Kelompok ini mencakup layanan usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa fotogrametri dan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terkait Foto-grametri dan Pengindera-an Jauh (*Earth Observing and Scanning*) untuk pelaksana-an: (1) akuisisi data geo-spasial berbasis wahana udara meng-gunakan metode foto-grametri, lidar, dan				pekerjaan fotogrametri dan pengindera-an jauh, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan		penginderaan jauh 2. Menyampai-kan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjut-an meliputi: a. Standar mutu peralat-an b. Standar ke-selamat-an dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Synthetic Aperture Radar atau SAR (2) akuisisi data geospasial berbasis wahana satelit penginderaan jauh menggunakan sensor optik, lidar, dan radar (3) Pengolahan hasil akuisisi data fotogrametri				badan usaha dalam negeri		kesehatan kerja c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh d. Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa pekerjaan fotogrametri dan penginderaan jauh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan peng-inderaan jauh untuk meng-hasilkan antara lain ortofoto, *Digital Surface Model* (DSM), *Digital Terrain Model* (DTM) sesuai ketentu-an						e. Pedoman per-lindung-an sosial tenaga kerja sesuai ketentu-an peratur-an per-undang-undang-an 4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 5. Menggguna-kan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									teknis pemrosesan dan produk DG/IG			
			Kode subklasi-fikasi: IG004 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait pelaksana-an akuisisi data geospasial hidrografi utamanya untuk kegiatan pengamat-an pasut, pengukur-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan hidrografi yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa hidrografi 2. Menyampai-kan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			an garis pantai, dan pemerum-an termasuk pengolahan datanya				geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri		Keberlanjut-an meliputi: a. Standar mutu peralat-an b. Standar ke-selamat-an dan kesehat-an kerja. c. Standar Prosedur Pe-laksana-an akuisisi data hidro-grafi d. Standar mutu hasil pelaksa-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									naan Jasa akuisisi data hidro-grafi e. Pedoman per-lindung-an sosial tenaga kerja sesuai ketentu-an peratur-an per-undang-undang-an 4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG 6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG			
			Kode subklasifikasi: IG005 Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: (1) Kompilasi/ ekstraksi data	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbentuk badan usaha 2. Memiliki sertifikat penyedia jasa bidang informasi geospasial terkait pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan	10 Hari	1. Memenuhi kualifikasi sesuai Standar Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa sistem informasi geografis dan analisis spasial	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			berbasis foto udara dan citra peng-inderaan jauh untuk men-dapat-kan informa-si geo-spasial (2) Pe-rancang-an dan pem-bangun-an sistem basis data serta				analisis spasial, yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa bidang informasi geospasial berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 3. Badan usaha penanam modal asing wajib berafiliasi dengan badan usaha dalam negeri		2. Menyampai-kan laporan kegiatan Usaha tahunan Badan Usaha 3. Menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjut-an meliputi: a. Standar mutu peralat-an b. Standar ke-selamat-an dan kesehat-an kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			analisis spasial (3) Analisis kewilayahan (4) Penyajian informasi geospasial (5) Pengelolaan dan penyebarluasan Data Geospasial/ Informasi Geospasial						c. Standar Prosedur Pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan analisis spasial d. Standar mutu hasil pelaksanaan pekerjaan sistem informasi geografis dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									analisis spasial e. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu 5. Menggunakan SDM dengan sertifikasi bidang IG			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Menerapkan spesifikasi teknis pemrosesan dan produk DG/IG			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.R.1

R. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per		atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah memperoleh		kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi		ketentuan per-undang-undangan di bidang ketenagakerja-an			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenaga-kerjaan					
2	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komu-nikasi Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditanda-tangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV ins-truktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur		pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penam-bahan prog-ram pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan prog-ram yang di-setujui			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan		6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi		9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerja-an			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Registrasi SKK dari Kementerian Ketenaga-kerjaan					
3	78423	Pelatihan Kerja In-dustri Kre-atif Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Pe-nanggung Ja-wab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Pro-fil Lembaga yang ditanda-tangani oleh penanggung jawab LPK memuat:	5 Hari	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Pe-nanggung Ja-wab LPK 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 ta-hun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penam-	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana		bahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh		7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 10. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari		(TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan					
4	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK		tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup		pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka		mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan di bidang ketenagakerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti regis-trasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan di-jadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Doku-men Regis-trasi SKK dari Kementerian Ketenagaker-jaan					
5	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Mana-jemen Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1	Penye-leng-garaan Pema-gangan	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatanga-ni oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat		tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja	di Luar Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha		5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi		dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian		ketenagakerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ketenagaker-jaan					
6	78426	Pelatihan Kerja Peker-jaan Do-mestik Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Pe-nanggung Ja-wab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Pro-fil Lembaga yang ditanda-tangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 ta-hun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 ta-hun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penam-bahan prog-ram pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per		atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau sewa bermaterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh		kabupaten/ kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi		sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenaga-kerjaan					
7	78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga	-	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan		pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							RAB untuk 3 tahun d. program PBK e. kapasitas latih per tahun f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan		6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali 8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk jabatan instruktur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha enggunakan standar		9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompetensi khusus maka Pelaku Usaha wajib melampirkan bukti regis-trasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan di-jadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Doku-men Registrasi SKK dari Ke-menterian Ketenaga-ker-jaan					
8	78429	Pelatihan Kerja	Pelatihan Kerja Keju-ruan	- Mikro - Kecil	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan riwayat hidup penanggung	5 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pelatihan	Peman-faatan Sumber	Seluruh	Bupati/ Wali-kota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Swasta Lainnya	Swasta Lainnya di Luar Pembinaan dan Konsultasi K3	- Menengah - Besar			jawab usaha pelatihan kerja berupa CV Penanggung Jawab LPK 2. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: a. struktur organisasi dan uraian tugas b. daftar & CV tenaga pembina/ tenaga		kerja paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 tahun sejak PB diterbitkan 3. Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja 4. Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program	Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/ atau Pelatihan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ahli/ tenaga teknis, sertifikat kompetensi instruktur c. program kerja dan RAB untuk 3 tahun d. program PBK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja e. kapasitas latih per tahun		pelatihan kerja 5. Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang disetujui 6. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program 7. Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 bulan sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan g. bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan *Online* (WLKP *Online*) h. bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat 3. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa		8. Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur 9. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memiliki pengesahan RPTKA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup 4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup 5. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan					
			Pembinaan dan Konsultasi K3	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Melampirkan surat permohonan 2. Melampirkan pas poto penanggung jawab Perusahaan Jasa K3 3. Melampirkan Berita acara pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan setempat diketahui oleh pimpinan unit 4. Melampirkan profil perusahaan	5 Hari	1. Durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi standar paling lambat 1 tahun setelah usaha jasa K3 bidang pembinaan dan konsultasi K3 beroperasi 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan konsultasi keselamatan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Melampirkan struktur organisasi dan uraian tugasnya 6. Melampirkan daftar dan foto dokumentasi sarana dan prasarana pembinaan K3 7. Melampirkan surat pernyataan sebagai tenaga ahli dan tenaga teknis yang menyatakan bekerja penuh di perusahaan 8. Melampirkan sertifikat ahli K3 sesuai bidang jasa dan		dan kesehatan kerja 3. Memelihara dokumen kegiatan selama kegiatan berlaku 4. Menggunakan sarana dan prasarana pembinaan sesuai dengan bidang usaha. 5. Menyampaikan laporan kepada Menteri			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							khusus untuk bidang kesehatan kerja sertifikat dokter hiperkes 9. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagaker-jaan 10. Melampirkan sertifikat TOT sesuai bi-dangnya 11. Melampirkan NPWP dan SPT pajak 2 tahun terakhir dengan kete-rangan status valid					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							12. Melampirkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) *online* 13. Melampirkan KTP dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dan tenaga teknis 14. Melampirkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) tenaga ahli yang masih berlaku 15. Melampirkan Standar Operasional Prosedur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(SOP) pembinaan 16. Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) keberlangsungan usaha					
9	74321	Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak Ke-3	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. LSP memiliki legalitas pendirian yang teregistrasi di Kementerian Hukum dan HAM 2. LSP memiliki dokumen sistem manajemen mutu 3. LSP memiliki skema sesuai dengan ruang lingkup sektor	67 Hari	1. LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai ruang lingkup lisensi yang kredibel 2. LSP mempublikasikan layanan sertifikasi secara transparan 3. LSP mengelola kelembagaannya	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi 4. LSP memiliki sarana prasarana terstandar 5. LSP memiliki perangkat asesmen berdasarkan skema sesuai dengan ruang lingkup sektor/sub sektor, bidang/sub bidang/ profesi 6. LSP memiliki tata kelola yang baik/*Good Governance* dibuktikan		melalui penjaminan mutu yang konsisten 4. LSP menyampaikan laporan secara periodik kepada BNSP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan dokumen hasil audit internal dan kaji ulang manajemen. 7. LSP memiliki sistem informasi yang mudah diakses publik dibuktikan dengan adanya *website*, sosial media dan publikasi lainnya 8. LSP mendapatkan lisensi dari BNSP					
10	78101	Aktivitas Penyeleksian dan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dalam bentuk	5 Hari	1. Melakukan penempatan tenaga kerja paling lambat	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri		- Besar			Perseroan Terbatas 2. Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama paling singkat 3 tahun berupa dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai Cukup 3. Rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja dalam		1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri 3. Memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 tahun PB yang diterbitkan berupa dokumen Sertifikat ISO			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							negeri paling singkat 1 tahun berupa dokumen Rencana Usaha Penempatan Tenaga Kerja 1 tahun 4. Memiliki perjanjian kerja sama dengan pengguna tenaga kerja atau perjanjian keagenan dengan Prinsipal 5. Dokumen Surat Pernyataan mengenai Komitmen penanggung jawab perusahaan memuat:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dalam negeri b. Tidak merangkap sebagai penanggungjawab pada usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri lain c. Tidak pernah dijatuhi hukuman					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri d. Bersedia memiliki petugas antar kerja paling sedikit 1 orang e. Mengutamakan keterlibatan tenaga kerja lokal 6. Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							negeri berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penempatan Tenaga Kerja 7. Melampirkan profil perusahaan penempatan tenaga kerja dalam negeri yang ditandatangani oleh penanggung jawab memuat: a. struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama yang menjabat dan uraian tugas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. CV direktur 8. Memiliki tenaga ahli di bidang pengawakan kapal perikanan/niaga yang dibuktikan dengan Sertifikat Ahli Nautika Kapal perikanan/niaga atau Sertifikat Ahli Teknika Kapal perikanan/niaga (*bagi PPTKS yang menempatkan awak kapal perikanan/niaga) 9. Memiliki bukti lulus seleksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (*bagi PPTKS yang menempatkan awak kapal perikanan) dan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (*bagi PPTKS yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menempatkan awak kapal niaga). 10. Memiliki sistem pendataan awak kapal perikanan/awak kapal niaga (*bagi PPTKS yang menempatkan awak kapal perikanan/niaga)					
11	78102	Aktivitas Penyeleksian dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Kantor Pusat Penempatan Tenaga Kerja	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas 2. Memiliki modal disetor dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.	7 Hari	1. Melakukan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia sesuai standar paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							000,00 (lima miliar rupiah); untuk PMDN, dan untuk PMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melampirkan Struktur organisasi perusahaan dilengkapi dengan nama yang menjabat 4. Memiliki bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada		2. Memiliki Manajemen Mutu yang di buktikan dengan sertifikat ISO 9001 dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak memperoleh PB 3. Melaporkan kegiatan usaha kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun 4. Memiliki SIP2MI dalam melakukan penempatan Calon Pekerja Migran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bank pemerintah untuk penyelesaian permasalahan/kasus pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan 5. Bukti penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan berupa sertifikat a.n. perusahaan atau akta notaris perjanjian sewa/kontrak/ kerjasama		Indonesia, calon Awak Kapal Niaga Migran, atau calon Awak Kapal Perikanan Migran 5. Memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (*endorsement*) oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam hal P3MI melaksanakan penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan jangka waktu sewa/kontrak/kerja sama paling singkat 5 tahun 6. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Perusahaan yang memuat: a. Tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada usaha penempatan Pekerja Migran		Perikanan Migran 6. Melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja 7. Melakukan seleksi pada dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota atau LTSA			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia lain b. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia 7. Surat Pernyataan Bersedia mengubah dan menyerahkan bilyet deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima		Pekerja Migran Indonesia 8. Melaporkan hasil seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota 9. Mendaftarkan dan mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam orientasi pra pemberangkatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ratus juta rupiah) atas nama perusahaan menjadi atas nama Menteri q.q P3MI bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai P3MI 8. Rencana Kerja Penempatan (RKP) dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk proposal yang memuat data P3MI meliputi nama, alamat, surat elektronik (*email*), no		10. Melaporkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk 11. Melaporkan data keberangkatan dan/atau perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telepon/faksimili paling singkat 3 tahun berdasarkan: a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri b. target penempatan Pekerja Migran Indonesia setiap tahun per negera tujuan c. pemantauan dan pembinaan Pekerja		Indonesia di negara tujuan penempatan 12. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja 13. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk jabatan yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Migran Indonesia d. upaya penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia e. pelindungan Pekerja Migran Indonesia f. Lampiran Uraian RKP meliputi tahun, negara tujuan dan peluang serta target penempatan Pekerja Migran Indonesia dari		perundang-undangan 14. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada negara tertentu yang dinyatakan tidak tertutup 15. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebelum bekerja 16. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengguna perseorangan dan berbadan hukum		perseorangan melalui mitra usaha di negara tujuan penempatan 17. Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan 18. Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 kali 24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									19. Mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan 20. Memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									semua biaya yang diper-lukan, terma-suk biaya pengu-buran sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indo-nesia yang bersangkutan 21. Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Mig-ran Indonesia atas persetujuan pihak keluarga Pekerja Mig-ran Indonesia atau sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan 22. Memberikan pelindungan terhadap seluruh harta milik Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya 23. Mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									24. Memulangkan Pekerja Migran Indonesia dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja, pemutusan hubungan kerja, mengalami kecelakaan kerja, dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan, dan/atau sebab lain yang menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									25. Menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang digunakan tidak mencukupi 26. Tidak membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kerja atau Pemberi Kerja 27. Tidak membebankan biaya penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja di negara tujuan penempatan 28. Memberikan pelindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									termasuk Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran 29. Menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan 30. Memenuhi persyaratan SIP3MI termasuk menyetorkan kembali deposito uang jaminan yang telah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dicairkan untuk penyelesaian permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia paling lama 1 bulan			
			Kantor Cabang Penempatan Tenaga Kerja	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi	7 Hari	1. Melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan, meliputi: a. pemberian informasi terkait peluang kerja di luar negeri		Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penanaman Modal atas nama Menteri Ketenagakerjaan 2. Salinan KTP Kepala Kantor Cabang 3. Foto Kepala Kantor Cabang 4. Struktur Organisasi Kantor Cabang yang disahkan oleh Direktur Utama P3MI dengan mencantumkan nama dan jabatan 5. Surat Permohonan Pembentukan Kantor		b. melakukan penyeleksian Calon Pekerja Migran Indonesia c. menyelesaikan permasalahan atau kasus Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja 2. Menyampaikan laporan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Cabang P3MI dari Direktur Utama P3MI diatas kertas bermaterai cukup 6. Surat Keputusan Direktur Utama P3MI tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang P3MI beserta karyawan 7. Surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama yang membuktikan		kepada pejabat penerbit izin paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penguasaan sarana dan prasarana kantor cabang P3MI paling singkat 2 tahun 8. Rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat					
12	78103	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas 2. Dokumen Surat Pernyataan mengenai Komitmen	5 Hari	1. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 bulan 2. Melaksanakan penempatan pekerja rumah tangga paling lambat 1	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung-jawab perusahaan memuat: a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar b. Tidak merangkap sebagai penanggung-jawab pada usaha penempatan pekerja rumah tangga lain		tahun sejak PB diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan pekerja rumah tangga d. Bersedia memiliki petugas antar kerja minimal 1 orang e. Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rumah tangga berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penem-patan Tenaga Kerja 3. Surat per-nyataan penempatan tenaga kerja non-formal untuk peker-jaan ke-rumahtang-gaan (perseorangan) 4. Penguasaan sarana dan prasarana kantor					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama paling singkat 3 tahun (Dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai Cukup) 5. Rencana kerja usaha penempatan pekerja rumah tangga paling singkat 1 tahun berupa Dokumen Rencana Usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penempatan Tenaga Kerja 1 tahun 6. Melampirkan profil perusahaan penempatan pekerja rumah tangga yang ditandatangani oleh penanggung jawab memuat: a. struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama yang menjabat dan uraian tugas b. CV direktur					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13	78104	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*)	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas 2. Bersedia berintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan dari Kementerian berupa Dokumen Surat Pernyataan 3. Dokumen Surat Pernyataan mengenai Komitmen penanggung jawab perusahaan memuat:	5 Hari	1. Melaksanakan penempatan tenaga kerja daring paling lambat 1 tahun sejak PB diterbitkan 2. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3 bulan 3. Memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 tahun PB diterbitkan berupa	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar b. Tidak merangkap sebagai penanggungjawab pada usaha penempatan tenaga kerja daring (*job portal*) lain c. Tidak pernah dijatuhi		Dokumen Sertifikat ISO 4. Memiliki rekomendasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) berupa Dokumen PSE paling lambat 1 bulan sejak PB diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja daring *(job portal)* d. Bersedia memiliki petugas Antarkerja minimal 1 orang e. Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja daring (job portal)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penem-patan Tenaga Kerja 4. Memiliki kan-tor yang berkedudukan di wilayah NKRI dengan alamat dan nomor telepon yang jelas 5. Melampirkan bukti Kepemilikan/ bukti Sewa paling singkat 3 tahun 6. Memiliki Sis-tem *database* untuk data					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pencari kerja, pemberi kerja, lowongan kerja dan penempatan berupa Surat Pernyataan Bersedia memiliki sistem Database dengan Materai cukup 7. Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama minimal 3 tahun					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa Dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai cukup 8. Rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja daring (*job portal*) paling singkat 1 tahun berupa Dokumen Rencana Usaha Penempatan Tenaga Kerja 1 tahun 9. Melampirkan profil perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Daring (*Job Portal*) yang ditandatangani oleh					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penanggung jawab memuat: a. struktur organisasi dilengkapi dengan foto, nama yang menjabat dan uraian tugas b. CV direktur					
14	78300	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya melalui Alih Daya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan standar K3L 2. Mencatatkan perjanjian alih daya kepada instansi yang berwenang 3. Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun setelah PB diterbitkan 4. Melaporkan perubahan data meliputi: a. Nama perusahaan alih daya b. Penanggung jawab perusahaan alih daya c. Alamat perusahaan alih daya-dan/ atau d. Bidang usaha			
15	71201	Jasa Sertifikasi	Lembaga Audit SMK3	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Berbadan hukum dengan status Perseroan Terbatas	5 Hari	1. Durasi pemenuhan kewajiban untuk melaksanakan Sertifikasi	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri 3. Memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai pernyataan yang telah disampaikan dan sesuai dengan ketentuan		Standar paling lambat 1 tahun setelah usaha Lembaga Audit SMK3 beroperasi 2. Melaksanakan audit SMK3 3. Menjaga kerahasiaan perusahaan yang diaudit 4. Memelihara dokumen kegiatan 5. Melaporkan kegiatan dan hasil audit SMK3 kepada menteri, perusahaan yang diaudit, dan dinas provinsi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 4. Memiliki bukti kepemilikan kantor cabang paling sedikit di 3 wilayah pada Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur 5. Memiliki surat keputusan penunjukan auditor eksternal SMK3 sebanyak 4 auditor eksternal senior dan 8 auditor eksternal junior yang masih berlaku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Memiliki dokumen akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang membuktikan telah berpengalaman melakukan sertifikasi sistem manajemen 7. Memiliki struktur organisasi Lembaga Audit SMK3 kantor pusat dan kantor cabang 8. Memiliki dokumen panduan audit sistem					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manajemen yang digunakan oleh lembaga audit sesuai dengan standar yang berlaku					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.S.1

S. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKOPERASIAN

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Usaha KSP Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal atau ekuitas pada laporan keuangan terakhir 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 4. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa		4. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja					
			Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP Primer	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan		3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasi-kan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		4. Mengonsolidasi-kan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang pembantu 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
			Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah		penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor kas 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib		kabupaten/ kota	
											Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan		memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
2	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Usaha USP Koperasi Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekun-der)	Usaha KSP Sekunder	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Dalam hal melaksanakan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			
			Jaringan Pelayanan Kantor	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam sekunder	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Cabang KSP Sekunder	- Besar			2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat		Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang		Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan		5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
4	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekun-der)	Usaha USP Koperasi Sekunder	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dan surat pernyataan bermeterai	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan		dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib		Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			
5	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Usaha KSPPS Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan		penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		kabupaten/ kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja					
			Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSPPS Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan		tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasi-kan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan		Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon		Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepala jaringan pelayanan					
			Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan		3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasi-kan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor cabang pembantu 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
			Jaringan Pelayanan Kantor Kas	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam primer	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			KSPPS Primer	- Besar			2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat		Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasikan kegiatan usaha jaringan pelayanan kantor kas		Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/kota	Bupati/Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja 11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan		5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					
6	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Usaha USPPS Koperasi Primer	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal tetap pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan		penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		kabupaten/ kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja					
7	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Sekunder (KSPPS	Usaha KSPPS Sekunder	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal usaha awal pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Sekun-der)					surat pernyataan bermaterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan usaha simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan		pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja					
			Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSPPS Sekunder •	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Memiliki Izin untuk usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah sekunder 2. Laporan keuangan tahunan koperasi 3. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar 4. Hasil pemeriksaan	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan		Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan dinyatakan sehat 5. Anggaran dasar koperasi 6. Riwayat hidup pengurus dan pengawas 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak 9. Jumlah minimal anggota di daerah yang akan dibuka jaringan pelayanan 10. Jumlah minimal modal kerja		penerapan prinsip kehati-hatian 3. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 4. Mengonsolidasi-kan kegiata usaha jaringan pelayanan kantor cabang 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan		Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Rencana kerja jaringan pelayanan 12. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja 13. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan 14. Sertifikat kompetensi calon kepala jaringan pelayanan dan 15. Surat pernyataan integritas calon kepala jaringan pelayanan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembia-yaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekun-der)	Usaha USPPS Koperasi Sekunder	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti setoran modal tetap pada bank syariah 2. Memiliki rencana kerja 3. Riwayat hidup pengurus dan pengawas dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 4. Surat lulus uji kelayakan dan kepatutan pengurus dan pengawas 5. Surat pernyataan kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan usaha	3 Hari	1. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM) 2. Mengelola unit simpan pinjam sebagai unit usaha otonom dengan pembukuan terpisah 3. Melaksanakan ketentuan penyelenggaraan usaha simpan pinjam sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip kehati-hatian	-	Wilayah keanggotaan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Wilayah keanggotaan lintas kabupaten/ kota	Gubernur
											Wilayah keanggotaan kabupaten/ kota	Bupati/ Walikota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							simpan pinjam 6. Surat pernyataan penerima manfaat (*Beneficial Owner*) 7. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 8. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan koperasi bagi pengelola dan 9. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja		4. Menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan usaha kepada pemerintah 5. Dalam hal melaksanakan aktifitas Koperasi Jasa Keuangan (KJK) wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan Lembaga otoritas keuangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	66292	Aktivitas Pemering-kat Usaha Mikro, Kecil, Mene-ngah dan Koperasi	Aktifitas Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Mene-ngah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Berbentuk badan hukum 2. Memiliki struktur organisasi, uraian tugas, kewenangan dan tanggung jawab 3. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kementerian koperasi dan ukm. 4. Memiliki standar operasional manajemen aktivitas pemeringkatan koperasi. 5. Personil yang melaksanakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									aktifitas pemeringkatan bebas konflik kepentingan 6. Memiliki personil yang mempunyai keahlian dan pengalaman dibidang pemeringkatan koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau tanda bukti pendidikan dan/atau pelatihan yang dikeluarkan pejabat berwenang			

T. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENANAMAN MODAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
1.	64200	Aktivitas Perusaha-an Holding	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2.	69101	Aktivitas Pengacara	Kantor Advokat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat wajib mendapat-kan Surat Keputusan Pengangkat-an Advokat dari Organi-	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									sasi Advokat, yang salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan 3. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advokat, wajib memilki izin kerja berdasarkan reko-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									mendasi dari Organisasi Advokat dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan			
3.	69102	Aktivitas Konsultan Hukum	Kantor Advokat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat wajib mendapat-kan Surat	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									Keputusan Pengangkatan Advokat dari Organisasi Advokat, yang salinannya disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan 3. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advo-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									kat, wajib memilki izin kerja berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Advokat dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan			
4.	69103	Aktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual	Kantor konsultan kekayaan intelektual	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Konsultan kekayaan intelektual	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									yang bekerja pada kantor konsultan kekayaan intelektual wajib menda-patkan Surat Keputusan Pengangkat-an Konsultan Kekayaan Intelektual dari Menteri Hukum cq. Direktur Jenderal KI, sesuai ketentuan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
5.	69109	Aktivitas Hukum Lainnya	Kantor Advokat	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Advokat yang bekerja pada Kantor Advokat wajib mendapat-kan Surat Keputusan Pengangkat-an Advokat dari Organi-sasi Advokat, yang salinan-nya disam-paikan kepa-da Mahka-mah Agung dan Kemen-	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									terian hukum, serta berkegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan 3. Advokat Asing yang bekerja pada Kantor Advokat, wajib memilki izin kerja berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Advokat dan Kementerian Hukum, serta berkegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									sesuai ketentuan perundang-undangan			
6.	74901	Aktivitas Penerjemah atau Interpreter	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Mengikuti proses pengangkatan Penerjemah Tersumpah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 juncto Nomor	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									04 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkat-an, Pelapo-ran, dan Pemberhen-tian Penerje-mah Tersumpah			
7.	91012	Perpusta-kaan dan Arsip Swasta	Kegiatan perpusta-kaan yang dilakukan oleh swasta	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Mendapat-kan Nomor Pokok Perpustaka-an (NPP) dan Akreditasi Perpustaka-	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									an Khusus dari Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional (LAP-N) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi			
			Kegiatan pengelolaan arsip yang	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampaikan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
			dilakukan oleh swasta						2. Mendapatkan Akreditasi Kearsipan dari Pusat Akreditasi Kearsipan - Arsip Nasional Indonesia (ANRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan paling lambat 1 (satu)tahun setelah beroperasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
8.	96910	Aktivitas Pemakam-an dan Kegiatan YBDI	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menyampai-kan LKPM melalui Sistem OSS per triwulan 2. Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Krematorium wajib mendapat-kan izin/ keputusan Bupati/Wali-kota atau Gubernur apabila berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12	(13)
									diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman			
9.	70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui Sistem OSS per triwulan.	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

U. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	62014	Aktivitas Pengembangan Teknologi *Blockchain*	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Menyerahkan perencanaan/ *Roadmap* teknologi *Blockchain* termasuk rencana menerapkan aktivitas usaha lainnya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 2. Pelaporan secara berkala setiap minimal 1 (satu) tahun sekali	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (dalam hal memiliki sistem elektronik yang dipergunakan)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau jika terjadi perubahan mengenai perkembangan proyek kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika			
2	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Membuat dan menerapkan internal *company policies* mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial	- Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Ling-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Memenuhi *self-declare* untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian *Artificial Intelligence* Sub	kup Privat (dalam hal memiliki sistem elektronik yang dipergunakan) - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaik		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Bidang *Data Science* 3. Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui event, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi 4. Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun mengenai kegiatan manajemen	an Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan keamanan data (*data security and governance*) yang dilakukan kepada Menteri yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	Moda Udara - Izin Pro-duksi Alat Pera-latan Perta-hanan dan Kea-ma-nan		
3	62022	Aktivitas Penye-diaan Identitas Digital	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat pernyataan kesediaan untuk menjamin kerugian Pengguna Identitas Digital akibat kegagalan	21 Hari	1. Menyerahkan salinan bukti laporan sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan	Pen-daftaran Penye-lenggara Sistem Elek-tronik Lingkup Privat	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							layanan Identitas Digital, kesengajaan dan/atau kelalaian kepada Orang, Badan Usaha, atau Instansi karena kegagalannya 2. Memiliki fasilitas dan peralatan yang berada di wilayah Indonesia sebagai berikut: a. Sistem untuk mengelola informasi pendaftaran pemilik		perundang-undangan 2. Memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasikan fasilitas dan peralatan 3. Melakukan validasi Identitas Digital sesuai dengan standar dan panduan penyediaan Identitas Digital 4. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							identitas digital b. Sistem untuk menerbitkan dan mengelola identitas digital yang diberikan kepada pemilik identitas digital c. Sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam penyeleng-garaan identitas digital		mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital 5. Memberitahu-kan kontrak berlangganan (*Subscriber Agreement*) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital 6. Membuat daftar Identitas Digital yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Sistem verifikasi identitas digital		aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital 7. Memelihara dokumen arsip secara sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan baik dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan/atau elektronik (*electronic based*) 8. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau Pemilik Identitas Digital 9. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya 10. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 11. Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									waktu apabila diminta 12.Telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian			
4	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1.Tidak menjadi induk bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) lain dan tidak berinduk kepada PSrE lain 2.Telah melakukan penilaian mandiri yang mengacu pada standar fasilitas dan	21 Hari	1. Melaksanakan audit terhadap otoritas pendaftaran-nya (*registration authority*) 2. Melakukan validasi Sertifikat Elektronik 3. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peralatan yang diterbitkan oleh Kementerian 3. Melampirkan surat permohonan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 4. Memenuhi interoperabilitas PSrE		Pemilik Sertifikat Elektronik mengenai penggunaan dan pengamanan Sertifikat Elektronik 4. Memberitahukan kontrak berlangganan (*Subscriber Agreement*) dan kebijakan privasi Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia yang mengacu pada standar interoperabilitas PSrE non-Instansi yang diterbitkan oleh Kementerian 5. Memiliki bukti sertifikat dan laporan hasil dari penilaian sertifikasi sistem manajemen pengamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Memiliki dokumen kebijakan yang berisi jaminan		Sertifikat Elektronik 5. Memberitahukan Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektroniknya kepada pihak lain yang menggunakan jasa PSrE Indonesia 6. Membuat daftar Sertifikat Elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ganti rugi yang dialami Orang, Badan Usaha, atau Instansi akibat kegagalan layanan Penyeleggaraan Sertifikasi Elektronik baik karena kesengajaan dan/atau kelalaian dalam mematuhi kewajibannya sebagai PSrE 7. Memiliki kemampuan keuangan berupa harta paling sedikit Rp30 000 000 000,00 (tiga puluh miliar		yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik (*validation authority*) 7. Memelihara dokumen arsip secara sistematik dan dapat dipertanggung jawabkan baik dalam bentuk tertulis (*paper based*) dan/atau elektronik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rupiah) dan menyerahkan bukti kemampuan keuangan berupa salinan neraca keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen 8. Memiliki paling sedikit 11 (sebelas) orang peran terpercaya dalam pengoperasian fasilitas dan peralatan 9. Memiliki Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik		(*electronic based*) 8. Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Sertifikat Elektronik 9. Meminta persetujuan Menteri dalam hal terjadi perubahan layanan PSrE Indonesia yang berbeda dengan ketentuan dalam Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(*Certification Practice Statement*) PSrE yang mengacu pada Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) PSrE Induk 10. Memiliki prosedur dan metode untuk mengelola dan mengoperasi-kan fasilitas dan peralatan 11. Menyampaikan memiliki proposal PSrE sesuai dengan format sebagaimana tercantum		*Policy*) PSrE Induk 10. Memperbarui Tanda Lulus PSrE yang akan habis masa berlakunya 11. Mempublika-sikan Pernyataan Penyelenggara an Sertifikasi Elektronik (*Certification Practice Statement*) Penyelengga-raan Sertifikasi Elektroniknya di situs resmi layanannya 12. Mengelola dan mengamankan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 12. Menyerahkan salinan bukti integritas dan rekam jejak direksi dan dewan komisaris PSrE Indonesia 13. Menyerahkan salinan rekam jejak PSrE Indonesia tidak dalam kondisi berperkara		sistem yang menyimpan identitas Pemilik Sertifikat Elektronik 13. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili badan hukum berada 14. Memiliki fasilitas dan peralatan yang dibutukan untuk penyelenggaraan sertifikasi elektronik dalam wilayah hukum Indonesia sebagai berikut: a. Sistem untuk mengelola informasi pendaftaran		kewajiban sebagai PSrE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 14. Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta 15. Telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemilik Sertifikat Elektronik b. Sistem untuk membuat dan mengelola data pembuatan Tanda Tangan Elektronik dan Data Verifikasi Tanda Tangan Elektronik c. Sistem untuk menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik yang diberikan		Elektronik di Kementerian			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kepada Pemilik Sertifikat Elektronik d. Sistem untuk menandai waktu data elektronik (*timestamp*) e. Sistem perlindungan untuk menjamin keamanan fasilitas dan peralatan dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik f. Sistem verifikasi Sertifikat Elektronik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemilik Sertifikat Elektronik (*validation authority*) yaitu: i. *Online Certificate Status Protocol* (OCSP) ii. *Certificate Revocation List* (CRL) iii. Memiliki atau mem-punyai kontrol penuh atas fasilitas dan peralatan yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibutuh-kan dalam menyedia-kan layanan ter-sertifikasi yang diseleng-garakan-nya dalam wilayah hukum Indonesia, antara lain: 1. Tanda Tangan Elektro-nik 2. Segel Elektro-nik 3. Penanda Waktu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Elektronik 4. Layanan Pengiriman Elektronik Tercatat 5. Autentikasi Situs Web dan/atau 6. Preservasi Tanda Tangan Elektronik dan/atau Segel Elektronik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							15. Memiliki dokumen: a. Rencana bisnis b. Rencana keber-langsungan bisnis c. Rencana penanggulan gan bencana d. Laporan pengujian sistem elektronik (*stress test* dan *load test*) dan analisis keamanan informasi (*penetration test*), 16. Mendapatkan Tanda Lulus penilaian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelaikan dari Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang penilaiannya mengacu pada: a. Standar yang diterbitkan oleh Kementerian bidang Komunikasi dan Informatika, antara lain: i. Standar fasilitas dan peralatan PSrE					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ii. Standar inter-operabilitas iii. Standar verifikasi identitas iv. Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*) PSrE Induk b. Panduan-panduan yang diterbitkan oleh Kementerian bidang Komunikasi dan Informatika c. Standar-standar lain yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disebutkan dalam Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik d. *Best practice* internasional yang dipakai PSrE Indonesia dalam layanannya 17. Menerapkan sistem manajemen usaha yang mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh Kominfo, antara lain:					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Standar Fasilitas dan Peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yang di dalamnya mensyaratkan sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi b. Panduan Operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik c. Kebijakan Sertifikat Elektronik (*Certificate Policy*)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk, yang di dalamnya mengatur terkait dengan jaminan ganti rugi, rencana bisnis, rencana keberlangsungan bisnis, rencana penanggulangan bencana serta panduan lain yang mengacu pada *best*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							practice internasional					
5	62024	(Aktvitas konsultasi dan perancangan *Internet of Things* (IoT))	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memenuhi Standar Aktivitas Konsultasi dan Perancangan *Internet of Things* (IoT) 2. Memenuhi *self-declare* untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Informasi dan Komunikasi	- Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (dalam hal memiliki sistem elektronik yang diper-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Golongan Pokok Telekomunikasi bidang *Internet of Things* (IoT) 3. Pelaporan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	gunakan) - Izin Penetapan Industri Pertahanan - Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval*		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Facility Worthiness of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Keamanan - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		
6	58200	Penerbitan Piranti Lunak (*Software*)	Penerbitan Gim	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Melakukan pemenuhan PB UMKU Klasifikasi Gim 2. Melakukan pemenuhan PB UMKU Pendaftaran Penyeleng-	- Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Ling-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gara Sistem Elektronik Lingkup Privat 3. Melakukan pemenuhan uji kesesuaian Klasifikasi Gim 4. Melakukan pelaporan secara berkala	kup Privat Klasi-fikasi Pro-duk Gim - Izin Pene-tapan Industri Per-taha-nan - Serti-fikat Perse-tujuan Kelaik an Fasi-litas Produ ksi Perta-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										hanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production*): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara - Izin Produksi Alat		

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.U.36

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan		

V. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	38110	Pengumpulan Sampah Dan Limbah Tidak Berbahaya	Pengumpulan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Oleh Bank Sampah Induk (BSI), Wirausaha/ Wiraswasta, Dan *Sociopreneur* Baik Konvensional	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Pelaku usaha berbentuk badan usaha 2. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah 3. Sarana dilengkapi dengan label atau tanda 4. Luas lokasi	-	Pengumpulan sampah dengan wilayah pelayanan dalam 1 Kabupaten/ Kota	Bupati/ WaliKota
											Pengumpulan sampah dengan wilayah pelayanan lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Maupun *Platform* Digital						dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan 5. Lokasi mudah diakses 6. Tidak mencemari lingkungan 7. Memiliki sarana pengolahan sampah 8. Memiliki alat transportasi pengum-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pulan sampah 9. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan 10. Cakupan pelayanan di Tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten 11. Memiliki Prosedur operasional standar penyelenggaraan bank sampah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Memenuhi sarana minimal pengolahan air lindi sampah sederhana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (selama menjalankan kegiatan usaha apabila terdapat kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pencuci-an sampah) 13. Menyam-paikan Laporan Pengelo-laan Sampah kepada Pemerin-tah Daerah, termasuk pencatat-an data jenis, jumlah dan/ sumber sampah yang di kumpul-kan, dipilah dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diangkut (2 kali dalam setahun, setiap bulan Januari dan Juli)			
			Pe-ngumpul-an Limbah Tidak Berbahaya (Tidak Mencakup Limbah Non-B3 Sebagai-mana Dimaksud Lampiran XIV Peraturan Pemerin-tah Nomor 22 Tahun	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Pelaku usaha berbentuk badan usaha 2. Memiliki sarana untuk me-ngelom-pokkan sampah berdasar-kan jenis sampah 3. Dileng-kapi label atau		Pengumpul-an sampah dengan wilayah pelayanan dalam 1 Kabupaten/ Kota	Bupati/ WaliKota
											Pengumpul-an sampah dengan wilayah pelayanan lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Oleh Bank Sampah Induk (BSI), Wirausaha/ Wiraswasta, Dan *Socio-preneur* Baik Konvensional Maupun						tanda pada sarana 4. Luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan 5. Lokasi mudah diakses 6. Tidak mencemari Lingkungan 7. Memiliki sarana pengolahan sampah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Platform Digital						8. Memiliki alat transportasi pengumpulan sampah 9. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan 10. Cakupan pelayanan di Tingkat Provinsi, Kota/ Kabupaten 11. Memiliki Prosedur operasional standar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pe-nyeleng-garaan bank sampah 12. Meme-nuhi sarana minimal pengolah-an air lindi sampah seder-hana, sesuai ketentu-an per-aturan per-undang-undang-an (selama menjalan-kan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha] [apabila terdapat kegiatan pencucian sampah) 13. Menyampaikan Laporan Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah, termasuk pencatatan data jenis, jumlah dan sumber sampah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang di kumpul-kan, dipilah dan diangkut (2 kali dalam setahun), setiap bulan Januari dan Juli			
2	38120	Pe-ngum-pulan Limbah Berba-haya	Pengum-pulan Sampah Yang Me-ngandung B3 dan/atau Limbah B3 Yang Ber-sumber dari Rumah	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki peralatan pena-nganan ke-daruratan [pada saat memulai kegiatan usaha], termasuk: kendara-	-	Pengumpul-an sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga dengan wilayah pelayanan	Bupati/ WaliKota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Tangga di Fasilitas Pengelola-an Sampah Spesifik						an, timba-ngan, *log-book*, dan sarana K3 2. Memiliki bangunan dan sarana untuk me-nampung sampah yang mengan-dung B3 dan/atau Limbah B3 3. Memiliki lokasi penam-pungan sampah yang		dalam 1 Kabupaten/ Kota	
											Pengumpul-an sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang bersumber dari rumah tangga dengan wilayah pelayanan lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 Provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									mudah diakses 4. Memiliki sistem drainase 5. Memiliki struktur kelembagaan 6. Memiliki dan menjalankan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengumpulan Sampah Spesifik (selama menjalankan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan usaha) 7. Memiliki sarana pencegahan pencemaran lingkungan 8. Memiliki tata kelola pengangkutan dan pengumpulan sampah 9. Menyampaikan Laporan Pengelolaan Sampah kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Pemerintah Daerah, termasuk pencatatan data jenis, jumlah dan sumber sampah yang di kumpulkan, dipilah dan diangkut (2 kali dalam setahun, setiap bulan Januari dan Juli)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengumpulan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat kelayakan Operasional 2. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan	10 Hari	1. Mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3 2. Menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan kapasitas tempat Penyim-		Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/ Kota	Bupati/ WaliKota
											Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi atau lintas Kabupaten/ Kota	Gubernur
											Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional, lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fungsi Lingkungan Hidup 3. Persetujuan Teknis		panan Limbah B3 3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 4. Melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 5. Melakukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan 6. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 yang dikumpulkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari 7. Melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									apabila diperlukan 8. Melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan 9. Menyusun dan Menyampaikan laporan Kegiatan Pengumpulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah B3 10. Melakukan kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
3	38211	*Treatment* dan Pembuang-	Pengolahan Sampah Yang Tidak	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen studi kelayakan yang	10 Hari	1. Menjalankan pengelolaan sampah	-	Lokasi Pengolahan di Kabupaten/ Kota	Bupati/ WaliKota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		an Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Berbahaya Menghasilkan Produk Berupa Bahan Bakar Alternatif/ Substitusi, Biofuel, Biogas, Dan Lainnya				paling sedikit memuat: a. Jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari, komposisi, dan karakteristik		sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) 2. Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 3. Melakukan pencatatan sampah yang		DKI Jakarta	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sampah b. Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan c. Kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan		masuk dan terkelola 4. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah mengenai hasil pengelolaan sampah serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Perencanaan teknik yang paling sedikit memuat: a. *Site-plan* b. Gambar teknis c. Spesifikasi teknis d. Memo disain e. Volume pekerjaan		Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setiap 6 (enam) bulan sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Rencana anggaran biaya g. Jadwal pelaksanaan h. Spesifikasi produk yang dihasilkan dari hasil pengolahan (cont-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oh: spesifikasi bahan bakar substitusi yang dihasilkan beserta rencana pemanfaatannya) 3. Dokumen *Standard Operating Procedure*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(SOP) pengelolaan sampah dan sistem tanggap darurat					
			Pengolahan Limbah Dan Sampah Yang Tidak Berbahaya Secara Termal Menghasilkan Produk Berupa Listrik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari, komposisi,	10 Hari	1. Menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) 2. Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan karakteristik sampah b. Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan c. Kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan 2. Perencanaan teknik yang paling sedikit memuat: a. *Siteplan*		dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 3. Melakukan pencatatan sampah yang masuk dan terkelola 4. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Gambar teknis c. Spesi-fikasi teknis d. Memo disain e. Volume peker-jaan f. Ren-cana angga-ran biaya g. Jadwal pelak-sanaan h. Spesi-fikasi produk yang dihasil-kan dari hasil		mengenai hasil pengelo-laan sampah serta pengelo-laan dan peman-tauan lingkung-an hidup sesuai dengan Per-setujuan Lingkung-an dan ketentuan Peraturan Per-undang-undangan setiap 6 (enam)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengolahan (contoh: spesifikasi bahan bakar substitusi yang dihasilkan termasuk rencana pemanfaatannya) 3. Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan sampah dan sistem		bulan sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanggap darurat					
			Pengolahan Limbah Dan Sampah Yang Tidak Berbahaya Secara Termal Tidak Menghasilkan Produk Berupa Listrik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat: a. Jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari, kompos isi, dan karakteristik sampah b. Kelayakan	10 Hari	1. Menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) 2. Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan		Seluruh	Bupati/ WaliKota

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknis, ekonomi, dan keuangan c. Kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan 2. Perencanaan teknik yang paling sedikit memuat: a. *Siteplan* b. Gambar teknis		Perundang-undangan 3. Melakukan pencatatan sampah yang masuk dan terkelola 4. Menyampaikan laporan kepada Pemerintah/ 5. Pemerintah Daerah mengenai hasil pengelo-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Spesifikasi teknis d. Memo disain e. Volume pekerjaan f. Rencana anggaran biaya dan g. Jadwal pelaksanaan 3. Dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan		laan sampah serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setiap 6 (enam) bulan sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sampah dan sistem tanggap darurat					
4	38220	*Treat-ment* dan Pem-buang-an Limbah Ber-bahaya	Pe-nimbunan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat kelayakan Operasio-nal 2. Bukti ke-pemilikan atas dana Penang-gulangan Pen-cemaran Lingku-ngan Hidup dan/atau Kerusak-an Lingku-ngan Hidup atau dana	10 Hari	1. Melaku-kan identifi-kasi Limbah B3 yang ditimbun 2. Melaksa-nakan Penim-bunan Limbah B3 sesuai dengan standar Penim-bunan Limbah B3 3. Melaku-kan	- Dekomi-sioning Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif - Kons-truksi Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif - Operasi Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pen-jaminan Pemulih-an Fungsi Lingku-ngan Hidup 3. Per-setujuan Teknis dari Dirjen PSLB3		pencata-tan nama dan jumlah Limbah B3 yang ditimbun 4. Menyim-pan Limbah B3 yang berasal dari pihak lain yang akan ditimbun ke dalam tempat Pengum-pulan Limbah B3 atau langsung ke fasilitas	- Per-nyataan Pem-bebasan Fasilitas Pengelo-laan Limbah Radioaktif		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penimbunan Limbah B3 5. Memenuhi standar lingkungan hidup dan/atau baku mutu lingkungan hidup mengenai pelaksanaan Penimbunan Limbah B3 6. Menaati baku mutu air			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penimbunan Limbah B3 menghasilkan air limbah 7. Melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat Penimbunan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah B3 8. Melakukan Pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya Limbah B3 ke lingkungan hidup 9. Menutup bagian paling			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									atas fasilitas Penimbunan Limbah B3 setelah selesainya kegiatan Penimbunan Limbah B3 10. Menyusun dan Menyampaikan laporan Penimbunan Limbah B3			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Pengolahan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang diolah 2. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang diolah 3. Melaksanakan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan standar Pengolah-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an Limbah B3 4. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3 5. Menyimpan Limbah B3 yang akan diolah ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3 6. Melakukan Pengumpulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah B3 yang akan diolah 7. Mengolah Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pengolahan Limbah B3 yang dimiliki 8. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3 9. Memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Darurat berupa Dokumen Program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 10. Memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3			
			Pemanfaatan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin		10 Hari	1. Melaksanakan Pemanfaatan		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan/atau baku mutu lingkungan hidup 2. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dimanfaatkan 3. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan 4. Menyimpan Limbah B3 dari pihak lain yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									akan dimanfaatkan ke dalam Tempat Pengumpulan Limbah B3 5. Memanfaatkan Limbah B3 sesuai dengan teknologi Pemanfaatan Limbah B3 yang dimiliki 6. Menaati baku mutu air Limbah,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan air Limbah dan ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menaati baku mutu emisi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Pemanfaatan Limbah B3 menghasilkan emisi udara 8. Menyusun dan menyampaikan laporan Peman-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									faatan Limbah B3			
			Pengolahan Limbah B3 Untuk Kegiatan *Tank Cleaning* Yang Tidak Terintegrasi Dengan Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Dan Pemanfaatan Limbah B3	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Surat Kelayakan Operasional 2. Persetujuan Teknis dari Dirjen PSLB3 3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau	10 Hari	1. Mengidentifikasi Limbah B3 yang dihasilkan 2. Melakukan pencatatan nama dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan 3. Melakukan pengemasan		Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup		Limbah B3 4. Menyerahkan Limbah B3 hasil kegiatan pencucian tangki kapal kepada pemanfaat, pengolah dan/atau pengumpul Limbah B3 5. Menyusun dan menyampaikan rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kegiatan pekerjaan *tank cleaning* kepada Menteri c.q. Dirjen PSLB3 paling lama 2 (dua) minggu sebelum kegiatan dilaksana kan meliputi: a. Jad-wal ke-giatan *tank*			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									cleaning b. Nama kapal yang dibersihkan c. Lokasi labuh jangkar d. Kapasitas angkut kapal dalam satuan *deadweight tonnage* (DWT)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									e. Perkiraan jumlah Limbah B3 f. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang masih berlaku den-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gan nilai pertanggungan paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) g. Salinan sertifikat kompetensi pengelolaan Lim-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bah B3 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan *tank cleaning*, meliputi: a. Melakukan pencatatan nama Limbah B3 dan Jumlah Limbah B3			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang di-hasil-kan dari kegia-tan *tank clea-ning* b. Mela-kukan pe-nge-masan Lim-bah B3 yang di-hasil-kan c. Me-nye-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									rah-kan Lim-bah B3 yang diha-silkan ke-pada pen-gelola Lim-bah B3 ber-izin di-sertai den-gan kon-trak kerja-sama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									d. Membuat manifes elektronik 7. Pada pasca pelaksanaan, menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan *tank cleaning* kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lama 2 (dua) minggu setelah kegiatan dilaksanakan			
5	46654	Perdagangan Besar B3	Perdagangan Di Dalam Negeri Untuk Distribusi Bagi B3 Yang Dapat Dipergunakan Dan Terbatas Dipergunakan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti penguasaan gudang penyimpanan B3 2. Disain gudang penyimpanan B3 3. Disain tata penyimpanan B3 4. Surat penunjukan	20 Hari	1. Mendistribusikan B3 sesuai rencana distribusi 2. Memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyimpanan B3 yang memenuhi	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari produsen/ pemasok B3 5. *Material Safety Data Sheet* (MSDS)/ Lembar Data Keselamatan (LDK) 6. Disain dan spesifikasi kemasan B3 7. Rencana Distribusi B3		persyaratan untuk: a. Lokasi dan b. Konstruksi bangunan 3. Setiap lokasi penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label B3 sesuai dengan peraturan per-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undang-undangan 4. Wajib meng-gunakan pengang-kutan B3 yang laik operasi serta pelaksa-naannya sesuai dengan tata cara pengang-kutan yang di atur dalam peraturan per-undang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									5. Setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan dan peredaran (pendistribusian) B3 wajib menyertakan/dilengkapi Lembar Data Keselamatan (LDK) 6. Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan label B3, Dalam hal simbol dan label B3 mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru 7. Dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan : untuk B3 yang masih			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dapat dikemas ulang pengemasannya dilakukan oleh distributor untuk B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau ke-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									selamat-an manusia, pengedar wajib me-lakukan penang-gulangan-nya 8. B3 yang kadalu-warsa, yang tidak me-menuhi spesifi-kasi dan/atau bekas kemasan B3 wajib dikelola sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan per-undang-undangan di bidang Pengelo-laan Limbah B3 9. Menjaga ke-selamat-an dan ke-sehatan kerja 10. Menang-gulangi terjadinya kecelaka-an dan atau keadaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									darurat akibat B3 11. Menyampaikan laporan Pengelolaan B3 secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									12. Dalam hal terdapat perubahan data, Perusahaan wajib mengajukan pembaharuan data melalui Sistem OSS			
			Perdagangan Luar Negeri (Impor/ Ekspor) Bagi B3 Yang	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Bukti penguasaan gudang penyimpanan B3	20 Hari	1. Memiliki dan/atau menguasai gudang tempat penyim-		Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dapat Diper-gunakan Dan Terbatas Diper-gunakan				2. Disain gudang penyim-panan B3 3. Disain tata penyim-panan B3 4. Surat Keterang-an Registrasi B3		panan B3 yang me-menuhi persya-ratan untuk: a. Lokasi dan b. Kon-struk-si ba-ngun-an 2. Setiap penyim-panan B3 wajib diberikan simbol dan label B3 sesuai dengan peraturan per-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									undang-undangan 3. Wajib meng-gunakan pengang-kutan B3 yang laik operasi serta pelaksa-naannya sesuai dengan tata cara pengang-kutan yang di atur dalam peraturan per-undang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									4. Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label B3, Dalam hal simbol dan label B3 mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru 5. Dalam hal kemasan B3 mengalami			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerusakan : untuk B3 yang masih dapat dikemas ulang pengemasannya dilakukan oleh importir/ eksportir untuk B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau keselamatan manusia, importir/eksportir wajib melakukan penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. B3 yang kada-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									luwarsa, yang tidak meme-nuhi spesifi-kasi dan atau bekas kemasan B3 wajib dikelola sesuai dengan peraturan per-undangan di bidang pengelo-laan limbah B3 7. Menjaga kesela-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									matan dan kesehatan kerja 8. Menang-gulangi terjadinya kecelaka-an dan atau keadaan darurat akibat B3 9. Menyam-paikan laporan Pengelo-laan B3 secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan hidup 10. Dalam hal terdapat perubahan data, Perusahaan wajib mengajukan pembaharuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perubah-an data			
6	37021	*Treat-ment* dan Pem-buang-an Air Limbah Tidak Ber-bahaya	Instalasi Pengolah-an Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penun-jangnya Dengan Kapasitas <50 m3/Hari	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetu-juan teknis pem-buangan dan/atau peman-faatan air limbah 2. Dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau peng-angkut lumpur tinja	5 Hari	Melaksana-kan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah	-	1.Skala industri kecil dan menengah, dan Skala Kabupaten /Kota 2.Skala industri kecil dan menengah lokasi lintas Kabupaten /Kota, Skala Provinsi dan Skala Industri besar	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur
											1.Skala industri kecil dan	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											menengah lokasi lintas Provinsi 2. Skala industri besar lokasi lintas Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Termasuk Fasilitas Penunjangnya Dengan Kapasitas Melayani ≤ 20000/ Hari	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau air pengangkut air limbah domestik	5 Hari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		1. Skala Kabupaten /Kota 2. Skala Provinsi	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur
											Skala Nasional	Menteri/ Kepala Badan
7	37022	*Treatment* dan Pem-	Instalasi Pengolahan Lumpur	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan teknis pembu-	5 Hari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana	-	1.Skala industri kecil dan menengah	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		buang-an Air Limbah Ber-bahaya	Tinja (IPLT)	- Besar			angan dan/ atau peman-faatan air limbah 2. Doku-men kontrak kerja sama dengan peng-hasil dan/ atau lumpur tinja peng-angkut		yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		dan lokasi Kabupaten /Kota 2. Skala industri kecil dan menengah lokasi lintas Kabupaten /Kota atau skala industri besar dalam satu Provinsi	
											1. Skala industri kecil dan menengah lokasi lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											2.Skala industri besar lokasi lintas Provinsi	
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan penghasil dan/	5 Hari	Melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		1.Skala Kabupaten /Kota 2.Skala Provinsi	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur
											Skala Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau air peng-angkut air limbah domestik					
			Instalasi Pengolah-an Air Limbah (IPAL) Industri	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Perse-tujuan teknis pembu-angan dan/ atau peman-faatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan peng-hasil dan/	5 Hari	Melaksana-kan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		1.Skala Kabupaten /Kota 2.Skala Provinsi	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur
											Skala Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau air peng-angkut air limbah					
			Instalasi Pengolah-an Air Limbah (IPAL) Terpadu (Air Limbah Domestik Dan Air Limbah Proses Dari Usaha Dan/ Atau Kegiatan)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Perse-tujuan teknis pem-buangan dan/ atau peman-faatan air limbah 2. Kontrak kerja sama dengan peng-hasil dan/	5 Hari	Melaksana-kan ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Persetujuan teknis pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah		1.Skala Kabupaten /Kota 2.Skala Provinsi	1.Bupati/ WaliKota 2.Gubernur
											Skala Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau air peng-angkut air limbah					

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 130342 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KELAYAKAN OPERASI (B)							
1.	Surat Izin Penangkapan Ikan	1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan permohonan paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Mengisi *Log Book* Penangkapan Ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan 4. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	1 tahun musim penang-kapan ikan	1. Kapal penang-kap ikan berukur-an di atas 5 (lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh)	Gubernur

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ketentuan peraturan perundang undangan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		gross tonnage (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal penang-kap ikan sesuai dengan ketentu-an peraturan perun-dang-undangan mengenai Pemerinta han Aceh) dan 2. Daerah penang-kapan ikan di	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan 11. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal penangkap ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal pengangkut ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Mengisi *log book* penangkapan ikan dan melaporkannya setiap kali mendaratkan ikan 4. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* dan 2. Daerah penang-	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ketentuan peraturan perundang undangan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 5. Melaporkan hasil penghitungan sendiri jenis dan berat ikan hasil tangkapan, setiap kali mendaratkan ikan 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 7. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 8. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan		kapan ikan pada WPPNRI di atas 12 (dua belas mil laut dan/atau laut lepas	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pangkalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Terdaftar dan memenuhi ketentuan *regional fisheries management organizations*, bagi kapal penangkap ikan yang menangkap tuna dan sejenisnya di wilayah konvensi dan/atau kompetensi *Regional Fisheries Management Organizations* 11. Memiliki Surat Izin Penempatan Rumpon, bagi yang menempatkan rumpon dan 12. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
2.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan	Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar	1 tahun musim penang-kapan ikan	1. Kapal pengang-kut ikan beruku-ran di atas 5	Gubernur

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan b. Jenis muatan ikan yang diangkut c. Daerah penangkapan ikan d. Pelabuhan Muat e. Pelabuhan Pangkalan dan f. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan		(lima) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pengang-kut ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan mengenai Pemerinta	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		han Aceh) dan 2. Beroperasi di: a. WPPN-RI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi Provinsi yang bersangkutan, untuk Kapal	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						peng-angkut ikan yang ber-operasi dari daerah pe-nang-kapan ikan ke Pela-buhan Pang-kalan atau b. Wila-yah admini strasi Provin-si yang bersa-	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						ngkutan untuk kapal pengangkut ikan yang beroperasi antar Pelabuhan Pangkalan	
		Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan dan 3. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Tipe operasi kapal pengangkut ikan b. Jenis muatan ikan yang diangkut	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Melaporkan jenis dan berat ikan muatan	1 tahun musim penangkapan ikan	Untuk Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 1. Kapal pengangkut ikan	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Daerah penangkapan ikan d. Pelabuhan Muat e. Pelabuhan Pangkalan dan f. Nama kapal penangkap ikan mitra, untuk yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pemilik dengan mitranya, kecuali untuk mengangkut ikan milik sendiri dan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus:		5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 6. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 7. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Memuat dan mendaratkan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 9. Memenuhi ketentuan terkait alih muatan, bagi kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan melakukan alih muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		berukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* dan 2. Beroperasi di: a. WPPN RI paling jauh 12 mil laut lintas provinsi, di atas 12 (dua belas) mil laut, dan/	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Memiliki alokasi usaha kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit informasi: a. Jenis muatan ikan yang diangkut b. Pelabuhan peMuat c. Pelabuhan Pangkalan d. Pelabuhan negara tujuan dan e. Daftar nama perusahaan perikanan yang membutuhkan jasa pengangkutan ikan, yang dilengkapi dengan perjanjian kerja sama yang disahkan notaris bagi kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan bukan milik sendiri 3. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, dilengkapi dengan persyaratan tambahan berupa Buku Kapal Perikanan 4. Untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dilengkapi dengan persyaratan tambahan:				atau laut lepas untuk kapal peng-angkut ikan yang ber-operasi dari daerah pe-nang-kapan ikan ke Pe-labuh-an Pang-kalan atau b. Antar pro-	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Surat izin usaha pelayaran (SIUPAL)/surat izin usaha keagenan kapal (SIUPKK) b. Surat penunjukan keagenan kapal dari pemilik kapal c. Dokumen dari negara asal kapal pengangkut ikan yang memuat informasi: 1) Identitas pemilik kapal pengangkut ikan 2) Identitas kapal pengangkut ikan: dan 3) Nakhoda dan daftar anak buah kapal yang dilengkapi dengan paspor dan/atau buku pelaut 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha				vinsi, untuk kapal peng-angkut ikan yang ber-operasi antar Pe-labuh-an Pang-kalan Untuk Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus: 1. Kapal pengang-	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kut ikan ber-ukuran paling kecil 20 (dua puluh) *gross tonnage* dan 2. Ber-operasi antar-negara	
3.	Surat Izin Kapal Pendukung Operasi Penangkapan Ikan	1. Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 3. Memiliki Buku Kapal Perikanan	7 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar 3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan	1 tahun musim penang-kapan ikan	1. Kapal pen-dukung operasi penang-kapan ikan ber-ukuran di atas 5 (lima)	Gubernur

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan 6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		*gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (khusus Provinsi Aceh ukuran kapal pendu-kung operasi penangka pan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mengenai Pemerintahan Aceh) dan 2. Beroperasi di WPPNRI paling jauh 12 (dua belas) mil laut di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan	
		1. Memiliki alokasi usaha kapal pendukung operasi penangkapan ikan yang tercantum dalam perizinan berusaha 2. Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan dalam satu kesatuan usaha yang	4 Hari	1. Memenuhi kelaikan kapal perikanan yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan 2. Memiliki Persetujuan Berlayar, setiap kali akan berlayar	1 tahun musim penangkapan ikan	1. Kapal pendukung operasi penangkap-	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 3. Memiliki Buku Kapal Perikanan 4. Menyampaikan permohonan yang paling sedikit memuat informasi: a. Daerah penangkapan ikan b. Pelabuhan Pangkalan dan c. Nama kapal penangkap ikan yang membutuhkan dukungan operasi penangkapan ikan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan sebelum mendapatkan perizinan berusaha		3. Memiliki Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, setiap kali kapal tiba di Pelabuhan Pangkalan 4. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pemanfaatan sumber daya alam perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenakan setelah mendapatkan perizinan berusaha 5. Mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dan 6. Memenuhi ketentuan terkait pengawakan kapal perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		an ikan ber-ukuran di atas 5 (lima) *gross tonnage* dan 2. Ber-operasi di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau laut lepas	
4.	*Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	1. Dokumen rencana pembangunan/penempatan bangunan 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi	7 Hari	Laporan pelaksanaan pembangunan/ penempatan	Selama masa berlaku	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain ke-	Gubernur

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	perizinan berusaha	wenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional	Menteri/ Kepala badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
5.	*Surat Izin Membongkar		7 Hari		Selama masa	1. Wilayah perairan ≤	Gubernur

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana pembangunan/ penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/ retribusi		Laporan pelaksanaan pembokaran Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	berlaku perizinan berusaha	12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasio-	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nal atau f. Kawasan lintas provinsi	
6.	*Surat Izin Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Surat Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan sebelumnya	7 Hari	Laporan pemanfaatan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan	Selama masa berlaku perizinan berusaha	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil di	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						luar kewenangan Menteri dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
II. STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
7.	Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	1. Memenuhi standar penerapan distribusi ikan 2. Surat keterangan mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis cara distribusi ikan yang baik 3. Memiliki panduan cara distribusi ikan yang baik unit usahanya	10 Hari	1. Menerapkan cara distribusi ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Jenis dan kapasitas sarana dan prasarana	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Laporan hasil penilaian cara distribusi ikan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		b. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan distribusi ikan c. Tenaga kerja d. Asal dan tujuan distribusi ikan dan e. Jenis dan volume ikan			
8.	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik	1. Struktur organisasi dan uraian tugas 2. Data unit pembudidayaan ikan, antara lain: a. Data umum b. Data budidaya dan produksi c. Data personel d. Data fasilitas e. Gambar tata letak/layout bangunan dan unit pembudidayaan ikan dan f. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan budidaya ikan	10 Hari	1. Menerapkan cara budidaya ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Identitas pemilik/perusahaan b. Teknologi yang digunakan c. Jenis sarana dan prasarana yang digunakan d. Penggunaan tenaga kerja dan e. Perkembangan usaha pembudidayaan ikan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9.	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	1. Sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik untuk kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di laut 2. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan	10 Hari	1. Menerapkan cara penanganan ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh ukuran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menangkap atau mengangkut jenis ikan tertentu	Menteri/ Kepala Badan
10.	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	1. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan 2. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan 3. Data struktur organisasi dan uraian tugas 4. Dokumen yang memuat, antara lain: a. Jenis ikan b. Sarana dan prasarana yang dimiliki c. Teknologi pembenihan yang digunakan dan	10 Hari	1. Menerapkan cara pembenihan ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha pembenihan ikan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Rencana jumlah dan ukuran hasil produksi 5. Data Manajer Pengendali Mutu (MPM)		b. Perkembangan kegiatan usaha			
11.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	1. Struktur organisasi dan uraian tugas, meliputi: a. Bagian produksi dan b. Bagian mutu 2. Gambar tata letak ruangan 3. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Data bahan pakan ikan c. Data produksi d. Data proksimat dan e. Data SOP	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
12.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point*	1. *Manual Hazard Analysis and Critical Control Point* yang telah divalidasi 2. Hasil audit internal 3. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* yang masih berlaku (khusus permohonan	10 Hari	1. Menjaga konsistensi penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD), Sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point,* dan Sistem Ketertelusuran dan 2. Mnyampaikan laporan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penambahan ruang lingkup dan perpanjangan) 4. Nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 5. Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor (khusus permohonan peninjauan ulang peringkat) 6. Laporan hasil pembinaan					
13.	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	1. Gambar *site plan* gudang dan tata letak (layout) ruangan 2. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ikan 3. Formulir data dan persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara distribusi obat ikan yang baik:	10 Hari	1. Menerapkan prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Manajemen mutu 2) Organisasi, manajemen dan personalia 3) Bangunan dan peralatan 4) Operasional 5) Penarikan kembali 6) Transportasi dan 7) Dokumentasi 4. Personil pernah mendapatkan pelatihan cara distribusi obat ikan yang baik atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip cara distribusi obat ikan yang baik 5. Untuk distributor memiliki tenaga professional		b. Perkembangan kegiatan usaha			
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	1. Gambar *site plan* pabrik dan tata letak (layout) ruangan 2. Formulir data dan persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik yang telah diisi meliputi: a. Identitas pemohon b. Persyaratan cara pembuatan obat ikan yang baik: 1) Manajemen mutu	10 Hari	1. Menerapkan prinsip-prinsip cara pembuatan obat ikan yang baik secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit:	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Personalia 3) Bangunan dan fasilitas 4) Peralatan 5) Sanitasi dan higiene 6) Produksi 7) Pengawasan mutu 8) Inspeksi diri (audit internal) dan audit mutu 9) Penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian 10) Dokumentasi dan 11) Kualifikasi dan validasi 3. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu: a. Dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami atau b. Dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik		a. Standar pelaksanaan usaha dan b. Perkembangan kegiatan usaha			

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1. Memenuhi standar kelayakan pengolahan 2. Sertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu 3. Panduan mutu penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Standar Operasi Sanitasi 4. Laporan hasil pembinaan	10 Hari	1. Menerapkan standar kelayakan pengolahan secara konsisten dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat paling sedikit: a. Standar pelaksanaan usaha dan b. Perkembangan kegiatan usaha	4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
16.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	1. Surat pernyataan telah menerapkan prinsip cara pembuatan pakan ikan yang baik 2. Laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi): a. Pakan ikan buatan, meliputi: 1) Ikan konsumsi, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin atau	15 Hari	1. Memiliki sertifikat cara pembuatan pakan ikan yang baik khusus bagi pelaku usaha yang memproduksi pakan ikan di dalam negeri 2. Menjaga konsistensi mutu pakan ikan 3. Menyampaikan laporan paling sedikit meliputi: a. Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diproduksi dan diedarkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Ikan hias, meliputi uji proksimat lengkap, nitrogen non protein, kestabilan pakan dalam air, cemaran mikroba, logam berat, melamin, dan total karotenoid b. Pakan ikan alami, meliputi uji proksimat lengkap, khusus untuk pakan alami fase telur dormant/kista pengujian hanya dilakukan terhadap: 1) Persentase penetasan (*hatching percentage*) 2) Efisiensi penetasan (*hatching efficiency*) dan 3) Jumlah kista (*cysta*) per gram 3. Surat pernyataan pengambilan sampel pakan ikan oleh petugas pengambil contoh 4. Data teknis pakan ikan yang berisi: a. Merek, jenis, kode produksi, peruntukan, dan kandungan nutrien pakan ikan, dan b. Nama bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap, dan imbuhan pakan ikan		b. Jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diedarkan, untuk importir c. Jumlah dan jenis pakan ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan dan d. Harga pakan ikan yang dijual			

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan: a. *Certificate of good manufacturing practice, international organization for standardization* 22000, atau *hazard analysis critical control point* b. Surat keterangan asal atau *certificate of origin* dari instansi yang berwenang di negara asal c. Sertifikat analisa atau *Certificate of Analysis* dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat hasil uji proksimat lengkap, cemaran mikroba, antibiotik, logam berat, dan melamin d. Surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal dan e. Surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir					

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17.	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	1. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan 2. Memiliki sertifikat cara pembuatan obat ikan yang baik khusus bagi produsen obat ikan 3. Dokumen teknis obat ikan yang meliputi: a. Formulir a (komposisi obat ikan) b. Formulir b (cara pembuatan obat ikan) c. Formulir c (pemeriksaan obat ikan) d. Formulir d (pemeriksaaan bahan baku obat ikan) e. Formulir e (pemeriksaan stabilitas) f. Formulir f (daya farmakologi) g. Formulir g (publikasi ilmiah/uji lapang) h. Formulir h (keterangan tentang wadah, bungkus, dan tutup) i. Formulir i (keterangan tentang penandaan) dan j. Formulir j (keterangan lainnya untuk obat ikan yang berasal dari luar negeri) meliputi: 1) Surat keterangan asal (*certificate of origin*)	10 Hari	1. Menyampaikan laporan paling sedikit meliputi: a. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diproduksi dan diedarkan, untuk pembuatan obat ikan di dalam negeri b. Jumlah dan jenis obat ikan yang telah diedarkan, untuk pemasukan obat ikan dari luar negeri dan c. Jumlah dan jenis obat ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan 2. Menjaga konsistensi mutu obat ikan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Surat keterangan sudah diperjualbelikan (*certificate of free sale*) 3) *Certificate of good manufacturing practice* (gmp) 4) Sertifikat bukan produk rekayasa genetika (*certificate non genetically modified organism*), untuk obat ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika dan 5) Surat penunjukan keagenan atau distributor (*letter of appointment*) dari produsen obat ikan di luar negeri kepada importir obat ikan di indonesia 4. Laporan hasil pengujian lapangan, untuk obat ikan yang memerlukan pengujian lapangan dan 5. Memiliki sertifikat keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati, untuk obat ikan yang zat aktifnya atau salah satu zat aktifnya merupakan produk rekayasa genetika/*genetically modified organism* (GMO)					

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
18.	Surat Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	Memenuhi standar Izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut	21 Hari	1. Memenuhi standar izin Biofarmakologi dan Bioteknologi Laut dan 2. Menyampaikan laporan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur
						1. Kawa-san perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, mene-ngah,	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						e. Kawasan lintas provinsi	
19.	Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	Standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi	30 Hari	1. Memenuhi standar Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan di Kawasan Konservasi 2. Menyampaikan laporan	1 tahun	Kawasan Konservasi Daerah	Gubernur
						Kawasan Konservasi Nasional	Menteri/ Kepala Badan
20.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen rencana reklamasi 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	21 Hari	1. Laporan kegiatan reklamasi 2. Menggunakan material hasil pengelolaan sedimentasi di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5 tahun	1. Wilayah perairan ≤ 12 mil selain kewenangan Menteri dan 2. Usaha mikro	Gubernur

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						1. Kawasan perairan >12 mil 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan Strategis Nasio-	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						nal Tertentu d. Kawasan konservasi perairan nasional atau e. Kawasan lintas provinsi	
21.	Surat Izin Wisata Bahari	1. Dokumen rencana usaha wisata 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak/retribusi	14 Hari	Laporan pelaksanaan usaha	10 tahun	1. Wilayah perairan ≤12 mil, diluar kewenangan Menteri dan	Gubernur

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Usaha mikro	
						1. Kawasan perairan >12 mil atau 2. Kawasan perairan ≤12 mil dengan kriteria: a. Usaha kecil, menengah, atau besar b. Kawasan Strategis Nasional c. Kawasan	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Strategis Nasional Tertentu d. Penyertaan Modal Asing e. Kawasan konservasi perairan nasional atau f. Kawasan lintas provinsi	

No	Nomeklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22.	*Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Hasil Pengawasan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Bukti pemenuhan sanksi administratif 2. Dokumen evaluasi hasil reklamasi 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak	30 Hari	Laporan pemenuhan rekomendasi perbaikan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTANIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1.	Pendaftaran Obat Hewan	**A. Pendaftaran Baru** 1. Sertifikat perizinan berusaha importir dan/atau produsen obat hewan 2. Surat hasil persetujuan Penilai Pendaftaran Obat Hewan (PPOH) dan/atau komisi obat hewan (KOH) terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan 3. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/ *genetically modified organism* (GMO) 4. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat	10 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 5. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan. 6. Khusus obat hewan impor: a. Sertifikat keterangan asal (*Certificate of Origin*) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal b. Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak		hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menerbitkan *Certificate of Free Sale* c. Sertifikat GMP (*Certificate of Good Manufacturing Practices*)/sertifikat setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal d. Sertifikat GMO/Non GMO (Certificate of GMO/nonGMO)/ dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal e. Sertifikat registrasi (*Certificate of Registration*) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dipersyaratkan di registrasi di negara asal f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf e oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan g. Surat penunjukan (*Letter of Appointment*) dari principal h. Surat persetujuan kajian lapang obat hewan (Ondesk/*Onsite review*) untuk obat hewan yang didaftarkan untuk pertama kali merupakan obat hewan dengan ruang lingkup sediaan baru dan/atau berasal dari produsen/pabrik yang belum pernah melakukan pemasukan untuk sediaan yang akan didaftarkan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Khusus untuk obat hewan kontrak (*toll manufacturing*): a. Sertifikat CPOHB obat hewan penerima kontrak yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat yang dikontrakkan b. Perjanjian kontrak *toll manufacturing* dengan masa berlaku maksimal 5 tahun. Pemberi kontrak wajib memiliki pabrik bersertifikat CPOHB setelah masa berlaku perjanjian kontrak berakhir 8. Khusus obat hewan lisensi a. Sertifikat perizinan berusaha produsen obat hewan b. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi c. Sertifikat *Good Manufacturing Practices*					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(GMP) produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan d. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan e. Dokumen induk obat hewan (*Drug master file*/DMF) dari pemberi lisensi					
		B. Pendaftaran Ulang 1. Sertifikat nomor pendaftaran obat hewan 2. Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa tidak ada perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produksi, *self life* (umur simpan obat), rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan 3. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 4. Khusus obat hewan produksi dalam negeri : Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan 5. Khusus obat hewan impor: a. Sertifikat keterangan asal (*Certificate of Origin*) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal b. Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang		keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal atau Sertifikat keterangan bebas jual (*Certificate of Free Sale*) yang berasal dari minimal 2 (dua) negara maju, apabila pemerintah negara asal tidak menerbitkan *Certificate of Free Sale* c. Sertifikat GMP (Certificate of Good Manufacturing Practices)/sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal d. Sertifikat GMO/Non GMO (Certificate of GMO/nonGMO)/ dokumen setara untuk produk probiotik, enzim, asam amino		pendaftaran obat hewan per tahun			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten di negara asal e. Sertifikat registrasi (Certificate *of Registration*) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal atau surat pernyataan dari pemerintah negara asal bahwa obat hewan tidak dipersyaratkan di registrasi di negara asal f. Pengesahan untuk dokumen pada huruf a sampai dengan huruf oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Surat penunjukan (*letter of appointment*) dari principal 6. Khusus obat hewan lisensi: a. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi b. Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk hewan yang dilisensikan c. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan					
		C. Persetujuan Perubahan Nomor Pendaftaran Obat Hewan	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, *shelf life*, rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan a. Sertifikat nomor pendaftaran obat hewan b. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan c. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) 2. Perubahan indikasi, dan/atau waktu henti obat a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan b. Surat Hasil Persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan 3. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran		kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang	Hewan yang diajukan		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan b. Surat Hasil Persetujuan terhadap dokumen teknis (*dossier*) obat hewan 4. Perubahan desain label/etiket a. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan. b. Dokumen justifikasi perubahan desain label/etik		sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun			
		D. Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat Hewan 1. Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan 2. Surat Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftaran bahwa	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftaran 2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar	Mengikuti masa berlaku Sertifikat Nomor Pendaftaran Obat Hewan yang diajukan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersedia mengalihkan nomor pendaftaran 3. Surat Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran 4. Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran 5. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk dalam negeri: a. Surat pernyataan dari penerima nomor pendaftaran bahwa obat hewan yang akan diproduksi tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi,		keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/sticker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan 4. Melakukan penarikan kembali (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk kembalian (*return*) sesuai ketentuan 6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan 7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		self life (umur simpan obat), indikasi, dan/atau rute pemberian b. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran c. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran 6. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor: a. Surat Pernyataan dari principal bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran, dan keriasama dialihkan ke		pendaftaran obat hewan per tahun			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran; b. *Letter of appointment* dari principal ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran 7. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor ke produsen dalam negeri: a. Dokumen induk obat hewan (*Drug master file*/DMF) b. Surat pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk obat hewan beserta proses produksinya tidak ada perubahan dan masih sesuai formulasi yang didaftarkan. Apabila teriadi perubahan pada proses pembuatan formulasi,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		komposisi, dan hal pengawasan mutu maka harus didaftarkan sebagai produk baru c. Surat pernyataan dari principal/produsen bahwa sudah tidak bekerjasama dengan perusahaan pemilik nomor pendaftaran dan proses produksi obat hewan dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran d. Surat perjanjian pengalihan produksi obat hewan antara principal/produsen dengan penerima nomor pendaftaran e. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima pengalihan nomor pendaftaran					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Sertifikat hasil pengujian mutu dari BBPMSOH yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran					
		E. Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan 1. Sertifikat perizinan berusaha Produsen obat hewan 2. Surat pernyataan pendaftaran yang menyatakan antara lain: a. Obat hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulangan penyakit yang menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai	15 Hari	1. Menjamin obat hewan yang digunakan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu obat hewan 2. Melaporkan realisasi produksi, distribusi dan penggunaan obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat 3. Melaporkan hasil monitoring efek samping obat hewan (MESOH) selama persetujuan penggunaan darurat	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bertanggungjawab terhadap mutu obat hewan c. melakukan uji lapang untuk memastikan efektifitas dan keamanan d. Melakukan monitoring efek samping obat hewan (MESOH) e. Melaporkan realisasi produksi dan distribusi obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat, serta laporan hasil MESOH kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Proposal uji lapang 4. Surat hasil persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen teknis (dossier) obat hewan 5. Sertifikasi keamanan lingkungan dari Komisi Hayati Produk Rekayasa					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetic/genetically modified organism (GMO) 6. Sertifikasi CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan					
2.	Pendaftaran Pakan	**A. Pakan Dalam Negeri** 1. Usaha Besar a. Sertifikat lulus pengujian b. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe A c. Contoh label d. Jenis Bahan Pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan 2. Usaha Menengah a. Sertifikat lulus pengujian	8 Hari	1. Melaporkan produksi pakan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Tidak menggunakan hormon sintetik pada pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe B c. Contoh label d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. 3. Usaha Kecil a. Sertifikat lulus pengujian b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe C c. Contoh label d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. 4. Usaha Mikro a. Sertifikat lulus pengujian					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Tipe D c. Contoh label d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase e. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. **B. Pendaftaran Pakan Kontrak (*Toll Manufacturing*)** 1. Sertifikat lulus pengujian 2. Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (*Type A*) untuk non UMKM dan minimal *Type* B untuk UMKM 3. Perjanjian kontrak 4. Contoh label 5. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 6. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		C. Pakan Impor 1. *Certificate of Analysis* (CoA) dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal 2. *Certificate Good Manufacturing Practices* (GMP) dari Negara Asal 3. Contoh label 4. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase 5. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan					
3.	Registrasi Produk Hewan	**Persyaratan Administrasi** Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri 1. Profil perusahaan 2. Alur proses 3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22OOOIBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha	7 Hari	1. Mencantumkan nomor registrasi Produk Hewan pada label dan kemasan 2. Pencantuman nomor Registrasi pada label dan kemasan harus mudah dibaca dan menggunakan bahan yang tidak mudah lepas, tidak mudah	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) 5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan) 6. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar 7. Surat perjanjian kerja sama jika produk diproduksi oleh pihak lain (*toll manufacturing*) Produk hewan yang diproduksi di luar negeri: 1. Profil perusahaan pengimpor 2. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22OOOIBRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha 3. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika		luntur, serta tidak mudah rusak 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Gubernur atau Bupati/walikota melalui Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk Produk Hewan yang berasal dari produksi dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tidak memiliki harus membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan) 4. Surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan 5. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia: 1. Profil perusahaan 2. Alur proses produksi 3. Sertifikat sistem manajemen keamanan produk hewan seperti HACCP/ISO 22000/BRC atau yang sejenis yang dimiliki oleh unit usaha 4. Sertifikat kompartemen (untuk unit usaha peternakan) atau 5. Dokumen Informasi sistem ketertelusuran produk (jika tidak memiliki harus		Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan). 5. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk Produk Hewan yang dimasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia secara berkala setiap 6 (enam bulan). Laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya sebagaimana dimaksud pada angka 3,4 dan 5 terdiri atas: 1. jumlah produksi atau diimpor per jenis produk			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		membuat surat komitmen pemenuhan persyaratan) 7. Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar. **Persyaratan Teknis** Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan teknis untuk: a. Produk hewan yang diproduksi di dalam negeri: 1) Berasal dari unit usaha yang memiliki NKV sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk Hewan yang dibuktikan dengan sertifikat hasil uji yang diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian 3) Memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan		2. jumlah dan peredaran 3. informasi penarikan produk dan 4. hasil uji fisik, biologi dan kimia dari laboratorium terakreditasi			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peraturan perundang-undangan 4) Rancangan label pada kemasan produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan 5) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan. b. Produk hewan yang dimasukkan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia: 1) Berasal dari Negara dan Unit Usaha yang sudah disetujui pemasukannya 2) Memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan dari negara asal yang dibuktikan dengan dokumen: a. Sertifikat kesehatan Produk Hewan (*Certificate of Health*)					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Fotokopi sertifikat asal Produk Hewan (*Certificate of Origin*) c. Fotokopi sertifikat analisis (*Certificate of Analysis*), dan d. Fotokopi sertifikat halal (*Certifiicate of Halal*) bagi yang dipersyaratkan. 3) Rancangan label pada kemasan Produk Hewan yang memuat paling sedikit nomor Registrasi dan 4) Contoh jenis dan kemasan Produk Hewan. c. Produk hewan yang dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis negara tujuan.					
4.	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	**Persyaratan Calon Varietas** 1. Memiliki deskripsi varietas	28 Hari	1. Kesanggupan untuk melaksanakan	Selamanya apabila tanda	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura 2. Belum pernah didaftarkan untuk peredaran 3. memiliki keunggulan tertentu sebagaimana diakui oleh pemulia atau pemilik calon varietas/kuasanya 4. Nama varietas mengikuti penamaan peraturan perundangan perlindungan varietas tanaman **Persyaratan Permohonan Pendaftaran Varietas** 1. Memiliki/menguasai calon varietas 2. Hasil Uji Keunggulan calon varietas 3. Hasil Uji Kebenaran calon varietas 4. Deskripsi varietas 5. Foto penciri utama calon varietas 6. Surat Izin Pemasukan (SIP)		perbanyakan benih yang memenuhi PTM 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi 3. Memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli 4. Menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya	daftar varietas tidak dicabut		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk varietas introduksi 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi PTM 8. Surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi 9. Surat pertanyaan kesanggupan memelihara arsip benih/tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli 10. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas dimaksud dicabut tanda daftarnya 11. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri					
5.	Pendaftaran Pestisida	**A. Pendaftaran Pestisida (Percobaan)** Persyaratan Umum: 1. Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi 2. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran 3. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek 4. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok (*letter of authorization*) bagi yang memproduksi sendiri dengan melampirkan: a. Data iritasi mata dan kulit dan sensitisasi pada kulit formulasi pestisida b. Data toksisitas akut oral dermal formulasi pestisida	30 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan)	1 tahun (dapat diperpanjang)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri (*Letter of Access*) 6. Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis (*manufacturing license*) 7. Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida Persyaratan Teknis: 1. Sertifikat analisis (*certificate of analysis/CoA*) dari laboratorium uji mutu 2. Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida dan 3. Sertifikat komposisi formulasi (*certificate of composition/ CoC*) dari pembuat formulasi. 4. Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan.					
		B. Pendaftaran Pestisida (Tetap) **Pendaftaran Baru** 1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida. 2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan aktraktan. 3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan antraktan 4. Laporan hasil uji toksisitas	90 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis dan administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan)	5 tahun (dapat didaftar ulang)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida 5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi 6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran dan 7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		feromon, atraktan, dan rodentisida. 8. Hasil pengujian residu dipersyaratkan terhadap 12 (dua belas) komoditas sayuran dan buah **Pendaftaran Ulang** 1. Laporan Hasil Uji Mutu 2. Laporan Hasil uji efikasi terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar ≥ 10 tahun **Pendaftaran Bahan Teknis Pestisida** 1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis 2. Laporan Hasil Uji Mutu **Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor** 1. Surat jaminan suplai Bahan Teknis dari pemasok Bahan Teknis					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Laporan Hasil Uji Mutu **Pendaftaran Pestisida (Perubahan Nama Formulasi)** 1. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang 2. Dokumen nomor pendaftaran Pestisida 3. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk Dagang dari HKI MENKUM **Pendaftaran pestisida (Perubahan dosis/konsentrasi)** 1. Telah memiliki nomor pendaftaran izin tetap yang masih berlaku 2. Melampirkan laporan Hasil Uji Efikasi **Pendaftaran Pestisida (Perluasan Penggunaan)** 1. Dokumen Nomor Pendaftaran Pestisida 2. Dokumen Laporan Uji Efikasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pendaftaran Pestisida (Peralihan Pemegang Nomor Pendaftaran) 1. Dokumen Surat Perjanjian serah terima 2. Dokumen nomor pendaftaran pestisida 3. Dokumen NIB Pemilik Baru Pestisida Dokumen surat penunjukan/jaminan suplai bahan aktif ke pemilik baru					
		C. Pendaftaran Pestisida (Sementara) 1. Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal (*outbreaks*) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud 2. Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal	90 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftaran teknis dan administrasi) dan 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Paling lama 1 (satu) tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(*outbreaks*) diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis 3. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (*outbreaks*) 4. Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (*outbreak*) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun 5. Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan/atau					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kesehatan di wilayah yang terserang *outbreaks*.					
6.	Pendaftaran Pupuk An-Organik	**A. Pendaftaran Baru** Persyaratan Umum 1. Mengisi formulir pendaftaran 2. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 3. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 4. Memiliki bukti pembayaran PNBP 5. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk	10 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis dan syarat pendaftran administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Pendaftaran Ulang Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Sertifikat/Bukti Pendaftaran Merek Dagang dari HKI MENKUMHAM. 4. Sertifikat SPPT SNI bagi pupuk yang wajib SNI 5. Surat Pengantar Pembayaran PNBP dan Bukti Pembayaran PNBP 6. Konsep desain label kemasan. 7. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis 1. Pendaftaran Ulang 5 tahun: Dokumen Hasil Uji Mutu 2. Pendaftaran ulang 10 tahun: a. Dokumen hasil uji mutu dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen hasil uji efektifitas **C. Perubahan Warna Formula** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk Persyaratan Teknis Dokumen Hasil Uji Mutu **D. Perubahan Produsen/Asal Formula** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persyaratan Teknis 1. Dokumen Hasil Uji Mutu 2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk **E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk **F. Perubahan Merek Dagang** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang 4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		G. Pengalihan Nomor Pendaftaran 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan					
7.	Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah	**A. Pendaftaran Baru** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Mengisi formulir pendaftaran 3. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk 4. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 5. Memiliki bukti pembayaran PNBP	5 Hari	1. Memenuhi syarat pendaftaran (telah memenuhi syarat pendaftran teknis dan syarat pendaftran administrasi) 2. Menyampaikan laporan hasil produksi per 6 (enam) bulan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Surat Penunjukkan dari produsen luar negeri Persyaratan Teknis 1. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM) 2. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk **B. Pendaftaran Ulang** Persyaratan Umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Mengisi formulir pendaftaran 3. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha perdagangan (TDUP) pupuk 4. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek 6. Memiliki bukti pembayaran PNBP Persyaratan Teknis Memiliki sertifikat hasil uji mutu **C. Perubahan Warna Formula** Persyaratan umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk Persyaratan Teknis: Dokumen Hasil Uji Mutu **D. Perubahan Produsen/Asal Formula** Persyaratan umum 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Surat Kerjasama atau penunjukkan sebagai distributor dari produsen baru Persyaratan Teknis 1. Dokumen Hasil Uji Mutu 2. Dokumen laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk **E. Perubahan/Penambahan Bahan Kemasan** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk **F. Perubahan Merek Dagang** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen Surat Pernyataan Merk Dagang 4. Dokumen Bukti Pendaftaran Merk/Sertifikat Merk dari HKI MENKUMHAM **G. Pengalihan Nomor Pendaftaran** 1. Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha dan KBLI yang sudah ditetapkan 2. Dokumen Nomor Pendaftaran Pupuk 3. Dokumen Akta Notaris Perjanjian Pengalihan 4. Dokumen NIB Perusahaan Penerima Pengalihan					
8.	Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	Untuk Perusahaan Kelapa Sawit 1. Surat permohonan SP3BKS 2. IUP (dapat ditambahkan dengan HGU) 3. Surat pernyataan untuk kebutuhan sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada pihak lain.	8 Hari	1. Melaporkan realisasi SP2BKS secara berkala 2. Menyertakan sertifikat benih bila benih akan beredar ke kebun plasma atau dijual ke masyarakat	12 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Rencana penanaman kebun. 5. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan). Untuk Produsen Pembesaran 1. Surat permohonan SP3BKS 2. Izin Usaha Produksi Benih / Sertifikat Standar 3. Dokumen legalitas lahan kebun pembenihan 4. Surat Kerjasama dengan pemilik varietas dan/atau produsen benih yang memproduksi benih dalam bentuk kecambah kelapa sawit. 5. Rencana Pembesaran Benih 6. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) Untuk Pekebun (Perorangan / Kelompok Tani)					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Surat permohonan SP3BKS 2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber 3. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar 4. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan) Untuk Penelitian / Riset 1. Surat permohonan SP3BKS 2. Proposal penelitian/riset (bagi permohonan baru) atau laporan perkembangan penelitian (bagi permohonan yang sudah pernah) 3. Rekomendasi pembangunan kebun induk kelapa sawit dari Direktur Jenderal Perkebunan (jika akan membangun kebun induk) 4. Izin Usaha Perkebunan 5. Hak Guna Usaha 6. Surat pernyataan tentang penggunaan benih kelapa					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sawit untuk kebutuhan sendiri 7. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi perusahaan perkebunan yang baru mengajukan) Untuk Pengecambahan di *Seed Processing Unit* 1. Surat permohonan SP3BKS 2. Surat Keputusan Penetapan Kebun Benih Sumber 5. Izin Usaha Produksi Benih/Sertifikat Standar 3. Laporan realisasi SP2BKS sebelumnya (dikecualikan bagi produsen benih yang baru mengajukan)					
II.	**STANDARDISASI PRODUK DAN JASA (C)**						
9.	Sertifikasi Cara Pembibitan Ternak Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan	14 Hari	1. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha	3 tahun	Lokasi di kabupaten/ kota	Bupati/Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi		pembibitan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 2. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 3. Menyampaikan surat Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik secara berkelanjutan. 4. Bersedia dilakukan *surveilance* paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.		Lokasi di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur
						Untuk tujuan ekspor	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen jaminan mutu/SOP Pernyataan diri (*self-declare*) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik					
10.	Sertifikasi Cara Budi Daya Ternak Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan	14 Hari	1. Menerapkan Cara Budidaya Ternak yang Baik kepada instansi yang berwenang 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha budi daya kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya 3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara budi daya ternak yang baik secara berkelanjutan.	3 tahun	Lokasi di kabupaten/kota	Bupati/Walikota
						Lokasi di lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	Gubernur
						Untuk tujuan ekspor	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu/ SOP dan 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik		5. Bersedia dilakukan *surveilance* paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.			
11.	Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik	1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri	14 Hari	1. Menerapkan cara penetasan yang baik 2. Melaporkan kegiatan usaha dan pengembangan kegiatan usaha penetasan kepada pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya	3 tahun	Usaha berlokasi di Kabupaten/ Kota	Bupati/Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota. 2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu/ SOP dan		3. Menindaklanjuti ketidaksesuaian penilaian Tim Audit. 4. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan cara penetasan yang baik secara berkelanjutan. 5. Bersedia dilakukan *surveilance* paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik					
12.	Sertifikasi Benih Tanaman Pakan Ternak	**A. Sertifikasi benih varietas lokal** 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Formulir karekteristik morfologi	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
		B. Sertifikasi Benih Bina 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Surat izin produksi benih bina dari bupati/wali kota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD 3. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan sesuai dengan prosedur sertifikasi.	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih benih yang diproduksi.	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		C. Peredaran benih tanaman pakan ternak 1. Surat permohonan sertifikasi 2. Sertifikat pelepasan benih tanaman pakan ternak 3. Label untuk benih bina dan benih varietas lokal yang akan diedarkan	14 Hari	1. Menjamin mutu benih bina yang diproduksi 2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi 3. Membuat laporan data benih yang diproduksi	Selama masih melakukan produksi benih	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
13.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB)	1. Persyaratan Umum a. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan yang dimiliki merupakan fasilitas yang khusus diperuntukan untuk proses pembuatan yang terpisah dari fasilitas umum lainnya (seperti perumahan, perkantoran, dll) b. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan jenis sediaan farmasetik (antibiotik betalaktam dan hormon) harus terpisah secara	30 Hari	1. Menjamin pembuatan obat hewan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar pembuatan obat hewan yang telah ditetapkan 2. Menyampaikan laporan hasil inspeksi/audit internal/*self assessment*/eksternal CPOHB maksimal setiap 2 tahun sekali 3. Menyampaikan pemberitahuan/laporan apabila terjadi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		fisik dengan bangunan fasilitas produksi obat hewan jenis sediaan lainnya c. Fasilitas pembuatan/produksi obat hewan harus memiliki sarana pengolahan limbah terpadu atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengolahan limbah (padat, semi padat, dan cair) yang dihasilkan oleh fasilitas produksi obat hewan 2. Permohonan baru a. Dokumen rencana pembuatan obat hewan (*master design*) dan daftar obat hewan yang akan dibuat b. Dokumen Denah bangunan (layout)		perubahan (administrasi dan teknis) atas fasilitas produksi obat hewan 4. Melakukan penarikan (*recall*) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan; dan 5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian (return) sesuai ketentuan 6. Menyampaikan laporan apabila terjadi/timbulnya efek samping obat hewan.			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pabrik yang dilengkapi dengan sarana penunjang kritis seperti sistem tata udara dan tata pengolahan air yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik c. Dokumen induk cara pembuatan obat hewan yang baik (*site master file*/SMF) atau dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan obat hewan d. Dokumen panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan pencatatan mutu e. Surat hasil penilaian dokumen CPOHB f. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi CPOHB					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Surat hasil *corrective action and preventive action dan* (CAPA) atau perbaikan dokumen temuan hasil inspeksi CPOHB 3. Permohonan ulang a. Dokumen daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhir b. Daftar berita acara penilaian (BAP) inspeksi internal/*self assessment*/inpeksi eksternal yang dilaksanakan setiap tahun c. Surat hasil *corrective action* and *preventive action* dan (CAPA) daftar temuan atau penyimpangan sejak inspeksi terakhir					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Salinan sertifikat CPOHB yang telah diterbitkan sebelumnya 4. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOHB) meliputi: a. Pembuatan produk farmasi untuk hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premiks) b. Pembuatan bahan farmasi untuk hewan c. Pembuatan Kosmetik untuk hewan d. Pembuatan bahan baku obat alami/tradisional untuk hewan e. Pembuatan Obat alami/Tradisional untuk Hewan					
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)	1. Persyaratan Umum: a. surat permohonan penilaian CPPB b. profil pelaku usaha 2. Persyaratan Teknis:	67 Hari	1. Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian Tim Audit 2. Menerapkan cara pembuatan pakan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. foto udara lokasi/denah lengkap dengan batas-batasannya b. alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi c. layout bangunan sesuai alur produksi d. struktur organisasi dan *job description* yang jelas khususnya yang menangani produksi dan penjamin mutu pakan e. sistem jaminan mutu yang terdokumentasi		yang baik dalam proses produksi.			
15.	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	1. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan	14 Hari	1. Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan 2. Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Gubernur (Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi)

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Form data Umum dan Khusus unit usaha 2. Persyaratan teknis meliputi: a. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi b. Prosedur tertulis penerapan *hygiene* sanitasi c. Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan					
III.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
16.	Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	1. Rekomendasi pelepasan varietas oleh Ketua Tim Penilai Varietas 2. Laporan akhir pelaksanaan pengujian dalam bentuk ringkasan proposal (*executive summary*) 3. Surat keterangan persetujuan nama varietas dari Kepala Pusat PVTPP 4. Matrik keunggulan varietas terhadap pembanding 5. Surat izin dari pemilik varietas untuk varietas introduksi. 6. Deskripsi tetua untuk varietas hibrida	16 Hari	1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (*Breeder Seed*) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut 4. Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanda daftar dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) untuk varietas lokal. 8. Surat jaminan produksi benih hibirida dari pengusul untuk calon varietas hibrida introduksi 9. Analisis ekonomi dari calon varietas yang diusulkan. 10. Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun ke depan. 11. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik varietas yang menyatakan bahwa produksi benih hibrida (F1) untuk tanaman perkebunan akan dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun untuk tanaman semusim dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) tahun untuk tanaman tahunan sejak pelepasan		pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan 6. Bila benih tetua merupakan benih introduksi maka berkewajiban membangun benih sumber dengan materi tetua jantan dan betina dalam rangka memproduksi benih di Indonesia			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		12. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.					
17.	Pelepasan varietas tanaman pakan ternak	1. Ringkasan laporan hasil akhir pelaksanaan pengujian 2. Surat keterangan persetujuan nama Varietas oleh Pusat PVTPP 3. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut 4. Rencanapengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan 5. Rekomendasi Tim Penilai Varietas 6. Deskripsi varietas 7. Foto morfologi varietas	7 Hari	1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (*breeder seed*) 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi 3. Melaporkan pengembangan produksi benih tiap 6 (bulan). Laporan mencakup: a. jenis b. bentuk c. jumlah d. area distribusi/ pengembangan benih	Selama pemilik varietas masih memenuhi kewajiban	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	Pelepasan Varietas Tanaman Pangan	1. Rekomendasi pelepasan dari Ketua Tim Penilai Varietas 2. Deskripsi varietas (untuk Hibrida termasuk Tetua Betina dan Tetua Jantan) 3. Ringkasan Laporan Hasil Pengujian 4. Matriks Keunggulan 5. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*Breeder Seed*/BS) atau tetuanya tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut sebagai varietas unggul nasional 6. Surat pernyataan rencana pengembangan produksi benih selama 5 (lima) tahun kedepan. 7. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila SK Pelepasannya dicabut.	6 Hari	1. Memenuhi kewajiban sebagai pemilik varietas tanaman pangan 2. Laporan perkembangan sebaran varietas secara periodik dilaporkan kepada Dirjen Tanaman Pangan	Selamanya sepanjang tidak dilakukan penarikan varietas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Apabila Varietas Introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas 9. Apabila varietas lokal harus melampirkan tanda daftar 10. Apabila varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilengkapi dengan surat jaminan produksi benih dari pengusul 11. Proposal pelepasan varietas					

D. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1.	Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	1. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/Perusahaan perseorangan atau ketua Koperasi yang memuat informasi: a. Jenis komoditas tergali b. Jumlah tonase Mineral/Batubara tergali c. kualitas Mineral atau Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah	14 Hari	1. Melakukan penjualan komoditas mineral atau batubara tergali sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Izin 2. Membayar penerimaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas mineral atau batubara tergali yang akan dijual 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan	Sesuai periode penjualan komoditas mineral atau batubara dan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam Izin	Komoditas Mineral Logam dan Batubara	Menteri/ Kepala Badan
						Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium) 2. Menghasilkan Mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat mineral atau batubara tergali 4. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam		termasuk menggunakan sistem informasi penjualan komoditas mineral atau batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial 5. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*Beneficial Ownership*) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dari Badan Usaha					
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
2.	Persetujuan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Proyek PLTP	1. Surat penyampaian dokumen studi kelayakan 2. Dokumen studi kelayakan 3. Izin lingkungan	30 Hari	1. Melaksanakan program kerja eksploitasi dan produksi/pemanfaan sesuai dokumen FS	Selama Izin Panas Bumi berlaku dalam hal tidak terjadi perubahan kapasitas dan/atau teknologi pembangkitan tenaga listrik	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Menyampaikan laporan jangka panjang eksploitasi 3. Menyampaikan laporan berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) serta Laporan RKAB 4. Memenuhi semua kewajiban lainnya untuk tahap eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) UU 21/2014 dan Pasal 89 PP 7/2017	pada jangka waktu eksploitasi		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum : 1. Surat permohonan dari Kepala Teknik pada Kontraktor, Kepala Teknik pada Pemegang Izin Usaha atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi 2. Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi) B. Persyaratan Khusus :	10 Hari	1. Pemegang Izin Usaha, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung untuk Kepentingan Sendiri, atau Badan Usaha Penunjang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan instalasi 2. Setiap perubahan instalasi wajib dilaporkan kepada	Paling lama 4 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Laporan hasil Inspeksi Teknis Instalasi 2. Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi 3. Tindak lanjut Berita Acara Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi, apabila ada 4. Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi 5. Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru atau Instalasi Eksisting yang		Kepala Inspeksi Migas serta dapat dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi 3. Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat- lambat-nya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengalami perubahan/modifikasi) 6. Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting) 7. Hasil Analisis Risiko, apabila disyaratkan 8. Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan dan instalasi yang telah melewati batas umur layan desain)					
4.	*Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Kajian teknis dengan ketentuan dokumen (berba-hasa Indonesia) berisi: 1. analisis kebutuhan tenaga listrik 2. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)	14 Hari	1. Memenuhi persyaratan dasar sesuai kebutuhan usaha 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib	10 tahun	1. Memiliki fasilitas instalasi lintas provinsi 2. Berada di wilayah di atas 12 mil laut	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	3. diagram satu garis 4. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik 5. jadwal pembangunan dan 6. jadwal pengoperasian		memiliki Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) Tahun sekali		3. Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW 4. Dibiayai baik sebagian atau keseluruhan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Instalasi tenaga listrik berlokasi pada usaha minyak dan gas bumi	
						1. Memiliki fasilitas instalasi dalam daerah provinsi	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Berada di wilayah sampai dengan 12 mil laut dan/atau pembangkitan dengan kapasitas sampai dengan 10 MW	
5.	Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya (misalnya pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha untuk pemandian alam dan akan mengusahakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam pemandian	10 Hari	1. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5 tahun	1. Lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung 2. Kawasan hutan konservasi	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		alam maka pelaku usaha hanya memenuhi standar pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung) 2. Persyaratan administratif: a. Nomor Induk Berusaha/Perizinan Berusaha Sektor b. peta situasi lokasi pengambilan energi panas bumi dan c. salinan bukti/sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi dari pelaku usaha		dan memenuhi standar yang berlaku 2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup 3. Memenuhi standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung		3. Kawasan konservasi di perairan 4. Wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia	
						1. Lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.	
						1. Wilayah kabupaten/ kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung 2. Wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						kewenangan provinsi.	
6.	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	1. Nomor Identitas SPKLU Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. skema SPKLU b. nama badan usaha c. fasilitas penukaran baterai d. alamat SPKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota) 2. Nomor Identitas SPBKLU	14 Hari	1. Memenuhi komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha (misal kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan, persetujuan bangunan gedung, SLF, AMDAL, UKL/UPL, dsb) 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memenuhi ketentuan sertifikasi laik operasi	Selama pelaku usaha menjalan-kan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Badan usaha pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. skema SPBKLU b. fasilitas pengecekan ulang baterai 3. alamat SPBKLU (jalan, provinsi, kabupaten / kota)		3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan 5. Badan Usaha Pengoperasian SPKLU dan SPBKLU harus memiliki Perizinan Berusaha Penunjang Tenaga Listrik 4. Dalam hal terdapat perubahan data skema dan lokasi SPKLU / SPBKLU,			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Badan Usaha wajib melaporkan perubahan data kepada Direktorat Jenderal			
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
7.	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	1. Surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) 3. Berita acara HPS 4. Berita acara kesepakatan/negosiasi	14 Hari	Menindaklanjuti dengan Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (*Power Exchange Agreement*)	Masa berlaku sesuai dengan masa berlaku IUPTL paling lama 5 (lima) tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Informasi perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP komisaris utama dan direktur utama) 6. Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik					
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
8	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	A. Persyaratan Umum: a. Surat pernyataan di atas materai mengenai: 1. Kesanggupan Kontraktor memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Kesanggupan Kontraktor memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	12 Hari	1. Kepala Teknik bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan keamanan gudang bahan peledak dan bahan peledak yang disimpan 2. Kepala Teknik wajib menaati segala peraturan umum	1. Gudang Permanen Bahan Peledak: 5 tahun 2. Gudang Sementara Bahan Peledak: paling lama 1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Kesediaan dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung B. Persyaratan Teknis: a. Persyaratan Gudang Permanen dan Sementara		penyimpanan, pengeluaran, pengangkutan, dan pemakaian bahan peledak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia 3. Kepala Teknik menunjuk tim pengelola bahan peledak yang dilengkapi personel yang memiliki sertifikat kualifikasi pengelola bahan peledak dan/ atau			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi: 1. Gambar konstruksi Gudang Bahan Peledak 2. *Layout* Gudang Bahan Peledak 3. Peta Situasi yang menggambarkan posisi dan jarak gudang dengan sarana dan fasilitas di sekitarnya 4. Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda untuk Gudang Permanen dan Gudang sementara di darat Untuk Kontainer penyimpanan bahan peledak sementara di atas perairan tidak		juru tembak yang memiliki surat persetujuan juru tembak bahan peledak dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 4. Kepala Teknik menyampaikan pelaporan pengelolaan bahan peledak kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memerlukan rekomendasi Polda) 5. Struktur Organisasi Tim Pengelola Bahan Peledak 6. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Bahan Peledak 7. Berita Acara Inspeksi Lapangan/Verifikasi Dokumen Teknis oleh Inspektur Migas 8. Untuk gudang sementara pemakaian bersama atau sewa dilengkapi dengan perjanjian kerja sama atau sewa antara pemilik gudang dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemakai gudang (Kontraktor), dengan menyebutkan nama lokasi (*onshore*) atau instalasi (*offshore*) termasuk masa berlaku perjanjian b. Memenuhi ketentuan dalam Standar Nasional Indonesia tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau Standar lain yang diacu					
9	Persetujuan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi	1. Salinan pengesahan pengangkatan kepala teknik panas bumi 2. Gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1:100	7 Hari	Menyampaikan laporan triwulanan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak	1. Izin gudang bahan peledak sementara: 2 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1:5000 4. Rekomendasi penggunaan gudang bahan peledak dari kepolisian			2. Izin gudang bahan peledak tetap: 5 tahun		
10	Persetujuan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	1. Persyaratan administratif berupa surat persetujuan prinsip pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka dari Menteri ESDM 2. Persyaratan teknis: a. Surat persetujuan terminasi b. Kontrak Kerja Sama c. Surat rekomendasi SKK Migas yang disampaikan setelah diterbitkannya surat persetujuan prinsip yang paling sedikit meliputi:	3 bulan	1. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Sisa Komitmen Pasti 2. Melaporkan hasil kegiatan pengalihan sisa Komitmen Pasti ke wilayah terbuka setiap 6 bulan sekali termasuk laporan keuangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 3. Kewajiban menyerahkan data hasil kegiatan	Paling lama 3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Surat pernyataan dari Kontraktor untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan 2) Peta, koordinat dan luas wilayah yang diusulkan dan 3) Rencana kerja, tata waktu pelaksanaan kegiatan dan nilai anggaran d. Surat penarikan piutang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, apabila piutang telah diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang		eksplorasi kepada Pemerintah			
11	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP)	1. Surat pernyataan kewajiban perusahaan	4 Hari	1. Mengikuti ketentuan peraturan	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Surat sewa/kepemilikan peralatan 3. Surat pernyataan tenaga ahli 4. *Company Profile* 5. Salinan surat izin sesuai dengan sub bidang usaha yang diajukan 6. Laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen		perundang-undangan yang berlaku 2. Semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri 3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Direktorat Panas Bumi			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi			
12	Izin Pengusahaan Air Tanah (*berlaku untuk seluruh KBLI)	**Permohonan Baru** 1. Formulir permohonan; dan 2. Dokumen teknis rencana penggunaan Air Tanah pada Sungai Bawah Tanah yang tidak memerlukan konstruksi pengeboran/ penggalian eksplorasi air tanah atau laporan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah dengan disertai dokumen pendukung	30 Hari	1. Memenuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Air Tanah; 2. Memasang meter air; 3. Membangun sumur imbuhan atau sumur resapan; 4. Membangun sumur pantau untuk kriteria tertentu; 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi air tanah;	1. Sesuai zona konservasi air tanah : a. Izin Pengusahaan Air Tanah baru (zona perlindungan air tanah di daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun, zona aman paling lama 7 tahun, zona rawan paling	1. Setiap KBLI dengan skala usaha kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perpanjangan 1. Formulir permohonan; 2. Dokumen Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan diperpanjang; 3. dokumen perizinan berusaha yang memuat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia milik Pelaku Usaha sesuai dengan kegiatan pengajuan penggunaan air tanah; 4. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tanah lokasi sumur bor/gali air tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; 5. surat keterangan telah membuat sumur imbuhan		6. Mencegah kerusakan lingkungan; 7. Tidak menggangu sumber air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar; 8. Menyampaikan laporan teknis untuk debit tertentu; 9. memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan air untuk masyarakat sekitar;	lama 5 tahun, dan zona kritis paling lama 4 tahun) atau b. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah: 1) zona perlindungan air tanah pada daerah imbuhan air tanah paling lama 3 tahun	sungai strategis nasional 2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusahaan	

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau sumur resapan disertai foto *geotagging* sumur imbuhan atau sumur resapan yang telah dibangun; 6. surat keterangan telah membuat sumur pantau disertai foto geotagging sumur pantau yang telah dibangun, dalam hal dipersyaratkan; 7. rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir; 8. bukti setor pajak air tanah dan/atau kewajiban keuangan lainnya dalam 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan		10. melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah; 11. memberikan akses kepada aparatur sipil negara yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali air tanah;	2) zona aman paling lama 7 tahun, 3) zona rawan paling lama 5 tahun 4) zona kritis paling lama 4 tahun, 5) zona rusak paling lama 3 tahun 2. Izin Pengusahaan Air Tanah hasil penataan diberikan un-	Air Tanah; dan/atau b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah	
						1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peraturan perundang-undangan; 9. dokumentasi sumur bor/gali air tanah, sarana dan prasarana penggunaan air tanah lainnya yang terbangun saat ini dalam kompilasi foto geotagging; dan 10. untuk debit pengambilan air tanah lebih dari 10 m3/hari (sepuluh meter kubik per hari), dilengkapi dengan: a. laporan teknis 1 (satu) tahun terakhir; b. gambar log bor dan gambar konstruksi sumur bor/gali air tanah; dan		12. menyediakan lahan untuk pembangunan sumur pantau yang akan dibangun oleh pemerintah, dengan ketentuan penyediaan lahan tidak menghilangkan kewajiban membangun sumur pantau bagi pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah;	tuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, kecuali untuk penggunaan Air Tanah pada zona rusak tidak diberikan perpanjangan	tanah lainnya di wilayah sungai lintas kabupa-ten/kota dan skala usaha mikro yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional	

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. dokumen data dan analisis uji pemompaan. **Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin pengusahaan air tanah (Penataan)** 1. Formulir permohonan dengan disertai dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. Surat pernyataan bermeterai yang memuat: a. Telah melaksanakan konstruksi berupa sumur bor/gali Air		13. memberikan ganti rugi kepada masyarakat sekitar apabila kegiatan pengusahaan air tanah yang dilakukan menimbulkan kerugian; 14. melaporkan apabila ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan; dan 15. membayar pajak air tanah dan kewajiban keuangan lainnya.		2. Keterlanjuran konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah dan/atau penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah (Penataan) dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah; dan/atau	

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah dan/atau menggunakan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah atau yang telah habis masa berlaku izinnya; b. Jangka waktu penggunaan Air Tanah tanpa Izin Pengusahaan Air Tanah; c. Lokasi yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa; d. Bersedia membayar denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Bersedia mengikuti ketentuan Peraturan				b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusa-haan Air Tanah	
						1. Setiap KBLI dengan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar yang menggunakan air tanah yang terletak pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai dalam	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menteri ini dengan disertai dokumen pendukung.				satu kabupaten/ kota 2. Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah dimohonkan untuk: a. konstruksi berupa sumur bor/gali air tanah tanpa Izin Pengusaha-an Air Tanah; atau b. penggunaan air tanah tanpa Izin Pengusaha-	

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Verifikasi	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						an Air Tanah atau yang telah habis masa berlakunya.	

E. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	PEREDARAN PRODUK (A)						
1	• *Ekspor Zat Radioaktif • *Impor Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 5. Dokumen sistem manajemen 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor dan ekspor zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan zat radioaktif kepada BAPETEN secara	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi impor dan ekspor zat radioaktif kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
2	• *Impor Pembangkit Radiasi Pengion • *Ekspor Pembangkit Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion 3. Dokumen sistem manajemen	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor dan ekspor pembangkit radiasi pengion sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan ekspor kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
3	*Impor dan/atau Pengalihan Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melakukan kegiatan impor dan/atau pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dokumen persyaratan PB UMKU 3. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 4. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 5. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 6. Menyampaikan rekapitulasi realisasi impor dan pengalihan kepada BAPETEN secara berkala setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
4	*Ekspor Barang Konsumen yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi	1. Melakukan kegiatan ekspor barang konsumen yang	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mengandung Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	persyaratan dan melakukan pembayaran	mengandung zat radioaktif sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dokumen persyaratan PB UMKU 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Menyampaikan rekapitulasi realisasi ekspor kepada BAPETEN secara berkala			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				setiap 6 bulan terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
5	• Ekspor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir • Impor Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir • Pengalihan Bahan Nuklir untuk Menunjang Kegiatan Instalasi Nuklir	1. Dokumen spesifikasi teknis bahan nuklir 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Prosedur yang terkait dengan penanganan dan pengangkutan bahan nuklir 4. Dokumen rencana proteksi fisik 5. Dokumen sistem *safeguards* 6. Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Melakukan ekspor/impor/pengalihan bahan nuklir dengan memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan garda-aman	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
6	Konstruksi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Operasi Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
8	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
9	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
10	Konstruksi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen sistem manajemen		4. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 8. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
11	Operasi Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		3. Melaksanakan ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
12	Dekomisioning Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan dari pengawasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Radiofarmaka yang Menunjang Layanan Kedokteran Nuklir	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Konstruksi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
15	Operasi Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan keberlanjutan pengelolaan limbah radioaktif, dekomisioning, dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
16	Dekomisioning Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	90 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
17	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pengelolaan Limbah Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
18	Konstruksi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen		2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
19	Operasi Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
20	Dekomisioning Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
21	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Produksi Barang Konsumen yang Mengandung Zat Radioaktif	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
22	Konstruksi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
23	Operasi Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
24	Dekomisioning Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
25	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kalibrasi yang Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
26	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	melakukan pembayaran	teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
27	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
28	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Terapi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
30	Konstruksi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
31	Operasi Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
32	Dekomisioning Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
33	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vivo*	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
34	Konstruksi Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
35	Operasi Fasilitas Radioterapi	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif 8. Program pengelolaan limbah radioaktif		5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
36	Dekomisioning Fasilitas Radioterapi	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning		UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
37	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Radioterapi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.E.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	• *Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen program komisioning 5. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 6. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
39	• *Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Operasi Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 5. Dokumen program perawatan 6. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 7. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		8. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif		keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
40	• *Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)			inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
41	• *Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama • *Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori III Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	*Konstruksi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program komisioning 4. Dokumen sistem manajemen	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
43	*Operasi Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
44	*Dekomisioning Fasilitas Iradiator Kategori II	1. Dokumen program dekomisioning yang	30 Hari setelah memenuhi	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap	Sampai terbitnya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	persyaratan dan melakukan pembayaran	2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN	pernyataan pembebasan		
45	*Pernyataan Pembebasan Fasilitas Iradiator Kategori II Menggunakan Pembangkit Radiasi	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)		melakukan pembayaran				
46	Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion untuk Tujuan Pendidikan, Penelitian, dan/atau Pelatihan	1. Dokumen hasil justifikasi penggunaan sumber radiasi pengion dalam penelitian dan pengembangan 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif 5. Dokumen rencana teknis fasilitas	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan zat radioaktif 3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen program perawatan 7. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melampirkan jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif		6. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif kategori I, II, dan III, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Dalam hal kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan menggunakan zat radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai dengan program pengelolaan limbah			
47	Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Sumber Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
48	• *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion Terpasang Tetap • *Uji Tak Rusak Menggunakan Sumber Radiasi Pengion *Mobile* atau *Portable* (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan 5. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan: a. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif b. Program pengelolaan limbah radioaktif		5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan uji tak rusak menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
49	Fasilitas Iradiator Kategori I Menggunakan Pembangkit Radiasi Pengion sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
50	*Perekaman Data Dalam Sumur Pengeboran *(Well Logging)* (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Dokumen program perawatan 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan penanganan limbah radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diberikan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
51	*Pengukuran *(Gauging)* (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan 5. Dalam hal kegiatan pengukuran *(Gauging)* menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengelolaan limbah radioaktif		inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pengukuran *(Gauging)* menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pengukuran *(Gauging)* menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
52	*Pemeriksaan Unjuk Kerja Peralatan dengan Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
53	*Analisis Menggunakan Sumber Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
54	Pemindai Bagasi atau Barang Lainnya Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		program keamanan zat radioaktif 2. Dokumen program perawatan 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melampirkan program pengelolaan limbah radioaktif	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Dalam hal kegiatan pemindai bagasi atau barang lainnya menggunakan sumber radioaktif, Pelaku Usaha melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			
55	*Fasilitas Penyimpanan Sumber Radioaktif untuk Menunjang Kegiatan Utama (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sumber radiasi pengion	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen sistem manajemen 6. Dokumen program perawatan		4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
56	*Penyimpanan Sementara Zat Radioaktif (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen program keamanan zat radioaktif 4. Dokumen sistem manajemen 5. Program pengelolaan limbah radioaktif		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dan ketentuan keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan keamanan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan limbah radioaktif			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	*Penyimpanan Sementara Pembangkit Radiasi Pengion (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 2. Data teknis fasilitas radiasi	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
58	Radiologi Diagnostik dan/atau Intervensional	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	melakukan pembayaran	2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			
59	Pemeriksaan Nonmedik pada Manusia dengan Pembangkit Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan		3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan			
60	Radiologi Diagnostik untuk Pengukuran Densitas Tulang dan/atau Pesawat Gigi Intra Oral	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
61	Penanda dan/atau Perunut Menggunakan Zat Radioaktif	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen sistem manajemen 4. Dokumen program perawatan	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan zat radioaktif dilakukan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 7. Melaksanakan perawatan sesuai dengan program perawatan			
62	Konstruksi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen teknis fasilitas radiasi 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau dokumen program keamanan zat radioaktif 3. Dokumen program komisioning	45 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Melaksanakan konstruksi sesuai dengan dokumen rencana teknis fasilitas radiasi yang telah disetujui oleh BAPETEN 2. Melaksanakan konstruksi paling lambat 2 tahun terhitung sejak PB UMKU konstruksi diterbitkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas yang menggunakan sumber radioaktif 5. Dokumen sistem manajemen		3. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Memastikan uji untuk masing-masing struktur, sistem, dan komponen 7. Memastikan uji terintegrasi struktur, sistem, dan komponen dengan sumber radiasi pengion			
63	Operasi Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan hasil pelaksanaan komisioning 2. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi dan/atau dokumen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam sistem manajemen pada tahap operasi 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		program keamanan zat radioaktif yang diperbaharui sesuai dengan tahap operasi 3. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap operasi 4. Dokumen program perawatan 5. Dokumen program dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion 6. Jaminan finansial untuk pelaksanaan dekomisioning dan penanganan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif 7. Dokumen program pengelolaan limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas		radiasi dan/atau keamanan zat radioaktif dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase zat radioaktif 7. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan dan/atau keamanan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan 8. Melakukan perawatan sesuai dengan program perawatan 9. Melakukan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan program pengelolaan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menggunakan sumber radioaktif		limbah radioaktif untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif			
64	Dekomisioning Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Dokumen program dekomisioning yang diperbarui sesuai dengan kondisi terkini 2. Dokumen sistem manajemen yang diperbarui sesuai dengan tahap dekomisioning	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Pelaku Usaha menghentikan kegiatannya secara tetap 2. Melaksanakan kegiatan dekomisioning setelah PB UMKU dekomisioning diterbitkan 3. Melakukan penanganan limbah radioaktif yang ditimbulkan dari pelaksanaan dekomisioning untuk fasilitas pemeriksaan peti kemas menggunakan sumber radioaktif 4. Melaksanakan sistem manajemen pada saat proses dekomisioning dilakukan 5. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi pada saat proses dekomisioning 6. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	Sampai terbitnya pernyataan pembebasan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 7. Melaporkan hasil pelaksanaan dekomisioning kepada BAPETEN			
65	Pernyataan Pembebasan Fasilitas Pemeriksaan Peti Kemas Menggunakan Sumber Radiasi Pengion	1. Laporan pelaksanaan dekomisioning 2. Laporan pelaksanaan sistem manajemen	30 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi	-	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
66	Kedokteran Nuklir Diagnostik *In Vitro*	1. Dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi 2. Dokumen sistem manajemen	5 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan PB UMKU yang diterbitkan 2. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam prosedur penggunaan sumber radiasi pengion 3. Memastikan bahwa ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi dilakukan 4. Memberikan akses kepada BAPETEN untuk melakukan inspeksi 5. Menindaklanjuti ketidaksesuaian hasil	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				inspeksi sesuai jangka waktu yang disepakati 6. Menyampaikan laporan verifikasi keselamatan kepada BAPETEN secara berkala setiap tahun terhitung sejak PB UMKU diterbitkan			
67	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	1. Dokumen spesifikasi mineral ikutan radioaktif 2. Program proteksi dan keselamatan radiasi 3. Dokumen rencana proteksi fisik dan sistem garda-aman	10 Hari setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran	1. Memenuhi aspek: a. teknis keselamatan; dan b. teknis keamanan 2. Memutakhirkan dokumen yang disyaratkan sebagai persyaratan teknis 3. Menerapkan budaya keselamatan dan keamanan 4. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat melakukan: a. pengolahan; b. pemanfaatan; dan/atau c. pengalihan 5. Pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif dapat memilih untuk:	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				a. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil uranium dan toriumnya; atau b. mengolah mineral ikutan radioaktif untuk diambil unsur selain uranium dan toriumnya 6. Dalam melakukan pengolahan mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib memiliki PB Pengolahan Mineral Ikutan Radioaktif di Luar Wilayah Penugasan Penambangan Mineral Radioaktif (WPPMR) 7. Apabila mineral ikutan radioaktif akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif wajib mengajukan persetujuan kepada BAPETEN 8. Apabila:			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				a. PB kegiatan utama habis masa berlakunya; b. badan hukum/usaha pemegang PB bubar; c. badan hukum/usaha pemegang PB pailit berdasar putusan pengadilan yang telah *in kracht;* atau d. fasilitas penyimpanan sudah tidak dapat menampung mineral ikutan radioaktif, pemegang PB UMKU tanpa menunggu PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif berakhir, harus: a. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pengolahan, pemanfaatan, atau penyimpanan; atau b. mengalihkan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain untuk pembuangan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				permanen, pengalihan mineral ikutan radioaktif ke pihak lain wajib memperoleh persetujuan BAPETEN 9. Dalam hal pemegang PB UMKU Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif akan membuat pembuangan permanen, pemegang PB UMKU Penyimpanan mineral ikutan radioaktif wajib memiliki PB Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif			

F. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Produksi Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), Dan Komputer Tablet	Dokumen Persyaratan TPP Produksi: 1. Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital 2. Brosur produk; dan 3. Dokumen perjanjian kerja sama produksi (jika diproduksi di luar perusahaan pemohon)	5 Hari	Laporan realisasi produksi	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
2	Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin Dan Peralatan Produksi Cakram Optik	1. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa mesin yang diimpor	5 Hari	Bagi Perusahaan Industri yang melakukan perbanyakan/ replikasi:	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		tidak untuk membuat atau menggandakan cakram optik bajakan (Materai Rp. 10.000) 2. Legalisasi Pendaftaran/Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik terakhir (khusus untuk perpanjangan) 3. Bukti pembelian atau pemindahtanganan mesin (disahkan oleh notaris) 4. Importir Terdaftar (IT) Cakram Optik (khusus untuk perpanjangan); dan 5. Bukti laporan produksi 2 Semester terakhir		Menyampaikan contoh cakram optik hasil perbanyakan/ replikasi kepada Direktur di Kementerian Perindustrian yang melakukan pembinaan terhadap industri cakram optik			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(khusus untuk perpanjangan)					
3	Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor	Dokumen persyaratan untuk keperluan uji tipe: 1. Formulir isian pendaftaran tipe dan varian kendaraan bermotor 2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrk atau pemasok	5 Hari	Laporan realisasi impor	1 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		kendaraan bermotor dari negara asal 3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan 4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan 5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian 6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhi materai yang dibuat					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor; dan 7. Okumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh Dokumen persyaratan untuk keperluan Impor: 1. Formulir isian pendaftaran tipe dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		varian kendaraan bermotor 2. Penjelasan NIK atau tanda bukti penerapan VIN minimal 9 karakter pertama secara berurutan beserta penjelasannya serta dilengkapi dengan keterangan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh, yang dibuat oleh pabrik atau pemasok kendaraan bermotor dari negara asal 3. Rencana impor selama 1 (satu) tahun ke depan sejak pengajuan permohonan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		4. Gambar/brosur yang diterbitkan oleh pabrik atau penyedia yang berisi spesifikasi teknis dari tipe yang didaftarkan 5. Surat pernyataan jaminan mutu dan layanan purna jual yang dibuat oleh importir dan disahkan oleh notaris sesuai tipe dan varian 6. Pernyataan harga FOB dengan dibubuhi materai yang dibuat oleh importir yang bersangkutan sesuai dengan tipe dari kendaraan bermotor yang diimpor 7. Tanda lulus uji tipe					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		8. Tanda Pendaftaran Tipe untuk keperluan uji tipe yang telah diperoleh atau Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama 9. Sertifikat bengkel dari surveyor independen atau perjanjian antara principal dengan perusahaan pemohon mengenai komitmen penyediaan layanan purna jual 10. Dokumen pernyataan tahun pembuatan yang diterbitkan oleh pabrik/prinsipal atau pemasok luar negeri, apabila dalam					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		penjelasan NIK tidak mencantumkan tahun pembuatan pada karakter kesepuluh; dan 11. Dokumen realisasi impor, apabila pelaku usaha mengajukan Tanda Pendaftaran Tipe untuk impor terakhir atas tipe dan varian yang sama					
II.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
4	Sertifikat Akreditasi Kawasan Industri	Melakukan pengisian penilaian mandiri dalam form survei yang paling sedikit berupa data dan/atau informasi aspek Standar Kawasan Industri yang terdiri atas:	13 Hari	-	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		1. Aspek infrastruktur dasar 2. Aspek pengelolaan lingkungan; dan 3. Aspek manajemen dan layanan					
5	Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri	1. Hasil penghitungan sendiri nilai TKDN (*self assessment*) 2. Alur proses produksi 3. Apabila pelaku usaha melakukan kerja sama, permohonan juga melampirkan: a. Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Industri dan pelaksana kerja sama	22 Hari	-	3 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		b. Perizinan berusaha dari pelaksana kerja sama c. Profil pelaksana kerja sama d. Terkait aspek produksi terhadap produk yang akan dinilai 4. Khusus untuk produk farmasi, telepon seluler, komputer genggam, dan modul surya harus melampirkan surat persetujuan penilaian TKDN					
III. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
6	Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk	Dokumen perolehan Barang untuk Keperluan	5 Hari	-	1 kali importasi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berupa: 1. Surat keterangan dari pemberi hibah/ bantuan (*gift certificate*) atau surat perjanjian kerjasama, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan berasal dari hibah/bantuan atau kerjasama; atau 2. Dokumen pembelian, dalam hal Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengernbangan ilmu Pengetahuan berasal dari pembelian					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
7	Surat Persetujuan Penilaian Tkdn Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri	Daftar mesin yang dilengkapi dengan jumlah, jenis, spesifikasi dan harga mesin	5 Hari	-	Berlaku untuk 1 kali pengajuan permohonan penilaian TKDN	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
8	Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu	Dokumen berupa: 1. Perhitungan kelayakan 2. Keekonomian industri 3. Nilai tambah yang dapat diberikan oleh perusahaan industri pengguna gas bumi 4. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir perusahaan yang sudah diaudit oleh akuntan publik 5. Perjanjian jual beli gas bumi yang berlaku	-	Laporan atas penggunaan gas bumi tertentu	Pengajuan rekomendasi per periode, jika sudah mendapatkan rekomendasi masa berlaku selamanya sampai adanya Kepmen ESDM yang baru	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		6. Laporan pemakaian gas bumi pada masing-masing pabrik selama 1 (satu) tahun terakhir; dan 7. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direksi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian					
9	Sertifikat Tanda Sah Dokumen Pencegahan Dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia Dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia	1. Dokumen penilaian risiko yang meliputi: a. Alur proses produksi; dan	5 Hari	Laporan upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang memuat:	5 tahun	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		b. Daftar bahan kimia dan pengelolaan bahan kimia 2. Dokumen prosedur yang meliputi: a. Prosedur standar operasi dan/atau instruksi kerja pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia b. Daftar personil keadaan darurat bahan kimia c. Peralatan dan perlengkapan keadaan darurat bahan kimia d. Alur proses sistem komunikasi		a. Kejadian keadaan darurat yang terjadi dan penananannya b. Pelaksanaan latihan c. Kondisi peralatan dan perlengkapan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		keadaan darurat; dan e. Nota kesepahaman/dokumen perjanjian kerja sama perencanaan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat tingkat 2					
10	Surat Penetapan Kode Perusahaan Dalam Rangka Penerapan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK)	1. Gambar atau brosur kendaraan bermotor yang akan diproduksi 2. Merek dari kendaraan bermotor yang terdaftar pada instansi yang berwenang (tanda pendaftaran merek dilampirkan)	5 Hari	10. Apabila tempat dan atau tanah yang dijadikan sebagai tempat usaha atas dasar kontrak, sewa atau kerjasama, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun 11. Setiap akan memproduksi kendaraan dengan merk dan	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		3. Kode penjelasan kendaraan bermotor yaitu 6 (enam) karakter untuk NIK atau 1 (satu) karakter untuk NIK tambahan 4. Rencana produksi 5. Rencana penggunaan komponen lokal 6. Foto dokumentasi kantor, pabrik dan fasilitas serta peralatannya 7. *Lay-out* pabrik dan lokasi kantor 8. Daftar peralatan utama dan peralatan pendukung 9. Perjanjian kerja sama/kontrak bagi pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan		atau tipe baru, perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan sistem penomoran NIK sekurang-kurangnya 9 karakter dan untuk NIK tambahan sekurang-kurangnya 5 karakter pertama disertai penjelasan dari masing-masing karakter 12. Perusahaan yang telah menerapkan NIK atau NIK tambahan diwajibkan menyampaikan laporan penerapan NIK atau NIK tambahan serta laporan realisasi produksi setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun berjalan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Penetapan Perusahaan Yang Mengimpor Kendaraan Bermotor IKD	1. Surat Penetapan Kode Perusahaan; dan 2. Surat Pendaftaran Merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi Kendaraan Bermotor dengan merek prinsipal	5 Hari	-	Berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi atau tidak ada perubahan data pada Surat Penetapan dimaksud	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
12	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	1. Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi 2. Dokumen tangkapan layar/*screenshot* dan/atau dokumen pencatatan yang membuktikan kepemilikan sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang	6 Hari	Laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM	Selama Pelaku Usaha masih melakukan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		(*traceability*) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan 3. Data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha					
13	Surat Penetapan Perusahaan Industri Pemanfaat Skema Khusus Industri Galangan Kapal	Dokumentasi berupa foto dan gambar *lay-out* fasilitas galangan kapal paling sedikit berupa dok tempat pembangunan kapal dan bengkel produksi	5 Hari	Laporan pemanfaatan skema khusus industri galangan kapal	Selama masih menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/Kepala Badan
14	Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya	1. Bagi produsen bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:	5 Hari	1. Produsen terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian	Selama pelaku usaha masih menjalankan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas b. Menyampaikan uraian mengenai proses produksi dan fasilitas pengadaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pengangkutan bahan berbahaya c. Memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)		provinsi setempat mengenai data produksi, penggunaan dan penyaluran bahan berbahaya 2. Industri pengguna akhir terdaftar bahan berbahaya wajib melaporkan mengenai data pengadaan dan penggunaan bahan berbahaya untuk proses produksinya kepada direktur jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas perindustrian provinsi setempat	kegiatan usaha		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) d. Memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat e. Memiliki tenaga ahli di bidang pengelolaan bahan berbahaya sebagai penanggung jawab teknis produksi; dan f. Menyampaikan surat pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan disalurkan kepada distributor terdaftar bahan berbahaya dan/atau industri pengguna akhir terdaftar					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		2. Bagi industri pengguna akhir bahan berbahaya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Menyampaikan nama penanggung jawab yang menangani bahan berbahaya b. Menyampaikan uraian proses produksi dan diagram alir serta perhitungan pemakaian bahan berbahaya; dan c. Menyampaikan surat Pernyataan bahwa bahan berbahaya hanya akan dipakai sendiri dalam proses produksinya dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		tidak diperjualbelikan					
15	Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau	1. Dokumen keterangan mengenai spesifikasi teknis mesin, paling sedikit memuat: a. Kapasitas terpasang mesin persatuan waktu b. Merek mesin dan atau nomor seri mesin c. Nama perusahaan pembuat/manufaktur d. Negara asal e. Tahun pembuatan; dan f. Kondisi mesin 2. Dokumen keterangan asal mesin lokasi keberadaan mesin	5 Hari	-	5 tahun	Industri mikro, kecil, menengah	Bupati/Walikota
						Industri besar	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
16	Surat Penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	1. Salinan surat penetapan kode perusahaan 2. Salinan surat pendaftaran merek dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau perjanjian untuk memproduksi kendaraan bermotor dengan merek prinsipal; dan 3. Dokumen rencana pengembangan industri yang paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPNBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Rencana umum pengembangan perusahaan; dan b. Rencana penambahan investasi					
17	Surat Penetapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV)	1. Surat penetapan Perusahaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah (LCEV) 2. Surat keterangan verifikasi awal yang diterbitkan Lembaga Verifikasi 3. Dokumen rencana kegiatan usaha (business plan) paling sedikit memuat:	5 Hari	-	Selama berlakunya program pengenaan PPNBM berdasarkan emisi	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		a. Rencana investasi dan/atau realisasi investasi b. Perhitungan proporsi nilai investasi berdasarkan karakteristik teknologi kendaraan c. Rencana dan/atau realisasi produksi kendaraan (merek, jenis, tipe, dan/atau varian kendaraan); dan d. Rencana pemberdayaan komponen dalam negeri, khusus kendaraan listrik berbasis baterai					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		dilengkapi dengan sertifikat TKDN; dan 4. Surat pernyataan harga untuk KBH2					
18	Surat Keterangan Kawasan Industri Halal	1. Rencana induk/masterplan Kawasan Industri halal; dan 2. Dokumen berupa: a. Bagan struktur dan sertifikat kompetensi tim manajemen halal b. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium c. Dokumentasi dan/atau dokumen kerja sama dengan	5 Hari	Laporan perkembangan kawasan industri halal	Selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)	(7)	(8)
		Lembaga Pemeriksa Halal d. Dokumentasi, dokumen kerja sama dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku e. Dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola f. Dokumentasi pembatas; dan g. Dokumen sistem manajemen halal					

G. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	1. Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 2. Surat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usaha	5 Hari	1. Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis 2. Menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 3. Melayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas 4. Mengajukan perubahan SKPL-A apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-A	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C)	1. Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 2. Surat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar 3. Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usaha 4. Bagi Penjual Langsung yang mengajukan perpanjangan SKPL-B&C, selain menyampaikan persyaratan dalam angka 1 - 3 di atas, juga menyampaikan Nomor	5 Hari	1. Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis 2. Menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah 3. Melayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas 4. Mengajukan perubahan SKPL-B &C apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-B&C 5. Menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC)		Khusus Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat			
3	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (SK – IT MB)	1. Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali PT Perorangan 2. Surat Penetapan IT MB dari Kementerian Perdagangan 3. Tanda Daftar Gudang (TDG) 4. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan 5. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk	5 Hari	1. Menerapkan standar K3L 2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya 3. Menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan setiap triwulan mengenai pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol 4. Mengajukan perubahan SK - IT MB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SK – IT MB	3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
4	Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	A. NPB Baru 1. SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya 2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari	1. Menjaga konsistensi mutu 2. Mencantumkan NPB pada barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan 3. Mencantumkan NPB pada PIB dengan benar setiap kali melakukan importasi 4. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud) 5. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran	Sesuai masa berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI), surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. NPB Perubahan 1. NPB lama 2. SPPT SNI perubahan, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian perubahan, atau perubahan Sertifikat Kesesuaian lainnya 3. SPPT SNI lama, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian lama, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya yang lama 4. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
5	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/ Agen)	1. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: . Memiliki Perjanjian yang dilegalisasi oleh *Notary Public* dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal a. Bila perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib	5 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan 2. Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan 3. Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: . Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian	1. Sesuai masa berlaku perjanjian atau surat konfirmasi kewenangan 2. Apabila masa berlaku perjanjian lebih singkat daripada surat konfirmasi kewenangan atau sebaliknya, maka masa berlaku STP Distributor/	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah b. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen c. Leaflet/brosur/katalog dari Prinsipal Produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan d. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku		a. Maksud dan tujuan perjanjian b. Status keagenan atau kedistributoran c. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan d. Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif e. Wilayah pemasaran f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak g. Kewenangan h. Jangka waktu perjanjian i. Cara-cara pengakhiran perjanjian j. Cara-cara penyelesaian perselisihan k. Hukum yang dipergunakan l. Tenggang waktu penyelesaian	Agen mengikuti masa berlaku yang tersingkat 3. Apabila perjanjian tidak mencantumkan masa berlaku, maka STP Distributor/ Agen berlaku selama 2 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku perjanjian yang dilegalisasi oleh *Notary Public* dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara Prinsipal 2. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri: . Perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjamah Tersumpah b. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen c. Melampirkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha milik Prinsipal d. Leaflet/brosur/katalog dari principal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan e. Surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki surat izin atau					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku f. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris Pendaftaran 3. Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: . Perjanjian atau penunjukan dari Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang menunjuk dan dilegalisasi oleh Notaris a. Menginput nomor STP yang masih berlaku dari Distributor, Distributor Tunggal, agen, atau agen tunggal yang menunjuk b. Untuk perpanjangan STP, apabila Sub Distributor atau Sub Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	1. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukan untuk LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib 2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari	1. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud) 2. Menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya 3. Jika tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat	1. Sesuai masa berlaku sertifikat akreditasi dan dapat diperpanjang 2. 2 (dua) tahun bagi LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kesesuaian lainnya, LPK wajib menyampaikan laporan nihil 4. Melakukan pembekuan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya, audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu setelah memperoleh informasi bahwa barang yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan 5. Mencabut SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya jika pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan 6. Memastikan kliennya mencantumkan NPB atau nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan 7. Memastikan kliennya menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud)			
7	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika	1. Daftar Pusat layanan Purna Jual dilengkapi dengan Alamat lengkap serta jaminan ketersediaan suku cadang (minimal 6 pelayanan purna jual) 2. Contoh Kartu Jaminan dan Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia	3 Hari	1. Tanda Pendaftaran wajib dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk [dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu garansi, sepanjang berlakunya tanda pendaftaran] 2. Produsen atau importir wajib menyediakan pusat layanan purna jual paling sedikit 10 pusat layanan purna jual, jika saat mendaftar baru	Sepanjang produk elektronika dan produk telematika beredar	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyediakan 6 pusat layanan purna jual yang tersebar di 6 daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah beredarnya produk elektronika dan produk telematika, dalam jangka waktu 4 tahun harus telah bertambah menjadi total 10 pusat layanan purna jual di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual [dalam waktu 4 tahun sejak penerbitan Tanda Pendaftaran (setiap 2 tahun harus bertambah 2 pusat layanan purna jual) di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual]			
8	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba b. legalitas usaha Pemberi Waralaba	5 Hari	1. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba 2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual 2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia 3. Prospektus penawaran waralaba harus dilengkapi dengan dokumen izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal dan dilegalisasi oleh:		tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h	1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. otoritas yang berwenang, bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing atau b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal, bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing 4. Surat keterangan keberlangsungan kegiatan usaha Waralaba dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Dalam Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba b. legalitas usaha Pemberi Waralaba c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau dan Penerima Waralaba dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual 2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba g. wilayah usaha h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam perjanjian waralaba 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu Perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba yang mencakup: a. nama pemberi waralaba b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/ Wali kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba g. wilayah usaha h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu Perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba					
12	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan atau Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		peraturan perundang-undangan	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
13	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
14	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup: a. nama pemberi waralaba lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati /Wali kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dari Waralaba Luar Negeri	b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutan b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan		Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan g. wilayah usaha h. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan					
15	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup: a. nama pemberi waralaba lanjutan b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati /Wali kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penerima waralaba lanjutan 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutan b. kekayaan intelektual masih dalam masa pelindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan g. wilayah usaha h. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada			3. berakhirnya masa pelindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya i. jangka waktu perjanjian j. tata cara pembayaran imbalan k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba l. penyelesaian sengketa m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Tanda Daftar Gudang	1. Alamat gudang dan titik koordinatnya 2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang 3. Lampiran data teknis	5 Hari	Bagi Pemilik Gudang: Melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Perdagangan Dalam Negeri perihal perjanjian kerja sama pengelolaan dan/atau penyewaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan Bagi Pengelola Gudang: 1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan 2. Menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang 3. Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/ Bupati/Wali kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan lampiran pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
17	Registrasi Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)	A. Registrasi Barang Terkait K3L Baru 1. Produsen/importir harus melampirkan: a. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L b. Foto fisik barang yang akan didaftarkan	3 Hari	1. Mencantumkan nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak 2. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer 3. Melakukan registrasi ulang untuk pemutakhiran data 4. Menjaga konsistensi mutu	Berlaku selama produsen/importir memproduksi dan/atau memperdagangkan barang	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Laporan hasil uji yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan d. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer 2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan: a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer B. Registrasi Barang Terkait K3L Perubahan/Registrasi Ulang 1. Produsen/importir harus melampirkan:					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Registrasi Barang Terkait K3L lama b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Foto fisik barang yang akan didaftarkan d. Laporan hasil uji untuk semua barang yang didaftarkan yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan e. Daftar dan alamat distributor, agen,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		grosir, dan/atau pengecer 2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan: a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer					
18	Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	A. Persetujuan Tipe Baru 1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual - Contoh merk pabrik dan/atau produk	3 Hari	1. Mencantumkan tanda kesesuaian tipe 2. Apabila dilakukan modifikasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan 3. Mencantumkan data Persetujuan Tipe dalam Pemberitahuan Impor Barang 4. Melaporkan realisasi impor, produksi, dan pemasaran Alat Ukur setiap semester	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual - Contoh kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing 2. Sertifikat Evaluasi Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan serta laporan hasil pengujian B. Perpanjangan Persetujuan Tipe 1. Dokumen Administrasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Alat Perlengkapan Asal Impor - Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikan di luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe - Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual 2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe Alat Ukur,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan					
19	Pendaftaran Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Pendaftaran Usaha Reparasi UTTP baru/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup 1. Dokumen Administrasi - Rekomendasi dari dinas yang membidangi metrologi legal atau dari Direktorat Metrologi dalam hal reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan merupakan penanganan khusus - Daftar isian peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Sertifikat pelatihan reparasi Alat Ukur	3 Hari	1. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan data pelaku usaha (diantaranya data SDM dan lokasi usaha) 2. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup usaha reparasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan 3. Melaporkan kegiatan reparasi Alat Ukur setiap semester	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan

H. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D. KELANCARAN KEGIATAN USAHA							
1	*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan 2. Surat pertanggungjawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 3. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A permohonan dilengkapi dengan: 1. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem	1. 7 Hari (tanpa klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis) 2. 9 Hari (jika memerlukan klarifikasi teknis); atau 3. 14 Hari (jika memerlukan rekomendasi teknis) Terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air/Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (*Kewajiban untuk membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dikecualikan bagi pemegang izin untuk konstruksi pada sumber air yang tidak menggunakan air) 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 4. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air	a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air c. Sesuai dengan perhitungan rencana	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa: a. Lokasi Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah; atau b. Kebutuhan Air untuk Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air menghasilkan produk berupa Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang diselenggarakan melalui sistem penyediaan Air Minum; atau 2. Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit		5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 7. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 8. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat 9. Selain hal diatas pemegang izin juga memiliki kewajiban untuk: a. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	keuangan investasi, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan prasarana dengan investasi besar	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		listrik tenaga mikrohidro /pembangkit listrik tenaga Air antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/*letter of intent* penunjukan penyedia C. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air dan 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun D. Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf C, untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pembangkit listrik tenaga surya terapung juga harus dilengkapi dengan kajian teknis E. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya		b. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi c. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi d. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya e. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air **Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** dilengkapi dengan syarat A. Syarat Administrasi 1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang dan 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun		f. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi dan g. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Foto terbaru prasarana terbangun C. Permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perpanjangan Izin Pengusahan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya E. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air yang telah mendapatkan izin sebelumnya **Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** dilengkapi dengan syarat: A. Syarat Administrasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diubah 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan B. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, syarat					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		administrasi dilengkapi dengan: 1. Bukti kepemilikan usaha atau anggaran dasar badan usaha yang berbentuk badan hukum 2. Surat pernyataan bahwa pemilik usaha yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air D. Permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sumber Daya Air berakhir E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air berakhir permohonan perubahan Izin Pengusahan Sumber Daya Air belum diajukan, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air baru dengan melampirkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya F. Perubahan Izin Pengusahaan Sumber					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daya Air dapat dilakukan dalam hal: 1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air mengalami perubahan 2. Terjadi perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti 3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah 4. Volume penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan/atau 5. Pemegang Izin Pengusahaan Sumber					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daya Air mengajukan permohonan perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air					
2	*Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air 2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/atau pengambilan Air 3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan 4. Jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air 5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan	30 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air 4. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan	a. Untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat di perpanjang b. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air berupa pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Syarat Teknis: 1. Gambar teknis *(as built drawing)* prasarana yang telah terbangun yang mencakup: a) Peta lokasi yang mencantumkan koordinat b) Denah keseluruhan pengolahan air/Peta situasi c) Posisi flowmeter pada instalasi (khusus untuk pengambilan air) d) Gambar Intake (mulut pipa/saluran pengambilan air) terbangun, yang mencantumkan elevasinya (khusus untuk pengambilan air) e) Gambar garis elevasi muka air (banjir/normal) pada		peraturan perundang undangan 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 10. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan	menggunakan Air c. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlu-kan prasarana dengan investasi besar	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sumber air dan f) Gambar skalatis dan menggambarkan kondisi terbangun (bukan shop drawing/gambar rencana) 2. Foto terkini sarana dan prasarana yang telah terbangun disertai dengan koordinat lokasi (sesuai dengan *as built drawing* yang dilampirkan) 3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang 4. Skema pengambilan air dengan mencantumkan		11. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		posisi flowmeter (khusus untuk pengambilan air) 5. Foto udara terbaru 6. Lama waktu pengambilan sumber daya air (bulan) (khusus untuk pengambilan air) 7. Volume pengambilan air (m3/bulan) (khusus untuk pengambilan air) 8. Analisis Struktur (khusus untuk konstruksi) 9. Nilai Jual Objek Pajak Tanah Terbaru di Lokasi Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air untuk Permohonan terkait Kegiatan Konstruksi Melintang atau Sejajar Sumber Air 10. Data Produksi Listrik yang dihasilkan dalam kWh (kilo watt hour)meter/ bulan untuk permohonan terkait					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kegiatan pembangkit listrik 11. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain 12. Berita acara konsultasi publik atas pengusahaan Sumber Daya Air 13. Surat pernyataan telah membangun konstruksi dan/atau menggunakan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air tanpa izin. C. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN): A. Syarat teknis paling sedikit berupa: 1. Persetujuan lingkungan dan 2. Gambar teknis (*as built drawing*) prasarana yang telah terbangun B. Syarat administrasi: 1. Maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air 2. Lokasi pengusahaan Sumber Air dan/ atau pengambilan Air 3. Jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diusahakan 4. Jangka waktu yang diperlukan untuk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengusahaan Sumber Daya Air 5. Jenis prasarana dan teknologi yang digunakan C. Satu permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air hanya dapat diajukan untuk satu nama sumber air					
3	*Izin Pengalihan Alur Sungai (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi 1. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan	28 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai: 1. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas air paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya	Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diserahkannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya kepada menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai 4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan. B. Syarat Teknis 1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan gambar rencana ruas Sungai baru 2. Peta rencana pemanfaatan pada alur sungai yang akan dialihkan		2. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan 3. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 4. Menyerahkan ruas Sungai baru yang memiliki luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya dan/atau prasarana sumber daya air lainnya kepada Menteri yang membidangi sumber daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 5. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai	bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Hitungan luas alur sungai beserta sempadannya yang akan dialihkan dan luas rencana alur sungai baru 4. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai 5. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh perubahan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan 6. Hitungan stabilitas lereng ruas Sungai baru, termasuk		6. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 7. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 8. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 9. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		stabilitas struktur bangunan pelengkapnya 7. Desain konstruksi ruas Sungai baru serta rencana pemasangan pos duga air otomatis di titik awal ruas Sungai baru, termasuk desain konstruksi bangunan pelengkap jika diperlukan. C. Pelaksanaan Pengalihan Alur Sungai dilakukan dengan: 1. Mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi Sungai 2. Mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana Sungai yang telah dibangun		10. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 11. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 12. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 13. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 14. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 15. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran Sungai 4. Memperhatikan kepentingan pemakai air Sungai yang sudah ada 5. Memperhatikan fungsi pengaliran Sungai ditinjau dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan 6. Mempertimbangkan aspek morfologi Sungai secara keseluruhan		terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 16. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 17. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 18. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 19. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai dan 2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya 3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan 4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai. 5. Menyampaikan laporan bahwa konstruksi ruas Sungai baru telah selesai dan memohon untuk			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dilakukan uji coba aliran air Sungai pada ruas Sungai baru paling lambat 1 (satu) bulan sejak konstruksi ruas sungai baru selesai dilakukan guna penerbitan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 6. Mengalirkan air melalui trase ruas sungai baru setelah mendapatkan persetujuan operasi atas ruas sungai baru 7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan 12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat			
4	*Izin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	A. Syarat Administrasi: 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan	60 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai beserta persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi kaidah teknis	1. Menyetorkan denda administratif ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin ditetapkan 2. Melaporkan bukti pelunasan denda administratif Kepada Menteri cq Dirjen SDA 3. Menyerahkan ruas sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir	Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diserah-kannya ruas sungai baru beserta bangunan pelengkapnya kepada menteri yang membidangi sumber daya air,	Wilayah Sungai Lintas Negara, Wilayah Sungai Lintas Provinsi, Wilayah Sungai Strategis Nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peraturan perundang-undangan 2. Surat keterangan telah mengalihkan alur sungai tanpa persetujuan 3. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang dikeluarkan oleh instansi membidangi penataan ruang 4. Surat keterangan bahwa kegiatan yang dilakukan dan/atau konstruksi yang dibangun tersebut memberi manfaat sosial dan ekonomi dan/atau tidak menimbulkan kerugian pihak lain		paling sedikit sama dengan ruas sungai yang dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya 4. Menyatakan lahan yang dimanfaatkan untuk ruas sungai baru tidak dalam sengketa atau permasalahan hukum serta memiliki alas hak 5. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 6. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai 7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 8. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 9. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air	gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Izin Pengalihan Alur Sungai diberikan sampai dengan diterbitkannya persetujuan operasi atas sungai baru	Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas penggunaan lahan tempat kegiatan 6. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan 7. Surat pernyataan kesediaan pemohon yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai 9. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan		10. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 11. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. 12. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 13. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 14. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 15. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penggunaan kawasan hutan B. Syarat Teknis: 1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru 2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan alurnya dan luas rencana alur Sungai baru (Ruas Sungai baru paling sedikit memiliki luas yang sama dengan ruas Sungai yang dialihkan) 3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai		timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 16. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 17. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air 18. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat dan 19. Melakukan perbaikan Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin ditetapkan, apabila terdapat kerusakan pada Sumber air, Prasarana Sumber Daya Air,			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		melalui suatu analisis model 4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada 5. Desain konstruksi ruas Sungai baru 6. Kajian erosi dan sedimentasi 7. Analisis geoteknik 8. *Detailed Engineering Design* (DED) 9. Gambar teknis (*as built drawing*) konstruksi ruas sungai baru		dan/atau konstruksi yang dibangun Dalam hal permohonan alur sungai berada pada kawasan hutan, Kewajiban Pemegang Izin Pengalihan alur sungai, yaitu: 1. Menyelesaikan dampak permasalahan sosial akibat Pengalihan Alur Sungai 2. Membangun konstruksi ruas Sungai baru dengan luas ruas sungai dan kapasitas alir paling sedikit sama dengan ruas Sungai yang akan dialihkan alurnya beserta bangunan pelengkapnya 3. Membangun dan menyerahkan prasarana sumber daya air sebagai bentuk kompensasi apabila luas ruas Sungai baru			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Permohonan Izin Pengalihan Alur Sungai untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dilengkapi dengan syarat: A. Syarat Administrasi: 1. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Izin berusaha (Nomor Induk Berusaha) yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air yang akan dilakukan 3. Surat pernyataan kesediaan pemohon		kurang dari luas ruas Sungai yang dialihkan 4. Mematuhi ketentuan dalam Izin pengalihan alur sungai 5. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air 6. Melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air 7. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 8. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan dan 9. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan alur sungai 4. Dalam hal permohonan pengalihan alur sungai berada pada kawasan hutan, persyaratan administrasi ditambah dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan B. Syarat Teknis: 1. Peta lokasi Sungai yang akan dialihkan alurnya dan usulan rencana ruas Sungai baru 2. Hitungan luas alur Sungai yang akan dialihkan dan luas		10. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi 11. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 12. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 13. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 14. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 15. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		rencana alur Sungai baru 3. Hitungan aspek hidrologi dan hidrolika terhadap fungsi pengaliran Sungai sebelum dan sesudah Pengalihan Alur Sungai melalui suatu analisis model 4. Hitungan pengaruh Pengalihan Alur Sungai terhadap muka air banjir dan muka air rendah di hulu dan hilir lokasi pengalihan dan pengaruh penurunan dasar Sungai di hulu dan hilir lokasi pengalihan terhadap kestabilan bangunan yang ada 5. Desain konstruksi ruas Sungai baru 6. Kajian erosi dan sedimentasi		16. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Analisis geoteknik 8. *Detailed Engineering Design* (DED) dan 9. Gambar teknis (*as built drawing*) konstruksi ruas sungai baru					
5	*Izin Pemanfaatan Irigasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Air Irigasi dan daya Air Irigasi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Pertanian Rakyat di dalam Sistem Irigasi yang sudah ada 2. Dalam keadaan tertentu Air Irigasi dan daya Air Irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain selama air tersedia/ ketersediaan air mencukupi 3. Pemanfaatan Air dan/atau Daya Air Irigasi hanya dilakukan pada jaringan utama (jaringan irigasi	14 Hari terhitung sejak permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi/ Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi/Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi beserta persyaratannya dinyatakan lengkap	1. Mematuhi ketentuan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi. 2. Membayar biaya jasa pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 3. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi jaringan irigasi 4. Melindungi dan mengamankan jaringan irigasi	1. Untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2. Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun, dalam hal pemanfaatan irigasi berupa pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi yang tidak menggunakan air	Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 2.000 ha (dua ribu hektare) atau pada Daerah Irigasi lintas provinsi, Daerah Irigasi lintas negara, dan Daerah Irigasi strategis nasional	Menteri/ Kepala Badan
						Daerah Irigasi yang luasnya 500 ha (lima ratus hektare) sampai dengan 2.000 ha (dua ribu hektare)	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		primer dan jaringan irigasi sekunder) 4. Pemanfaatan Irigasi untuk pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, rehabilitasi Jaringan Irigasi, dan Pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya dilakukan pada: a. Jaringan Irigasi primer b. Jaringan Irigasi sekunder; atau c. Jaringan Irigasi tersier. 5. Syarat administrasi: a. Surat pernyataan bertanggung jawab atas permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan yang dilakukan b. Surat pertanggung-jawaban mutlak atas		5. Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air 6. Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan 7. Memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dan 8. Memberikan ganti kerugian kepada masyarakat, apabila menimbulkan kerugian pada masyarakat Selain hal diatas pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi juga memiliki kewajiban untuk: 1. Mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi	3. Sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi, dalam hal pemanfaatan Irigasi memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar	atau pada Daerah Irigasi lintas kabupaten/kota Daerah Irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 500 ha (lima ratus hektare)	 Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penggunaan lahan tempat kegiatan c. Izin berusaha yang telah dimiliki oleh pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Air yang akan dilakukan d. Surat keterangan dari badan usaha milik daerah di bidang sistem penyediaan Air Minum setempat yang menyatakan bahwa: 1) Lokasi pemanfaatan Irigasi tidak dalam wilayah layanan badan usaha milik daerah atau 2) Kebutuhan Air untuk pemanfaatan Irigasi tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha milik daerah Dalam hal pemanfaatan Irigasi menghasilkan		2. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi 3. Menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi 4. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya 5. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan BBWS/BWS			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk berupa Air bersih atau Air Minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari; atau e. Dokumen yang diperlukan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ pembangkit listrik tenaga Air/ pembangkit listrik tenaga surya antara lain berupa perjanjian jual beli listrik/izin usaha pembangkit tenaga listrik/letter of intent penunjukan penyedia apabila tenaga listrik yang dihasilkan untuk diperjualbelikan f. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan		6. Berkoordinasi dengan BBWS/BWS dalam pelaksanaan konstruksi 7. Mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Syarat teknis untuk pemanfaatan Irigasi untuk memperoleh dan/atau mengambil Air dan/atau Daya Air Irigasi: a. Jumlah dan jadwal pengambilan Air; dan b. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana pengambilan Air 7. Syarat teknis untuk pembangunan Jaringan Irigasi serta peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi termasuk kegiatan pengubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi: a. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Rencana pelaksanaan pembangunan Jaringan Irigasi, peningkatan Jaringan Irigasi, dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi 8. Syarat teknis untuk pemanfaatan Jaringan Irigasi di dalam, di atas, atau di bawah Jaringan Irigasi termasuk sempadannya berupa gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dilakukan pemanfaatan di dalam, di atas, atau di bawah jaringan irigasi termasuk sempadannya **Perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi** A. Syarat Administrasi 1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diperpanjang 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Irigasi yang akan dilakukan B. Syarat Teknis 1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun 3. Foto terbaru prasarana terbangun C. Permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir D. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perpanjangan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru dengan melampirkan Izin Pemanfaatan Irigasi atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air yang dimiliki sebelumnya E. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan dalam kegiatan pemanfaatan irigasi yang telah mendapatkan izin sebelumnya **Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi** A. Syarat Administrasi 1. Izin Pemanfaatan Irigasi yang akan diubah 2. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengan kegiatan pemanfaatan irigasi yang akan dilakukan B. Syarat Teknis					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Jumlah dan jadwal pengambilan Air 2. Gambar desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun C. Dalam hal perubahan yang dimohonkan berupa perubahan nama pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi, persyaratan meliputi: 1. Akta kematian atau surat keterangan kematian pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi 2. Bukti perubahan anggaran dasar koperasi atau badan usaha 3. Surat pernyataan bahwa badan usaha atau koperasi dengan nama yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Pemanfaatan Irigasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		D. Permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir E. Dalam hal 1 bulan sebelum jangka waktu Izin Pemanfaatan Irigasi berakhir permohonan perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi belum diajukan, Izin Pemanfaatan Irigasi tidak dapat diubah dan pemohon dapat mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Irigasi baru F. Perubahan Izin Pemanfaatan Irigasi dapat dilakukan dalam hal: 1. Keadaan yang dipakai sebagai dasar pemberian Izin Pemanfaatan Irigasi mengalami perubahan 2. Terjadi alih fungsi lahan pada daerah Irigasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Terdapat perubahan kebijakan pemerintah 4. Volume penggunaan Air selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut kurang dari 90% (sembilan puluh persen) dari kuota yang ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Irigasi dan/atau 5. Pemegang Izin Pemanfaatan Irigasi mengajukan permohonan perubahan persetujuan					
6	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol	A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat permohonan yang berisi data/ identitas pemohon.	17 Hari	1. Memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan bertanggungjawab terhadap segala kerusakan	2 Tahun dan dapat diperpanjang	Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/ Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan serta menanggung segala risiko yang mungkin terjadi.		jalan selama jangka waktu perizinan 2. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama dilakukan pelaksanaan konstruksi.		Bagian-Bagian Jalan Provinsi	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Jaminan-jaminan (jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan polis asuransi kerugian pihak ketiga) 4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN) untuk pemanfaatan ruang milik jalan B. Persyaratan teknis: 1. Informasi lokasi yang terdiri atas: (a) untuk pemanfaatan ruang milik jalan berupa denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000 dan (b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa rute, jenis muatan jumlah angkutan, berat, dan dimensi untuk		3. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan 4. Membongkar, mem-perbaiki, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali dan penyeleng-gara jalan membutuhkan lahan Mematuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait		Bagian-Bagian Jalan Nasional Non Tol	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penggunaan ruang manfaat jalan 2. Rencana teknis rinci yang berisi rencana penempatan/pemasangan penandaan secara permanen serta spesifikasi teknis sesuai dengan peraturan teknis, mengenai pembebanan bangunan, perencanaan bangunan baja, bahan bangunan, perencanaan bangunan beton, instalasi listrik 3. Metode pelaksanaan yang terdiri atas: (a) untuk pemanfaataan ruang milik jalan berupa mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas; dan (b) untuk penggunaan ruang manfaat jalan berupa perbaikan alinyemen, pelebaran jalu lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur, dan pengaturan lalu lintas 4. Jadwal pelaksanaan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	*Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Tol (*berlaku untuk seluruh KBLI)	**1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT Persyaratan Teknis B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi 2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/ memanjang) 3. Rencana Jadwal Pelaksanaan 4. Metode Pelaksanaan 5. Pengendalian Lalu Lintas	1. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan iklan: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 3. Penggunaaan ruang pengawasan Jalan Tol: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 4. Penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus: 12 Hari (Dispensasi Ditjen Bina Marga) 5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan *overpass* atau	1. Notulensi hasil koordinasi dengan BUJT 2. Mematuhi ketentuan dalam perizinan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tol 3. Berita Acara dengan instansi terkait seperti PAM, Telkom, dll agar tidak mengganggu utilitas eksisting 4. Surat pengantar dari Pemda setempat berkaitan dengan restribusi untuk penyelenggaraan reklame atau media iklan (ipr) 5. Persyaratan yang tertuang dalam Izin/Rekomendasi Teknis yang diterbitkan	Sesuai jenis permohonan, jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan dapat di perpanjang	Seluruh ruas jalan tol yang telah beroperasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Analisis Risiko 7. Studi Lingkungan (khusus utilitas) **2. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit) 2. Sistem Jaringan Jalan 3. Kajian Lalu Lintas	*underpass*: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun: 22 Hari (Izin Menteri PUPR) 7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain: 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B: 22 Hari (Izin Menteri PUPR) 9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C : 12 Hari (Izin Ditjen Bina Marga) 10. Fasilitas inap: 22 Hari (Izin Menteri PUPR)				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial 5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, *Plan Profile*, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang) 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan 7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas 8. Analisis Risiko 9. Studi Lingkungan **3. Penggunaan ruang pengawasan Jalan Tol** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah)					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta lokasi dan gambar situasi (termasuk lokasi titik koordinat dan KM jalan tol) 2. Rencana Penempatan Konstruksi/ Bangunan 3. Jenis Peruntukan Bangunan 4. Rencana Sistem Drainase 5. Rencana Jalan Akses (jika diperlukan) 6. Analisis Risiko **4. Penggunaan ruang Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat atau khusus** A. Persyaratan Administrasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait. 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Rute dan Jumlah Trip 2. Jenis Muatan, Bobot, DImensi 3. Jenis Kendaraan Angkut, Jumlah Sumbu 4. Rencana Pengendalian Lalu lintas 5. Rencana Jadwal Pelaksanaan 6. Analisis Pembebanan 7. Analisis Risiko 8. Rencana Gambar Teknis/Penanganan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan *overpass* atau *underpass* A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi (dalam foto udara atau citra satelit) 2. Sistem Jaringan Jalan 3. Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, *plan profile,* Tipikal Potongan melintang/ memanjang)					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Rencana Jadwal Pelaksanaan 5. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas 6. Analisis Resiko 7. Studi Lingkungan **6. Pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Sistem Jaringan Jalan 3. Kajian Lalu Lintas 4. Kajian Kelayakan Ekonomi dan Finansial 5. Gambar Rencana Teknis (Titik koordinat dan KM jalan tol, Plan Profile, Tipikal Potongan Melintang/ Memanjang) 6. Rencana Jadwal Pelaksanaan 7. Metode Pelaksanaan dan Pengendalian Lalu Lintas 8. Analisis Resiko 9. Studi Lingkungan **7. Pembukaan akses sementara/permanen dari ruang milik Jalan Tol atau lokasi lain** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait 6. Draft MoU antara pemohon dengan BUJT B. Persyaratan Teknis 1. Peta Rencana Lokasi 2. Rencana Teknis (Plan Profile, Tipikal Potongan melintang/ memanjang) 3. Rencana Jadwal Pelaksanaan 4. Metode Pelaksanaan 5. Pengendalian Lalu Lintas **8. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe A dan B** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait B. Persyaratan Teknis 1. Hasil Kajian Kelayakan 2. Denah Lokasi dan tata letak 3. Gambar Desain Awal 4. Skema Pengusahaan 5. Dokumen Lingkungan 6. Kajian Lalu Lintas 7. Kajian Teknis 8. Kajian Kebutuhan Penggguna Jalan Tol 9. Profil Pengusahaan **9. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) Tipe C** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait B. Persyaratan Teknis 1. Denah Lokasi dan tata letak 2. Gambar Desain Awal 3. Dokumen Lingkungan 4. Kajian Lalu Lintas 5. Kajian Teknis 6. Kajian Kebutuhan Penggguna Jalan Tol **10. Fasilitas Inap** A. Persyaratan Administrasi 1. Surat Permohonan 2. Identitas Pemohon 3. Surat Pernyataan 4. Izin Usaha (tidak berlaku untuk Instansi Pemerintah) 5. Izin Instansi Terkait					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Persyaratan Teknis 1. Denah Lokasi dan tata letak 2. Gambar Desain Awal 3. Dokumen Lingkungan 4. Kajian Lalu Lintas 5. Kajian Teknis 6. Kajian Kebutuhan Penggguna Jalan Tol					

I. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR TRANSPORTASI

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B. KELAYAKAN OPERASI							
1	Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus	1. Gambar teknis 2. Data lapangan 3. Rancang bangun 4. Formulir data teknis izin peningkatan perkeretaapian khusus 5. Jadwal pelaksanaan 6. Surat persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus 7. Persyaratan yang harus diunggah oleh pelaku usaha 8. Spesifikasi teknis 9. Metode pelaksanaan 10. Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang dibutuhkan	60 Hari	Memenuhi Kewajiban Sesuai Standar Peningkatan Perkeretaapian Khusus	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan
						Lingkup Provinsi	Gubernur
						Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Izin Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalan Dengan Kereta Api dan Bangunan Lainnya	Dokumen Rencana usaha (*business plan*) yang paling sedikit memuat: 1. Jenis perpotongan atau persinggungan yang akan digunakan; 2. Jadwal pelaksanaan; 3. Gambar lokasi; 4. Gambar teknis; 5. Sistem pengamanan yang digunakan; dan 6. Metode kerja yang digunakan.	14 Hari	1. Memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kereta api pada saat pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi 2. Pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada gambar desain yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 3. Harus dikerjakan oleh SDM yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perkeretaapian 4. Menyampaikan laporan triwulan kemajuan pekerjaan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian 5. Harus diberi patok/tanda atau logo yang menunjukkan identitas pemegang izin 6. Melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan secara berkala dan berkesinambu-	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ngan selama pekerjaan untuk menjamin keamanan konstruksi jalur kereta api dan keselamatan dan kelancaran operasi kereta api 7. Melaporkan hasil pemeliharaan dan perawatan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
3	Izin Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	1. Gambar teknis interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 2. Data lapangan prasarana yang akan disambungkan 3. Jadwal pelaksanaan penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 4. Metode kerja interkoneksi/ penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum	60 Hari	Sesuai Standar Interkoneksi Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Peta lokasi penyambungan jalur kereta api khusus dengan jalur kereta api umum 6. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian 7. Sertifikat pengujian pertama atau pengujian berkala prasarana perkeretaapian 8. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dari masing-masing pihak yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan 9. Perjanjian interkoneksi antara penyelenggara perkeretaapian khusus					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan penyelenggara perkeretaapian umum 10. Spesifikasi teknis jalur dan fasilitas operasi perke-retaapian yang akan disambungkan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian antara lain berupa: a. Sistem dan komponen jalur Kereta Api yang disambungkan b. sistem dan komponen peralatan persinyalan c. perkeretaapian yang akan disambungkan d. sistem dan komponen peralatan telekomunikasi yang akan disambungkan e. sistem dan komponen instalasi listrik yang akan disambungkan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		11. Kajian kebutuhan interkoneksi berupa ekonomi dan/atau finansial yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi apabila dilakukan interkoneksi serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang diakibatkan dari interkoneksi					
4	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	1. Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Perkeretaapian Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelaikan dan telah lulus uji pertama	30 Hari	1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama Badan Usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus 3. Tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Khusus yang memiliki sertifikat kompetensi 4. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian dan 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian khusus secara berkala kepada pemberi izin		Lingkup Provinsi	Gubernur
						Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	1. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama 2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana Perkeretaapian 3. Tersedianya tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian, tenaga pemeriksa Prasarana	44 Hari	1. Mengoperasikan prasarana perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perkeretaapian dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Menaati peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengoperasian prasarana perkeretaapian 4. Bertanggung jawab atas pengoperasian prasarana perkeretaapian	Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan
						Lingkup Provinsi	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perkeretaapian dan petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat 4. Menyediakan peralatan untuk perawatan Prasarana Perkeretaapian 5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		5. Melaporkan kegiatan operasional prasarana perkeretaapian secara berkala setiap 1 satu tahun sekali kepada pemberi izin 6. Mendapat persetujuan menteri apabila melaksanakan pembangunan prasarana/ fasilitas lain yang bersinggungan atau berpotongan dengan prasarana perkeretaapian		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	1. Memiliki studi kelayakan 2. Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian 3. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama 4. Tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga	30 Hari	1. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya 2. Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji 3. Menaati peraturan perundang-undangan dibidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	5 tahun	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat 5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian 6. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian 7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau		4. Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian 5. Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 6. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian		Lingkup Provinsi	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya 8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan		7. Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian		Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus	1. Bukti pengalihan kepemilikan izin operasi 2. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana 3. Data lengkap prasarana yang akan dialihkan disertai dengan sertifikat uji kelayakan 4. Data lengkap sarana yang akan dialihkan disertai	30 Hari	1. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup 3. Bertanggung jawab atas pengoperasian perkeretaapian khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional perkeretaapian	Selama Badan Usaha Menjalankan Usaha Pokoknya	Lingkup Nasional/ Internasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dengan sertifikat uji kelayakan 5. Data petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan mengalihkan izin operasi		khusus secara berkala kepada pemberi izin		Lingkup Provinsi	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Tersedianya petugas petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, tenaga perawat prasarana dan sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilengkapi dengan sertifikat kecakapan/ keahlian di perusahaan yang akan menerima pengalihan izin operasi				Lingkup Kabupaten/Kota	Bupati/ Walikota
8	Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Sertifikat uji jalur untuk perawatan 2. Memiliki peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi 3. Memiliki tenaga perawatan yang	30 Hari	1. Melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan dengan sertifikat keahlian 4. Memiliki sistem dan prosedur perawatan		bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup 4. Bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian 5. Melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian	menjalankan usaha pokoknya		
9	Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian	1. Spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian 2. Memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta	30 Hari	1. Melaksanakan pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian 3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup	Selama badan usaha penyelenggara sarana/badan usaha perawatan sarana masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten /kota	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		apinya akan disambungkan 3. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL 4. Peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian 5. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang		4. Bertanggung jawab atas pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian 5. Melaporkan kegiatan operasional pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
10	Persetujuan Pengoperasian Peralatan Khusus	1. Spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perkeretaapian 2. Memiliki perjanjian kerjasama dengan	30 Hari	1. Mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian	Selama badan usaha penyelenggara sarana/ penyelenggara prasarana perkeretaapian/ badan usaha pengelola peralatan khusus masih menjalankan usaha pokoknya	Lingkup operasionalnya nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelenggara prasarana perkeretaapian umum 3. Peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji 4. Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan 5. Memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus 6. Menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus		4. Melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian			
11	*Sertifikat Penyelenggaraan	1. Dokumen berupa Gambar tata letak lokasi Terminal Barang Untuk Kepentingan	7 Hari	1. Melaporkan kegiatan pengoperasian Terminal Barang Untuk Kepentingan	Selama pelaku usaha	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Sendiri dengan menggunakan kertas A3 dengan skala menyesuaikan 2. Bukti penguasaan tanah berupa sertifikat tanah 3. Proposal Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri 4. Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis 5. Memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang pengelolaan barang yang dibuktikan dengan sertifikat		Sendiri setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Menyelenggarakan Terminal Barang hanya untuk kepentingan sendiri 3. Melengkapi Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	menjalankan kegiatan usaha		
12	Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan	1. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 2. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Berkerjasama dengan penyedia bahan yang memiliki Tanda Daftar Badan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Usaha Penyedia Bahan yang masih berlaku 3. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir			
13	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan	1. Surat penunjukan sebagai agen atau distributor (untuk perusahaan importir bahan perlengkapan jalan) 2. Standar bahan berdasarkan hasil uji 3. Standar peralatan sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan 4. Sumber daya manusia sesuai subbidang usaha perlengkapan jalan yang diajukan	5 Hari	1. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat 2. Melakukan pendaftaran ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Uji Berkala Kendaraan Bermotor Swasta dan APM	1. Memiliki bukti kepemilikan tanah/lokasi atau bukti sewa tanah/sewa lokasi unit pelaksana uji berkala 2. Memiliki daftar SDM penguji yang berkompeten dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi sebagai penguji berkala kendaraan bermotor 3. Melampirkan gambar/foto/layout fasilitas prasarana (gedung uji) pengujian berkala kendaraan bermotor 4. Melampirkan gambar/foto peralatan pengujian utama kendaraan bermotor 5. Melampirkan hasil kalibrasi/keakurasian peralatan pengujian utama kendaraan bermotor dengan	13 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 2. Mengajukan proses akreditasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha penyelenggaraan uji berkala dan memperpanjang akreditasi tersebut secara periodik	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan dievaluasi paling sedikit setiap 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		hasil AKURAT yang masih berlaku 6. Memiliki bukti adanya sistem informasi pengujian berkala kendaraan bermotor untuk mengelola data hasil uji dan integrasi data 7. Memiliki SOP Pelayanan Administrasi Pengujian Berkala 8. Memiliki SOP Penggunaan Peralatan Pengujian Berkala 9. Memiliki SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					
15	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (*Operating Certificate*) - OC 91	1. Memiliki atau menguasai Pesawat Udara 2. Memiliki atau menguasai personel operasi Pesawat Udara dan personel ahli perawatan Pesawat Udara	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat OC 2. Melaksanakaan ketentuan didalam batasan operasi (*operation specification*)	Selama masih melakukan kegiatan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara 4. Memiliki program perawatan Pesawat Udara 5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional		3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan 4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan			
16	Sertifikat Operator pesawat udara tanpa awak (*Remotely Pilo-ted Aircraft Operator Certificate*/ROC)	1. Memiliki dan/atau menguasai Pesawat Udara Tanpa Awak (*Unmanned Aircraft System*/CAS) dengan jumlah tertentu sesuai dengan yang tertulis di dalam lampiran Perizinan Berusaha atau perizinan kegiatan Angkutan Udara 2. Memiliki dan/atau menguasai personel operasi Pesawat Udara Tanpa Awak	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat ROC 2. Melaksakaan ketentuan didalam batasan operasi (*operation specification*) 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(Unmanned Aircraft System/ UAS) dan/atau personel ahli perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (Unmanned Aircraft System/UAS) 3. Memiliki standar pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (*Unmanned Aircraft System*/UAS) 4. Memiliki standar perawatan Pesawat Udara Tanpa Awak (*Unmanned Aircraft System*/UAS) 5. Memiliki program keamanan Angkutan Udara mengacu kepada ketentuan program Keamanan Penerbangan nasional		Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*/ AOC)	1. Memiliki dan menguasai Pesawat Udara dengan jumlah tertentu sesuai dengan Perizinan Berusaha Angkutan Udara Niaga yang dimiliki 2. Memiliki dan/atau menguasai personel Pesawat Udara yang kompeten dalam jumlah rasio yang memadai untuk mengoperasikan dan melakukan perawatan Pesawat Udara 3. Memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan, dan jaminan kendali mutu 4. Memiliki personel manajemen yang	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat AOC 2. Melaksakaan ketentuan didalam batasan operasi (*operation specification*) 3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan 4. Melakukan kegiatan perawatan sesuai dengan manual perawatan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kompeten yang bertanggung jawab terhadap kegiatan keselamatan, operasi dan perawatan Pesawat Udara serta telah dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan: 5. Memiliki pedoman organisasi pengoperasian dan pedoman organisasi perawatan 6. Memiliki program perawatan Pesawat Udara 7. Memiliki pedoman sistem manajemen mutu untuk mempertahankan kinerja operasi dan teknik secara terus menerus 8. Memiliki pedoman sistem manajemen keselamatan dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Memiliki program keamanan Angkutan Udara yang telah mendapat pengesahan					
18	Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	1. Memenuhi ketentuan pedoman penyelenggaraan kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan dalam bentuk manual operasi 2. Memenuhi ketentuan organisasi, SDM, Fasilitas, Pemeliharaan, Jaminan Kualitas, dan Ketentuan Teknis Lainnya	7 Hari	1. Memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan 2. Melaporkan segala perubahan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila terdapat perubahan organisasi, sistem kalibrasi penerbangan dan hal-hal terkait lainnya 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh data yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam rangka pengurusan sertifikat persyaratan sertifikat penyelenggara kalibrasi	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fasilitas navigasi penerbangan 4. Melaksanakan penerbangan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan pesawat udara, komunikasi penerbangan, Radio Detecting Ranging (RADAR), prosedur penerbangan instrument dan penerbangan lainnya Pengelolaan perawatan pesawat udara kalibrasi 5. Melaksanakan pengujian alat bantu navigasi udara, pendaratan, komunikasi penerbangan, RADAR, serta prosedur penerbangan instrument			
19	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan	1. Bukti bayar PNBP	7 Hari	1. Melaksanakan inspeksi keselamatan bandar udara,	Selama pelaku usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bandar Udara, Heliport Dan Waterbase	2. Pedoman inspeksi Keselamatan (*Safety Inspection Manual*) 3. Peralatan inspeksi keselamata 4. Struktur organisasi perusahaan, paling sedikit memiliki 2 (dua) bidang yaitu bidang inspeksi keselamatan dan bidang kendali mutu pelaksanaan inspeksi tersebut		*heliport*, dan *waterbase* beregister sesuai dengan peraturan dan ketentuan 2. Menyampaikan pemberitahuan akan dilaksanakan kegiatan inspeksi keselamatan kepada Direktur Bandar Udara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan inspeksi 3. Melaporkan kegiatan lembaga inspeksi keselamatan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal 4. Menerapkan sistem kendali mutu untuk menjaga kualitas atau mutu pelaksanaan inspeksi keselamatan	menjalankan kegiatan usaha		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Senantiasa patuh terhadap peraturan dan ketentuan di bidang penerbangan khususnya peraturan yang terkait dengan keselamatan operasional bandar udara, *heliport*, dan *waterbase* bergister 6. Mempunyai dan melaksanakan program peningkatan kompetensi terhadap personel inspeksi keselamatan 7. Melaksanakan kalibrasi peralatan inspeksi keselamatan sesuai ketentuan teknis yang berlaku 8. Menindaklanjuti setiap saran/ rekomendasi perbaikan dari Direktorat Jenderal			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Mengizinkan dan membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur bandar udara atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur 10. Bertanggung jawab penuh atas hasil inspeksi keselamatan yang telah dilaksanakan, termasuk saran / rekomendasi yang diberikan kepada penyelenggara bandar udara, *heliport*, dan *waterbase* beregister yang diinspeksi			
20	Sertifikat Organisasi Yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara,	1. DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109 2. Design Organization Manual (DOM), Prosedur	7 Hari	1. Menjaga Design Assurance Selama menjalankan System (DAS) sesuai kegiatan usaha dengan CASR Part 21, DOM dan prosedur tier-2	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dan Baling-baling Pesawat Udara (*Design Organization Approval*)	tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun 3. Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA 4. Hasil internal training pada fase sertifikasi 5. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara 6. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21- 09 sesuai dengan kelas DOA yang diajukan 7. SMS Manual yang telah disahkan		2. Melaksanakan Internal Audit tahunan sesuai dengan Audit Program Melaporkan dan mengajukan aplikasi yang baru jika terdapat perubahan yang signifikan terhadap Design Assurance System (DAS)			
21	Sertifikat Organisasi Pemegang Sertifikat Produksi (*Production Approval*	1. DGCA form 21-04 2. Quality System yang telah disahkan 3. Quality Manual yang telah disahkan	7 Hari	1. Melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan sertifikat PAH 2. Melaksanakan kegiatan produksi sesuai batasan kemampuan yang disahkan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Holder) Pesawat Udara Dan/Atau Komponen Pesawat	4. Memiliki fasilitas produksi dan peralatan pendukung 5. Daftar produksi yang telah disahkan (*Production Limitation Record/PLR*) 6. SMS manual yang telah disahkan 7. Memiliki struktur organisasi yang telah disahkan		3. Melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan prosedur manual operasional yang telah disahkan (Quality System Manual, Quality Manual, dan SMS Manual)			
22	Sertifikat/Register Bandar Udara	1. Hanya untuk pelaku usaha berbentuk Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan Bandar Udara Umum 2. Bukti bayar PNBP 3. Mengisi formulir data teknis Sertifikat/register bandar udara 4. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan keselamatan penerbangan	7 Hari	Memenuhi standar keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan keamanan penerbangan 6. Memiliki bukti pemenuhan ketentuan pelayanan jasa kebandarudaraan					
23	*Sertifikat Pembangunan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus d. Peta situasi (mapping) Terminal		3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat		6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus 7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran f. Dokumentasi peninjauan lapangan		operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
24	*Sertifikat Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus		berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Khusus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pengembangan Terminal Khusus kepada			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Khusus oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut		Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus 7. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran		tugas pemerintahan di Terminal Khusus 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Khusus 5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Khusus 6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Khusus) 7. Tanda bukti pembayaran PNBP Penggunaan Perairan priode berjalan		menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
25	*Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	penggunaan/pemanfaatan tanahDokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan		pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2 (dua) titik di sisi darat c. Peta situasi (mapping Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 2. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar		pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pembangunan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 9. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
26	*Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: a. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat c. Peta situasi (mapping) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/ bangunan lain di sekitarnya 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak sertifikat pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan terminal untuk kepentingan sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat pembangunan Terminal Khusus kepada			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat		Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 6. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 8. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7. Tanda bukti pembayaran PNBP Penggunaan Perairan priode berjalan		9. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
27	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan,	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Khusus oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Khusus b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan		keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Khusus sejak sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Khusus yang bersangkutan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Terminal Khusus dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
28	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Khusus oleh	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang	Paling lama 2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Khusus b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Khusus paling lama 2		berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Khusus diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Khusus yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Khusus setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(dua) tahun disertai timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		Khusus kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat 6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Khusus, kolam Terminal Khusus, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Khusus 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan pengawasan, serta menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Khusus			
29	*Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan	Paling lama 2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional Pelabuhan Pengumpan Lokal	Menteri/ Kepala Badan Gubernur Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Kemajuan fisik pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai		pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
30	*Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:	10 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memulai pelaksanaan pekerjaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sejak sertifikat perpanjangan	Paling lama 2 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional,	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Kemajuan fisik pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha c. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai		pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 4. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dampak yang timbul selama dan setelah pelaksanaan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 5. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri setiap 3 (tiga) bulan sejak penerbitan sertifikat perpanjangan pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		timeline kurva "S" rencana penyelesaian 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		6. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 7. Menyediakan sistem informasi kegiatan operasional maupun pengawasan dalam layanan kapal dan/atau barang yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal dan/atau pengawas guna pelaporan dan pengawasan, serta			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan memberikan dukungan kerjasama pendidikan dibidang transportasi dan pelayanan 8. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 9. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
31	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemenuhan komitmen pengoperasian/penyesuaian Terminal Khusus yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 tahun 2018 yang masih berlaku 2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan penyelenggara pelabuhan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
32	*Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Pemenuan komitmen pengoperasian/ penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Mengikuti masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan,
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		89 tahun 2018 yang masih berlaku 2. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, alur pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan 11. Menyediakan dan memasang papan informasi			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
33	*Sertifikat Pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah 2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Khusus yang telah terverifikasi 3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan)	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan Terminal Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan b. Hasil pembangunan Terminal Khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban,		diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga /perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Dokumentasi peninjauan lapangan 5. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
34	*Sertifikat Pengoperasian Terminal	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang telah terverifikasi 3. Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan) 4. Berita Acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan Terminal Untuk		lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai dengan sertifikat standar pembangunan yang diberikan 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di			
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/ Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kepentingan Sendiri telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Sertifikat standar Pembangunan Terminal Khusus dan siap untuk dioperasikan b. Hasil pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di sisi darat d. Dokumentasi peninjauan lapangan		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7 Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
35	*Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas Terminal Khusus tidak mengalami perubahan	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur pelayaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan masih layak untuk dioperasikan b. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup 5. Bukti pembayaran/pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir		keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Khusus 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
36	Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat	3 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Paling lama 5 (lima) tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/ Kepala Badan,
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	pernyataan penggunaan/ pemanfaatan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi oleh Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan terdekat yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri tidak mengalami perubahan dari perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya dan		pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-layaran, kolam terminal dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Memelihara ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di		Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		masih layak untuk dioperasikan b. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diketahui/diterima instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup 5. Bukti pembayaran/ pelunasan penggunaan perairan tahun terakhir		Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Memelihara fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan sejak sertifikat pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan dan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
37	*Sertifikat Penyesuaian Terminal Khusus (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian	5 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian Terminal Khusus oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/ tambat		undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 3. Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Khusus dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Khusus 5. melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat d. Koordinat Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Terminal Khusus e. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran f. Lampiran peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus		penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Khusus yang bersangkutan 7. menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan terdekat sejak			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Khusus)		sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			
38	*Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah serta surat pernyataan tanah 2. Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) atau Pemerintah Daerah 3. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana	5 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengerukan dan reklamasi, serta pengelolaan lingkungan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya	Paling lama 5 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat : a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut b. Data fasilitas sandar/ tambat c. Koordinat geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan		3. Menyediakan dan/atau memelihara Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran, alur-pelayaran, kolam Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan fasilitas yang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran serta kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang 4. Menyediakan ruangan dan sarana kerja dalam batas-batas kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 5. Melengkapi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan 2 (dua) titik di darat d. Rencana alur keluar masuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran e. Dokumentasi peninjauan lapangan 4. Persetujuan Lingkungan dibidang Kepelabuhanan (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri)		menyebabkan pencemaran dan memenuhi segala kewajiban terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang bersangkutan 7. Menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Kepelabuhanan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Penyelenggara Pelabuhan Terdekat sejak sertifikat perpanjangan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diterbitkan 8. Mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 9. Melakukan pembayaran PNBP penggunaan perairan berdasarkan perjanjian penggunaan perairan dengan Penyelenggara Pelabuhan sesuai ketentuan perundang – undangan sejak sertifikat standar			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengoperasian Terminal Khusus diterbitkan 10. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
39	*Sertifkat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Khusus Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian Terminal Khusus 2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat: a. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan terminal khusus yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu b. Kesiapan fasilitas	10 Hari	1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta pembangkit untuk cadangan pasokan listrik c. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar terminal khusus d. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan e. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau		pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus 5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana terminal khusus sehingga dapat dioperasikan secara optimal 6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus-menerus selama 24 (dua			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kendaraan f. Kesiapan sarana transportasi darat 3. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat: a. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan		puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan terminal khusus berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan 7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pelayaran serta kelestarian lingkungan b. Dokumentasi peninjauan lapangan					
40	*Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian TUKS 2. Dokumen/Proposal Teknis yang memuat 3. Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi perairan TUKS yang sudah ditetapkan sebagai perairan wajib pandu 4. Kesiapan fasilitas terminal khusus berupa lampu penerangan di dermaga dan lapangan penumpukan serta	10 Hari	1. Menyediakan fasilitas penampungan limbah dari kapal yang memadai sesuai kebutuhan 2. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, melalui Penyelenggara Pelabuhan setempat 3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, angkutan di perairan, keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS)	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional (TUKS)	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal (TUKS)	Bupati/ WaliKota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pembangkit untuk cadangan pasokan listrik 5. Kesiapan gudang dan/atau fasilitas lain di luar TUKS 6. Kesiapan keamanan dan ketertiban berupa pos keamanan, kamera pengawas, alat komunikasi bagi penjaga keamanan 7. Kesiapan tenaga kerja bongkar muat dan naik turun penumpang atau kendaraan 8. Kesiapan sarana transportasi darat 9. Berita acara peninjauan lapangan dan evaluasi dalam rangka pemenuhan persyaratan operasional secara terus menerus		perundang-undangan lainnya yang terkait 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS 5. Memelihara kondisi dan kemampuan serta perawatan sarana dan prasarana TUKS sehingga dapat dioperasikan secara optimal 6. Pelaksanaan pelayanan operasional secara terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan TUKS			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) Hari atau selama waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan Tim Teknis Terpadu Kantor Pusat dan Penyelenggara Pelabuhan yang paling sedikit memuat 10. Fasilitas terminal khusus telah memenuhi aspek keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan 11. Dokumentasi peninjauan lapangan		berpedoman pada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dan didukung oleh sumber daya manusia sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan 7. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			
41	*Sertifikat Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	1. Sertifikat standar/perizinan pengoperasian terminal khusus 2. Dokumen/Proposal teknis	10 Hari	1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	yang memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran:		untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di terminal khusus 2. Melengkapi Terminal Khusus dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelengaraan pelabuhan di terminal khusus 4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Kedalaman perairan yang memadai 2) Luas kolam untuk gerak kapal 3) Sarana bantu navigasi pelayaran 4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran 5) Prasarana, sarana, SDM pandu 6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan) 7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF) b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan:		bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan 6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 7. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian terminal khusus untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan dan 8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Khusus			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan) 2) Gudang tertutup 3) Peralatan bongkar muat 4) Peralatan pencegahan kebakaran 5) Fasilitas pencegahan pencemaran c. Aspek Ekonomi a) Menunjang Industri Tertentu b) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atau c) Arus Barang Ekspor paling					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sedikit 20000 ton/tahun					
42	Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat standar/ perizinan pengoperasian terminal khusus 2. Dokumen/Proposal teknis yang memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran b. Aspek Teknis Fasilitas Terminal Khusus c. Aspek Ekonomi 3. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan,	10 Hari	1. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di TUKS 2. Melengkapi TUKS dengan fasilitas penampungan limbah dan penampungan sampah 3. Menyediakan fasilitas kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas bagi instansi bea cukai, imigrasi, karantina dan penyelengaraan pelabuhan di TUKS	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul (TUKS)	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional (TUKS)	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal (TUKS)	Bupati/WaliKota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Kementerian Keuangan yang paling sedikit memuat: a. Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran: 1) Kedalaman perairan yang memadai 2) Luas kolam untuk gerak kapal 3) Sarana bantu navigasi pelayaran 4) Fasilitas telekomunikasi pelayaran 5) Prasarana, sarana, SDM pandu		4. Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan 6. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya 7. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian TUKS untuk kegiatan perdagangan luar negeri yang bersangkutan 8. Menyediakan dan memasang papan informasi status perizinan berusaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6) Kapal Patroli (bila dibutuhkan) 7) Menerapkan ISPS Code (melampirkan sertifikat SOCPF) b. Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan: 1) Dermaga Beton (paling sedikit 1 tambatan) 2) Gudang tertutup 3) Peralatan bongkar muat 4) Peralatan pencegahan kebakaran 5) Fasilitas pencegahan pencemaran c. Aspek Ekonomi:					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Menunjang Industri Tertentu 2) Arus Barang Impor paling sedikit 10000 ton/tahun dan/atau 3) Arus Barang Ekspor paling sedikit 20000 ton/tahun					
43	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Termin al Untuk	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus serta Pengerukan dalam rangka Penambangan	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau 3) Perizinan Berusaha Pertambangan untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis		pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat dan		Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengerukan, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil keruk (dumping area) di laut		6. Memulai kegiatan kerja keruk 3 (tiga) bulan sejak sertifikat kegiatan kerja keruk diterbitkan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Proposal rencana pekerjaan pengerukan, yang memuat: 1) Rencana volume keruk, metode dan peralatan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengerukan yang digunakan 2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
44	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi:	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan	Paling lama 4 tahun	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan c. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan:		ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan		Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bupati/Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan 2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan 3) Lahan reklamasi digunankan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Termin al Untuk		5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah 8. Memulai kegiatan kerja reklamasi 3 (tiga) bulan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kepentingan Sendiri) 2. Dokumen Teknis a. Peta kedalaman awal (predredge sounding) area yang akan di reklamasi b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan		sertifikat kegiatan kerja reklamasi diterbitkan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Rencana Induk Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp e. Proposal rencana pekerjaan reklamasi, yang memuat: 1) Maksud dan tujuan reklamasi 2) Rencana volume material, metode dan daftar peralatan untuk reklamasi 3) Rencana jadwal pekerjaan reklamasi					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4) Aspek Ekonomi pembiayaan reklamasi 5) Dampak Sosial terhadap pekerjaan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu Dokumen Lingkungan					
45	*Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS, yang meliputi: 1) Perizinan Berusaha Terminal Khusus/Termina	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		l Untuk Kepentingan Sendiri atau 2) Perizinan Berusaha Badan Usaha Pelabuhan beserta Konsesi atau Kerja Sama Lainnya atau b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan c. Surat Pernyataan bermaterai cukup, yang menyatakan: 1) Hak Pengelolaan dimohonkan oleh Penyelenggara Pelabuhan		siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi 3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan 4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan		Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Menyerahkan seluas 5% dari total lahan reklamasi untuk kepentingan Pemerintah di bidang kepelabuhanan 3) Lahan reklamasi digunankan untuk menunjang usaha pokok (bagi pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) 2. Dokumen Teknis		dan/atau syahbandar setempat 6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan 7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Desain rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang meliputi: 1) Peta kedalaman awal (predredge sounding) area keruk dan reklamasi 2) Profil/potongan melintang dan volume keruk 3) Hasil penyelidikan tanah pada area keruk 4) Hasil pengamatan arus lokasi pembuangan material hasil					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keruk (dumping area) di laut 5) Alinyemen dan kemiringan (slope) Alur Pelayaran b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Pertimbangan Teknis dari Penyelenggara Pelabuhan terhadap Kesesuaian dengan Rencana Induk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pelabuhan untuk reklamasi di Dalam DLKr/DLKp d. Kesesuaian dengan Tata Ruang untuk reklamasi di Luar DLKr/DLKp e. Proposal rencana pekerjaan pengerukan dan reklamasi, yang memuat: 1) Maksud dan tujuan lahan reklamasi, rencana volume keruk dan reklamasi, serta metode dan peralatan pengerukan dan reklamasi yang digunakan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Rencana jadwal pekerjaan pengerukan dan reklamasi 3) Aspek Ekonomi pembiayaan pengerukan dan reklamasi 4) Dampak Sosial terhadap pekerjaan pengerukan dan reklamasi f. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan					
46	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan pengerukan sebelumnya	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Terminal	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerukan dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan yang diketahui oleh Penyelengga Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi		2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja keruk kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan		Khusus serta Pengerukan dalam rangka Penambangan	
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan		dan/atau Syahbandar setempat 6. Memulai kegiatan kerja keruk sejak izin kegiatan kerja keruk diterbitkan			
47	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan reklamasi sebelumnya b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan reklamasi dan alasan/justifikasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang	7 Hari	1. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas izin kegiatan kerja reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 3. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan reklamasi d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu 3. Dokumen Lingkungan		Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja reklamasi 4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan 5. Melaporkan kegiatan kerja reklamasi kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 6. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 7. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kegiatan kerja reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah 8. Memulai kegiatan kerja reklamasi sejak izin kegiatan kerja reklamasi di terbitkan			
48	*Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Dokumen Administrasi a. Persetujuan pekerjaan pengerukan dan reklamasi sebelumnya b. Kontrak Kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan 2. Dokumen Teknis a. Laporan progres terakhir kegiatan pengerukan dan reklamasi serta alasan/justifikasi	7 Hari	1. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan 2. Memasang tanda beserta rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam Hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi Setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi	Paling lama 4 tahun	Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, serta Terminal Khusus	Menteri/ Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan b. Pertimbangan Teknis terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar setelah peninjauan lapangan bersama Distrik Navigasi setempat dengan melampirkan Peta Laut c. Jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi d. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu		3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dilakukan 4. Melaporkan kegiatan kerja keruk dan reklamasi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh penyelenggara pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat 5. Menyerahkan hak pengelolaan lahan hasil reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau syahbandar setempat 6. Menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada		Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Wali Kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen Lingkungan		Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan 7. Memulai kegiatan kerja keruk dan reklamasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk dan reklamasi di terbitkan			
49	*Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengerukan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berbentuk BUMN/BUMD dan Badan Hukum Indonesia 2. Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang di audit oleh kantor akuntan publik terdaftar 3. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia	7 Hari	1. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 2. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengerukan dan reklamasi 3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya	Nasional	Menteri/Kepala Badan
						Pelabuhan Pengumpan Regional	Gubernur
						Pelabuhan Pengumpan lokal	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja dan memiliki pendidikan, sebagai berikut: a. Ahli Nautika Tingkat I (ANT-1) b. Ahli Teknikal Tingkat I (ATT-1) c. Teknik Sipil d. Teknik Geodesi dan e. Teknik Kelautan 5. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture) 6. Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha		Direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili serta status kepemilikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadi perubahan 4. Melaporkan kegiatan usaha pengerukan dan reklamasi kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		patungan (joint venture) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m^3 (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan 7. Berita Acara Verifikasi Tim Teknis Terpadu					
50	*Sertifikat Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang	3 Hari	1. Melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin operasi angkutan laut khusus 2. Melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus-menerus sesuai standar usaha angkutan laut paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin operasi diterbitkan	Selama badan usaha tersebut masih mengoperasikan kapal miliknya untuk menunjang usaha pokok	Lintas pelabuhan/ Tersus antarprovinsi	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan surat pengangkatan sebagai karyawan atau perjanjian/kontrak kerja 2. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*) 3. Memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya 4. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sebagaimana dimaksud pada butir 4 harus dapat dibuktikan melalui: a. Grosse akta kapal b. Surat ukur kapal yang masih berlaku		3. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya 4. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut apabila terjadi perubahan nama direktur utama atau nama penanggung jawab atau nama pemilik, nomor pokok wajib pajak perusahaan, domisili perusahaan, dan status kepemilikan kapal paling lama 14 (empat belas) Hari setelah terjadinya perubahan 5. Memberikan prioritas akomodasi untuk taruna atau calon perwira yang melakukan praktek kerja laut	untuk kepentingan sendiri dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku dan d. Crew list		6. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut semua data kapal milik dan/atau kapal charter serta kapal yang dioperasikan 7. Melaporkan perubahan armada kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 8. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan/atau keberangkatan kapal serta laporan daftar muatan di atas kapal (cargo manifest) kepada penyelenggara pelabuhan 9. Menyampaikan laporan kunjungan kapal kepada penyelenggara pelabuhan yang merupakan realisasi dari rencana kedatangan dan keberangkatan kapal			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				10. Melaporkan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan rekapitulasi dari laporan kunjungan kapal 11. Melaporkan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 12. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang meliputi data umum perusahaan, data kapal yang dimiliki dan/atau dicharter, data kegiatan operasional kapal milik dan/atau kapal charter, data kegiatan keagenan kapal, serta laporan kinerja keuangan perusahaan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	*Sertifikat Daerah *Ship To Ship* (STS) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat permohonan kepada direktur kenavigasian dengan lampiran sebagai berikut : a. Peta bathymetri b. Peta laut indonesia c. Data kordinat jalur pipa / kabel bawah laut d. Usulan zona keamanan dan keselamatan dari pemohon pada peta laut indonesia e. Data dimensi kapal dan volume kapal yang melintas f. data kordinat sarana dan fasilitas (dermaga)	9 Hari	1. Menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah *ship to ship* 2. Menyediakan dan menjaga sbnp dan alur keluar masuk wilayah *ship to ship* 3. Melaporkan secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan *ship to ship* yang dikelola	Selama masih mengelola kegiatan STS di perairan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		g. alur pelayaran sekitar zona keamanan dan kesela matan data daerah ship to ship disekitar usulan zona keamanan dan ke selamatan					
52	*Sertifikat Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi Dalam Dinas Bergerak Pelayaran *Accounting Authority Identification Code* (AAIC) (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki tenaga ahli di bidang radio elektronika paling rendah SRE- II 2. Kapal yang terdaftar pada kuasa perhitungan paling sedikit: a. 5 (lima) unit kapal untuk perusahaan angkutan laut nasional b. 10 (sepuluh) unit kapal untuk pelaku usaha lainnya	1 (satu) Hari setelah dilakukan verifikasi lapangan	1. Pelaku Usaha yang diberikan standar pemberian Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) dalam melaksanakan kegiatan wajib: a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain di	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				bidang pelayaran dan telekomunikasi b. Membuat laporan dan menyelesaikan perhitungan biaya kepada pihak yang berhak, baik dalam negeri maupun luar negeri c. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau: 1) Setiap terjadi pendaftaran baru, pemindahan, perubahan atau penghapusan Stasiun Radio Kapal dan/atau Stasiun Bumi Kapal dalam			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				daftar tanggung jawabnya 2) setiap terjadi penyelesaian perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran dan 3) setiap perubahan/ penggantian tenaga ahli di bidang radio elektronika yang dimiliki 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. daftar nama kapal b. Tanda Panggil (Call Sign)/identifikasi kapal c. bendera atau kebangsaan kapal dan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				d. pembayaran dan hutang piutang dalam dan luar negeri 3. Kegiatan Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC) dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko 4. Dalam hal diperlukan, audit dapat dilakukan atau sewaktu-waktu oleh Direktur Jenderal 5. Pelaku Usaha yang belum memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(accounting authority identification code/AAIC) dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha yang telah memperoleh Kuasa Perhitungan jasa telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran (accounting authority identification code/AAIC)			
53	*Persetujuan peralatan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Veriefied Gross Mass* /VGM) dengan Metode ke- 1 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki atau menguasai peralatan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) yang dibuktikan dengan surat kepemilikan, surat pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa 2. Dokumen kalibrasi peralatan yang digunakan	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan kepada penyelenggara pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Memiliki operator peralatan dengan status pegawai tetap beserta sertifikat yang dimiliki 4. Dokumentasi peralatan 5. Sistem informasi penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM)					
54	*Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) dengan Metode ke- 2 (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat keterangan domisili tempat penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) 2. Standar operasional prosedur penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) yang paling sedikit memuat:	3 Hari	1. Menyampaikan laporan kegiatan penimbangan setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat di lokasi pemuatan peti kemas dan 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-	2 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a Tahapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) sampai memperoleh nilai Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) b Sistem komunikasi penyampaian informasi berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) c Peralatan penentuan Berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified gross Mass*/VGM) yang digunakan beserta sertifikat kalibrasinya dari Instansi yang		undangan lainnya			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berwenang di bidang kemetrologian d Pemeliharaan peralatan dan e Sistem informasi penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) 3. Surat penunjukkan dari Shipper 4. Bukti kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian kerjasama dan/atau sewa menyewa terhadap peralatan atau perlengkapan penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi (*Verified Gross Mass*/VGM) terkalibrasi dan bersertifikat					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Usulan tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Shipper atau yang mewakili atau asosiasi terkait dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan					
55	*Persetujuan Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki tenaga teknis paling sedikit 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau ketrampilan di bidang pengelasan atau pelapisan/pengecatan 2. Memiliki sarana dan prasarana perlengkapan, yang paling sedikit terdiri dari:	4 Hari	1. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan lainnya 2. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan persyaratan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak terjadi perubahan dan	5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Mesin las b. Kompresor c. Alat angkat peti kemas d. Alat pencegahan kebakaran dan generator listrik Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		3. Menyampaikan laporan secara tertulis terkait kegiatan bengkel usaha perbaikan Peti Kemas kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali untuk dilakukan evaluasi			
56	*Izin Membangun Bangunan Instalasi di Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berita Acara Verifikasi 2. Surat tidak keberatan atas persilangan pipa atau kabel yang telah terpasang (*existing*), pemilik konsesi 3. Surat Penunjukkan/kuasa dari	7 Hari	1. Menyampaikan laporan *as laid drawing* hasil pembangunan dan memetakan kedalam Peta Laut Indonesia kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 2. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi pipa/label bawah air	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		direksi/pimpinan perusahaan 4. Berita Acara peninjauan lokasi 5. Sertifikat standard (Pernyataan Mandiri) 6. Surat Pernyataan: a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat		sektor Perhubungan 3. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 4. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap kali terjadi perubahan yang berkaitan dengan pembangunan 5. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel 7. Hasil survey teknis meliputi: a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasi b. Data bathimetry c. Data hidrografy *d.* Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan *(sub soil)* *e.* Titik koordinat pendaratan *(landing point)* 8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi 9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Metode kerja dan analisa teknis 11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat 12. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 13. Dokumen hasil kajian analisa risiko *(risk assessment)*					
57	*Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat sesuai dengan IALA Guideline No 1100 (Aids To Navigastion dan IALA Guideline 1014 (Vessel Traffic Service) 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kenavigasian 3. Evaluasi standar mutu diklat kenavigasian dilakukan setiap tahun	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselengarakan		4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya pada Direktorat Kenavigasian			
58	Perpanjangan Sertifikat Pengesahan (Approval) Program Studi Lembaga Diklat Kepelautan	1. Berita Acara Verifikasi Pemenuhan Sertifikat 2. Memiliki sistem manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga mutu yang diakui Internasional maupun nasional 3. Memiliki tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai program diklat yang diselengarakan	5 Hari	1. Membayar PNBP 2. Setiap Lembaga Diklat wajib memiliki sistem standar mutu sesuai dengan pedoman pada sistem standar mutu kepelautan 3. Evaluasi standar mutu diklat kepelautan dilakukan setiap tahun 4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Diklat Kepelautan			
59	*Sertifikat Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Memiliki pengalaman / masa kerja selama 2 (tahun) dalam program studi diklat kenavigasian yang diikuti 2. Telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program studi diklat kenavigasian 3. Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian	3 Hari	1. Membayar PNBP 2. Menyelesaikan Pendidikan dan pelatihan program studi diklat kenavigasian 3. Mengikuti Kegiatan Ujian Kompetensi Program Studi Diklat Kenavigasian	Paling lama 5 tahun	Nasional	Menteri/ Kepala Badan
60	*Sertifikat Penentuan Ruang Bebas (*Clearance*) Kabel Saluran Udara Atau Jembatan Di Atas Perairan	Ruang bebas dihitung dengan memperhatikan: 1. Kepadatan lalu lintas kapal (traffic) dan pesawat udara 2. Dimensi kapal 3. Kondisi alur 4. Air pasang tertinggi	3 Hari	Melaporkan kepada instansi terkait baik di pusat maupun di daerah termasuk dalam penetapan batas-batas zona keamanan keselamatan pelayaran, pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta penyiarannya kepada kapal-kapal agar dilaksanakan	Selama melakukan satu kegiatan	Nasional	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	5. Tinggi tiang utama kapal 6. Gelombang 7. Kedalaman perairan 8. Pilar konstruksi kabel saluran udara atau jembatan		sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
61	*Sertifikat Membangun Kabel, Saluran Udara/SUTT Atau Jembatan Diatas Perairan (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Sertifikat Standar terkait penentuan ruang bebas *(clearance)* 2. Rekomendasi dari Distrik Navigasi setempat 3. Berita Acara peninjauan lokasi 4. Berita Acara Verifikasi 5. Surat Penunjukkan/ Kuasa dari Direksi/Pimpinan Perusahaan 6. Surat Pernyataan: a. Kepemilikan/aset instalasi pipa/kabel	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau Jembatan di atas perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama dan setelah Pembangunan Kabel Saluran	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang diajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bersedia melakukan pembongkaran jika sudah tidak digunakan lagi dan menempatkan uang jaminan sebagai pengganti biaya pembongkaran c. Lama waktu pemanfaatan dan bersedia bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pihak lain akibat pelaksanaan pembangunan pipa/kabel dan keberadaan pipa/kabel 7. Hasil survey teknis meliputi :		Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangunan Kabel Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan 4. Menyampaikan data koordinat geografis kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan yang telah terpasang (as laid drawing) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 5. Menyampaikan Persetujuan Layak Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Posisi geografis jalur bangunan/instalasi b. Data hidrografy c. Titik koordinat pendaratan *(landing point)* 8. Perhitungan teknis dan gambar desain bangunan/instalasi 9. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan 10. Metode kerja dan analisa teknis 11. Rekomendasi aspek keselamatan pelayaran dari penyelenggara pelabuhan KSOP/UPP setempat 12. Rekomendasi Aspek Keselamatan Penerbangan		di atas perairan setelah pelaksanaan pemasangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 6. Menjaga kelestarian lingkungan 7. Menggunakan Perusahaan nasional yang memiliki Izin Usaha Perusahaan Pekerjaan Bawah Air dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 8. Melaporkan keberadaan jalur Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan kepada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setempat 9. Melaporkan kondisi teknis keberadaan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan secara			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				periodik untuk dapat dilakukan mitigasi penanganan apabila Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan tersebut mengalami perubahan dan/atau kerusakan 10. Apabila jangka waktu pemanfaatan Kabel, Saluran Udara/SUTT atau jembatan di atas perairan telah berakhir (pasca operasi) selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak dinyatakan tidak digunakan lagi wajib dibongkar 11. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
62	*Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Bangunan Dan/Atau Instalasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Surat penunjukan /kuasa dari direksi/pimpinan perusahaan 2. Hasil uji kelaikan bangunan dan/atau memindahkan 3. Surat Permohonan Perpanjangan 4. Rekomendasi dari instansi teknis pembina bangunan dan/atau instalasi 5. Salinan izin membangun dan/atau memindahkan 6. Hasil *Risk Assessment Study*	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang	Selama pemanfaatan bangunan dan/atau instalasi yang di ajukan oleh pemrakarsa	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi di perairan 4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Melaporkan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 6. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan			
63	*Sertifikat Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	1. Hasil survey teknis meliputi : a. Posisi geografis jalur bangunan/ instalasi	7 Hari	1. Berkoordinasi dengan Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama pelaksanaan	Dalam 12 bulan belum melakukan pembongkaran,	Nasional	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(*berlaku untuk seluruh KBLI)	b. Data bathimetry c. Data hidrografy d. Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan (sub soil) 2. Gambar desain bangunan/instalasi 3. Lama waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan 4. Metode kerja dan analisa teknis 5. Standar operasional prosedur (SOP) membongkar yang sudah disetujui oleh instansi pembina pemilik instalasi 6. Lokasi penyimpanan hasil pembongkaran bangunan dan/atau instalasi 7. Evaluasi dan verifikasi lapangan Tim Teknis Terpadu dengan yang		pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 2. Berkoordinasi dengan Direktorat Kenavigasian untuk penyiaran pelaksanaan kegiatan melalui Maklumat Pelayaran (Mapel) dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) selama pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada semua pihak dalam hal terjadi segala sesuatu yang merugikan sebagai akibat dari pelaksanaan pembongkaran bangunan dan instalasi di perairan 4. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang	akan diberikan perpanjangan		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dibuktikan Berita Acara Risk Assestment		disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut 5. Menyampaikan data koordinat geografis bangunan dan instalasi di perairan yang telah dibongkar kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 6. Melaporkan pembongkaran bangunan dan instalasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut pelaksana teknis syahbandar setempat 7. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan 8. Melaporkan kepada pushidrosal untuk pemberitahuan Berita Pelaut Indonesia (BPI) dan penyesuaian pemetaan laut			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.I.159

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia			

SK No 148712 C

J1. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR KESEHATAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri	1. Persyaratan administrasi, yang meliputi a. Perizinan berusaha produksi alat kesehatan b. Perizinan berusaha distribusi alat kesehatan, jika produk didaftarkan oleh distributor pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen c. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik produk dengan produsen / distributor yang telah disahkan notaris dengan masa berlaku minimal 2 (dua) tahun, jika produk didaftarkan oleh pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen d. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai	1. Baru: 16 Hari (Kelas A), 26 Hari (Kelas B dan C), 40 Hari (Kelas D) 2. Perpanjangan: 13 Hari 3. Perubahan atau perpanjangan dengan perubahan: 16 Hari	1. Laporan berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Sertifikat merek yang masih berlaku f. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai g. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai h. *Standard operating procedure* (SOP) dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan, kejadian tidak diinginkan, penarikan kembali produk dan informasi produk lain terkait *post market* (*untuk permohonan baru) 2. Persyaratan teknis, yang meliputi: a. Dokumen *quality management system*, seperti sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Alkes), sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan jika produsen melakukan kegiatan distribusi sendiri,SNI, dan sertifikat CE a. *Declaration of conformity* atau surat pernyataan kesesuaian standar dari produsen b. Informasi produk c. Spesifikasi dan jaminan mutu d. Persyaratan penandaan 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
2	Izin Edar Alat Kesehatan Impor	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha distribusi alat kesehatan b. Untuk alat kesehatan impor yang melakukan pengemasan primer, melampirkan perizinan	1. Baru: 21 Hari (Kelas A), 36 Hari (Kelas B dan C), 55 Hari (Kelas D)	1. Laporan berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun, kecuali untuk produk OEM Impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berusaha umku sertifikasi cara pembuatan yang baik untuk alat kesehatan (CPB untuk alkes) c. Surat penunjukan keagenan dari pabrikan/ prinsipal yang telah disahkan perwakilan pemerintah republik indonesia di negara asal dengan masa berlaku maksimal 5 (lima) tahun dari tanggal penunjukan keagenan d. *Certificate of Free Sales* (CFS) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asal e. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai f. Sertifikat merek yang masih berlaku untuk alat kesehatan OEM impor g. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai	2. Perpanjangan: 13 Hari 3. Perubahan atau perpanjangan dengan perubahan: 16 Hari		maksimal 3 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		h. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai i. *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan, kejadian tidak diinginkan, penarikan kembali produk dan informasi produk lain terkait *post market* (*untuk permohonan baru) 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen *quality management system* seperti sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan, ISO, dan sertifikat CE b. *Declaration of conformity* dari pabrikan c. Informasi produk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Spesifikasi dan jaminan mutu e. Persyaratan penandaan 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
3	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dalam Negeri	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha produksi PKRT b. Surat kerjasama/ hubungan/ penunjukkan/ lisensi antara pabrik dengan pemilik merek (untuk makloon/ lisensi/OEM) yang bermaterai c. Sertifikat dan dokumen yang menyebutkan kesesuaian produk PKRT dengan standar produk yang masih berlaku dan memiliki ruang lingkup mencakup sistem manajemen mutu PKRT seperti Cara Pembuatan yang Baik untuk PKRT (CPB	1. Baru: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1), 8 Hari (Notifikasi Kelas 2), 35 Hari (Kelas 3) 2. Perpanja-ngan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3) 3. Perubahan atau perpanja-ngan	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk PKRT) atau ISO 9001 tahun termutakhir d. Sertifikat Merek yang masih berlaku e. Surat pernyataan keaslian dokumen dan data yang bermaterai f. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermaterai 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Formula/ komponen dan prosedur pembuatan b. DKP untuk setiap PKRT yang didaftarkan (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Notifikasi Kelas 1 & 2) c. Spesifikasi bahan baku dan wadah (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Kelas 3) d. Spesifikasi dan stabilitas produk jadi	dengan perubahan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3)				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. Kegunaan dan contoh f. Data pendukung g. Persyaratan khusus 3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
4	Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha produksi PKRT b. Surat penunjukkan keagenan dari pabrikan/ prinsipal yang telah disahkan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di negara asal c. *Certificate of Free Sales* (CFS) yang masih berlaku dan diterbitkan oleh instansi berwenang di negara asal d. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermaterai e. Sertifikat merek yang masih berlaku untuk PKRT OEM impor	1. Baru: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1), 8 Hari (Notifikasi Kelas 2), 50 Hari (Kelas 3) 2. Perpanjangan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3) 3. Perubahan atau perpanja-ngan dengan	1. Laporan Berkala setahun 2 (dua) kali 2. Laporan Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), jika ada kejadian yang tidak diinginkan	Maksimal 5 tahun, kecuali untuk produk OEM Impor maksimal 3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		f. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermaterai g. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Formula/ komponen dan prosedur pembuatan b. DKP untuk setiap PKRT yang didaftarkan (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Notifikasi Kelas 1 & 2) c. Spesifikasi bahan baku dan wadah (*hanya untuk permohonan Izin Edar PKRT Dalam Negeri Kelas 3) d. Spesifikasi dan stabilitas produk jadi e. Kegunaan dan contoh f. Data pendukung g. Persyaratan khusus	perubahan: 8 Hari (Notifikasi Kelas 1 & 2), 12 Hari (Kelas 3)				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
5	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha jasa pangan b. Dokumen pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji (*self assessment*), menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) c. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji atau higiene sanitasi depot air minum bagi pengelola/penanggung jawab TPP d. Sertifikat kursus penjamah pangan/operator depot air minum dan jumlahnya sesuai ketentuan, atau Sertifikat kompetensi yang	30 Hari	1. Memasang logo SLHS di tempat yang mudah terlihat pengunjung pada tempat usaha, kemasan/produk dan media promosi, serta pada tempat/ wadah/kemasan pangan. 2. Mencantumkan informasi kandungan gula, garam dan lemak total berupa logo Nutri-Level pada bagian depan kemasan, menu, dan/atau papan iklan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Laporan berkala pengawas-an internal untuk persyarat-an kesehatan (IKL) 1 (satu) tahun sekali 4. Laporan berkala pengawas-an internal untuk pengujian sampel pangan 2 (dua) tahun sekali	5 tahun	Tempat Pengelola Pangan (TPP) berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan dan pos lintas batas negara	Menteri/ Kepala Badan
						TPP berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dikeluarkan oleh lembaga terlisensi e. Dokumen keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk penjamah pangan/operator depot air minum 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. TPP memenuhi persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, menggunakan formulir IKL b. Hasil uji laboratorium sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan Siap Saji yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah c. Hasil uji laboratorium kandungan gula, garam, dan lemak total pangan olahan		5. Laporan berkala pengawas-an internal khusus penguji-an sampel air minum pada Depot Air Minum sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang kualitas air minum			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		siap saji yang diterbitkan oleh laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
6	Sertifikat Laik Sehat (SLS)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha jasa akomodasi tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga b. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji sesuai dengan ketentuan pada persyaratan teknis SLHS c. Sertifikat kursus petugas kebersihan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertifikat kursus keamanan pangan siap saji untuk Tempat	30 Hari	1. Melaporkan hasil pengawasan internal inspeksi kesehatan lingkungan setiap 1 (satu) tahun sekali 2. Melaporkan hasil pengawasan internal pemeriksaan pemenuhan persyaratan standar baku mutu kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap 1 (satu) tahun sekali	5 tahun	Akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum dan tempat olahraga berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pengelola Pangan (TPP) di luar manajemen akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Bukti pemenuhan persyaratan akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan				lintas batas negara	
						Akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandi-an umum dan tempat olahraga berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kualitas air di kolam renang, SPA, tempat pemandian umum sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					
7	Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP)	1. Persyaratan administrasi yang meliputi terdaftar di dinas kesehatan kabupaten/kota/puskesmas. 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi persyaratan kesehatan sesuai formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	15 Hari	Memasang Label HSP di Tempat Pengelolaan Pangan	2 tahun	Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) berlokasi di wilayah bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Pengelola/penanggung jawab dan penjamah pangan mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji.				TPP berlokasi di wilayah Kabupaten /Kota	Bupati/ Walikota
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
8	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan (CPB untuk Alkes)	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Jenis alat kesehatan yang diproduksi 4. *Self-assessment* 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per-tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
9	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (CPB untuk PKRT)	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Jenis PKRT yang diproduksi 4. *Self-assessment* 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
10	Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Kelompok alat kesehatan yang didistribusikan 4. *Self-assessment*	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
11	Sertifikat Cara Distribusi yang baik (CDB) untuk Alat Kesehatan Cabang	1. Perizinan berusaha 2. Sarana dan prasarana 3. Kelompok alat kesehatan yang didistribusikan 4. *Self-assessment* 5. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)	30 Hari	Laporan hasil audit internal per tahun	5 tahun	Seluruh	Gubernur
12	Penetapan Penyelenggaraan Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan unit laboratorium pengolahan sel dan/atau sel punca di rumah sakit c. Profil Laboratorium Pengolahan Sel dan/atau Sel Punca di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasaran, dan prosedur b. Daftar peralatan	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Daftar sumber daya manusia sesuai kewenangan dan kompetensi					
13	Penetapan Penyelenggaraan Bank Sel, Bank Sel Punca, dan/atau Bank Jaringan di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan bank sel, bank sel punca, dan/atau bank jaringan di rumah sakit c. Profil bank sel, bank sel punca, dan/atau bank jaringan di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan prosedur b. Daftar peralatan c. Daftar sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	Penetapan Penyelenggaraan Penelitian Berbasis Pelayanan Terapi Sel Punca dan/atau Sel	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit c. Dokumen *self assessment* penelitian berbasis pelayanan terapi sel punca dan/atau sel paling sedikit terdiri atas standar SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan peralatan b. Daftar sumber daya manusia (SDM) sesuai kewenangan dan kompetensi c. Dokumen struktur organisasi d. Persyaratan pelayanan	25 Hari	1. Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun 2. Melakukan audit mutu internal dan eksternal	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Penetapan Aktivitas Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis	1. Persyaratan administrasi yang meliputi dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik utama 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sumber daya manusia (SDM), struktur organisasi, pelayanan, ruangan, prasarana, peralatan, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sarana/ prasarana untuk pengelolaan limbah, dan sarana/prasarana lain untuk rumah sakit atau klinik utama yang menyelenggarakan pelayanan dialisis b. SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi ketenagaan pelayanan dialisis c. Dokumen struktur organisasi rumah sakit	25 Hari	1. Melakukan pelaporan/ registrasi pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun 2. Menyelenggarakan pelayanan Dialisis berupa HD dan Dialisis Peritoneal	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		atau klinik utama yang memberikan pelayanan dialisis d. Dokumen kerja sama dengan rumah sakit rujukan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis (*berlaku untuk klinik utama)					
16	Penetapan Pelayanan Medis Hiperbarik	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit atau klinik b. Dokumen pembentukan unit pelayanan Terapi Oksigen Hiperbarik (TOHB) di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen profil pelayanan medik terapi oksigen hiperbarik di rumah sakit atau klinik yang terdiri	25 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari: 1) daftar sarana, prasarana, dan peralatan 2) daftar sumber daya manusia (SDM) 3) daftar pelayanan b. Persyaratan SDM					
17	Penetapan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) pemanfaatan zat radioaktif dari BAPETEN c. Dokumen PB UMKU sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen surat izin praktek dokter Spesialis dengan kompetensi di bidang Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler	14 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen surat izin praktek tenaga kesehatan c. Dokumen organisasi pelayanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit dapat berupa instalasi/ departemen/ bagian atau organisasi lain sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit d. Dokumen sistem administrasi pelayanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler e. Daftar SDM f. Daftar sarana, prasarana, bangunan dan peralatan					
18	Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Radioterapi	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)	14 Hari	Melakukan pelaporan/registrasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemanfaatan zat radioaktif dari BAPETEN c. Dokumen *self assessment* sesuai dengan persyaratan khusus sarana, ketenagaan, dan peralatan. 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen organisasi pelayanan medik radioterapi/pelayanan medik spesialistik onkologi radiasi b. Daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan jenis kemampuan pelayanan medik radioterapi/pelayanan medik spesialistik onkologi radiasi yang diusulkan c. Dokumen profil penyelenggaraan pelayanan medik onkologi radiasi di rumah sakit					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Dokumen surat perjanjian kerjasama rumah sakit dengan pihak penyedia/ vendor/ importir mengenai *re-export*/pengelolaan limbah radioaktif, jika pelayanan medik radioterapi menggunakan bahan radioaktif berupa radioisotope e. Daftar SDM f. Daftar sarana, prasarana, dan peralatan					
19	Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi c. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit d. Dokumen penetapan unit penyelenggara pelayanan teknologi reproduksi berbantu di rumah sakit	28 Hari	1. Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun 2. Melakukan audit mutu internal dan eksternal	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang telah mendapatkan perizinan berusaha 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Dokumen profil unit penyelenggara pelayanan teknologi reproduksi berbantu b. Daftar sarana, prasarana, peralatan, dan prosedur c. Daftar SDM sesuai kewenangan dan kompetensi d. Dokumen prosedur untuk memastikan kesehatan dan keselamatan kerja personel laboratorium serta penanganannya baik dari agen biologi maupun bahan berbahaya dan beracun dan lingkungan sekitarnya e. Dokumen prosedur untuk pengendalian dan penanganan limbah medis yang dihasilkan (tidak termasuk pengangkutan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan pengolahan dan pemusnahan) f. Dokumen struktur organisasi g. Persyaratan pelayanan					
20	Penyelenggaraan Transplantasi Organ di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit c. Dokumen rekomendasi Komite Transplantasi Nasional d. Dokumen *self assessment* pelayanan transplantasi organ di rumah sakit paling sedikit terdiri atas: SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan e. Dokumen penetapan tim transplantasi organ oleh kepala/direktur rumah sakit	28 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar SDM, sarana, prasarana, peralatan, administrasi, dan pelayanan b. SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi					
21	Penyelenggaraan Bank Mata di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen pembentukan bank mata di rumah sakit c. Profil Bank Mata di rumah sakit 2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Daftar sarana, prasarana, dan prosedur b. Daftar peralatan c. Daftar sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi bank mata	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun	Selama pelayan-an masih ber-langsung dan registrasi setiap tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Unit Pengelola Darah (UPD) di Rumah Sakit	1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Dokumen perizinan berusaha rumah sakit b. Dokumen profil UPD 2. Persyratan teknsi yang meliputi: a. Bangunan, sarana, prasarana dan peralatan UPD di rumah sakit b. SDM dan struktur organisasi UPD di rumah sakit c. Kemampuan pelayanan UPD di rumah sakit	25 Hari	Melakukan pelaporan/ registrasi pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
23	Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	1. Dokumen perizinan berusaha RS atau klinik utama yang masih berlaku 2. Profil RS atau klinik utama untuk penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CPMI 3. *Self assesment* penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan CPMI di rumah sakit atau klinik utama. 4. Dokumen struktur organisasi RS atau klinik utama yang memasukkan paling sedikit penanggung jawab	28 Hari	1. Menginput data hasil pemeriksaan kesehatan CPMI pada rekam medis elektronik milik RS atau klinik utama yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional dan BP2MI sesuai ketentuan yang berlaku 2. Melakukan pelaporan/ registrasi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan	Selama pelayan-an masih ber-langsung kecuali ada per-ubahan	Seluruh	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		penyelenggaraan pemeriksaaan kesehatan CPMI yang disahkan pimpinan RS atau klinik utama, termasuk dokumen uraian tugasnya 5. SIP tenaga medis/ tenaga kesehatan yang bekerja untuk pemeriksaan kesehatan CPMI. 6. Dokumen pengangkatan sebagai pegawai dan/atau perjanjian kerja sama antara pelaku usaha dengan pegawai RS atau klinik utama 7. Dokumen alur pemeriksaan kesehatan CPMI dan standar prosedur operasional kerja yang disahkan pimpinan RS atau klinik utama 8. Bukti penyelenggaraan rekam medis elektronik milik RS atau klinik utama yang telah terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional 9. Bukti manifest pengelolaan limbah B3 cair dan padat di RS atau klinik utama		CPMI sesuai ketentuan yang berlaku			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Data pendukung (jika diperlukan): 1. Dokumen perjanjian kerja sama dengan fasiltas pelayanan kesehatan lain terkait pemeriksaan kesehatan CPMI di luar pelayanan yang dimiliki oleh RS atau klinik utama 2. Dokumen persyaratan perubahan					
24	Penyelenggaraan Bank Plasma	1. Dokumen perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga penelitian 2. Dokumen profil bank plasma 3. Dokumen fasilitas bank plasma (termasuk denah bangunan, sarana, prasarana, dan peralatan) 4. Dokumen penanggung jawab bank plasma	25 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), untuk penyelenggara-an bank plasma 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan plasma	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
25	Penetapan Fasilitas Fraksionasi Plasma	1. Dokumen perizinan berusaha industri farmasi 2. Studi kelayakan untuk penyelenggaraan fraksionasi plasma	30 Hari	1. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Fasilitas Produksi Produk Obat Derivat Plasma	Selama pelaku usaha menja-lankan	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat pernyataan kesanggupan mendirikan dan menjalankan fasilitas Fraksionasi Plasma dalam negeri yang tersertifikasi cara pembuatan obat yang baik dalam waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan plasma dengan dukungan dari Bank Plasma dan/atau UPD 5. Rencana produksi produk obat derivat plasma		2. Menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan plasma, realisasi produksi produk obat derivat plasma, pemusnahan sisa fraksi plasma dan sisa plasma, dan distribusi produk obat derivat plasma hasil produksi	kegiatan usaha		
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
26	Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik untuk Alat Kesehatan dan PKRT Tertentu	1. Identitas pengawas internal 2. Daftar produk alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi 3. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan selama menjalankan usaha mikro dan usaha kecil alat kesehatan dan PKRT	7 Hari	1. Laporan produksi dan penjualan produk secara eceran 2. Laporan penanganan keluhan dan retur	5 tahun	Seluruh	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Toko Alat Kesehatan yang Baik	1. Identitas penanggung jawab toko alat kesehatan 2. Daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana 3. Daftar alat kesehatan yang dijual	7 Hari	Laporan penjualan produk secara eceran	5 tahun	Seluruh	Gubernur
28	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF)	1. Dokumen perizinan berusaha bidang perdagangan melalui sistem elektronik 2. Dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) 3. Dokumen apoteker penanggung jawab 4. Dokumen teknis PSEF (termasuk proses bisnis dan SDM) 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	14 Hari	Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik farmasi	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
29	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) Distribusi	1. Dokumen perizinan berusaha bidang perdagangan melalui sistem elektronik 2. Dokumen Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE)	14 Hari	1. Menerapkan ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) 2. Menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik farmasi distribusi	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Data apoteker penanggung jawab 4. Dokumen teknis PSEF Distribusi (termasuk proses bisnis dan SDM) 5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)					
30	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi Bahan Obat	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Ijazah apoteker 3. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 4. Surat pernyataan bekerja penuh 5. Surat perjanjian kerja sama 6. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4 Hari	1. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Melakukan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Memproduksi bahan obat sesuai standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 4. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan (Jika ada produksi/penyaluran) c. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi setiap tahun 5. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab 6. Apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab, Produksi, Pengawasan Mutu, Pemastian Mutu, dan Distribusi			
31	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Farmasi	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Ijazah apoteker 3. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 4. Surat pernyataan bekerja penuh 5. Surat perjanjian kerja sama	4 Hari	1. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Melakukan farmakovigilans sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		3. Memproduksi obat sesuai standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 4. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat setiap triwulan b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika dan/atau prekursor farmasi setiap bulan (Jika ada produksi/penyaluran) c. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat setiap tahun 5. Surat permohonan pergantian apoteker penanggung jawab apabila terjadi perubahan atau pergantian apoteker penanggung jawab, produksi,			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pengawasan mutu, pemastian mutu, dan distribusi			
32	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Ekstrak Bahan Alam	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3. KTP 4. Surat pernyataan bekerja penuh waktu 5. Perjanjian kerja sama 6. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4 Hari	1. Memproduksi ekstrak bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran ekstrak bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi ekstrak bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pergantian Apoteker Penanggung Jawab			
33	Surat Keterangan Apoteker Penanggung Jawab Industri Obat Bahan Alam	1. Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) 2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) 3. KTP 4. Surat pernyataan bekerja penuh waktu 5. Perjanjian kerja sama 6. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	4 Hari	1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Kecil Obat Bahan Alam	1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penanggung jawab teknis dengan ketentuan: a. Paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi atau b. Paling rendah tenaga vokasi farmasi yang memiliki sertifikat pelatihan atau Apoteker bagi UKOBA yang memproduksi kapsul dan/atau cairan obat dalam. 2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kefarmasian 3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kefarmasian 4. KTP 5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 6. Perjanjian Kerja Sama 7. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)	4 Hari	1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Penanggung Jawab Teknis apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Penanggung Jawab Teknis	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Gubernur
35	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam	1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi atau Tenaga Kesehatan Tradisional	4 Hari	1. Memproduksi obat bahan alam sesuai standar dan persyaratan Farmakope	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jamu sebagai Penanggung Jawab Teknis 2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan 3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kesehatan 4. KTP 5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 6. Perjanjian Kerja Sama 7. Bukti Pembayaran Penerimaan Asli Daerah (PAD)		Herbal Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui 2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran obat bahan alam setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi obat bahan alam setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Apoteker Penanggung Jawab			
36	Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Industri Kosmetik	1. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknis dengan ketentuan: a. Apoteker untuk Industri Kosmetik golongan A	4 Hari	1. Memproduksi kosmetik sesuai standar dan persyaratan menggunakan bahan baku sesuai Kodeks Kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui	Selama kegiatan operasio-nal	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. paling rendah Tenaga Vokasi Farmasi untuk Industri Kosmetik golongan B 2. Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kefarmasian 3. Surat Izin Praktek bagi Tenaga Kefarmasian 4. KTP 5. Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu 6. Perjanjian Kerja Sama 7. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		2. Menyampaikan laporan, meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran kosmetik setiap 6 bulan b. Laporan investasi, rencana produksi dan kapasitas produksi kosmetik setiap tahun 3. Surat Permohonan Pergantian Penanggung Jawab Teknis apabila terjadi Perubahan atau Pergantian Penanggung Jawab Teknis			
37	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Dalam Negeri	1. Informasi produk meliputi nama produk, export name (bila ada), nomor izin edar, bahan baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan, dan informasi negara tujuan 2. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui serta	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jika ada penandaan dengan *export name* 3. Surat pernyataan diatas materai cukup yang menyatakan kesesuaian produk yang diekspor dengan produk yang telah memiliki izin edar di Indonesia (jika nama produk yang akan dicantumkan berbeda dengan nama produk yang telah memiliki izin edar)					
38	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Sertifikat Bebas Jual Untuk Produk Impor	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor izin edar, bahan baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan dan informasi negara tujuan 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku 3. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
39	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor -	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor izin edar, bahan	3 Hari	-	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sertifikat Pemberitahuan Ekspor	baku/aktif dan kegunaan, tipe/ukuran, spesifikasi, kemasan, penandaan dan informasi negara tujuan 2. Izin Distribusi Alat Kesehatan yang masih berlaku 3. Izin edar yang masih berlaku dan penandaan yang disetujui					
40	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan *Research Use Only*	1. Informasi produk meliputi nama produk, nomor katalog, nama pabrik dan jumlah produk yang akan diimpor dalam 2 (dua) tahun 2. Ringkasan kegunaan dan cara penggunaan produk 3. Brosur/ katalog dan data pendukung lainnya mengenai produk 4. Sertifikat/ surat keterangan untuk produk RUO dari instansi yang berwenang di negara asal pabrikan	3 Hari	Laporan distribusi produk RUO	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Rancangan penandaan RUO dan keterangan "hanya digunakan untuk tujuan non klinis" pada kemasan produk yang mudah terbaca 6. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan produk hanya digunakan untuk penelitian pada manusia dan atau untuk tujuan non klinis 7. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan untuk memberikan laporan distribusi produk RUO					
41	Surat Keterangan Pendukung Ekspor Impor - Surat Keterangan Kuasa Impor	1. Informasi produk meliputi nama pemberi dan penerima kuasa impor, nama produk, nomor izin edar, jumlah produk dan nomor invoice 2. Surat persetujuan memberikan kuasa pelaksanaan impor dari pemilik Izin Edar	3 Hari	Laporan kemanfaatan produk	Untuk 1 kali impor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa produk tidak akan diperjualbelikan 4. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesediaan untuk memberikan laporan distribusi produk 5. Izin Edar produk yang diterbitkan Kementerian Kesehatan dan masih berlaku					
42	Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan	**A. Uji Klinik Prapemasaran** (untuk alat kesehatan dengan klasifikasi kelas C dan Kelas D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia) a. Dokumen persyaratan umum, sarana, fasilitas dan kondisi lingkungan sesuai dengan Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik	20 Hari	1. Laporan perkembangan pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan, selambatnya setiap 6 (enam) bulan 2. Laporan saat berakhirnya pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan 3. Laporan jika terjadi penghentian Uji Klinik Alat	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Bukti Pembayaran PNBP atas Persetujuan Uji Klinik Prapemasaran **B. Uji Klinik Pascapemasaran** (untuk alat kesehatan dengan klasifikasi kelas C dan Kelas D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia) a. Dokumen persyaratan umum, sarana, fasilitas dan kondisi lingkungan sesuai dengan Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik b. Bukti pembayaran PNBP atas Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran		Kesehatan sebelum waktunya dengan menjelaskan alasannya dilakukan paling lambat 15 (lima belas) haru kerja sejak penghentian pelaksanaan Uji Klinik Alat Kesehatan 4. Laporan Kejadian Tidak Diinginkan yang Serius (KTDS) 5. Laporan perubahan dokumen Uji Klinik Alat Kesehatan harus mendapatkan amandemen persetujuan			

J2. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1.	Izin Edar Obat			1. Memenuhi Standar Izin Edar Obat. 2. Memenuhi standar Farmakope Indonesia yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau standar lainnya yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Menjamin keamanan, khasiat, mutu, dan label		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				obat serta melakukan pemantauan farmakovigilans dan pelaporan efek samping obat kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. 4. Memproduksi atau mengimpor obat paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan izin edar obat.			
	a. Permohonan Baru:	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.					
	1) Hasil Pra Registrasi hanya untuk obat baru, produk biologi, obat generik wajib bioekivalensi, obat generik impor, dan obat generik pertama		1. Pra registrasi = 40 Hari 2. Pra registrasi *Emergency Use Authorization* (EUA) = 6 jam		1 Tahun		
	2) Izin edar obat baru, obat generik, dan produk biologi		1. Registrasi obat khusus ekspor = 7 Hari 2. Registrasi pertama obat pengembangan baru dengan investasi di Indonesia = 50 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Registrasi pertama obat generik pertama dengan investasi di Indonesia = 75 Hari 4. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang diindikasikan untuk terapi penyakit serius yang mengancam nyawa manusia (*life saving*), dan/atau mudah menular kepada orang lain, dan/atau belum ada atau kurangnya pilihan terapi lain yang aman dan efektif = 100 Hari 5. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang berdasarkan justifikasi diindikasikan untuk penyakit serius dan langka				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(orphan drug) di Indonesia atau peralihan dari EUA menjadi izin edar = 100 Hari 6. Registrasi baru obat baru, produk biologi, obat generik, dan obat generik bermerek ditujukan untuk program kesehatan nasional yang dilengkapi dengan dokumen penunjang kebutuhan program atau hasil prakualifikasi Badan Kesehatan Dunia *(World Health Organization)* = 100 Hari 7. Registrasi pertama obat baru dan produk biologi dengan investasi di Indonesia = 100 Hari				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			8. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang telah melalui proses obat pengembangan baru dan paling sedikit 1 (satu) uji klinik dilakukan di Indonesia = 100 Hari 9. Registrasi baru obat generik yang memiliki formula, sumber bahan baku, spesifikasi obat, mutu, proses produksi, dan menggunakan fasilitas produksi yang sama dengan obat generik bermerek yang telah disetujui atau sebaliknya = 100 Hari				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			10. Registrasi baru untuk obat dan produk biologi baru yang telah disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 90 Hari 11. Registrasi baru obat generik dan obat generik bermerek yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi registrasi pertama obat baru dan produk biologi degnan investasi di Indonesia = 150 Hari 12. Registrasi baru obat baru dan produk biologi yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi registrasi 100				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(seratus) Hari dan 90 (sembilan puluh) Hari = 300 Hari				
	3) *Emergency Use Authorization* (EUA)		1. Obat baru dan Produk Biologi = 20 Hari 2. Obat generik = 5 Hari		Berlaku untuk penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang diperuntukan bagi pengobatan pasien sesuai dengan ketentuan		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					peraturan perundang-undangan		
	b. Perubahan:	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.					
	1) Hasil Pra Registrasi hanya untuk registrasi variasi major		1. Pra registrasi = 40 Hari 2. Pra registrasi *Emergency Use Authorization* = 6 jam		1 Tahun		
	2) Persetujuan Perubahan		1. Registrasi variasi obat baru dan produk biologi terkait mutu yang telah disetujui		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 75 Hari 2. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru untuk obat yang ditujukan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2.4 sampai dengan butir 1.a.2.6 pada registrasi obat baru dan produk biologi = 100 Hari 3. Registrasi variasi major obat baru, produk biologi, dan obat generik terkait mutu dan informasi produk = 100 Hari 4. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			untuk obat dan produk biologi baru yang telah disetujui paling sedikit di 1 (satu) negara dengan sistem evaluasi yang telah dikenal baik = 90 Hari 5. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru obat baru dan produk biologi yang tidak termasuk dalam jalur evaluasi 100 (seratus) Hari dan 90 (sembilan puluh) Hari = 300 Hari 6. Registrasi variasi major indikasi baru/posologi baru untuk *Emergency Use Authorization* (EUA) obat baru dan produk biologi = 20 Hari				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7. Registrasi variasi minor = 40 Hari 8. Registrasi variasi minor notifikasi (*do and tell*) = 20 Hari				
	c. Perpanjangan: Izin edar obat baru, obat generik, dan produk biologi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait mutu dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
2.	Izin Edar Obat Bahan Alam			Memenuhi Standar Izin Edar Obat Bahan Alam berupa Farmakope Herbal Indonesia dan standar dan/atau persyaratan selain farmakope herbal Indonesia yang diatur/ ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru						
	1) Hasil Pra Registrasi Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Pra Registrasi Obat Bahan Alam berupa Jamu/Obat Herbal Terstandar/ Fitofarmaka/Obat Bahan Alam lainnya = 15 Hari 2. Pra Registrasi Obat Bahan Alam berupa Jamu komposisi Tertentu = 10 Hari		20 Hari		
	2) Izin Edar Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Jamu Sederhana = 7 Hari 2. Registrasi Jamu Komposisi Tertentu = 15 Hari 3. Registrasi Jamu Komposisi Kompleks = 30 Hari 4. Registrasi Obat Herbal Terstandar = 90 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			5. Registrasi Fitofarmaka = 90 Hari 6. Registrasi Obat Bahan Alam Lisensi: 30 Hari 7. Registrasi Obat Bahan Alam Impor = 90 Hari 8. Registrasi Obat Bahan Alam Lainnya = 90 Hari 9. Registrasi Obat Bahan Alam Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan:						
	Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Variasi Mayor Obat Bahan Alam = 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Obat Bahan Alam dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Obat Bahan Alam dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan:						
	Izin Edar Registrasi Ulang Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Bahan Alam.	1. Registrasi Ulang Obat Bahan Alam tanpa perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Obat Bahan Alam disertai perubahan = 30 Hari		Maksimal 5 Tahun		
3.	Izin Edar Obat Kuasi			Memenuhi Standar Izin Edar Obat Kuasi berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, Kodeks Kosmetika Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru:						
	1) Hasil Pra Registrasi Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	15 Hari		20 Hari		
	2) Izin Edar Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Obat Kuasi dalam negeri dengan bahan aktif atau Komposisi yang sudah diketahui profil keamanan dan khasiatnya = 30 Hari 2. Registrasi Obat Kuasi dalam negeri dengan bahan aktif atau Komposisi yang belum diketahui profil keamanan dan khasiatnya = 50 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3. Registrasi Obat Kuasi impor = 60 Hari 4. Registrasi Obat Kuasi Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan: Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Variasi Mayor Obat Kuasi = 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Obat Kuasi dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Izin Edar Registrasi Ulang Obat Kuasi	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Obat Kuasi.	1. Registrasi Ulang Obat Kuasi tanpa disertai perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Obat Kuasi disertai perubahan = 30 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Izin Edar Suplemen Kesehatan			Memenuhi Standar Izin Edar Suplemen Kesehatan berupa Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia, dan/atau persyaratan lain yang diatur/ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru						
	1) Hasil Pra Registrasi Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis berupa formula produk, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. 15 Hari untuk: a. registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal selain vitamin dan mineral atau kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan dan		20 Hari		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kemanfaatannya (Kategori 2); b. registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru, posologi baru, klaim baru, bentuk sediaan baru, atau belum diketahui profil keamanan dan manfaatnya (Kategori 3); dan c. registrasi baru impor (Kategori 4). 2. 10 Hari untuk registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal berupa vitamin atau mineral yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 1).				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Izin Edar Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal berupa vitamin atau mineral yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 1) = 15 Hari 2. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal selain vitamin dan mineral atau kombinasi yang sudah diketahui profil keamanan dan kemanfaatannya (Kategori 2) = 30 Hari 3. Registrasi Suplemen Kesehatan dalam negeri dengan bahan aktif tunggal atau kombinasi yang baru, posologi baru, klaim baru,		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			bentuk sediaan baru, atau belum diketahui profil keamanan dan manfaatnya (Kategori 3) = 50 Hari 4. Registrasi baru Suplemen Kesehatan impor (Kategori 4) = 50 Hari 5. Registrasi Suplemen Kesehatan Ekspor = 3 Hari				
	b. Perubahan: Surat Persetujuan Perubahan Izin Edar Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Variasi Mayor Suplemen Kesehatan= 30 Hari 2. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Persetujuan = 7 Hari 3. Registrasi Variasi Minor Suplemen Kesehatan dengan Notifikasi = 5 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan: Izin Edar Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis terkait keamanan dan khasiat, mutu, dan/atau penandaan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Suplemen Kesehatan.	1. Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan tanpa disertai perubahan = 10 Hari 2. Registrasi Ulang Suplemen Kesehatan disertai perubahan = 30 Hari				
5.	Izin Edar Kosmetik			Memenuhi Standar Izin Edar Kosmetik, berupa Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar dan/atau persyaratan lain yang diatur dengan peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan mutu, sesuai dengan standar dan/atau persyaratan penerbitan izin edar kosmetik.			Maksimal 3 tahun		
	1) Notifikasi Baru		1. Notifikasi Baru untuk Kosmetik selain tipe produk sediaan wangi-wangian = 14 Hari 2. Notifikasi Baru untuk Kosmetik tipe produk sediaan wangi-wangian = 3 Hari				
	2) Notifikasi Kosmetik Kit		3 Hari				
	3) Notifikasi Baru Kosmetik khusus ekspor		3 Hari				
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau			Maksimal 3 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan/atau mutu, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Kosmetik.					
	1) Notifikasi Perubahan /Variasi Perusahaan/ Pabrik		14 Hari				
	2) Notifikasi Perubahan/ Variasi Kemasan		3 Hari				
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Kosmetik.			Maksimal 3 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Pembaruan Notifikasi Kosmetik		1. Pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik selain tipe produk sediaan wangi-wangian = 14 Hari 2. Pembaruan Kosmetik untuk Kosmetik tipe produk sediaan wangi-wangian = 3 Hari				
	2) Pembaruan Notifikasi Kosmetik Kit		3 Hari				
	3) Pembaruan Notifikasi Kosmetik khusus ekspor		3 Hari				
6.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan		1 Hari	1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari	Memenuhi ketentuan komitmen yang tercantum dalam PB-UMKU paling lama 12 (dua belas) bulan sejak PB-UMKU diterbitkan.	5 tahun		
	b. Perubahan 1) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan 2) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan	Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan	1 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
7.	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	5 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
	1) Sertifikat Persetujuan Variasi Mayor Pangan Olahan		5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Sertifikat Persetujuan Variasi Minor Pangan Olahan		1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan 2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat	1 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.					
8.	Izin Edar Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan. 2. Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.	1. Tanpa Notifikasi =30 Hari 2. Dengan Notifikasi= 15 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan:	1. dokumen administratif; dan/atau 2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan.					
	1) Izin Variasi Mayor Pangan Olahan	`	30 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan		1 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan	1. rancangan label; dan 2. dokumen teknis terkait label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.	1 Hari		5 Tahun		
9.	Izin Variasi Akun Perusahaan	Dokumen administratif dan/atau dokumen teknis terkait perubahan pada akun perusahaan	10 Hari	Memenuhi Standar Izin Variasi Akun Perusahaan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Variasi Akun Perusahaan.					
10.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan	1. surat pernyataan atau keterangan dari perusahaan yang menjelaskan tujuan dan batas waktu untuk promosi; 2. rancangan label promosi; dan 3. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis terkait keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan.	1 Hari	1 Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan. 2 Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Maksimal 5 Tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)			1. Memenuhi Standar Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. 2. Memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga serta pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang		Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. pernyataan pemenuhan komitmen; 3. data pangan olahan yang didaftarkan; 4. data label; dan 5. rancangan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	Terbit otomatis		Maksimal 5 Tahun		
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau	5 Hari		Mengikuti masa		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada standar dan/atau persyaratan penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; 2. data pangan olahan yang didaftarkan; 3. data label; dan 4. rancangan label, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	Terbit otomatis		Maksimal 5 Tahun		
12.	Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Izin Pemenuhan	Maksimal 5 Tahun	Pangan olahan tertentu	Bupati/ Walikota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Industri Rumah Tangga (IPP-IRT)			Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT). 2. Memenuhi standar cara produksi pangan olahan yang baik untuk industri rumah tangga serta pemeriksaan sarana industri rumah tangga pangan yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan		yang diproduksi oleh industri rumah tangga	

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				di bidang pengawasan obat dan makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. pernyataan pemenuhan komitmen; 3. data pangan olahan yang didaftarkan; 4. data label; 5. rancangan label; dan 6. hasil uji Bahan Tambahan Pangan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).	5 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	b. Perubahan	1. dokumen administratif; dan/atau	5 Hari		Mengikuti masa		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada standar dan/atau persyaratan penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; 2. data pangan olahan yang didaftarkan; 3. data label; 4. rancangan label; dan 5. hasil uji Bahan Tambahan Pangan, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT).	5 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin	1. dokumen administratif berupa: a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin; b. sertifikat analisis; c. Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin dari Badan Otoritas Negara Tempat Vaksin Diluluskan; d. protokol ringkasan Bets/Lot (*Summary Batch/Lot Protocol*); dan e. surat persetujuan Izin Edar/EUA/surat	1. Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin yang telah dilengkapi dengan *Certificate of Release* dari negara asal = 7 Hari 2. Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin yang tidak dilengkapi dengan *Certificate of Release* dari negara asal = 84 Hari	Memenuhi Standar Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin.	Untuk tiap bets/lot produksi yang akan diedarkan	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		persetujuan pemasukan Vaksin melalui SAS. 2. dokumen teknis: Vaksin yang diproduksi dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia, dan/atau tujuan ekspor, berupa: a. surat keterangan impor; dan b. berita acara sampling, sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pelulusan Bets/Lot Vaksin.					
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
14.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)			1. Memenuhi Standar Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Melaporkan kegiatan berusaha kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaporkan Dokumen Induk Industri Farmasi 6 (enam) bulan setelah terbit sertifikat dan 1 (satu) bulan sejak perubahan.			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				5. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Sertifikat CPOB. 6. Wajib menotifikasi/mengajukan persetujuan perubahan fasilitas produksi yang telah tersertifikasi CPOB. 7. Perpanjangan Sertifikat CPOB wajib diajukan paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CPOB berakhir.			
	a. Permohonan Baru						
	1) Sertifikasi Baru	1. Panduan mutu atau dokumen setara terkait pembuatan obat	35 Hari		Maksimal 5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan/atau bahan obat sesuai dengan standar CPOB. 2. Surat pernyataan dari penanggung jawab pemastian mutu yang menyatakan telah tersedia dokumen sebagai berikut: a. ringkasan laporan kualifikasi sarana penunjang kritis sampai dengan tahap kualifikasi kinerja, khusus untuk kualifikasi sistem pengolahan air paling sedikit sampai dengan tahap kualifikasi kinerja fase 1 (satu); b. kualifikasi personil kunci; c. kualifikasi instalasi dan operasional peralatan produksi dan pengujian,					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		khusus untuk sterilisator termasuk kualifikasi kinerja; dan d. protokol dan laporan validasi metode analisis, protokol validasi proses, protokol validasi pembersihan, dan protokol validasi media fill untuk proses aseptis.					
	2) Persetujuan Penambahan gudang di luar lokasi pabrik	1. sertifikat CPOB; 2. dokumen administratif berkaitan dengan penambahan gudang di luar lokasi pabrik; dan 3. dokumen teknis berkaitan denah ruangan, perjanjian sewa, pengendalian perubahan dan kajian risiko mutu, dokumen kualifikasi personil,	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	b. Perubahan						
	1) Perubahan fasilitas	1. daftar perubahan fasilitas; 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan; dan 3. dokumen kualifikasi/validasi terkait perubahan.	1. Perubahan fasilitas yang memerlukan inspeksi = 35 Hari 2. Perubahan fasilitas yang tidak memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Perubahan administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan						
	1) Sertifikat CPOB	1. Daftar perubahan bermakna sejak pengawasan CPOB terakhir; 2. Daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB terakhir; 3. Pengkajian mutu produk (obat) periode terakhir untuk tiga	1. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan inspeksi = 10 Hari 2. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk (obat) yang paling banyak diproduksi di fasilitas yang akan diajukan perpanjangan Sertifikat CPOB; dan 4. Perkembangan tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CPOB terakhir.					
	2) Persetujuan gudang di luar lokasi pabrik	1. Daftar perubahan bermakna sejak pengawasan CPOB terakhir; 2. Daftar penyimpangan sejak pengawasan CPOB terakhir; dan 3. Perkembangan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CPOB terakhir.	1. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang tidak memerlukan inspeksi = 10 Hari 2. Perpanjangan Sertifikat CPOB yang memerlukan inspeksi = 35 Hari		Maksimal 5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB)			1. Memenuhi Standar Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. Dokumen induk Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam;	35 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan Obat; 3. Sertifikat CPOBAB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan sesuai dengan permohonan jika menggunakan fasilitas bersama dengan Obat; dan 4. surat pernyataan komitmen untuk permohonan Sertifikat CPOBAB.					
	b. Perubahan				Mengikuti masa berlaku sertifikat		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. Dokumen pengendalian perubahan; 2. Dokumen pendukung terkait perubahan; 3. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif; dan 4. Sertifikat CPOBAB terkait sebelumnya yang masih berlaku.	14 Hari				
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas yang Memerlukan Inspeksi dan Tidak Memerlukan Inspeksi	1. Daftar perubahan fasilitas; 2. Dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan; 3. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif; dan 4. Sertifikat CPOBAB terkait sebelumnya yang masih berlaku.	35 Hari				
	c. Perpanjangan	1. Dokumen induk Industri Obat Bahan Alam (IOBA), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA),	35 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam; 2. Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama yang masih berlaku dengan bentuk sediaan sesuai dengan permohonan untuk sarana produksi yang menggunakan fasilitas bersama dengan Obat; 3. Sertifikat CPOB yang masih berlaku untuk bentuk sediaan sesuai dengan permohonan jika menggunakan fasilitas bersama dengan Obat. Dokumen induk IOT, IEBA, Usaha Kecil Obat Bahan Alam, atau Usaha Mikro Obat Bahan Alam; 4. Sertifikat CPOBAB; dan 5. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perkembangan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan/atau hasil inspeksi diri terakhir.					
16.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik Secara Bertahap			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara Bertahap. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Surat pernyataan komitmen untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap; dan 2. Surat pernyataan komitmen telah tersedianya dokumen mutu dilampiri denah bangunan produksi untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap.	55 Hari		3 Tahun		
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	1. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan 2. Dokumen pendukung terkait perubahan administratif.	55 Hari		Mengikuti masa berlaku sertifikat		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	c. Perpanjangan	1. Surat pernyataan komitmen telah tersedianya dokumen mutu dilampiri denah bangunan produksi untuk permohonan Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap; 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB secara Bertahap terkait sebelumnya; dan 3. Berita Acara Pemeriksaan dari Inspeksi Rutin bersama perkembangan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) 2 (dua) tahun terakhir dan / atau hasil inspeksi diri terakhir.	55 Hari		3 Tahun		
17.	Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)			1. Memenuhi Standar Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 Tahun		
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	Dokumen pendukung perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	1. dokumen penerapan 12 (dua belas) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 Tahun		
18.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Secara Bertahap Golongan A			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik secara Bertahap Golongan A.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	Dokumen pendukung perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Secara Bertahap Golongan A	1. dokumen penerapan 10 (sepuluh) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 2. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		
19.	Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B			1. Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik secara Bertahap Golongan B.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik untuk industri kosmetik golongan B yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; 2. dokumen penerapan 2 (dua) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 3. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	2) Persetujuan Perubahan Teknis	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; dan 2. Dokumen penerapan sistem mutu disesuaikan dengan perubahan teknis yang diajukan.	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) Golongan B	1. Denah Bangunan Industri Kosmetik sesuai prinsip CPKB; 2. dokumen penerapan 2 (dua) aspek sistem mutu sesuai dengan standar CPKB; dan 3. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	35 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)			1. Memenuhi Standar Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik. 2. Memenuhi Standar Cara Distribusi Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Dalam hal mengelola Obat, Obat yang diadakan, disimpan, dan disalurkan wajib memiliki PB-UMKU berupa Izin Edar Obat, atau Pemasukan Melalui Mekanisme Jalur Khusus atau *Special Access Scheme* (SAS). 4. Menyampaikan laporan kegiatan berusaha		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Mengajukan perubahan jika terdapat perubahan terhadap bisnis proses atau lokasi pada sertifikat CDOB. 6. Mengajukan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat CDOB berakhir.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis (untuk fasilitas distribusi) meliputi:	49 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat; b. daftar kategori-produk dan/atau aktivitas; c. struktur organisasi dan manajemen pengelolaan obat; d. daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/ terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai kategori produk yang didistribusikan; dan e. kebijakan mutu dan daftar SOP;					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. dokumen teknis (untuk pelaku usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan distribusi Obat) meliputi: a. data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, meliputi minimal: Apoteker; dan Tenaga ahli di bidang sistem elektronik dan/atau teknologi informasi; b. Diagram Bisnis proses sistem aplikasi; dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok melalui sistem.					
	b. Perubahan	1. Untuk Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang pada alamat dan lokasi berbeda, berupa: a. dokumen administratif; dan/atau b. dokumen teknis meliputi: 1) denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat; 2) daftar peralatan/ perlengkapan terkualifikasi/ terkalibrasi dalam operasional gudang	1. Perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi = 49 Hari 2. Perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi = 7 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai kategori produk yang didistribusikan; dan 3) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) penanggung jawab gudang baru. 2. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena penambahan gudang atau pindah gudang termasuk perubahan fungsi atau perluasan ruangan penyimpanan, ruangan pengemasan ulang, dan pelabelan ulang pada alamat yang sama: a. dokumen administratif; dan b. dokumen teknis berupa denah alur pengelolaan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		obat dan/atau bahan obat yang baru. 3. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena perubahan kategori produk dan/atau aktifitas: a. dokumen administratif; dan b. dokumen teknis meliputi: 1) denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat; 2) daftar peralatan/perlengkapan terkualifikasi/terkalibrasi dalam operasional gudang sesuai kategori produk dan/atau aktifitas; dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3) daftar kategori produk yang didistribusikan. 4. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang memerlukan inspeksi karena perubahan/ penambahan aktivitas menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kegiatan distribusi Obat: a. dokumen administratif; dan b. dokumen teknis meliputi: 1) data tenaga ahli dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, meliputi minimal: Apoteker; dan Tenaga ahli di bidang sistem elektronik dan/atau teknologi informasi;					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Diagram Bisnis proses sistem aplikasi; dan 3) Prosedur kualifikasi pelanggan dan pemasok melalui sistem. 5. Untuk perubahan Sertifikat CDOB yang tidak memerlukan inspeksi karena perubahan alamat yang tidak mengubah lokasi, perubahan alamat kantor, atau pengurangan gudang PBF atau PBF Cabang: a. dokumen administratif; dan/atau b. dokumen teknis meliputi: Denah alur pengelolaan obat dan/atau bahan obat.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis meliputi: a. dokumen inspeksi diri; dan	49 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil pengawasan CDOB dalam 4 (empat) tahun terakhir yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan.					
21.	Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat			1. Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bersama dengan Non-Obat.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, kapasitas laboratorium, matriks data produk non-	20 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		obat, spesifikasi bahan baku aktif dan penolong, dan peralatan yang digunakan, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	b. Perpanjangan	1. Sertifikat CPOB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi obat bersama dengan non-obat; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas	20 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terpasang, kapasitas peralatan produksi, kapasitas laboratorium, matriks data produk non-obat, spesifikasi bahan baku aktif dan penolong, dan peralatan yang digunakan, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPOB.					
	c. Perubahan	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
22.	Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik			Memenuhi Standar Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. memiliki penanggung jawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memiliki sarana yang memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk; dan 3. memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetika berupa: a. prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan; b. catatan persediaan/kartu stok kosmetika; c. prosedur tertulis dan catatan penanganan sampel pertinggal; d. prosedur tertulis dan catatan penarikan dan	12 Hari		Maksimal 1 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemusnahan kosmetika; dan e. prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran kosmetika.					
	b. Perubahan	Dokumen pendukung perubahan administratif.	5 Hari		Maksimal 1 Tahun		
23.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama dengan Kosmetik dan Pangan Olahan			1. Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi dan/atau Pengujian Obat Bahan Alam Bersama dengan Kosmetik dan Pangan Olahan. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat	Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat CPOBAB	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan bagi Industri Obat Bahan Alam atau Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat CPOBAB						

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1) Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOBAB untuk dari fasilitas yang akan digunakan bersama; 2. Sertifikat CPOBAB fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk fasilitas produksi IOT; 3. Formula produk yang akan diproduksi pada fasilitas bersama; 4. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas produksi; dan 5. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa:	20 Hari		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi non obat bahan alam, khusus fasilitas produksi; b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade/food grade*; c. produksi non obat bahan alam tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan obat bahan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		alam, khusus fasilitas produksi; dan d. memiliki kapasitas berlebih untuk menguji non obat bahan alam; 6. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, dan marker produk (jika ada), khusus untuk fasilitas produksi; 7. Protap pembersihan peralatan dan ruangan yang akan digunakan untuk produksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; 8. Protokol validasi pembersihan peralatan termasuk metode					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		analisa yang digunakan dalam validasi pembersihan, khusus untuk fasilitas produksi; 9. Protap dan *layout* penyimpanan bahan baku dan bahan kemas serta produk jadi untuk produk obat bahan alam dan non obat bahan alam yang akan diproduksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; dan 10. Perencanaan pengujian obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas pengujian.					
	2) Perpanjangan	1. Surat Persetujuan Penggunaan Bersama	20 Hari		Maksimal mengikuti		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Fasilitas Obat Bahan Alam dengan Kosmetik dan/atau Pangan yang dimohonkan untuk diperpanjang; 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPBOBAB terkini fasilitas yang akan digunakan bersama sesuai dengan bentuk sediaan fasilitas bersama yang dimohonkan dan masih berlaku; 3. Matriks data produk kosmetik dan/ atau pangan olahan yang diproduksi pada fasilitas obat bahan alam sesuai bentuk sediaan, mencakup: nama produk, nomor dan tanggal Izin Edar dan komposisi; 4. Matriks data peralatan produksi yang digunakan			masa berlaku sertifikat		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, marker produk; 5. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang; 6. Protap pembersihan peralatan yang digunakan bersama; 7. Protap pembersihan ruangan yang digunakan bersama; 8. *Risk assessment*/kajian penetapan marker yang mencakup faktor risiko dari produk obat bahan alam dan kosmetik/pangan olahan yang akan diproduksi di fasilitas bersama, serta tidak terbatas					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pada dosis terapetik terkecil, toksisitas, dan kelarutan; 9. Protokol dan laporan validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama; dan 10. Protokol dan laporan validasi metode analisa produk dengan marker tertentu.					
	b. Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam Bersama Kosmetik dan Pangan Olahan bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam yang memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik secara						

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bertahap						
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPOBAB atau Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOBAB Bertahap minimal Tahap 2 untuk dari fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk Fasilitas produksi bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam/Usaha Mikro Obat Bahan Alam , Fasilitas Pengujian bagi Usaha Kecil Obat Bahan Alam/Usaha Mikro Obat Bahan Alam; 2. Sertifikat CPOBAB fasilitas yang akan digunakan bersama, khusus untuk fasilitas produksi IOT; 3. Formula produk yang akan diproduksi pada fasilitas bersama;	1. Pelaksanaan Inspeksi 10 Hari 2. Evaluasi Hasil Inspeksi Sertifikasi = 5 Hari 3. Evaluasi CAPA = 15 Hari Kerja 4. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama = 5 Hari Kerja		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas produksi; 5. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: 1) masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi non obat bahan alam, khusus fasilitas produksi; 2) bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade / food grade*;					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3) produksi non-obat bahan alam tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan obat bahan alam, khusus fasilitas produksi; dan 4) memiliki kapasitas berlebih untuk menguji non-obat bahan alam. 6. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, dan marker					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		produk (jika ada), khusus untuk fasilitas produksi; 7. Protap pembersihan peralatan dan ruangan yang akan digunakan untuk produksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; 8. Protokol validasi pembersihan peralatan termasuk metode analisa yang digunakan dalam validasi pembersihan, khusus untuk fasilitas produksi; 9. Protap dan *layout* penyimpanan bahan baku dan bahan kemas serta produk jadi untuk produk obat bahan alam dan non-obat bahan alam yang akan diproduksi bersama, khusus untuk fasilitas produksi; dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		10. Perencanaan pengujian obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang, khusus untuk fasilitas pengujian.					
	b. Perpanjangan	1. Surat Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Bahan Alam dengan Kosmetik dan/atau Pangan yang dimohonkan untuk diperpanjang; 2. Sertifikat Pemenuhan Aspek CPBOBAB Bertahap Tahap II terkini fasilitas yang akan digunakan bersama sesuai dengan bentuk sediaan fasilitas bersama yang dimohonkan dan masih berlaku;	1. Pelaksanaan Inspeksi 10 Hari 2. Evaluasi Hasil Inspeksi Sertifikasi = 5 Hari 3. Evaluasi CAPA = 15 Hari 4. Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama = 5 Hari		Maksimal mengikuti masa berlaku sertifikat		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Matriks data produk kosmetik dan/ atau pangan olahan yang diproduksi pada fasilitas obat bahan alam sesuai bentuk sediaan, mencakup: nama produk, nomor dan tanggal Izin Edar dan komposisi; 4. Matriks data peralatan produksi yang digunakan bersama, mencakup: nama dan ID peralatan untuk tiap tahapan proses, nomor dokumen prosedur pembersihan, marker produk; 5. Perencanaan produksi obat bahan alam dan non obat bahan alam yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi silang;					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Protap pembersihan peralatan yang digunakan bersama; 7. Protap pembersihan ruangan yang digunakan bersama; 8. *Risk assessment*/kajian penetapan marker yang mencakup faktor risiko dari produk obat bahan alam dan kosmetik/pangan olahan yang akan diproduksi di fasilitas bersama, serta tidak terbatas pada dosis terapetik terkecil, toksisitas, dan kelarutan; 9. Protokol dan laporan validasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama; dan 10. Protokol dan laporan validasi metode analisa produk dengan marker tertentu.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)			Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku PKRT, jadwal produksi kosmetik dan PKRT, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	fasilitas produksi kosmetik bersama dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku PKRT, jadwal produksi kosmetik dan PKRT, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
25.	Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama			Memenuhi Standar Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dengan Obat Kuasi			Bersama dengan Obat Kuasi.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku obat kuasi, jadwal produksi kosmetik dan obat kuasi, peralatan yang digunakan, protokol dan	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
	b. Perubahan: Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung untuk perubahan administratif.	10 Hari		Maksimal 5 Tahun		
	c. Perpanjangan: Pembaharuan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Produksi Kosmetik Bersama dengan Obat Kuasi	1. Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai bentuk sediaan yang dimiliki; 2. Dokumen administratif berkaitan dengan permohonan penggunaan fasilitas produksi kosmetik bersama dengan obat kuasi; dan 3. Dokumen teknis berkaitan dengan data kapasitas terpasang, kapasitas	35 Hari		Maksimal 5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		peralatan produksi, komposisi dan spesifikasi bahan baku obat kuasi, jadwal produksi kosmetik dan obat kuasi, peralatan yang digunakan, protokol dan format verifikasi pembersihan peralatan yang digunakan bersama, serta dokumen mutu lain sesuai dengan standar CPKB.					
26.	Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan			1. Memenuhi Standar Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
	a. Permohonan Baru	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; dan 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk	35 Hari		Maksimal 5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memproduksi suplemen kesehatan; b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade/food grade*; c. produksi non-suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan d. sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		untuk memproduksi Suplemen Kesehatan akan mengikuti standar minimal CPOBAB.					
	b. Perubahan:				Mengikuti masa berlaku persetujuan		
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sebelumnya; dan	14 Hari				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen pendukung terkait perubahan.					
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa:	35 Hari				

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi suplemen kesehatan; b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade / food grade*; c. produksi non suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan d. Sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan untuk memproduksi Suplemen Kesehatan akan mengikuti standar minimal CPOBAB; 4. Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sebelumnya (untuk Perpanjangan dan Perubahan); dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Dokumen pendukung terkait perubahan.					
	c. Perpanjangan	1. Sertifikat CPPOB Industri Pangan jenis pangan terkait dari fasilitas yang akan digunakan memproduksi Suplemen Kesehatan yang masih berlaku; 2. Formula produk Pangan dan Suplemen Kesehatan yang akan diproduksi, bila fasilitas produksi yang digunakan sama; 3. Pernyataan Penanggung Jawab bahwa: a. masih memiliki kapasitas berlebih untuk memproduksi suplemen kesehatan;	35 Hari		Maksimal 5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. bahan baku aktif dan bahan penolong yang digunakan harus mempunyai kualitas (sekurang kurangnya) *pharmaceutical grade/food grade*; c. produksi non-suplemen kesehatan tidak mempengaruhi pelaksanaan pengujian untuk memastikan mutu produk dan tidak mempengaruhi penyimpanan suplemen kesehatan; dan d. sistem mutu yang diterapkan di fasilitas pangan yang digunakan untuk memproduksi Suplemen Kesehatan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		akan mengikuti standar minimal CPOBAB.					
27.	Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan. 2. Memenuhi aspek penyimpanan dan pendistribusian sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. Daftar Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang akan diimpor; 2. dokumen teknis:	14 Hari		3 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Surat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri di negara asal yang masih berlaku; b. Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan bentuk sediaan produk dari produsen di negara asal; c. Foto produk, kemasan/penandaan asli produk yang akan diimpor dilengkapi dokumen untuk					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyatakan spesifikasi penyimpanan produk secara valid dari produsen; dan d. Surat pernyataan sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis yang ditandatangani di atas materai.					
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat	14 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis perubahan fasilitas; 2. dokumen teknis; dan a. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan	14 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Dokumen pendukung teknis perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. Dokumen administratif: a. Formulir data teknis; dan b. Daftar Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan yang telah dan akan diimpor; 2. dokumen teknis: a. Surat penunjukan keagenan dan hak untuk melakukan registrasi dari industri	14 Hari		Maksimal 3 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		di negara asal yang masih berlaku; b. Sertifikat cara pembuatan yang baik sesuai dengan bentuk sediaan produk dari produsen di negara asal; c. Foto produk, kemasan/penandaan asli produk yang telah dan akan diimpor dilengkapi dokumen untuk menyatakan spesifikasi penyimpanan produk secara valid dari produsen;					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Surat pernyataan sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis yang ditandatangani di atas materai; dan e. Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan/atau Suplemen Kesehatan terkait sebelumnya.					
28.	Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai pemilik atau pemegang izin edar			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pemilik atau pemegang izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia. 2. Memenuhi aspek penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan mutu sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat kuasi dan/ atau suplemen	20 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kesehatan yang akan dikontrakan; 2. dokumen teknis: a. dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement*); b. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak: 1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat kuasi dan suplemen kesehatan; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan jenis pengujian yang dilakukan sendiri. c. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam, atau Industri Pangan; dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2) Sertifikat CPOB, CPOBAB atau Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					
	b. Perubahan						
	1) Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomendasi		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat kuasi dan/ atau suplemen kesehatan yang telah dan akan dikontrakan; 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan sebagai	20 Hari		Maksimal 5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya; b. Dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement*); c. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak: 1) Izin badan usaha di bidang pemasaran					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		obat kuasi dan suplemen kesehatan; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan sendiri.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam, atau Industri Pangan; dan 2) Sertifikat CPOB, CPOBAB atau Persetujuan Memproduksi Suplemen Kesehatan di Fasilitas Pangan terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.J2.122

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar			1. Memenuhi Standar Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai pemilik atau pemegang izin edar yang melakukan kontrak produksi dengan industri dan usaha obat bahan alam yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang berada di wilayah Indonesia.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Memenuhi aspek penyimpanan, pendistribusian, dan pengawasan mutu sesuai Standar Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 3. Memenuhi ketentuan mengenai pengawasan peredaran obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; a. formulir data teknis; dan b. daftar obat bahan alam yang akan dikontrakan; dan 2. dokumen teknis meliputi: a. dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement);* b. dokumen teknis pemberi kontrak:	20 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian yang dilakukan sendiri.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, atau Industri/Usaha di Bidang Obat Bahan Alam; dan 2) Sertifikat CPOB, atau CPOBAB terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Administratif	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis:	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan administratif.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2) Persetujuan Perubahan Fasilitas	1. dokumen administratif berupa formulir data teknis; dan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait	20 Hari		Mengikuti masa berlaku rekomen-dasi		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebelumnya yang masih berlaku; dan b. Dokumen pendukung perubahan fasilitas.					
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif: a. formulir data teknis; dan b. daftar obat bahan alam yang telah dan akan dikontrakan 2. dokumen teknis: a. Rekomendasi Badan Usaha di Bidang Pemasaran Obat Bahan Alam sebagai Pemilik atau Pemegang Izin Edar	20 Hari		Maksimal 5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang Melakukan Kontrak Produksi dengan Industri yang Memiliki Sertifikat Cara Pembuatan yang Baik yang Berada di Wilayah Indonesia terkait sebelumnya; b. Dokumen teknis perjanjian kontrak (*technical agreement*); c. Dokumen Teknis Pemberi Kontrak:					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1) Izin badan usaha di bidang pemasaran obat bahan alam; dan 2) Surat pernyataan memiliki laboratorium pengujian mutu dengan penanggung jawab teknis seorang Apoteker, yang disertai lampiran denah laboratorium, daftar instrumen pengujian yang dimiliki, dan ruang lingkup pengujian					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang dilakukan sendiri. d. Dokumen Teknis Penerima Kontrak: 1) Izin Industri Farmasi, atau Industri/Usaha di bidang obat bahan alam; dan 2) Sertifikat CPOB, atau CPOBAB terkait sesuai bentuk sediaan yang akan dikontrakkan yang masih berlaku.					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30.	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)			1. Memenuhi Standar Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. 2. Memenuhi Standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis meliputi: a. peta lokasi sarana produksi; b. denah bangunan (*lay out*) sarana produksi; c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi;	60 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		d. deskripsi Pangan Olahan; dan e. alur proses produksi beserta penjelasannya.					
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	60 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. dokumen teknis: a. peta lokasi sarana produksi; b. denah bangunan (*lay out*) sarana produksi;	60 Hari		5 Tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi; d. deskripsi Pangan Olahan; dan e. alur proses produksi beserta penjelasannya.					
31.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi			Memenuhi Standar Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru 1) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; dan	40 Hari		3 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 1	3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.					
	2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 2	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).	40 Hari		2 tahun		
	3) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan	40 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 3	4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)					
	b. Perubahan:						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	40 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan:						
	1) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana	1. Sistem Manajemen Mutu (Tim Program Manajemen Risiko dan pengendalian dokumen); 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; dan	40 Hari		3 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 1 hanya untuk 1 (satu) kali perpanjangan	3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.					
	2) Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi Untuk Tahap 3	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).	40 Hari		5 tahun		
32.	Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan			Memenuhi Standar Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan.			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Permohonan Baru	1. Sistem Manajemen Mutu; 2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).	40 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan						
	1) Persetujuan Perubahan Teknis	1. daftar perubahan pada sarana produksi/penambahan fasilitas baru; dan 2. dokumen pengendalian perubahan dan dokumen pendukung terkait perubahan.	40 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	2) Persetujuan Perubahan Administrasi	Dokumen pendukung terkait perubahan administrasi.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku izin penerapan		
	c. Perpanjangan	1. Sistem Manajemen Mutu;	40 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Program Keamanan Pangan Berbasis Risiko; 3. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; dan 4. Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).					
33.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran			Memenuhi Standar penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; dan 2. surat pernyataan pemenuhan komitmen.	1 Hari		5 tahun		
	b. Perubahan	1. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di	1 Hari		Mengikuti masa		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Sarana Peredaran yang masih berlaku; dan 2. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan.			berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang lama.	Terbit Otomatis		5 tahun		
34.	Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran			Memenuhi Standar penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.		Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
	a. Permohonan Baru	1. dokumen administratif; 2. dokumen sistem audit internal; 3. *layout* sarana; dan	20 Hari		5 tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. dokumen keamanan dan mutu pangan.					
	b. Perubahan	1. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang masih berlaku; dan 2. dokumen administratif dan/atau dokumen teknis sesuai dengan perubahan yang diajukan.	10 Hari		Mengikuti masa berlaku sertifikat		
	c. Perpanjangan	1. dokumen administratif; dan 2. Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang lama.	10 Hari		5 tahun		
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
35.	Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat	1. bukti pengajuan permohonan Registrasi Obat Impor pada tahap registrasi; dan	1. Penilaian Dokumen Registrasi Obat Impor terkait Pemenuhan Persyaratan CPOB = 15 Hari	1. Memenuhi Standar Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB	Maksimal 2 Tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Impor	2. dokumen Registrasi Obat Impor terkait pemenuhan persyaratan CPOB dari Produsen.	2. *Desktop Inspection* = 20 Hari Keputusan Penerbitan Hasil Inspeksi Lapangan Fasilitas Pembuatan Obat Impor = 22 Hari	terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor. 2. Memenuhi Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik yang diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.			
36.	Penilaian Obat Pengembangan Baru	1. Ringkasan dokumen mutu obat pengembangan baru; 2. Dokumen non klinik; 3. *Drug master file* (jika ada); 4. Program pengembangan klinik; 5. Dokumen Uji Klinik; dan	100 Hari	Memenuhi Standar Penilaian Obat Pengembangan Baru.	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		6. Dokumen pendukung lainnya, sesuai standar dan/atau persyaratan penerbitan hasil penilaian proses obat pengembangan baru.					
37.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai standar dan/atau persyaratan penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat.	1. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat = 20 Hari 2. Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat dalam rangka penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat = 15 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
38.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi	1. dokumen uji bioekivalensi; 2. dokumen obat uji dan komparator; 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Bioekivalensi					
39.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Bahan Alam.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
40.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Obat Kuasi	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Obat Kuasi.					
41.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
42.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Kosmetik	1. dokumen administratif; 2. dokumen teknis terkait protokol uji praklinik, produk/bahan uji, tim peneliti; dan 3. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Kosmetik.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik (PPUPK) Kosmetik.					
43.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Bahan Alam	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
44.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Suplemen Kesehatan	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
46.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Kosmetik	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Kosmetik.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Kosmetik.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
47.	Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam	1. laporan hasil uji praklinik obat bahan alam; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Obat Bahan Alam.					
48.	Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi	1. laporan hasil uji praklinik obat kuasi; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
49.	Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan	1. laporan hasil uji praklinik suplemen kesehatan; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan.	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Praklinik Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
50.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik obat bahan alam; dan 2. dokumen pendukung lainnya,	20 Hari	Memenuhi Standar Pelaporan Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Bahan Alam.					
51.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik obat kuasi; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi.	20 Hari	Memenuhi Standar Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Obat Kuasi.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
52.	Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan	1. laporan hasil uji klinik dan penelitian klinik suplemen kesehatan; dan 2. dokumen pendukung lainnya, sesuai Standar dan/atau Persyaratan Evaluasi Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik	20 Hari	Memenuhi Standar Hasil Uji Klinik dan Penelitian Klinik Suplemen Kesehatan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Suplemen Kesehatan.					
53.	Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan	1. dokumen uji klinik; 2. dokumen produk uji klinik; dan 3. dokumen pendukung lainnya sesuai Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) Pangan Olahan.	20 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan.	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
54.	Persetujuan Iklan Obat	1. izin edar dan penandaan/label produk/variasi terakhir yang disetujui; 2. rancangan iklan; dan 3. dokumen pendukung lainnya bila diperlukan sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat.	1. Iklan Kategori Layanan Notifikasi = 1 Hari 2. Iklan Kategori Minor =10 Hari 3. Iklan Kategori Mayor = 25 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55.	Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga
56.	Persetujuan Iklan Obat Kuasi	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Obat Kuasi.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Obat Kuasi.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57.	Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan	1. dokumen administratif 2. dokumen teknis berupa: a. izin edar dan penandaan produk/variasi terakhir yang disetujui; b. rancangan iklan; dan c. dokumen teknis lainnya sesuai dengan Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan.	1. Iklan Kategori mayor = 30 Hari 2. Iklan kategori minor = 5 Hari	Memenuhi Standar Persetujuan Iklan Suplemen Kesehatan.	Maksimal 5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Lembaga

J3. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PANGAN SEGAR

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PEREDARAN PRODUK (A)							
1	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT)	**A. Permohonan baru/ perpanjangan/penambahan ruang lingkup SPPB-PSAT** 1. Mengisi formulir keterangan informasi unit penanganan 2. Denah ruang penanganan PSAT 3. Diagram alir penanganan PSAT 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 5. Standar Operasi Prosedur (SOP) penanganan PSAT yang baik a. SOP penanganan PSAT sesuai diagram alir b. SOP Sanitasi Higienis (SOP kebersihan, kesehatan	60 Hari	Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT	5 tahun	Penanganan produk produksi luar negeri	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		karyawan, pengendalian hama, SOP *recall*, dll) c. Bukti penerapan SOP berupa catatan/rekaman 6. Apabila ada, dapat melampirkan sertifikat jaminan keamanan pangan berbasis SNI ISO 22000 atau HACCP, atau sertifikat jaminan keamanan pangan lainnya yang menjadikan SPPB-PSAT sebagai persyaratan **B. Pengalihan Kepemilikan SPPB-PSAT** 1. Fotokopi SPPB-PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 2. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT				Penanganan produk produksi dalam negeri	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT PSAT sebagai persyaratan					
2	Izin Edar PSAT Produksi Luar Negeri (PSAT-PL)	**A. Permohonan Awal/Perpanjangan Izin Edar PSAT-PL** 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang	14 Hari	1. Mencantumkan nomor Izin Edar pada label dan/atau kemasan 2. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT 3. Menggunakan label dan kemasan sesuai desain yang telah disetujui 4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan 5. Menyampaikan laporan hasil uji minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dari 5 tahun 4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PL 5. *Certificate of Analysis* (CoA) dari negara asal atau Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT yang diterbitkan paling lama 6 bulan terakhir 6. Desain label dan kemasan 7. Diagram Alir Penanganan PSAT di luar negeri 8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya 10. Sertifikat jaminan Keamanan PSAT dan/atau Mutu PSAT dari negara					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		asal (bagi yang memiliki) **B. Perubahan Data Izin Edar PSAT-PL** 1. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 4. Surat Pernyataan yang berisi tentang perubahan data 5. Mengisi formulir keterangan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perubahan data Izin Edar PSAT-PL 6. Desain label dan kemasan lama 7. Desain label dan kemasan baru **C. Pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PL yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Surat Pernyataan tentang kebenaran pengalihan kepemilikan 5. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PL					
3	Izin Edar PSAT Produksi Dalam Negeri (PSAT-PD)	**A. Permohonan awal/perpanja-ngan Izin Edar PSAT-PD** 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 4. SPPB-PSAT sesuai ruang lingkup penanganan PSAT-PD	14 Hari	1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan 2. Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT 3. Komitmen menggunakan label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan 4. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan	5 tahun	Seluruh	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan perundang-undangan 6. Desain label dan kemasan 7. Diagram Alir Penanganan PSAT 8. Bukti pemenuhan klaim untuk produk dengan klaim 9. Laporan Hasil Uji Mutu PSAT untuk PSAT yang diatur mutunya **B. Perubahan data Izin Edar PSAT-PD** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan		6. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebelum berakhirnya masa berlaku) 4. Surat Pernyataan yang berisi tentang kebenaran perubahan data 5. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PD 6. Desain label dan kemasan lama 7. Desain label dan kemasan baru **C. Pengalihan Kepemilikan Izin Edar PSAT-PD** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Surat pernyataan memelihara SPPB-PSAT apabila masa berlaku SPPB-PSAT yang berlaku kurang dari 5 tahun 3. Sertifikat Izin Edar PSAT-PD yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku)					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Surat Pernyataan tentang pengalihan kepemilikan 5. Mengisi formulir pengalihan kepemilikan Izin Edar PSAT-PD					
4	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	**A. Permohonan Baru/Perpanjangan Registrasi PSAT-PDUK** 1. Mengisi keterangan informasi produk 2. Surat pernyataan tentang komitmen a. memenuhi standar penanganan yang baik PSAT dan mempunyai diagram alir PSAT PDUK b. memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundang-undangan c. memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundang-undangan	14 Hari	1. Mencantumkan nomor pendaftaran/Izin Edar dalam label dan/atau kemasan atas pangan segar asal tumbuhan yang didaftarkan 2. Memenuhi komitmen untuk: a. Menerapkan standar penanganan yang baik PSAT b. Menggunakan label dan kemasan sesuai ketentuan perundang-undangan c. Menjamin keamanan dan mutu PSAT yang diedarkan 3. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	5 tahun	Seluruh	Bupati/Wali kota

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa **B. Perubahan data Registarsi PSAT-PDUK** 1. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 2. Sertifikat registrasi PSAT-PDUK yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku) 3. Mengisi formulir keterangan perubahan data Izin Edar PSAT-PDUK 4. Desain label dan kemasan lama 5. Desain label dan kemasan baru					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Izin Rumah Pengemasan	**A. Permohonan izin awal/perpanjangan Izin Rumah Pengemasan** 1. Mengisi formulir informasi rumah pengemasan 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat pernyataan tentang komitmen penerapan SPPB-PSAT 4. Daftar Pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan *Good Agricultural Practices* 5. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan 6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan 7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau standar nasional Indonesia	14 Hari	1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT 2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT 3. Menyampaikan laporan ekspor 4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada	5 tahun	Seluruh	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. Perubahan Ruang Lingkup Izin Rumah Pengemasan 1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan) 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Mengisi formulir perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan 4. SPPB-PSAT dengan ruang lingkup sesuai perubahan ruang lingkup Izin Rumah Pengemasan yang diajukan 5. Daftar pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan *Good Agricultural Practices* 6. Desain kemasan dan label sesuai ketentuan peraturan perundang-					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan sesuai perubahan ruang lingkup yang diajukan 7. Laporan Hasil Uji Keamanan PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau Standar Nasional Indonesia **C. Pengalihan Kepemilikan Izin Rumah Pengemasan** 1. Sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT yang masih berlaku (minimal 3 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Rumah Pengemasan) 2. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa 3. Surat Pernyataan pengalihan kepemilikan Izin Rumah Pengemasan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Mengisi formulir keterangan pengalihan kepemilikan Izin Rumah					
6	Izin Keamanan PSAT/*Health Certificate*	1. Surat keterangan informasi produk 2. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT minimal level 2 3. Desain label dan kemasan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan 4. Sertifikat hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan	14 Hari	1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan Izin Rumah Pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT 2. Komitmen memenuhi persyaratan keamanan PSAT 3. Menyampaikan laporan ekspor 4. Menyampaikan kasus ekspor apabila ada	4 bulan	Seluruh	Gubernur

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.K.1

K. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1	Rekomendasi Impor Film	Menyampaikan film yang diimpor yang memuat: a. Judul film b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama eksportir film	3 Hari	Rekomendasi impor film berlaku juga sebagai rekomendasi untuk mengajukan sensor film	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
2	Tanda Lulus Sensor	1. Menyampaikan materi dan sinopsis film bagi film dan iklan film sesuai dengan judul dan isi cerita yang tercantum dalam surat TPPF 2. Melampirkan bukti bayar biaya sensor sesuai dengan ketentuan 3. Melampirkan surat TPPF bagi pelaku usaha pembuatan film atau surat rekomendasi impor film bagi pelaku usaha impor film.	3 Hari	1. Pelaku pertunjukan film wajib menampilkan telop bagi setiap film yang telah lulus sensor ketika dipertunjukkan 2. Bagi Pelaku Usaha penjualan dan penyewaan film wajib membuat telop dan mencantumkan penggolongan usia penonton pada materi publikasi dan sampul kemasan	3 sampai 5 tahun sesuai dengan materi film dan iklan film yang disensor	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
II.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
3	Pemberitahuan Pembuatan Film	Menyampaikan informasi pembuatan film yang memuat: a. Judul Film	2 Hari	Melakukan aktivitas pembuatan film paling lambat 3 bulan setelah diterbitkan	3 bulan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b. Isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia c. Nama produser, sutradara, dan penulis d. Jadwal dan lokasi pembuatan film e. Bukti kepemilikan judul film apabila terjadi kesamaan judul dan jalan cerita dengan perusahaan lain					

N. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
1	*Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Persyaratan umum: 1. Laporan hasil uji atau *test report* alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 2. Dokumen spesifikasi teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 3. Deklarasi kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap standar teknis alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang ditandatangani oleh pemohon 4. Foto berwarna alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menampilkan data merek dan tipe alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 5. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid dan 6. Melunasi biaya sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi	1 Hari	1. Memasang label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah diterbitkan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 2. Melaporkan bukti pemasangan label pada alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 3. Mengajukan perubahan data administrasi sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut: a. nama pemilik sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan/atau b. alamat pemilik sertifikat alat telekomunikasi	Tidak berbatas waktu, namun dalam hal pemilik sertifikat alat teleko-munikasi dan/atau perang-kat teleko-munikasi akan membuat, merakit, atau me-masuk-kan alat teleko-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persyaratan khusus: 1. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia dan surat pernyataan tidak memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi penguat sinyal (*repeater/booster*) sistem komunikasi bergerak seluler selain kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler Indonesia 2. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi berupa telepon/modem satelit, melampirkan surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit dan surat pernyataan tidak		dan/atau perangkat telekomunikasi	munikasi dan/atau perang-kat teleko-munikasi untuk diperda-gangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 (tiga) tahun setelah sertifikat alat teleko-munikasi dan/atau perang-		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memperdagangkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi telepon/modem satelit selain kepada penyelenggara telekomunikasi Indonesia yang menyediakan layanan telepon/modem satelit 3. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi pesawat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, melampirkan surat deklarasi jaminan keamanan *international mobile equipment identity* dan daftar *international mobile equipment identity* yang disetujui oleh *Global System for Mobile Communications Association* (GSMA) atau sejenisnya 4. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh Pelaku Usaha yang ditunjuk sebagai perwakilan dan/atau distributor oleh pemilik merek, melampirkan surat penunjukan sebagai perwakilan			kat teleko-munikasi diterbit-kan, wajib memiliki sertifikat alat teleko-munikasi dan/atau perang-kat telekomu nikasi baru		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan/atau distributor dari pemilik merek 5. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diajukan oleh pemilik merek yang terdaftar di Indonesia, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait kepemilikan hak atas merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 6. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang diwajibkan memenuhi ketentuan terkait tingkat komponen dalam negeri, melampirkan dokumen yang menunjukan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tingkat komponen dalam negeri alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dari menteri yang					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian 7. Khusus untuk alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan sendiri, melampirkan surat pernyataan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi hanya digunakan untuk keperluan sendiri dan 8. Khusus untuk permohonan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang menggunakan laporan hasil uji atau *test report* milik pihak lain, melampirkan persetujuan penggunaan laporan hasil uji atau *test report* dari pemilik laporan hasil uji atau *test report*					
II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)							
2	Penomoran Telekomunikasi	1. Dokumen Perizinan Berusaha sesuai peruntukan	11 Hari	1. Menggunakan penomoran telekomunikasi sesuai dengan peruntukannya	Selama Pelaku Usaha	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Laporan penggunaan penomoran yang telah ditetapkan sebelumnya untuk permohonan tambahan penomoran telekomunikasi 3. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		2. Melaporkan penggunaan penomoran telekomunikasi setiap tahun	menja-lankan kegiatan usaha dan meme-nuhi kewajib-annya		
3	*Izin Stasiun Radio (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Persyaratan umum: 1. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid 2. Mengisi formulir teknis data penggunaan spektrum frekuensi radio 3. Melampirkan izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran Persyaratan ini tidak berlaku untuk: a. Keperluan dinas khusus dan/atau b. Keperluan lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	1 Hari	1. Menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya 2. Mengoperasikan stasiun radio sesuai dengan parameter teknis yang ditetapkan dalam ISR 3. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) 4. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat	Paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanj ang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Tidak memiliki kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 5. Memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 6. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan sesuai peruntukkannya dan 7. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR Persyaratan khusus: 1. Untuk permohonan ISR keperluan maritim, melampirkan *grosse* akta atau surat ukur untuk stasiun radio kapal dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan		telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 5. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal 6. Memenuhi kelas emisi (*class of emission*) sesuai dengan peraturan radio (*radio regulation*) yang ditetapkan oleh *International Telecommunication Union* 7. Menggunakan sinyal identifikasi atau identitas stasiun radio pada setiap pemancaran spektrum frekuensi radio untuk dinas radiokomunikasi tertentu 8. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk ISR tahunan 9. Khusus untuk pemegang ISR stasiun bumi, wajib memberikan akses terhadap stasiun bumi dalam rangka pengawasan dan penegakan	(lima) tahun		

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Untuk permohonan ISR keperluan penerbangan, melampirkan rekomendasi stasiun radio darat penerbangan, dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan 3. Untuk permohonan ISR stasiun bumi, melampirkan: a. konfigurasi jaringan dan b. khusus untuk permohonan ISR stasiun bumi yang diajukan oleh lembaga penyiaran berlangganan, melampirkan: 1) Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing dan 2) Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri 4. Untuk permohonan ISR angkasa, melampirkan: a. Salinan hak labuh satelit, jika menggunakan satelit asing b. Salinan perjanjian kerja sama penggunaan kapasitas satelit dengan		hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 10. Khusus untuk pemegang ISR angkasa, wajib: a. Memiliki infrastruktur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kemampuan paling sedikit: 1) pemantauan jaringan dan trafik (network and traffic monitoring); 2) pengendalian jaringan dan trafik (network and traffic control); 3) keamanan jaringan dan trafik (network and traffic security); dan 4) akses untuk penyadapan yang sah (lawful interception), secara real-time yang digunakan untuk melaksanakan fungsi: 1) Kendali trafik pelanggan			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemilik satelit, jika tidak menggunakan satelit sendiri c. Konfigurasi jaringan d. Bukti kepemilikan infrastruktur pusat pengendali jaringan dan e. Data stasiun bumi, khusus untuk pemohon isr angkasa yang memiliki stasiun bumi telemetri, penjejakan, dan komando jarak jauh (*telemetry, tracking and command*), dan/atau *gateway* 5. Untuk permohonan ISR keperluan *microwave link* titik ke titik (*point-to-point*) yang merupakan bagian dari jaringan telekomunikasi lintas negara, melampirkan salinan hak labuh *microwave link*		2) Kendali akses Stasiun Bumi untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan 3) Pemblokiran akses terhadap sumber informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Memberikan jaminan akses terhadap infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Menyampaikan daftar badan usaha yang memiliki perjanjian kerja sama dengan pemegang ISR angkasa untuk penggunaan kapasitas Satelit atau konstelasi satelit di wilayah Negara Kesatuan Republik			

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Indonesia secara berkala setiap tahun dan d. Mendaftarkan stasiun bumi secara berkala setiap tahun			
4	Izin Pita Frekuensi Radio	1. Permohonan IPFR dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan: a. Keputusan penetapan pemenang seleksi hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan seleksi b. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan berdasarkan evaluasi c. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang ditetapkan melalui perubahan ISR menjadi IPFR d. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi	1 Hari	1. Menggunakan pita frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya 2. Menggunakan spektrum frekuensi radio yang tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) 3. Menggunakan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi 4. Menggunakan spektrum frekuensi radio secara optimal 5. Menyampaikan laporan penggunaan pita frekuensi radio secara berkala 6. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum	Paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun berdasarkan hasil evaluasi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui perpanjangan IPFR atau e. Keputusan penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio bagi pelaku usaha yang disetujui sebagai penerima pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio 2. Melunasi biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk IPFR		frekuensi radio untuk IPFR tahunan 7. Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi, bagi pemegang IPFR yang dinyatakan sebagai pemenang seleksi 8. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio dan 9. Memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sebelum melakukan pengalihan hak penggunaan spektrum frekuensi radio			
5	Hak Labuh Satelit	1. Menggunakan satelit asing yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan	1 Hari	1. Memperoleh ISR sebelum mengoperasikan stasiun bumi dan	Paling lama 5 (lima)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 2. Menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan valid 3. Melampirkan: a. Surat pernyataan dukungan penyediaan kapasitas (*bandwidth*) dari penyelenggara satelit asing b. Formulir teknis data penggunaan satelit asing dan c. Izin penyelenggaraan telekomunikasi atau izin penyelenggaraan penyiaran		2. Melakukan mitigasi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) terhadap filing Satelit Indonesia dan/atau terhadap stasiun radio terestrial Indonesia	tahun, dan dapat diperpan-jang 1 (satu) kali untuk masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun berdasar-kan hasil evaluasi		
6	Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Transmisi Telekomunikasi Internasional	1. Permohonan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha penyelenggaraan jaringan tetap tertutup 2. Pelaku Usaha yang mengajukan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Melaporkan kapasitas yang tersedia tiap tahunnya untuk sistem kabel yang mendapatkan hak labuh beserta utilisasinya 2. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan	Selama Pelaku Usaha menja-lankan kegiatan usaha dan me-menuhi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Transmisi Telekomunikasi Internasional harus mengajukan surat permohonan Hak Labuh, fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan badan usaha asing, dan persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 3. Persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk mendapatkan Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan berdasarkan hasil evaluasi 4. Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi Telekomunikasi internasional mulai berlaku efektif sejak permohonan disetujui			kewajib-annya		

O. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SUB SEKTOR PERTAHANAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**PEREDARAN PRODUK (A)**						
1.	Izin Pemasaran Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	1. Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 2. Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi dan/atau Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production and/or Maintenance): Moda Darat, Moda Laut atau Moda Udara 3. Dokumen materiil serta gambar produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan 4. Certificate of Origin yang diterbitkan oleh Industri Pertahanan 5. Invoice dan/atau packing list dari Industri Pertahanan dan/atau forwarder	21 hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Izin Usaha Pendistribusian Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir 3. Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris 4. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak 5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengawas Bahan Peledak	Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
II.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	1. Rekomendasi Pendirian Pabrik Senjata dan Amunisi dan/atau Rekomendasi Penanaman Modal Asing 2. Bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali BU yang baru 3. Bukti kepemilikan/ penguasaan lahan (Sertifikat/ PN, sewa lahan/ pinjam pakai (Notaris), KSO untuk lahan pemerintah/ negara (Notaris/ Blanko Instansi) 4. Desain Teknologi proses produksi (industri) 5. Surat pernyataan bukti ketersediaan bahan baku dan list bahan baku (industri) 6. Sertifikasi tenaga ahli bidang pabrikasi (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi) 7. Sertifikasi tenaga ahli bidang perencanaan (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi) 8. Sertifikasi tenaga ahli bidang pengawasan pabrik (lembaga pendidikan/ profesi/ sertifikasi)	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		9. Studi kelayakan pabrik yang dibuat oleh pelaku usaha dan/atau Lembaga sertifikasi					
4.	Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak	1. Rekomendasi Pendirian Pabrik Bahan Baku Bahan Peledak, Bahan Peledak atau Bahan Peledak Aksesoris 2. Dokumen bukti adanya kepemilikan atau penguasaan lahan yang akan digunakan untuk mendirikan pabrik serta menjamin tidak dalam sengketa 3. Surat Pernyataan adanya ketersediaan bahan baku 4. Desain teknologi proses produksi yang akan digunakan 5. Dokumen personil tenaga ahli yang kompeten di bidang pabrikasi bahan peledak dan pengawasan pabrik 6. Dokumen persetujuan studi kelayakan pabrik yang dikeluarkan oleh pelaku usaha atau Lembaga yang tersertifikasi	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Potensi Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Izin Penetapan Industri Pertahanan	1. Izin Pendirian Pabrik Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (*hanya untuk Industri Alat Utama: Industri Senjata dan Amunisi) 2. Rekomendasi Penanaman Modal Asing (*hanya untuk Industri Alat Utama: selain Industri Senjata dan Amunisi) 3. Dokumen penjelasan *Core Competency* Alpalhankam; Dokumen Alat *Quality Control Test*; Dokumen Fasilitas pengawasan suhu dan kelembaban; Dokumen Fasilitas keamanan Informasi teknologi pertahanan 4. Surat Keterangan Tanggungan Pajak (SKTP), Surat Pemberitahuan Penghasilan Kena Pajak (SPPKP), Surat Pajak Terhutang (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali badan usaha yang baru berdiri (sudah ada) 5. Surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum dari	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pengadilan negeri dan/atau masuk dalam daftar hitam 6. Surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register kepailitan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga setempat 7. Surat pernyataan kemampuan penyediaan Bahan Baku Utama Produksi 8. Memiliki: 1 fasilitas produksi/operasi, infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya; 2 bukti adanya ketersediaan Bahan Baku; 3 persyaratan teknis sesuai bidang dan sub bidangnya, serta personel yang terdidik dan/atau terlatih dan bersertifikat untuk bidang dan/atau subbidangnya; dan 4 standar mutu yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang					
6.	Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness*	1. Izin Penetapan Industri Pertahanan 2. Dokumen *Quality Manual*	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	of Defence Production): Moda Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara	3. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Hidup 4. Dokumen Daftar List Produk 5. Dokumen Daftar Personel kunci 6. Dokumen List buku petunjuk teknis pelaksanaan kerja 7. Daftar sarana dan prasarana sesuai kemampuan 8. Daftar Tools/ Special Tools/ Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan 9. Dokumen daftar Aprroved Vendor List 10. Dokumen materiil serta gambar produk alat peralatan pertahanan dan Keamanan atau Type Certificate atau Design Approval 11. Dokumen Training Manual (*hanya dipersyaratkan bagi fasilitas yang melaksanakan *In House Training*)		kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
7.	Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Maintenance*): Moda	1. Izin Penetapan Industri Pertahanan 2. Dokumen *Quality Manual* 3. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Hidup atau Dokumen *Safety Management System Manual khusus*	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan	1 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Darat, Moda Laut dan/atau Moda Udara	*untuk Fasilitas pemeliharaan Pesawat Terbang Militer* 4. Dokumen Daftar Kemampuan 5. Dokumen Daftar Personel kunci 6. Dokumen List buku manual pemeliharan 7. Daftar sarana dan prasarana sesuai kemampuan 8. Daftar Tools/ *Special Tools*/ Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan 9. Dokumen daftar *Aprroved Vendor List* 10. ADARS Manual (*hanya dipersyaratkan untuk Fasilitas pemeliharaan Pesawat Terbang Militer) 11. Dokumen *Training Manual* (* hanya dipersyaratkan bagi fasilitas yang melaksanakan *In House Training*)		melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
8.	Izin Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan	1. Sertifikat Persetujuan Kelaikan Fasilitas Produksi dan/atau Fasilitas Pemeliharaan Pertahanan (*Certificate of Approval Facility Worthiness of Defence Production and/or*	21 Hari	1. Menyampaikan laporan setiap 6 bulan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan	5 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Maintenance): Moda Darat, Moda Laut atau Moda Udara 2. Kemampuan desain, atau memiliki desain produk serta produksi, produk yang sudah disertifikasi *(sertifikat tipe/design approval dari Puslaik Kemhan)*, dan jaminan purna jual		melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
9.	Izin Produksi Badan Usaha Bahan Peledak	1. Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak 2. Dokumen daftar tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan instansi terkait	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	10 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Dokumen daftar personel untuk mengamankan pabrik dan gudang bahan baku bahan peledak 4. Dokumen daftar personel yang berpengetahuan dan berpengalaman di bidang bahan baku bahan peledak 5. Dokumen fasilitas keamanan meliputi keamanan dalam penyimpanan *blueprint product* atau *technical data product* dan proses produksi		2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
III.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
10.	Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan termasuk juga kegiatan Produksi di lapangan	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Mempunyai Kepala Jasa Peledakan dengan persyaratan sertifikat peledakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mineral dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 3. Mempunyai tenaga ahli/juru ledak bahan peledak yang bersertifikat dan memiliki Kartu Izin Meledakan (KIM) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 4. Mempunyai peralatan peledakan dan komponen-komponennya serta peralatan untuk memantau efek ledakan 5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak		2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
IV.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
11.	Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Mempunyai personil yang dengan kompetensi produksi bahan baku bahan peledak dan/atau bahan peledak aksesoris	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Mempunyai peralatan *quality control* terkait kualitas bahan baku bahan peledak dan bahan peledak aksesoris 4. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak		2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			
12.	Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	1. Badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Persero dan/atau Perseroan Terbatas (PT) 2. Melampirkan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir 3. Bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi	21 Hari	1. Menyampaikan laporan bulanan terkait dengan kegiatan usaha Industri Pertahanan kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan 2. Melaporkan kejadian insidentil di lingkungan	2 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sebagai gudang bahan peledak yang akan digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan bahan peledak aksesoris 4. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian bahan peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan bahan peledak 5. Memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengawas Bahan Peledak		Industri Pertahanan yang karena kesalahan dan/atau kelalaian manusia atau karena bencana alam yang mengakibatkan kerugian korban jiwa manusia atau materiil dan/atau kerusakan lingkungan, paling lama dalam waktu 2 x 24 jam kepada Menteri Pertahanan melalui Direktur Jenderal Industri Pertahanan			

R. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	**KELAYAKAN OPERASI (B)**						
1	*Sertifikat layak K3 bagi peralatan, pesawat angkat dan pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap, bejana tekanan, tangki timbun, elevator / lift, eskalator, instalasi penyalur petir, sarana proteksi kebakaran dan peralatan lainnya yang berisiko tinggi, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan dokumen pengendalian potensi bahaya besar / menengah dan lingkungan kerja (*berlaku untuk seluruh KBLI)	1. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Pengujian Gambar Rencana Objek K3 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan (kecuali Instalasi Penyalur Petir, Instalasi Listrik, Sarana Proteksi Kebakaran, penetapan potensi bahaya besar / menengah dan surat persetujuan dokumen pengendalian potensi bahaya besar / menengah dari bahan kimia berbahaya dan lingkungan kerja) 2. Melampirkan dokumen Surat Keterangan Memenuhi Persyaratan K3 Objek K3 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi	7 Hari	1. Mengisi Formulir Data Teknis Sertifikat Layak K3 Objek K3 pada OSS 2. Wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian objek K3 secara berkala sesuai ketentuan Peraturan Perundangan 3. Wajib dioperasikan / dikelola oleh Personil K3 yang telah memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan	Berlaku selama objek K3 digunakan oleh pelaku usaha yang sama sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Lintas Provinsi	Menteri/Kepala Badan
						Satu Provinsi	Gubernur

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Setempat (Satu Provinsi) atau Kementerian Ketenagakerjaan RI (Lintas Provinsi)					
II.	**STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)**						
2	Izin Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja	1. Surat Pernyataan Pelaku Usaha 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Pengawas Ketenagakerjaan 3. Surat Pernyataan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja untuk Bekerja Penuh di Perusahaan 4. Salinan Surat Penunjukan Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan dengan masa berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 5. Sertifikat kalibrasi peralatan rontgen 6. Sertifikat kalibrasi peralatan audiometri dan spirometri 7. Sertifikat peralatan laboratorium klinik 8. Bukti kepemilikan atau bukti kerjasama fasilitas pemeriksaan kadar bahan kimia seperti logam	5 Hari	1. Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja dan/atau Pelayanan Kesehatan Kerja 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban 3. Memelihara dokumen kegiatan 4. Menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan bidang usaha 5. Menyampaikan laporan kepada menteri	Selama Pelaku Usaha menjalan-kan kegiatan usaha	Seluruh, kecuali Klinik Pratama Pendukung PMA	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		berat/pelarut dalam darah atau urin (monitoring biologi) 9. Izin operasional Fasilitas layanan kesehatan yang masih berlaku 10. Formulir data teknis Jasa K3 Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja Dan/Atau Pelayanan Kesehatan Kerja					
III.	**KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)**						
3	Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri	1. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pelatihan vokasi dan produktivitas dengan template yang mengacu kepada regulasi di Kementerian Ketenagakerjaan 2. Salinan perizinan berusaha LPK Swasta yang berlaku paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 3. Salinan akreditasi LPK Swasta yang diterbitkan oleh Lembaga Akreditasi	14 Hari	Penyelenggara Pemagangan wajib melaporkan pelaksanaan pemagangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Direktur Jenderal secara daring melalui sigstem informasi ketenagakerjan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai domisili Penyelenggara Pemagangan dan peserta Pemagangan.	Selama Pelaku Usaha menjalan-kan kegiatan usaha	Pusat	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Lembaga Pelatihan Kerja sesuai dengan program pelatihan 4. Salinan perjanjian antara LPK dengan lembaga penerima pemagangan di luar negeri yang dilegalisasi/diketahui oleh perwakilan negara Republik Indonesia di negara penerima atau telah dilegalisasi melalui sistem Apostille 5. Program pemagangan meliputi kurikulum dan silabus yang sesuai dengan jabatan yang akan dimagangkan di luar negeri 6. Rencana penempatan Peserta Pemagangan setelah menyelesaikan program Pemagangan 7. Profil LPK Swasta yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang memuat: struktur organisasi dan uraian tugas, daftar riwayat hidup Instruktur					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, kapasitas pelatihan pertahun, daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan; dan 8. Salinan rancangan perjanjian pemagangan antara LPK Swasta dengan Peserta Pemagangan					

U. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
STANDARDISASI PRODUK/JASA (C)							
1	*Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (*berlaku untuk seluruh KBLI)	Mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai: 1. Gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yang terdiri atas: . Nama Sistem Elektronik . Sektor Sistem Elektronik . *Uniform Resource Locator* (URL) website . Sistem nama domain (*domain name system*) dan/atau alamat *Internet Protocol* (IP) server . Deskripsi model bisnis . Deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik . Keterangan Data Pribadi yang diproses	1 Hari	1. Pelaporan dalam hal ada perubahan data pendaftaran 2. Memenuhi *self-declare* terhadap persyaratan pendaftaran PSE 3. Memastikan: . Sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan . Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi kewajibannya, serta tidak terdapat perubahan data pendaftaran	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		. Keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik. . Keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 3. Kewajiban melakukan pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tambahan persyaratan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat asing (PSE Lingkup Privat asing): Formulir pendaftaran yang memuat: 1. Identitas PSE Lingkup Privat asing 2. Identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab 3. Keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (*certificate of incorporation*) yang disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah 4. Jumlah pelanggan (*user*) dari Indonesia 5. Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia					

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Klasifikasi Produk Gim	1. Melakukan klasifikasi gim secara mandiri secara daring 2. Menyediakan informasi terkait penerbit gim 3. Menyediakan informasi terkait gim 4. Dilakukan uji kesesuaian oleh penguji klasifikasi gim	1 Hari	1. Memiliki produk berupa piranti lunak (*software*) Gim 2. Mengisi form pembuatan akun IGRS (*Indonesia Game Rating System*) dengan menyediakan informasi terkait Penerbit terdiri atas: a. Nama Penerbit b. Nama penanggung jawab c. Narahubung d. Alamat e. Nomor telepon f. Alamat surat elektronik 3. Melakukan klasifikasi produk gim pada sistem IGRS dengan menyediakan informasi terkait sekurang-kurangnya: a. Nama Gim b. Platform distribusi c. Jenis atau genre d. Waktu rilis e. Kode pembaruan (versi) f. Deskripsi singkat g. Cuplikan permainan dan cuplikan konten	Selama Pelaku Usaha menjalan-kan kegiatan usahanya	Seluruh	Menteri/Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.U.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				h. Tautan untuk mengunduh Gim i. Monetisasi produk Gim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 130343

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

METODE ANALISIS RISIKO

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*/RBA). Mekanisme dimaksud diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat Risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut.

Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses Pengawasan, yang merupakan komponen penting dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja. Perizinan dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan Risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perizinan . . .

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan oleh Pemerintah Pusat antara lain pada 23 (dua puluh tiga) kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangan pembinaan bidang usaha, yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha. Hal ini merupakan cara menganalisis Risiko yang menghasilkan analisis Risiko kegiatan usaha yang berada pada Lampiran I.

B. MEKANISME PELAKSANAAN ANALISIS TINGKAT RISIKO

Tingkat Risiko kegiatan usaha menjadi poin kunci dalam penerapan RBA. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (*initial risk*).

Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi: (1) aspek kesehatan; (2) aspek keselamatan; (3) aspek lingkungan; dan (4) aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.

Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep Risiko maksimum (*maximum risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Hasil analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dikelompokkan ke dalam tiga tingkat Risiko utama, yaitu: Rendah, Menengah, dan Tinggi.

Penetapan jenis Perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka Perizinan Berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusahanya adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.

Gambar . . .

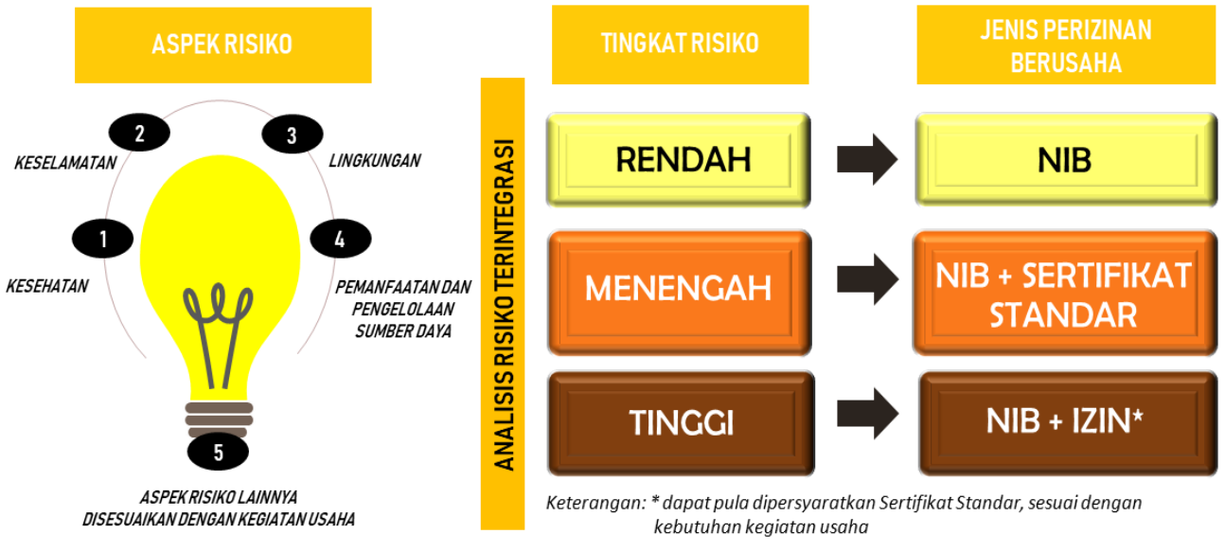

Gambar 1.1 Proses Penetapan Perizinan Berusaha

I. Tahapan Pelaksanaan Analisis Tingkat Risiko

Tahapan ini terdiri dari:

1. Pengidentifikasian Kegiatan Usaha

   Pengidentifikasian kegiatan usaha merupakan tahap pertama dari proses analisis tingkat Risiko yang dimaksudkan sebagai tahapan mengenali dan mengidentifikasi jenis Perizinan Berusaha saat ini (*existing*) untuk setiap kegiatan usaha yang menjadi binaan kementerian/lembaga.

   Kegiatan usaha mengacu pada deskripsi bidang usaha berdasarkan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020. Hasil dari tahap ini adalah setiap kementerian/lembaga memiliki daftar kegiatan usaha yang mengacu pada KBLI 5 digit.

2. Pengidentifikasian Skala Usaha

   Skala usaha yang digunakan dalam analisis tingkat Risiko mengacu kepada peraturan perundangan-undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

3. Penilaian Tingkat Bahaya

   Nilai bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh pelaksanaan kegiatan usaha ditinjau dari aspek:

a. Kesehatan . . .

a. Kesehatan

Aspek kesehatan mencakup bahaya terhadap kesehatan konsumen, penduduk di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan, dan/atau masyarakat luas. Nilai bahaya kesehatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari kalender.

3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari kalender.

4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan disabilitas secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat.

b. Keselamatan

Aspek keselamatan mencakup bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, karyawan, dan/atau pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Nilai bahaya keselamatan terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cedera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.

3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 apabila menimbulkan disabilitas permanen 1 (satu) orang karyawan.

4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 apabila menimbulkan disabilitas permanen lebih dari 1 (satu) orang karyawan atau kematian 1 (satu) orang karyawan.

c. Lingkungan

Aspek lingkungan mencakup bahaya terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Nilai bahaya lingkungan hidup terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rincian sebagai berikut:

1) Bahaya . . .

1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara secara permanen.

d. Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya

Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya mencakup bahaya terhadap keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam dan non-alam. Nilai bahaya pemanfaatan sumber daya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan memperhatikan sifat dan ketersediaan sumber daya yang dikaitkan dengan kegiatan usaha pada masing-masing sektor.

Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Aspek lain disesuaikan dengan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Nilai bahaya aspek lainnya terdiri dari skala penilaian 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dengan penentuan berdasarkan sifat kegiatan usaha pada masing-masing sektor. Penentuan dan penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai tingkat bahaya.

4. Penilaian Potensi Terjadinya Bahaya

Nilai potensi terjadinya bahaya merupakan hasil analisis potensi terjadinya bahaya dari pelaksanaan kegiatan usaha dan terdiri dari:

a. Hampir tidak mungkin terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun;
b. Kemungkinan kecil terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun;

c. Kemungkinan . . .

c. Kemungkinan terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; atau
d. Hampir pasti terjadi, apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.

Penilaian potensi terjadinya bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai potensi terjadinya bahaya.

II. Penetapan Tingkat Risiko dan Peringkat Skala Usaha Kegiatan Usaha

Tingkat Risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek Risiko di mana hasil perkalian mengacu pada matriks Risiko sebagaimana dimaksud dalam Gambar 1.2, dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat Risiko. Tingkat Risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat Risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek Risiko. Sebagai contoh, dari 3 (tiga) aspek Risiko (kesehatan, keselamatan, dan lingkungan) diketahui bahwa suatu kegiatan usaha dinilai berisiko tinggi ditinjau dari aspek keselamatan serta berisiko rendah ditinjau dari aspek kesehatan dan lingkungan. Dengan memperhatikan ketiga aspek Risiko, maka tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut adalah berisiko tinggi.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat Risiko sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, terbagi atas:
   1) tingkat Risiko menengah rendah;
   2) tingkat Risiko menengah tinggi.
c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut selanjutnya menentukan jenis Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud pada Gambar 1.1

POTENSI . . .

DAMPAK BAHAYA					POTENSI TERJADI			
					1	2	3	4
	KESELAMATAN DAN KESEHATAN (INTERNAL)	KESEHATAN (EKSTERNAL)	LINGKUNGAN	Aspek Lainnya Sesuai Kegiatan Usaha	JARANG TERJADI - Diatas 10 tahun	KEMUNGKINAN KECIL - Dalam 5-10 tahun	MUNGKIN TERJADI - Dalam jangka waktu 1-5 tahun	HAMPIR PASTI TERJADI - Lebih dari sekali setiap tahun
1	Masalah kesehatan ringan yang membutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	<1 tahun kerugian lingkungan kecil dengan dampak pemulihan singkat pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	*diisi K/L*	1	2	3	4
2	Masalah kesehatan yang membutuhkan perawatan medis membutuhkan rawat inap min 1 malam	Sakit, Rawat Inap maksimal rawat 3 hari	Dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tahah, air dan udara	*diisi K/L*	2	4	6	8
3	Masalah kesehatan yang mengakibatkan disabilitas permanen 1 orang	Sakit, Rawat inap lebih dari 3 hari	Penyebab > 10 tahun kerugian lingkungan jangka panjang dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air dan udara	*diisi K/L*	3	6	9	12
4	Kematian 1 orang dan/atau disabilitas permanen > 1 orang	Disabilitas permanen, Kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	*diisi K/L*	4	8	12	16

Keterangan:				
	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah	Risiko Menengah Tinggi	Risiko Tinggi

Tingkat Risiko Usaha = Tingkat Risiko Tertinggi dari semua Kriteria Risiko

GAMBAR 1.2 Matriks Risiko

III. Penetapan . . .

III. Penetapan Jenis Perizinan Berusaha

Dari hasil perhitungan dan analisis Risiko telah didapatkan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha berdasarkan KBLI 5 digit. Tahap selanjutnya adalah penentuan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah, jenis Perizinan Berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

   Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sebagai Perizinan Berusaha sekaligus merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.

   Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, baik Risiko menengah rendah maupun menengah tinggi, jenis Perizinan Berusahanya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.

   Untuk tingkat Risiko menengah rendah:

   1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.

   2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut merupakan Perizinan Berusaha yang digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan kegiatan usaha mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

   3) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

   Untuk tingkat Risiko menengah tinggi:

   1) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS untuk memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha.

2) NIB . . .

2) NIB dan Sertifikat Standar tersebut merupakan Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha.

3) Sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaan verifikasi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang telah diakreditasi Pemerintah Pusat.

4) Untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha.

5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan Pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

c. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi, jenis Perizinan Berusahanya adalah NIB dan Izin.

Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud.

Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi tersebut dipersyaratkan standar kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan PB UMKU.

IV. Pelaksanaan Analisis Risiko

Analisis Risiko untuk setiap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh setiap kementerian/lembaga sebagai pembina bidang usaha. Memperkaya hasil analisis Risiko yang dilakukan oleh setiap kementerian/lembaga, pembahasan analisis Risiko juga melibatkan:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

b. kementerian . . .

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. kementerian atau lembaga sektor terkait; dan

e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Pelibatan banyak pihak dalam proses analisis Risiko dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait bahaya maupun potensi terjadinya bahaya, sehingga penetapan tingkat Risiko sudah berdasarkan masukan berbagai pihak. Masukan dari berbagai pihak terutama ditujukan untuk memberikan:

a. masukan mengenai *nature business* suatu kegiatan usaha; dan

b. pertimbangan lain terkait analisis Risiko dari sudut pandang kondisi di lapangan.

C. PERIZINAN BERUSAHA LAINNYA UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Di dalam pelaksanaan kegiatan usaha, selain Perizinan Berusaha sebagaimana yang telah diuraikan di atas, masih diperlukan Perizinan Berusaha yang tujuannya sebagai penunjang kegiatan usaha pada subtahapan operasional dan/atau komersial. Secara umum Perizinan Berusaha tersebut dimaksudkan untuk memitigasi Risiko yang terjadi pada saat operasional/komersial kegiatan usaha.

Kementerian/lembaga mengidentifikasi jenis-jenis Perizinan Berusaha sebagai penunjang kegiatan usaha pada subtahapan operasional dan/atau komersial, dan mengaturnya di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

D. STANDAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA

Dalam konsep Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dikenal satu bentuk Perizinan Berusaha berupa Sertifikat Standar. Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri merupakan bentuk komitmen Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah . . .

Pemerintah Pusat menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah dan/atau Risiko tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko rendah, maka standar pelaksanaan kegiatan usahanya adalah standar atas pemenuhan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Standar pelaksanaan kegiatan usaha meliputi: standar usaha dan standar produk barang dan/atau jasa.

Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk setiap kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha yang berada di bawah binaannya dengan memperhatikan kesederhanaan persyaratan dan kemudahan proses bisnis. Penyusunan standar pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan secara transparan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku secara internasional, dalam proses penyusunan standar perlu dilakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait termasuk dengan Pelaku Usaha/asosiasi, hal ini untuk mewujudkan konsensus bersama sebelum sebuah standar bisa diterbitkan untuk diimplementasikan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan standar pelaksanaan kegiatan usaha Risiko rendah yang harus dipatuhi oleh Pelaku Usaha sebagai berikut:

2.1. Ruang Lingkup

Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha yang masuk pada Risiko rendah meliputi: kesehatan; keselamatan; dan lingkungan.

2.2. Penggolongan Usaha

Standar ini berlaku umum untuk semua kegiatan usaha Risiko usaha rendah.

2.3. Persyaratan umum yang wajib dipatuhi oleh Pelaku Usaha adalah:

a. Kesehatan . . .

a. Kesehatan

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.
2.	Kebersihan dalam lokasi usaha.
3.	Tersedia akses sanitasi yang sesuai dan bersih.
4.	Sirkulasi udara yang baik alami dan buatan (tidak panas dan tidak lembab).
5.	Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.
6.	Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen.
7.	Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen.
8.	Kejelasan informasi produk/jasa.

b. Keselamatan

No.	Kriteria
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.
2.	Sirkulasi udara yang baik untuk karyawan (ruangan, *basement*).
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan/APAR) sesuai dengan jenis usaha.
5.	Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) pada tempat kerja.
6.	Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu, dan lain-lain).
7.	Kebersihan sarana sanitasi.
8.	Alat kerja, perkakas, dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.
9.	Pemenuhan norma kerja (upah, waktu kerja dan waktu istirahat) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
10.	Pemenuhan jaminan sosial kesehatan.

c. Lingkungan

No.	Kriteria
1.	Pemenuhan baku mutu (kualitas) lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.

2. Menyediakan . . .

No.	Kriteria
2.	Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan (tempat sampah).
3.	Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.
4.	Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.4. Sarana

Sarana sesuai dengan kegiatan usaha.

2.5. Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
KESEHATAN				
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.			
2.	Kebersihan dalam lokasi usaha: - Tidak ada jentik nyamuk; dan - Bebas dari serangga dan binatang pembawa penyakit (MR).			
3.	Tersedia akses sanitasi (jamban, air bersih, dan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun) yang sesuai dan bersih.			
4.	Sirkulasi udara yang baik alami dan/atau buatan (tidak panas dan tidak lembab).			
5.	Penerangan pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.			

6. Sarana . . .

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
6.	Sarana/media/peralatan yang bersih digunakan oleh konsumen.			
7.	Sarana/media/peralatan yang aman bagi konsumen.			
8.	Kejelasan informasi produk/jasa.			
KESELAMATAN				
1.	Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai standar.			
2.	Sirkulasi udara yang baik (alami atau buatan) untuk karyawan di setiap ruangan yang digunakan.			
3.	Penerangan yang baik pada umumnya sesuai dengan jenis usaha.			
4.	Perangkat pemadam kebakaran (alat pemadam kebakaran api ringan/APAR) sesuai dengan jenis usaha yang dilengkapi dengan minimum spesifikasi APAR *Dry Chemical Powder multipurpose* ABC.			
5.	Pelaksanaan Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) pada tempat Kerja a. Ringkas Memisahkan alat, perkakas, dan bahan yang diperlukan atau digunakan. b. Rapih Menata alat, perkakas, dan bahan sesuai dengan posisi yang ditetapkan. c. Resik			

Membersihkan . . .

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	Membersihkan alat, perkakas, dan bahan secara rutin. d. Rawat Menetapkan dan melaksanakan prosedur kebersihan, penempatan, dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan (membakukan/dibuat standar agar 3R tetap terlaksana). e. Rajin Mengembangkan prosedur kebersihan, penempatan, dan penataan untuk alat, perkakas, dan bahan (meningkatkan kebiasaan/displin dalam melaksanakan 4R).			
6.	Penyediaan sarana sanitasi yang sesuai (toilet, sabun, tisu, dan lain-lain).			
7.	Kebersihan Sarana sanitasi: a. Toilet dan kelengkapannya (jamban, air bersih, alat pembilas, tempat sampah, sabun dan tempat cuci tangan); b. Tempat sampah i. diberikan label untuk sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya; ii. dilengkapi dengan penutup dan terbuat dari bahan kedap air; dan			

iii. tidak . . .

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	iii. tidak menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain. c. Peralatan kebersihan.			
8.	Alat kerja, perkakas, dan bahan ditata dan disimpan secara rapi untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan tidak menimbulkan bahaya serta pemberian label untuk membedakan barang-barang tersebut.			
9.	Pemenuhan norma kerja (upah, waktu kerja, dan waktu istirahat) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.			
10.	Pemenuhan jaminan sosial kesehatan.			
LINGKUNGAN				
1.	Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan.			
2.	Menyediakan fasilitas penyimpanan limbah (padat dan cair) sementara sesuai dengan kegiatan dan limbah yang dihasilkan.			
3.	Mengelola limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya.			
4.	Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan			

peraturan . . .

No.	Kriteria Standar	Sudah (1)	Belum (0)	Alasannya apabila belum dan rekomendasi
	peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.			

E. TATA CARA PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

Pengawasan berbasis Risiko dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan standar oleh Pelaku Usaha dengan cara mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas Pengawasan didasari oleh:

a. tingkat Risiko kegiatan usaha, yakni semakin tinggi tingkat Risiko maka akan semakin sering Pengawasan dilakukan; dan

b. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, yakni semakin sering melakukan pelanggaran maka akan semakin sering Pengawasan dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur 2 (dua) jenis Pengawasan yaitu Pengawasan rutin dan Pengawasan insidental. Pengawasan rutin dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina, sementara Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat.

Semua jenis kegiatan usaha tunduk terhadap Pengawasan yang tertulis dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria, kecuali untuk:

a. kegiatan usaha berisiko rendah, maka pengawasan hanya dilakukan dengan sistem insidental; dan

b. UMK, pengawasan dilakukan dalam bentuk pembinaan.

Selanjutnya Pengawasan akan dilakukan secara terintegrasi, apabila kegiatan usaha tersebut memiliki pembina lintas sektor atau persetujuan perizinan multi sektor. Hal ini dilakukan agar terciptanya efisiensi di pemerintah dan juga bagi Pelaku Usaha yang diawasi.

Hasil . . .

Hasil dari Pengawasan akan menjadi masukan dalam penetapan tingkat Risiko kegiatan usaha di masa yang akan datang.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA LEMBAGA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA

Fungsi utama dari standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa merupakan sarana atau alat untuk memitigasi terjadinya Risiko. Oleh karenanya kementerian/lembaga harus mengenali dan memahami kegiatan usaha dan produk/jasa yang akan dibuat standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.

Penetapan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa dalam Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga adalah sebagai berikut:

A. BATANG TUBUH

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ...

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR/SUBSEKTOR ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: . . .

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor/Subsektor ...;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

Pasal 1

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor/subsektor ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini.

Pasal 2 s.d. Pasal ...

(jika diperlukan)

Memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria sektor/subsektor yang perlu diatur dalam batang tubuh.

Pasal . . .

Pasal ...

(jika telah ada Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga yang ditetapkan sebelumnya)

Pada saat Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini mulai berlaku, Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... Nomor ... Tahun ... tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor/Subsektor ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala ... ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

B. LAMPIRAN . . .

B. LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

STANDAR KEGIATAN USAHA

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
1.	Ruang Lingkup	Diisi dengan ruang lingkup standar sebagai acuan untuk melakukan kegiatan usaha sesuai deskripsi KBLI atau beberapa KBLI lainnya atau hanya sebagian deskripsi KBLI.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Penggolongan Usaha	Hanya diisi bila dalam ruang lingkup (poin 1) terdapat klasifikasi lebih lanjut yang menyebabkan satu sama lain membutuhkan persyaratan yang berbeda, misal: skala usaha, atau pembagian jenis kegiatan usaha lainnya. Jika tidak ada: cukup diisi "-" (dikosongkan)
4.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan ketentuan yang dapat berupa: • Sarana: minimum ketersediaan sarana, fasilitas, atau sumber daya yang harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan. • Sumber Daya Manusia: ketersediaan dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang harus dipenuhi Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan.

• Ketentuan . . .

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
		• Ketentuan Produksi: cara dan alur produksi barang/proses/jasa, mencakup ketentuan pelayanan minimum yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha untuk memitigasi Risiko - jika relevan. • Sistem Manajemen Usaha: sistem manajemen tertentu yang harus diterapkan oleh Pelaku Usaha untuk memastikan terkendalinya Risiko dari waktu ke waktu - jika relevan, misalnya terkait perencanaan; pengelolaan; komunikasi pelanggan; peningkatan berkelanjutan; tindakan pencegahan; serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. • dan lain-lain untuk memitigasi Risiko.
5.	Ketentuan Verifikasi	Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup: - Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak pelaksana penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. - Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. - Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.

6. Ketentuan . . .

No.	NOMENKLATUR STANDAR KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang diatur menggunakan standar kegiatan usaha dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
6.	Ketentuan Kewajiban	Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa: • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi; • Sistem Manajemen Usaha; • dan lain-lain, jika relevan. Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang.

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

LAMPIRAN II . . .

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI/PERATURAN KEPALA ... REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU STANDAR PRODUK/JASA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR/SUBSEKTOR ...

STANDAR PRODUK /JASA

No.	NOMENKLATUR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA KBLI: (00000) Judul KBLI; (00001) Judul KBLI Daftar nomor dan judul KBLI yang terkait dengan PB UMKU dimaksud, dapat berisi satu atau lebih KBLI.	
1.	Tujuan	Diisi dengan maksud dan tujuan penerapan standar pada perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, yang memuat kondisi tertentu diwajibkan PB-UMKU.
2.	Istilah dan Definisi	Diisi dengan daftar istilah khusus yang digunakan, spesifik pada standar dimaksud.
3.	Ketentuan Persyaratan	Diisi dengan daftar ketentuan khusus yang harus dipenuhi untuk memitigasi Risiko atas kegiatan usaha/produk/jasa. Apabila terdapat ketentuan yang mengacu pada ketentuan internasional/Standar Nasional Indonesia-wajib dapat dituliskan nomor dan nomenklaturnya.
4.	Ketentuan Verifikasi	Diisi dengan mekanisme verifikasi untuk memastikan pemenuhan Pelaku Usaha terhadap isi standar untuk mendapatkan legalitas kegiatan usaha, mencakup: - Pelaksana Penilaian Kesesuaian Diisi dengan pihak pelaksana penilaian kesesuaian yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian kesesuaian bisa dilakukan oleh unit dalam kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, atau diserahkan kepada pihak ketiga

yang . . .

		yang berlaku imparsial dan memiliki kompetensi yang memadai. - Waktu Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian Diisi dengan ketentuan waktu pelaksanaan yang ditetapkan, tergantung dengan Risiko yang dipertimbangkan. - Prosedur Penilaian Kesesuaian Diisi dengan tahapan pelaksanaan penilaian kesesuaian.
5.	Ketentuan Kewajiban	Diisi dengan daftar kewajiban setelah Perizinan Berusaha didapatkan, yang dapat berupa: • Sarana; • Sumber Daya Manusia; • Ketentuan Produksi; • Sistem Manajemen Usaha; • dan lain-lain, jika relevan. Jika poin kewajiban sama dengan persyaratan, maka tidak perlu ditulis ulang.

MENTERI/KEPALA ...
REPUBLIK INDONESIA,

.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lydia Silvanna Djaman

SK No 194453 A